



**mandiri**  
tunas finance

# | ADAPT TO CHANGE

LAPORAN TAHUNAN 2018 PT MANDIRI TUNAS FINANCE



## TENTANG LAPORAN TAHUNAN 2018 PT MANDIRI TUNAS FINANCE

---

Selamat datang pada Laporan Tahunan 2018 PT Mandiri Tunas Finance dengan tema "*Adapt to Change*". Tema tersebut dipilih berdasarkan kajian dan fakta dari perkembangan bisnis Mandiri Tunas Finance pada 2018 serta masa depan keberlanjutan bisnis Perseroan. Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi Perseroan kepada otoritas terkait serta menjadi buku tahunan yang turut membangun rasa bangga dan solidaritas di antara karyawan.

Laporan Tahunan 2018 Mandiri Tunas Finance menjadi sumber dokumentasi komprehensif yang berisikan informasi kinerja Perseroan dalam setahun. Informasi tersebut memuat dokumentasi lengkap yang menggambarkan profil Perseroan; kinerja operasional, pemasaran, dan keuangan; informasi tentang tugas, peran, serta fungsi struktural organisasi Perusahaan yang menerapkan konsep best practices dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan

yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Selain itu, Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan tentang Mandiri Tunas Finance dengan menyediakan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan. Para pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh informasi yang memadai terkait kebijakan yang telah dan akan dilakukan serta kesuksesan pencapaian Perseroan pada tahun 2018. Laporan Tahunan Mandiri Tunas Finance 2018 disajikan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam buku yang berbeda dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas baik.

Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh dalam situs web resmi Mandiri Tunas Finance dengan alamat [www.mtf.co.id](http://www.mtf.co.id)

## SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

---

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Mandiri Tunas Finance yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis dimana

Mandiri Tunas Finance menjalankan kegiatan usaha. Mandiri Tunas Finance tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan. Laporan Tahunan ini memuat kata "Perseroan", "MTF", "Mandiri Tunas Finance" atau "Perusahaan" yang didefinisikan sebagai PT Mandiri Tunas Finance yang menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang penyedia jasa pembiayaan kendaraan roda empat, pembiayaan alat berat, dan pembiayaan lainnya. Adakalanya kata "kami" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Mandiri Tunas Finance secara umum.

# ADAPT TO CHANGE

Kondisi perekonomian nasional yang bertumbuh secara perlahan namun pasti membawa dampak signifikan terhadap performa Perseroan.

Selama kurun waktu 2018, Mandiri Tunas Finance berhasil menorehkan pencapaian gemilang dengan mencatatkan pertumbuhan bisnis lebih baik dibandingkan dengan periode tahun lalu , dan mampu merealisasikan pencapaian pembiayaan dari target awal. Kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor pembiayaan dan otomotif sebagai salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta upaya perbaikan infrastruktur daerah terutama di bagian Timur dan Tengah Indonesia menjadi salah satu faktor peningkatan performa

## KESINAMBUNGAN TEMA LAPORAN TAHUNAN



### 2016 INOVASI STRATEGI UNTUK INDONESIA

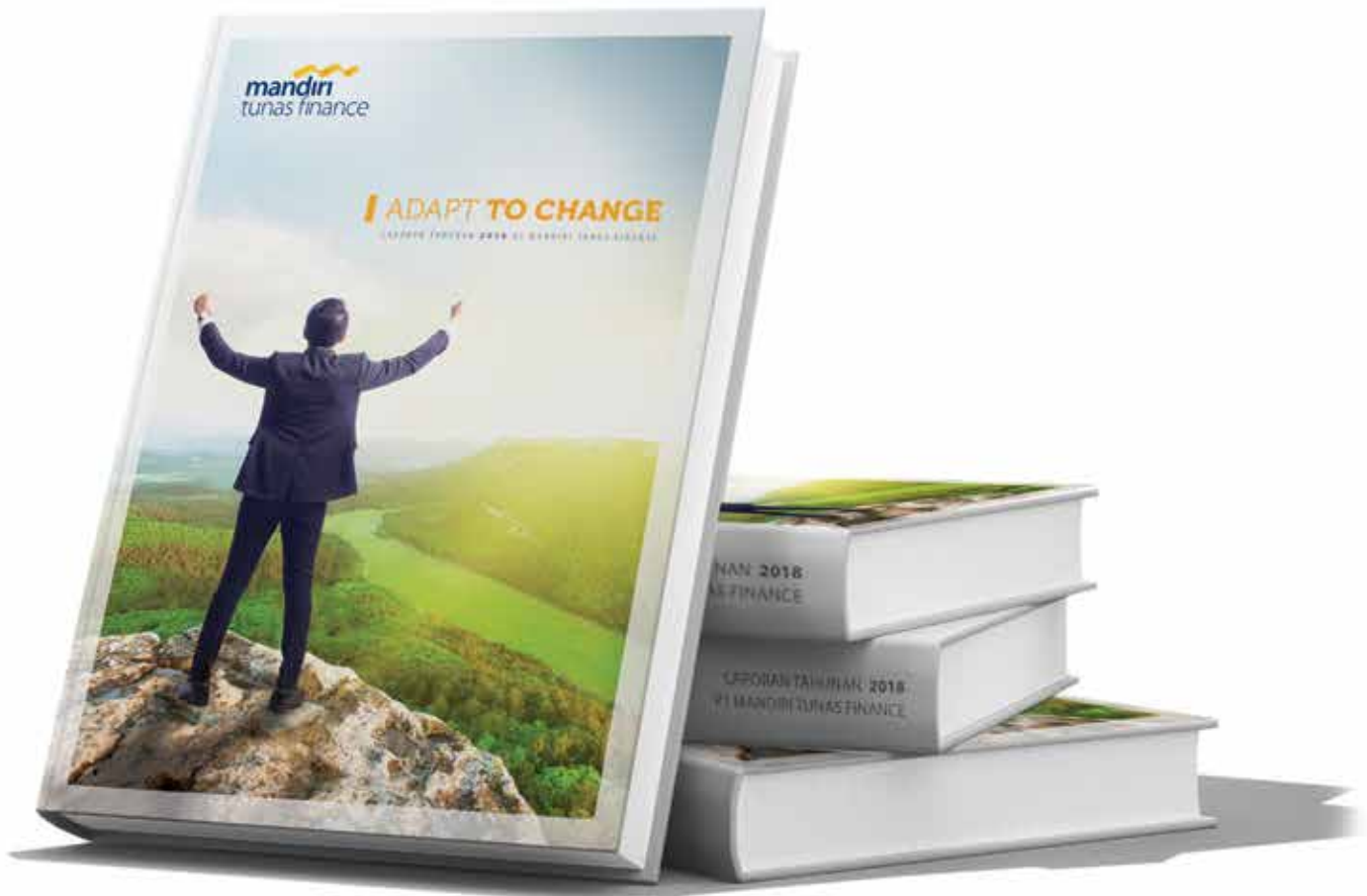
Perusahaan tumbuh seiring waktu, teknologi pun berkembang tanpa kenal usai. Kenyataan persaingan menjadi motivasi Perusahaan agar terus bersandar untuk memperbaiki diri. Bersama keunggulan teknologi, inovasi kian nyata mengantar Mandiri Tunas Finance mewujudkan pelayanan prima.



### 2017 STRENGTHENING THE FOUNDATION TO TRANSFORM

Penguatan dasar perusahaan dengan penanaman nilai budaya PERWIRA (kePercayaan, keWlrausahaan, dan kegembIRAan) sebagai pedoman berpikir, berperilaku dalam melayani konsumen terus diupayakan karena menjadi kunci penting dalam menjalankan kegiatan usaha. Selaras dengan hal tersebut, *“Strengthening the Foundation to Transform”* diangkat sebagai tajuk Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2017 serta menjadi representasi akan dedikasi tinggi seluruh insan Mandiri Tunas Finance dalam melayani negeri.





**2018**

## **ADAPT TO CHANGE**

Kondisi perekonomian nasional yang bertumbuh secara perlahan namun pasti membawa dampak signifikan terhadap performa Perseroan. Selama kurun waktu 2018, Mandiri Tunas Finance berhasil menorehkan pencapaian gemilang dengan mencatatkan pertumbuhan bisnis lebih baik dibandingkan dengan periode tahun lalu, dan mampu merealisasikan pencapaian pembiayaan dari target awal. Kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor pembiayaan dan otomotif sebagai salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta upaya perbaikan infrastruktur daerah terutama di bagian Timur dan Tengah Indonesia menjadi salah satu faktor peningkatan performa

## DAFTAR ISI

### INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN TAHUNAN

Referensi dan standar yang digunakan Perseroan dalam penyusunan Laporan Tahunan PT Mandiri Tunas Finance menggunakan parameter dan kriteria standar yang berlaku di Indonesia tempat dimana Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya. Dikarenakan Perseroan melakukan penerbitan obligasi, maka dengan statusnya sebagai emiten penyampaian Laporan Tahunan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 /POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta kriteria dalam *Annual Report Award (ARA)*.

Dalam rangka menjalankan *best practice* pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*, penyampaian laporan ini juga mengacu pada pedoman praktik tata kelola yang berlaku di lingkup regional ASEAN, yaitu menggunakan parameter ASEAN CG *Scorecard*. Perseroan juga menyampaikan beberapa aspek yang merupakan bagian dari pengembangan dan interpretasi kami atas isi Laporan Tahunan. Dengan demikian, Mandiri Tunas Finance mengharapkan Laporan Tahunan ini dapat mendorong peningkatan keterbukaan informasi yang wajar seiring dengan terpenuhinya aspek komposisi dan aspek substansi.

<b>Kesinambungan Tema Laporan Tahunan</b>	<b>2</b>
<b>Informasi yang Disajikan Dalam Laporan Tahunan</b>	<b>4</b>
<b>Jejak Langkah Perusahaan</b>	<b>16</b>
<b>Ringkasan Kinerja Perusahaan 2018</b>	<b>18</b>

<b>PERFORMA 2018</b>	<b>21</b>
Ikhtisar Data Keuangan Penting	22
Ikhtisar Operasi	30
Ikhtisar Saham	31
Ikhtisar Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi	32
Informasi Tentang Sumber Pendanaan Lainnya	33
Kilas Peristiwa	34

<b>LAPORAN MANAJEMEN</b>	<b>41</b>
Laporan Dewan Komisaris	42
Laporan Direksi	50
Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2018 PT Mandiri Tunas Finance	61

<b>PROFIL PERUSAHAAN</b>	<b>65</b>
Identitas Perusahaan	66
Riwayat Singkat Perusahaan	68
Bidang Usaha	72
Peta Wilayah Operasional	74
Struktur Organisasi	76

**Ikhtisar Utama 2018**

Laporan Manajemen  
 Profil Perusahaan  
 Analisa & Pembahasan Manajemen  
 Tinjauan Pendukung Operasional  
 Manajemen Risiko  
 Tata Kelola Perusahaan  
 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perusahaan	78
Makna Logo Perusahaan	80
Profil Dewan Komisaris	81
Profil Direksi	87
Demografi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi	96
Komposisi Pemegang Saham	102
Komposisi Kepemilikan Saham Mandiri Tunas Finance	102
Informasi Tentang Pemegang Saham Utama dan/ atau Pemegang Saham Pengendali Hingga Nama Pemilik Akhir	103
Struktur Kepemilikan Saham Hingga Nama Pemilik Akhir	104
Informasi tentang Entitas Anak, Entitas Asosiasi Serta <i>Joint Venture (JV)</i> dan <i>Special Purpose Vehicle (SPV)</i>	109
Struktur Grup Mandiri Tunas Finance	109
Informasi Tentang Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham	110
Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Obligasi dan/ atau Efek Lainnya	110
Lembaga dan Profesi Penunjang	118
Penghargaan dan Sertifikasi	120
Daftar Alamat Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan, Serta Informasi Terkait Entitas Anak	124
Informasi Pada Situs Web Perusahaan	131
Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal	134

## ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN 139

Tinjauan Perekonomian dan Industri	140
Rencana Strategis 2018	144
Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha	146
Tentang Kegiatan Usaha Perusahaan	146
Segmen Operasi	152
Analisis Segmen Usaha berdasarkan Kelompok Nasabah Utama dan Produk	153
Analisis Segmen Usaha Berdasarkan Informasi Geografis	163
Tinjauan Keuangan	164
Standar Penyajian Informasi dan Kesesuaian Terhadap Standar Akuntansi Keuangan	164
Posisi Keuangan	164
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	173
Arus Kas	178
Rasio-rasio Keuangan	180
Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang	185
Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktural Modal	187
Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal	190
Realisasi Investasi Barang Modal	190
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/ atau Restrukturisasi Utang/ Modal	191
Perbandingan Antara Target Anggaran dengan Realisasi, dan Proyeksi Usaha	191
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan	194
Dampak Nilai Tukar Mata Uang Asing	195



Prospek Usaha	195
Aspek Pemasaran	196
Tinjauan Keuangan Lainnya	199
Kebijakan Dividen dan Pembagiannya	199
Kontribusi Terhadap Negara	200
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/ atau Manajemen (ESOP/MSOP)	201
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan pihak Afiliasi/pihak Berelasi	202
Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi	206
Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan	207
Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan	209
Informasi Kelangsungan Usaha	210
Peta Jalan Usaha: Rencana Jangka Panjang	211

<b>FUNGSI PENUNJANG BISNIS</b>	<b>213</b>
Tumbuh Bersama Karyawan: Pengelolaan Sumber Daya Manusia	214
Menjemput Perubahan: Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Informasi	230
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>	<b>237</b>
Pemahaman Mendasar Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	238
Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup Mandiri Tunas Finance	240
Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	240
Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik	246
Sosialisasi dan Internalisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik	250
Penghargaan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	251
Penilaian: Evaluasi, Pemantauan, dan Peningkatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	252



Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan yang Baik	258
Hubungan antar Organ dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik	258
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	259
Dewan Komisaris	266
Komisaris Independen	275
Direksi	277
Transparansi Informasi Tentang Dewan Komisaris dan Direksi	286
<i>Assessment</i> Penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris dan Direksi	286
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	287
Rapat Dewan Komisaris dan Direksi	292
Pengungkapan Hubungan Afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali	298
Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi	299
Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi	301
Organ Pendukung Dewan Komisaris	302
Komite Audit	302
Komite Nominasi dan Remunerasi	312
Komite Pemantauan Risiko	321
Informasi Tentang Organ/Komite Lainnya di Bawah Dewan Komisaris	329
Organ Pendukung Direksi	330
Sekretaris Perusahaan	330
Audit Internal	338
Auditor Eksternal/ Akuntan Publik	346
Manajemen Risiko	350
Sistem Pengendalian Internal	361
<i>Corporate Social Responsibility</i>	364

Perkara Penting	365
Akses Informasi dan Data Perusahaan	369
Kode Etik	374
Pengendalian Gratifikasi	379
Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik	380
Kebijakan Anti Korupsi	381
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	382
<i>Whistleblowing System</i>	385
Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	388
Kepatuhan Terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan: Kesesuaian Terhadap Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014	390
Transparansi Praktik <i>Bad Governance</i>	402

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 405

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pembangunan Berkelanjutan	406
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	410
Program dan Kegiatan Terkait Ketenagakerjaan	410
Program dan Kegiatan Terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja	413
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial dan Masyarakat	415
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab Terhadap Produk/ Jasa Serta konsumen dan Mitra Kerja	420

## REFERENSI SILANG: KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018 422

## LAPORAN KEUANGAN AUDIT 433

**Dukungan Penuh  
Pemegang Saham,  
dan Nilai Jual Brand  
"Mandiri" dan "Tunas"**





.....

**Bank Mandiri mendukung program Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang dapat dilaksanakan di seluruh cabang Bank Mandiri, sehingga memungkinkan penambahan *lending* dari segmen *referral* baik untuk pembelian ritel maupun *fleet*.** Selain itu aliansi kerjasama dengan bisnis unit terkait di Bank Mandiri memungkinkan Mandiri Tunas Finance dapat menggarap nasabah mitra karya Bank Mandiri. Tunas Group mendukung Mandiri Tunas Finance dengan memberikan kesempatan pertama (prioritas) Mandiri Tunas Finance untuk membiayai kredit pembiayaan kendaraan Tunas Group, yang memungkinkan Mandiri Tunas Finance dapat menambah *lending* dari segmen mobil baru.

Dengan menyandang nama besar Bank Mandiri memungkinkan Mandiri Tunas Finance dapat bekerjasama dengan APM mobil baru untuk membantu pembiayaan kredit kendaraannya. Selain itu, bagi pelanggan, nama besar Bank Mandiri memberikan kepercayaan dan rasa aman untuk menjalin kerjasama dengan Mandiri Tunas Finance.

.....







---

## Sumber Pendanaan yang Berkelanjutan Melalui *Joint Financing*, dan Hubungan Baik dengan Sumber-sumber Pendanaan Utama

Faktor terpenting dari perusahaan pembiayaan adalah keberadaan sumber dana untuk pembiayaan yang memungkinkan perusahaan pembiayaan senantiasa mendukung *Dealer/Showroom* dalam menjual kendaraannya melalui pembelian kredit. Dengan adanya ketersediaan dana yang berkelanjutan akan memberikan rasa aman bagi *Dealer/Showroom* berbisnis dengan Mandiri Tunas Finance.

Selain dana dari *joint financing*, dana *non joint financing* juga diperlukan dalam struktur pembiayaan, oleh karena itu hubungan baik dengan sumber dana *non joint financing* akan memberikan kepastian ketersediaan dana bagi Mandiri Tunas Finance.

---





---

## **Jaringan yang Tersebar Luas di Seluruh Indonesia dan Didukung Aliansi Strategis Bank Mandiri**

**Guna memberikan layanan yang cepat dan berkualitas kepada *Dealer/Showroom* dan pelanggan, maka diperlukan respon service level yang baik.** Untuk itu Mandiri Tunas Finance mendekati pasar yang potensial dengan menambah jaringan kantor yang ada untuk mendekatkan Mandiri Tunas Finance dengan konsumennya.

---





---

# **Hubungan Baik dan Luas dengan Jaringan Dealer dan APM**

---



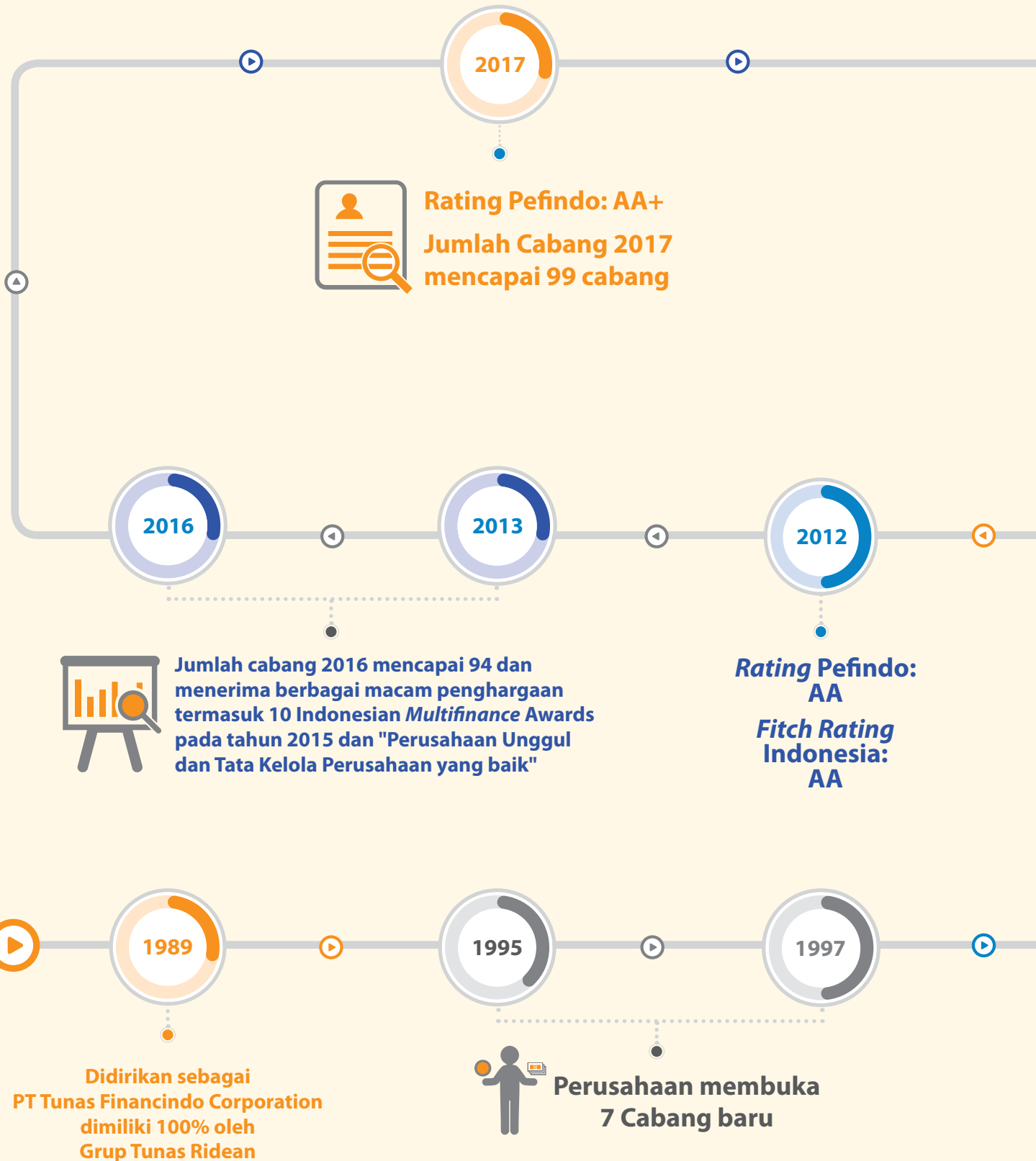


---

**Mandiri Tunas Finance telah menjalin hubungan yang baik dengan banyak *dealer* dan Agen Pemegang *Merk* (APM) terkemuka di Indonesia, termasuk dengan *dealer mobil premium/luxury car* dan *dealer motor besar*.**

---

## JEJAK LANGKAH PERUSAHAAN



PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

**PROFIL PERUSAHAAN**

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

2018

- Implementasi Sentralisasi Proses Input (SPRINT)
- Minimalisasi *cost of fund* melalui pendanaan *off shore, asset purchase*
- Pembukaan 3 cabang: Medan 2, Pekanbaru 2, dan Ungaran

2011

2010

2009



Perusahaan terus berkembang, membuka 35 Cabang baru di Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera

Berganti nama menjadi PT Mandiri Tunas Finance. 51% Saham Perusahaan diakuisisi Bank Mandiri (Persero)

2000

2004

2008

Perusahaan berganti nama menjadi PT Tunas Financindo Sarana

Perusahaan membuka 20 Cabang baru



## RINGKASAN KINERJA PERUSAHAAN 2018

**21,6%**



### PEMBIAYAAN BARU

Rp26,9 triliun  
naik 21,6%

**15,2%**



### LABA BERSIH

Rp403,3 miliar  
naik 15,2%

**6,09%**



### RASIO EFISIENSI

**BIAYA** 49,3%  
naik 6,09%  
dari 46,50%

**102**  
cabang



Total 102 **CABANG** di  
tahun 2018, dari 99  
cabang di tahun 2017



# 356.464

## JUMLAH KONSUMEN

di tahun 2018 adalah 356.464  
naik 4,7% dari 340.049 di tahun  
2017



# 0,83%

**NPL** 0,83% dari  
0,80% YOY

# Rp17,5

triliun

**ASET** Rp 17,5  
triliun naik 18,6%



# Rp3,12

triliun

## JUMLAH PENDAPATAN

Rp3,12 triliun naik 13,94%



# PERFORMA 2018

Ikhtisar Data Keuangan Penting	22
Ikhtisar Operasi	30
Ikhtisar Saham	31
Ikhtisar Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi	32
Informasi Tentang Sumber Pendanaan Lainnya	33
Kilas Peristiwa	34

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

### LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	2018	2017	2016	2015	2014	YoY 2017-2018 (%)
<b>Pendapatan</b>						
Pembiayaan Konsumen	1.936.719	1.830.424	1.772.265	1.423.223	1.063.442	5,81% ↑
Sewa pembiayaan	386.302	178.983	92.307	99.641	87.369	115,83% ↑
Anjak Piutang	96	-	-	-	-	-
Bunga	12.116	9.036	10.099	7.672	19.798	34,09% ↑
Lain-lain neto	784.959	719.921	574.598	456.996	342.946	9,03% ↑
<b>Total Pendapatan</b>	<b>3.120.192</b>	<b>2.738.364</b>	<b>2.449.269</b>	<b>1.987.532</b>	<b>1.513.555</b>	<b>13,94% ↑</b>
<b>Beban</b>						
Beban keuangan	(1.260.010)	(1.035.442)	(921.263)	(703.121)	(548.682)	21,69% ↑
Gaji dan tunjangan	(518.980)	(437.812)	(342.088)	(304.698)	(235.081)	18,54% ↑
Umum dan administrasi	(398.555)	(354.063)	(309.840)	(279.747)	(197.569)	12,57% ↑
<b>Penyisihan kerugian penurunan nilai</b>						
Pembiayaan konsumen	(394.619)	(434.774)	(426.997)	(291.487)	(209.114)	-9,24% ↓
Sewa pembiayaan	(3.950)	(5.784)	(196)	2.356	(10.805)	-31,71% ↓
Anjak Piutang	(113)	-	-	-	-	-
Piutang lain-lain	(4.122)	(2.111)	-	9	19	95,26% ↑
<b>Total Beban</b>	<b>(2.580.349)</b>	<b>(2.269.986)</b>	<b>(2.000.384)</b>	<b>(1.576.688)</b>	<b>(1.201.232)</b>	<b>13,67% ↑</b>
<b>Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan</b>	<b>539.843</b>	<b>468.378</b>	<b>448.885</b>	<b>410.844</b>	<b>312.323</b>	<b>15,26% ↑</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>						
Beban Pajak Final	(2.423)	(1.807)	(2.020)	(1.534)	(3.960)	34,09% ↑
<b>Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan</b>	<b>537.420</b>	<b>466.571</b>	<b>446.865</b>	<b>409.310</b>	<b>308.363</b>	<b>20,34% ↑</b>
Beban Pajak Penghasilan	(134.100)	(116.329)	(111.495)	(102.510)	(74.317)	15,28% ↑
<b>Laba Tahun Berjalan</b>	<b>403.320</b>	<b>350.242</b>	<b>335.370</b>	<b>306.800</b>	<b>234.046</b>	<b>15,15% ↑</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>						
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>						
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	6.730	(13.162)	(4.266)	(7.221)	(5.302)	151,13% ↑
Pajak penghasilan terkait	(1.682)	3.290	1.067	1.805	1.325	-151,12% ↓
	5.048	(9.872)	(3.199)	(5.416)	(3.977)	151,13% ↑
<b>Pos yang akan direklasifikasi ke Laba Rugi</b>						
Bagian efektif dari kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	(27.695)	(16.826)	-	-	-	64,60% ↑
Pajak penghasilan terkait	6.924	4.206	-	-	-	64,62% ↑
	(20.771)	(12.620)	-	-	-	64,59% ↑
<b>Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak</b>	<b>(15.723)</b>	<b>(22.492)</b>	<b>(3.199)</b>	<b>(5.416)</b>	<b>(3.977)</b>	<b>-30,10% ↓</b>
<b>Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>387.597</b>	<b>327.750</b>	<b>332.171</b>	<b>301.384</b>	<b>230.069</b>	<b>18,26% ↑</b>
<b>Laba Per Saham Dasar (nilai Rupiah penuh)</b>	<b>161</b>	<b>140</b>	<b>134</b>	<b>123</b>	<b>94</b>	<b>15,00% ↑</b>

## PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

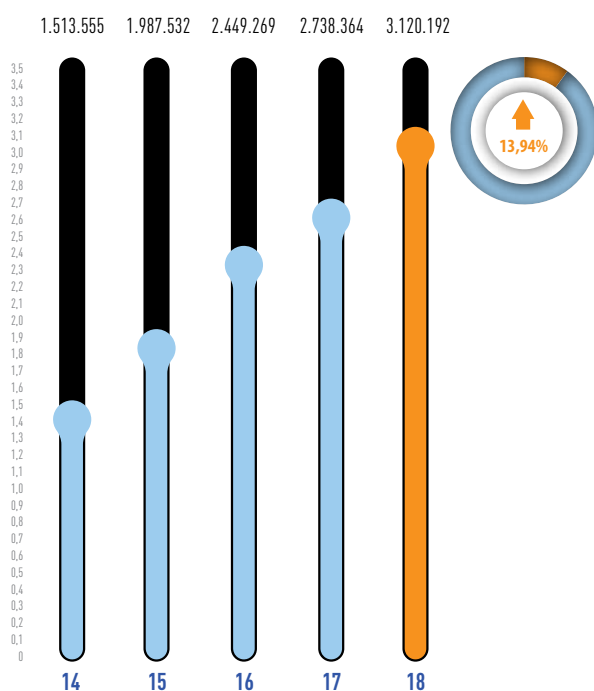
FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

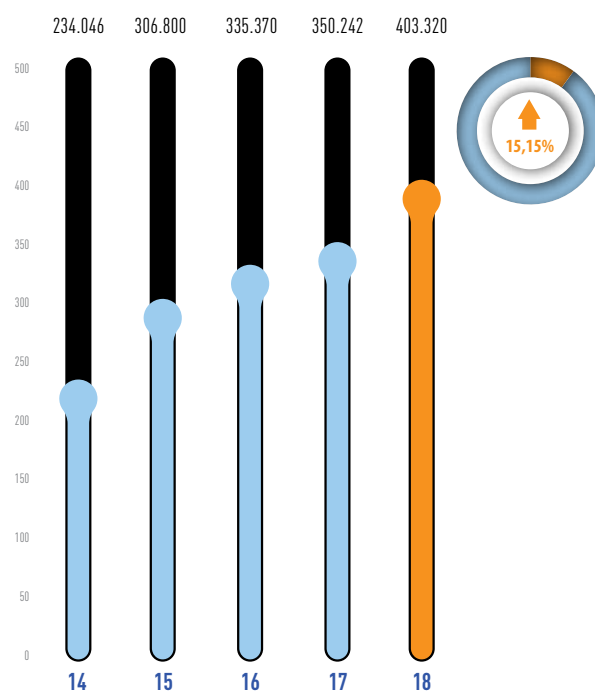
## PENDAPATAN

(Rp juta)

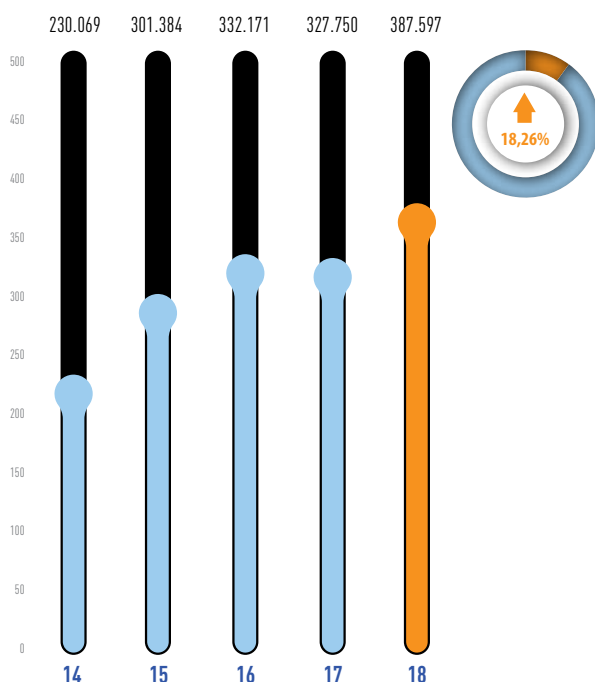


## LABA TAHUN BERJALAN

(Rp juta)

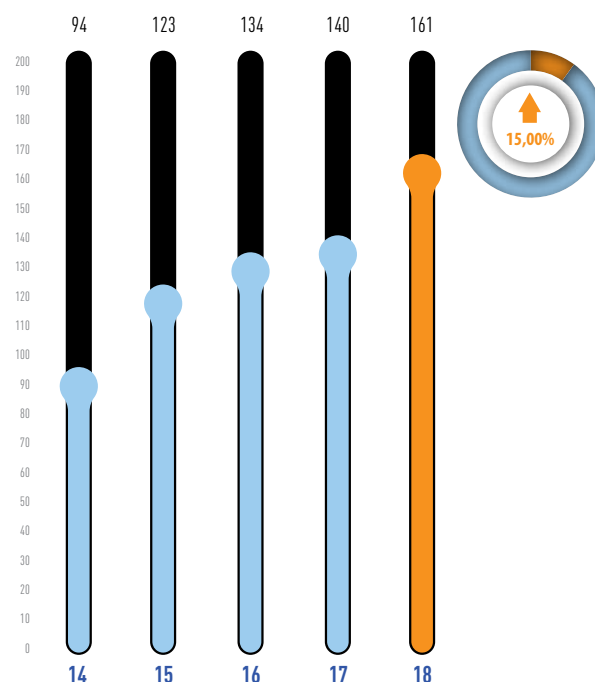
TOTAL PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

(Rp juta)



## LABA PER SAHAM DASAR

(Rp)





## POSISI KEUANGAN

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	2018	2017	2016	2015	2014	YoY 2017-2018 (%)
<b>ASET</b>						
Kas dan Setara Kas						
Kas	12.863	20.198	24.074	19.938	13.951	-36,32% ↓
Kas Pada Bank						
Pihak Ketiga	105.923	8.944	21.521	3.257	8.914	1084,29% ↑
Pihak Berelasi	136.154	131.408	212.299	68.771	250.585	3,61% ↑
	254.940	160.550	257.894	91.966	273.450	58,79% ↑
Piutang Pembiayaan Konsumen						
Pihak Ketiga	12.927.542	11.444.554	9.956.989	8.148.026	6.080.567	12,96% ↑
Pihak Berelasi	5.822	7.957	10.532	5.886	7.420	-26,83% ↓
	12.933.364	11.452.511	9.967.521	8.153.912	6.087.987	12,93% ↑
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(303.884)	(271.205)	(298.650)	(270.477)	(194.852)	12,05% ↑
	12.629.480	11.181.306	9.668.871	7.883.435	5.893.135	12,95% ↑
Piutang Sewa Pembiayaan						
Pihak Ketiga	3.328.389	2.364.629	834.483	604.150	783.737	40,76% ↑
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(9.286)	(7.739)	(4.538)	(5.791)	(17.213)	19,99% ↑
	3.319.103	2.356.890	829.945	598.359	766.524	40,83% ↑
Anjak Piutang						
Pihak Ketiga	11.416	-	-	-	-	-
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(113)	-	-	-	-	-
	11.303	-	-	-	-	-
Piutang Lain-lain						
Pihak Ketiga	115.193	104.140	69.420	76.923	43.921	10,61% ↑
Pihak berelasi	620.215	564.131	274.585	388.421	320.326	9,94% ↑
	735.408	668.271	344.005	465.344	364.247	10,05% ↑
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.007)	(2.896)	(785)	(785)	(794)	107,42% ↑
	729.401	665.375	343.220	464.559	363.453	9,62% ↑
Aset pajak tangguhan	59.921	38.004	23.079	19.907	12.885	57,67% ↑
Tagihan kelebihan pajak	43.538	65.538	65.538	-	-	-33,57% ↓
Piutang derivatif	138.333	23.202	-	-	-	496,21% ↑
Aset tetap	182.005	165.907	141.322	102.852	74.531	9,70% ↑
Aset Lain-lain						
Pihak Ketiga	111.593	81.340	73.061	41.081	36.845	37,19% ↑
Pihak berelasi	2.227	1.346	1.132	835	966	65,45% ↑
<b>TOTAL ASET</b>	<b>17.481.844</b>	<b>14.739.458</b>	<b>11.404.062</b>	<b>9.202.994</b>	<b>7.421.789</b>	<b>18,61% ↑</b>

## PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

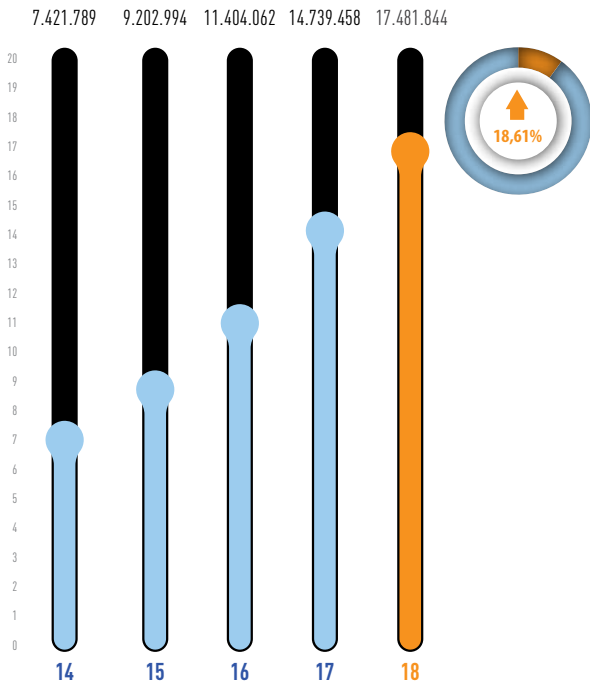
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

URAIAN	2018	2017	2016	2015	2014	YoY 2017-2018 (%)
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>						
<b>LIABILITAS</b>						
Utang usaha	649.630	606.513	593.910	390.262	523.518	7,11% ↑
Utang Lain-lain						
Pihak ketiga	199.947	194.491	150.048	110.205	84.605	2,81% ↑
Pihak berelasi	84.738	30.344	106.733	44.803	53.799	179,26% ↑
Utang pajak kini	1.852	33.916	13.594	20.462	11.037	-94,54% ↓
Beban yang Masih Harus Dibayar						
Pihak ketiga	220.282	135.559	89.259	94.240	91.704	62,50% ↑
Pihak berelasi	1.828	1.227	868	1.835	2.691	48,98% ↑
Pinjaman bank						
Pihak ketiga	9.843.103	6.641.977	4.118.987	4.228.720	2.941.445	48,20% ↑
Pihak berelasi	1.379.632	1.602.605	1.502.505	1.272.623	1.364.359	-13,91% ↓
	11.222.735	8.244.582	5.621.492	5.501.343	4.305.804	36,12% ↑
Biaya provisi yang belum diamortasi	(34.611)	(34.152)	(12.340)	(14.753)	(14.662)	1,34% ↑
	11.188.124	8.210.430	5.609.152	5.486.590	4.291.142	36,27% ↑
Surat berharga yang diterbitkan						
Pihak ketiga	1.835.300	2.443.300	2.284.000	1.297.250	1.092.000	-24,88% ↓
Pihak berelasi	1.014.700	1.231.700	1.041.000	552.750	358.000	-17,62% ↓
	2.850.000	3.675.000	3.325.000	1.850.000	1.450.000	-22,45% ↓
Beban emisi yang belum diamortisasi	(5.284)	(9.749)	(8.766)	(4.590)	(2.631)	-45,80% ↓
	2.844.716	3.665.251	3.316.234	1.845.410	1.447.369	-22,39% ↓
Utang derivatif	89.788	19.540	-	-	-	359,51% ↑
Liabilitas imbalan kerja karyawan	80.024	73.845	50.135	36.549	21.271	8,37% ↑
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>15.360.929</b>	<b>12.971.116</b>	<b>9.929.933</b>	<b>8.030.356</b>	<b>6.527.136</b>	<b>18,42% ↑</b>
<b>EKUITAS</b>						
Modal Saham	-	-	-	-	-	-
Modal Disetor	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00% ↑
Penghasilan Komprehensif Lain:						
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan - neto	(19.519)	(24.567)	(14.695)	(11.496)	(6.080)	-20,55% ↓
Kerugian kumulatif atas instrument derivatif untuk lindung nilai arus kas- neto	(33.391)	(12.620)	-	-	-	164,59% ↑
Saldo laba						
Sudah ditentukan penggunaannya	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00% ↑
Belum ditentukan penggunaannya	1.873.825	1.505.529	1.188.824	884.134	600.733	24,46% ↑
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>2.120.915</b>	<b>1.768.342</b>	<b>1.474.129</b>	<b>1.172.638</b>	<b>894.653</b>	<b>19,94% ↑</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>17.481.844</b>	<b>14.739.458</b>	<b>11.404.062</b>	<b>9.202.994</b>	<b>7.421.789</b>	<b>18,61% ↑</b>

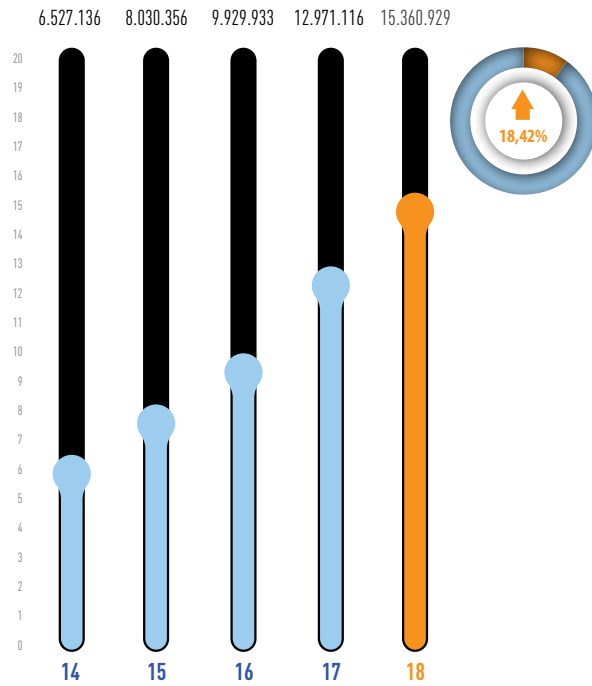
### TOTAL ASET

(Rp juta)



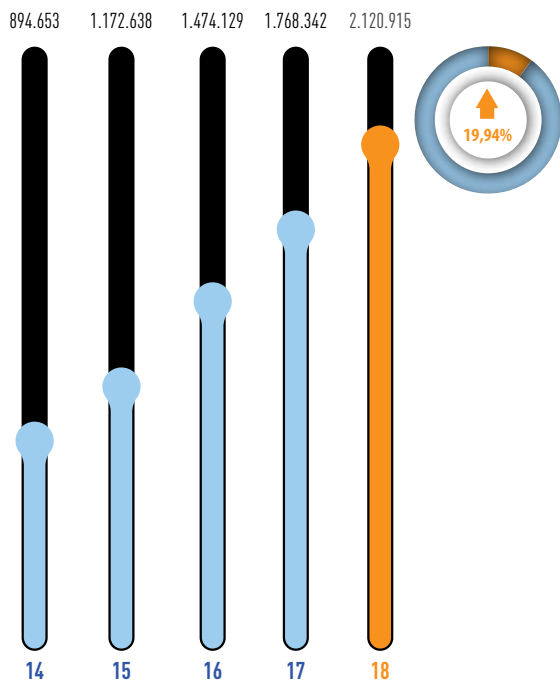
### TOTAL LIABILITAS

(Rp juta)



### TOTAL EKUITAS

(Rp juta)



## PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

**ARUS KAS***(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

URAIAN	2018	2017	2016	2015	2014	YoY 2017-2018 (%)	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(1.943.479)	(2.970.105)	(1.329.902)	(1.703.073)	(1.151.645)	-34,57%	↓
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(50.719)	(49.941)	(59.268)	(45.974)	(42.357)	1,56%	↑
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	2.088.588	2.922.702	1.555.098	1.567.563	1.276.213	-28,54%	↓
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	94.390	(97.344)	165.928	(181.484)	82.211	196,97%	↑
Kas dan setara kas pada awal tahun	160.550	257.894	91.966	273.450	191.239	-37,75%	↓
Kas dan setara kas pada akhir tahun	254.940	160.550	257.894	91.966	273.450	58,79%	↑

## RASIO-RASIO KEUANGAN

URAIAN	2018	2017	2016	2015	2014	YoY 2017-2018 (%)	
<b>PROFITABILITAS</b>							
Imbal hasil aset	2,50%	2,68%	3,25%	3,69%	3,58%	-6,72%	↓
Imbal hasil aset *	3,35%	3,58%	4,36%	4,94%	4,78%	-6,42%	↓
Imbal hasil rata-rata aset *	3,33%	3,67%	4,32%	5,11%	4,74%	-9,26%	↓
Imbal hasil ekuitas	20,74%	21,60%	25,34%	29,68%	29,62%	-3,98%	↓
Imbal hasil rata-rata ekuitas	20,73%	22,10%	25,53%	29,77%	29,71%	-6,20%	↓
Jumlah pendapatan/jumlah aset	17,85%	18,58%	21,48%	21,60%	20,39%	-3,93%	↓
<b>ASET PRODUKTIF</b>							
Piutang pembiayaan bersih kelolaan **	43.490.232	36.849.316	31.272.392	26.758.485	21.161.175	18,02%	↑
Piutang pembiayaan-pembiayaan bersama **	27.217.063	23.032.176	20.470.388	18.000.423	14.289.451	18,17%	↑
Piutang bermasalah kelolaan	0,83%	0,80%	1,49%	1,20%	1,15%	3,75%	↑
<b>LIKUIDITAS</b>							
Jumlah liabilitas/jumlah aset (kali)	0,88	0,88	0,87	0,87	0,88	0,00%	-
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas (kali)	7,24	7,34	6,74	6,85	7,30	-1,36%	↓
Utang yang berbunga/jumlah ekuitas (kali) ***	6,62	6,72	6,05	6,25	6,41	-1,49%	↓
<b>PERTUMBUHAN</b>							
Pertumbuhan pendapatan	13,94%	11,80%	23,23%	31,32%	29,79%	18,14%	↑
Pertumbuhan laba tahun berjalan	15,15%	4,43%	9,31%	31,09%	32,62%	241,99%	↑
Pertumbuhan aset	18,61%	29,25%	23,92%	24,00%	31,59%	-36,38%	↓
Pertumbuhan liabilitas	18,42%	30,63%	23,65%	23,03%	31,74%	-39,86%	↓
Pertumbuhan ekuitas	19,94%	19,96%	25,71%	31,07%	30,47%	-0,10%	↓



## PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

URAIAN	2018	2017	2016	2015	2014	YoY 2017-2018 (%)
<b>RASIO LAINNYA</b>						
Laba sebelum pajak penghasilan/pendapatan	17,30%	17,10%	18,33%	20,67%	20,64%	1,17% ↑
Laba bersih setelah pajak tahun berjalan/pendapatan	12,93%	12,79%	13,69%	15,44%	15,46%	1,09% ↑
Rasio efisiensi biaya	49,33%	46,50%	42,67%	45,43%	44,81%	6,09% ↑

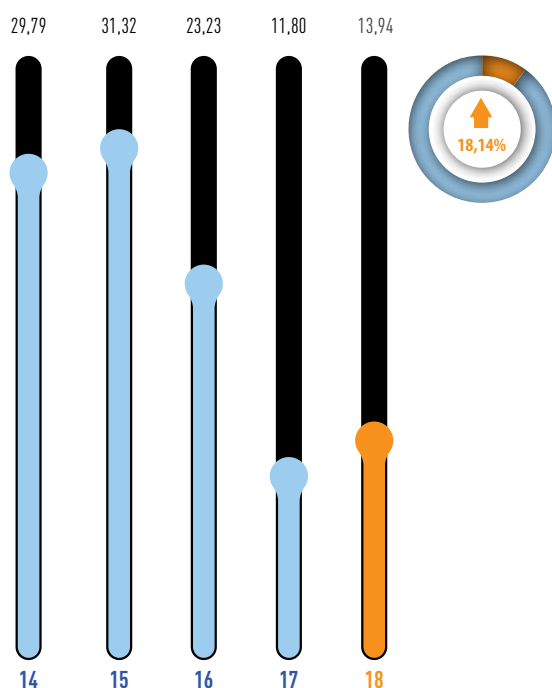
## Keterangan

\* Menggunakan perhitungan laba sebelum pajak

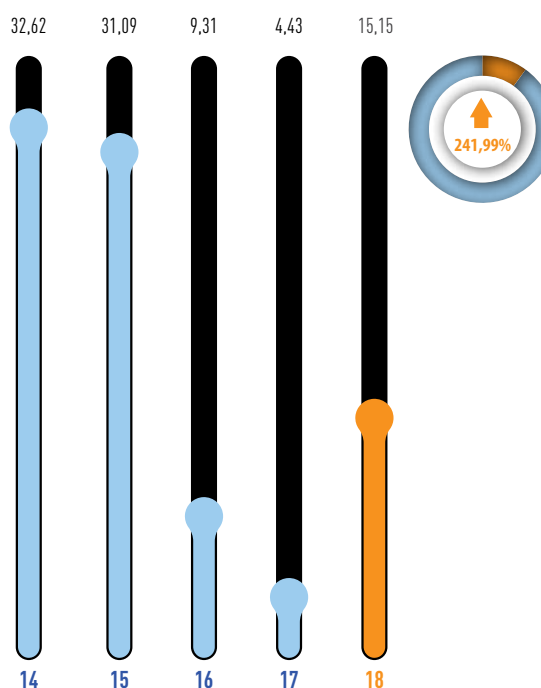
\*\* Dalam jutaan rupiah

\*\*\* *Gearing Ratio*

### PERTUMBUHAN PENDAPATAN (%)



### PERTUMBUHAN LABA TAHUN BERJALAN (%)

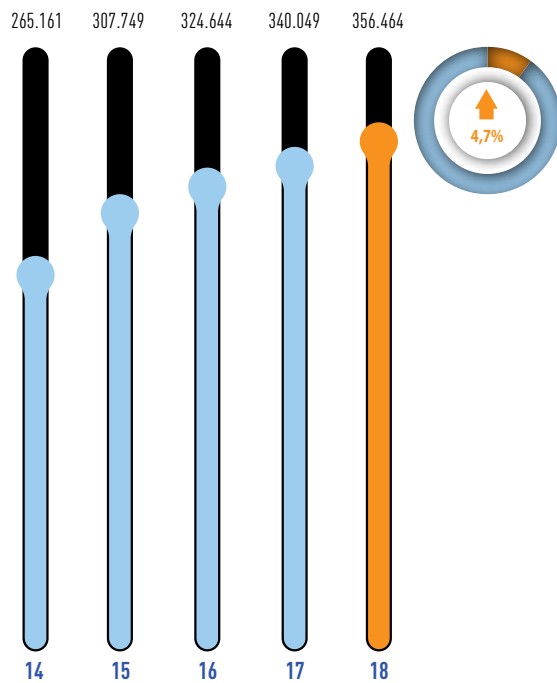


## IKHTISAR OPERASI

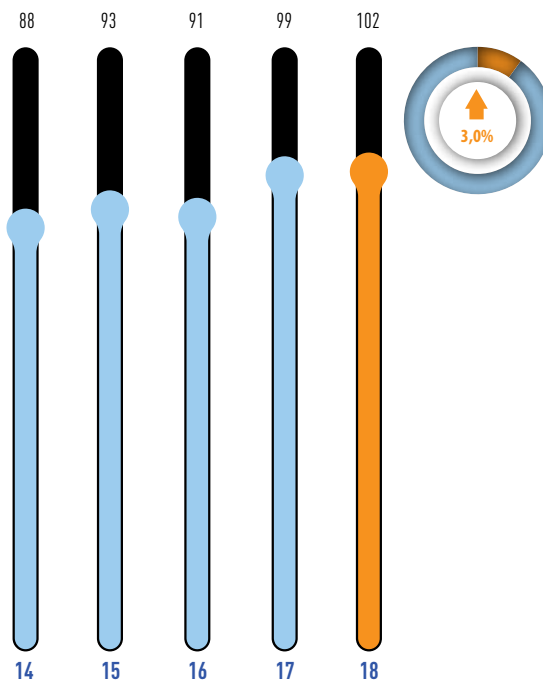
### IKHTISAR OPERASI

URAIAN	2018	2017	2016	2015	2014	YoY 2017-2018 (%)
Jumlah Konsumen	356.464	340.049	324.644	307.749	265.161	4,7% ↑
Jumlah Cabang	102	99	91	93	88	3,0% ↑
Pembiayaan Baru	Rp26,99 triliun	Rp22,20 triliun	Rp18,63 triliun	Rp17,14 triliun	Rp14,78 triliun	21,6% ↑
Jumlah Sumber Daya Manusia	3.448	3.467	3.572	3.725	3.329	0,5% ↑

### JUMLAH KONSUMEN



### JUMLAH CABANG



## PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## IKHTISAR SAHAM

### JUMLAH SAHAM

Jumlah saham Mandiri Tunas Finance sebanyak 2.500.000.000 lembar saham, dengan kepemilikan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 1.275.000.000 lembar saham atau 51,00%, dan PT Tunas Ridean Tbk sebanyak 1.225.000.000 lembar saham atau 49,00%. Mandiri Tunas Finance tidak menerbitkan sahamnya untuk dimiliki oleh publik maupun oleh manajemen atau karyawan.

### INFORMASI TENTANG PERDAGANGAN SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PUBLIK

Hingga 31 Desember 2018 Mandiri Tunas Finance tidak pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait perdagangan saham yang memuat kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan informasi

dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan dan volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir; termasuk penghentian sementara perdagangan saham dalam 2 (dua) tahun terakhir.

### INFORMASI TENTANG AKSI KORPORASI

Di sepanjang tahun 2017 dan 2018, Mandiri Tunas Finance tidak melakukan aksi korporasi seperti aksi pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), saham bonus, maupun penurunan nilai nominal saham.

### DIVIDEN SAHAM

Pembagian Dividen Saham untuk hasil usaha tahun buku 2016 yang dilakukan di tahun 2017 dan Dividen Saham untuk hasil usaha tahun buku 2017 yang dibagikan di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

#### DIVIDEN SAHAM

Dividen Saham	2018 (untuk Dividen Saham Tahun Buku 2017)	2017 (untuk Dividen Saham Tahun Buku 2016)	Peningkatan (Penurunan)
Jumlah Dividen yang Dibagikan (Rp-juta)	35.024	33.537	4,43% ↑
Dividen Kas per Saham (Rp)	14,01	13,00	7,69% ↑
Rasio Pembagian Dividen (%)	10%	10%	-
Tanggal Pengumuman	9 Maret 2018	10 April 2017	-
Tanggal Pembayaran	29 Maret 2018	27 April 2017	-

## IKHTISAR OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI

Mandiri Tunas Finance telah beberapa kali menerbitkan Obligasi yang dananya digunakan seluruhnya untuk kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor. Walaupun Mandiri Tunas Finance mendapatkan dukungan penuh atas fasilitas pendanaan terutama *Joint Financing* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, namun Mandiri Tunas Finance tetap melakukan diversifikasi pendanaan untuk

menunjang kinerja usaha. Penerbitan Obligasi antara lain bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan investor serta mempertahankan eksistensi di Pasar Modal.

Obligasi yang masih beredar serta masih dalam status belum lunas untuk periode 2017-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

### IKHTISAR OBLIGASI

Tahun	Nama Obligasi	Seri	Peringkat	Jumlah (Rp)	Tingkat Bunga	Frekuensi Pembayaran Bunga	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Ket.
2015	Obligasi Berkelanjutan I MTF Tahap III	-	idAA	150.000.000.000	9,75 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	9 Jun 2015	9 Jun 2018	-
	Obligasi Berkelanjutan II MTF Tahap I	A	idAA	500.000.000.000	10,20 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	18 Des 2015	18 Des 2018	-
		B		100.000.000.000	10,80 % p.a		18 Des 2015	18 Des 2020	-
			600.000.000.000						
2016	Obligasi Berkelanjutan II MTF Tahap II	A	idAA	720.000.000.000	8,95 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	1 Jun 2016	1 Jun 2019	-
		B	idAA	680.000.000.000	9,25 % p.a		1 Jun 2016	1 Jun 2021	-
			1.400.000.000.000						
	Obligasi Berkelanjutan III MTF Tahap I	A	idAA+	400.000.000.000	8,20% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	7 Okt 2016	7 Okt 2019	-
		B	idAA+	100.000.000.000	8,55% p.a		7 Okt 2016	7 Okt 2021	-
			500.000.000.000						
2017	Obligasi Berkelanjutan III MTF Tahap II	A	idAA+	610.000.000.000	8,50% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	6 Jun 2017	6 Jun 2020	-
		B	idAA+	240.000.000.000	8,85% p.a		6 Jun 2017	6 Jun 2022	-
<b>TOTAL</b>				<b>Rp3.350.000.000.000</b>					

Selain obligasi di atas, Mandiri Tunas Finance tidak menerbitkan efek apapun dalam bentuk lain.

## INFORMASI TENTANG SUMBER PENDANAAN LAINNYA

### PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



Mandiri Tunas Finance telah beberapa kali menerbitkan *Medium Term Notes* (MTF) dalam rangka melakukan diversifikasi pendanaan untuk memperkuat pembiayaan kendaraan bermotor. *Medium Term Notes* terakhir diterbitkan dengan nama *Medium Term Notes* (MTN) Mandiri Tunas Finance III tahun 2012 dengan nilai Rp200.000.000.000 yang diterbitkan pada 2 Februari 2012. *Medium Term Notes* ini telah berstatus lunas sesuai dengan jatuh tempo pada 2 Februari 2015.

Sejak diterbitkannya *Medium Term Notes* (MTN) Mandiri Tunas Finance III tahun 2012 hingga akhir tahun 2018, Mandiri Tunas Finance tidak lagi menerbitkan *Medium Term Notes*. Seluruh pendanaan untuk pembiayaan kendaraan bermotor dipenuhi dari *Joint Financing* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku entitas induk, dan penerbitan obligasi seperti yang telah diuraikan di atas.



## KILAS PERISTIWA



### 20-21 JANUARI RAPAT KERJA NASIONAL

Untuk menggalang kekompakan dan semangat menyambut tahun 2018, PT Mandiri Tunas Finance mengadakan kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada tanggal 20-21 Januari 2018 di Hotel Aston, Sentul, Bogor. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Manajer sampai Direksi, ini diawali dengan *fun rally* kemudian dilanjutkan dengan rangkaian *sharing session*, *getting commitment* dan ditutup dengan hiburan musik.



### 6 FEBRUARI PERAYAAN HUT MTF KE-9

Merayakan genap 9 tahun PT Mandiri Tunas Finance (MTF) melayani nasabah dalam bidang pembiayaan kendaraan bermotor, pada tanggal 6 Februari 2018 digelar acara perayaan di Ballroom Graha Mandiri. Hadir dalam perayaan ini antara lain Bapak Anton Setiawan selaku *founding father* MTF sekaligus pemilik Tunas Grup, Komisaris MTF Bapak Harry Gale dan Komisaris Independen MTF Bapak Ravik Karsidi. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama MTF Ignatius Susatyo Wijoyo meresmikan produk baru MTF yaitu MTF *Signature* yang menawarkan DP 9%.



### 13 FEBRUARI PERESMIAN KANTOR CABANG MANADO

MTF meresmikan kantor cabang di kota Manado, yang dihadiri oleh Deputi Direktur MTF Albertus Henditrianto, dan Regional Manajer Region IX Makkah Indra Purnomo. Kantor MTF Cabang Manado beralamat alamat Jl. Piere Tendean Komp. Ruko Marina Plaza Blok C No. 3 Kota Manado, Sulawesi Utara. Dengan lokasi kantor yang lebih strategis dan mudah dijangkau, MTF yakin dapat melayani nasabah dengan lebih baik.



### 27 FEBRUARI PRESS CONFERENCE KINERJA MTF 2018

Dalam upaya MTF menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan sejalan melalui penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor di tahun 2017. Direktur Utama MTF Ignatius Susatyo Wijoyo menjelaskan, "Sepanjang tahun 2017, MTF telah menyalurkan pembiayaan baru sebesar Rp22,2 triliun atau naik 19% dibandingkan pembiayaan baru tahun 2016 sebesar Rp18,6 triliun. Dari total pembiayaan tersebut, sebesar 72,78% disalurkan untuk *passenger car*, 19,57% untuk kendaraan komersial, 7,46% alat berat dan lain-lain."

**PERFORMA 2018**

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

**2 MARET****MTF RAIH DUA PENGHARGAAN DI BIDANG CORPORATE SECRETARY & CORPORATE COMMUNICATION DAN IT**

MTF meraih dua penghargaan Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communications (ICCA) Award III 2018 untuk industri *Multifinance* kategori Platinum mendapatkan peringkat 1 dengan skor 94, dengan predikat "Very Excellent", dan Indonesia Information Technology (ITA) Award I 2018 kategori Platinum, peringkat 1 dengan skor 88.54 dengan predikat "Very Excellent". Penghargaan diterima oleh Deputy Direktur MTF William Francis Indra.

**9 MARET****RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MANDIRI TUNAS FINANCE TAHUN BUKU 2017**

PT Mandiri Tunas Finance telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 pada tanggal 9 Maret 2018 bertempat di Ruang Belitung, Plaza Mandiri Lantai 2, Jakarta. Salah satu hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandiri Tunas Finance tersebut yaitu melakukan perubahan susunan Anggota Direksi, yakni Arya Suprihadi sebagai Direktur Utama, serta Harjanto Tjitohardjo dan Armendra sebagai Direktur.

**23 MARET****PISAH SAMBUT DIREKSI MTF**

PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menggelar acara pisah sambut direksi MTF di Ballroom Graha Mandiri. Ignatius Susatyo Wijoyo telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Direktur Utama yang dimulai dari tahun 2009 dan selesai pada tahun 2018 digantikan oleh Arya Suprihadi yang diangkat melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan MTF tahun 2018. Bersamaan dengan diangkatnya Arya Suprihadi sebagai Direktur Utama, Armendra juga diangkat sebagai Direktur MTF.

**15 APRIL****JOGJA MARATHON 2018**

Mandiri Tunas Finance menjadi sponsor dan peserta dalam kegiatan Jogja Marathon 2018 yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri. Direktur Utama MTF Arya Suprihadi, Direktur MTF Armendra dan Deputy Direktur MTF Albertus Henditrianto hadir dan mengikuti kegiatan lari ini. Dalam event ini, MTF menurunkan para pelarinya di kategori 5K, 10K dan Full Marathon (42K).



## 17 APRIL PARTISIPASI DALAM POR APPI

Prestasi kembali dicatatkan PT Mandiri Tunas Finance (MTF) dalam bidang olah raga, yakni sebagai Juara 1 Tenis Lapangan dan Juara 2 Fun Run kategori 5K dalam kegiatan Pekan Olah Raga (POR) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan April 2018, MTF turut serta sebagai sponsor dan peserta dalam sejumlah cabang olah raga.



## 19 APRIL MTF OFFICIAL LEASING IIMS 2018

PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menjadi Official Leasing Partner untuk kegiatan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018. Acara yang diselenggarakan oleh Dyandra ini bertempat di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta. MTF hadir dalam IIMS 2018 untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kendaraan masyarakat selama 10 hari mulai tanggal 10 - 19 April 2018



## 25 MAY BUKA PUASA BERSAMA KARYAWAN MTF

Buka puasa bersama sebagai ajang silaturahmi antara Manajemen dan karyawan dilaksanakan secara rutin di PT Mandiri Tunas Finance (MTF), dan tahun ini acara tersebut digelar di Ballroom Graha Mandiri pada tanggal 25 Mei 2018. Dihadiri oleh seluruh Direksi dan para karyawan di Head Office, acara buka puasa dimeriahkan oleh penampilan talent-talent MTF. Sedangkan sesi tausiah dibawakan oleh Prof. Dedi Djubaedi, Guru Besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. MTF juga berbagi dengan para anak yatim dari salah satu panti asuhan di Jakarta



## 19-21 JULI LEADERSHIP FORUM 2018 "SYNERGY & INNOVATION TO BREAK THE LIMIT"

Jajaran Manajemen Mandiri Tunas Finance (MTF) semakin solid dalam menghadapi tantangan di semester kedua tahun 2018. Hal ini tertuang dalam acara Leadership Forum 2018 di Belitung, 19-21 Juli 2018 bertema "Synergy and innovation to break the limit", yang diikuti oleh seluruh Direksi, Kepala Divisi dan Kepala Wilayah MTF. Dalam acara tersebut, hadir Senior Economist Bank Mandiri Andry Asmoro memberikan materi mengenai update makro ekonomi Indonesia yang menjadi referensi bagi jajaran Manajemen.



## PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



### 10 AGUSTUS MTF RAIH TIGA PENGHARGAAN TOP MULTIFINANCE 2018

PT Mandiri Tunas Finance (MTF) kembali menorehkan prestasi dalam dunia bisnis pembiayaan, dengan diraihnya penghargaan TOP *Multifinance* 2018 dari Majalah BusinessNews Indonesia. Acara penyerahan penghargaan dilaksanakan di Jakarta, 10 Agustus 2018 dihadiri oleh Direktur Utama MTF Arya Suprihadi. Dalam acara tersebut, MTF menerima tiga kategori penghargaan, yakni: TOP *Multifinance* (aset Rp 10 – 20 triliun), TOP CEO *Multifinance* – Arya Suprihadi, dan TOP *Multifinance* bidang Implementasi Teknologi Digital.



### 20 AGUSTUS PERAYAAN HUT RI KE-73

MTF merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 di Graha Mandiri, Jakarta secara sederhana yang dihadiri oleh jajaran Direksi dan seluruh karyawan di kantor pusat.



### 30 AGUSTUS PARTISIPASI DALAM PORSENI BANK MANDIRI

MTF berpartisipasi dalam Pekan Olah Raga dan Seni yang dilaksanakan secara rutin tiap tahun oleh Bank Mandiri, yang diikuti tidak hanya perwakilan karyawan Bank Mandiri namun juga karyawan dari Perusahaan Anak Mandiri Group.



### 4 SEPTEMBER HARI PELANGGAN NASIONAL

Memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas), secara serentak jajaran Direksi PT Mandiri Tunas Finance (MTF) dan Kepala Cabang di 99 Kantor Cabang MTF turun langsung melayani *customer*. Selain itu, Direksi MTF juga mengantarkan sendiri mobil yang dipesan hingga ke alamat *customer*, sekaligus bersilaturahmi dengan *customer* dan keluarganya. Sejumlah program promosi yang dilaksanakan sehubungan dengan Harpelnas, serta memperkenalkan kembali aplikasi MTF GO dengan fitur MTF Aksesku.



## 12 OKTOBER MANDIRI TUNAS FINANCE PERLUAS JARINGAN DI UNGARAN

Ungaran, 12 Oktober 2018. Direktur Utama MTF Arya Supriyadi meresmikan Kantor Cabang Ungaran didampingi oleh Regional Manager Region VI Puji Bisno Santoso, Corporate Secretary & Legal Business Division Head Vivid Zulprimiandanni, Branch Manager MTF Ungaran Doddy Pratidina serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kantor Cabang MTF Ungaran berlokasi di Ruko Mutiara Square No.6, Jl Gatot Subroto 133, Ungaran.



## 20 OKTOBER PARTISIPASI DALAM MANDIRI KARNAVAL 2018

MTF berpartisipasi dalam acara Mandiri Karnaval dalam rangka perayaan HUT Bank Mandiri ke-20 dalam bentuk *booth* untuk memperkenalkan produk-produk MTF kepada pengunjung.



## 21 OKTOBER EMPLOYEE GATHERING 2018

Untuk meningkatkan kebersamaan dan kekompakan karyawan, sekaligus sebagai apresiasi perusahaan, MTF mengadakan kegiatan tahunan *Employee Gathering* yang diikuti oleh sekitar 1400 karyawan di area Jakarta dan sekitarnya. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan di bulan yang sama oleh karyawan MTF di seluruh Indonesia.



## 26-28 OKTOBER MULTIFINANCE DAY APPI

Sebagai bagian dari kegiatan inklusi keuangan, MTF berpartisipasi dalam kegiatan *Multifinance Day* yang diadakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) bersama dengan 34 perusahaan pembiayaan di Trans Studio Mall Makassar.



**PERFORMA 2018**

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



**8 NOVEMBER**  
**TINGKATKAN STANDAR PELAYANAN**  
**ADMINISTRASI, MTF JALIN KERJA**  
**SAMA DENGAN DUKCAPIL**

Mandiri Tunas Finance (MTF) menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan pada 8 November 2018, di Jakarta. Hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Dukcapil Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh SH, MH, Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ir. Gunawan, MA, Direktur Utama MTF Arya Suprihadi, dan Direktur MTF Harjanto Tjitohardjojo.



**29 NOVEMBER**  
**INVESTOR GATHERING PENERBITAN**  
**OBLIGASI**

PT Mandiri Tunas Finance (MTF) mengadakan Investor Gathering dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2018 dengan target pencapaian dana Rp 1 Triliun. Penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV yang menargetkan dana dengan nilai nominal sebanyak-banyaknya Rp 3 triliun.



**29 NOVEMBER**  
**MTF SABET PENGHARGAAN**  
**MULTIFINANCE TERBAIK 2018**

PT Mandiri Tunas Finance (MTF) meraih penghargaan sebagai perusahaan pembiayaan terbaik di Indonesia dengan aset di atas Rp 10 triliun, dari The Finance, media ber-platform digital yang merupakan Bagian dari Infobank Group. Penghargaan ini diterima langsung oleh Direktur Utama MTF, Arya Suprihadi pada acara penganugerahan "Top 20 Financial Institutions 2018".



**11 DESEMBER**  
**MANDIRI TUNAS FINANCE DORONG**  
**PERAN MILLENIALS DALAM DUNIA**  
**BISNIS**

MTF mengadakan ajang Mandiri Tunas Finance *Business Case Competition* bagi mahasiswa tingkat akhir dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Mengusung tema "Empowering Youth Idea to Transform Multifinance Business", sesi penilaian akhir dari para finalis digelar di Jakarta, 11 Desember 2018.



# LAPORAN MANAJEMEN

Laporan Dewan Komisaris	42
Laporan Direksi	50
Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2018 PT Mandiri Tunas Finance	61





## LAPORAN DEWAN KOMISARIS

---



“Pencapaian target yang telah dicanangkan di awal tahun 2018 menjadi kunci bagi pemegang saham untuk dapat menilai kinerja Perseroan. Manajemen MTF telah membuktikan keberhasilan tersebut.”

**Rico Adisurja Setiawan**

Komisaris Utama



***Dewan Komisaris berpandangan bahwa arahan tersebut akan memberikan dorongan besar bagi Perseroan untuk dapat berakselerasi dan tumbuh di masa depan, terutama dengan ditunjang dengan beberapa strategi manajemen yang memiliki potensi besar***

***Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,***

Sebagai bagian dari kelompok usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perbankan, dan PT Tunas Ridean Tbk sebagai pelaku usaha pada industri otomotif, PT Mandiri Tunas Finance, disebut juga "Perseroan" atau "MTF", memiliki tanggung jawab yang besar untuk dapat menghadirkan pengelolaan bisnis pembiayaan dan pengembangan organisasi yang akuntabel. Dewan Komisaris turut ambil bagian dalam perwujudan tanggung jawab tersebut, melalui fungsi pengawasan atas pengelolaan Perusahaan yang dilakukan Direksi.

Izinkan Dewan Komisaris menyampaikan sekilas laporannya dalam laporan tahunan Perusahaan tahun 2018, yang akan menjadi bagian penting dalam pelaporan manajemen atas kinerja Perusahaan di sepanjang tahun 2018.

### **PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI MENGENAI PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN DASAR PENILAIANNYA**

Penilaian atas kinerja Direksi didasarkan pada arahan pemegang saham yang tertuang melalui Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. RTB/100/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Arahan Mengenai Prioritas dan Target Utama MTF Tahun 2018. Melalui arahan tersebut, disepakati

# PT Mandiri Tunas Finance

Ruang Belitung - Plaza Mandiri Lt. 2

Jakarta 9 Maret 2018



kontrak manajemen sebagai *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai kriteria penilaian kinerja Direksi. Arahan tersebut diantaranya memberikan prioritas utama Perseroan pada hal-hal berikut ini:

- Pertumbuhan laba bersih untuk mempertahankan tingkat *Return on Equity*.
- Ekspansi melalui *Joint Financing* untuk menjaga tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan.
- Pengelolaan kualitas aset untuk menciptakan portfolio pembiayaan yang sehat.
- Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta manajemen risiko yang kuat.
- Kontribusi strategis Perseroan untuk memperkuat sinergi di dalam Bank Mandiri Group.

Untuk mengukur dan memandu kinerja Perseroan dalam mengimplementasikan prioritas di atas, target-target utama yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Indikator	Bobot	Target
Laba bersih	30%	Rp370,5 miliar*
Baki Debet <i>Joint Financing</i>	35%	Rp26,2 triliun*
<i>Non Performing Financing</i>	35%	1,66%*

a. Laporan keuangan mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau setara dari auditor.

b. *Subsidiary risk profile* mendapat skor maksimal 2 (*low to moderate / satisfactory*).

\*Target menyesuaikan dengan RKAP 2018 terkini yang disetujui Bank Mandiri

Selain itu, kontribusi strategis Perseroan bagi Bank Mandiri Group menjadi bagian penting dalam arahan yang diberikan oleh pemegang saham, dengan harapan Perseroan akan mampu membawa Bank Mandiri Group menjadi pemimpin pasar di segmen mobil baru pada tahun 2022. Dewan Komisaris berpandangan bahwa arahan tersebut akan memberikan dorongan besar bagi Perseroan untuk dapat berakselerasi dan tumbuh di masa depan, terutama dengan ditunjang dengan beberapa strategi manajemen yang memiliki potensi besar, seperti:

- #1 in New Car financing
- Meningkatkan *marketshare newcar* 14% -> 15%
- P2P Lending / Financial Technology
- Remarketing Financing
- Pengembangan *Mobile Platform*
- Partnership dengan *Online Marketplace*
- Inisiatif Penurunan CER

Dewan Komisaris memberikan apresiasinya terhadap kinerja Direksi di sepanjang tahun 2018. Dengan target *Lending* tahun 2018 sebesar Rp27 triliun dan target laba Rp400 miliar telah berhasil dicapai. Keberhasilan ini tak lepas dari peran kepemimpinan Direksi dan kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam bisnis Perseroan.

## PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI DAN PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN

Peran pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui keterlibatan intens Dewan Komisaris secara rutin dalam memberi arahan terhadap penyusunan rencana kerja Perseroan kepada

Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki forum rapat gabungan yang membahas berbagai agenda menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Rapat ini merupakan bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam risalah rapat.

Di sepanjang tahun 2018, rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali. Dari ke-8 rapat tersebut, rata-rata kehadiran Dewan Komisaris mencapai 91,67% atau dengan tingkat kehadiran rata-rata 7,33 kali rapat, sementara kehadiran Direksi mencapai 87,50% atau dengan tingkat kehadiran rata-rata 7 kali rapat. Hal ini menunjukkan komitmen kedua organ, baik Dewan Komisaris dan Direksi, untuk dapat duduk bersama dan membicarakan tantangan dan pencapaian Perseroan. Dewan Komisaris berharap, komitmen ini dapat terus terjaga hingga waktu-waktu yang akan datang.

## PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN OLEH DIREKSI

Dewan Komisaris optimis terhadap target tahun 2019 yang disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh pemegang saham. Target tersebut dinilai realistis dan sangat optimal bila dikaitkan dengan tantangan bisnis di tahun 2019. Laba bersih ditargetkan sebesar Rp440 miliar. Selain menargetkan laba bersih, manajemen menargetkan agenda umum RKAP 2019 yaitu melakukan koordinasi dengan Bank Mandiri sehubungan dengan restrukturisasi nasabah yang

terdampak gempa (*force majeure*) di Lombok, Palu, dan Donggala. Selain itu, target yang tak kalah penting adalah pembiayaan multiguna yang akan terus diperkuat, serta meningkatkan efektifitas penanganan *Account Receivable* (AR) untuk menekan *Loss on Repo* (LOR).

Target ini diyakini oleh Dewan Komisaris dapat dicapai dengan maksimal, meskipun tantangan yang akan dihadapi di tahun 2019 tidaklah mudah, seperti adanya agenda Pemilihan Umum. Namun, dengan kemampuan kinerja para jajaran manajemen Perseroan, Dewan Komisaris optimis bahwa target-target tersebut dapat tercapai.

## PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Dewan Komisaris memandang bahwa manajemen Perseroan telah berupaya senantiasa memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, antara lain diterapkan melalui hal-hal sebagai berikut:

- Perseroan selalu tepat waktu dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit melakukan pertemuan secara berkala minimal 1 (satu) bulan sekali.
- Perseroan menyampaikan laporan kepada regulator secara tepat waktu dan akurat.
- Melakukan transparansi kinerja keuangan baik melalui situs web maupun konferensi pers secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.

- Mematuhi peraturan untuk sektor perusahaan pembiayaan.
- Membentuk Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan induk perusahaan Bank Mandiri.

Dewan Komisaris selalu memberikan arahan kepada seluruh organ GCG di Perseroan, dan selalu meninjau perkembangan yang dihasilkan terhadap penerapan GCG. Salah satu pencapaian GCG di tahun 2018 adalah penerimaan penghargaan *Good Corporate Governance Award 2018 - Indonesia Trusted Companies*, kategori *Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)* pada tanggal 19 Desember 2018 yang diberikan oleh Lembaga IICG – SWA. Penghargaan ini sekaligus menjadi tolak ukur bagi Perseroan untuk dapat mengevaluasi penerapan prinsip GCG di lingkup Perseroan.

## TENTANG MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN YANG DIBERLAKUKAN DI PERUSAHAAN

Hingga akhir tahun 2018, Perseroan belum menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) yang dikelola secara mandiri dan independen. Sistem pelaporan pelanggaran dilakukan melalui mekanisme internal organisasi Perseroan yang dikelola oleh Divisi *Human Capital* dan ditindaklanjuti melalui peraturan yang berlaku.

Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan WBS di tahun 2019 sebagai bagian dari penerapan prinsip GCG di lingkup Perseroan, yang bersandarkan pada pengelolaan organisasi yang akuntabel.

## PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi beserta tanggung jawabnya dibantu oleh Komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris termasuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko. Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan efektif. Rapat rutin yang

dilakukan setiap komite menjadi poin penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing komite, khususnya dalam memberikan masukan bagi Dewan Komisaris.

## PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Di tahun 2018, pemegang saham memutuskan untuk tidak melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018 adalah sama.

Nama	Jabatan	Masa Jabatan
Rico Adisurja Setiawan	Komisaris Utama	RUPS Tahun 2017 - RUPS Tahun 2020
Harry Gale	Komisaris	RUPS Tahun 2017 - RUPS Tahun 2020
Ravik Karsidi	Komisaris Independen	RUPS Tahun 2017 - RUPS Tahun 2020 Periode Jabatan: ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan)

## AKHIR KATA

Kepada pemegang saham, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasinya kepada Direksi atas kerja sama dan komitmen yang telah ditunjukkan. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan Perseroan yang telah memberikan kontribusinya secara optimal. Dewan Komisaris sungguh berharap, perjalanan tahun 2018 menjadi catatan penting bagi seluruh jajaran untuk dapat terus merumuskan strategi yang tepat dan mampu membawa Perseroan menuju pertumbuhan yang lebih baik.

Atas nama Dewan Komisaris  
Jakarta, Maret 2019



**Rico Adisurja Setiawan**

Komisaris Utama

PERFORMA 2018

**LAPORAN MANAJEMEN**

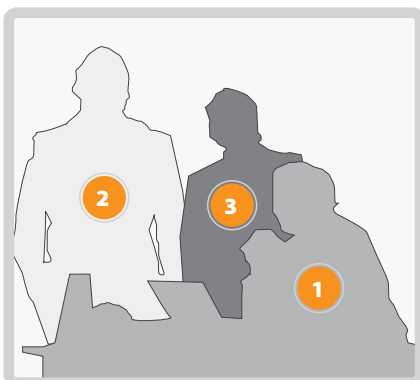
PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

**DEWAN KOMISARIS****1 RICO ADISURJA SETIAWAN**

Komisaris Utama

**2 HARRY GALE**

Komisaris

**3 RAVIK KARSIDI**

Komisaris Independen



## LAPORAN DIREKSI

---



“Nilai Pembiayaan MTF mencapai Rp26,99 triliun, meningkat Rp4,79 triliun atau 21,56% dari Nilai Pembiayaan tahun 2017 yang sebesar Rp22,20 triliun. Peningkatan Nilai Pembiayaan ini mendorong kenaikan pendapatan dan laba Perseroan tahun 2018.”

**Arya Suprihadi**

Direktur Utama



**Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,**

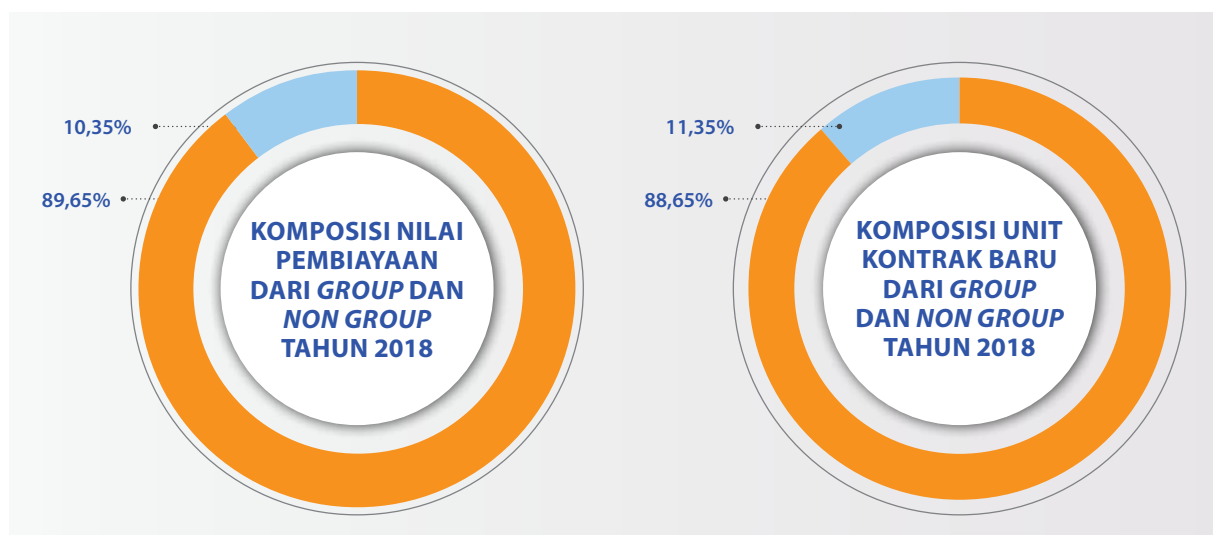
Tahun 2018 menjadi tahun penuh tantangan bagi industri jasa pembiayaan, khususnya pada sektor pembiayaan bagi kendaraan bermotor. Pertumbuhan pasar yang stagnan membuat PT Mandiri Tunas Finance, disebut juga “Perseroan” atau “MTF”, melakukan serangkaian strategi untuk dapat terus melakukan akselerasi pertumbuhan bisnisnya. Laporan tahunan ini menjadi bagian dari pelaporan manajemen atas strategi dan kinerja Perseroan di sepanjang tahun 2018, sekaligus menjadi dokumentasi atas perjalanan Perseroan untuk mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan.

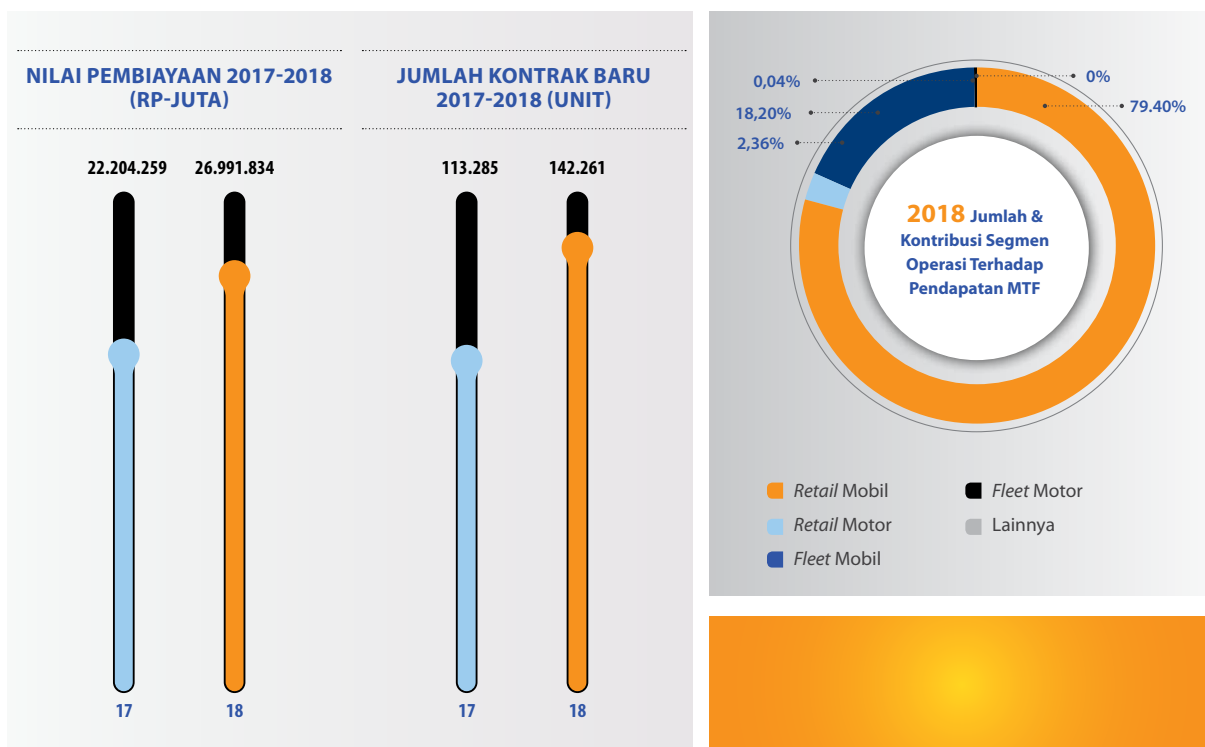
**STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2018**

Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, anjak piutang dan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan telah memiliki izin berdasarkan amandemen

terakhir dari Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP- 352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009. Keunggulan utama Perseroan terletak pada kekuatan finansial dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan jaringan *dealer* otomotif dari PT Tunas Ridean Tbk.

Namun demikian, Perseroan berupaya untuk mencari sumber pendanaan lainnya seperti penjualan Obligasi serta *Medium Term Notes*. Sejak tahun 2015, Perseroan telah menerbitkan 9 (sembilan) Obligasi; terakhir yaitu Obligasi Berkelanjutan III MTF Tahap II Seri A dan Seri B pada 6 Juni 2017 dengan total nilai Rp850 miliar. Demikian pula dengan jaringan *dealer*, Perseroan berupaya untuk terus melakukan ekspansi pasar. Per 31 Desember 2018, Nilai Pembiayaan Perseroan mencapai Rp26,99 triliun, meningkat Rp4,79 triliun atau 21,56% dari Nilai Pembiayaan tahun 2017 yang sebesar Rp22,20 triliun. Jumlah Kontrak Baru tahun 2018 sebesar 142.261 unit, meningkat 25,58% dari jumlah Kontrak Baru tahun 2017 yang sebesar 113.285 unit. Dari Nilai Pembiayaan dan Kontrak Baru tersebut, komposisi antara asal kontrak dari TURI/*Group* dan *Non Group* justru didominasi oleh *Non Group*, yang terlihat pada tabel di bawah ini.





Dalam menjalankan usahanya, Perseroan membagi segmen operasi berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk, yaitu *Fleet* dan *Retail*. Segmen *Retail* didapatkan dari pembiayaan konsumen untuk nasabah individu, sementara segmen *Fleet* didapatkan dari pembiayaan untuk nasabah korporasi. Masing-masing segmen memberikan pembiayaan untuk produk mobil dan motor. Dari sisi pendapatan, di tahun 2018 segmen *Retail* berkontribusi hingga 81,76% yang didapatkan dari pembiayaan produk mobil 79,40% dan produk

motor 2,36%. Sementara segmen *Fleet* berkontribusi sebesar 18,24% yang didapatkan dari pembiayaan produk mobil 18,20% dan produk motor 0,04%.

Dari persepektif industri, penjualan mobil baru tahun 2018 tumbuh 6,9%, di atas penjualan tahun 2017 yang hanya tumbuh 1,4%. Pertumbuhan ini mengindikasikan kompetisi yang cukup ketat pada jasa pembiayaan untuk produk mobil. Untuk itu, Perseroan merumuskan strategi besar untuk dapat menghadapi tantangan persaingan pasar.

## STRATEGI UTAMA MTF MENGHADAPI TANTANGAN PERSAINGAN PASAR

**SHIFTING  
HIGH MARGIN  
PRODUCT**

**PENINGKATAN  
SERVICE LEVEL  
AGREEMENT (SLA)**

**SINERGI DENGAN  
BANK MANDIRI  
GROUP**



Strategi *shifting to high margin product* dilakukan dengan upaya meningkatkan pangsa pasar serta diversifikasi bisnis pada produk dengan margin tinggi seperti multiguna dan Kredit Investasi/Kredit Modal Kerja (KI/KMK). Setelah diluncurkan pada tahun 2017, di tahun 2018 produk pembiayaan multiguna MTF melakukan perbaikan proses dan meningkatkan layanan bagi calon nasabah; salah satunya melalui terobosan dengan meluncurkan sistem keagenan untuk nasabah eksternal bernama WIRA. Untuk pembiayaan KI/KMK, Perseroan melihat potensi yang besar terutama untuk menjawab berbagai kebutuhan nasabah komersial melalui peluncuran produk seperti *dealer financing* dan anjak piutang.

Selain diversifikasi produk, Perseroan berupaya untuk meningkatkan *Service Level Agreement* (SLA) dengan menggunakan teknologi pada proses untuk

mempercepat SLA; dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk perluasan *channel* penjualan serta meningkatkan layanan nasabah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

Perseroan juga mewujudkan sinergi dalam Bank Mandiri Group melalui program referral Bank Mandiri untuk produk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan layanan segmen *Fleet*. Salah satu sinergi penting dalam Bank Mandiri Group dilakukan melalui kerjasama pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri OTO, dimana Perseroan bertindak sebagai *servicing agent* untuk melakukan proses survei kepada nasabah, membantu proses kredit dan membantu nasabah menghubungi *dealer*. Seluruh strategi tersebut tentunya didukung oleh enabler yaitu adanya perbaikan proses bisnis, perubahan model bisnis serta penyesuaian struktur organisasi yang menunjang eksekusi strategi yang telah dirancang.



## **Perusahaan menargetkan peningkatan pendapatan tahun 2019 mencapai 11,21% dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2018, yang terutama didapatkan dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan**

Seperti yang telah dijelaskan di atas, salah satu keunggulan Perseroan adalah faktor kekuatan *financing*, baik dukungan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku pemegang saham, maupun *financing* yang diupayakan secara mandiri oleh Perseroan.

Secara komposisi, total liabilitas dan ekuitas menunjukkan stabilitasnya. Hal ini mengindikasikan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan imbal hasil dan juga peningkatan laba tahun berjalan. Pengelolaan permodalan diperlukan sebagai bagian dari kelangsungan usaha Perseroan untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya modal (*cost of capital*).

Pada aspek pembiayaan, Perseroan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian. Setiap permohonan kredit harus melalui proses analisis kredit secara cermat dan berbagai tahapan persetujuan. Perseroan melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dengan lebih menitikberatkan prinsip kehati-hatian dan menjaga ketaatan konsumennya untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Komposisi piutang yang tergolong lancar terhadap total piutang per 31 Desember 2018 sebesar 94,44%, menunjukkan posisi terjaga bagi kesehatan keuangan Perseroan. Untuk tunggakan lebih dari 180 hari terjadi penurunan sebesar 28,18% dibandingkan tahun 2017, yang menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menurunkan tunggakan yang dapat menimbulkan piutang *non performing*.



Melalui berbagai strategi di atas, Perseroan mampu membukukan pendapatan tahun 2018 mencapai Rp3,12 triliun, meningkat Rp381,83 miliar atau 13,94% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp2,74 triliun. Peningkatan pendapatan ini terutama didapatkan dari pendapatan pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, yang masing-masing meningkat hingga Rp106,3 miliar dan Rp207,32 miliar dari tahun sebelumnya. Laba tahun berjalan mengalami peningkatan hingga 15,15% atau Rp53,08 miliar, dari Rp350,24 miliar di tahun 2017 menjadi Rp403,32 miliar di tahun 2018. Jumlah aset Perseroan tahun 2018 mencapai Rp17,48 triliun, meningkat 18,61% atau Rp2,74 triliun dibandingkan jumlah aset tahun 2017 yang sebesar Rp14,74 triliun. Kenaikan portofolio piutang pembiayaan konsumen seiring dengan meningkatnya volume pembiayaan konsumen mendorong peningkatan jumlah aset Perseroan.

## KENDALA, TANTANGAN, DAN SOLUSINYA

Tantangan terbesar dalam industri pembiayaan, khususnya pembiayaan bagi kendaraan bermotor adalah ketergantungan Perseroan pada tingkat penjualan kendaraan bermotor, yang umumnya sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian, suku bunga, serta kemampuan dan/atau kemauan konsumsi masyarakat khususnya untuk produk kendaraan bermotor. Di samping itu, ketatnya kompetisi pada sektor pembiayaan kendaraan bermotor turut menjadi tantangan tersendiri. Dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang relatif menunjukkan kestabilan, tentu akan sangat berpengaruh pada penjualan kendaraan bermotor di Indonesia.

Untuk itu, Perseroan berupaya untuk melakukan strategi *shifting to high margin product*. Seperti yang telah dijelaskan di atas, strategi ini ditempuh melalui diversifikasi bisnis pada produk dengan margin tinggi seperti pembiayaan multiguna dan KI/KMK. Strategi yang telah diinisiasi sejak tahun 2017 ini terbukti cukup berhasil mendorong ekspansi dan perkembangan bisnis Perseroan, seperti yang tercermin dari pendapatan Perseroan tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 yang meningkat hingga 13,94%. Perseroan akan terus berupaya melakukan hal-hal baru untuk dapat menopang pertumbuhan bisnis di masa-masa mendatang.

## PROSPEK USAHA 2019

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) memproyeksikan penjualan mobil baru tahun 2019 mencapai 1,1 juta kendaraan, tidak mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2018. Namun demikian, berdasarkan data OJK, industri pembiayaan tahun 2018 mengalami perbaikan *Non Performing Financing* (NPF) dan penurunan BOPO sebagai upaya perbaikan kualitas dan upaya efisiensi untuk menghadapi tantangan kenaikan sumber pembiayaan akibat kenaikan suku bunga FFR oleh *The Fed*. Perbaikan ini menghasilkan peningkatan ROA dan ROE untuk industri pembiayaan. Diluncurkannya Peraturan OJK tentang perusahaan pembiayaan terbaru yang memberikan lebih banyak ruang dan fleksibilitas untuk perusahaan pembiayaan seperti pembiayaan Fasilitas Dana dan perubahan ketentuan uang muka, Perseroan beryakinan hal ini akan menjadi stimulus peningkatan industri pembiayaan.

Perusahaan menargetkan peningkatan pendapatan tahun 2019 mencapai 11,21% dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2018, yang terutama didapatkan dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan. Laba tahun berjalan tahun 2019 diproyeksikan dapat tumbuh 9,12% dibandingkan realisasi laba tahun berjalan tahun 2018.

## PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Salah satu arahan utama dari pemegang saham Perseroan adalah penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG). Sebagai perusahaan pembiayaan yang tergolong dalam Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Perseroan diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan bisnis dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan GCG ini terutama didasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Salah satunya adalah Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, dimana Perseroan berupaya untuk menerapkan dan menyesuaikan perkembangan penerapan GCG di lingkup Perusahaan dengan peraturan tersebut. Pengelolaan risiko di lingkup Perseroan juga mengacu kepada Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Selain itu,

sebagai entitas anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Perseroan juga melakukan konsolidasi risiko dengan entitas induk sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 dan Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Melalui kepatuhan tersebut, penerapan manajemen risiko Perseroan merupakan pendekatan terpadu dan konsisten dalam melakukan penelaahan, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko terhadap seluruh komponen kelompok Perseroan. Perkembangan konsolidasi ini secara berkala telah dikomunikasikan Bank Mandiri kepada regulator. Struktur GCG Perseroan telah dikembangkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dengan proses atau mekanisme GCG sebagai aturan main yang memberikan definisi secara jelas tentang tugas, peran dan fungsi masing-masing organ dalam struktur GCG. Perseroan juga melakukan evaluasi dan pemantauan hasil penerapan GCG melalui *assessment* atau penilaian penerapan GCG. Perseroan melaksanakan 2 (dua) bentuk penilaian, yaitu penilaian yang dilakukan secara internal maupun secara eksternal.

Penilaian internal tahun 2018 dilakukan dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015, serta Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014, juga Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05/2016. Untuk penilaian berdasarkan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015, Perseroan memperoleh skor 1,32 dengan predikat "Sangat Baik". Sementara untuk penilaian berdasarkan Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014, juga Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05/2016, Perseroan memperoleh skor 99,32 dengan predikat yang juga "Sangat Baik".

Penilaian eksternal dilakukan oleh The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) dalam ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI). Metode dan aspek penilaian terdiri dari 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan analisis dan observasi. Hasil penilaian CGPI menunjukkan skor sebesar 79,80 dan menempatkan Perseroan berada dalam

kelompok perusahaan “Terpercaya”.

Manajemen Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan level penerapan prinsip GCG, terutama kesadaran seluruh insan MTF untuk secara sadar mewujudkan *Good Corporate Citizen*.

## PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Di sepanjang tahun 2018 terdapat pergantian keanggotaan Direksi, sesuai keputusan RUPS Tahunan 2018 tanggal 9 Maret 2018. Berikut disampaikan kronologis susunan Direksi di sepanjang tahun 2018.

### KRONOLOGIS SUSUNAN DIREKSI DI SEPANJANG TAHUN 2018

1 Januari - 9 Maret 2018	9 Maret - 31 Desember 2018	Keterangan
Ignatius Susatyo Wijoyo (Direktur Utama)		Ignatius Susatyo Wijoyo tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi sejak RUPS Tahunan 9 Maret 2018
Arya Suprihadi (Direktur)	Arya Suprihadi (Direktur Utama)	Melalui RUPS Tahunan 9 Maret 2018, Arya Suprihadi diangkat menjadi Direktur Utama
Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)	Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)	-
	Armendra (Direktur)	Armendra duduk dalam jajaran Direksi sejak RUPS Tahunan 9 Maret 2018

Dengan demikian, susunan Direksi per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

### SUSUNAN DIREKSI PER 31 DESEMBER 2018

Nama	Jabatan	Masa Jabatan
Arya Suprihadi	Direktur Utama	RUPS Tahun 2018 - RUPS Tahun 2021
Harjanto Tjitohardjojo	Direktur	RUPS Tahun 2018 - RUPS Tahun 2021
Armendra	Direktur	RUPS Tahun 2018 - RUPS Tahun 2021

Tentang pergantian dan perubahan susunan kepengurusan Perseroan sepenuhnya menjadi hak dari pemegang saham.

## AKHIR KATA

PERFORMA 2018

**LAPORAN MANAJEMEN**

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Direksi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya selaku representasi pemegang saham atas arahan, nasihat dan pengawasan yang telah dilakukan. Kepada seluruh karyawan, izinkan Direksi menyampaikan apresiasinya atas seluruh dedikasi yang telah diberikan. Demikian

pula kepada mitra kerja, Direksi menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah tercipta. Semoga semangat kebersamaan ini menjadi fondasi bagi Perusahaan untuk dapat tumbuh di masa yang akan datang.

Atas nama Direksi  
Jakarta, Maret 2019



**Arya Suprihadi**  
Direktur Utama

## DIREKSI



**1** **ARYA SUPRIHADI**  
Direktur Utama

**2** **HARJANTO  
TJITOHARDJOJO**  
Direktur

**3** **ARMENDRA**  
Direktur

**4** **ALBERTUS  
HENDITRIANTO**  
Deputy Direktur

**5** **BONIFATIUS PERANA  
CITRA KETAREN**  
Deputy Direktur

**6** **WILLIAM FRANCIS  
INDRA**  
Deputy Direktur



---

# Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2018 PT Mandiri Tunas Finance

---

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Mandiri Tunas Finance tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Maret 2019

## Dewan Komisaris



**RICO ADISURJA SETIAWAN**  
Komisaris Utama



**HARRY GALE**  
Komisaris



**RAVIK KARSIDI**  
Komisaris Independen

## Direksi



**ARYA SUPRIHADI**  
Direktur Utama



**ARMENDRA**  
Direktur



**HARJANTO TJITOHARDJOJO**  
Direktur

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

A high-angle photograph of a business meeting. Several people in dark suits are gathered around a light-colored wooden table. A silver laptop is open, and a hand is pointing at its screen. In the foreground, a hand holds a tablet displaying a financial chart with various data points. A brown leather notebook is also visible on the table. The overall scene is professional and collaborative.

**TO BE THE MOST PROGRESSIVE AND  
RELIABLE *MULTIFINANCE* IN INDONESIA**





# PROFIL PERUSAHAAN

Identitas Perusahaan	66
Riwayat Singkat Perusahaan	68
Bidang Usaha	72
Peta Wilayah Operasional	74
Struktur Organisasi	76
Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perusahaan	78
Makna Logo Perusahaan	80
Profil Dewan Komisaris	81
Profil Direksi	87
Demografi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi	96
Komposisi Pemegang Saham	102
Komposisi Kepemilikan Saham Mandiri Tunas Finance	102
Informasi Tentang Pemegang Saham Utama dan/ atau Pemegang Saham Pengendali Hingga Nama Pemilik Akhir	103
Struktur Kepemilikan Saham Hingga Nama Pemilik Akhir	104
Informasi tentang Entitas Anak, Entitas Asosiasi Serta <i>Joint Venture (JV)</i> dan <i>Special Purpose Vehicle (SPV)</i>	109
Struktur Grup Mandiri Tunas Finance	109
Informasi Tentang Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham	110
Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Obligasi dan/ atau Efek Lainnya	110
Lembaga dan Profesi Penunjang	118
Penghargaan dan Sertifikasi	120
Daftar Alamat Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan, Serta Informasi Terkait Entitas Anak	124
Informasi Pada Situs Web Perusahaan	131
Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal	134



## IDENTITAS PERUSAHAAN

<b>Nama Perusahaan</b>	PT Mandiri Tunas Finance
<b>Tanggal Pendirian</b>	17 Mei 1989 (dengan nama PT Tunas Financindo Corporation)
<b>Cikal Bakal Beroperasi Komersial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Tunas Financindo Corporation (1989)</li> <li>• PT Tunas Financindo Sarana (2000)</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Pendirian</b>	Akta No. 262 tanggal 17 Mei 1989 dari Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-4868.HT.01.01.TH.89 tanggal 1 Juni 1989 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 57, Tambahan No. 1369 tanggal 18 Juli 1989
<b>Status Hukum</b>	Perseroan Terbatas (PT), Emiten
<b>Kegiatan Usaha</b>	Pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
<b>Produk dan Jasa</b>	Pembiayaan kendaraan bermotor kepada <i>retail</i> dan perusahaan meliputi mobil baru, motor besar, kendaraan niaga dan alat-alat berat serta pembiayaan multiguna
<b>Status Perusahaan</b>	Anak Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Tunas Ridean Tbk
<b>Kepemilikan Saham</b>	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (51%) PT Tunas Ridean Tbk (49%)
<b>Modal Dasar</b>	Rp 1.000.000.000.000
<b>Modal Ditempatkan</b>	Rp 250.000.000.000
<b>Bursa Pencatatan Obligasi</b>	Bursa Efek Indonesia
<b>Kode Efek</b>	TUFI
<b>Tanggal Pencatatan Obligasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Seri B tahun 2014: 23 Mei 2014</li> <li>• Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III tahun 2015: 9 Juni 2015</li> <li>• Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I tahun 2015: 18 Desember 2015</li> <li>• Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II tahun 2016: 1 Juni 2016</li> <li>• Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I tahun 2016: 7 Oktober 2016</li> <li>• Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II tahun 2017: 6 Juni 2017</li> </ul>

PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

**PROFIL PERUSAHAAN**

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

<b>Rating Obligasi dan Rating Perusahaan</b>	<b>Pefindo</b> - Rating Obligasi: idAA+ (Double A+) - Rating Perusahaan (Nasional): id AA+ ( <i>Double A+; Stable Outlook</i> )  <b>Fitch Rating</b> - Rating Perusahaan (Nasional): AA (idn); Stable Outlook
<b>Jumlah Karyawan</b>	3.448 orang (2018)
<b>Jaringan Usaha</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 102 Kantor Cabang</li> <li>• 20 Kantor Satelit</li> </ul>
<b>Mobile Application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MTF Go</li> <li>• MTF Mobile</li> <li>• MTF Lelang</li> </ul>
<b>Alamat</b>	Graha Mandiri Lt. 3A Jl. Imam Bonjol No.61 Menteng, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10310, Indonesia
<b>Telepon</b>	+61 21 230 5608
<b>Faksimili</b>	+61 21 230 5618
<b>Surel</b>	corporate.secretary@mtf.co.id
<b>Situs Web</b>	www.mtf.co.id
<b>Kontak Perusahaan</b>	<b>Corporate Secretary</b> <b>Arif Reza Fahlepi</b> Tel.: +62 21 230 5608 Fax.: +62 21 230 5618 Email: corporate.secretary@mtf.co.id
<b>Layanan Pelanggan</b>	Surel : <i>customer.service@mtf.co.id</i> Care Center : 15000-59 Jam Operasional : Senin-Jumat Pk. 08.00-17.00 WIB
<b>Jaringan Media Sosial</b>	Facebook Fanpage : MTFAutoLoan Twitter : @MTF_AutoLoan Youtube : MTF AutoLoan Instagram : @mtf_autoLoan Google Plus : MTF AutoLoan Whatsapp : 08111766935 Linkedin : Mandiri Tunas Finance

## RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN



### PERJALANAN MTF SEJAK BERDIRI

Rekam jejak PT Mandiri Tunas Finance, disebut juga “Perseroan” atau “MTF”, dimulai pada tahun 1989 melalui pendirian PT Tunas Financindo Corporation sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Tunas Financindo Corporation No. 262 tanggal 17 Mei 1989 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-4868.HT.01.01. TH'89 tanggal 01 Juni 1989 serta telah didaftarkan di dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1206/1989 tanggal 21 Juni 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57, tanggal 18 Juli

1989, Tambahan No.1369.

Pada awal mula didirikan, Perseroan bergerak di bidang usaha pemberian fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor yang awalnya dikhususkan bagi konsumen dari jaringan *Dealer* yang dimiliki oleh Grup Tunas Ridean. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan portofolio bisnis, PT Tunas Financindo Corporation melakukan pergantian nama di tahun 2000 menjadi PT Tunas Financindo Sarana. Sejak pendirian awal hingga tahun 2009, kepemilikan saham Perseroan dimiliki oleh PT Tunas Ridean Tbk yang saat ini merupakan grup otomotif independen terbesar dengan lebih dari 100 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di tahun 2009, Perseroan mengambil langkah strategis dalam rangka pengembangan usaha

PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

**PROFIL PERUSAHAAN**

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

memperluas jangkauan pasar serta memperkuat struktur permodalan agar mampu mengoptimalkan potensi untuk bersaing di industri pembiayaan otomotif Indonesia. Langkah yang dilakukan adalah dengan diakuisisinya Perseroan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perbankan dengan jaringan usaha yang luas dan nasabah yang besar. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan akuisisi sebesar 51,00% saham dari Grup Tunas Ridean serta mengubah nama Perseroan menjadi PT Mandiri Tunas Finance yang diikuti dengan perubahan logo Perusahaan. Dengan akuisisi tersebut, persentase saham PT Tunas Ridean Tbk menjadi sebesar 49,00%. Dengan perubahan tersebut serta hadirnya 2 (dua) entitas bisnis besar di industri otomotif serta perbankan dan jasa keuangan, Perseroan dituntut untuk selalu tumbuh secara progresif dan berkelanjutan serta menjadi perusahaan pembiayaan yang terpercaya di Indonesia dan mampu menjadi pemimpin pasar di segmennya.

Dengan perubahan tersebut, Perseroan melakukan akselerasi bisnis dengan melakukan pengembangan-pengembangan yang dibutuhkan. Upaya ini mencapai hasil yang luar biasa dengan pertumbuhan jumlah kantor cabang yang semula tercatat sebanyak 33 kantor cabang menjadi 99 kantor cabang serta 20 kantor satelit yang tersebar di 28 provinsi di seluruh Indonesia di akhir tahun 2018.

Perkembangan ini tidak lepas dari konsistensi kinerja yang tetap fokus pada industri pembiayaan di sektor otomotif dan multiguna. Di segmen pembiayaan otomotif, Perseroan menghadirkan pembiayaan untuk mobil baru, motor besar, kendaraan niaga serta alat-alat berat. Dalam

menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 guna menciptakan industri pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif serta berperan dalam menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan Perseroan menghadirkan ragam pembiayaan lainnya yaitu pembiayaan multiguna di sektor pendidikan.

Selain memanfaatkan sumber pendanaan dari perbankan dalam rangka pengembangan usaha, Perseroan juga menerbitkan dan mencatatkan Obligasi. Historis penerbitan obligasi Perseroan dimulai dari Obligasi I hingga tahun 2011 yang saat itu dicatatkan di Bursa Efek Surabaya sebelum akhirnya melebur dengan Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia. Perseroan melakukan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia hingga Obligasi VI. Kemudian Perseroan juga melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tahap II tahun 2015, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015, dan II Tahap II Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016, serta Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II tahun 2017: 6 Juni 2017.

Dengan upaya serta kerja keras yang dilakukan Perseroan selama ini, pada akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan. Hal tersebut tercermin dari hasil pemeringkatan Perseroan, di mana pada tahun 2003 PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idBBB+ (triple B plus) hingga menjadi idAA (double A) di tahun 2012. Kemudian Pefindo menetapkan kembali *rating* idAA (double A) pada tahun 2013, 2014,

2015 dan pada akhir tahun 2016 Perseroan mampu meningkatkan *rating* menjadi idAA+ (*double A Plus*). Rating efek yang baik ini Perseroan harapkan dapat menekan biaya bunga yang berdampak pada strategi pengelolaan keuangan Perseroan yang menjadi lebih efisien sehingga dapat memacu kinerja usaha secara optimal.

Dengan memberikan fasilitas serta solusi pembiayaan mudah, inovatif dan kompetitif bagi para konsumen dalam membantu mewujudkan impian memiliki mobil baru, motor besar, pemenuhan kendaraan niaga maupun alat berat dalam mendukung kegiatan bisnis, pembiayaan dan sewa guna usaha serta mutiguna pendidikan, Perseroan tetap menomorsatukan pelayanan terhadap konsumen dalam hal memberi kemudahan apalagi didukung oleh kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan sumber daya manusia yang berkualitas serta fasilitas infrastruktur yang memadai.

## **PERUSAHAAN PEMBIAYAAN OTOMOTIF BERORIENTASI KEPADA PEMENUHAN KREDIT MASYARAKAT**

Mengusung visi "*To Be The Most Progressive and Reliable Multifinance in Indonesia*", Perseroan berupaya untuk memahami kebutuhan masyarakat terkait aspek pembiayaan dengan tidak hanya menghadirkan ragam produk pembiayaan namun juga dapat memberikan nilai tambah agar proses-proses yang ada dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu, aspek keterjangkauan juga terus kami perhatikan dengan melakukan perluasan area bisnis di seluruh

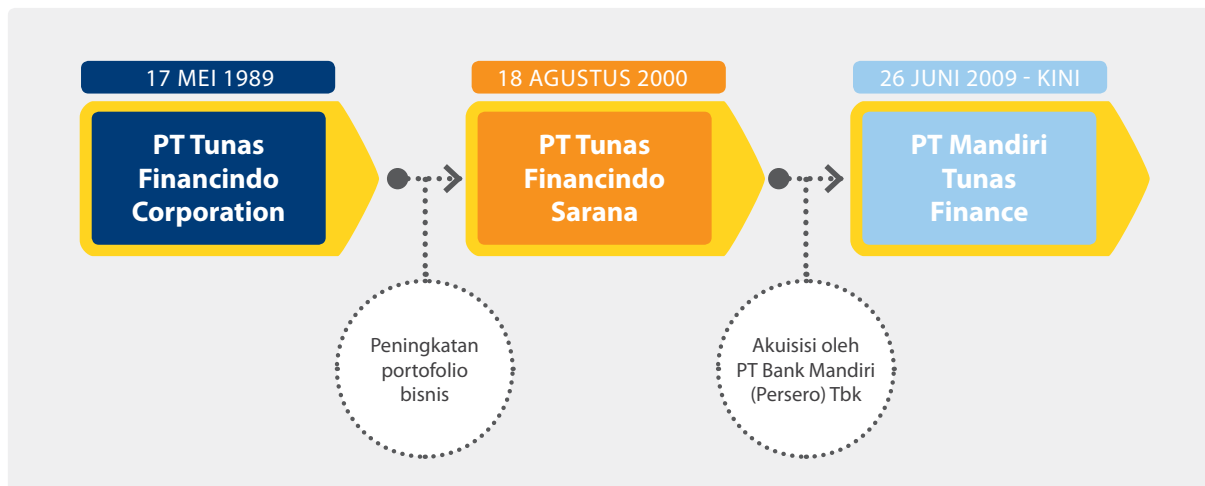
Indonesia. Dengan demografis masyarakat Indonesia yang masih mengedepankan sektor komoditas dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perseroan dapat masuk dalam rangka memenuhi kebutuhan terkait modernisasi kendaraan maupun alat berat produksi dalam menunjang aktivitas niaga, sewa guna usaha dan kebutuhan lainnya. Hal tersebut menjadi potensi yang harus dimaksimalkan secara baik oleh Perseroan agar dapat menciptakan sinergi yang baik bagi aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia.

## **KINERJA TERBAIK**

Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai target kinerja terbaik. Untuk itu Perseroan melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan dan membentuk sumber daya manusia terbaik, antara lain dengan menyelenggarakan program *Management Development Program* (MDP) dan *Management Trainee*, program ini merupakan program pendidikan dan pelatihan untuk menjangkau kandidat terbaik di internal Perseroan serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk menjadi *Future Leaders* Perseroan yang memiliki loyalitas tinggi serta kapabilitas yang diharapkan. Selain itu, Perseroan juga melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan sistem serta prosedur operasional, menjunjung tinggi budaya Perwira Perseroan, meningkatkan kualitas kredit untuk menurunkan Non Performing Loan (NPL) serta melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir *fraud*.



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
<b>PROFIL PERUSAHAAN</b>
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



## KINERJA TERBESAR DAN TERPERCAYA

Perseroan secara berkelanjutan terus meningkatkan dan memperluas kerja sama dengan seluruh Agen Pemegang Merek (APM) kendaraan bermotor dan jaringan *dealer* serta *showroom* di seluruh wilayah kantor pemasaran Perseroan untuk meningkatkan pangsa pasar. Saat ini, Perseroan telah bekerja sama dengan hampir seluruh APM sehingga Perseroan dapat membiayai seluruh merek kendaraan yang dibutuhkan oleh konsumen. Hal ini membuktikan tingkat kepercayaan APM dan *dealer* yang sangat tinggi kepada Perseroan. Dengan adanya kerja sama tersebut, Perseroan dapat lebih banyak memberikan berbagai pilihan jenis kendaraan bermotor kepada konsumen serta mempermudah penetrasi pasar di berbagai wilayah kantor pemasaran Perseroan.

## INFORMASI PERUBAHAN NAMA

Seperti yang telah diuraikan di atas, Perseroan resmi berdiri pada tanggal 17 Mei 1989 dengan nama PT Tunas Financindo Corporation. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan portofolio bisnis, PT Tunas Financindo Corporation melakukan pergantian nama di tahun 2000 menjadi PT Tunas Financindo Sarana. Di tahun 2009, Grup Tunas Ridean sebagai pendiri memutuskan untuk memperluas jangkauan pasar serta memperkuat struktur permodalan dengan diakuisisinya Perseroan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan akuisisi saham Perseroan sebesar 51,00%; sisanya sebesar 49,00% tetap dimiliki oleh PT Tunas Ridean Tbk.

## BIDANG USAHA

---



### KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir mengalami perubahan dengan Akta No. 23 tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan pendirian Perseroan adalah berusaha dalam bidang lembaga pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.1021/KMK.13/1989 tanggal 7 September 1989 kemudian diperbaharui oleh Surat Keputusan No. 54/KMK-013/1992 tanggal 15 Januari 1992 lalu No. 19/KMK.017/2001 tanggal 19 Januari 2001 dan terakhir diubah dengan No. KEP-352/ KM.10/2009 tanggal 29 September 2009. Saat ini, Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna dan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

## KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN SERTA PRODUK DAN JASA

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 (Revisi 2009) tentang “Segmen Operasi”, segmen usaha Perseroan dikelompokkan berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk, yaitu *Fleet* dan *Retail*, serta segmen lainnya sebagai perhitungan yang tidak dapat dialokasikan ke dalam kedua segmen tersebut.

### SEGMENT USAHA MANDIRI TUNAS FINANCE

#### RETAIL



Mobil



Motor

#### PEMBIAYAAN RETAIL

Pembiayaan *Customer Retail* adalah pembiayaan kepada *Customer* yang mengajukan pembiayaan lewat kantor Cabang MTF melalui menu *Credit Scoring*. Pembiayaan *retail* ini diberikan kepada Target Market untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor dalam kondisi baru atau bekas. Dalam pembiayaan *retail* ketentuan Biaya Administrasi dan Asuransi dibebankan kepada *Customer*, besar bebannya tergantung dari jangka waktu pembiayaan dan ditetapkan terpisah dalam Produk/Paket Pembiayaan yang disediakan. Selama masa pembiayaan diasuransikan ke Perusahaan Asuransi Rekanan MTF.

#### FLEET



Mobil



Motor

#### PEMBIAYAAN FLEET

Pembiayaan *Customer Fleet* adalah pembiayaan kepada *Customer* yang dikelola oleh Divisi *Corporate Fleet*, yang merupakan pemberian Batas Pemberian Pembiayaan (BPP) kepada 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) kelompok Obligor baik badan usaha maupun perseorangan. Terkait badan usaha ketentuan nilai pembiayaan sama dengan atau di atas Rp5 miliar. Pembiayaan *Fleet* terbagi menjadi 2 (dua) buku yaitu Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja.

- **Pembiayaan modal** kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha *Customer*, dengan cara menyediakan batas pembiayaan kepada *Customer* yang bersifat *committed* dan *advised*.
- **Pembiayaan investasi** adalah pembiayaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada Debitur.

#### LAINNYA



**“Hingga akhir tahun 2018, Mandiri Tunas Finance memiliki 102 kantor cabang dan 20 kantor satelit yang beroperasi di 28 Provinsi di Indonesia.”**

## PETA WILAYAH OPERASIONAL

### 1 SUMATERA

- Banda Aceh
- Medan
- Rantau Prapat
- Padang
- Bukittinggi
- Pekanbaru
- Duri
- Rokan Hulu
- Muara Bungo
- Batam
- Tanjung Pinang
- Bengkulu
- Palembang 1
- Palembang 2
- Lubuk Linggau
- Jambi
- Lampung
- Tulang Bawang
- Tanggamus
- Bandar Jaya
- Pangkal Pinang
- Batu Raja

### 3 BALI & NUSA TENGGARA BARAT

- Denpasar
- Gianyar
- Mataram
- Ketapang

### 4 NUSA TENGGARA TIMUR

- Kupang

### 5 KALIMANTAN

- Pontianak
- Banjarmasin
- Banjarbaru
- Palangkaraya
- Samarinda
- Balikpapan
- Tarakan
- Bontang
- Sintang
- Sampit

### 6 SULAWESI

- Makassar 1
- Parepare
- Kendari
- Manado
- Palu
- Gorontalo
- Kotamobagu
- Mamuju
- Makassar 2
- Luwuk

### 2 JAWA

- Pecenongan
- Kelapa Gading
- Matraman
- Tanjung Duren
- Fatmawati
- Kebon Jeruk
- Duren Tiga
- Lebak Bulus
- Kemayoran
- Pondok Gede
- Cilegon
- Serang
- Serpong (BSD)
- Tangerang I
- Bintaro
- Rangkasbitung
- Bekasi
- Cikarang
- Karawang
- Depok
- Bogor
- Cibubur
- Cibinong
- Sukabumi
- Bandung 1
- Bandung 2
- Bandung 3
- Tasikmalaya
- Cirebon
- Garut
- Subang
- Tegall
- Purwokerto
- Semarang
- Solo
- Kudus
- Magelang
- Pekalongan
- Yogyakarta
- Surabaya 1
- Surabaya 2
- Malang
- Kediri
- Jember
- Madiun
- Tuban
- Mojokerto
- Gresik

### 7 AMBON

- Ambon

### 8 JAYAPURA

- Jayapura
- Sorong



PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

**PROFIL PERUSAHAAN**

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

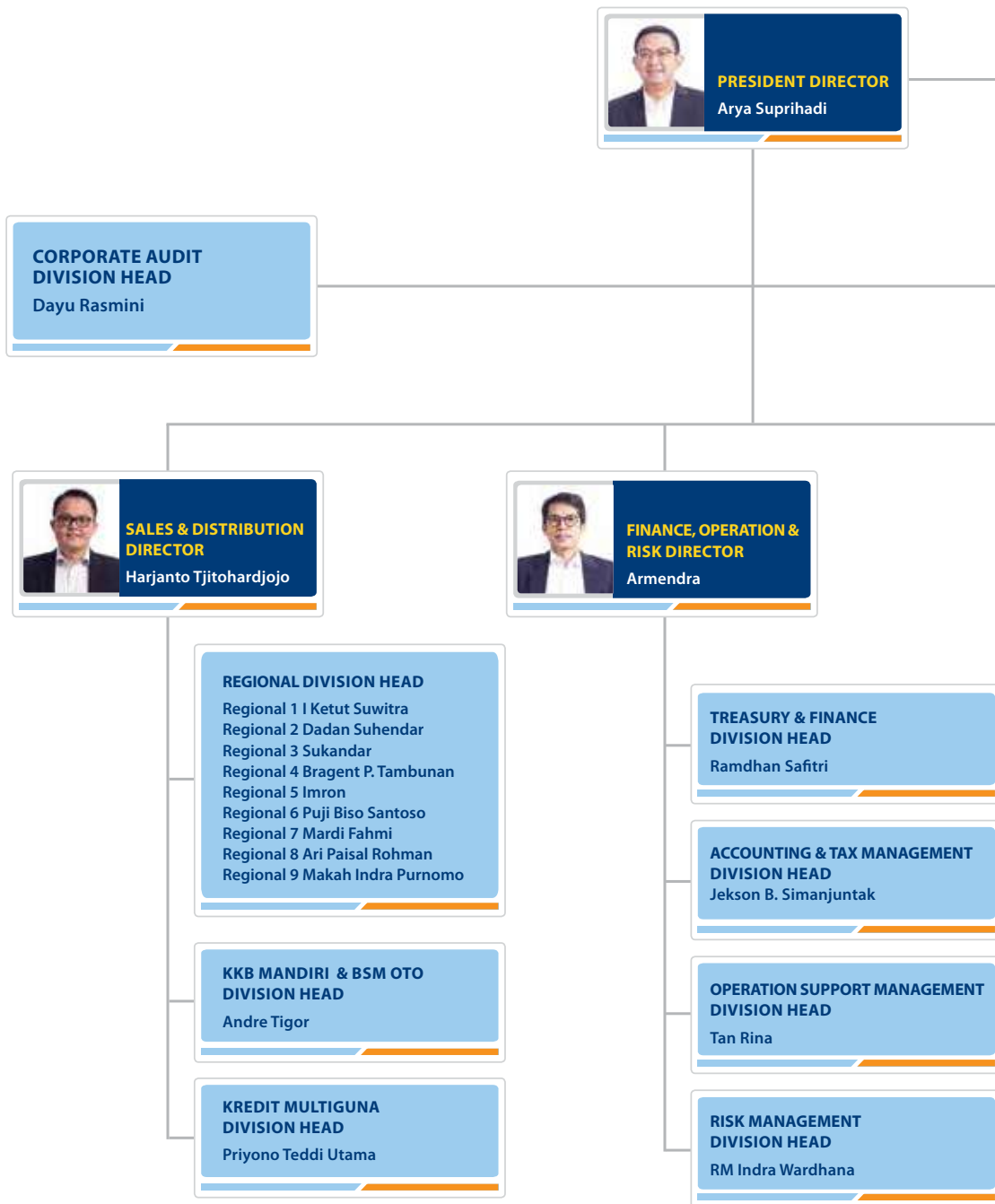
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN





# STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Perseroan telah disahkan melalui SK No.002/SK-DIR/MTF/I/2018 tentang Struktur Organisasi PT Mandiri Tunas Finance yang ditetapkan tanggal 22 Januari 2018. Berikut struktur organisasi Perseroan per 31 Desember 2018.



PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

**PROFIL PERUSAHAAN**

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

**CORPORATE SECRETARY & LEGAL  
COMPLIANCE DIVISION HEAD**

Arif Reza Fahlepi

**UKPN**

Vacant

**MARKETING  
DEPUTY DIRECTOR**

Albertus Hendrianto

**CREDIT, AR &  
RECOVERY DEPUTY  
DIRECTOR**

Bonifatius Perana  
Citra Ketaren

**IT, STRATEGIC BUSINESS  
INITIATIVE, HC & GA  
DEPUTY DIRECTOR**

William Francis Indra

**MARKETING  
DIVISION HEAD**

Wawan Yuliyanto

**STRATEGIC MARKETING  
DIVISION HEAD**

Afri Feder Fauzi

**CORPORATE FLEET  
DIVISION HEAD**

Julius Subagyo

**CREDIT MANAGEMENT  
DIVISION HEAD**

Ivan Ferdinand Thanta

**AR MANAGEMENT  
DIVISION HEAD**

A Tatep Fathurohman

**RECOVERY MANAGEMENT  
DIVISION HEAD**

Laurensius Purba

**HUMAN CAPITAL  
DIVISION HEAD**

Vivid Zulprimiadhanni

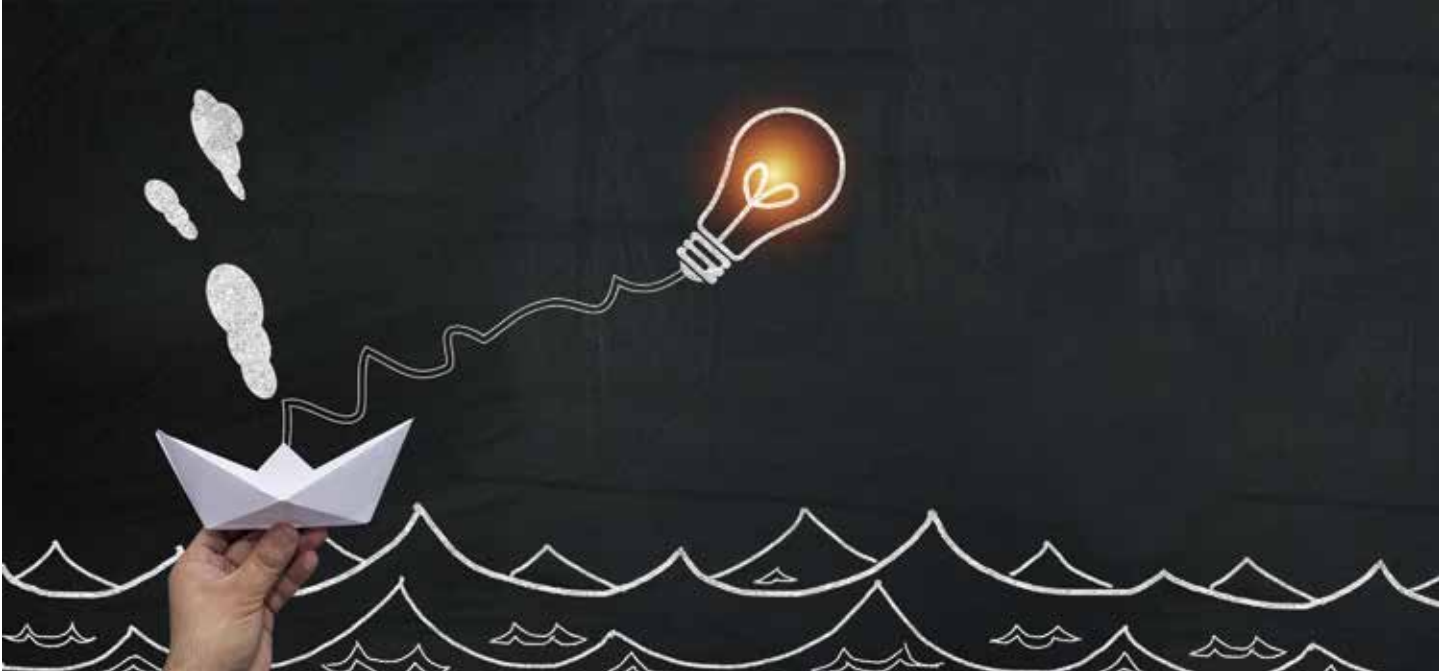
**STRATEGIC BUSINESS INITIATIVE  
DIVISION HEAD**

Citra Judith Lupitadevi

**INFORMATION TECHNOLOGY  
DIVISION HEAD**

Kanda Oktaviano

## VISI, MISI, NILAI DAN BUDAYA PERUSAHAAN



# Misi

- **Berorientasi kepada Pemenuhan Kebutuhan kredit masyarakat untuk mensejahterakan bangsa**
- **Memberi keuntungan dan manfaat optimal bagi stakeholder**
- **Membangun sumber daya manusia yang profesional dan pantang menyerah melalui budaya kerja PERWIRA**
- **Menjadi institusi yang menyenangkan dan membanggakan dalam berkarya meraih prestasi terbaik.**

# Visi

*To Be The Most Progressive and  
Reliable Multifinance in Indonesia*

## Nilai Perusahaan

Budaya Kerja Perseroan yang selalu dijunjung tinggi oleh seluruh karyawan adalah PERWIRA, yang merupakan singkatan dari Kepercayaan, Kewirausahaan dan Kegembiraan yang merupakan 3 (tiga) nilai-nilai dasar yang didalamnya mengandung 9 (sembilan) perilaku utama yang harus diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan oleh setiap karyawan.

### KEPERCAYAAN

Setiap karyawan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai:

- Jujur dan dapat dipercaya
- Bertanggung Jawab
- Berkomitmen

### KEWIRAUSAHAAN

Setiap karyawan wajib mempunyai:

- Rasa Memiliki
- Profesionalisme
- Fokus Kepada Pelanggan

### KEGEMBIRAAAN

Setiap karyawan harus bekerja:

- Antusias, ulet, dan pantang menyerah
- Bersinergi
- Gembira

Budaya PERWIRA dirumuskan dan dikukuhkan sebagai budaya kerja Perseroan pada 11 Desember 2009 di Bandung. Perseroan senantiasa menekankan kepada setiap karyawan untuk konsisten dalam memegang teguh dan mengimplementasikan budaya Perusahaan yaitu budaya kerja PERWIRA dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Budaya kerja PERWIRA pada awalnya dirumuskan sendiri oleh karyawan dan kemudian diterima oleh Perseroan sebagai budaya kerja yang menjadi pedoman berpikir dan berperilaku bagi setiap karyawan.

## MAKNA LOGO PERUSAHAAN

Identitas *brand* Mandiri Tunas Finance terdiri dari simbol, huruf logo, warna dan *tagline*. Secara sederhana masing-masing *items* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1

### BENTUK GELOMBANG EMAS CAIR

Sebagai simbol dari kekayaan finansial di Asia yang mengedepankan sifat *agile*, progresif, berpandangan ke depan, *excellence*, *flexible* serta tangguh menghadapi segala tantangan yang akan di hadapi di masa mendatang.

2

### KUNING EMAS (KUNING KE ARAH ORANYE)

Warga logam mulia yang menandakan keagungan, kemuliaan, kemakmuran, dan kekayaan Melambangkan keaktifan, kreatif, meriah, ramah, menyenangkan dan nyaman.



**mandiri**  
tunas finance

4

### HURUF BIRU TUA

Melambangkan rasa nyaman, tenang, menyejukkan, Warisan luhur, stabilitas, serius (*respect*) dan tahan uji (*reliable*). Menyimbolkan profesionalisme, pondasi yang kuat, setia, dapat dipercaya dan memiliki kehormatan yang tinggi.

3

### BENTUK LOGO DENGAN HURUF KECIL

Penggunaan huruf kecil menandakan sikap ramah terhadap semua segmen bisnis yang dimasuki oleh Bank Mandiri dan menunjukkan keinginan yang besar untuk melayani seluruh nasabah dengan rendah hati (*customer focus*).



PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

**PROFIL PERUSAHAAN**

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## PROFIL DEWAN KOMISARIS



### **RICO ADISURJA SETIAWAN**

Komisaris Utama

#### **PERIODE JABATAN**

26 April 2017 - RUPST 2020, Periode Pertama

#### **DATA PRIBADI**

Warga negara Indonesia

Kelahiran Jakarta, 2 Agustus 1971 (47 tahun)

#### **DOMISILI**

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

#### **RIWAYAT PENUNJUKAN**

Pengangkatan dalam jajaran Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 April 2017 yang telah dilembagakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance No. 23 tanggal 26 April 2017 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mandiri Tunas Finance No. AHU-AH.01.03-0132306 tanggal 02 Mei 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0056462.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 02 Mei 2017.

#### **PENDIDIKAN**

*Bachelor of Science* - University of Southern California (1992), *Master* - School of Business Administration, Woodbury University (1994)

### PENGALAMAN KERJA

*Management Consultant* Prasetio Utomo Arthur Andersen (1995 – 1996), Direktur TURI (1996 – 1998), Direktur PT Tunas Financindo Corp (1995 – 1999), Direktur Provisions (Asia) Trading Singapore (1998 – 2001), Komisaris PT Tunas Dwipa Matra (1997 – 2010), Direktur Utama PT Tunas Andalan Pratama (1998 – 2010), Direktur PT Tunas Financindo Sarana (2000 - 2005), Komisaris PT Tunas Financindo Sarana (2005 - 2009), Direktur TURI (2001 - 2010), Direktur PT Tunas Dwipa Matra (2005 – 2013), Direktur Utama PT Tunas Mobilindo Parama (1997 – sekarang), Direktur Utama PT Tunas Mobilindo Perkasa (2017 – sekarang), Direktur Utama PT Tunas Asset Sarana (2005 – sekarang), Direktur Utama PT Surya Mobil Megahtama (2005 – sekarang), Direktur PT Surya Sudeco (2005– sekarang), Direktur Utama TURI (2010 – sekarang), Komisaris PT Rahardja Ekalancar (2010 – sekarang), Komisaris Utama PT Tunas Dwipa Matra (2013 - sekarang), Komisaris Utama PT Asia Surya Perkasa (2015 – sekarang), Komisaris PT Mandiri Utama Finance (2015 - Januari 2017).

### SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2018

Mengikuti program *workshop* “Peningkatan Kompetensi Melalui Edukasi Terkait Perencanaan Keuangan” yang diselenggarakan oleh OJK pada 8 November 2018, serta “Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Tahun 2019”

yang diselenggarakan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) pada 15 November 2018.

### RANGKAP JABATAN

Direktur Utama PT Tunas Mobilindo Parama (1997 – sekarang), Direktur Utama PT Tunas Mobilindo Perkasa (2017 – sekarang), Direktur Utama PT Tunas Asset Sarana (2005 – sekarang), Direktur Utama PT Surya Mobil Megahtama (2005 – sekarang), Direktur PT Surya Sudeco (2005– sekarang), Direktur Utama TURI (2010 – sekarang), Komisaris PT Rahardja Ekalancar (2010 – sekarang), Komisaris Utama PT Tunas Dwipa Matra (2013 - sekarang), Komisaris Utama PT Asia Surya Perkasa (2015 – sekarang).

### HUBUNGAN AFILIASI

Rico Adisurja Setiawan tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan pemegang saham utama

### KEPEMILIKAN SAHAM MTF

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan.

PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

**PROFIL PERUSAHAAN**

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



## **RAVIK KARSIDI**

Komisaris Independen

### **PERIODE JABATAN**

26 April 2017 - RUPST 2020, Periode Pertama

### **DATA PRIBADI**

Warga negara Indonesia

Kelahiran Sragen, 7 Juli 1957 (61 tahun)

### **DOMISILI**

Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

### **RIWAYAT PENUNJUKAN**

Pengangkatan dalam jajaran Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 April 2017 yang telah dilembagakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance No. 23 tanggal 26 April 2017 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mandiri Tunas Finance No. AHU-AH.01.03-0132306 tanggal 02 Mei 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0056462.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 02 Mei 2017.

### **PENDIDIKAN**

S1 jurusan Ilmu Pendidikan di Universitas Sebelas Maret Surakarta (1980), S2 Magister Sains jurusan Prodi Sosiologi Pedesaan untuk Studi Pembangunan di Institut Pertanian Bogor (1994), S3 Doktor jurusan Prodi Ilmu Penyuluhan Pembangunan di Institut Pertanian Bogor (1999).

#### **PENGALAMAN KERJA**

Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru PTN se Indonesia (SNMPTN&SBMPTN) (2017-sekarang), Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) (2011-sekarang), Sebagai Asesor Program studi dan institusi Perguruan Tinggi di BANPT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) (2003-sekarang), Staf Pengajar Pascasarjana UNS (2001-sekarang), *Deputy Tim Leader/Social and Training Specialist* di Proyek Kredit Mikro, Bank Indonesia Jakarta – Asian Development Bank (1996-2000), Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP UNS (1981-sekarang).

#### **SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM**

##### **PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2018**

Meraih sertifikasi dari Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) melalui program “Sertifikasi Dasar Pembiayaan Komisaris” yang dilaksanakan pada 4 April 2018

#### **RANGKAP JABATAN**

Tidak memiliki rangkap jabatan baik di perusahaan lain maupun di lembaga manapun.

#### **HUBUNGAN AFILIASI**

Ravik Karsidi tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan pemegang saham utama.

#### **KEPEMILIKAN SAHAM MTF**

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan.

PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

**PROFIL PERUSAHAAN**

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



## HARRY GALE

Komisaris

### PERIODE JABATAN

Periode Jabatan: 26 April 2017 - RUPST 2020, Periode Pertama

### DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia  
Kelahiran Plaju, 23 Juli 1971 (47 tahun)

### DOMISILI

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

### RIWAYAT PENUNJUKAN

Pengangkatan dalam jajaran Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 April 2017 yang telah dilembagakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance No. 23 tanggal 26 April 2017 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mandiri Tunas Finance No. AHU-AH.01.03-0132306 tanggal 02 Mei 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0056462.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 02 Mei 2017.

### PENDIDIKAN

S1 jurusan Ekonomi Manajemen di Universitas Sriwijaya, Palembang (1996), S2 Magister Manajemen di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2007)

### PENGALAMAN KERJA

Senior Vice President Consumer Loans Group Bank Mandiri (2016 – 2018), RCEO Jawa 1 Bank Mandiri (2018 – sekarang).



**SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM  
PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2018**

Meraih sertifikasi dari Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) melalui program “Sertifikasi Dasar Pembiayaan Komisaris” yang dilaksanakan pada 2 Agustus 2018, dan mengikuti program *workshop* “Peningkatan Kompetensi Melalui Edukasi Terkait Perencanaan Keuangan” yang diselenggarakan oleh OJK pada 8 November 2018, serta “Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Tahun 2019” yang diselenggarakan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) pada 15 November 2018.

**RANGKAP JABATAN**

RCEO Jawa 1 Bank Mandiri (2018 – sekarang).

**HUBUNGAN AFILIASI**

Harry Gale tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan pemegang saham utama.

**KEPEMILIKAN SAHAM MTF**

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan.

PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

**PROFIL PERUSAHAAN**

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## PROFIL DIREKSI



### ARYA SUPRIHADI

Direktur Utama

#### PERIODE JABATAN

26 Maret 2018 - RUPST 2021, Periode Pertama

#### DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia

Kelahiran Surabaya 17 Februari 1971 (47 tahun)

#### DOMISILI

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

#### RIWAYAT PENUNJUKAN

Pengangkatan dalam jajaran Direksi Perseroan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Maret 2018 yang telah dilembagakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance No. 42 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mandiri Tunas Finance No. AHU-AH.01.03-0128132 tanggal 28 Maret 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0044227.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Maret 2018.

#### PENDIDIKAN

S1 dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Indonesia (1996), *Master Science in Finance* serta *Master of Business Administration* dari University of Colorado, Denver, USA (1999).

### **PENGALAMAN KERJA**

Direktur Keuangan MTF (2016-2018), Deputy Direktur MTF (2016), menjabat berbagai posisi di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yaitu sebagai SVP – *Group Head Corporate Banking VII* (2015 – Mei 2016), SVP – Kepala Wilayah Kalimantan (2013 – 2014), VP – Deputy Kanwil Makassar (2012 – 2013), VP *Area Manager* Makassar (2011 – 2012), VP *Area Manager* Jakarta Tanjung Priok (2010 – 2011), VP *Area Manager* Bandung Braga (2009 – 2010), AVP Department Head PMS – Jakarta Network Group (2004 – 2009), *Senior Manager* – Priority Banking (2003 – 2004), *Assistant Manager* Priority Banking (2001 – 2002). Berkarir di Bank Mandiri diawali sebagai peserta *Officer Development Program* (ODP) pada tahun 2000.

### **SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM**

#### **PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2018**

Mengikuti Seminar Nasional “Transparansi dan Disclosure Sektor Jasa Keuangan di Indonesia: Praktik Saat Ini vs *International Best Practices*” yang diselenggarakan oleh OJK & World Bank pada 28 April 2018, “Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Revolusi Industri 4.0 (Digital)” yang diselenggarakan oleh Lembaga Manajemen Indonesia Banking School pada 7 Mei 2018, “Perusahaan Pembiayaan Di Mata Perbankan” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) pada 8 Mei 2018, serta Seminar International “*Digitalization as Multifinance’s New Era*” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) pada 21 September 2018.

### **RANGKAP JABATAN**

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

### **HUBUNGAN AFILIASI**

Arya Suprihadi tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama.

### **KEPEMILIKAN SAHAM MTF**

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan demikian, tidak terdapat Direksi yang memiliki saham Perseroan.

PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

**PROFIL PERUSAHAAN**

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



## HARJANTO TJITOHARDJO

Direktur Penjualan & Distribusi

### PERIODE JABATAN

26 Maret 2018 - RUPST 2021, Periode Kedua

### DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia

Kelahiran Jakarta, 12 Juni 1968 (50 tahun)

### DOMISILI

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

### RIWAYAT PENUNJUKAN

Pengangkatan dalam jajaran Direksi Perseroan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Maret 2018 yang telah dilembagakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance No. 42 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mandiri Tunas Finance No. AHU-AH.01.03-0128132 tanggal 28 Maret 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0044227.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Maret 2018.

### PENDIDIKAN

S1 di Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Krida Wacana, Jakarta (1991)

### **PENGALAMAN KERJA**

Bergabung dengan Perseroan pada tahun 2010 sebagai Direktur Perseroan. Sebelumnya menjabat sebagai *Vice President* Tunas Toyota (2006 – 2010), *Operation Director* Tunas Toyota (2004 – 2006), *Operation Manager* Tunas Toyota (2000 – 2004), Kepala Cabang beberapa *Dealer* Tunas Toyota (1995 – 2000) dan *Sales Manager* Toyota Astra International GSO (1993 – 1994). Memulai karir sebagai *Management Trainee* Auto 2000 (1991 – 1993).

### **SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2018**

Mengikuti Seminar Nasional “Industri Pembiayaan Di Pasar Modal” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) pada 26 Juli 2018, dan Seminar Nasional “Peluang dan Tantangan Tahun 2019” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) pada 15 November 2018, serta menjadi Pembicara untuk materi pemasaran dalam “*Training of Basic Certification Program*” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) pada 5-6 November 2018.

### **RANGKAP JABATAN**

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

### **HUBUNGAN AFILIASI**

Harjanto Tjitohardjojo tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama.

### **KEPEMILIKAN SAHAM MTF**

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan demikian, tidak terdapat Direksi yang memiliki saham Perseroan.



PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

**PROFIL PERUSAHAAN**

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



## ARMENDRA

Direktur Keuangan, Operasi & Risiko

### PERIODE JABATAN

26 Maret 2018 - RUPST 2021, Periode Pertama

### DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia

Kelahiran Jakarta, 7 September 1971 (47 tahun)

### DOMISILI

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

### RIWAYAT PENUNJUKAN

Pengangkatan dalam jajaran Direksi Perseroan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Maret 2018 yang telah dilembagakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance No. 42 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mandiri Tunas Finance No. AHU-AH.01.03-0128132 tanggal 28 Maret 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0044227.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Maret 2018.

### PENDIDIKAN

Sarjana bidang Matematika dari Universitas Indonesia (1995)

### **PENGALAMAN KERJA**

Direktur Keuangan di PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) (2015-2018), pernah menjabat berbagai posisi di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yaitu sebagai Financial Planning Department Head (2009-2015), *Decision Support - Micro Retail Banking Department Head* (2006-2009), *Team Leader Pengembangan Sistem Pengukuran dan Supporting Unit* (2000-2006) dan *Corporate Planning* (2000).

### **SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2018**

Mengikuti Seminar Nasional "Industri Pembiayaan Di Pasar Modal" yang diselenggarakan oleh APPI pada 26 Juli 2018, program *workshop* "Mekanisme Internal Dispute Resolution dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan" yang diselenggarakan oleh BMPPVI pada 5-6 September 2018, dan *workshop* "Peningkatan Kompetensi Melalui Edukasi Terkait Perencanaan Keuangan" yang diselenggarakan oleh OJK pada 8 November 2018, serta Seminar International *Insuring Sustainable Business Strategy* (ISBS) yang diselenggarakan oleh Insuring Sustainable Business Strategy (ISBS) pada 15 November 2018.

### **RANGKAP JABATAN**

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain

### **HUBUNGAN AFILIASI**

Armendra tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama.

### **KEPEMILIKAN SAHAM MTF**

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan demikian, tidak terdapat Direksi yang memiliki saham Perseroan.

PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

**PROFIL PERUSAHAAN**

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



## **ALBERTUS HENDITRIANTO**

Deputi Direktur Pemasaran

### **PERIODE JABATAN**

Sejak: 1 Februari 2018

### **DATA PRIBADI**

Warga negara Indonesia  
Jakarta/ 12 Februari 1969 (49 tahun)

### **DOMISILI**

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

### **PENDIDIKAN**

Sarjana (S1) Ekonomi Universitas Gadjah Mada

### **PENGALAMAN KERJA**

Sebelumnya menjabat sebagai Deputi Direktur I sejak 1 Mei 2016 – 31 Januari 2018 dan Deputi Direktur sejak 1 Mei 2014 – 30 April 2016. Mulai bergabung dengan Perseroan pada tahun 2009, sebagai *Marketing Development* dan terakhir sebagai Kepala Divisi Marketing & Product (2015), sebelum akhirnya diangkat menjadi Deputi Direktur.

### **RANGKAP JABATAN**

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain

### **HUBUNGAN AFILIASI**

Albertus Henditrianto tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan pemegang saham utama.

### **KEPEMILIKAN SAHAM MTF**

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan demikian, tidak terdapat Direksi yang memiliki saham Perseroan.



## BONIFATIUS PERANA CITRA KETAREN

Deputi Direktur Kredit, AR & Pemulihan

### PERIODE JABATAN

Menjabat sejak: 1 Februari 2018

### DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia

Jakarta/ 16 April 1977 (41 tahun)

### DOMISILI

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

### PENDIDIKAN

Sarjana (S1) Akuntansi Universitas Parahyangan (2001)

### PENGALAMAN KERJA

Sebelumnya menjabat sebagai Deputi Direktur II sejak 1 Mei 2016 – 31 Januari 2018 dan Deputi Direktur sejak 11 Januari 2016 – 30 April 2016. Mulai bergabung dengan Perseroan pada tahun 2009, sebagai Kepala *Department Operation* dan terakhir sebagai Kepala Divisi *Finance & Accounting* (2016), sebelum akhirnya diangkat menjadi Deputi Direktur.

### RANGKAP JABATAN

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain

### HUBUNGAN AFILIASI

Bonifatius Perana Citra Ketaren tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan pemegang saham utama.

### KEPEMILIKAN SAHAM MTF

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan demikian, tidak terdapat Direksi yang memiliki saham Perseroan.

PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

**PROFIL PERUSAHAAN**

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



## **WILLIAM FRANCIS INDRA**

Deputi Direktur IT, Strategic Business Initiative & Human Capital

### **PERIODE JABATAN**

Menjabat sejak: 1 Februari 2018

### **DATA PRIBADI**

Warga negara Indonesia  
Karawang/ 14 Juli 1982 (36 tahun)

### **DOMISILI**

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

### **PENDIDIKAN**

Sarjana (S1) Matematika Universitas Padjadjaran,  
Magister Manajemen Universitas Mercu Buana

### **PENGALAMAN KERJA**

Sebelumnya menjabat sebagai Deputi Direktur III sejak 1 Mei 2016 – 31 Januari 2018 dan Deputi Direktur sejak 11 Januari 2016 – 30 April 2016. Mulai bergabung dengan Perseroan pada tahun 2010, sebagai Kepala Department IT Planning & Security dan terakhir sebagai Kepala Divisi *Business Excellence Management* (2016), sebelum akhirnya diangkat menjadi Deputi Direktur

### **RANGKAP JABATAN**

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain

### **HUBUNGAN AFILIASI**

William Francis Indra tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan pemegang saham utama.

### **KEPEMILIKAN SAHAM MTF**

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan demikian, tidak terdapat Direksi yang memiliki saham Perseroan.

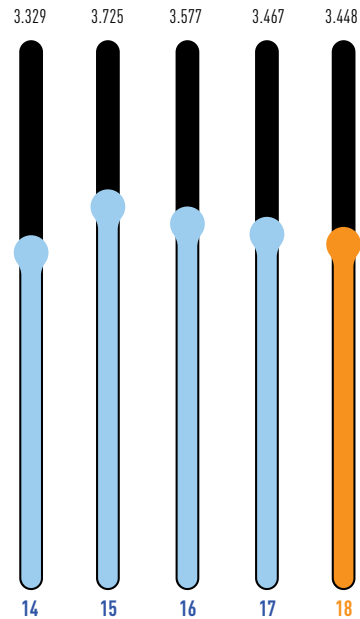
## DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

### DEMOGRAFI KARYAWAN

Per 31 Desember 2018, jumlah karyawan Perseroan mencapai 3.448 orang, mengalami penurunan sebesar 0,55% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2017 yang sebanyak 3.467 orang. Penurunan ini terutama disebabkan kebijakan Perseroan dengan melakukan mutasi karyawan *unperformed* yang dipindahkan ke *outsourcing*.

Profil demografi karyawan Perseroan dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini.

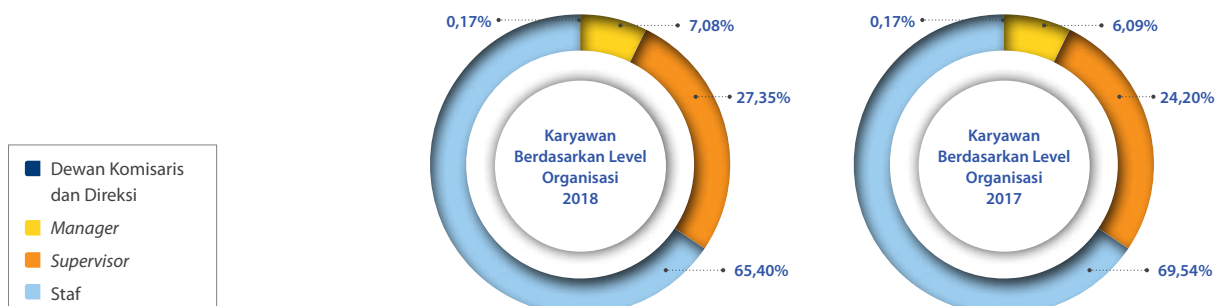
### PERGERAKAN JUMLAH KARYAWAN DALAM 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR 2014-2018



### DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI/JABATAN (orang)

Level Organisasi/Jabatan	2018				2017			
	L	P	Jumlah	(%)	L	P	Jumlah	(%)
Dewan Komisaris dan Direksi	6	0	6	0,17%	6	0	6	0,17%
Manager	207	37	244	7,08%	182	29	211	6,09%
Supervisor	714	229	943	27,35%	648	191	839	24,20%
Staf	1.612	643	2.255	65,40%	1.711	700	2.411	69,54%
<b>Jumlah</b>	<b>2.539</b>	<b>909</b>	<b>3.448</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.547</b>	<b>920</b>	<b>3.467</b>	<b>100,00%</b>

L = Laki-laki / P = Perempuan





PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

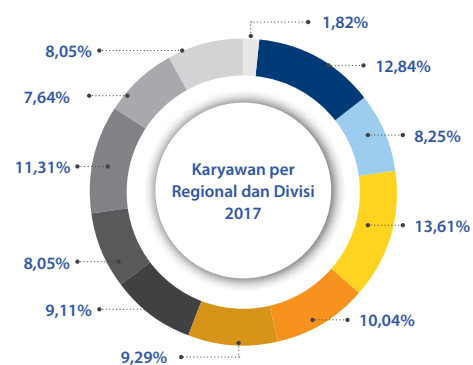
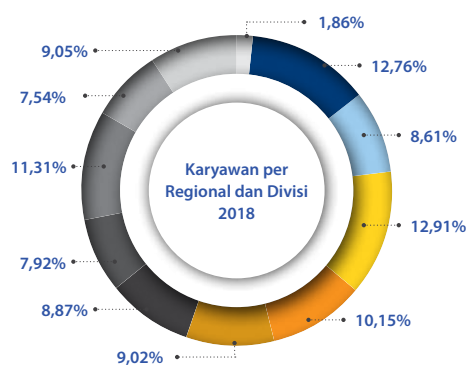
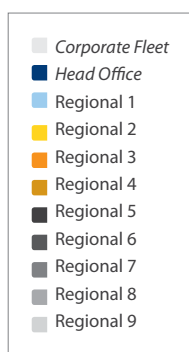
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



## DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN LOKASI KERJA/PENEMPATAN (orang)

Lokasi Kerja/ Penempatan	2018				2017			
	L	P	Jumlah	(%)	L	P	Jumlah	(%)
Corporate Fleet	44	20	64	1,86%	41	22	63	1,82%
Head Office	285	155	440	12,76%	304	141	445	12,84%
Regional 1	228	69	297	8,61%	215	71	286	8,25%
Regional 2	363	82	445	12,91%	379	93	472	13,61%
Regional 3	253	97	350	10,15%	237	111	348	10,04%
Regional 4	212	99	311	9,02%	237	85	322	9,29%
Regional 5	224	82	306	8,87%	230	86	316	9,11%
Regional 6	206	67	273	7,92%	212	67	279	8,05%
Regional 7	296	94	390	11,31%	293	99	392	11,31%
Regional 8	197	63	260	7,54%	198	67	265	7,64%
Regional 9	231	81	312	9,05%	201	78	279	8,05%
<b>Jumlah</b>	<b>2.539</b>	<b>909</b>	<b>3.448</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.547</b>	<b>920</b>	<b>3.467</b>	<b>100,00%</b>

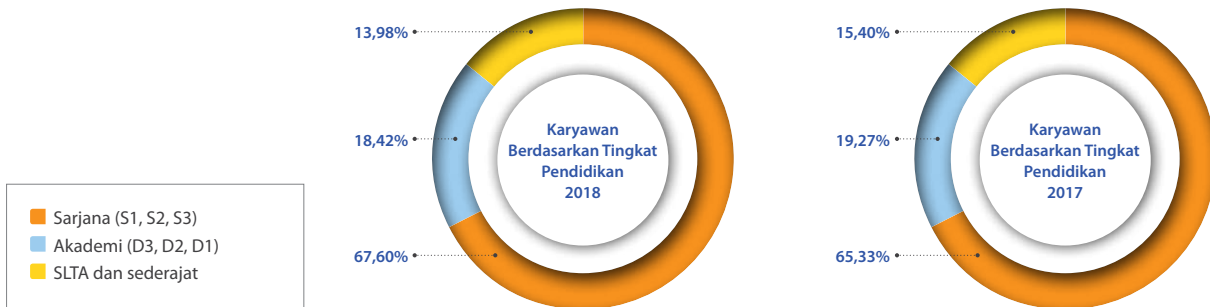
L = Laki-laki / P = Perempuan



**DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**  
(orang)

Tingkat Pendidikan	2018				2017			
	L	P	Jumlah	(%)	L	P	Jumlah	(%)
Sarjana (S1,S2,S3)	1.645	686	2.331	67,60%	1.580	685	2.265	65,33%
Akademi (D3,D2,D1)	433	202	635	18,42%	458	210	668	19,27%
SLTA dan sederajat	461	21	482	13,98%	509	25	534	15,40%
<b>Jumlah</b>	<b>2.539</b>	<b>909</b>	<b>3.448</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.547</b>	<b>920</b>	<b>3.467</b>	<b>100,00%</b>

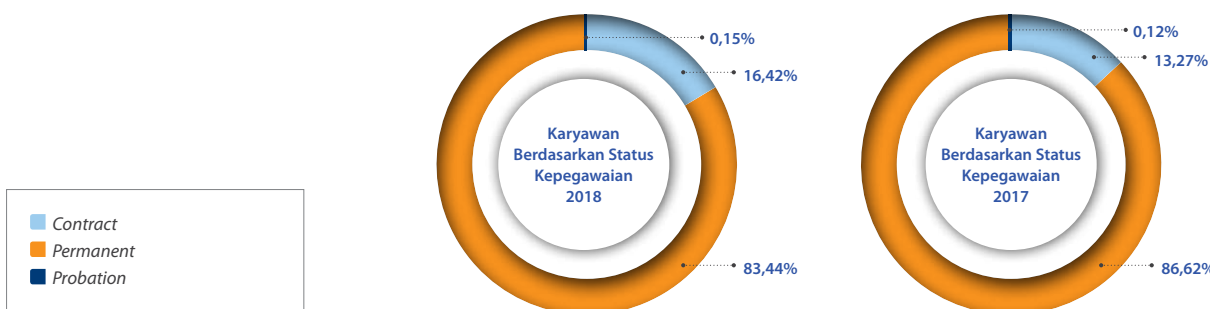
L = Laki-laki / P = Perempuan



**DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN**  
(orang)

Status Kepegawaian	2018				2017			
	L	P	Jumlah	(%)	L	P	Jumlah	(%)
Contract	427	139	566	16,42%	352	108	460	13,27%
Permanent	2.108	769	2.877	83,44%	2.193	810	3.003	86,62%
Probation	4	1	5	0,15%	2	2	4	0,12%
<b>Jumlah</b>	<b>2.539</b>	<b>909</b>	<b>3.448</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.547</b>	<b>920</b>	<b>3.467</b>	<b>100,00%</b>

L = Laki-laki / P = Perempuan

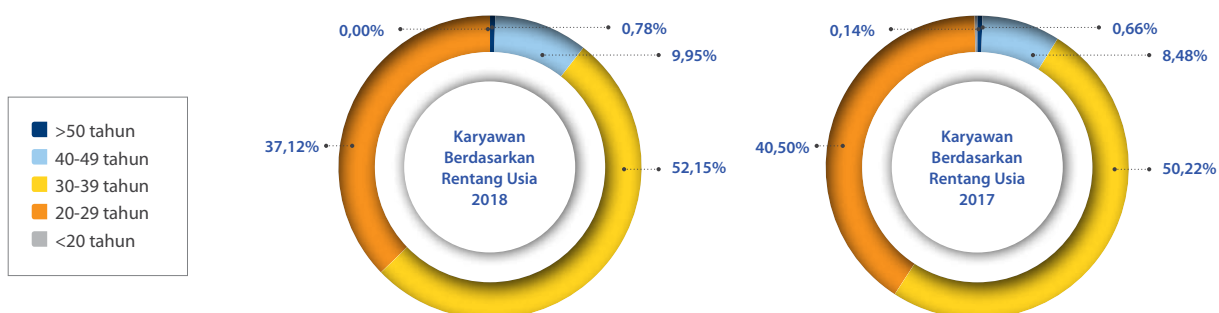




## DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN RENTANG USIA (orang)

Rentang Usia	2018				2017			
	L	P	Jumlah	(%)	L	P	Jumlah	(%)
> 50 tahun	24	3	27	0,78%	20	3	23	0,66%
40-49 tahun	290	53	343	9,95%	253	41	294	8,48%
30-39 tahun	1.446	352	1.798	52,15%	1.394	347	1.741	50,22%
20-29 tahun	779	501	1.280	37,12%	875	529	1.404	40,50%
< 20 Tahun	0	0	0	0,00%	5	0	5	0,14%
<b>Jumlah</b>	<b>2.539</b>	<b>909</b>	<b>3.448</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.547</b>	<b>920</b>	<b>3.467</b>	<b>100,00%</b>

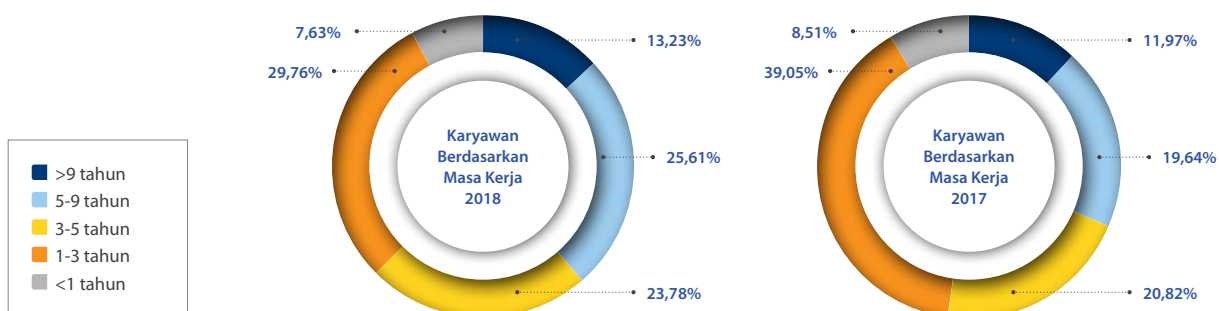
L = Laki-laki / P = Perempuan



## DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA (orang)

Rentang Usia	2018				2017			
	L	P	Jumlah	(%)	L	P	Jumlah	(%)
> 9 tahun	327	129	456	13,23%	291	124	415	11,97%
5 - 9 tahun	605	278	883	25,61%	460	221	681	19,64%
3 - 5 tahun	611	209	820	23,78%	522	200	722	20,82%
1 - 3 tahun	786	240	1.026	29,76%	1.039	315	1.354	39,05%
< 1 Tahun	210	53	263	7,63%	235	60	295	8,51%
<b>Jumlah</b>	<b>2.539</b>	<b>909</b>	<b>3.448</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.547</b>	<b>920</b>	<b>3.467</b>	<b>100,00%</b>

L = Laki-laki / P = Perempuan

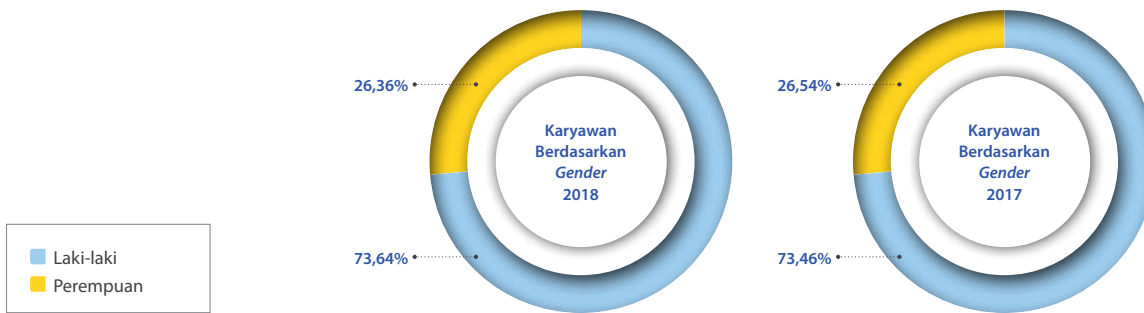




### DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER/JENIS KELAMIN (orang)

Gender/Jenis Kelamin	2018		2017	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
Laki-laki	2.539	73,64%	2.547	73,46%
Perempuan	909	26,36%	920	26,54%
<b>Jumlah</b>	<b>3.448</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.467</b>	<b>100,00%</b>

L = Laki-laki / P = Perempuan



Lebih lanjut tentang demografi karyawan Perseroan dapat dilihat pada pembahasan Sumber Daya Manusia di bab Fungsi Penunjang Bisnis dalam laporan tahunan ini.

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Perseroan memiliki komitmen dalam membangun kualitas SDM secara konsisten dan berkesinambungan dengan mengikutsertakan karyawan terhadap kegiatan pengembangan kompetensi baik internal maupun eksternal. Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan tanpa terkecuali untuk mengikuti

program pengembangan kompetensi, dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri dari setiap karyawan.

Untuk Pengembangan Kompetensi tahun 2018 Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp 5.752.306.622

### PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG MENGGAMBARAKAN LEVEL JABATAN DAN KESETARAAN GENDER TAHUN 2018

Level Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Peserta			Biaya (Rp)
		L	P	Jumlah	
Komisaris	Seminar, Pelatihan dan <i>Workshop</i>	6, (100%)	0, (0%)	6	20.200.000
Direktur	Seminar, Pelatihan dan <i>Workshop</i>	14, (100%)	0, (0%)	14	33.350.000
Deputi Direktur	Seminar, Pelatihan dan <i>Workshop</i>	9, (100%)	0, (0%)	9	24.600.000
Kadiv/Kawil	Seminar, Pelatihan dan <i>Workshop</i>	14, (82%)	3, (18%)	17	521.725.221
Dept.Head/Manager	Seminar, Pelatihan dan <i>Workshop</i>	125, (80%)	31, (20%)	156	1.910.748.348
Section Head	Seminar, Pelatihan dan <i>Workshop</i>	725, (80%)	186, (20%)	911	1.000.742.900
Staff/Officer	Seminar, Pelatihan dan <i>Workshop</i>	926, (73%)	346, (27%)	1.272	379.642.840
Management Trainee	Seminar, Pelatihan dan <i>Workshop</i>	29, (53%)	26, (47%)	55	682.333.775
Manager Development Program	Seminar, Pelatihan dan <i>Workshop</i>	4, (50%)	4, (50%)	8	569.361.550
Supervisor Development Program	Seminar, Pelatihan dan <i>Workshop</i>	85, (81%)	20, (19%)	105	609.601.988
<b>Total</b>		<b>616, (24%)</b>	<b>1.937, (76%)</b>	<b>2.553</b>	<b>5.752.306.622</b>



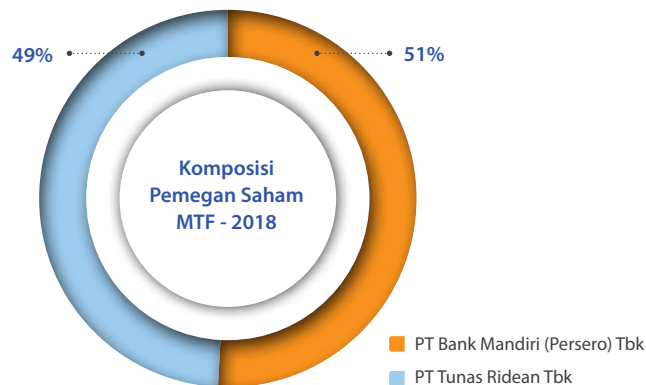
**“Uraian lengkap terkait kebijakan Mandiri Tunas Finance dalam mengelola dan mengembangkan kompetensi SDM dapat dilihat pada pembahasan Sumber Daya Manusia di bab Fungsi Penunjang Bisnis dalam laporan tahunan ini.”**

## KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

### KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM MANDIRI TUNAS FINANCE

#### KEPEMILIKAN SAHAM MANDIRI TUNAS FINANCE PER 31 DESEMBER 2018

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.275.000.000	127.500.000.000	51,00
2. PT Tunas Ridean Tbk	1.275.000.000	122.500.000.000	49,00
Jumlah	2.500.000.000	250.000.000.000	100



#### KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

No	Nama	Jabatan	2018		2017	
			Jumlah Saham (lembar)	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham (lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
<b>DEWAN KOMISARIS</b>						
1	Rico Adisurja Setiawan	Komisaris Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Harry Gale	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Ravik Karsidi	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
<b>DIREKSI</b>						
1	Arya Suprihadi	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Harjanto Tjitohardjojo	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Armendra	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Nihil = tidak memiliki saham MTF



PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

**PROFIL PERUSAHAAN**

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



***“Hingga akhir tahun 2018, Mandiri Tunas Finance tidak memiliki program kepemilikan saham baik oleh Dewan Komisaris, Direksi, maupun kepemilikan saham oleh karyawan.”***

## **Informasi Tentang Pemegang Saham Utama Dan/Atau Pemegang Saham Pengendali Hingga Nama Pemilik Akhir**

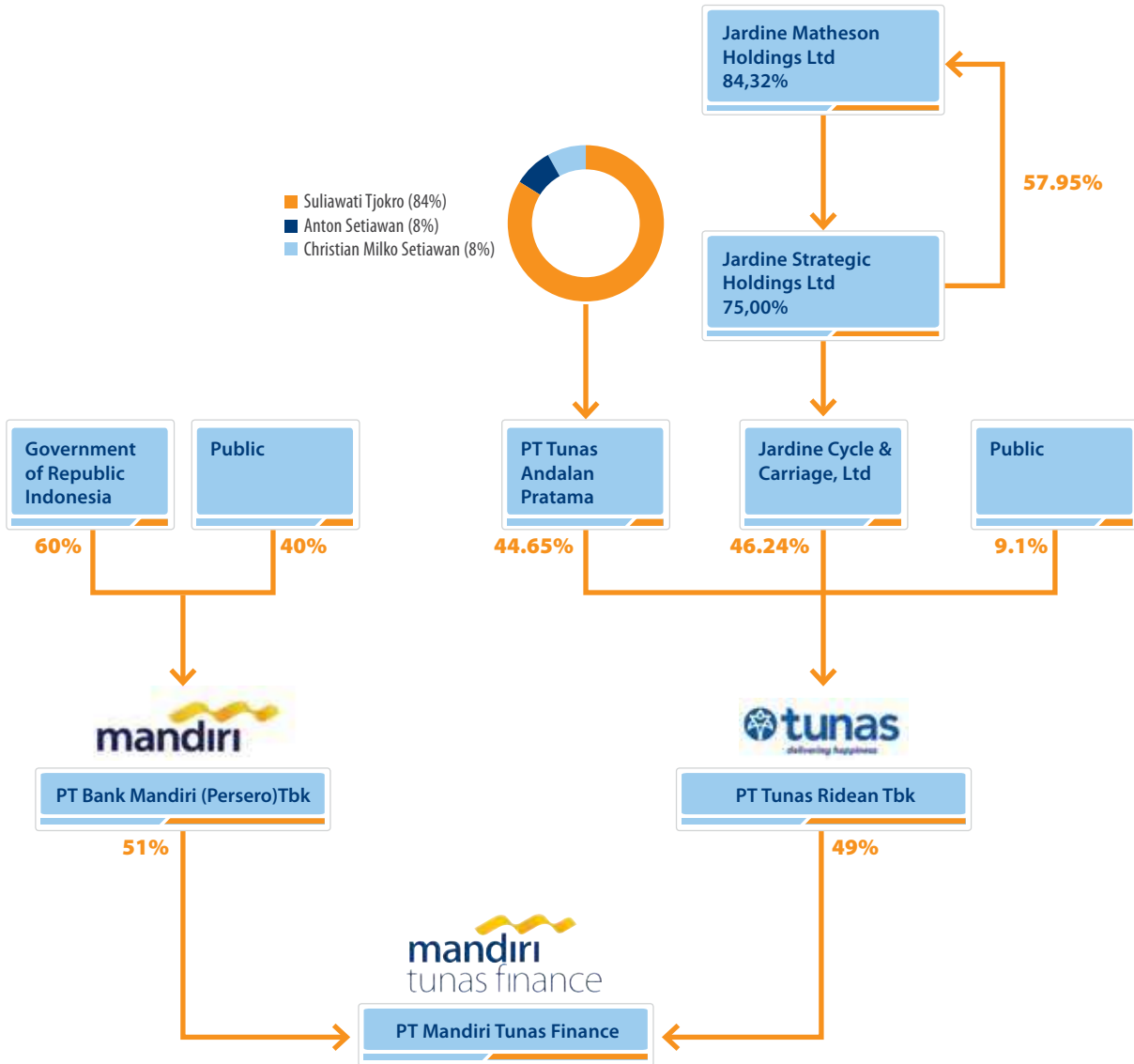
Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang memiliki saham Perseroan sebanyak 51,00%. Sementara

PT Tunas Ridean Tbk memiliki saham Perseroan sebanyak 49,00%. Berikut disampaikan struktur kepemilikan saham hingga nama pemilik akhir.



***PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan pemegang saham utama/pengendali Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 51,00%.”***

## Struktur Kepemilikan Saham Hingga Nama Pemilik Akhir





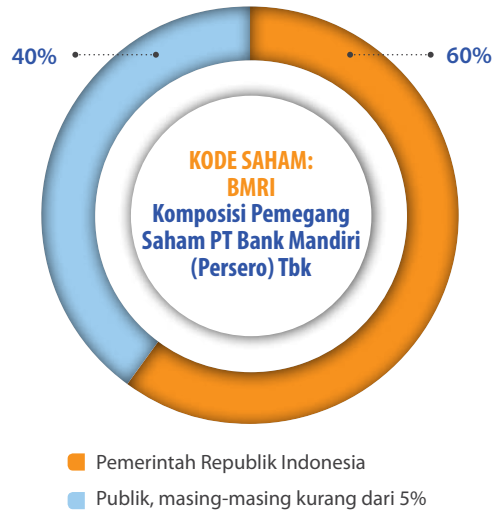
## PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya disebut "Bank Mandiri" atau "Bank", didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 di Negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H., No. 10, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998 tanggal 1 Oktober 1998. Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank Ekspor Impor (Persero), dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). Di tahun 2003, Bank Mandiri melakukan penawaran saham perdana pada 14 Juli 2003 dengan kode saham "BMRI" sebesar 20% atau ekuivalen dengan 4 miliar lembar saham.

Seiring berjalannya waktu dan didukung dengan pengalaman serta kemampuan yang matang dalam memberikan layanan perbankan, terutama pada segmen kredit korporasi, hingga kini Bank Mandiri masih dipercaya sebagai salah satu Bank BUMN yang terbesar di Indonesia dari sisi total aset, pinjaman, dan deposit.

Sebagai bank BUMN yang beroperasi di tengah populasi masyarakat terbesar ke empat di dunia, serta dalam rangka mewujudkan aspirasi jangka panjangnya di tahun 2020 yaitu "*Indonesia's best, ASEAN prominent*" atau menjadi institusi keuangan dengan kinerja terbaik dari segi pelayanan, produk, dan imbal hasil kepada pemegang saham, serta manfaat yang diterima oleh masyarakat secara luas di skala ASEAN maka Bank Mandiri secara konsisten memfokuskan strategi bisnisnya pada 3 (tiga) hal, yaitu memperkuat leadership di segmen *wholesale* dengan melakukan pendalaman *relationship* dengan nasabah, senantiasa berusaha menjadi bank pilihan nasabah di segmen *retail*, dan terus mengupayakan integrasi di seluruh lini bisnis baik yang dimiliki Bank Mandiri maupun anak usahanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Mandiri secara berkesinambungan meningkatkan posisi dan kemampuannya pada sektor industri perbankan Nasional dengan memerhatikan perkembangan teknologi yang cepat, kebutuhan nasabah yang semakin dinamis, dan demografis masyarakat Indonesia.



#### SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

No	Nama	Jabatan
<b>Dewan Komisaris</b>		
1	Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/ Komisaris Independen
2	Imam Apriyanto Putro	Wakil Komisaris Utama
3	Askolani	Komisaris
4	Bangun Sarwito Kusmuljono	Komisaris Independen
5	Goel Siau Hong	Komisaris Independen
6	Ardan Adiperdana	Komisaris Komisaris
7	Makmur Keliat	Komisaris Independen
8	R. Widyo Pramono	Komisaris Independen
<b>Direksi</b>		
1	Kartika Wirjoatmodjo	Direktur Utama
2	Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama
3	Royke Tumilaar	Direktur
4	Hery Gunardi	Direktur
5	Ahmad Siddik Badruddin	Direktur
6	Rico Usthavia Frans	Direktur
7	Darmawan Junaidi	Direktur
8	Alexandra Askandar	Direktur
9	Agus Dwi Handaya	Direktur
10	Panji Irawan	Direktur
11	Donsuwan Simatupang	Direktur



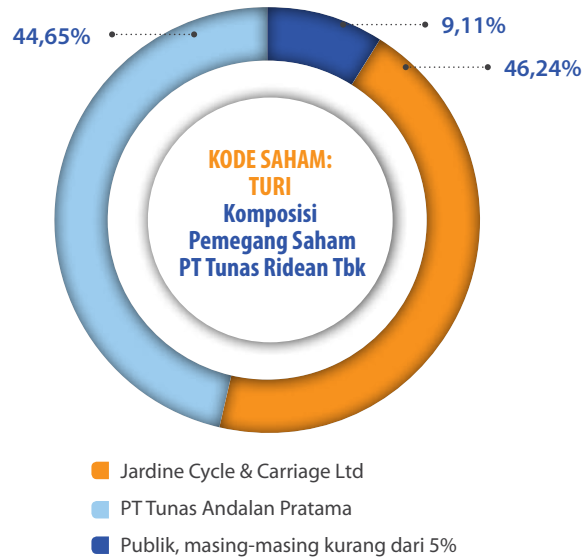
## PT TUNAS RIDEAN TBK

PT Tunas Ridean Tbk, selanjutnya disebut “Tunas Grup”, merupakan pemegang saham pendiri Perseroan. Tunas Grup adalah perusahaan keluarga bernama Tunas Indonesia Motor yang beroperasi sejak tahun 1967. Pada tahun 1980, Tunas Grup mengintegrasikan seluruh bisnis unit ke dalam satu perusahaan induk PT Tunas Ridean. Perusahaan ini kemudian mendaftarkan diri di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1995.

Di tahun 2012, Tunas Grup memperluas jaringan outlet penjualan dan layanan purna jual merk otomotif melalui akuisisi diler resmi Isuzu PT Rahardja Ekalancar dan sekarang bernama Tunas Isuzu. Pada November 2014, PT Tunas Dwipa Matra bersama-sama dengan pihak ketiga mendirikan PT Asia Surya Perkasa, diler utama sepeda motor Honda untuk wilayah Bangka Belitung.

Saat ini Perusahaan telah menjadi grup otomotif independen terbesar yang memiliki 154 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Tunas Grup mengoperasikan jaringan outlet penjualan dan layanan purnajual merek otomotif ternama melalui PT Tunas Ridean Tbk (Tunas Toyota), PT Tunas Mobilindo Perkasa (Tunas Daihatsu dan Tunas Peugeot), PT Tunas Mobilindo Parama (Tunas BMW), dan PT Tunas Dwipa Matra diler utama sepeda motor Honda untuk wilayah Lampung. Perseroan melalui PT Tunas Aset Sarana (Tunas Used Car) juga mengoperasikan layanan penjualan mobil bekas *BMW Premium Selection*.

Selain itu Tunas Grup mengoperasikan layanan penyewaan kendaraan dan pengelolaan armada jangka pendek dan jangka panjang melalui PT Surya Sudeco (Tunas Rent). PT Surya Sudeco mendirikan perusahaan *manpower services* bernama PT Mitra Asri Pratama dan balai lelang bernama PT Mega Armada Sudeco.



**SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT TUNAS RIDEAN TBK PER 31 DESEMBER 2018**

No	Nama	Jabatan
<b>Dewan Komisaris</b>		
1	Anton Setiawan	Komisaris Utama/ Komisaris Independen
2	Dr. Cosmas Batubara	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen
3	Hong Anton Leoman	Komisaris
4	Haslam Preston	Komisaris
5	Sarastri Baskoro	Komisaris Independen
<b>Direksi</b>		
1	Rico Adisurja Setiawan	Direktur Utama
2	Nugraha Indra Permadi	Direktur
3	Tenny Febyana Halim	Direktur
4	Tan Fony Salim	Direktur
5	Kent Teo	Direktur



## INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI SERTA *JOINT VENTURE (JV)* DAN *SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)*

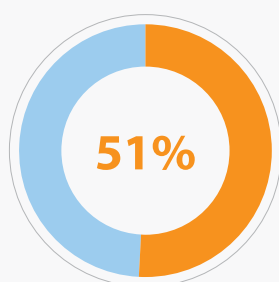


***“Hingga akhir tahun 2018, Mandiri Tunas Finance tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Penyertaan Saham, Joint Venture (JV), Special Purpose Vehicle (SPV), maupun Kerja Sama Operasi (KSO).”***

Perseroan tidak memiliki entitas anak maupun entitas asosiasi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi tentang nama entitas anak dan/atau asosiasi, persentase kepemilikan saham,

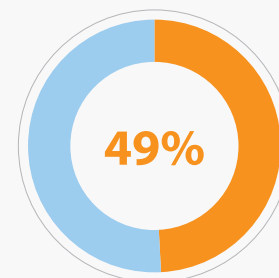
keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi, dan keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi.

## STRUKTUR GRUP MANDIRI TUNAS FINANCE



PT Bank Mandiri  
Persero Tbk.

### STRUKTUR GRUP MANDIRI TUNAS FINANCE



PT Tunas Ridean Tbk

mandiri  
tunas finance

## INFORMASI TENTANG KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM

Hingga akhir tahun 2018, Perseroan tidak menerbitkan dan mencatatkan sahamnya di bursa saham. Perseroan menjadi perusahaan tercatat

karena menerbitkan obligasi. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi tentang kronologis penerbitan dan pencatatan saham.

## KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN OBLIGASI SERTA EFEK LAINNYA

Perseroan telah beberapa kali menerbitkan Obligasi dan *Medium Term Notes* (MTN) yang dananya digunakan seluruhnya untuk kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor. Walaupun Perseroan mendapatkan dukungan penuh atas fasilitas pendanaan terutama *Joint Financing* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, namun Perseroan

tetap melakukan diversifikasi pendanaan untuk menunjang kinerja usaha Perseroan.

Penerbitan Obligasi dan MTN antara lain bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan investor serta mempertahankan eksistensi Perseroan di Pasar Modal.

### OBLIGASI

Tahun	Nama Obligasi	Seri	Peringkat	Jumlah (Rp)	Tingkat Bunga	Frekuensi Pembayaran Bunga	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Ket.
2003	Obligasi Tunas Financindo Sarana I dengan Tingkat Bunga Tetap	-	idBBB+	500.000.000.000	14,50 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	4 Jun 2003	29 Mei 2006	Lunas
2004	Obligasi Tunas Financindo Sarana II dengan Tingkat Bunga Tetap	-	idBBB+	350.000.000.000	10,00 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	15 Jun 2004	22 Jul 2005	Lunas
2005	Obligasi Tunas Financindo Sarana III dengan Tingkat Bunga Tetap	A	idA-	150.000.000.000	10,625 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	1 Jul 2005	8 Jul 2006	Lunas
		B	idA-	100.000.000.000	12,825 % p.a		1 Jul 2005	8 Jul 2006	Lunas
		C	idA-	100.000.000.000	13,250 % p.a		1 Jul 2005	8 Jul 2006	Lunas
				350.000.000.000					
2007	Obligasi Tunas Financindo Sarana IV dengan Tingkat Bunga Tetap	A	idA-	150.000.000.000	10,00 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	14 Feb 2007	27 Feb 2008	Lunas
		B	idA-	100.000.000.000	10,40 % p.a		14 Feb 2007	22 Feb 2009	Lunas
		C	idA-	350.000.000.000	11,00% p.a		14 Feb 2007	22 Feb 2010	Lunas
				600.000.000.000					

PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

**PROFIL PERUSAHAAN**

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tahun	Nama Obligasi	Seri	Peringkat	Jumlah (Rp)	Tingkat Bunga	Frekuensi Pembayaran Bunga	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Ket.
2008	Obligasi Tunas Finacindo Sarana V dengan Tingkat Bunga Tetap	A	idA-	350.000.000.000	10,00 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	12 Feb 2008	27 Feb 2009	Lunas
		B	idA-	25.000.000.000	10,50 % p.a		12 Feb 2008	20 Feb 2010	Lunas
		C	idA-	50.000.000.000	11,00 % p.a		12 Feb 2008	20 Feb 2011	Lunas
		D	idA-	175.000.000.000	11,25 % p.a		12 Feb 2008	20 Feb 2012	Lunas
			600.000.000.000						
2011	Obligasi Tunas Finacindo Sarana VI dengan Tingkat Bunga Tetap	A	idA+	48.000.000.000	8,60 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	10 Mei 2011	23 Mei 2012	Lunas
		B	idA+	52.000.000.000	9,60 % p.a		10 Mei 2011	19 Mei 2013	Lunas
		C	idA+	350.000.000.000	10,00 % p.a		10 Mei 2011	19 Mei 2014	Lunas
		D	idA+	150.000.000.000	10,70 % p.a		10 Mei 2011	19 Mei 2015	Lunas
			600.000.000.000						
2013	Obligasi Berkelanjutan I MTF Tahap I	A	idAA	425.000.000.000	7,75 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	5 Jun 2013	5 Jun 2016	Lunas
		B	idAA	75.000.000.000	7,80 % p.a		5 Jun 2013	5 Jun 2017	Lunas
			500.000.000.000						
2014	Obligasi Berkelanjutan I MTF Tahap II	A	idAA	425.000.000.000	10,70 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	23 Mei 2014	23 Mei 2017	Lunas
		B	idAA	175.000.000.000	10,85 % p.a		23 Mei 2014	23 Mei 2018	-
			600.000.000.000						
2015	Obligasi Berkelanjutan I MTF Tahap III	-	idAA	150.000.000.000	9,75 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	9 Jun 2015	9 Jun 2018	-
	Obligasi Berkelanjutan II MTF Tahap I	A	idAA	500.000.000.000	10,20 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	18 Des 2015	18 Des 2018	-
		B		100.000.000.000	10,80 % p.a		18 Des 2015	18 Des 2020	-
			600.000.000.000						
2016	Obligasi Berkelanjutan II MTF Tahap II	A	idAA	720.000.000.000	8,95 % p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	1 Jun 2016	1 Jun 2019	-
		B	idAA	680.000.000.000	9,25 % p.a		1 Jun 2016	1 Jun 2021	-
				1.400.000.000.000					
	Obligasi Berkelanjutan III MTF Tahap I	A	idAA+	400.000.000.000	8,20% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	7 Okt 2016	7 Okt 2019	-
B		idAA+	100.000.000.000	8,55% p.a	7 Okt 2016		7 Okt 2021	-	
			500.000.000.000						
2017	Obligasi Berkelanjutan III MTF Tahap II	A	idAA+	610.000.000.000	8,50% p.a	Setiap 3 (tiga) bulan	6 Jun 2017	6 Jun 2020	-
		B	idAA+	240.000.000.000	8,85% p.a		6 Jun 2017	6 Jun 2022	-
<b>TOTAL</b>							<b>Rp4.175.000.000.000</b>		

Kronologis pencatatan obligasi Perseroan yang sampai saat ini masih beredar dan tercatat di PT Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

1. **Pada 10 Mei 2011**, Perseroan menerbitkan Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok sejumlah Rp 600.000.000.000, dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun, yang terdiri dari:

**Seri A** : Dengan jumlah pokok sebesar Rp 48.000.000.000, berjangka waktu 370 hari dengan bunga 8,60% per tahun (jatuh tempo 23 Mei 2012). Pembayaran pokok Obligasi secara penuh telah dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi Seri A.

**Seri B**: Dengan jumlah pokok sebesar Rp 52.000.000.000, berjangka waktu 2 (dua) tahun dengan bunga 9,60% per tahun (jatuh tempo 19 Mei 2013). Pembayaran pokok Obligasi secara penuh telah dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi Seri B.

**Seri C** : Dengan jumlah pokok sebesar Rp 350.000.000.000, berjangka waktu 3 (tiga) tahun dengan bunga 10,00% per tahun (jatuh tempo 19 Mei 2014). Pembayaran pokok Obligasi secara penuh akan dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi Seri C.

**Seri D** : Dengan jumlah pokok sebesar Rp150.000.000.000, berjangka waktu 4 (empat) tahun dengan bunga 10,70% per tahun (jatuh tempo 19 Mei 2015). Pembayaran pokok Obligasi secara penuh akan dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi Seri D.

Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang performing sekurang-kurangnya sebesar 80% dari nilai pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan di mana pembayaran bunga obligasi pertama kali pada 19 Agustus 2011, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada 19 Mei 2015.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan peringkat: idA+ (*Single A plus; Stable Outlook*) dan telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia pada 20 Mei 2011.

Dana hasil Obligasi ini telah digunakan 100% untuk menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan kendaraan bermotor oleh Perseroan. Laporan realisasi penggunaan seluruh dana telah disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui surat No. 084/ MTF-CSC/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.

Penawaran Umum atas Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 dibantu oleh lembaga dan profesi penunjang pasar modal, yaitu:

Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk
Akuntan Publik	: KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan ( <i>a member firm of Pricewaterhouse Coopers Global Network</i> )
Notaris	: Fathiah Helmi, SH
Konsultan Hukum	: BM & Partners Law Office
Pemeringkat Efek	: PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
<b>PROFIL PERUSAHAAN</b>
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pada 2 November 2012, PT Fitch Ratings Indonesia telah menetapkan peringkat Perseroan (*Corporate Rating*) dengan peringkat AA(idn) (*Double AA; Stable Outlook*). Pada tanggal 12 Nopember 2012, PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) telah menaikkan peringkat Perseroan (*Corporate Rating*) beserta surat utang Obligasi VI Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2011 yang semula dengan peringkat idA+ (*Single A plus; Stable Outlook*) menjadi idAA (*Double A; Stable Outlook*). Kemudian pada tanggal 5 Maret 2014, melalui surat PEFINDO No. No. 360/PEF-Dir/III/2014 perihal Sertifikat Pemantauan Tahunan Pemeringkatan atas Obligasi VI Seri C dan Seri D Tahun 2011 PT Mandiri Tunas Finance periode 5 Maret 2014 sampai dengan 1 Maret 2015, yang memutuskan menetapkan kembali peringkat idAA (*Double A*).

2. **Pada 30 Mei 2013**, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok sejumlah Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun, yang terdiri dari:

**Seri A** : Dengan jumlah pokok sebesar Rp425.000.000.000 berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan bunga 7,75% per tahun (jatuh tempo 5 Juni 2016). Pembayaran pokok Obligasi secara penuh akan dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi Seri A.

**Seri B** : Dengan jumlah pokok sebesar Rp75.000.000.000, berjangka waktu 48 bulan dengan bunga 7,80% per tahun (jatuh tempo 5 Juni 2017). Pembayaran pokok Obligasi secara penuh akan dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi Seri B.

Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang performing sekurang-kurangnya sebesar 60% dari nilai pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dimana pembayaran bunga obligasi pertama kali pada 5 September 2013, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada 5 Juni 2017.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan peringkat: idAA (*Double A*) untuk periode 18 Maret 2013 sampai dengan 1 Maret 2014 dan telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia pada 7 Juni 2013. Kemudian pada 5 Maret 2014, melalui surat PEFINDO No. 359/PEF-Dir/III/2014 perihal Sertifikat Pemantauan Tahunan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I PT Mandiri Tunas Finance periode 5 Maret 2014 sampai dengan 1 Maret 2015 yang memutuskan kembali peringkat idAA (*Double A*).

Dana hasil Obligasi ini telah digunakan 100% untuk menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan kendaraan bermotor oleh Perseroan. Laporan realisasi penggunaan seluruh dana telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 091/ MTF CSC/ VII/2013 tanggal 8 Juli 2013.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 dibantu oleh lembaga dan profesi penunjang pasar modal, yaitu:

Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk
Akuntan Publik	: KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (a member firm of Pricewaterhouse

Coopers Global  
Network)  
Notaris : Fathiah Helmi, SH  
Konsultan Hukum : BM & Partners Law  
Office  
Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek  
Indonesia (PEFINDO)

3. **Pada 19 Mei 2014**, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok sejumlah Rp600.000.000.000 dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun, yang terdiri dari:

**Seri A** : Dengan jumlah pokok sebesar Rp425.000.000.000 berjangka waktu 36 bulan dengan bunga 10,70% per tahun (jatuh tempo 23 Mei 2017). Pembayaran pokok Obligasi secara penuh akan dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi Seri A.

**Seri B** : Dengan jumlah pokok sebesar Rp175.000.000.000 berjangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan bunga 10,85% per tahun (jatuh tempo 23 Mei 2018). Pembayaran pokok Obligasi secara penuh akan dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi Seri B.

Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang performing sekurang-kurangnya sebesar 60% dari nilai pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dimana pembayaran bunga obligasi pertama kali pada 23 Agustus 2014, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada 23 Mei 2018.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi

dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan peringkat: idAA (Double A) untuk periode 5 Maret 2014 sampai dengan 1 Maret 2015 dan telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia pada 26 Mei 2014.

Dana hasil Obligasi ini telah digunakan 100% untuk menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan kendaraan bermotor Dana hasil Obligasi ini telah digunakan 100% untuk menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan kendaraan bermotor

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 dibantu oleh lembaga dan profesi penunjang pasar modal, yaitu:

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk  
Akuntan Publik : KAP Tanudiredja,  
Wibisana dan Rekan  
(a member firm  
of Pricewaterhouse  
Coopers Global Network)

Notaris : Fathiah Helmi, SH  
Konsultan Hukum : BM & Partners Law  
Office  
Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek  
Indonesia (PEFINDO)

4. **Pada 28 Mei 2015**, Perseroan menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance tahap III Tahun 2015 dengan nilai pokok obligasi sebesar Rp150.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun dengan bunga 9,75% per tahun.

Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang performing sekurang-kurangnya sebesar 60% dari nilai pokok obligasi. Bunga



obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan di mana pembayaran bunga obligasi pertama kali pada 9 September 2015, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada 9 Juni 2018.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan peringkat: idAA (*Double A*) untuk periode 6 Maret 2015 sampai dengan 1 Maret 2016 dan telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia pada 10 Juni 2015.

Dana hasil Obligasi ini telah digunakan 100% untuk menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan kendaraan bermotor oleh Perseroan.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 dibantu oleh lembaga dan profesi penunjang pasar modal, yaitu:

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk

Akuntan Publik : KAP Tanudiredja,  
Wibisana dan Rekan  
(a member firm  
of Pricewaterhouse  
Coopers Global Network)

Notaris : Fathiah Helmi, SH

Konsultan Hukum : BM & Partners Law  
Office

Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek  
Indonesia (PEFINDO)

5. **Pada 11 Desember 2015**, Perseroan menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance tahap I Tahun 2015 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp600.000.000.000 dengan jangka waktu paling

lama 5 tahun yang terdiri dari:

**Seri A** : Dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun dan bunga 10,20% pertahun.

**Seri B** : Dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun dan bunga 10,80% pertahun.

Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang performing sekurang-kurangnya sebesar 60% dari nilai pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan di mana pembayaran bunga obligasi pertama kali pada 16 Maret 2015, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada 16 September 2020.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan peringkat: idAA (*Double A*) untuk periode 30 September 2015 sampai dengan 1 September 2016 dan telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia pada 14 Desember 2015.

Dana hasil Obligasi ini telah digunakan 100% untuk menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan kendaraan bermotor oleh Perseroan.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 dibantu oleh lembaga dan profesi penunjang pasar modal, yaitu:

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk

Akuntan Publik : KAP Tanudiredja,  
Wibisana dan Rekan  
(a member firm

of Pricewaterhouse  
Coopers Global Network)  
Notaris : Fathiah Helmi, SH  
Konsultan Hukum : BM & Partners Law  
Office  
Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek  
Indonesia (PEFINDO)

6. **Pada 1 Juni 2016**, Perseroan menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance tahap II Tahun 2016 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.400.000.000.000 (satu triliun empat Ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu paling lama 5 tahun yang terdiri dari:

**Seri A** : Dengan jumlah pokok sebesar Rp720.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun dan bunga 8,95% pertahun.

**Seri B** : Dengan jumlah pokok sebesar Rp680.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun dan bunga 9,25% pertahun.

Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang performing sekurang-kurangnya sebesar 60% dari nilai pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dimana pembayaran bunga obligasi pertama kali pada 1 September 2016, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada 1 Juni 2021.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan peringkat: idAA (*Double A*) untuk periode 30 September 2015 sampai dengan 1 September 2016 dan telah dicatatkan di PT Bursa

Efek Indonesia pada 2 Juni 2016.

Dana hasil Obligasi ini telah digunakan 100% untuk menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan kendaraan bermotor oleh Perseroan. Laporan realisasi penggunaan seluruh dana telah disampaikan kepada OJK dan Bursa efek Indonesia melalui surat No. 079/MTF-CLC.CCS/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 dibantu oleh lembaga dan profesi penunjang pasar modal, yaitu:

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk  
Akuntan Publik : KAP Tanudiredja,  
Wibisana dan Rekan  
(*a member firm*  
of Pricewaterhouse  
Coopers Global  
Network)

Notaris : Fathiah Helmi, SH  
Konsultan Hukum : BM & Partners Law  
Office  
Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek  
Indonesia (PEFINDO)

7. **Pada 7 Oktober 2016**, Perseroan menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance tahap I Tahun 2016 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp500.000.000.000 dengan jangka waktu paling lama 5 tahun yang terdiri dari:

**Seri A** : Dengan jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun dan bunga 8,20% pertahun.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
<b>PROFIL PERUSAHAAN</b>
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

**Seri B** : Dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun dan bunga 8,55% pertahun.

Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang performing sekurang-kurangnya sebesar 60% dari nilai pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dimana pembayaran bunga obligasi pertama kali pada 07 Januari 2017, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada 7 Oktober 2021.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan peringkat: idAA+ (*Double A plus*) untuk periode 28 Juli 2016 sampai dengan 1 Juli 2017 dan telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia pada 10 Oktober 2016.

Dana hasil Obligasi ini telah digunakan 100% untuk menambah modal kerja dalam rangka

pembiayaan kendaraan bermotor oleh Perseroan. Laporan realisasi penggunaan seluruh dana telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui surat No. 007/MTF-CLC.CCS/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 dan revisi Laporan Realisasi melalui surat No. 009/MTFCLC.CCS/I/2017 tanggal 12 Januari 2017.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016 dibantu oleh lembaga dan profesi penunjang pasar modal, yaitu:

Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk
Akuntan Publik	: KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan ( <i>a member firm</i> of Pricewaterhouse Coopers Global Network)
Notaris	: Fathiah Helmi, SH
Konsultan Hukum	: BM & Partners Law Office
Pemeringkat Efek	: PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

### DAFTAR LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

No	Nama	Alamat	Jenis dan Bentuk Jasa	Biaya (Rp)	Periode Penugasan
<b>LEMBAGA PENUNJANG</b>					
1	Kustodian	<b>Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)</b> Alamat: Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lt.5 Jalan Jend.Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190	Agen pembayaran atas pelunasan pokok obligasi dan pembayaran bunga obligasi	-	2018
2	Wali Amanat	<b>PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Divisi Investment Services Bagian Trust &amp; Corporate Services</b> Alamat: Gedung BRI II Lt.30 Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46 Jakarta 10210	Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi	75.000.000	2018
3	Pemeringkat Efek	<b>PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)</b> Alamat: Panin Tower Senayan City Lt.17 Jalan Asia Afrika Lot.19 Jakarta 10270	Memberikan penilaian atau pemeringkat terhadap Obligasi yang diterbitkan Perseroan	454.545.455	2018
4	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	<b>PT Mandiri Sekuritas</b> Alamat: Menara Mandiri Tower I, Lt.25 Jalan Jend. Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12190  <b>PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia</b> Alamat: Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt.11 Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190	Bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum	1.700.000.000	2018
<b>PROFESI PENUNJANG</b>					
1	Kantor Akuntan Publik	<b>Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &amp; Surja (Firma anggota Ernst &amp; Young Global Limited)</b> Alamat: Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telepon: (021) 5289 5000 Faksimili: (021) 5289 4111	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2018	570.000.000	2018
2	Konsultan Hukum	<b>Hendro &amp; Kanon, Advocates and Counsellors at Law</b> Alamat: Graha Binakarsa Lt.4 Jalan HR Rasuna Said Kav. C-18 Jakarta 12940	Melakukan pemeriksaan segi hukum.	450.000.000	2018
3	Notaris	<b>Fathiah Helmi, SH</b> Alamat: Gedung Graha Irama Lt. 6C Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2 Jakarta Selatan Tlp. : (021) 52907304, (021) 52907305-6 Fax. : (021) 5261136	Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi antara lain Perjanjian Perwalianamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Pengakuan Hutang, akta jaminan serta akta-akta pengubahannya.	85.000.000	2018

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
<b>PROFIL PERUSAHAAN</b>
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

#### DAFTAR KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN 6 (ENAM) TAHUN TERAKHIR 2013-2018

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Akuntan	Jasa	Jasa Lainnya	Opini	Biaya Jasa
2018	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Danil Setiadi Handaja, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2018	-	Wajar dalam semua hal yang material	Rp570.000.000
2017	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Danil Setiadi Handaja, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2017	-	Wajar dalam semua hal yang material	Rp506.000.000
2016	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Yasir, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2016	-	Wajar dalam semua hal yang material	Rp460.000.000
2015	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Danil Setiadi Handaja, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2015	-	Wajar dalam semua hal yang material	RP 423.500.000
2014	Purwantono, Suherman & Surja (EY)	Danil Setiadi Handaja, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2014	-	Wajar dalam semua hal yang material	
2013	Purwantono, Suherman, & Surja (EY)	Peter Surja, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2013	-	Wajar dalam semua hal yang material	

#### DAFTAR PENTING LAINNYA

Informasi Perdagangan dan Pencatatan Saham	Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia	Tel: +62 21 515 0515 Email: callcenter@idx.co.id Situs web: www.idx.co.id
Hubungan Investor	Corporate Secretary Arif Reza Fahlepi	Tel.: +62 21 230 5608 Fax.: +62 21 230 5618 Email: corporate.secretary@mtf.co.id

## PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI





PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
<b>PROFIL PERUSAHAAN</b>
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



## PENGHARGAAN DI TAHUN 2018

No	Tanggal	Acara	Penghargaan	Diberikan Oleh
<b>PENGHARGAAN</b>				
1	23 Februari 2018	Indonesia CSR Award-II-2018	Peringkat 3 / Platinum / <i>Very Excellent - A</i>	ECONOMIC REVIEW
2	2 Maret 2018	Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award-III-2018	Peringkat 1 / Platinum / <i>Very Excellent - A</i>	ECONOMIC REVIEW
3	2 Maret 2018	Indonesia Information Technology Award-I-2018	Peringkat 1 / Platinum / <i>Very Excellent - A</i>	ECONOMIC REVIEW
4	9 Maret 2018	Mandiri Synergy Award IT Summit 2018 - Building Mutual Partnership in the Digital Ecosystem	<i>1st Place</i>	BANK MANDIRI
5	13 April 2018	Indonesia Sales Marketing Award - II - 2018	Peringkat 2 / Platinum	ECONOMIC REVIEW
6	13 April 2018	Indonesia Legal Award - I - 2018	Peringkat 4 / <i>Gold</i>	ECONOMIC REVIEW
7	9 Mei 2018	Top 5 Indonesia Most Admired Companies 2018 in Financing Category	Kategori <i>Financing Company</i>	WARTA EKONOMI
8	30 Mei 2018	Indonesia Human Capital Award - IV - 2018	Peringkat 2 / Platinum	ECONOMIC REVIEW
9	29 Juni 2018	Top 100 Enterprises 2018	Best in Financial Industry - <i>Multifinance</i> Category	WARTA EKONOMI
10	10 Agustus 2018	Top <i>Multifinance</i> Company 2018	Kategori Aset > 10 T s/d 20 T	BUSINESSNEWS
11	10 Agustus 2018	Top CEO <i>Multifinance</i> 2018 - Arya Suprihadi	Kategori <i>Multifinance</i>	BUSINESSNEWS
12	10 Agustus 2018	Top Company Bidang Implementasi Teknologi Digital 2018	Kategori <i>Multifinance</i>	BUSINESSNEWS
13	24 Agustus 2018	Indonesia Corporate PR Award 2018: Top Popular Company in <i>Multifinance</i> Sector.	<i>Multifinance</i> Category	WARTA EKONOMI
14	6 September 2018	Infobank <i>Multifinance</i> Award 2018	Predikat Sangat Bagus / <i>Golden Trophy</i>	INFOBANK
15	3 Oktober 2018	Indonesia <i>Multifinance</i> Award 2018	Juara Umum - 1 - <i>Multifinance</i> Terbaik Indonesia	ECONOMIC REVIEW
16	26 Oktober 2018	Indonesia <i>Multifinance</i> Consumer Choice Award 2018 (5th)	<i>Multifinance</i> Company with <i>Very Good Performance</i> Category Asset More that Rp. 10 Trillion	WARTA EKONOMI

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
<b>PROFIL PERUSAHAAN</b>
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

No	Tanggal	Acara	Penghargaan	Diberikan Oleh
17	2 November 2018	Indonesia <i>Good Corporate Governance Award IV 2018</i>	<i>Subsidiary Of Soe's Company - Good's Award, Excellent's Remarks</i>	ECONOMIC REVIEW
18	2 November 2018	Operation Excellence Award I 2018	<i>Subsidiary Of Soe's Company - Platinum's Award, Very Excellent's Remarks</i>	ECONOMIC REVIEW
19	23 November 2018	Apresiasi Indonesia Untuk BUMN 2018; BUMN Heroes Pahlawan Devisa dan Penyelamatan bencana	<i>TOP 4 SOE Subsidiaries IN Financial and Insurance Services Sector</i>	WARTA EKONOMI
20	29 November 2018	TOP 20 FINANCIAL INSTITUTIONS 2018	<i>In Recognition Of Outstanding Achivement In Top 20 Financial Institution 2018</i>	The Finance
21	6 Desember 2018	TOP IT 2018	<i>Arya Suprihadi - Top Leader on IT Leadership 2018</i>	IT Works
22	6 Desember 2018	TOP IT 2018	<i>Top IT Implementation on Multifinance Sector 2018</i>	IT Works
23	19 Desember 2018	Tokoh Finansial Indonesia & BUMN Terbaik	<i>Multifinance Terbaik 2018 - Kategori Aset diatas Rp10 Triliun</i>	Majalah Investor
24	19 Desember 2018	<i>Good Corporate Governance Award 2018 - Indonesia Trusted Companies</i>	<i>Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)</i>	IICG - SWA
SERTIFIKASI				
No	Tanggal	Acara	Periode	Diberikan Oleh
25	5 Maret 2018	Sertifikat Mandiri Tunas Finance sebagai Anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia	1 Januari - 31 Desember 2018	APPI

## DAFTAR ALAMAT KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN, SERTA INFORMASI TERKAIT ENTITAS ANAK

### ALAMAT KANTOR CABANG

No	Provinsi	Nama Cabang	Alamat Terkini	Telp.	Fax.
1	Aceh	Banda Aceh	Jl. Prof. Dr. Muhammad Hasan, Desa Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh	(0651) 635689 -635685	(0651) 635668
2	Sumatera Utara	Medan	Jl. Ringroad No 104 ABC Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang Kota Medan Kodepos 20132 (samping Hotel Sahara Viesta)	061-8220915/ 061-8220981	-
		Rantau Prapat	Jl. Sisingamangaraja, Ruko Kompleks Mall Suzuya, Rantau Prapat, Sumatera Utara	0624-7671497	-
3	Sumatera Barat	Padang	Jl S Parman No 236 A, Kel. Ulak Karang Barat, Kec. Padang Utara, Padang, Propinsi Sumatera Barat	(0751) 4488970	0751) 4488972
		Bukittinggi	Ruko A1 , Jalan Raya Bukittinggi - Padang KM 5, Cingkariang, Padang Luar, Bukittinggi, Sumatera Barat 26181	0752-7839214 & 0752-7839132	
4	Riau	Pekanbaru	Jl. Arifin Ahmad, Komplek Platinum Bisnis Center No 25-26, RT 003/RW 011, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Provinsi Riau 28294	(0761) 63442	-
		Duri	Jl. Hang Tuah No. 386, DURI, Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau	(0765) 595155 / 082883038595/ 082883038596 / 082883038597	0765) 92078
		Ujung Batu/ Rokan Hulu	Jl. Raya Jenderal Sudirman Ujung Batu, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau.	(0762) 7363485/ (0762) 7363484	(0762) 7363486
5	Jambi	Jambi	Jl. Gajah Mada No.85, RT 022/RW 006, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi	(0741) 7550022 / 23/ 24	0741) 7550025
		Muaro Bungo	Jl.Lintas Sudirman Rt.14 Rw.05 Kel. Batang Bungo Kec. Pasar Muara Bungo, Kab. Bungo, Muaro Bungo, Jambi.	0747) 323782 – 23	(0747) 323779
6	Kepulauan Riau	Batam	Ruko Kara Junction Blok A No. 13 A, Batam ( Simpang Kara )	(0778) 464352 / 464354	0778) 464356
		Tanjung Pinang	Ruko Grand Bintang Centre, Jl. DI Panjaitan KM 9, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau.	0771) 7335756	0771) 7335776
7	Bengkulu	Bengkulu	Jl. Pangeran Natadirja KM. 6,5 No. 29 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu	(0736) 347710	(0736) 347575
8	Sumatera Selatan	Palembang 1	Jl. R Sukamto Kompleks Ruko PTC Mall, Blok G No 8 B-C Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang – 30114	0711) 378476 / 363999 / 377234	(0711) 370777
		Palembang 2	Jl. Kol. H. Burlian KM 6 No.1032 RT.20 RW.03, Kel. Sukabangun Kec. Sukarami, Palembang. POS 30151	08111772994/ 08111772976	
		Baturaja	Jl. Dr. Mohammad Hatta No. 589 E, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu 32112. Sumatera Selatan	(0735) 322024 / 322026	0735) 323717
		Lubuklinggau	Jl. Yos Sudarso RT 006 Kel. Majapahit Kec. Lubuk Linggau Timur I Lubuk Linggau, Sumatera Selatan	(0733) 732 9631	(0733) 732 9633

PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

No	Provinsi	Nama Cabang	Alamat Terkini	Telp.	Fax.
9	Lampung	Bandar Lampung	Jl. Pangeran Antasari No.91C, Kel. Kedamaian, Tanjung Karang, Bandar Lampung, Lampung	(0721) 772486 / 773557 / 773614	(0721) 773556 / 772487
		Metro	Jl. AH. Nasution No.123B Rt.25 Rw.07, Yosorejo Metro Timur, Kota Metro Lampung, Lampung	(0725) 7851001 / 7850488	(0725) 7851603
		Tulang Bawang	Jl. Lintas Timur Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung	(0726) 750570	(0726) 750647
		Tanggamus	Jl. Jend. A. Yani No.46A Pringsewu (depan BCA) Kab. Pringsewu - Lampung	(0729) 23826 082880006969 / 082880066969	(0729) 22431
		Bandarjaya	Jl. Proklamator RT 015 RW 006 Lingkungan III, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung	(0725) 529691	(0725) 529690
10	Kep. Bangka Belitung	Pangkal Pinang	JL. Soekarno Hatta No.8A, Pangkal Pinang 33146	(62-717) 436445-424630-4256615	-
11	DKI Jakarta	Pecenongan	Jl. Sukardjo Wirjo Pranoto No.2/6, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	(021) 3847288	(021) 3808939
		Kemayoran	Rukan Mangga Dua Square Blok C 35, Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 , Jakarta Utara - 14420	(021) 22620253	(021) 3808939
		Kelapa Gading	Jl. Boulevard Barat Blok C No.63 A, Plaza Kelapa Gading Inkopal, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta	(021) 45851153, 45859263, 45865547, 45865546	(021) 45851157
		Matraman	Jl. Jatinegara Timur No. 37 RT 008 RW 04, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta	(021) 85917920 / 21 / 22 / 23	(021) 8519721
		Tanjung Duren	JL. Prof Dr Latumenten, Komplek Ruko Seasons City Blok A No. 28, Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Wilayah Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta	(021) 29618062 / 63/ 64	(021) 29618065
		Fatmawati	Rukan Plaza 5, Pondok Indah Blok D No. 5, JL.Marga Guna Raya, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	(021) 27933248	
		Kebon Jeruk	Ruko Rich Palace Blok B III, JL. Meruya Ilir no. 36-40 kelurahan srengseng kecamatan kembangan jak-bar	(021) 58910034 / 58910035	(021) 58910034 / 58910035
		Mampang Prapatan	Jl.Duren Tiga , Nomor 29 A-B, RT 005 / RW 001, Kelurahan Duren Tiga ,Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	(021) 79195795 / 79195796	(021) 79190567
		Mangga Dua	Gedung WTC Mangga Dua Lantai 4 Blok AL 001 s/d AL003, Jl. Mangga Dua Raya Nomor 8, Jakarta Utara, DKI Jakarta	(021) 29986250 - 52	( 021) 29986253
		Lebak Bulus	Ruko Bona Indah Bisnis Center Blok B / I No. 80, Jl Karang Tengah, Kel. Lebak Bulus, Kec Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	(021) 27654001	(021) 27828127
12	Jawa Barat	Duren Tiga 2	Jl.Duren Tiga , Nomor 29 A-B, RT 005 / RW 001, Kelurahan Duren Tiga ,Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	(021) 79195795/ 79195796	
		Pondok Gede	Ruko Taman Jatimakmur, Jl. Raya Jatimakmur Blok A No. 16 G - 16 H, Pondok Gede, Bekasi (patokan dekat swalayan Tip Top)	(021) 85508709/ 85508576	(021) 84978733

No	Provinsi	Nama Cabang	Alamat Terkini	Telp.	Fax.
13	Banten	Cilegon	Jl. Raya Komplek PCI Ruko Cilegon Business Square Blok A No. 6 – 7 RT.05 RW.06, Kel. Kedaleman, Kec Cibeber, Cilegon Banten	0254) 374909/ 374910	(0254) 397413
		Serang	Ruko Ranca Utama Jl Raya Serang – Cilegon KM4 RT 03/04 Kp. Ranca Tales Kel. Drangong kec.Taktakan Serang	(0254) 8496151/ 52	(0254) 210945
		Serpong (BSD)	Ruko BSD Junctions Blok A39 Jl. Pahlawan Seribu Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Utara BSD CITY. Tangerang Selatan	(021) 5382090	(021) 5382091
		Tangerang I	Rukan Tangcity Business Park Blok D60 Jl. Jendral Sudirman No.1 Cikokol Tangerang Indonesia 15117	(021) 29676323	(021) 29676324
		Bintaro	Ruko Emerald Evenue 2 EB/ B-09, Jl. Bintaro Utama Sektor 9 Kel. Perigi Lama, Kec. Pondok Aren	(021) 29418978	
14	Jawa Barat	Bekasi	Ruko Emerald No UA 39, Jl Bulevar Selatan, Summarecon Bekasi, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi. Jawa Barat	(021) 89454997	
		Karawang	Ruko Dharmawangsa 2 Blok A No.33, Grand Taruma, Kelurahan Sukamakmur, Kec.Teluk Jambe Timur, Karawang Barat	(0267) 8633849	0267) 8457295
		Depok	Rukan Depok Mall Jl. Raya Margonda Blok B-1 No. 50, Kemirimuka, Beji, Depok, Jawa Barat	(021) 7756733/ 7758948/ 7759144	(021) 7756762
		Bogor	Jl. Siliwangi No. 60 B dan B-1, Bogor, Jawa Barat	(0251) 8371118 / 8370195	(0251) 8332874
		Cibubur	Ruko Cibubur Time Square, Jl. Transyogi Alternatif Cibubur, Blok B4 No. 21, Kel. Jati Karya, Kec. Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat	(021) 84300687	(021) 84300667
		Cikarang	Cikarang central city blok E no 15, Jl. Raya Cikarang - Cibusah, Ciantra, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17530	(021) 89903056	
15	Jawa Barat	Cibinong	Ruko Cibinong City Center Blok D 3B, Jl. Tegar Beriman Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, 16916.	(021) 29577430	(021) 29577431
		Bekasi 2	Ruko ROXY Blok B No.16 Lippo Cikarang, Jalan MH Thamrin Blok B No. 16, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat.	(021) 89903056	(021) 89903180
		Sukabumi	Jl.Jendral Sudirman No.57F, Rt.001 Rw.005, Kel.Sriwidari, Kec. Gunung Puyuh, Sukabumi – 43121	0266) 6223723/ 6223038	(0266) 6249245
		Bandung 1	Kopo Plaza Kav. C10 – 11, Jl. Peta Lingkar Selatan, Bandung, Jawa Barat	(022) 6040119 / 6040120	(022) 6074550
		Bandung 2	Jl. Batu Nunggal Indah Raya No. 249, Bandung, Jawa Barat	(022) 4219029 / 4219039	(022) 4209829
		Bandung 3	Ruko Plaza Asia Blok B 07-08, Jl. HZ Mustofa, Tasikmalaya 46126	(022) 87306880 /87306851/ 344917	-
		Tasikmalaya	Ruko Plaza Asia Blok B 07-08, Jl. HZ Mustofa, Tasikmalaya 46126	(0265) 344905 / 344906	(0265) 344844



PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

**PROFIL PERUSAHAAN**

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

No	Provinsi	Nama Cabang	Alamat Terkini	Telp.	Fax.
		Cirebon	Ruko Kesambi Regency No. 4, Jl. Raya Kesambi, Kel.Kesambi, Kec. Kesambi, Cirebon, Jawa Barat	(0231) 210285	(0231) 210280
		Garut	Jl. Pramuka Kompl Ruko Intan Bisnis Center (IBC), Blok I No. 27, Kel. Pakuwon, Kec. Garut Kota, Kab Garut, Jawa Barat	(0262) 544605	(0262) 4890607
		Subang	Jl. Otista No. 254, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	(0260) 415869	(0260) 415879
16	Jawa Tengah	Tegal	Ruko Komp. Nirmala Square Blok D/2, Jl. Yos Sudarso, Tegal, Jawa Tengah	(0283) 324066	(0283) 340113
		Purwokerto	Ruko Eks IAIN Jl. M.T. Haryono Nomor 3A-4A, Pasar Wage, Purwokerto, Jawa Tengah	(0281) 642645	(0281) 642646
		Semarang	Jl. Indraprasta No. 30 A – B, Kel. Pendrikan Kidul, Kc. Semarang Tengah, Kota Semarang	(024) 3589007 / 3589008	(024) 3587168
		Solo	Ruko Adi Sucipto Jl. Adi Sucipto 67 C RT 003/RW 011 Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah 57143	(0271) 738989 / 723557	(0271) 735038
		Kudus	JL. AKBP R Agil Kusumadya NO 32 RT 002 RW 001 Kelurahan Jati Kulon Kecamatan Jati, Kudus-59347	0291-4252070/ 4252037	(0291) 4250271
		Magelang	Ruko Metro Square Blok C No. 12A – 14, Jl. Mayjen Bambang Sugeng , Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan kabupaten Magelang – Jawa Tengah 56172	(0293) 312406 / 3218686	(0293) 310536
		Pekalongan	Jl. Dr. Sutomo Blok B2 No. 10, Komplek Ruko Dupan Square, Kelurahan Baros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	(0285) 4420100	
17	DI Yogyakarta	Yogyakarta	Ruko Sumber Baru Square Kav.W Jl.Ringroad Utara Jombor Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta (Depan Kampus UTY Jombor)	(0274) 860 9901 /8609902	(0274) 446 9718
18	Jawa Timur	Surabaya 1	Jl. Mayjen Sungkono 149 - 151 Ruko Rich Palace Blok I 5 Surabaya Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis	(031) 99533640	(031) 8420495
		Surabaya 2	Jl. Raya Tenggilis No. 23 Ruko Tenggilis Square Kav 5 & 6 RT 005 RW 002 Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya.	(031) 8420450	(031) 8420495
		Malang	Jl. Tumenggung Suryo No. 98, Kav. 1, Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, Malang, Jawa Timur	(0341) 497927/ 497934	(0341) 486429
		Kediri	Jl. Kawi No. 21, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kediri, Jawa Timur kodepos 64112	(0354) 775192	(0354) 780911
		Jember	Ruko Gajah Mada Square A9, Jl. Gajah Mada No.187, Kel. Kaliwates, Kec.Kaliwates, Jember, Jawa Timur	(0331) 425959 / 426969	(0331) 483939
		Madiun	Jl. Mayjend Sungkono No 31 , Madiun 63128	(0351) 473176, 476198,476298/ 08283010067	(0351) 473123
		Tuban	Jl. Diponegoro No.34 C, Kel. Latsari, Kec. Tuban, Tuban, Jawa Timur	(0356) 326381	(0356) 325289

No	Provinsi	Nama Cabang	Alamat Terkini	Telp.	Fax.
		Mojokerto	Jl. Mojopahit 456, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Propinsi Jawa Timur.	(0321) 329688	0321) 329611
		Gresik	Ruko Kartini Megah Kav. A10, Jl. RA Kartini No. 150-152 RT 003/RW 007, Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur.	(031) 3985189	(031) 3985188
		Banyuwangi	Ruko Golden City, Jl. S Parman No. 111, Kel. Pakis, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur	(0333)-3382601	
19	Bali	Denpasar	Jl. Buluh Indah no.53D Kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara Bali 80118	(0361) 8469896 / 8469897	(0361) 8469897
		Gianyar	Jl. Erlangga No.15 C, Kel. Gianyar, Kec. Gianyar, Gianyar, Bali	(0361) 944478 / 944480/ 944488	(0361) 941055
20	Nusa Tenggara	Mataram	Jl. Selaparang No. 47 A-B, Kec. Cakranegara Timur, Mataram, Nusa	(0370) 638277	-
21	Kalimantan Barat	Pontianak	Jl. Ahmad Yani Komplek Sentra Bisnis Ayani Megamall Blok B No 23 Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak 78121 Kalimantan Barat	(0561) 78171360/ 66555718	(0561) 6655718
		Banjarmasin	Jl. Veteran Km. 4,5, Rt. 14 Rw. 02 No. 86, Pengambangan, Banjar timur, Banjarmasin 70237	(0511) 3277145/ 3277147	(0511) 4315663
		Banjarbaru	Jl. Jend. A.Yani KM.35 Ruko Fortuna No.48 RT 005/ RW 001, Kel. Gunung Paikat, Kec. Banjarbaru Selatan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan	(0511) 4772067	(0511) 4772063
22	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Jl. G Obos Induk, Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Palangkaraya (Kalimantan Tengah)	(0536) 3224277	0536) 3224677
23	Kalimantan Timur	Samarinda	Jl. Dr. Sutomo No.4b, Rt. 40, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda 75124	(0541) 7273930/ 7772430	-
		Balikpapan	Jl. MT. Haryono No.12 Rt.33 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan-Kalimantan Timur	0542-7206520	-
		Tarakan	Jl Yos Sudarso Rt 14 No 5 Kel Selumit Pantai Kec Tarakan Tengah	(0551) 2029620 / 2029621 / 2029625	0551-2029625
		Bontang	Jl. Bhayangkara Ruko Btc, Depan Polres Bontang, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Bontang, Kaltim	(0548) 24488 / 24499	(0548) 24441
24	Sulawesi Selatan	Makassar	Jl. Veteran Selatan No. 311, Kel. Mamajang Dalam, Kec. Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan	(0411) 832789 / 832567	(0411) 832678
		Makassar 2	Jl. Ap Pettarani Kav 18, Ruko Pettarani Business Centre No E3, Kel. Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar	(0411) 467566/ 4677972	
		Parepare	Jl. Sultan Hasanuddin No. 16 A, Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung, Pare-Pare, Sulawesi Selatan	(0421) 28622 / 28623 / 28652	(0421) 28607
25	Sulawesi Tenggara	Kendari	Kompleks Senapati Land Blok A No. 14, Jl. Brigjend M. Yunus By Pass Kendari, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara	(0401) 3135093 / 3135094	(0401) 3135085
26	Sulawesi Utara	Manado	Jl. Pierre Tendean Komp. Ruko Marina Plaza, Block C NO 03, Manado 95000	(0431) 8819809	-

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
<b>PROFIL PERUSAHAAN</b>
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

No	Provinsi	Nama Cabang	Alamat Terkini	Telp.	Fax.
27	Sulawesi Tengah	Palu	Perkantoran Vatulemo, Jl. Muh. Yamin Blok D1, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94112	(0451) 454129/454139	(0451) 454806
		Luwuk	Jl. Urip Sumoharjo no. 18B, Kel. Keraton, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah 94711	(461) 22157/23128	
28	Gorontalo	Gorontalo	Jl. Nani Wartabone No 131 , Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Propinsi Gorontalo	(0435) 822315	(0435) 822315
29	Kalimantan Tengah	Sampit	Jl Pangeran Antasari Ruko No 7, Kel Mentawa Baru, Ketapang, Kec Ketapang Sampit, Kalimantan Tengah	(0531) 23216/23206	-
30	Kalimantan Barat	Sintang	Jl Lintas Melawi Komplek Ruko Golden Square Blok A 9 RT 3 RW 01 Kel Ladang Kec Sintang	(0565) 2022080/2022072	-
		Ketapang	Ruko Grand Rivera No. A2 Jl. Gatot Subroto RT. 002 RW. 001 Desa Paya Kumang Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat 78813	(0354) 3032761	-
31	Sulawesi Utara	Kotomobagu	Jl. Cempaka RT:006 RW:003 Lingkungan II, (Samping Lapangan Mogolaing Sebelah SDN 1 Mogolaing) Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat, Sulawesi Utara-95716	(0434) 2621540	-
32	Sulawesi Barat	Mamuju	Jl. Jendral Sudirman ( Depan Hotel Tiplayu) Mamuju, Sulawesi Barat		
33	NTT	Kupang	Jl. Timor Raya RT011/RW004 Kel. Oesapa Barat, Kelapa Lima, Kupang	081237571752	-
34	Maluku Selatan	Ambon	Kompleks Pertokoan Mutiara Super Block Jln Mutiara – Mardika , Kel Rijali, Kec.Sirimau Ambon Maluku 97123	(0911) 3829445	
35	Papua	Jayapura	Jl. Raya Abepura Kotaraja, Kel. Vim, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua	(0967) 5187813	
		Sorong	Jl. Basuki Rachmat km. 12, Depan Batalyon 752, Ruko Central (samping Bank Papua), Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Kode Pos 98418		

## ALAMAT KANTOR SATELIT

No	Cabang Utama	Kantor Satelit	Alamat
1	Padang	Pasaman Barat	Nagari Lingkungan Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat.
2	Bukittinggi	Solok	Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan (Pandan Dekat), Kel. Pasar Pandan Air Mtai, Kec. Tanjung Harapan, Kotamadya Solok, Propinsi Sumatera Barat.
3	Pangkal Pinang	Belitung	Jalan Merdeka, Dewa Kelurahan Kota, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4	Baturaja	Lahat	Jalan Mayor Ruslan II, Komplek Pertokoan Citra Niaga Lahat, Kel. Pasar Baru, Kec. Lahat, Kab. Lahat, Sumatera Selatan.
5	Palembang 2	Tugu Mulyo	Jalan Lintas Timur, Kampung III, RT 001, Kel. Tugu Mulyo, Kec. Lempuing, Kab Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan.
6	Bandung 2	Sumedang	Jalan Prabu Geusan Ulun No. 137, Sumedang, Jawa Barat
7	Cirebon	Indramayu	Desa Karanganyar, Kec. Kandanghaur, Keb. Indramayu, Jawa Barat.
8	Purwokerto	Cilacap	Jalan A. Yani No.100 RT. 03 RW.14, Kel. Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap.
9	Semarang	Salatiga	Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah.
10	Mataram	Sumbawa	Jalan Diponegoro No 10 Kel. Bugis, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat.
11	Gianyar	Singaraja	Jalan A. Yani Nomor 60, Kel. Kaliuntu, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Provinsi Bali.
12	Kediri	Blitar	Ruko Merdeka Trade Center, Jalan A. Yani No.7, Kel. Kepenjelor, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Propinsi Jawa Timur.
13	Gresik	Lamongan	Jalan Lamongrejo No. 120, Kel. Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Jawa Timur.
14	Malang	Pasuruan	Jalan Panglima Sudirman No.11, Pasuruan.
15	Makassar	Bone	Jalan Bajoe Desa Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab. DT II Bone, Sulawesi Selatan.
16	Kendari	Kolaka	Jalan Chairil Anwar, Kel. Lomokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka
17	Gorontalo	Marisa	Desa Buntulia Selatan, Kec. Duhiaadaa, Kab. Pohuwato, Propinsi Gorontalo
18	Makassar	Bulukumba	Jalan Doktor Sam Ratulangi, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan.
19	Parepare	Palopo	Kelurahan Surutanga, Kec. Wara Timur, Kota Palopo
20	Bandar Lampung	Bandar Lampung	Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung

Hingga akhir tahun 2018, Perseroan tidak memiliki entitas anak. Dengan demikian, tidak dapat disajikan informasi terkait alamat entitas anak.

## INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

**PROFIL PERUSAHAAN**

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik mendorong transparansi informasi pada situs web dari emiten atau perusahaan publik di Indonesia. Perseroan memiliki situs web resmi dengan alamat [www.mtf.co.id](http://www.mtf.co.id) yang terbagi ke dalam 2 (dua) platform, yaitu situs web produk dan jasa dengan alamat [www.mtf.co.id](http://www.mtf.co.id) yang dikelola oleh marketing, dan situs web korporasi dengan alamat [www.mtf.co.id/korporat](http://www.mtf.co.id/korporat) yang dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.

Situs web Perseroan juga telah tersedia dalam 2 (dua) bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Perseroan secara berkala memperbarui situs web untuk senantiasa memberikan informasi terbaru terkait Perseroan kepada para pemangku kepentingan serta dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

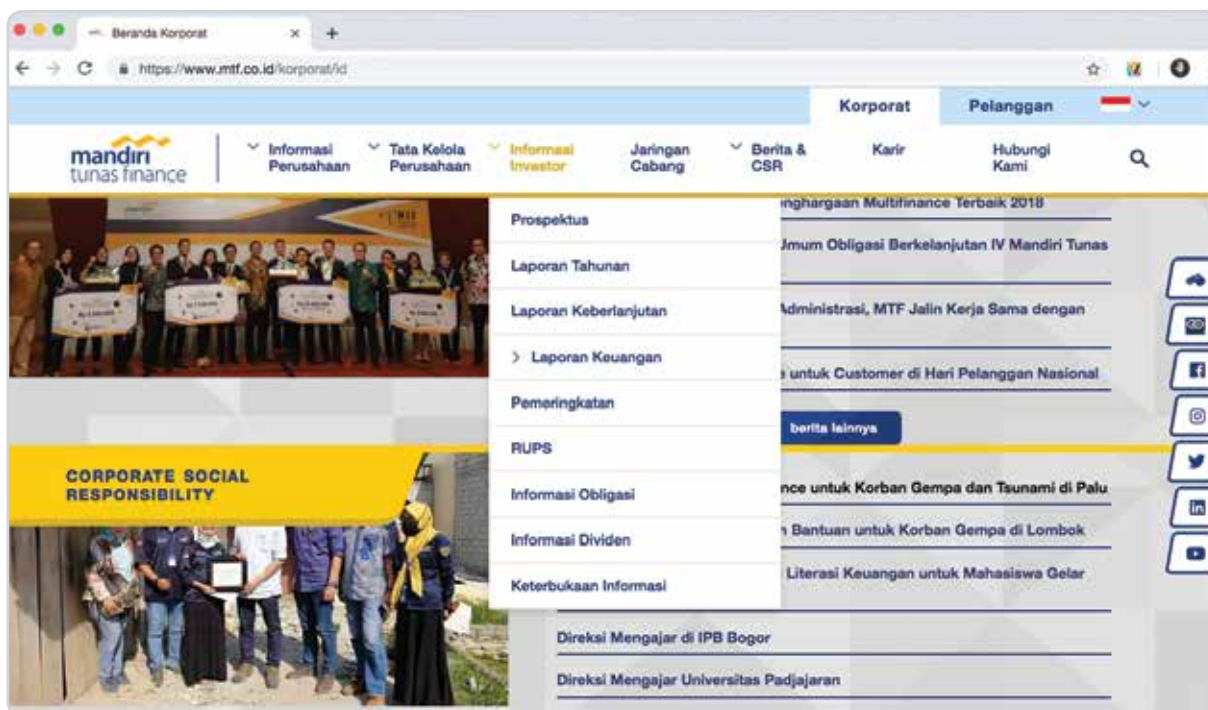
## NAVIGASI SITUS WEB KORPORAT MANDIRI TUNAS FINANCE

[www.mtf.co.id/korporat](http://www.mtf.co.id/korporat)

Menu	Cakupan Konten
<b>Informasi Perusahaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejarah MTF</li> <li>• Struktur Organisasi Perusahaan</li> <li>• Struktur Kepemilikan Saham</li> <li>• Struktur <i>Group</i> Perusahaan</li> <li>• <i>Management</i></li> <li>• Profesi Penunjang</li> <li>• Anggaran Dasar</li> <li>• Produk Pembiayaan</li> <li>• Penghargaan</li> </ul>
<b>Tata Kelola Perusahaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktik Tata Kelola</li> <li>• <i>GCG Charter</i></li> <li>• <i>Corporate Code of Conduct</i></li> <li>• Piagam Komite Audit</li> <li>• Kode Etik Pegawai</li> <li>• Pedoman Kerja Komite-Komite</li> <li>• Anggota Komite Audit</li> <li>• Prosedur Nominasi dan Remunerasi</li> <li>• Kebijakan Manajemen Risiko</li> <li>• Kebijakan Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran</li> </ul>
<b>Informasi Investor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prospektus</li> <li>• Laporan Tahunan</li> <li>• Laporan Keberlanjutan</li> <li>• Laporan Keuangan</li> <li>• Pemingkatan</li> <li>• RUPS</li> <li>• Informasi Obligasi</li> <li>• Informasi Dividen</li> <li>• Keterbukaan Informasi</li> </ul>
<b>Jaringan Cabang</b>	Kanal untuk melihat cakupan jaringan usaha MTF yang tersebar di Indonesia
<b>Berita &amp; CSR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita Kegiatan Korporat</li> <li>• Berita CSR</li> <li>• Galeri Video</li> <li>• Liputan Media</li> <li>• Siaran Pers</li> </ul>
<b>Karir</b>	Micro site dengan alamat <a href="http://www.karir.mtf.co.id">www.karir.mtf.co.id</a> tentang informasi lowongan pekerjaan di Perseroan
<b>Hubungi Kami</b>	Kanal untuk dapat mengirimkan pesan berbasis situs web kepada Perseroan



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
<b>PROFIL PERUSAHAAN</b>
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



Situs web Perseroan menjadi portal digital resmi korporasi yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang

komprehensif tentang Perseroan kepada khalayak luas.

Uraian	Ketersediaan	Keterangan
Struktur grup perusahaan dan informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu	✓	Terdapat di menu Informasi Perusahaan > Struktur Organisasi Perusahaan
Isi Kode Etik	✓	Terdapat di menu Tata Kelola Perusahaan > Kode Etik Pegawai
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan	✓	Terdapat di menu Informasi Investor > RUPS
Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir)	✓	Terdapat di menu Informasi Investor > Laporan Keuangan > Laporan Keuangan Tahunan
Profil Dewan Komisaris dan Direksi	✓	Terdapat di menu Informasi Perusahaan > Management
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit <i>Audit Internal</i>	✓	Terdapat di menu Tata Kelola Perusahaan

✓ = tersedia pada situs web Perseroan

X = belum tersedia pada situs web Perseroan

## PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNAL

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/ Tanggal	Penyelenggara
<b>DEWAN KOMISARIS</b>				
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	Workshop	Workshop Peningkatan Kompetensi Melalui Edukasi Terkait Perencanaan Keuangan	Jakarta, 8 Nopember 2018	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
	Seminar	Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Tahun 2019	Jakarta, 15 November 2018	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
Harry Gale (Komisaris)	Pelatihan	Sertifikasi Dasar Pembiayaan Komisaris	Jakarta, 2 Agustus 2018	Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI)
	Workshop	Workshop Peningkatan Kompetensi Melalui Edukasi Terkait Perencanaan Keuangan	Jakarta, 8 Nopember 2018	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
	Seminar	Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Tahun 2019	Jakarta, 15 November 2018	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
Ravik Karsidi (Komisaris Independen)	Pelatihan	Sertifikasi Dasar Pembiayaan Komisaris	Jakarta, 4 April 2018	Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI)
<b>DIREKSI</b>				
Arya Suprihadi (Direktur Utama)	Seminar	Seminar Nasional Transparansi Dan <i>Disclosure</i> Sektor Jasa Keuangan Di Indonesia : Praktik Saat Ini Vs <i>International Best Practices</i>	Jakarta, 26 April 2018	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & World Bank
	Seminar	Seminar Nasional Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Revolusi Industri 4.0 (Digital)	Jakarta, 7 Mei 2018	Lembaga Manajemen Indonesia Banking School
	Seminar	Seminar Nasional "Perusahaan Pembiayaan Dimata Perbankan"	Jakarta, 8 Mei 2018	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
	Seminar	Seminar International " <i>Digitalization as Multifinance's New Era</i> "	Singapura, 21 September 2018	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)

PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)	Seminar	Seminar Nasional Industri Pembiayaan Di Pasar Modal	Jakarta, 26 Juli 2018	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
	Workshop	Pembicara untuk Materi Pemasaran dalam Training of Basic Certification Program	Jakarta, 5 – 6 November 2018	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
	Seminar	Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Tahun 2019	Jakarta, 15 November 2018	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
Armendra (Direktur)	Seminar	Seminar Nasional Industri Pembiayaan Di Pasar Modal	Jakarta, 26 Juli 2018	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
	Workshop	Workshop "Mekanisme Internal Dispute Resolution dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan"	Jakarta, 5 - 6 September 2018	Badan Mediasi Pembiayaan, Pergadaian, dan Ventura Indonesia (BMPPVI)
	Workshop	Workshop Peningkatan Kompetensi Melalui Edukasi Terkait Perencanaan Keuangan	Jakarta, 8 Nopember 2018	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
	Seminar	Seminar International Insuring Sustainable Business Strategy (ISBS)	Semarang, 15 November 2018	Insuring Sustainable Business Strategy (ISBS)
Albertus Hendrianto (Direktur)	Seminar	Seminar Nasional "Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Multifinance</i> : Bagaimana Bank Melihat <i>Multifinance</i> Sekarang Dan Di Masa Datang?"	Jakarta, 6 September 2018	Info Bank
	Workshop	Workshop "Mekanisme Internal Dispute Resolution dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan"	Jakarta, 5 - 6 September 2018	Badan Mediasi Pembiayaan, Pergadaian, dan Ventura Indonesia (BMPPVI)
	Seminar	Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Tahun 2019	Jakarta, 15 November 2018	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/ Tanggal	Penyelenggara
Bonifasius Perana Citra Ketaren (Deputi Direktur)	Seminar	Seminar Nasional "Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Multifinance</i> : Bagaimana Bank Melihat <i>Multifinance</i> Sekarang Dan Di Masa Datang?"	Jakarta, 6 September 2018	Info Bank
	<i>Workshop</i>	<i>Workshop</i> "Mekanisme Internal Dispute Resolution Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan"	Jakarta, 5 - 6 September 2018	Badan Mediasi Pembiayaan, Pergadaian, dan Ventura Indonesia (BMPPVI)
	<i>Workshop</i>	<i>Workshop</i> "PSAK No.71 (IFRS 9) : Klasifikasi, Pengukuran & Penurunan Nilai Di Perusahaan Pembiayaan"	Jakarta, 17 - 18 Oktober 2018	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
William Francis Indra (Deputi Direktur)	Seminar	Seminar Nasional Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Revolusi Industri 4.0 (Digital)	Jakarta, 7 Mei 2018	Lembaga Manajemen Indonesia Banking School
	Seminar	Seminar Nasional " <i>Big Data</i> : <i>Changing The Way Of Non Bank Financial Institutions Business</i> "	Yogyakarta, 13 Agustus 2018	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
	Seminar	Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Tahun 2019	Jakarta, 15 November 2018	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
<b>PROFIL PERUSAHAAN</b>
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
<b>KOMITE AUDIT</b>				
Komite Audit	Sertifikasi	Sertifikasi Dasar Pembiayaan Komisariss	Jakarta, 4 April 2018	Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI)
<b>KOMITE NOMINASI &amp; REMUNERASI</b>				
Komite Nominasi & Remunerasi	Workshop	Workshop Peningkatan Kompetensi melalui Edukasi terkait Perencanaan Keuangan	Jakarta, 8 November 2018	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
	Seminar	Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Tahun 2019	Jakarta, 15 November 2018	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
	Seminar	3rd Asia Pacific HR Forum	Jakarta, 2018	PT Indonesia Lebih Baik
<b>KOMITE PEMANTAU RISIKO</b>				
Komite Pemantau Risiko	Workshop	Workshop Peningkatan Kompetensi melalui Edukasi terkait Perencanaan Keuangan	Jakarta , 8 November 2018	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
	Seminar	Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Tahun 2019	Jakarta , 15 November 2018	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
<b>SEKRETARIS PERUSAHAAN</b>				
Arif Reza Fahlepi (Sekretaris Perusahaan)	Seminar	<i>Understanding Media Policies in Digital Era</i>	2018	PR Indonesia
	Workshop	<i>PR Assessor Certification</i>	2018	Badan Nasional Sertifikasi Indonesia
	Seminar	Humas 4.0 Tantangan Kebangsaan dan Reputasi Indonesia	10 – 11 Desember 2018	Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas)
<b>AUDIT INTERNAL</b>				
Dayu Rasmini (Kepala Divisi Audit Internal)	Seminar	<i>Data Analytic &amp; Continuous Audit</i>	2018	Bank Mandiri
	Seminar	Teknik Komunikasi, Kepemimpinan, Jejaring Kerja, Pendeteksian dan Metodologi Mengenali Kebohongan	2018	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing





REFERENSI  
MTF

COACHING  
PROJECT

SIGN  
HERE

SIGN  
HERE

VENDOR  
TRAINING  
MTF

BAKERNAS  
MTF  
FCBR

MANDIRI TUNAS FINANCE TARGETKAN Rp 1 TRILIUN  
MELALUI PENAWARAN UMUM ORGASIS BERKELANJUTAN IV  
PRESS RELEASE

MANDIRI  
PRESS RELEASE

Sebagai perusahaan pembiayaan yang terus berkembang, PT Mandiri Tunas Finance (MTF) telah mendapatkan penghargaan sebagai "Best of the Best" dalam kategori "Best of the Best" di ajang Indonesia's Best Awards 2018. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang dinilai sebagai yang terbaik dalam bidangnya. MTF telah meraih penghargaan ini berkat kinerja yang konsisten dan inovatif dalam menyediakan layanan keuangan yang berkualitas kepada nasabah.

Table with columns for financial data, including dates and numerical values.

Item	Value	Unit
...	...	...
...	...	...



# ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

Tinjauan Perekonomian dan Industri	140
Rencana Strategis 2018	144
Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha	146
Tentang Kegiatan Usaha Perusahaan	146
Segmen Operasi	152
Analisis Segmen Usaha berdasarkan Kelompok Nasabah Utama dan Produk	153
Analisis Segmen Usaha Berdasarkan Informasi Geografis	163
Tinjauan Keuangan	164
Standar Penyajian Informasi dan Kesesuaian Terhadap Standar Akuntansi Keuangan	164
Posisi Keuangan	164
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	173
Arus Kas	178
Rasio-rasio Keuangan	180
Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang	185
Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktural Modal	187
Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal	190
Realisasi Investasi Barang Modal	190
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/ atau Restrukturisasi Utang/ Modal	191

Perbandingan Antara Target Anggaran dengan Realisasi, dan Proyeksi Usaha	191
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan	194
Dampak Nilai Tukar Mata Uang Asing	195
Prospek Usaha	195
Aspek Pemasaran	196
Tinjauan Keuangan Lainnya	199
Kebijakan Dividen dan Pembagiannya	199
Kontribusi Terhadap Negara	200
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/ atau Manajemen (ESOP/MSOP)	201
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan pihak Afiliasi/pihak Berelasi	202
Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi	206
Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan	207
Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan	209
Informasi Kelangsungan Usaha	210
Peta Jalan Usaha: Rencana Jangka Panjang	211

## TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

### **TAHUN 2018 MERUPAKAN TAHUN YANG MENANTANG BAGI INDONESIA. GEJOLAK PEREKONOMIAN GLOBAL TURUT BERIMBAS PADA PEREKONOMIAN INDONESIA**



#### **KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL**

Di tahun 2018, perekonomian global mengalami gejolak di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Menguatnya fundamental perekonomian Amerika Serikat di tengah perlambatan pertumbuhan diberbagai negara Eropa, Jepang dan Tiongkok. Hal ini mendorong *The Fed* untuk menaikkan suku bunga FFR. Terhitung sepanjang 2018, *The Fed* telah menaikkan suku bungan sebanyak empat kali dengan masing-masing sebesar 25bps atau total sebesar 1% menjadi 2,25% - 2,50%. Kenaikan suku bunga *The Fed* mengakibatkan terjadinya *capital outflow* dari berbagai negara menuju Amerika Serikat dan menguatnya nilai tukar Amerika Serikat terhadap berbagai mata uang negara lainnya. Untuk dapat mempertahankan kondisi perekonomian Indonesia,

BI turut menaikkan suku bunga acuannya. Terhitung pada 2018, BI telah menaikkan suku bunga acuan BI 7-day *Repo Rate* sebanyak enam kali dengan total 1,75% menjadi 6,00%.

Di sisi lain, perdagangan dunia juga mengalami ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan sejumlah negara. Gejolak perdagangan ini mengakibatkan ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada penurunan pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas. Hal ini dapat memberikan efek rambat terhadap perdagangan secara global antar negara lain yang berujung pada berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

Pada 2019 dan 2020, *The Fed* diperkirakan masih akan menaikkan kembali suku bunga FFR masing-masing sebanyak dua kali yang diiringi dengan proyeksi

PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

**ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN**

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



perlambatan pertumbuhan di Amerika Serikat. Perlambatan perekonomian juga akan berlanjut dialami oleh Eropa, Jepang, India dan Tiongkok.

## **PERSPEKTIF PEREKONOMIAN NASIONAL DI TAHUN 2018**

Tahun 2018 merupakan tahun yang menantang bagi Indonesia. Gejolak perekonomian global turut berimbas pada perekonomian Indonesia. Tercatat sepanjang 2018, BI telah menaikkan suku bunga acuan BI 7-day *Repo Rate* sebanyak enam kali dengan total kenaikan 1,75% menjadi 6,00% pada akhir 2018 sebagai respon atas naiknya suku bunga FFR Amerika Serikat (AS). Akibat dari kenaikan suku bunga FFR, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pun melemah. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada 2018

meningkat dari awal tahun sebesar Rp 13.542/USD dan ditutup menjadi Rp 14.481/ USD (kurs tengah) pada akhir tahun 2018 dengan nilai tertinggi pada 11 Oktober 2018 adalah Rp 15.253/USD. Sebagai dampak dari kenaikan suku bunga acuan BI, sumber pendana pun turut menaikkan suku bunga pinjaman yang berdampak pada kenaikan suku bunga sumber pendanaan serta keterbatasan sumber dana untuk perusahaan pembiayaan.

Di tengah perlambatan perekonomian Eropa dan Jepang yang memberikan dampak ke perlambatan ekonomi dunia, perang dagang antara AS dan Tiongkok turut mengguncang perdagangan global. Seperti yang telah diprediksi ekonom dunia, Tiongkok akan mulai mengalami perlambatan pertumbuhan perekonomian ditambah dengan kondisi ketidakpastian perdagangan global yang turut memperparah perlambatan pertumbuhan

ekonomi yang merembet ke berbagai negara. Melambatnya pertumbuhan perekonomian Tiongkok sebagai penggerak sepertiga dari perekonomian dunia dan tujuan ekspor nomor satu Indonesia tentu akan membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti akan melebarnya defisit neraca perdagangan.

Di sisi lain, Indonesia masih optimis dapat mencapai pertumbuhan PDB 2019 sebesar 5,3% yang lebih baik dari 2018 yaitu 5,2% didukung oleh laju inflasi yang terkendali. Optimisme tersebut didorong oleh penyelesaian pembangunan infrastruktur sebagai pendorong investasi dan tahun pemilu yang mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. Pemerintah berharap iklim politik Indonesia di 2019 dapat memberikan dampak positif dan kondusif sehingga iklim investasi pun dapat terjaga.

## TINJAUAN INDUSTRI

Industri Pengolahan Non-Migas (manufaktur), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar, Konstruksi, dan Pertambangan masing-masing menyumbang 17,49%, 13,53%, 13,01%, 10,36%, dan 8,11% terhadap PDB Indonesia dengan total sebesar 62,50%. Sedangkan untuk pertumbuhan PDB signifikan dialami oleh industri Informasi dan Komunikasi, Transportasi dan Pergudangan, dan Konstruksi masing-masing sebesar 7,80%, 7,59%, dan 6,27%.

Proyek pembangunan infrastruktur pemerintah turut menjadi menyokong pertumbuhan Industri Konstruksi yang merupakan penyokong pertumbuhan PDB Indonesia di tahun 2018. Proyek infrastruktur tersebut juga merupakan salah satu pendorong investasi sekaligus katalis atas

pertumbuhan industri lain seperti Perdagangan serta Transportasi dan Pergudangan. Dengan semakin banyaknya jalan penghubung dan sarana pendukung yang membantu pendistribusian barang, hal tersebut dapat menjadi stimulus atas peningkatan konsumsi masyarakat.

Menjawab era Revolusi Industri 4.0 dimana industri memasuki era ekonomi digital dengan memanfaatkan konektivitas dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas rantai manufaktur, Indonesia telah merancang peta jalan *Making Indonesia 4.0* sebagai strategi mewujudkan visi Indonesia menjadi 10 besar negara dengan perekonomian terbesar pada 2030. Langkah penggunaan konektivitas dan digitalisasi sudah mulai tercermin dari besarnya pertumbuhan PDB industri Informasi dan Komunikasi. Dalam peta jalan *Making Indonesia 4.0* terdapat lima industri yang menjadi fokus implementasi, yaitu: makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Kelima industri tersebut merupakan bagian dari industri Pengolahan Non-Migas yang merupakan kontributor utama dari PDP Indonesia dimana upaya pertumbuhan di industri tersebut akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan PDB Indonesia.

Industri pembiayaan sendiri pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan 9% dimana pembiayaan konvensional bertumbuh 12% sedangkan pembiayaan syariah turun -45%. Disinyalir hal ini diakibatkan oleh adanya pengetatan peraturan OJK mengenai uang muka pembiayaan syariah yang serupa dengan pembiayaan konvensional sehingga menurunkan daya saing pembiayaan syariah. Berdasarkan data APPI, pembiayaan konvensional mobil dan motor yang menguasai rata-rata 73% dari total industri pembiayaan hanya tumbuh 11% dan 16% ditopang oleh kenaikan harga jual kendaraan,



PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

**ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN**

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

namun di sisi lain pembiayaan mobil dan motor secara syariah mengalami penurunan pertumbuhan drastis hingga lebih dari 50%. Pembiayaan mesin/alat berat dengan menggunakan pembiayaan konvensional dan syariah sama-sama mengalami pertumbuhan signifikan. Tercatat pembiayaan mesin/alat berat secara konvensional mengalami pertumbuhan 40%, sedangkan pembiayaan syariah mengalami pertumbuhan 38%. Hal ini diakibatkan dari adanya kenaikan permintaan pembiayaan dari nasabah pada industri pertambangan dan perdagangan yang tumbuh signifikan.

## POSISI MANDIRI TUNAS FINANCE DALAM INDUSTRI PEMBIAYAAN

Kondisi saat ini tingkat penetrasi kepemilikan mobil baru mencapai 10% dari total penduduk Indonesia dengan bonus demografi dimana sebagian besar berada usia produktif. Di sisi lain, 70% dari penjualan kendaraan masih dilakukan melalui pembiayaan kredit. Berbagai katalis tersebut

merupakan pendorong bagi pertumbuhan industri otomotif sehingga industri otomotif di Indonesia masih sangat menarik karena memiliki ruang pertumbuhan yang masih besar.

Sebagai perusahaan pembiayaan yang berfokus pada pembiayaan mobil baru, saat ini Perseroan telah menjadi perusahaan pembiayaan nomor 3 (tiga) dengan total pembiayaan pada tahun 2018 mencapai Rp26,99 triliun. 82% dari pembiayaan MTF adalah untuk pembiayaan mobil baru sehingga menempatkan Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan mobil baru nomor 1 di Indonesia. Selain mendapatkan mayoritas bisnis dari rekanan *dealer*, MTF juga membuka sumber bisnis melalui Mandiri Group dalam bentuk referensi dari Bank Mandiri dan kerjasama *servicing* bersama Bank Syariah Mandiri. Untuk mengejar terus pertumbuhan dan menjadi perusahaan pembiayaan terdepan, MTF telah menyiapkan berbagai strategi untuk dapat memenangkan persaingan pasar dengan visi menjadi perusahaan pembiayaan terbaik di Indonesia.

## RENCANA STRATEGIS 2018

### STRATEGI UTAMA MTF MENGHADAPI TANTANGAN PERSAINGAN PASAR



Beberapa tahun terakhir, industri penjualan mobil sebagai *core business* MTF mengalami pertumbuhan landai. Tercatat pada tahun 2018, pertumbuhan penjualan mobil baru tumbuh 6,9% atau lebih baik dari tahun 2017 yang hanya tumbuh 1,4%. Terjadi perbaikan pertumbuhan pada penjualan mobil penumpang dari -2,3% pada tahun 2017 menjadi 3,8%. Sedangkan pada segmen penjualan mobil komersial, pertumbuhan masih terjaga pada kisaran angka 17%. Demi mencapai target pertumbuhan perusahaan yang berkesinambungan, MTF perlu untuk merancang langkah strategis yang dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan di atas pertumbuhan pasar. Terdapat tiga strategi utama Perseroan dalam menghadapi tantangan persaingan pasar yaitu *shifting to high margin product*, peningkatan SLA, dan sinergi dengan Mandiri Group.

Pada strategi *shifting to high margin product*, Perseroan berfokus pada menaikkan pangsa pasar serta diversifikasi bisnis pada produk dengan margin tinggi seperti multiguna dan KI/KMK. Pada tahun 2018, Perseroan berhasil untuk menaikkan *market share* penjualan mobil baru sebanyak 1% menjadi 15,95% dan pembukaan 3 cabang baru. Produk multiguna MTF yang diluncurkan di tahun 2017 merupakan produk dengan *margin*

tinggi sebagai upaya diversifikasi Perseroan untuk dapat meningkatkan profit Perseroan. Tahun 2018 merupakan tahun pembelajaran bagi multiguna untuk terus melakukan perbaikan proses dan meningkatkan layanan bagi calon nasabah sebagai dasar pondasi untuk melaju di tahun mendatang. Salah satu terobosan dari produk multiguna di 2018 adalah dengan meluncurkan sistem keagenan untuk nasabah eksternal bernama WIRA.

Melihat kesuksesan pembiayaan konsumen komersial pada tahun 2017 yang disokong oleh pertumbuhan industri komoditas, tahun 2018 MTF memperluas pembiayaannya dengan melakukan pembiayaan KI/KMK. Melihat peluang dan kebutuhan pasar serta untuk menjawab berbagai kebutuhan dari nasabah komersial, MTF meluncurkan produk KI/KMK seperti *dealer financing* dan anjak piutang.

Pada strategi peningkatan SLA, beberapa langkah strategis dilakukan dengan menggunakan teknologi pada proses untuk mempercepat SLA, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk perluasan *channel* penjualan serta meningkatkan layanan nasabah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Langkah sinergi dengan Mandiri Group pun



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

dilakukan dengan meningkatkan program *referral* Bank Mandiri untuk produk KKB dan *fleet* sebagai usaha untuk memperluas penetrasi pasar serta perluasan wilayah operasional pembiayaan BSM OTO dimana MTF telah bekerjasama dengan PT Bank Syariah Mandiri. Pada kerjasama BSM OTO, MTF bertindak sebagai *servicing agent* untuk melakukan proses *survey* kepada nasabah, membantu proses kredit dan membantu nasabah menghubungi *dealer*. Seluruh strategi tersebut tentunya didukung

oleh *enabler* yaitu dengan adanya perbaikan proses bisnis, perubahan model bisnis serta penyesuaian struktur organisasi yang menunjang eksekusi strategi yang telah dirancang.

Berbagai rencana strategis MTF atas tiga strategi utama beserta langkah strategi yang dilakukan Perseroan untuk mencapai target strategi rencana bisnis tahun 2018 dapat dirangkum dan dijelaskan ke dalam tabel di bawah ini.

#### RANGKUMAN RENCANA STRATEGIS MTF TAHUN 2018

Strategi Utama	No	Jabaran Strategy	Action Plan	Time Line
Peningkatan Produk dengan High Margin	1	Meningkatkan <i>Market Share</i> New Car 14% -> 15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penambahan 3 cabang baru</li> <li>Melakukan <i>partnership</i> dengan <i>online marketplace</i> &amp; mengembangkan <i>internal online platform</i>.</li> <li>Melakukan pengembangan <i>mobile apps</i></li> <li>Mengembangkan sistem <i>pre-approval</i> untuk nasabah prioritas / khusus</li> </ul>	Jan - Dec
	2	Meningkatkan <i>lending</i> produk multiguna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Sistem Keagenan Multiguna untuk Nasabah Eksternal</li> <li>Meningkatkan produktivitas telemarketing untuk follow up penawaran kepada <i>customer</i> eksisting</li> <li>Penambahan <i>dedicated sales</i> untuk multiguna</li> <li>Melakukan <i>review</i> bisnis proses multiguna di cabang untuk meningkatkan SLA</li> </ul>	Jan - Dec
	3	P2P <i>Lending</i> / Fintech	Melakukan kerjasama dengan Fintech khususnya yang bergerak di bidang P2P <i>lending</i>	Jan - Dec
	4	KI / KMK <i>Fleet</i>	Melakukan penjualan produk KI / KMK <i>Corporate Fleet</i> dengan rate > 13.5% (Sales & Leaseback, New HE & Used HE (GOH), Factoring)	Jan - Dec
Peningkatan Service Level	1	Pengembangan <i>Mobile Platform</i>	Mengembangkan <i>mobile collection &amp; executor</i> untuk meningkatkan <i>proses collection</i>	Jan - Dec
	2	Pengembangan <i>Project Document Process Outsourcing</i> (DPO)	Memindahkan proses penginputan ke pihak ke-3	Jan - Dec
	3	Partnership dengan <i>Online Marketplace</i>	Meningkatkan kerjasama dengan <i>Online Marketplace</i> seperti OLX/MOBIL 123	Jan - Dec
Peningkatan Sinergi dengan Mandiri Group	1	Peningkatan <i>Referral</i> Mandiri KKB	Pengembangan menu <i>Referral</i> KKB MTF GO dengan nama cabang MTF untuk memudahkan pemilihan AH oleh karyawan mandiri	Jan - Dec
	2	Perluasan <i>Coverage</i> BSM OTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sinkronisasi target BSM OTO secara nasional.</li> <li>Penambahan BSM OTO sebagai salah satu <i>parameter performance</i> cabang</li> <li>Penambahan <i>dedicated sales</i> untuk BSM OTO di cabang</li> <li>Negosiasi <i>processing fee</i> BSM OTO</li> </ul>	Jan - Dec
	3	<i>Fleet</i> (Canvasing Nasabah BMRI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan canvasing nasabah yang diperoleh dari data BMRI</li> <li>Pembiayaan <i>Achor Client &amp; Bank@Work</i></li> </ul>	Jan - Dec

## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

### TENTANG KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

Perseroan menjalankan usahanya di bidang jasa pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna. Saat ini Perseroan memfokuskan kegiatan usaha di bidang pembiayaan konsumen dalam bentuk penyediaan dana bagi para pelanggan yang ingin membeli dengan pembayaran secara angsuran baik dari entitas induk, PT Tunas Ridean Tbk ("TURI"), maupun dari luar kelompok usaha TURI. Perseroan memfokuskan usahanya pada pada kegiatan pembiayaan mobil baru yang dapat memberikan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang aman yang terdiri dari merek-merek Toyota, Daihatsu, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi dan Suzuki maupun merk yang dijual dari APM.

Kegiatan pembiayaan diberikan dalam bentuk kredit pemilikan kendaraan bermotor dengan ketentuan pembayaran kembali secara angsuran

tetap setiap bulannya. Perseroan mengklasifikasikan fasilitas pembiayaannya ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu mobil baru, mobil bekas dan sepeda motor. Karena itu Perseroan juga menerapkan persyaratan yang berbeda untuk ketiga jenis usaha ini. Secara umum, jangka waktu pembiayaan ditetapkan 1 (satu) sampai 7 (tujuh) tahun dengan jangka waktu pembiayaan terbanyak adalah 4 (empat) tahun. Sebagai agunan untuk kredit tersebut adalah berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli yang ditahan dan disimpan oleh Perseroan. Dokumen tersebut akan diserahkan kepada pelanggan apabila seluruh kewajibannya kepada Perseroan telah dilunasi.

Perkembangan nilai kontrak berdasarkan komposisi jenis kendaraan yang dibiayai oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 terlihat pada tabel di bawah ini.

#### PERKEMBANGAN JUMLAH UNIT KONTRAK BARU BERDASARKAN JENIS PEMBIAYAAN KENDARAAN

Jenis Pembayaran	Kontrak Baru		Kenaikan (Penurunan)		
	2018 (Unit)	2017 (Unit)	Selisih (Unit)	Persentase (%)	
Mobil Baru	112.642	108.061	4.581	4,24%	↑
Mobil Bekas	8.654	3.705	4.949	133,58%	↑
Motor	604	413	191	46,25%	↑
Lainnya	20.361	1.106	19.255	1.740,96%	↑
<b>Total</b>	<b>142.261</b>	<b>113.285</b>	<b>28.976</b>	<b>25,58%</b>	<b>↑</b>

#### PERKEMBANGAN NILAI KONTRAK PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS PEMBIAYAAN KENDARAAN

Jenis Pembiayaan	Nilai Pembiayaan		Kenaikan (Penurunan)		
	2018 (Rp-juta)	2017 (Rp-juta)	Selisih (Rp-juta)	Persentase (%)	
Mobil Baru	25.403.743	21.615.106	3.788.636	17,53%	↑
Mobil Bekas	1.475.121	553.387	921.734	166,56%	↑
Motor	45.420	32.126	13.294	41,38%	↑
Lainnya	67.550	3.639	63.911	1.756,28%	↑
<b>Total</b>	<b>26.991.834</b>	<b>22.204.259</b>	<b>4.787.575</b>	<b>21,56%</b>	<b>↑</b>

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Dari tabel di atas terlihat bahwa pembiayaan mobil baru mengalami peningkatan dari tahun 2017 dan 2018, dan menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi nilai kontrak yang diperoleh Perseroan. Banyaknya jumlah kontrak baru pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut.

#### PERKEMBANGAN JUMLAH NILAI KONTRAK BERDASARKAN JENIS PEMBIAYAAN KENDARAAN

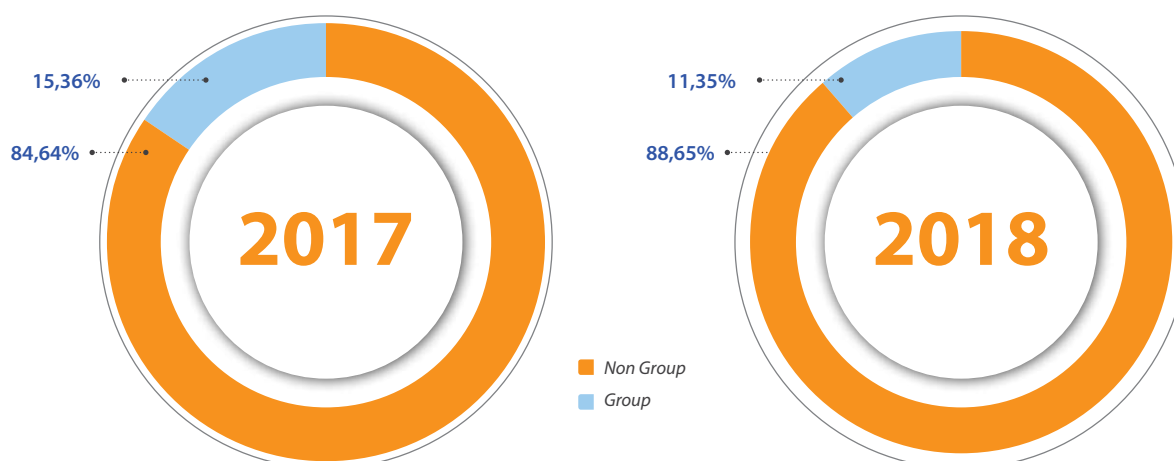
Jenis Pembiayaan	Kontrak Baru 2018 (Unit)	2017 (Unit)	Kenaikan (Penurunan)		
			Selisih (Unit)	Persentase (%)	
Nilai Pembiayaan (Rp-juta)	26.991.834	22.204.259	4.787.575	21,56%	↑
<b>Jumlah Kontrak Baru (unit)</b>	<b>142.261</b>	<b>113.285</b>	<b>28.976</b>	<b>25,58%</b>	<b>↑</b>

Dalam melakukan kegiatannya, Perseroan tidak dibatasi hanya pada penjualan yang berasal dari ataupun merek-merek kendaraan yang diageni oleh TURI. Namun Perseroan juga menjalin hubungan dengan para *Dealer* yang beroperasi di wilayah kerja Perseroan dan untuk para *Dealer* yang menjual berbagai merek kendaraan. Perkembangan nilai kontrak berdasarkan asal kontrak dari TURI atau Non *Group* yang berhasil diperoleh Perseroan di tahun 2017 dan 2018 terlihat pada tabel di bawah ini.

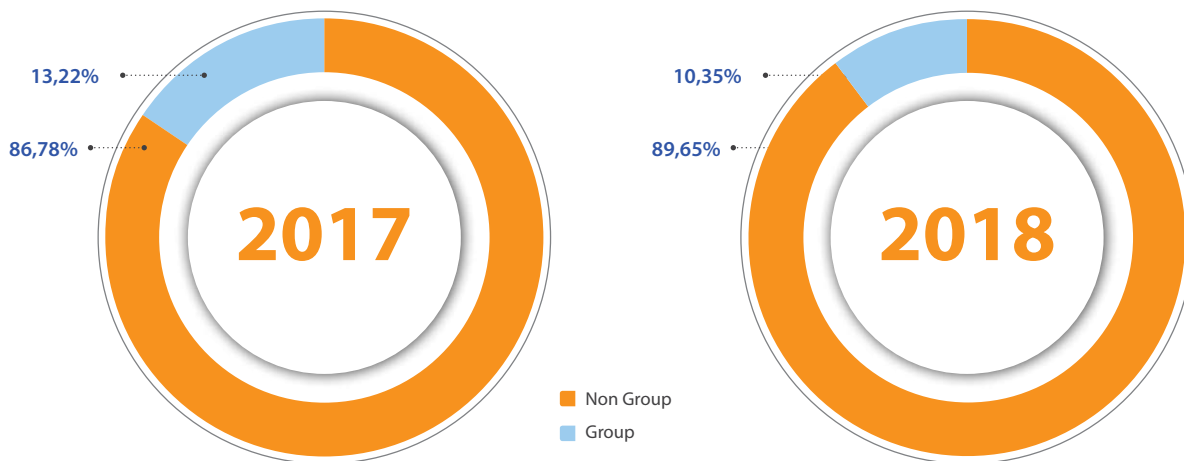
#### JUMLAH NILAI KONTRAK BERDASARKAN ASAL KONTRAK DARI GROUP ATAU NON GROUP

Cabang	2018		2017		Kenaikan (Penurunan)			
	Kontrak Baru (unit)	Nilai Pembiayaan (Rp-juta)	Kontrak Baru (unit)	Nilai Pembiayaan (Rp-juta)	Kontrak Baru		Nilai Pembiayaan	
					Selisih (unit)	(%)	Selisih (Rp-juta)	(%)
Group	16.144	2.792.764	17.400	2.935.530	(1.256)	-7,22%	(142.766)	-4,86%
Non Group	126.117	24.199.070	95.885	19.268.728	30.232	31,53%	4.930.342	25,59%
<b>Jumlah</b>	<b>142.261</b>	<b>26.991.834</b>	<b>113.285</b>	<b>22.204.259</b>	<b>28.976</b>	<b>25,58%</b>	<b>4.787.575</b>	<b>21,56%</b>

#### KOMPOSISI UNIT KONTRAK BARU DARI GROUP DAN NON GROUP



## KOMPOSISI NILAI PEMBIAYAAN DARI GROUP DAN NON GROUP



Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa baik komposisi Kontrak Baru maupun Nilai Pembiayaan justru ditopang oleh *Non Group* yang berasal dari kontrak di luar TURI.

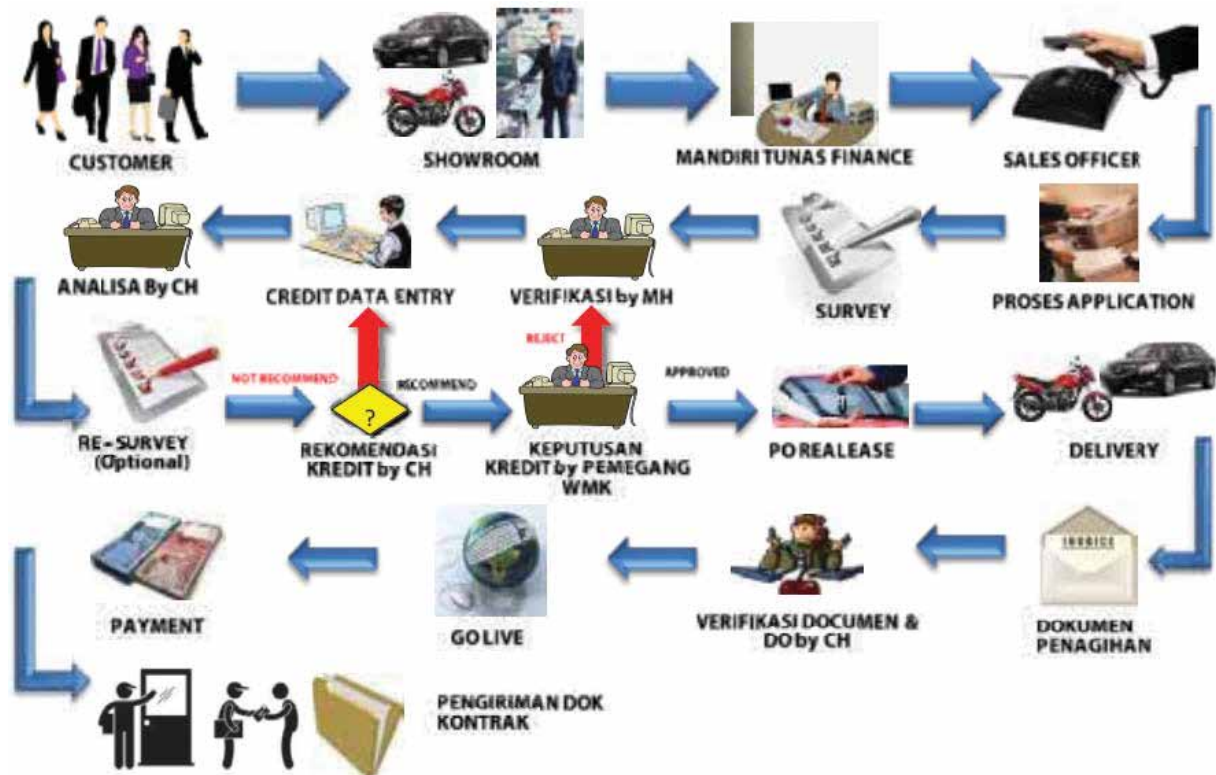
Dalam mencari calon pelanggan Perseroan mengandalkan petugas *Sales Officer (SO)*. SO bertugas untuk memperoleh aplikasi kredit dari *Dealer* dan *Showroom* rekanan Perseroan sekaligus melakukan analisa kredit, memproses kredit dan membantu memonitor kelancaran pembayaran kredit para pelanggan tersebut. Dengan demikian SO merupakan ujung tombak Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk tetap menjaga kualitas kredit yang dihasilkan, Perseroan menempatkan minimal 1 (satu) orang *Credit Head*

pada setiap cabang Perseroan yang berfungsi sebagai penyeleksi atas usulan kredit yang diajukan para SO dan petugas *Credit Head* dimaksud merupakan karyawan Kantor Pusat Perseroan yang ditempatkan di cabang sehingga kemandirian keputusan kredit tetap terjaga dengan baik.. Adapun perkembangan jumlah SO dan jumlah kontrak yang berhasil diperoleh di tahun 2017 dan 2018 terlihat pada tabel di bawah ini.

Pelayanan prima diberikan tidak terbatas hanya oleh setiap SO yang akan memproses aplikasi kredit di awal transaksi, tetapi juga oleh seluruh bagian selama masa kredit dan hingga selesainya kredit di akhir periode pembayaran.

Berikut disampaikan skema proses pembiayaan konsumen yang berlaku di lingkup Perseroan.

### SKEMA PROSES PEMBIAYAAN KONSUMEN MTF



Catatan : MH = Marketing Head; CH = Credit Head; WMK = Wewenang Memutus Kredit

SO menghubungi calon pelanggan yang membutuhkan fasilitas pembiayaan. Diawali pada saat para SO menawarkan jasa pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan baik mobil ataupun motor. Setiap SO merupakan ujung tombak usaha Perseroan karena merupakan pihak yang terlibat secara langsung dengan calon pelanggan sekaligus bertindak sebagai tenaga penjual jasa pembiayaan. Selanjutnya analisis secara cermat dilakukan terhadap setiap aplikasi kredit termasuk wawancara dan kunjungan terhadap calon pelanggan dan verifikasi setiap data pendukungnya.

Usulan kredit yang diajukan oleh SO selanjutnya akan diseleksi kembali oleh *Credit Head* sebelum diteruskan kepada pejabat cabang atau Kantor Pusat Perseroan sesuai dengan Wewenang Memutus Kredit (WMK) yang dimiliki masing-masing pejabat. Untuk membantu petugas yang melakukan proses kredit, Perseroan telah menerapkan sistem *Credit Scoring* yang terintegrasi dalam sistem yang digunakan oleh Perseroan yang disebut E-Star. Paramater dalam pembuatan *Credit Scoring* telah diuji dengan seksama dengan integritas data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga kebijakan *Prudent Financing* benar-benar dijalankan secara konsisten oleh Perseroan.

Dalam melakukan pemberian kredit, Perseroan memperhatikan batasan-batasan seperti tersebut di bawah ini:

1. Pembayaran uang muka sejumlah persentase tertentu dari harga mobil.
2. Untuk pembiayaan mobil bekas, maksimum berumur 12 tahun.
3. Jangka waktu kredit adalah minimum 6 (enam) bulan dan maksimum 7 (tujuh) tahun.
4. Selama masa kredit, mobil tersebut harus dilindungi asuransi dari perusahaan asuransi yang telah ditetapkan oleh Perseroan, yang pada saat ini berjumlah lima perusahaan besar di Indonesia.

Perseroan pada saat ini mengenakan biaya kepada pelanggannya terdiri atas:

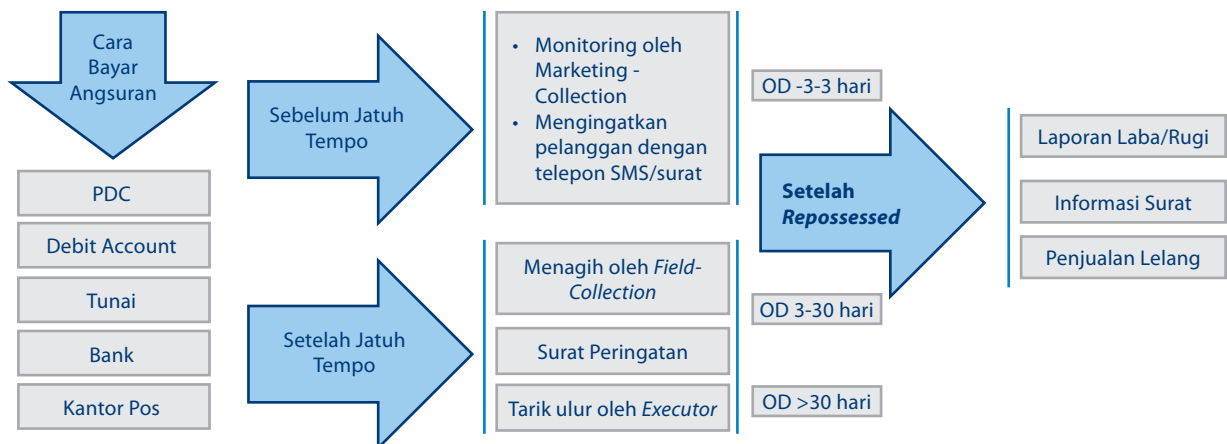
1. Biaya bunga dengan angsuran bulanan dalam jumlah yang tetap selama masa kredit.
2. Biaya administrasi kredit.
3. Denda, untuk pelanggan yang melakukan penunggakan atas kewajiban angsurannya.
4. Biaya pembebanan fidusia.
5. Biaya pelunasan dipercepat dan lain sebagainya.

Sebagai penerapan prinsip kehati-hatian, maka plafon persetujuan kredit untuk setiap jenjang dibuat tidak terlalu besar untuk setiap aplikasi kredit. Wewenang Memutuskan Kredit tersebut selalu ditinjau secara berkala dan ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari suatu Komite Kredit yang perlu mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudent financing*) yang dianut Perseroan.

Dengan adanya kebijakan kredit sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan diharapkan mampu menekan tingkat piutang yang bermasalah seminimal mungkin dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk mengelola kegiatan usaha pembiayaan serta upayanya untuk selalu menjaga tingkat kolektibilitas yang baik maka kegiatan penagihan merupakan salah satu kunci keberhasilan Perseroan.

Untuk itu Perseroan telah menerapkan kebijakan penagihan yang cukup ketat dengan skema proses penagihan sebagai berikut:

### SKEMA PENAGIHAN





PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Aplikasi kredit yang hasilnya lulus scoring selanjutnya akan diseleksi kembali oleh *Credit Head* sebelum diteruskan kepada pejabat cabang atau Kantor Pusat Perseroan sesuai dengan Wewenang Memutuskan Kredit (WMK) yang dimiliki masing-masing pejabat. Dalam melakukan pemberian kredit, Perseroan memperhatikan batasan-batasan:

- Kualitatif yaitu karakter, informasi-informasi industri/usaha, kemampuan manajemen dan kelangsungan usaha.
- Kuantitatif yaitu penghasilan, kondisi keuangan dan modal yang dimilikinya.

## SEGMENT OPERASI

Dalam menyusun laporan keuangan yang menjadi dasar bagi penyusunan laporan tahunan, Perseroan menerapkan PSAK 5 (Penyesuaian 2015) tentang Segmen Operasi. Segmen operasi Perseroan dibagi berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk, yaitu *Fleet* dan *Retail*, serta segmen lainnya sebagai perhitungan yang tidak dapat dialokasikan ke dalam kedua segmen tersebut.

Dalam menentukan hasil segmen, beberapa akun aset dan liabilitas serta pendapatan dan biaya yang terkait diatribusikan ke masing-masing segmen berdasarkan kebijakan pelaporan internal manajemen. Kinerja diukur berdasarkan laba segmen sebelum pajak penghasilan, sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang ditelaah oleh manajemen Perseroan. Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

Penjelasan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Perseroan adalah sebagai berikut:

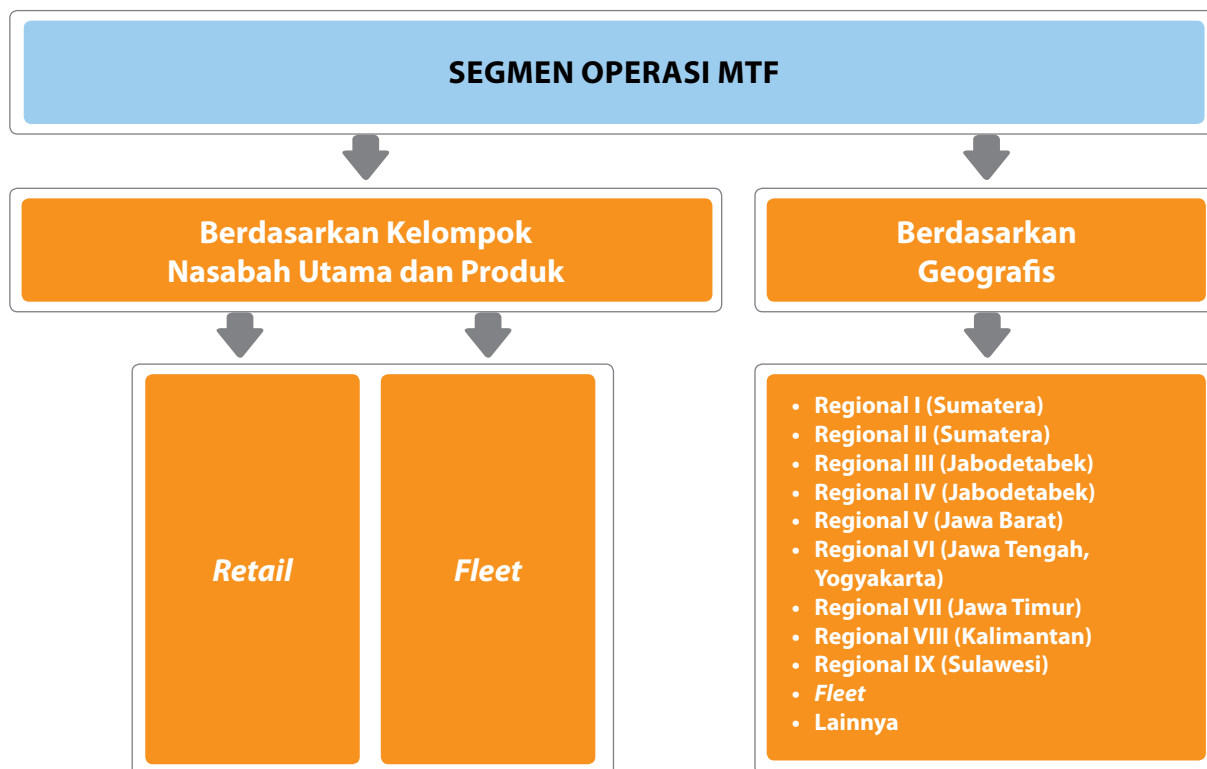
- **RETAIL**

Termasuk dalam pelaporan segmen *retail* adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan konsumen untuk nasabah individu.

- **FLEET**

Termasuk dalam pelaporan segmen *fleet* adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan untuk nasabah korporasi.

Selain itu, Perseroan memiliki segmen lainnya yang merupakan pelaporan terkait aktivitas treasuri dan kantor pusat seperti pendapatan bunga bank dan beban umum dan administrasi yang tidak dapat dialokasikan ke dalam kedua segmen di atas. Di samping itu, Perseroan memperhitungkan segmen operasi berdasarkan informasi geografis.



## ANALISIS SEGMENT USAHA BERDASARKAN KELOMPOK NASABAH UTAMA DAN PRODUK

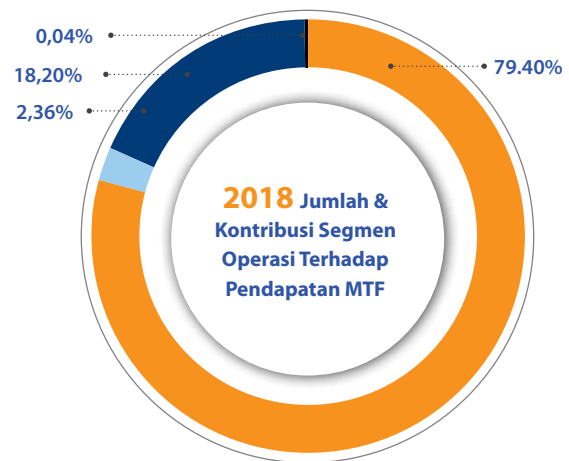
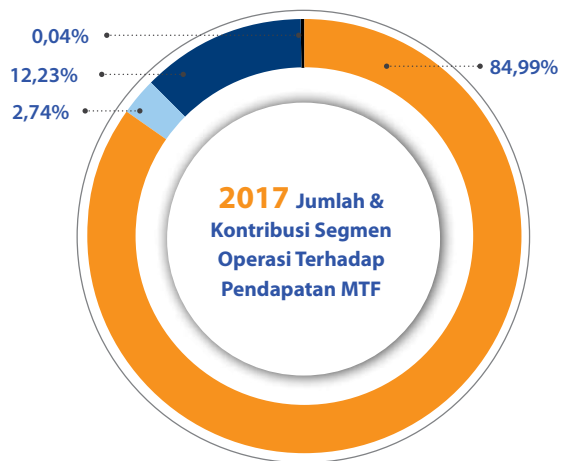
Perseroan membagi segment operasi berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk, mencakup *Fleet* dan *Retail*, serta segment lainnya sebagai perhitungan yang tidak dapat dialokasikan ke dalam kedua segment tersebut. Tentang operasi dari masing-masing segment dapat dilihat pada

penjelasan berikutnya.

Sekilas tentang profitabilitas dan kontribusi segment operasi terhadap kinerja keuangan Perseroan dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

### JUMLAH DAN KONTRIBUSI SEGMENT OPERASI TERHADAP PENDAPATAN MTF

Segmen Operasi	2018		2017		Kenaikan (Penurunan)		
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Selisih (Rp-juta)	Persentase (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3:2)	
<i>Retail</i>							
Mobil	2.477.298	79,40%	2.327.392	84,99%	149.906	6,44%	↑
Motor	73.787	2,36%	74.853	2,74%	(1.066)	-1,42%	↓
Jumlah Retail	2.551.085	81,76%	2.402.245	87,73%	148.840	6,20%	↑
<i>Fleet</i>							
Mobil	567.845	18,20%	334.951	12,23%	232.894	69,53%	↑
Motor	1.262	0,04%	1.168	0,04%	94	8,05%	↑
Jumlah Fleet	569.107	18,24%	336.119	12,27%	232.988	69,32%	↑
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.120.192</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.738.364</b>	<b>100,00%</b>	<b>381.828</b>	<b>13,94%</b>	<b>↑</b>



- Retail Mobil
- Retail Motor
- Fleet Mobil
- Fleet Motor

PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

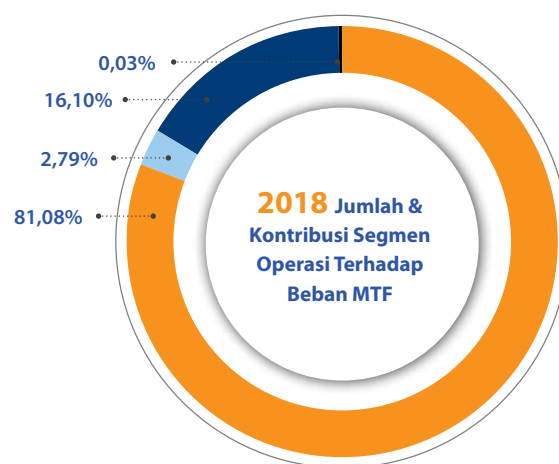
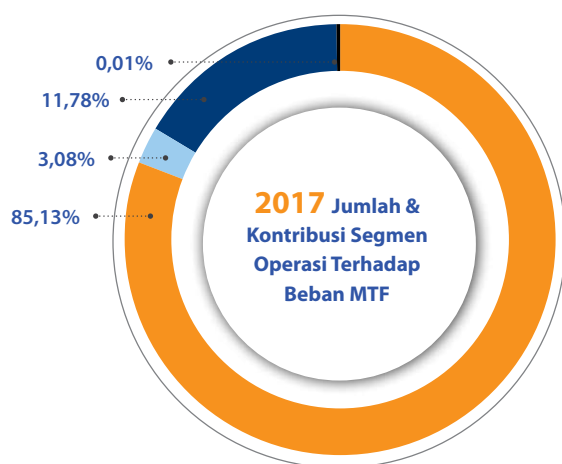
FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## JUMLAH DAN KONTRIBUSI SEGMENT OPERASI TERHADAP BEBAN MTF

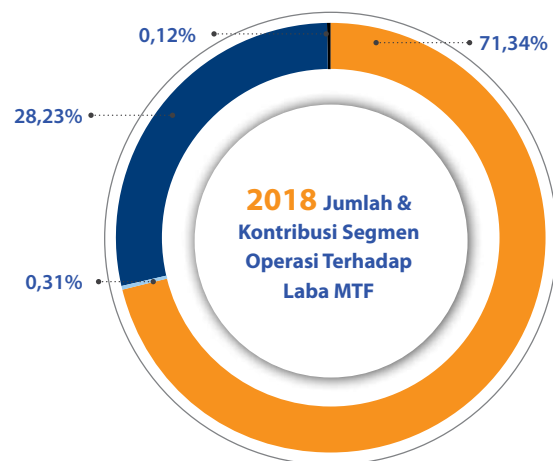
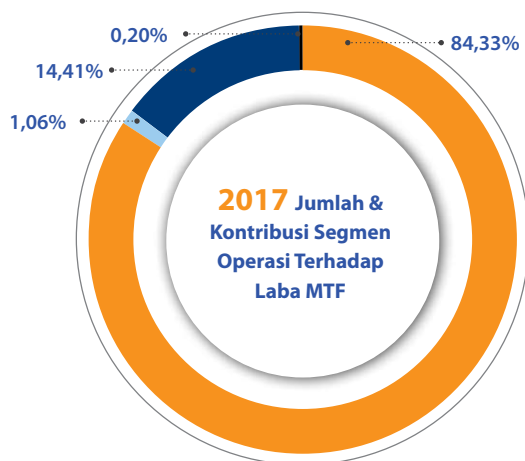
Segmen Operasi	2018		2017		Kenaikan (Penurunan)		
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Selisih (Rp-juta)	Persentase (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3:2)	
<i>Retail</i>							
Mobil	(2.092.179)	81,08%	(1.932.422)	85,13%	159.757	8,27%	▲
Motor	(72.099)	2,79%	(69.887)	3,08%	2.212	3,17%	▲
Jumlah <i>Retail</i>	(2.164.278)	83,87%	(2.002.309)	88,21%	161.969	8,09%	▲
<i>Fleet</i>							
Mobil	(415.481)	16,10%	(267.446)	11,78%	148.035	55,35%	▲
Motor	(590)	0,03%	(231)	0,01%	359	155,41%	▲
Jumlah <i>Fleet</i>	(416.071)	16,13%	(267.677)	11,79%	148.394	55,44%	▲
<b>Jumlah Beban</b>	<b>(2.580.349)</b>	<b>100,00%</b>	<b>(2.269.986)</b>	<b>100,00%</b>	<b>310.363</b>	<b>13,67%</b>	▲



- Retail Mobil
- Retail Motor
- Fleet Mobil
- Fleet Motor

### JUMLAH DAN KONTRIBUSI SEGMENT OPERASI TERHADAP LABA MTF

Segmen Operasi	2018		2017		Kenaikan (Penurunan)		
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Selisih (Rp-juta)	Persentase (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3:2)	
<i>Retail</i>							
Mobil	385.119	71,34%	394.970	84,33%	(9.851)	-2,49%	↓
Motor	1.688	0,31%	4.966	1,06%	(3.278)	-66,01%	↓
Jumlah <i>Retail</i>	386.807	71,65%	399.936	85,39%	(13.129)	-3,28%	↓
<i>Fleet</i>							
Mobil	152.364	28,23%	67.505	14,41%	84.859	125,71%	↑
Motor	672	0,12%	937	0,20%	(265)	-28,28%	↓
Jumlah <i>Fleet</i>	153.036	28,35%	68.442	14,61%	84.594	123,60%	↑
<b>Jumlah Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan</b>	<b>539.843</b>	<b>100,00%</b>	<b>468.378</b>	<b>100,00%</b>	<b>71.465</b>	<b>15,26%</b>	↑



- Retail Mobil
- Retail Motor
- Fleet Mobil
- Fleet Motor



PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

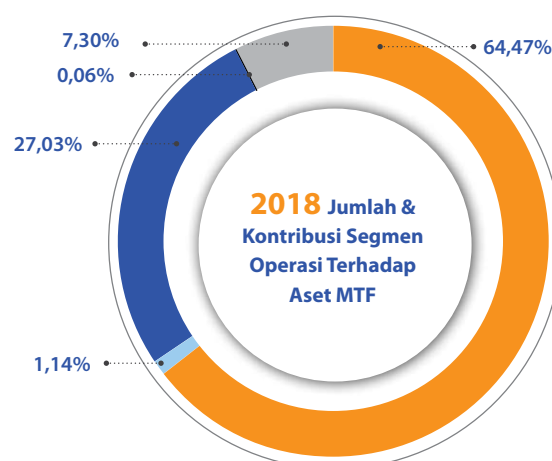
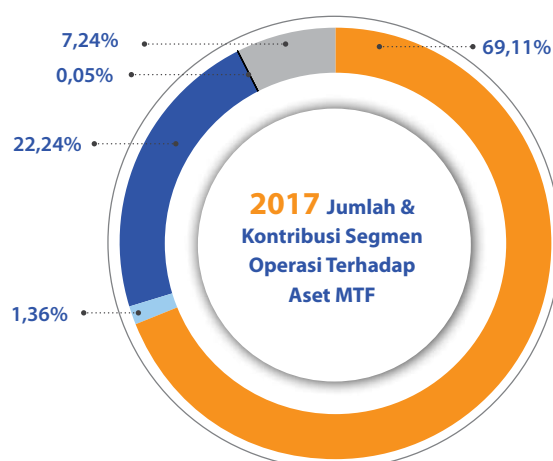
FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## JUMLAH DAN KONTRIBUSI SEGMENT OPERASI TERHADAP ASET MTF

Segmen Operasi	2018		2017		Kenaikan (Penurunan)		
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Selisih (Rp-juta)	Persentase (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3:2)	
<i>Retail</i>							
Mobil	11.270.507	64,47%	10.185.813	69,11%	1.084.693	10,65%	▲
Motor	199.851	1,14%	200.944	1,36%	(1.093)	-0,54%	▼
Jumlah <i>Retail</i>	11.470.358	65,61%	10.386.757	70,47%	1.083.600	10,43%	▲
<i>Fleet</i>							
Mobil	4.724.849	27,03%	3.277.540	22,24%	1.447.309	44,16%	▲
Motor	9.920	0,06%	8.269	0,05%	1.651	19,97%	▲
Jumlah <i>Fleet</i>	4.734.769	27,08%	3.285.809	22,29%	1.448.960	44,10%	▲
Lainnya	1.276.717	7,30%	1.066.892	7,24%	209.826	19,67%	▲
<b>Jumlah Aset</b>	<b>17.481.844</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.739.458</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.742.386</b>	<b>18,61%</b>	▲

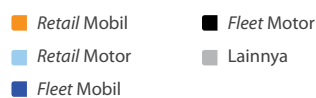
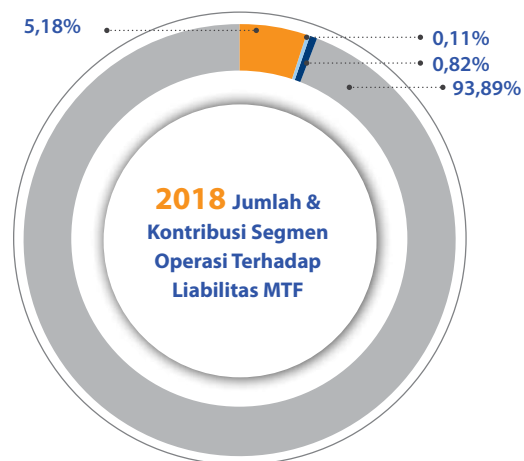
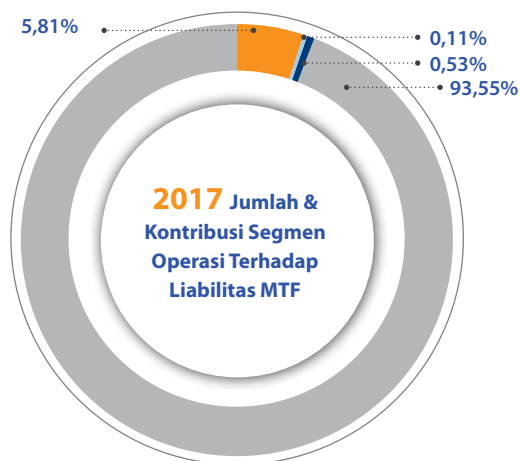


■ Retail Mobil  
■ Retail Motor  
■ Fleet Mobil  
■ Fleet Motor

Komposisi aset Perseroan didominasi oleh segmen *Retail Mobil* yang mencapai 64,47% di tahun 2018 dan 69,11% di tahun 2017. Sementara segmen *Fleet Mobil* mengalami peningkatan komposisi, dari 22,24% di tahun 2017 menjadi 27,03% terhadap jumlah aset Perseroan tahun 2018.

#### JUMLAH DAN KONTRIBUSI SEGMENT OPERASI TERHADAP LIABILITAS MTF

Segmen Operasi	2018		2017		Kenaikan (Penurunan)		
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Selisih (Rp-juta)	Persentase (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3:2)	
<i>Retail</i>							
Mobil	796.432	5,18%	753.452	5,81%	42.980	5,70%	↑
Motor	17.131	0,11%	13.750	0,11%	3.381	24,59%	↑
Jumlah <i>Retail</i>	813.563	5,29%	767.202	5,92%	46.361	6,04%	↑
<i>Fleet</i>							
Mobil	125.682	0,82%	69.030	0,53%	56.652	82,07%	↑
Motor	310	0,00%	210	0,00%	100	47,62%	↑
Jumlah <i>Fleet</i>	125.992	0,82%	69.240	0,53%	56.752	81,96%	↑
Lainnya	14.421.374	93,89%	12.134.674	93,55%	2.286.700	18,84%	↑
<b>Jumlah Aset</b>	<b>15.360.929</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.971.116</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.389.813</b>	<b>18,42%</b>	↑



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## PEMBIAYAAN RETAIL

Pembiayaan *Customer Retail* adalah pembiayaan kepada *Customer* yang mengajukan pembiayaan lewat kantor Cabang MTF melalui menu *Credit Scoring*. Pembiayaan *retail* ini diberikan kepada *Target Market* untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor dalam kondisi baru atau bekas.

Dalam pembiayaan *retail* ketentuan Biaya Administrasi dan Asuransi dibebankan kepada *Customer*, besar bebannya tergantung dari jangka waktu pembiayaan dan ditetapkan terpisah dalam Produk/Paket Pembiayaan yang disediakan. Selama masa pembiayaan diasuransikan ke Perusahaan Asuransi Rekanan MTF.

### KINERJA KEUANGAN DAN PROFITABILITAS SEGMENT RETAIL MTF

Segmen Operasi	2018 (Rp-juta)			2017 (Rp-juta)			Kenaikan (Penurunan)						
	Mobil	Motor	Jumlah	Mobil	Motor	Jumlah	Selisih (Rp-juta)			Persentase (%)			
							Mobil	Motor	Jumlah	Mobil	Motor	Jumlah	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=4+5)	(7=1-4)	(8=2-5)	(9=3-6)	(7:4)	(8:5)	(9:6)	
Pendapatan													
Pembiayaan konsumen	1.725.709	49.933	1.775.642	1.640.512	50.531	1.691.043	85.197	(598)	84.599	5,19%	-1,18%	5,00%	↑
Sewa pembiayaan	10.501	170	10.671	8.171	-	8.171	2.330	170	2.500	28,52%	-	30,60%	↑
Bunga	9.429	261	9.690	7.732	194	7.926	1.697	67	1.764	21,95%	34,54%	22,26%	↑
Lain-lain - neto	731.659	23.423	755.082	670.977	24.128	695.105	60.682	(705)	59.977	9,04%	-2,92%	8,63%	↑
Total pendapatan	2.477.298	73.787	2.551.085	2.327.392	74.853	2.402.245	149.906	(1.066)	148.840	6,44%	-1,42%	6,20%	↑
Beban													
Beban keuangan	(893.121)	(25.564)	(918.685)	(795.078)	(23.493)	(818.571)	98.043	2.071	100.114	12,33%	8,82%	12,23%	↑
Beban gaji dan tunjangan	(460.205)	(24.400)	(484.605)	(387.069)	(25.981)	(413.050)	73.136	(1.581)	71.555	18,89%	-6,09%	17,32%	↑
Beban umum dan administrasi	(363.654)	(14.206)	(377.860)	(326.947)	(13.589)	(340.536)	36.707	617	37.324	11,23%	4,54%	10,96%	↑
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(375.199)	(7.929)	(383.128)	(423.328)	(6.824)	(430.152)	(48.129)	1.105	(47.024)	-11,37%	16,19%	-10,93%	↓
Total beban	(2.092.179)	(72.099)	(2.164.278)	(1.932.422)	(69.887)	(2.002.309)	159.757	2.212	161.969	8,27%	3,17%	8,09%	↑
Laba (rugi) sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	385.119	1.688	386.807	394.970	4.966	399.936	(9.851)	(3.278)	(13.129)	-2,49%	-66,01%	-3,28%	↓
Total aset	11.270.507	199.851	11.470.358	10.185.814	200.944	10.386.758	1.084.693	(1.093)	1.083.600	10,65%	-0,54%	10,43%	↑
Total liabilitas	796.432	17.131	813.563	753.452	13.750	767.202	42.980	3.381	46.361	5,70%	24,59%	6,04%	↑

**KONTRIBUSI SEGMENT *RETAIL* TERHADAP PENDAPATAN MTF**

2017	2018
87,73%	81,76%

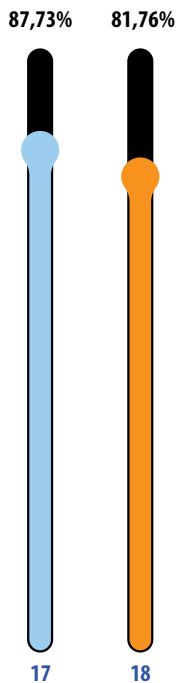
**KONTRIBUSI SEGMENT *RETAIL* TERHADAP LABA MTF**

2017	2018
85,39%	71,65%

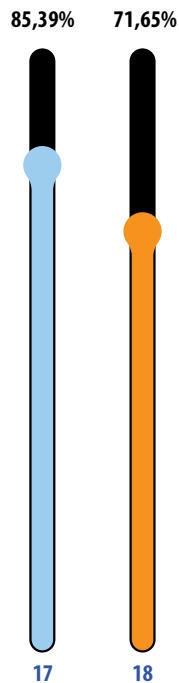
**KONTRIBUSI SEGMENT *RETAIL* TERHADAP ASET MTF**

2017	2018
70,47%	65,61%

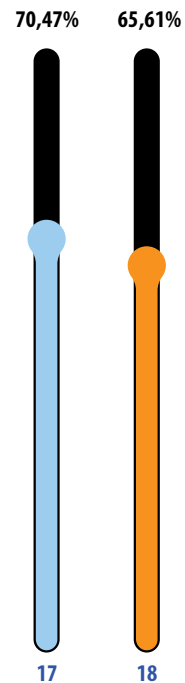
**KONTRIBUSI SEGMENT *RETAIL* TERHADAP PENDAPATAN MTF**



**KONTRIBUSI SEGMENT *RETAIL* TERHADAP LABA MTF**



**KONTRIBUSI SEGMENT *RETAIL* TERHADAP ASET MTF**



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## PEMBIAYAAN FLEET

Pembiayaan *Customer Fleet* adalah pembiayaan kepada *Customer* yang dikelola oleh Divisi *Corporate Fleet*, yang merupakan pemberian Batas Pemberian Pembiayaan (BPP) kepada 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) kelompok Obligor baik badan usaha maupun perseorangan. Terkait badan usaha ketentuan nilai pembiayaan sama dengan atau di atas Rp 5 Miliar. Pembiayaan *Fleet* terbagi menjadi 2 (dua) buku yaitu Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja.

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha *Customer*, dengan cara menyediakan batas pembiayaan kepada *Customer* yang bersifat *committed* dan *advised*.

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada Debitur.

## KINERJA KEUANGAN DAN PROFITABILITAS SEGMENT FLEET MTF

Segmen Operasi	2018 (Rp-juta)			2017 (Rp-juta)			Kenaikan (Penurunan)							
	Mobil	Motor	Jumlah	Mobil	Motor	Jumlah	Selisih (Rp-juta)			Persentase (%)				
							Mobil	Motor	Jumlah	Mobil	Motor	Jumlah		
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=4+5)	(7=1-4)	(8=2-5)	(9=3-6)	(7:4)	(8:5)	(9:6)		
Pendapatan														
Pembiayaan konsumen	159.874	1.203	161.077	138.328	1.053	139.381	21.546	150	21.696	15,58%	14,25%	15,57%	↑	
Sewa pembiayaan	375.631	-	375.631	170.812	-	170.812	204.819	-	204.819	119,91%	-	119,91%	↑	
Anjak piutang	96	-	96	-	-	-	96	-	96	-	-	-	↑	
Bunga	2.422	4	2.426	1.107	3	1.110	1.315	1	1.316	118,79%	33,33%	118,56%	↑	
Lain-lain - neto	29.822	55	29.877	24.704	112	24.816	5.118	(57)	5.061	20,72%	-50,89%	20,39%	↑	
Total pendapatan	567.845	1.262	569.107	334.951	1.168	336.119	232.894	94	232.988	69,53%	8,05%	69,32%	↑	
Beban														
Beban keuangan	(340.747)	(578)	(341.325)	(216.687)	(184)	(216.871)	124.060	394	124.454	57,25%	214,13%	57,39%	↑	
Beban gaji dan tunjangan	(34.375)	-	(34.375)	(24.762)	-	(24.762)	9.613	-	9.613	38,82%	-	38,82%	↑	
Beban umum dan administrasi	(20.695)	-	(20.695)	(13.527)	-	(13.527)	7.168	-	7.168	52,99%	-	52,99%	↑	
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(19.664)	(12)	(19.676)	(12.470)	(47)	(12.517)	(7.194)	(35)	7.159	57,69%	-74,47%	57,19%	↑	
Total beban	(415.481)	(590)	(416.071)	(267.446)	(231)	(267.677)	148.035	359	148.394	55,35%	155,41%	55,44%	↑	
Laba (rugi) sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan	152.364	672	153.036	67.505	937	68.442	84.859	(265)	84.594	125,71%	-28,28%	123,60%	↑	
Total aset	4.724.849	9.920	4.734.769	3.277.540	8.269	3.285.809	1.447.309	1.651	1.448.960	44,16%	19,97%	44,10%	↑	
Total liabilitas	125.682	310	125.992	69.030	210	69.240	56.652	100	56.752	82,07%	47,62%	81,96%	↑	

**KONTRIBUSI SEGMENT *FLEET* TERHADAP PENDAPATAN MTF**

2017	2018
12,27%	18,24%

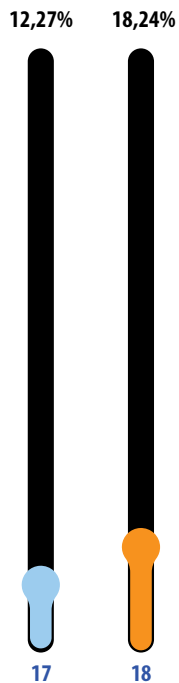
**KONTRIBUSI SEGMENT *FLEET* TERHADAP LABA MTF**

2017	2018
14,61%	28,35%

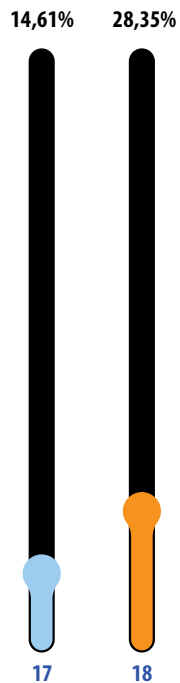
**KONTRIBUSI SEGMENT *FLEET* TERHADAP ASET MTF**

2017	2018
22,29%	27,09%

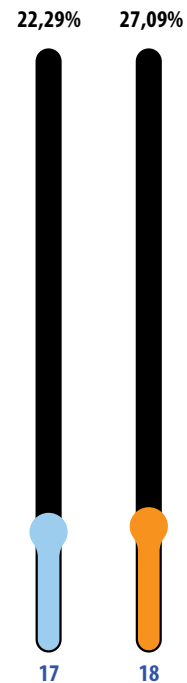
**KONTRIBUSI SEGMENT *FLEET* TERHADAP PENDAPATAN MTF**



**KONTRIBUSI SEGMENT *FLEET* TERHADAP LABA MTF**



**KONTRIBUSI SEGMENT *FLEET* TERHADAP ASET MTF**





PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## LAINNYA

Segmen lainnya adalah informasi pelaporan segmen operasi terkait dengan aktivitas treasuri dan kantor pusat seperti pendapatan bunga bank dan beban umum dan administrasi yang tidak dapat dialokasikan ke dalam kedua segmen di atas. Dalam segmen ini, hanya tercakupkan Aset dan Liabilitas sebagai bagian dari aktivitas treasuri dan kantor pusat.

### KINERJA KEUANGAN DAN PROFITABILITAS SEGMENT LAINNYA

Akun	2018 (Rp-juta)	2017 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Selisih (Rp-juta)	Persentase (%)	
Total aset	1.276.717	1.066.891	209.826	19,67%	▲
Total liabilitas	14.421.374	12.134.674	2.286.700	18,84%	▲

## Analisis Segmen Usaha Berdasarkan Informasi Geografis

### JUMLAH DAN KONTRIBUSI SEGMENT OPERASI BERDASARKAN GEOGRAFIS TERHADAP PENDAPATAN MTF

Segmen Operasi Berdasarkan Geografis	2018		2017		Kenaikan (Penurunan)		
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Selisih (Rp-juta)	Persentase (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3:2)	
Regional I (Sumatera)	168.809	5,41%	156.732	5,72%	12.077	7,71%	▲
Regional II (Sumatera)	343.578	11,01%	317.029	11,58%	26.549	8,37%	▲
Regional III (Jabodetabek)	372.747	11,95%	358.636	13,10%	14.111	3,93%	▲
Regional IV (Jabodetabek)	355.703	11,40%	371.169	13,55%	(15.466)	-4,17%	▼
Regional V (Jawa Barat)	219.365	7,03%	219.492	8,02%	(127)	-0,06%	▼
Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)	239.611	7,68%	222.022	8,11%	17.589	7,92%	▲
Regional VII (Jawa Timur)	288.924	9,26%	292.476	10,68%	(3.552)	-1,21%	▼
Regional VIII (Kalimantan)	265.531	8,51%	211.322	7,72%	54.209	25,65%	▲
Regional IX (Sulawesi)	296.817	9,51%	253.367	9,25%	43.450	17,15%	▲
Fleet	569.107	18,24%	336.119	12,27%	232.988	69,32%	▲
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.120.192</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.738.364</b>	<b>100,00%</b>	<b>381.828</b>	<b>13,94%</b>	<b>▲</b>

## TINJAUAN KEUANGAN

### Standar Penyajian Informasi Dan Kesesuaian Terhadap SAK

Analisa dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surya (EY). Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perseroan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia,

yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

### Posisi Keuangan

**"Jumlah aset Perseroan tahun 2018 mencapai Rp17,48 triliun, meningkat 18,61% dibandingkan jumlah aset tahun 2017 yang sebesar Rp14,74 triliun. Kenaikan portofolio piutang pembiayaan konsumen seiring dengan meningkatnya volume pembiayaan konsumen mendorong peningkatan jumlah aset Perseroan."**



PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

URAIAN	2018 (Rp-juta)	2017 (Rp-juta)	Hasil Perbandingan	
			Perubahan (Rp-juta)	Persentase (%)
<b>ASET</b>				
Kas dan Setara Kas				
Kas	12.863	20.198	(7.335)	-36,32%
Kas Pada bank				
Pihak ketiga	105.923	8.944	96.979	1084,29%
Pihak berelasi	136.154	131.408	4.746	3,61%
	<b>254.940</b>	<b>160.550</b>	<b>94.390</b>	<b>58,79%</b>
Piutang Pembiayaan Konsumen				
Pihak ketiga	12.927.542	11.444.554	1.482.988	12,96%
Pihak berelasi	5.822	7.957	(2.135)	-26,83%
	<b>12.933.364</b>	<b>11.452.511</b>	<b>1.480.853</b>	<b>12,93%</b>
Dikurangi :				
Cadangan kerugian penurunan nilai	(303.884)	(271.205)	(32.679)	12,05%
	<b>12.629.480</b>	<b>11.181.306</b>	<b>1.448.174</b>	<b>12,95%</b>
Piutang Sewa Pembiayaan				
Pihak Ketiga	3.328.389	2.364.629	963.760	40,76%
Dikurangi :				
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9.286)	(7.739)	(1.547)	19,99%
	<b>3.319.103</b>	<b>2.356.890</b>	<b>962.213</b>	<b>40,83%</b>
Anjak Piutang				
Pihak Ketiga	11.416	-	11.416	-
Dikurangi :				
Cadangan kerugian penurunan nilai	(113)	-	(113)	-
	<b>11.303</b>	<b>-</b>	<b>11.303</b>	<b>-</b>
Piutang Lain Lain				
Pihak ketiga	115.193	104.140	11.053	10,61%
Pihak berelasi	620.215	564.131	56.084	9,94%
	<b>735.408</b>	<b>668.271</b>	<b>67.137</b>	<b>10,05%</b>
Dikurangi :				
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.007)	(2.896)	(3.111)	107,42%
	<b>729.401</b>	<b>665.375</b>	<b>64.026</b>	<b>9,62%</b>
Aset Pajak tangguhan	59.921	38.004	21.917	57,67%
Tagihan Kelebihan pajak	43.538	65.538	(22.000)	-33,57%
Piutang derivatif	138.333	23.202	115.131	496,21%

URAIAN	2018 (Rp-juta)	2017 (Rp-juta)	Hasil Perbandingan	
			Perubahan (Rp-juta)	Persentase (%)
Aset tetap	182.005	165.907	16.098	9,70%
Aset Lain Lain				
Pihak ketiga	111.593	81.340	30.253	37,19%
Pihak Berelasi	2.227	1.346	881	65,45%
<b>Total Aset</b>	<b>17.481.844</b>	<b>14.739.458</b>	<b>2.742.386</b>	<b>18,61%</b>
<b>LIABILITAS</b>				
Utang usaha	649.630	606.513	43.117	7,11%
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	199.947	194.491	5.456	2,81%
Pihak berelasi	84.738	30.344	54.394	179,26%
Utang pajak kini	1.852	33.916	(32.064)	-94,54%
Beban yang masih harus dibayar				
Pihak ketiga	220.282	135.559	84.723	62,50%
Pihak berelasi	1.828	1.227	601	48,98%
Pinjaman bank				
Pihak ketiga	9.843.103	6.641.977	3.201.126	48,20%
Pihak berelasi	1.379.632	1.602.605	(222.973)	-13,91%
	11.222.735	8.244.582	2.978.153	36,12%
Biaya provisi yang belum diamortisasi	(34.611)	(34.152)	459	1,34%
	11.188.124	8.210.430	2.977.694	36,27%
Surat berharga yang diterbitkan				
Pihak ketiga	1.835.300	2.443.300	(608.000)	-24,88%
Pihak berelasi	1.014.700	1.231.700	(217.000)	-17,62%
	2.850.000	3.675.000	(825.000)	-22,45%
Beban emisi yang belum diamortisasi	(5.284)	(9.749)	(4.465)	-45,80%
	2.844.716	3.665.251	(820.535)	-22,39%
Utang Derivatif	89.788	19.540	70.248	359,51%
Liabilitas imbalan kerja karyawan	80.024	73.845	6.179	8,37%
<b>Total Liabilitas</b>	<b>15.360.929</b>	<b>12.971.116</b>	<b>2.389.813</b>	<b>18,42%</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham				
Modal Disetor	250.000	250.000	-	-
Penghasilan Komprehensif lain:				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan				
kerja karyawan - neto	(19.519)	(24.567)	(5.048)	-20,55%

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

URAIAN	2018 (Rp-juta)	2017 (Rp-juta)	Hasil Perbandingan	
			Perubahan (Rp-juta)	Persentase (%)
Kerugian kumulatif atas instrument derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto	(33.391)	(12.620)	20.771	164,59%
Saldo laba				
Sudah ditentukan penggunaannya	50.000	50.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	1.873.825	1.505.529	368.296	24,46%
<b>Total Ekuitas</b>	<b>2.120.915</b>	<b>1.768.342</b>	<b>352.573</b>	<b>19,94%</b>
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	17.481.844	14.739.458	2.742.386	18,61%

## ASET

Per 31 Desember 2018, jumlah aset Perseroan mencapai angka Rp17,48 triliun, mengalami kenaikan 18,61% dibandingkan jumlah aset tahun 2017 yang sebesar Rp14,74 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan portofolio piutang pembiayaan konsumen piutang sewa pembiayaan seiring dengan meningkatnya volume pembiayaan konsumen sewa pembiayaan.

Usaha Perseroan yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha sesuai dengan PSAK No.1 (revisi 2009 tentang penyajian laporan keuangan yang berlaku secara restrospektif efektif sejak 01 Januari 2011) dan

tidak menyajikan klasifikasi aset ke dalam kategori aset lancar dan aset tidak lancar.

## KAS DAN SETARA KAS

Di tahun 2018, saldo kas dan setara kas Perseroan tercatat sebesar Rp254,94 miliar, meningkat Rp94,39 miliar atau 58,79% dibandingkan dengan saldo kas dan setara kas Perseroan pada tahun 2017 yang berjumlah Rp160,55 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan kas yang ditempatkan pada bank dari Rp140,35 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp242,08 miliar pada tahun 2018. Kenaikan ini dikarenakan adanya pembayaran pinjaman bank di awal Januari 2018.

Kas dan Setara Kas	2018 (Rp-juta)	2017 (Rp-juta)	Persentase (%)
Kas	12.863	20.198	-36,32%
Kas pada bank			
Pihak ketiga	105.923	8.944	1.084,29%
Pihak berelasi	86.154	81.408	5,83%
Deposito Berjangka			
a. Pihak Ketiga			
b. Pihak berelasi	50.000	50.000	-
Jumlah	254.940	160.550	58,79%

## PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Piutang pembiayaan konsumen Perseroan di tahun 2018 tercatat sebesar Rp12,63 triliun, mengalami peningkatan Rp1,45 triliun atau 12,95% dibandingkan dengan saldo piutang pembiayaan konsumen Perseroan di tahun 2017 yang berjumlah Rp11,18 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan realisasi pembiayaan baru. Realisasi pembiayaan baru untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp23,25 triliun atau meningkat sebesar Rp3,27 triliun atau 16,37% dari realisasi tahun sebelumnya yang berjumlah Rp19,98 triliun.

Piutang pokok pembiayaan bersama (*joint financing*) tahun 2018 meningkat 13,22% dari

tahun sebelumnya, sejalan dengan peningkatan *lending* baru *joint financing* sebesar Rp1,03 triliun atau 7,81% dari tahun 2017 yang berjumlah Rp13,13 triliun menjadi Rp14,15 triliun pada tahun 2018. Diikuti dengan piutang pokok pembiayaan sendiri (*non joint financing*) yang meningkat sebesar 10,74% dari tahun sebelumnya, peningkatan *lending* baru *non joint financing* sebesar Rp3,76 triliun atau 41,41% dari tahun 2017 yang berjumlah Rp9,08 triliun menjadi Rp12,84 triliun pada tahun 2018. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan *lending* baru Perseroan meningkat cukup baik. Industri otomotif tidak menunjukkan pertumbuhan, namun Perseroan justru mampu meningkatkan *market share*-nya.

Uraian	2018 (Rp-juta)	2017 (Rp-juta)	Hasil Perbandingan	
			Perubahan (Rp-juta)	Persentase (%)
Piutang Pembiayaan Bersama	30.185.424	26.751.546	3.433.878	12,84%
Piutang Pembiayaan Sendiri	16.384.268	14.794.655	1.589.613	10,74%
Total Piutang Pembiayaan Kelolaan	46.569.692	41.546.201	5.023.491	12,09%
Pokok Piutang Pembiayaan Bersama	26.077.092	23.032.176	3.044.916	13,22%
Total Pokok Piutang Pembiayaan Kelolaan	39.010.456	34.484.687	4.525.769	13,12%
Penyisihan Piutang Ragu - ragu	303.884	271.205	32.679	12,05%
Piutang pembiayaan bersih	12.629.480	11.181.306	1.448.174	12,95%
Piutang Bermasalah kelolaan	0,83%	0,80%	0,03%	3,75%

## PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

Sejak tahun 2011, Perseroan telah memulai transaksi sewa pembiayaan atau *financial lease*. Transaksi ini dikelola oleh Divisi COP and *Fleet* untuk pembiayaan kendaraan komersial Perusahaan dan alat berat. Pada tahun 2018, dengan dukungan dari *Commercial* dan *Corporate Banking* Bank Mandiri, Divisi COP and *Fleet* meningkatkan fokus pada Pembiayaan kendaraan roda empat khususnya

kendaraan penumpang (*passenger*) karyawan Perusahaan, dan kendaraan *heavy truck* untuk industri infrastruktur, distribusi dan transportasi. Pada tahun 2018 ini, Perseroan mengalami peningkatan Piutang sewa Pembiayaan sebesar Rp0,96 triliun menjadi Rp3,32 triliun, dibandingkan dengan saldo piutang sewa pembiayaan tahun lalu yang hanya sebesar Rp2,36 triliun.



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Investasi Bersih dalam Sewa Pembiayaan	2018 (Rp-juta)	2017 (Rp-juta)	Hasil Perbandingan	
			Perubahan (Rp-juta)	Persentase (%)
Piutang sewa Pembiayaan bruto	5.160.930	2.756.597	2.404.333	87,22%
Piutang Sewa Pembiayaan Bersama	1.243.484	-	1.243.484	-
Nilai Sisa Yang Terjamin	1.631.185	796.442	834.743	104,81%
Pendapatan Sewa Pembiayaan Yang Ditangguhkan kelola	(692.570)	(391.968)	300.602	76,69%
Pendapatan Sewa Pembiayaan Yang Ditangguhkan Bersama	103.513	-	103.513	-
Simpanan Jaminan	(1.631.185)	(796.442)	834.743	104,81%
Penyisihan Piutang Ragu-ragu	(9.286)	(7.739)	1.547	19,99%
Jumlah Piutang Sewa pembiayaan	3.319.103	2.356.890	962.213	40,83%

## ANJAK PIUTANG

Sejak 2018 Perseroan sudah memulai melakukan transaksi anjak piutang (*Factoring*), transaksi ini dikelola oleh divisi COP dan *Fleet*. Pada tahun 2018 pembiayaan anjak piutang sebesar 11,32 miliar.

## PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain pihak ketiga sebagian besar merupakan tagihan yang ditujukan kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan akseptasi klaim, sedangkan piutang lain-lain pihak yang berelasi sebagian besar adalah transaksi dengan entitas induk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sehubungan dengan pembiayaan bersama. Saldo piutang lain-lain Perseroan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp729,40 miliar, meningkat Rp64,03 miliar dibandingkan dengan saldo piutang Perseroan pada tahun 2017 yang berjumlah Rp665,37 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pengakuan piutang Pembiayaan bersama pada

akhir bulan Desember 2018 sebesar Rp555,65 miliar dibanding tahun 2017 yang berjumlah Rp502,57 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp53,08 miliar atau sebesar 10,56%.

## ASET TETAP

Saldo aset tetap Perseroan pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp182 miliar, mengalami peningkatan Rp16,09 miliar atau 9,70% dibandingkan dengan saldo aset tetap Perseroan pada tahun 2017 yang berjumlah Rp165,90 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan aset berupa gedung, perlengkapan dan peralatan kantor serta renovasi bangunan sewa sejalan dengan ekspansi usaha Perseroan.

Penambahan *asset* berupa gedung sebesar Rp2,03 miliar. Penambahan gedung sebesar Rp1,4 miliar sebagai reklasifikasi dari bangunan dalam pengerjaan, peralatan kantor Rp40,8 miliar, renovasi bangunan sewa Rp3,2 miliar dan *asset* dalam penyelesaian sebesar Rp4,8 miliar.

## ASET PAJAK TANGGUHAN

Di tahun 2018, saldo aset pajak tangguhan Perseroan tercatat sebesar Rp59,92 miliar, meningkat Rp21,92miliar atau sebesar 57,67% dibandingkan dengan saldo aset pajak tangguhan Perseroan pada tahun 2017 yang berjumlah Rp38 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan pajak tangguhan atas penambahan koreksi fiskal atas perbedaan temporer untuk imbalan kerja karyawan, bonus, instrumen *derivative* untuk lindung nilai arus kas.

## TAGIHAN KELEBIHAN PAJAK

Pada tanggal 25 Januari 2016 dan 25 Oktober 2016, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas berbagai macam pajak untuk tahun pajak 2013, 2012 dan 2011, yang menghasilkan jumlah kurang bayar sebesar Rp172.49 miliar. Atas hal tersebut Perseroan telah melakukan pembayaran sebesar Rp67,63 miliar, dimana dari pembayaran tersebut Perseroan sedang dalam proses mengajukan keberatan sebesar Rp65,54 miliar dan sebesar Rp2,10 miliar yang dicatat sebagai Beban denda pajak di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Untuk jumlah yang belum dibayarkan sebesar Rp104,86 miliar, Perseroan mengajukan keberatan ke kantor pajak. Pada tahun 2017, Kantor Pajak menolak semua keberatan untuk tahun fiskal 2013, 2012, dan 2011. Pada tahun yang sama, Perseroan mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Pajak. Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh taksiran tagihan pajak penghasilan tersebut dapat dipulihkan.

Pada tanggal 18 Desember 2018, Pengadilan Pajak membacakan putusan terkait dengan banding yang diajukan Perseroan sebesar Rp170,40 miliar yang terdiri dari PPh Badan sebesar Rp104,46 miliar, PPN sebesar Rp57,73 miliar dan STP atas denda PPN sebesar Rp7,79 miliar, PPh Pasal 4(2) sebesar 370 juta untuk tahun pajak 2011, 2012 dan 2013. Atas putusan tersebut Perseroan menerima surat putusan dari Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Desember 2018.

Berdasarkan hasil putusan tersebut PPh Badan telah dikabulkan sebagian sebesar Rp104,35 miliar dan tidak dikabulkannya sebesar Rp112 juta. Sedangkan untuk PPN yang dikabulkan sebesar Rp57,67 miliar dan Rp59 juta tidak dikabulkan. Sedangkan untuk STP atas denda yang timbul dari PPN tersebut sebesar Rp7,78 miliar akan diajukan pembatalan STP ke Direktorat Jendral Pajak. Sehingga dari hasil putusan tersebut yang masih harus dibayar total keseluruhan sebesar Rp174 juta. Atas putusan yang sudah diterima, Manajemen sepakat untuk menerima hasil putusan yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Pajak.

## INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIVE (PIUTANG & UTANG DERIVATIF)

Instrumen derivatif diakui pertama-tama pada nilai wajar pada saat kontrak tersebut dilakukan, dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya. Derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Perseroan menggunakan instrumen keuangan derivatif, pertukaran (*swap*) mata uang asing dan

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

tingkat suku bunga, sebagai bagian dari aktivitas manajemen untuk melindungi dampak risiko mata uang asing dan tingkat suku bunga atas pinjaman Perusahaan. Perusahaan menerapkan akuntansi lindung nilai arus kas pada saat transaksi tersebut memenuhi kriteria perlakuan akuntansi lindung nilai.

## ASET LAIN-LAIN

Saldo aset lain-lain Perseroan di tahun 2018 adalah sebesar Rp113,82 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp31,13 miliar atau sebesar 37,65% dibandingkan dengan saldo aset lain-lain Perseroan pada tahun 2017 yang berjumlah Rp82,69 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh faktor kenaikan setoran dalam perjalanan Perseroan (pembayaran angsuran pembiayaan konsumen melalui kantor pos, alfamart, indomart dan pegadaian) sebesar Rp14,14 miliar seiring dengan bertambahnya aset kelolaan Perseroan.

## LIABILITAS

Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 18,42% dari Rp12,97 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp15,36 triliun pada tahun 2018 atau meningkat sebesar Rp2,39 triliun. Peningkatan ini sebagian besar diakibatkan oleh peningkatan pinjaman bank dari sebesar Rp8,21 triliun pada tahun 2017 meningkat 36,27% atau sebesar Rp2,98 triliun.

Perseroan dalam usahanya yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan konsumen berjalan sesuai dengan PSAK No. 1 (revisi 2009 tentang penyajian laporan keuangan

yang berlaku secara retrospektif efektif sejak 1 Januari 2011) tidak menyajikan klasifikasi utang ke dalam kategori utang jangka pendek dan utang jangka panjang.

## UTANG USAHA

Di tahun 2018, jumlah utang usaha Perseroan yang terdiri dari utang kepada pihak ketiga, baik utang kendaraan maupun utang asuransi tercatat sebesar Rp649,63 Miliar, meningkat 7,11% atau Rp43,11 miliar dibandingkan dengan jumlah utang usaha kepada pihak ketiga pada tahun 2017 yang berjumlah Rp606,51 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan utang kepada supplier kendaraan seiring dengan peningkatan volume pembiayaan selama tahun 2018.

## UTANG LAIN-LAIN

Utang lain-lain Perseroan terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan utang kepada pihak berelasi. Pada tahun 2018, jumlah utang lain-lain kepada pihak ketiga Perseroan tercatat berjumlah Rp199,95 miliar atau meningkat Rp5,46 miliar atau 2,81% dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain kepada pihak ketiga pada tahun 2017 yang berjumlah Rp194,49 miliar.

Peningkatan tersebut disebabkan oleh pengakuan kewajiban kepada pihak ketiga terkait transaksi non operasional Perseroan. Pada tahun 2018, jumlah utang lain-lain kepada pihak berelasi Perseroan berjumlah sebesar Rp84,74 miliar, meningkat Rp54,39 miliar atau 179,26% dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain kepada pihak berelasi yang berjumlah Rp30,34 miliar pada tahun 2017.

## UTANG PAJAK KINI

Pada tahun 2018, jumlah utang pajak Perseroan berjumlah sebesar Rp1,85 miliar, mengalami penurunan Rp32,06 miliar atau 94,54% dibandingkan dengan jumlah utang pajak Perseroan pada tahun 2017 yang berjumlah Rp33,92 miliar.

## BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Pada tahun 2018, jumlah beban yang masih harus dibayarkan oleh Perseroan berjumlah sebesar Rp222,11 miliar atau meningkat Rp85,32 miliar atau 62,38% dibandingkan dengan jumlah beban yang masih harus dibayar Perseroan pada tahun 2017 yang mencapai Rp136,79 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan biaya yang masih harus dibayar gaji dan tunjangan Rp35,25 miliar, di tahun 2018 sebesar Rp100 miliar dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp64,76 miliar juga disertai kenaikan bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp46,12 miliar, di tahun 2018 sebesar Rp100,58 miliar dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp54,46 miliar.

## PINJAMAN BANK

Di tahun 2018, jumlah pinjaman bank Perseroan mencapai Rp11,22 triliun, naik Rp2,98 triliun atau 36,12% dibandingkan dengan jumlah pinjaman bank Perseroan tahun 2017 yang sebesar Rp8,24 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan realisasi pembiayaan baru yang didanai dari pinjaman bank seiring dengan pertumbuhan usaha Perseroan.

## SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

Pada tahun 2018, jumlah surat berharga yang diterbitkan oleh Perseroan sebesar Rp2,85 triliun, turun Rp825 miliar atau 22,45% dibandingkan dengan jumlah surat berharga yang diterbitkan Perseroan pada tahun 2017 sebesar Rp3,67 triliun. Perseroan melunasi obligasi I tahap II sebesar Rp175 miliar, dan obligasi I tahap III sebesar Rp150 miliar dan obligasi II tahap I sebesar 500 miliar.

## LIABILITAS IMBALAN KERJA

Pada tahun 2018, jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan berjumlah sebesar Rp80,02 miliar meningkat Rp6,18 miliar atau 8,37% dibandingkan dengan jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan pada tahun 2017 sebesar Rp73,85 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan total benefit yang diterima karyawan dan jumlah karyawan tetap Perseroan.

## EKUITAS

Ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar 19,94% selama tahun 2018 atau meningkat Rp352,57 miliar dimana pada tahun 2017 yang berjumlah Rp1,77 triliun menjadi Rp2,12 triliun. Peningkatan ini diakibatkan oleh meningkatnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 24,46% atau Rp368,3 miliar dimana pada tahun 2017 yang berjumlah Rp1,51 triliun meningkat menjadi Rp1,87 triliun pada tahun 2018.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Ekuitas	2018 (Rp-juta)	2017 (Rp-juta)	Hasil Perbandingan	
			Perubahan (Rp-juta)	Persentase (%)
Modal saham				
Modal Disetor	250.000	250.000	-	-
Penghasilan Komprehensif lain:				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan - neto	(19.519)	(24.567)	(5.048)	-20,55%
Kerugian kumulatif atas instrument derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto	(33.391)	(12.620)	20.771	164,59%
Saldo laba				
Sudah ditentukan penggunaannya	50.000	50.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	1.873.825	1.505.529	368.296	24,46%
Jumlah Ekuitas	2.120.915	1.768.342	352.573	19,94%

## Laba (Rugi) Komprehensif Lain



**“Perseroan berhasil membukukan laba pada tahun 2018 sebesar Rp403,3 miliar. Laba bersih meningkat sebesar 15,15% dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2017 hanya berjumlah sebesar Rp350,2 miliar. Peningkatan ini didukung oleh pendapatan yang meningkat sebesar 13,94% dari portofolio pendapatan tahun lalu.”**

Uraian	2018 (Rp-juta)	2017 (Rp-juta)	Hasil Perbandingan	
			Perubahan (Rp-juta)	Persentase (%)
<b>Pendapatan</b>				
Pendapatan				
Pembiayaan konsumen	1.936.719	1.830.424	106.295	5,81%
Sewa pembiayaan	386.302	178.983	207.319	115,83%
Anjak Piutang	96	-	96	-
Bunga	12.116	9.036	3.080	34,09%
Lain-lain - neto	784.959	719.921	65.038	9,03%
Total pendapatan	3.120.192	2.738.364	381.828	13,94%
<b>Beban</b>				
Beban				
Beban keuangan	(1.260.010)	(1.035.442)	224.568	21,69%
Gaji dan tunjangan	(518.980)	(437.812)	81.168	18,54%
Umum dan administrasi	(398.555)	(354.063)	44.492	12,57%
<b>Penyisihan kerugian penurunan nilai:</b>				
Pembiayaan konsumen	(394.619)	(434.774)	(40.155)	-9,24%
Sewa pembiayaan	(3.950)	(5.784)	(1.834)	-31,71%
Anjak Piutang	(113)	-	113	-
Piutang lain-lain	(4.122)	(2.111)	2.011	95,26%
Total beban	(2.580.349)	(2.269.986)	(310.363)	13,67%
<b>Laba Sebelum Beban Pajak Final &amp; Pajak Penghasilan</b>				
Laba Sebelum Beban Pajak Final & Pajak Penghasilan	539.843	468.378	71.465	15,26%
Beban pajak final	(2.423)	(1.807)	(616)	34,09%
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	537.420	466.571	70.849	15,19%
Beban pajak penghasilan	(134.100)	(116.329)	(17.771)	15,28%
Laba Tahun Berjalan	403.320	350.242	53.078	15,15%
<b>Penghasilan Komprehensif Lain:</b>				
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	6.730	(13.162)	19.892	151,13%
Pajak penghasilan terkait	(1.682)	3.290	(4.972)	-151,12%
	5.048	(9.872)	14.920	151,13%
<b>Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>				
<b>Bagian efektif dari kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka</b>				
lindung nilai arus kas	(27.695)	(16.826)	10.869	64,60%
Pajak penghasilan terkait	6.924	4.206	2.718	64,62%
	(20.771)	(12.620)	8.151	64,59%



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Uraian	2018 (Rp-juta)	2017 (Rp-juta)	Hasil Perbandingan	
			Perubahan (Rp-juta)	Persentase (%)
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak	(15.723)	(22.492)	(6.769)	-30,10%
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	387.597	327.750	59.847	18,26%
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah Penuh)	161	140	21	15,00%

## PENDAPATAN

### a. Pendapatan Pembiayaan Konsumen

Di tahun 2018, pendapatan pembiayaan konsumen mencapai Rp1,94 triliun, meningkat 5,81% atau Rp106,3 miliar dibandingkan dengan pendapatan pembiayaan konsumen di tahun 2017 yang berjumlah Rp1,83 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh realisasi pembiayaan baru yang mengalami peningkatan di tahun 2018. Realisasi pembiayaan baru untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp23,25 triliun, naik Rp3,27 triliun atau 16,37% dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp19,98 triliun.

### b. Pendapatan Sewa Pembiayaan

Pendapatan sewa pembiayaan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp386,3 miliar, meningkat 115,83% atau Rp207,32 miliar dibandingkan dengan pendapatan sewa pembiayaan pada tahun 2017 yang sebesar Rp178,98 miliar.

### c. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp12,12 miliar, meningkat 34,09% atau Rp3,08 miliar dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2017 yang mencapai Rp9,04 miliar.

### d. Pendapatan lain-lain neto

Perseroan mencatat pendapatan lain-lain neto di tahun 2018 berjumlah Rp784,96

miliar, meningkat 9,03% atau Rp65,04 miliar jika dibandingkan dengan pendapatan lain-lain pada tahun 2017 yang berjumlah Rp719,92 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya *fee based income* seiring dengan peningkatan pembiayaan baru Perseroan.

## LABA TAHUN BERJALAN

Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp403,3 miliar atau meningkat 15,15% jika dibandingkan dengan Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp350,2 miliar. Kenaikan laba tahun berjalan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Peningkatan pendapatan dari pembiayaan konsumen dan pendapatan sewa pembiayaan di tahun 2018 yaitu masing-masing sebesar Rp106,30 miliar dan Rp207,32 miliar seiring pertumbuhan usaha Perseroan.
- Peningkatan pendapatan dari *fee based* Perseroan di tahun 2018 sebesar Rp65,04 miliar terutama dari pendapatan komisi asuransi, penalti, pendapatan penagihan, pendapatan akseptasi klaim seiring pertumbuhan usaha dan diversifikasi produk yang dilakukan Perseroan

Uraian	2018 (Rp-juta)	2017 (Rp-juta)	Hasil Perbandingan	
			Perubahan (Rp-juta)	Persentase (%)
Pendapatan	3.120.192	2.738.364	381.828	13,94%
Beban	(2.580.349)	(2.269.986)	(310.363)	13,67%
Laba sebelum pajak	539.843	468.378	71.465	15,26%
Beban pajak	(136.523)	(118.136)	(18.387)	15,56%
Laba tahun berjalan	403.320	350.242	53.078	15,15%
Total Penghasilan Komprehensif	387.597	327.750	59.847	18,26%

## LABA PER SAHAM

Perseroan mencatat laba per saham dari Rp140 per lembar saham pada tahun 2017 menjadi Rp 161 per lembar saham pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya laba tahun berjalan Perseroan sebesar Rp403,3 miliar pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar Rp350,2 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 15,15% atau Rp53,08 miliar.

## BEBAN

Total beban yang terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp2,58 triliun, meningkat 13,67% dari tahun sebelumnya yakni Rp2,27 triliun. Peningkatan ini sebagian besar dipengaruhi oleh meningkatnya beban keuangan sebesar 21,69%, atau Rp224,57 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.04 triliun. Hal ini sejalan dengan meningkatnya liabilitas perusahaan dari pinjaman bilateral maupun sindikasi yang terjadi pada tahun 2018.

### a. Beban Keuangan

Di tahun 2018, beban keuangan Perseroan tercatat berjumlah Rp1,260 miliar, meningkat 21,69% atau Rp224,57 miliar dibandingkan dengan beban pada tahun 2017 yang

mencapai Rp1,035 miliar. Kenaikan beban ini disebabkan adanya peningkatan jumlah pinjaman Rp11,22 triliun, naik Rp2,98 triliun atau 36,12% dibandingkan dengan jumlah pinjaman Perseroan pada tahun 2017 yang berjumlah Rp8,24 triliun. Perseroan juga melakukan pinjaman sindikasi sebagai bagian dari upaya yang dilakukan oleh Perseroan guna mendukung pencapaian target pembiayaan konsumen yang dibiayai sendiri.

### b. Beban Gaji dan Tunjangan

Beban gaji dan tunjangan tahun 2018 berjumlah Rp518,98 miliar, meningkat Rp81,17 miliar atau 18,54 % dari beban gaji dan tunjangan pada tahun 2017 yang berjumlah Rp437,81 miliar.

### c. Beban Umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan di tahun 2018 berjumlah Rp398,56 miliar, meningkat 12,57% atau Rp44,49 miliar dari tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp354,06 miliar. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur kantor cabang selama tahun 2018 untuk menunjang target pembiayaan konsumen baru. Biaya operasional meliputi biaya sewa, gedung, pemeliharaan, utilitas kantor, perjalanan dinas dan pengelolaan aset (penagihan) kantor cabang untuk menunjang pencapaian target perusahaan.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Uraian	2018 (Rp-juta)	2017 (Rp-juta)	Hasil Perbandingan	
			Perubahan (Rp-juta)	Persentase (%)
Biaya penagihan	152.072	171.328	(19.256)	-11,24%
Sewa	37.663	36.882	781	2,18%
Penyusutan	34.574	25.346	9.228	36,41%
Jasa pihak ketiga	18.620	11.255	7.365	65,44%
Perjalanan dinas	17.829	13.781	4.048	29,37%
Perbaikan dan pemeliharaan	14.221	12.217	2.004	16,40%
Komunikasi	13.955	13.325	630	4,73%
Keamanan	11.955	11.293	662	5,86%
Rekrutmen dan pelatihan	9.137	7.707	1.430	18,55%
Jasa profesional	8.475	3.734	4.741	126,97%
Iuran OJK	8.134	6.122	2.012	32,87%
Listrik dan air	6.577	6.197	380	6,13%
Alat tulis dan cetakan	5.864	5.501	363	6,60%
Jamuan bisnis	5.512	4.577	935	20,43%
Lain-lain	53.967	24.798	29.169	117,63%
Total Beban Umum dan Administrasi	398.555	354.063	44.492	12,57%

## BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN NILAI

Perseroan memiliki beban penyisihan kerugian penurunan nilai tahun 2018 yang tercatat berjumlah Rp402,8 miliar, turun 9,01% atau Rp39,9 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah Rp442,7 miliar. Penurunan penghapusan piutang

pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar Rp19,25 miliar atau 3,59%, sementara kenaikan *recovery* sebesar Rp80,20 miliar atau 111,37%.

## Arus Kas

Uraian	2018 (Rp-juta)	2017 (Rp-juta)	Hasil Perbandingan	
			Perubahan (Rp-juta)	Persentase (%)
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>				
Penerimaan kas dari konsumen :				
Pembiayaan konsumen	32.929.846	29.784.343	3.145.503	10,56%
Sewa pembiayaan	3.146.365	867.371	2.278.994	262,75%
Bunga	12.128	9.053	3.075	33,97%
Pendapatan penalti	58.007	47.844	10.163	21,24%
Penerimaan dari piutang yang dihapus				
bukukan	152.200	72.005	80.195	111,37%
Premi asuransi	1.746.273	1.643.524	102.749	6,25%
Pengeluaran kas masuk				
Pembiayaan fasilitas pembiayaan bersama	(9.408.430)	(9.844.625)	(436.195)	(4,43%)
Pembayaran kepada penyaluran kendaraan	(27.161.244)	(22.647.364)	4.513.880	19,93%
Pembayaran beban keuangan	(1.208.033)	(1.040.072)	167.961	16,15%
Pembayaran pajak penghasilan	(185.262)	(113.687)	71.575	62,96%
Pembayaran gaji dan tunjangan	(461.115)	(355.254)	105.861	29,80%
Pembayaran beban umum dan administrasi	(478.880)	(385.014)	93.866	24,38%
Pembayaran kepada perusahaan asuransi	(1.085.334)	(1.008.229)	77.105	7,65%
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi	(1.943.479)	(2.970.105)	(1.026.626)	(34,57%)
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>				
Hasil penjualan aset tetap	-	38	(38)	-
Pembelian aset tetap	(50.719)	(49.979)	740	1,48%
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas Investasi	(50.719)	(49.941)	778	1,56%
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>				
Penerimaan pinjaman bank	16.824.698	13.034.928	3.789.770	29,07%
Penerimaan utang obligasi	-	850.000	(850.000)	-
Pembayaran pinjaman bank	(13.874.241)	(10.424.457)	3.449.784	33,09%
Pembayaran surat berharga yang diterbitkan	(825.000)	(500.000)	325.000	65,00%
Pembayaran beban emisi	(1.845)	(4.232)	(2.387)	-56,40%
Pembayaran dividen kas	(35.024)	(33.537)	1.487	4,43%

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Uraian	2018 (Rp-juta)	2017 (Rp-juta)	Hasil Perbandingan	
			Perubahan (Rp-juta)	Persentase (%)
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	2.088.588	2.922.702	(834.114)	-28,54%
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	94.390	(97.344)	191.734	196,97%
Kas dan setara kas pada awal tahun	160.550	257.894	(97.344)	-37,75%
Kas dan setara kas pada akhir tahun	254.940	160.550	94.390	58,79%

## ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di tahun 2018 berjumlah Rp1,94 triliun, mengalami peningkatan 34,57% dari tahun 2017 yang berjumlah Rp2,97 triliun. Kenaikan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi disebabkan adanya kenaikan penerimaan pendapatan dari pembiayaan konsumen sebesar Rp3,15 triliun, kenaikan penerimaan sewa pembiayaan Rp2,28 triliun yang dikompensasi dengan kenaikan pembayaran kepada penyalur kendaraan sebesar Rp4,51 triliun.

## ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Di tahun 2018, penggunaan kas bersih untuk aktivitas investasi tercatat berjumlah Rp50,72 miliar, naik 1,56% dibandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah Rp49,94 miliar. Kas bersih ini digunakan untuk aktivitas investasi terutama untuk perolehan aset tetap sehubungan dengan penambahan prasarana, perabotan, peralatan kantor, tanah dan gedung.

## ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Di tahun 2018, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp2,09 triliun, turun 28,54% dari tahun 2017 yang berjumlah Rp2,92 triliun. Penurunan ini disebabkan adanya kenaikan penerimaan pinjaman bank sebesar Rp3,8 triliun, dikompensasi dengan kenaikan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp3,45 triliun di tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 dan kenaikan pembayaran utang obligasi sebesar 325 miliar di 2018 dibandingkan tahun 2017.

## RASIO-RASIO KEUANGAN

### RASIO LIKUIDITAS

Likuiditas dalam perusahaan pembiayaan merupakan gambaran dan kemampuan Perseroan dalam hal mengelola perputaran arus kas dalam jangka pendek, yang terdiri dari arus kas masuk (*cash inflow*) ataupun arus kas keluar (*cash outflow*). Risiko likuiditas merupakan risiko dimana Perseroan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi

untuk dapat memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Namun, karena mengingat Perseroan telah memperoleh dukungan keuangan yang kuat dari Entitas Induk melalui skema pembiayaan bersama, maka risiko ini dapat dikelola dengan baik.

Uraian (Rp-juta)	kurang dari satu bulan	1-6 bulan	lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo	Nilai Tercatat
<b>Aset</b>						
Kas dan setara kas	242.077	-	-	-	12.863	254.940
Piutang pembiayaan Konsumen	378.440	1.957.380	1.966.593	8.630.951	-	12.933.364
Piutang sewa Pembiayaan Konsumen	127.648	636.053	737.637	1.827.051	-	3.328.389
Anjak piutang	-	11.416	-	-	-	11.416
Piutang lain lain	735.408	-	-	-	-	735.408
Piutang Derivatif	-	-	-	138.333	-	138.333
Aset Lain lain	65.874	-	-	-	-	65.874
<b>Total Aset</b>	<b>1.549.447</b>	<b>2.604.849</b>	<b>2.704.230</b>	<b>10.596.335</b>	<b>12.863</b>	<b>17.467.724</b>
<b>LIABILITAS</b>						
Utang Usaha	649.630	-	-	-	-	649.630
Utang lain lain	223.804	-	-	-	-	223.804
Beban Bunga Yang masih harus dibayar	-	100.582	-	-	-	100.582
Pinjaman Bank	1.577.799	2.223.184	2.355.172	5.031.969	-	11.188.124
Utang derivatif	-	-	-	89.788	-	89.788
Surat Berharga yang diterbitkan	-	719.470	399.285	1.725.961	-	2.844.716
<b>Total Liabilitas</b>	<b>2.451.233</b>	<b>3.043.236</b>	<b>2.754.457</b>	<b>6.847.718</b>	<b>-</b>	<b>15.096.644</b>
<b>Total Perbedaan jatuh tempo</b>	<b>(901.786)</b>	<b>(438.387)</b>	<b>(50.227)</b>	<b>3.748.617</b>	<b>12.863</b>	<b>2.371.080</b>



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada *undiscounted cash flows* pada tanggal 31 Desember 2018.

Uraian (Rp-juta)	kurang dari satu bulan	1-6 bulan	lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo	Nilai Tercatat
LIABILITAS						
Utang Usaha	649.630	-	-	-	-	649.630
Utang lain lain	223.804	-	-	-	-	223.804
Beban Bunga Yang masih harus dibayar	-	100.582	-	-	-	100.582
Pinjaman Bank	2.143.440	2.297.153	2.505.930	5.078.171	-	12.024.694
Utang derivatif	-	-	-	89.788	-	89.788
Surat Berharga yang diterbitkan	-	845.760	493.356	1.927.236	-	3.266.352
Total Liabilitas	3.016.874	3.243.495	2.999.286	7.095.195	-	16.354.850

## RASIO KUALITAS KREDIT DARI ASET KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2018, eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas:

Uraian (Rp-juta)	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	mengalami penurunan nilai	Cadangan Kerugian penurunan nilai	Jumlah
	High grade	Standar grade				
Kas dan setara kas	242.077	-	-	-	-	242.077
Piutang pembiayaan Konsumen	5.138.800	6.766.515	871.965	156.084	(303.884)	12.629.480
Piutang sewa Pembiayaan Konsumen	1.876.988	1.259.383	167.720	24.298	(9.286)	3.319.103
Anjak piutang	11.416	-	-	-	(113)	11.303
Piutang lain lain	735.408	-	-	-	(6.007)	729.401
Piutang Derivatif	138.333	-	-	-	-	138.333
Aset Lain lain	65.874	-	-	-	-	65.874
Total Aset	8.208.896	8.025.898	1.039.685	180.382	(319.290)	17.135.571

Penjelasan pembagian kualitas kredit yang diberikan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai:

- *High grade*, yaitu tidak pernah mengalami tunggakan sebelumnya.
- *Standard grade*, yaitu pernah mengalami tunggakan sebelumnya namun sampai saat ini belum terdapat keterlambatan dalam pembayaran cicilan pokok dan bunga. Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan yang pembayarannya

menunggak lebih dari 90 hari diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang mengalami penurunan nilai. Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan konsumen yang diberikan, Perseroan menerima jaminan dari konsumen berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (“BPKB”) atas kendaraan bermotor yang dibiayai Perseroan.

Tabel berikut menunjukkan aging analysis terhadap piutang pembiayaan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai:

Uraian (Rp-juta)	1-30 hari	31-60 hari	61-90 hari	Jumlah
Piutang pembiayaan Konsumen				
Perorangan :	567.109	183.692	121.164	871.965
Piutang sewa Pembiayaan Konsumen				
Korporasi :	54.071	11.237	102.412	167.720
Total Aset	621.180	194.929	223.536	1.039.685

## RASIO PROFITABILITAS

Rasio imbal hasil rata-rata aset dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam meraih laba dari seluruh aset yang diinvestasikan. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, rasio imbal

hasil rata-rata aset adalah sebesar 3,33% dan 3,67%. Jumlah pendapatan/jumlah aset pada tahun 2018 sebesar 17,85% pada tahun 2017 menjadi 18,58% pada tahun 2018.

## ASET PRODUKTIF

Aset produktif Perseroan terdiri dari Piutang Pembiayaan Konsumen Kelolaan, Piutang Bermasalah (*Non performing Loan*), Likuiditas dan Solvabilitas, serta informasi keuangan lainnya. Secara rinci, perolehan aset produktif adalah sebagai berikut:

- Komposisi piutang yang tergolong lancar terhadap total piutang per 31 Desember

2018 adalah sebesar 94,44%, relative stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar 94,84%. Perseroan senantiasa menjaga kualitas piutang dan melakukan seleksi yang ketat terhadap pembiayaan yang ada. Perseroan konsisten melakukan penanganan dalam pembiayaan yang bermasalah dengan menitikberatkan

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

prinsip kehati-hatian atau *prudent* dan menjaga ketaatan konsumennya untuk melakukan pembayaran tepat dengan cara mengingatkan, menagih, dan mitigasi risiko.

- Perbandingan antara jumlah kewajiban dengan modal sendiri pada tanggal 31 Desember 2018

dan 2017 adalah sebesar 6,62x, dan 6,72x. Perbandingan antara jumlah kewajiban dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar 0,88x dan 0,88x. Rasio ini relatif stabil untuk tahun 2018 dan 2017.

## RASIO EFISIENSI BIAYA

Di tahun 2018, *Cost Efficiency Ratio* (CER) tercatat berjumlah sebesar 49,33% atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat berjumlah sebesar 46,50%.

## KOMPOSISI BEBAN PEMBIAYAAN

Beban keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.26 triliun, naik 21,69% atau meningkat sebesar Rp224,57 miliar dibandingkan dengan beban keuangan Perseroan pada tahun 2017 yang mencapai Rp1.04 triliun. Hal ini menunjukkan peningkatan dari sektor pembiayaan sendiri, oleh karenanya Perseroan tetap melakukan efisiensi dalam pengelolaan beban keuangan.

### RASIO EFISIENSI BIAYA

Uraian	2018	2017	Selisih	Persentase (%)
Rasio Efisiensi biaya	49,33%	46,50%	2,83%	6,09%
Rasio Biaya <i>Overhead</i> dibanding pendapatan	29,41%	28,92%	0,49%	1,69%

### KOMPOSISI BEBAN PEMBIAYAAN (RP-JUTA)

Uraian	2018	2017	Selisih	Persentase (%)
Pinjaman Bank	913.714	696.108	217.606	31,26%
Surat Berharga	315,882	326,103	(10,221)	-3,13%
Administrasi dan Provisi bank	4.673	3.789	884	23,33%
Rugi selisih kurs	17.853	3.124	14.729	471,48%
Amortisasi Biaya emisi Surat berharga	6.310	3.249	3.061	94,21%
Lain lain	1.578	3.069	(1.491)	-48,58%
Total Aset	1.260.010	1.035.442	224.568	21,69%

### RASIO KEUANGAN 2017-2018

Uraian	2018	2017	Selisih	Persentase (%)
<b>PROFITABILITAS</b>				
Imbal Hasil Aset	2,50%	2,68%	-0,18%	-6,72%
Imbal Hasil Aset*	3,35%	3,58%	-0,23%	-6,42%
Imbal Hasil rata-rata Aset*	3,33%	3,67%	-0,34%	-9,26%
Imbal Hasil Ekuitas	20,74%	21,60%	-0,86%	-3,98%
Imbal Hasil rata-rata Ekuitas	20,73%	22,10%	-1,37%	-6,20%
Jumlah Pendapatan / Jumlah Aset	17,85%	18,58%	-0,73%	-3,93%
<b>ASET PRODUKTIF</b>				
Piutang Pembiayaan Bersih Kelolaan**	43.490.232	36.849.316	6.640.916	18,02%
Piutang Pembiayaan-Pembiayaan Bersama**	27.217.063	23.032.176	4.184.887	18,17%
Piutang Bermasalah Kelolaan	0,83%	0,80%	-0,03%	3,75%
<b>LIKUIDITAS</b>				
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset (kali)	0,88	0,88	-	-
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (kali)	7,24	7,34	-0,10%	-1,36%
Utang yang Berbunga / Jumlah Ekuitas*** (Kali)	6,62	6,72	-0,10%	-1,49%
<b>PERTUMBUHAN</b>				
Pertumbuhan Pendapatan	13,94%	11,80%	2,14%	18,14%
Pertumbuhan Laba Tahun Berjalan	15,15%	4,43%	10,72%	241,99%
Pertumbuhan Aset	18,61%	29,25%	-10,64%	-36,38%
Pertumbuhan Liabilitas	18,42%	30,63%	-12,21%	-39,86%
Pertumbuhan Ekuitas	19,94%	19,96%	-0,02%	-0,10%
<b>RASIO LAINNYA</b>				
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan	17,30%	17,10%	0,20%	1,17%
Laba Bersih Setelah Pajak Tahun Berjalan / Pendapatan	12,93%	12,79%	0,14%	1,09%
Rasio Efisiensi Biaya	49,33%	46,50%	2,83%	6,09%

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## Kemampuan Membayar Utang Serta Fasilitas Pembiayaan dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

### KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG: LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan *asset* lancar yang dimilikinya. Likuiditas diukur dengan menggunakan rasio lancar (*current ratio*), yaitu perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas lancar. Aset lancar terdiri dari aset yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Di tahun 2018, likuiditas Perseroan tercatat sebesar 0,83 kali. Secara rinci, perhitungan likuiditas tersebut adalah:

$$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} = \frac{6.858.526}{8.248.926} = 0,83X$$

Sedangkan di tahun 2017 likuiditas Perseroan tercatat sebesar 1,02 kali, Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan jangka panjangnya yang tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas yang mengandung beban bunga dengan total aset. Perbandingan antara jumlah liabilitas yang mengandung beban bunga dengan modal sendiri pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar 6,62 kali dan 6,72 kali. Penurunan rasio tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 karena kemampuan Perseroan mengelola *asset* yang dimiliki Perseroan dan memperoleh sumber pendanaan yang lebih efisien untuk mendanai ekspansi dalam pembiayaan konsumen yang dilakukan perseroan tahun 2018.

#### PERKEMBANGAN LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS

Uraian	2018	2017	Selisih	Persentase (%)
Rasio Lancar	0,83	1,02	(0,19)	-18,63%
Rasio Liabilitas terhadap ekuitas	7,24	7,34	(0,10)	-1,36%

### FASILITAS PEMBIAYAAN DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Dalam menjalankan usahanya Perseroan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Setiap permohonan kredit harus melalui proses analisis kredit secara cermat dan berbagai tahapan persetujuan. Pengelolaan portfolio secara konservatif dilakukan dengan menerapkan

penyisihan secara progresif atas semua piutang yang telah masuk kategori ragu-ragu. Saat ini Perseroan menerapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan *review* terhadap status saldo pada akhir periode.

Perseroan konsisten melakukan penanganan dalam pembiayaan yang bermasalah dengan lebih menitikberatkan prinsip kehati-hatian atau (*prudent*) dan menjaga ketaatan konsumennya untuk melakukan pembayaran tepat waktu dengan cara *reminding* (mengingatkan), *collecting* (menagih), dan *repossess* (menarik kendaraan). Perusahaan juga memiliki divisi penyelamatan

kredit yang dinamakan *Account Receivable Management Division* yang dipimpin oleh seorang *Account Receivable Division Head* yang membawahi beberapa orang *Account Receivable Departemen Head* dan setiap *Account Receivable Department Head* akan membawahi beberapa orang *Remedial Head* dan *Collection Head*.

#### TUNGGAKAN PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN BERDASARKAN TUNGGAKAN ANGSURAN

	2018		2017		Kenaikan (Penurunan)		
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Selisih (Rp-juta)	Persentase (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3:2)	
Total Piutang	46.569.692	100,00%	41.546.201	100,00%	5.023.491	12,09%	↑
Lancar	43.978.864	94,44%	39.403.525	94,84%	4.575.339	11,61%	↑
Tunggakan 1 - 90 hari	2.191.715	4,71%	1.799.950	4,33%	391.765	21,77%	↑
Tunggakan 91 - 120 hari	180.103	0,39%	139.881	0,34%	40.222	28,75%	↑
Tunggakan 121 - 180 hari	200.498	0,43%	177.069	0,43%	23.429	13,23%	↑
Tunggakan >180 hari (piutang non performing)	18.512	0,03%	25.776	0,06%	(7.264)	-28,18%	↓

Komposisi piutang yang tergolong lancar terhadap total piutang per 31 Desember 2018 adalah sebesar 94,44%, dimana masih dalam posisi terjaga bagi kesehatan keuangan Perseroan. Untuk tunggakan lebih dari 180 hari terjadi penurunan sebesar 28,18% dibandingkan tahun 2017, yang menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menurunkan tunggakan yang dapat menimbulkan piutang *non performing*.

#### TUNGGAKAN PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN BERDASARKAN TUNGGAKAN ANGSURAN

	2018		2017		Kenaikan (Penurunan)		
	Jumlah (Rp-juta)		Jumlah (Rp-juta)		Selisih (Rp-juta)	Persentase (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3:2)	
Total Piutang	16.384.268		14.794.655		1.589.613	10,74%	↑
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(3.450.904)		(3.342.144)		(108.760)	3,25%	↑
Piutang pembiayaan konsumen bersih	12.933.364		11.452.511		1.480.853	12,93%	↑

Total pembiayaan konsumen Perseroan per 31 Desember 2018 sebesar Rp12,93 triliun. Berdasarkan tabel diatas, tren peningkatan terjadi pada piutang pembiayaan konsumen bersih yang menunjukkan ekspansi dan peningkatan daya saing diantara perusahaan pembiayaan sejenis.



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## Struktur Modal Dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

### STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN

Struktur modal merupakan kombinasi dari modal sendiri (ekuitas) dan utang (liabilitas). Kombinasi Struktur modal yang optimal akan memaksimalkan nilai perusahaan. Kondisi struktur modal optimal

dicapai dengan modal rata-rata tertimbang *Weighted Average Cost of Capital (WACC)* yang minimal.

### STRUKTUR MODAL DAN PERUBAHANNYA

Struktur Modal	2018		2017		Kenaikan (Penurunan)		
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Selisih (Rp-juta)	Persentase (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3:2)	
Aset Lancar	6.858.526	39,23%	5.474.423	37,14%	1.384.103	25,28%	↑
Aset Tidak Lancar	10.623.318	60,77%	9.265.035	62,86%	1.358.283	14,66%	↑
Total Aset	17.481.844	100,00%	14.739.458	100,00%	2.742.386	18,61%	↑
Liabilitas Lancar	8.248.926	47,19%	5.361.499	36,37%	2.887.427	53,85%	↑
Liabilitas Tidak Lancar	7.112.003	40,68%	7.609.617	51,63%	(497.614)	-6,54%	↓
Total Liabilitas	15.360.929	87,87%	12.971.116	88,00%	2.389.813	18,42%	↑
Total Ekuitas	2.120.915	12,13%	1.768.342	12,00%	352.573	19,94%	↑
Total Liabilitas dan Ekuitas	17.481.844	100,00%	14.739.458	100,00%	2.742.386	18,61%	↑

Komposisi pendanaan antara pinjaman dan permodalan Perseroan dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Uraian	2018		2017		Kenaikan (Penurunan)		
	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta)	Kontribusi (%)	Selisih (Rp-juta)	Persentase (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3:2)	
Pinjaman Bank	11.188.124	64,00%	8.210.430	55,70%	2.977.694	36,27%	↑
Surat Berharga yang Diterbitkan	2.844.716	16,27%	3.665.251	24,87%	(820.535)	-22,39%	↓
Kewajiban Lainnya	1.328.089	7,60%	1.095.435	7,43%	232.654	21,24%	↑
Ekuitas	2.120.915	12,13%	1.768.342	12,00%	352.573	19,94%	↑
Jumlah	17.481.844	100,00%	14.739.458	100,00%	2.742.386	18,61%	↑

Komposisi Pendanaan Perseroan di tahun 2018 sebesar 87,87% berasal dari pinjaman dan surat berharga, sisanya berjumlah sebesar 12,13% berasal dari Ekuitas dan Modal Sendiri. Komposisi ini relatif sama dengan tahun 2017, komposisi pinjaman yang berasal dari bank meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan sedangkan surat berharga yang diterbitkan menurun sebesar 22,39% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Perseroan melakukan pelunasan surat berharga berkelanjutan I tahap II, dan berkelanjutan I tahap III dan II tahap I. Kewajiban lainnya meningkat sebesar 21,24% di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini salah satu diantaranya disebabkan karena adanya peningkatan supplier kendaraan. Saldo ekuitas di tahun 2018 berjumlah sebesar Rp2,12 triliun atau naik sebesar 19,94% dibanding dengan tahun 2017 yang berjumlah Rp1,77 triliun.

Namun, secara komposisi, total liabilitas dan ekuitas relatif stabil, berjumlah sebesar 12%. Hal ini menunjukkan jika komposisi pinjaman dan ekuitas berjumlah relatif sama, maka Perseroan dapat meningkatkan imbal hasil sebesar 20,73% dan juga peningkatan laba tahun berjalan sebesar 15,15%. Tujuan Perseroan dalam mengelola permodalannya adalah menjaga kelangsungan usaha Perseroan untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya modal (*cost of capital*).

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, menyesuaikan imbalan hasil modal kepada pemegang saham atau

menerbitkan saham baru untuk dapat mengurangi jumlah pinjaman. Perseroan menerapkan konsistensi dengan pelaku industri lainnya, yaitu memonitor permodalan berdasarkan *gearing ratio*. Rasio ini dihitung dari nilai bersih pinjaman (termasuk obligasi) dibagi dengan jumlah modal. Jumlah modal diambil dari ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan. *Gearing ratio* yang harus dipelihara sesuai regulasi adalah maksimal 10x *gearing ratio* perusahaan di tahun 2018 adalah 7,2x sehingga masih taat pada ketentuan yang berlaku.

## KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL PERSEROAN

Tujuan Perseroan dalam mengelola permodalannya adalah menjaga kelangsungan usaha Perseroan untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya modal.

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbalan hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

Konsisten dengan pelaku industri lainnya, Perseroan memonitor permodalan berdasarkan *gearing ratio*. Rasio ini dihitung dari nilai bersih pinjaman (termasuk Obligasi dan *Medium-Term Notes*) dibagi dengan jumlah modal. Jumlah modal diambil dari ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Dalam mengelola permodalan, Perseroan melakukan analisa secara bulanan untuk memastikan bahwa Perseroan tetap mengikuti POJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang diantaranya mengatur ketentuan sebagai berikut:

- Modal disetor Perseroan minimum sebesar Rp100.000.000.000,-

- Ekuitas Perseroan minimum sebesar 50,00% dari modal disetor.
- Jumlah pinjaman yang dimiliki Perseroan dibandingkan modal sendiri dan utang subordinasi dikurangi penyertaan (*gearing ratio*) ditetapkan setinggi-tingginya 10 kali, baik untuk pinjaman luar negeri maupun dalam negeri.

Struktur Modal	2018	2017
Pinjaman		
Pinjaman yang diterima - neto	11.188.124	8.210.430
Obligasi	2.844.716	3.665.251
Total pinjaman	14.032.840	11.875.681
Jumlah modal	2.120.915	1.768.342
<i>Gearing ratio</i>	6,62	6,72

Perseroan senantiasa menjaga jumlah maksimum *gearing ratio* lebih kecil dari ketentuan yang ditetapkan melalui analisa alternatif pembiayaan baik melalui pinjaman bank, penerbitan obligasi ataupun optimalisasi dana *joint financing*. Perseroan juga menghitung biaya dana dari alternatif pembiayaan yang dipilih untuk memastikan biaya dana tersebut dapat menghasilkan pendapatan maksimum bagi Perseroan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang "Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan", pada tanggal 31 Desember 2018 Perseroan telah memenuhi jumlah minimal ekuitas

dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan. Perusahaan telah menghitung beberapa rasio antara lain:

Rasio permodalan (tidak diaudit)	20,36%
Rasio ekuitas terhadap modal disetor	848,37%
<i>Rasio Non-Performing Finance - neto</i>	0,83%
<i>Rasio Non-Performing Finance - gross</i>	1,11%
Rasio piutang pembiayaan terhadap total aset	91,29%
<i>Gearing ratio</i>	6,62
Total Ekuitas	2.120.915
Total Liabilitas dan Ekuitas	17.481.844

## IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Di tahun 2018, Perseroan memiliki ikatan material yang dapat dipergunakan untuk membeli aset-aset Perseroan berupa hak atas tanah, bangunan & prasarana, peralatan kantor, perabotan dan kendaraan terutama yang berhubungan dengan keperluan cabang. Sumber pendanaan tersebut

diperoleh dari hasil usaha Perseroan yang seluruhnya dalam mata uang Rupiah. Pada tahun 2018, pembelian aset tetap adalah sebesar Rp50,72 miliar, naik sebesar 1,48% atau sebesar Rp740 juta dibandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah Rp49,98 miliar.

## REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

### REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Investasi Barang Modal	Tujuan	Nilai (Rp-juta)
Bangunan	Menunjang pertumbuhan usaha Perseroan	2.034
Peralatan Kantor	Menunjang pertumbuhan usaha Perseroan	40.756
Renovasi Bangunan Sewa	Menunjang pertumbuhan usaha Perseroan	3.120
Aset dalam penyelesaian	Menunjang pertumbuhan usaha Perseroan	4.809
	Jumlah	50.719

Penjelasan tentang investasi barang modal dan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

### KINERJA KEUANGAN DAN PROFITABILITAS SEGMENT LAINNYA

	2018 (Rp-juta)	2017 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)		
			Selisih (Rp-juta)	Persentase (%)	
Realisasi Investasi Barang Modal	50.719	49.979	740	1,48%	↑

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/ MODAL

Perseroan tidak memiliki aksi korporasi berupa investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi dan restrukturisasi utang atau modal yang terjadi di sepanjang tahun 2018.

## PERBANDINGAN ANTARA TARGET ANGGARAN DENGAN REALISASI, DAN PROYEKSI USAHA

### LABA (RUGI)

(dalam jutaan Rupiah)	Realisasi 2018	Target 2018	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2018 (%)		Proyeksi 2019	Proyeksi 2019 Terhadap Realisasi 2018 (%)		Proyeksi 2019 Terhadap Target 2018 (%)	
	(1)	(2)	(1:2)		(3)	(3:1)		(3:2)	
Pembiayaan konsumen	1.936.719	1.873.718	103,36%	↑	2.191.922	113,18%	↑	116,98%	↑
Sewa pembiayaan	386.302	359.187	107,55%	↑	420.186	108,77%	↑	116,98%	↑
Anjak piutang	96	130	73,85%	↑	152	158,33%	↑	116,92%	↑
Bunga	12.116	9.416	128,68%	↑	12.164	100,40%	↑	129,19%	↑
Lain-lain-neto	784.959	799.422	98,19%	↑	845.404	107,70%	↑	105,75%	↑
Total Pendapatan	3.120.192	3.041.873	102,57%	↑	3.469.828	111,21%	↑	114,07%	↑
Beban keuangan	(1.260.010)	(1.155.962)	109,00%	↑	(1.384.364)	109,87%	↑	119,76%	↑
Gaji dan tunjangan	(518.980)	(495.052)	104,83%	↑	(590.231)	113,73%	↑	119,23%	↑
Umum dan administrasi	(398.555)	(412.732)	96,57%	↑	(453.268)	113,73%	↑	109,82%	↑
<i>Penyisihan kerugian penurunan nilai:</i>									
Pembiayaan konsumen	(394.619)	(484.807)	81,40%	↑	(446.179)	113,07%	↑	92,03%	↑
Sewa pembiayaan	(3.950)	(4.727)	83,56%	↑	(4.350)	110,13%	↑	92,03%	↑
Anjak piutang	(113)	(174)	64,94%	↑	(160)	141,59%	↑	91,95%	↑
Piutang lain-lain	(4.122)	(4.881)	84,45%	↑	(4.492)	108,98%	↑	92,03%	↑

(dalam jutaan Rupiah)	Realisasi 2018	Target 2018	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2018 (%)		Proyeksi 2019	Proyeksi 2019 Terhadap Realisasi 2018 (%)		Proyeksi 2019 Terhadap Target 2018 (%)	
	(1)	(2)	(1:2)		(3)	(3:1)		(3:2)	
Total Beban	(2.580.349)	(2.558.335)	100,86%	↑	(2.883.044)	111,73%	↑	112,69%	↑
Laba Sebelum Beban Pajak Final & Pajak Penghasilan	539.843	483.538	111,64%	↑	586.784	108,70%	↑	121,35%	↑
Beban pajak final & Beban pajak penghasilan	(136.523)	(123.484)	110,56%	↑	(146.696)	107,45%	↑	118,80%	↑
Laba Tahun Berjalan	403.320	360.054	112,02%	↑	440.088	109,12%	↑	122,23%	↑

#### POSISI KEUANGAN, STRUKTUR MODAL DAN DIVIDEN

(dalam jutaan Rupiah)	Realisasi 2018	Target 2018	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2018 (%)		Proyeksi 2019	Proyeksi 2019 Terhadap Realisasi 2018 (%)		Proyeksi 2019 Terhadap Target 2018 (%)	
	(1)	(2)	(1:2)		(3)	(3:1)		(3:2)	
Kas & bank	254.940	304.537	83,71%	↑	298.724	117,17%	↑	98,09%	↑
Piutang pembiayaan konsumen- net	12.629.480	12.248.421	103,11%	↑	12.959.126	102,61%	↑	105,80%	↑
Piutang sewa pembiayaan- net	3.319.103	3.246.255	102,24%	↑	3.434.616	103,48%	↑	105,80%	↑
Anjak piutang- net	11.303	106.564	10,61%	↑	112.748	997,50%	↑	105,80%	↑
Piutang lain- net	729.401	634.434	114,97%	↑	671.246	92,03%	↑	105,80%	↑
Aset pajak tangguhan	59.921	44.202	135,56%	↑	46.766	78,05%	↑	105,80%	↑
Tagihan kelebihan pajak	43.538	51.758	84,12%	↑	54.761	125,78%	↑	105,80%	↑
Piutang derivatif	138.333	182.322	75,87%	↑	192.901	139,45%	↑	105,80%	↑
Aset tetap	182.005	190.364	95,61%	↑	194.595	106,92%	↑	102,22%	↑
Aset lain-lain	113.820	204.604	55,63%	↑	216.476	190,19%	↑	105,80%	↑
Total Aset	17.481.844	17.213.461	101,56%	↑	18.181.959	104,00%	↑	105,63%	↑
Utang usaha	649.630	588.867	110,32%	↑	613.384	94,42%	↑	104,16%	↑
Utang lain-lain	284.685	268.914	105,86%	↑	340.826	119,72%	↑	126,74%	↑
Utang pajak kini	1.852	9.482	19,53%	↑	12.017	648,87%	↑	126,74%	↑
Beban yang masih harus dibayar	222.110	132.628	167,47%	↑	182.495	82,16%	↑	137,60%	↑
Pinjaman bank- net	11.188.124	8.419.119	132,89%	↑	10.670.517	95,37%	↑	126,74%	↑
Surat berharga yang diterbitkan- net	2.844.716	4.593.361	61,93%	↑	3.637.511	127,87%	↑	79,19%	↑
Utang derivatif	89.788	50.099	179,22%	↑	63.496	70,72%	↑	126,74%	↑
Liabilitas imbalan kerja	80.024	67.919	117,82%	↑	86.082	107,57%	↑	126,74%	↑
Total liabilitas	15.360.929	14.130.389	108,71%	↑	15.606.328	101,60%	↑	110,45%	↑

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

(dalam jutaan Rupiah)	Realisasi 2018	Target 2018	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2018 (%)		Proyeksi 2019	Proyeksi 2019 Terhadap Realisasi 2018 (%)		Proyeksi 2019 Terhadap Target 2018 (%)	
	(1)	(2)	(1:2)		(3)	(3:1)		(3:2)	
Modal saham	250.000	250.000	100,00%	↑	250.000	100,00%	↑	100,00%	↑
Penghasilan komprehensif lain:									
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan- neto	(19.519)	(30.128)	64,79%	↑	(25.169)	128,95%	↑	83,54%	↑
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas- neto	(33.391)	(52.725)	63,33%	↑	(44.046)	131,91%	↑	83,54%	↑
Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya	50.000	50.000	100,00%	↑	50.000	100,00%	↑	100,00%	↑
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	1.873.825	2.865.925	65,38%	↑	2.344.846	125,14%	↑	81,82%	↑
Total Ekuitas	2.120.915	3.083.072	68,79%	↑	2.575.631	121,44%	↑	83,54%	↑
Total Liabilitas dan Ekuitas	17.481.844	17.213.461	101,56%	↑	18.181.959	104,00%	↑	105,63%	↑



## INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Berikut peristiwa setelah periode pelaporan akuntan:

1. Surat Berharga yang Diterbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 8 Januari 2019, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019 ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I") dengan tanggal efektif 27 Desember 2018, dengan nilai nominal Rp1.000.000 yang terdiri atas 2 (dua) seri:

### REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Obligasi	Nilai nominal	Tingkat bunga tetap per tahun	Jatuh tempo	Cicilan pokok obligasi
Seri A	800.000	9,40%	8 Januari 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Seri B	200.000	9,75%	8 Januari 2024	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dari pokok obligasi terutang. Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I.

2. Perjanjian Kerjasama

Pada tanggal 11 Januari 2019, Perseroan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT Bank Mandiri Taspen untuk program *referral* pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor atau multiguna. Perseroan bertindak sebagai penyedia dana sekaligus pemutus permohonan pembiayaan, sedangkan PT Bank Mandiri Taspen bertindak sebagai agen pemasaran. Perjanjian ini berlaku sampai tanggal 10 Januari 2020 dan dapat diperpanjang.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## DAMPAK NILAI TUKAR MATA UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas

moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pada tanggal 31 Desember 2018, kurs nilai tukar yang digunakan kurs tengah Bank Indonesia sebesar Rp14.481 (nilai penuh) 31 Desember 2017: Rp13.548 (nilai penuh) untuk 1 Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS") dan Rp131.12 (nilai penuh) untuk 1 Yen Jepang (JPY¥).

## PROSPEK USAHA

Dalam menghadapi tantangan industri pembiayaan di tahun mendatang dimana masih terjadi ketidakpastian perekonomian serta perlambatan pertumbuhan ekonomi global, Perseroan optimis bahwa dengan fundamental perekonomian Indonesia yang baik dan peluang pasar yang besar serta rancangan strategi Perseroan jangka panjang akan mampu mendukung Perseroan tetap menjadi perusahaan pembiayaan yang tumbuh secara berkesinambungan.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) memproyeksikan penjualan mobil baru tahun 2019 mencapai 1,1 juta kendaraan, yang berarti akan sama dengan pencapaian penjualan

mobil baru di tahun 2018. Berdasarkan data OJK, dibandingkan dengan tahun 2017, industri pembiayaan tahun 2018 mengalami perbaikan *Non Performing Financing* (NPF) dan penurunan BOPO sebagai upaya perbaikan kualitas dan upaya efisiensi untuk menghadapi tantangan kenaikan sumber pembiayaan akibat kenaikan suku bunga FFR oleh *The Fed*. Perbaikan ini menghasilkan peningkatan ROA dan ROE industri pembiayaan. Dengan dikeluarkan POJK perusahaan pembiayaan terbaru dimana memberikan lebih banyak ruang dan fleksibilitas untuk perusahaan pembiayaan seperti pembiayaan Fasilitas Dana dan perubahan ketentuan uang muka, Perseroan yakin hal ini akan menjadi stimulus peningkatan industri pembiayaan.

## ASPEK PEMASARAN

### PANGSA PASAR

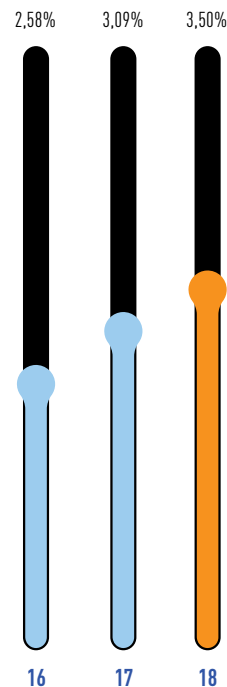
Pangsa pasar Perseroan berdasarkan total aset industri pembiayaan digambarkan pada tabel dan grafik di bawah ini.

	2018 (Rp-juta)	2017 (Rp-juta)
Total aset industri pembiayaan	504.763.000	477.166.000
Total aset Perseroan	17.481.844	14.739.458
Pangsa pasar berdasarkan aset	3,5%	3,09%

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki beberapa kompetitor di antaranya PT Astra Sedaya Finance, Oto Multi Artha dan Summit Oto Finance, PT Adira Finance, PT Federal International Finance (FIF), BCA Finance dan PT CIMB Niaga Auto Finance. Persaingan di antara kompetitor biasanya dalam hal tingkat suku bunga (*rate*), *down payment* (DP), pemberian *reward*. Adapun Perseroan mencatatkan sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbaik ketiga pada tahun 2014 berdasarkan data yang diperoleh dari APPI.

Pertumbuhan industri pembiayaan kendaraan bermotor mengalami lonjakan drastis selama 5 (lima) tahun terakhir yang meningkat seiring dengan meningkatnya penjualan kendaraan bermotor khususnya roda empat. Lonjakan pasar otomotif ini diluar perkiraan banyak pihak dan menjadikan industri otomotif sebagai salah satu industri paling prospektif di Indonesia. Keadaan ini diiringi oleh meningkatnya penjualan kendaraan bermotor melalui skema kredit yang menjadikan industri pembiayaan ini diminati

### PANGSA PASAR MTF PADA ASET INDUSTRI PEMBIAYAAN



oleh para pelaku industri pembiayaan dan perbankan mengingat masih besarnya pangsa pasar pada sektor usaha pembiayaan ini.

Banyaknya perusahaan pembiayaan sejenis dan perbankan yang masuk dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor beberapa tahun terakhir ini telah menimbulkan tingkat persaingan yang semakin ketat di sektor ini. Dengan semakin tingginya tingkat persaingan, maka perusahaan pembiayaan dituntut lebih kreatif dalam menyalurkan kredit kepada pelanggannya, dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumennya

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

diantaranya kemudahan dalam mendapatkan kredit kendaraan bermotor, kemudahan melakukan pembayaran cicilan, kecepatan dalam survei dan juga memberikan paket kredit yang menarik dan bersaing, baik dalam segi rate pembiayaan, masa tenor dan uang muka.

Dalam menghadapi persaingan usaha yang tinggi tersebut Perseroan telah mempersiapkan strategi yang secara konsisten memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen dan juga *dealer/showroom*, diantaranya secara konsisten

mengembangkan jaringan kantor cabang maupun outlet. Perseroan memberikan penawaran yang menarik dan menguntungkan bagi konsumen dengan memberikan paket kredit yang bersaing dan menarik baik dalam hal rate, masa tenor dan uang muka yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut data Gaikindo per 30 Juni 2018, Perseroan memiliki kontribusi pembiayaan terhadap keseluruhan penjualan (baik kredit maupun cash) sebagai berikut:

Merek Mobil	POLREG Nasional			POLREG Credit			M/S Credit To MTF					
	Passenger	Commercial	Total	Passenger	Commercial	Total	Passenger		Commercial		Total	
							Unit	%	Unit	%	Unit	%
Daihatsu	51.917	28.321	80.238	36.342	19.825	56.167	5.248	14,44%	6.070	30,62%	11.318	20,15%
Toyota	169.183	5.448	174.631	118.428	3.814	122.242	9.212	7,78%	441	11,56%	9.653	7,90%
Mitsubishi	15.218	41.323	56.541	10.652	28.926	39.579	1.437	13,49%	8.071	27,90%	9.508	24,02%
Suzuki	31.422	28.459	59.881	21.996	19.921	41.917	3.807	17,31%	7.259	36,44%	11.066	26,40%
Isuzu	2.945	6.682	9.627	2.061	4.678	6.739	60	2,91%	499	10,67%	559	8,30%
Honda	76.865	-	76.865	53.806	-	53.806	3.514	6,53%	-	0,00%	3.514	6,53%
Nissan	29.787	-	29.787	20.851	-	20.851	411	1,97%	-	0,00%	411	1,97%
Peugeot	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
BMW	969	-	969	678	-	678	211	31,11%	-	0,00%	211	31,11%
UD Truck	-	6.908	6.908	-	4.836	4.836	-	0,00%	10	0,21%	10	0,21%
Others	22.484	1.154	23.638	15.739	808	16.547	2.019	12,83%	1.494	184,97%	3.513	21,23%
Total	400.789	118.296	519.085	280.553	82.807	363.360	25.919	9,24%	23.844	28,79%	49.763	13,70%

## STRATEGI PEMASARAN

Cakupan wilayah pemasaran bisnis pembiayaan Perseroan meliputi pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Untuk menghadapi persaingan usaha di masa yang akan datang dan untuk mempertahankan pangsa pasar yang sudah dimiliki di bidang pembiayaan konsumen, Perseroan menerapkan langkah-langkah pemasaran sebagai berikut:

1. Memfokuskan pada pembiayaan mobil terutama mobil baru melalui program-program pembiayaan yang menarik dan kompetitif. Selain itu juga mengoptimalkan pembiayaan segmen *luxury car* serta pembiayaan sepeda motor besar seperti *brand* Harley Davidson dan Ducati.
2. Menggarap segmen pembiayaan baru yaitu pembiayaan multiguna pendidikan bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan. Perseroan

juga berencana memasuki segmen pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), infrastruktur dan maritim setelah melakukan pengkajian bisnis lebih mendalam.

3. Menjalankan program Kredit Pemilikan Mobil (KPM) khusus nasabah Bank Mandiri.
4. Memberikan jasa layanan yang unggul dalam arti jasa pembiayaan yang cepat, fleksibel dan mudah dengan tetap berpegang pada konsep pembiayaan secara hati-hati ("*Prudent Financing*").
5. Meningkatkan porsi pembiayaan langsung (*direct financing*) kepada konsumen baik secara *retail* maupun *fleet* melalui berbagai aktifitas pemasaran seperti *direct mail*, *telemarketing*, iklan, kunjungan langsung ke calon pelanggan yang potensial, dsb dengan tujuan jangka panjang untuk lebih meningkatkan tingkat rentabilitas Perseroan.
6. Memperluas pasar *retail* maupun korporasi melalui utilisasi jaringan cabang dan pembukaan kantor-kantor satelit di cabang Bank Mandiri yang sebagian besar berlokasi di daerah tingkat 2, serta menjalin aliansi strategis dengan unit kerja dan grup usaha Bank Mandiri.
7. Meningkatkan kegiatan promosi terutama yang bersifat *below the line activities* seperti turut aktif dalam pameran, *sponsorship*, *Showroom gathering*, dan sebagainya.
8. Menyediakan program-program pembiayaan yang dibuat secara khusus atau *customized* kepada para *Dealer* dan *Showroom* seperti suku bunga yang bersaing disertai hadiah-hadiah menarik baik untuk para pelanggan maupun para *Dealer* dan *Showroom* rekanan Perseroan.
9. Memelihara dan memanfaatkan *database* pelanggan potensial untuk menjangkau kesempatan mendapatkan pembiayaan ulang (*repeat order*).
10. Melakukan *cross selling* dari produk & *database* pelanggan Bank Mandiri maupun TURI Group.
11. Melakukan *review* dan reposisi atas jaringan usaha yang telah ada, serta memperluas jaringan usaha dengan membuka cabang-cabang baru atas pertimbangan bisnis yang cermat.
12. Melakukan diversifikasi portfolio yang meliputi jenis kendaraan, merek kendaraan, area/ daerah pelanggan.
13. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan *Dealer/ sub-dealer/ ruang pameran (Showroom)* yang merupakan keagenan (*Dealer/ sub-dealer*) resmi dari berbagai APM di Indonesia.
14. Meningkatkan kontribusi bisnis dari *Dealer-dealer* TURI Group.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## TINJAUAN KEUANGAN LAINNYA

### Kebijakan Dividen dan Pembagiannya

#### DASAR KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Akta Perjanjian Pemegang Saham No.5 Tanggal 6 Februari 2009 UU PERSEROAN TERBATAS No. 40 Tahun 2007 Pasal 70 dan 71. Setiap tahun buku, Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan dan penyisihan tersebut dilakukan sampai cadangan mencapai sekurangnya 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS dan dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen

#### ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Pasal 18 ayat 1 :

Laba Bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

#### AKTA PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM NO. 5 TANGGAL 6 FEBRUARI 2009

Pasal 14 ayat 1 :

Pembagian dividen dapat dilakukan jika terdapat saldo laba positif dan sepanjang kondisi keuangan TFS telah memperhitungkan nilai pencadangan sesuai kebijakan pemegang saham dan telah mencapai target profit tahunan, dengan besarnya dividen berkisar antara 35% - 40% dari jumlah laba bersih TFS kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

#### PEMBAGIAN DIVIDEN DI TAHUN 2018 DAN KRONOLOGIS PEMBAGIAN DIVIDEN

Pembagian dividen di sepanjang tahun 2018 sebagai berikut:

##### PEMBAGIAN DIVIDEN DI SEPANJANG TAHUN 2018

Dividen kas yang dibagikan	Rp35.024 juta
Dividen per lembar saham	Rp 14,01,-
Rasio pembagian Dividen	10%
Tanggal pengumuman	9 Maret 2018
Tanggal Pembayaran	29 Maret 2018

Kronologis pembagian dan pembayaran dividen di tahun 2014 untuk tahun dividen 2013 hingga pembagian dan pembayaran dividen di tahun 2018 untuk tahun dividen 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

#### PEMBAGIAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN DI TAHUN 2014 HINGGA 2018

Tahun Buku	Tahun Dividen	Tanggal Pengumuman	Tanggal Pembayaran	Dividen Kas yang Dibagikan (dalam jutaan rupiah)	Dividen per Lembar Saham (Rp)	Rasio Pembagian Dividen
2018	2017	9 Maret 2018	29 Maret 2018	35.024	14	10%
2017	2016	10 April 2017	27 April 2017	33.537	13	10%
2016	2015	24 Februari 2016	20 April 2016	30.680	12	10%
2015	2014	13 April 2015	26 Mei 2015	23.399	9,36	10%
2014	2013	10 April 2014	21 Mei 2014	21.157	8,46	12%

## Kontribusi Terhadap Negara

Sebagai entitas usaha yang melakukan kegiatan operasi dan usahanya di Indonesia yang kemudian tercatat sebagai Wajib Pajak, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi seluruh aspek kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah aspek kepatuhan terhadap perpajakan.

Perseroan memberikan kontribusinya terhadap perekonomian negara melalui pajak, yaitu Pajak

Penghasilan (PPh) Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan akhir tahun 2018, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Kontribusi Perseroan terhadap Negara dalam bentuk pemenuhan kewajiban pajak yang dibayarkan Perseroan adalah sebagai berikut:

Kantor	Tahun Dividen	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Hasil Perbandingan	
				Perubahan (Rp)	Persentase (%)
PUSAT	PPh Badan	138.499.879.536	118.485.218.722	20.014.660.814	16,89%
	PPN	87.006.585.551	71.858.865.461	15.147.720.090	21,08%
DAERAH	PPh with Holding	86.990.611.439	74.148.672.865	12.841.938.574	17,32%
	PBB	113.191.017	111.506.980	1.684.037	1,51%
	Jumlah	312.610.267.543	264.604.264.028	48.006.003.515	18,14%



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (ESOP) dan/atau Manajemen (MSOP). Perusahaan juga belum pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebagai aksi korporasi yang

memungkinkan kepemilikan saham oleh publik maupun manajemen dan/atau karyawan. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait ESOP/MSOP yang dilakukan Perusahaan.

## Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Perseroan telah menerbitkan 9 (sembilan) Obligasi, terakhir pada tahun 2017 dengan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III MTF Tahap II Seri A dan B. Hasil dana dari penerbitan Obligasi digunakan untuk:

1. Pelunasan utang pokok obligasi
2. Modal kerja

### RINCIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE PER JANUARI 2019

Jenis Penggunaan Dana	Perincian	Rencana Penggunaan Dana	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
Pelunasan Utang Pokok Obligasi	Utang Pokok Obligasi berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 Seri A	500.000.000.000	500.000.000.000	0
Modal kerja	Modal Kerja Pembiayaan Kendaraan bermotor	496.681.530.409	496.681.530.409	0
Jumlah		994.681.530.409	994.681.530.409	0

Perseroan telah melaporkan penggunaan dana dari hasil penerbitan Obligasi kepada OJK dan BEI melalui surat No. 002/MTF-CLC.CCS/I/2019 tanggal 15 Januari 2019

## Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan Dan/Atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

### KEBIJAKAN TENTANG PIHAK BERELASI

Perseroan mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi suatu pihak dianggap berelasi dengan Perseroan jika:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan Perseroan jika orang tersebut:
  - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perseroan;
  - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan; atau
  - (iii) merupakan personil manajemen kunci Perseroan atau entitas induk dari Perseroan.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Perseroan jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - (i) entitas dan Perseroan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
  - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari

entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

- (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perseroan atau entitas yang terkait dengan Perseroan. Jika Perseroan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perseroan.
- (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

Nama Pihak Bertransaksi, Sifat Hubungan Afiliasi, dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Berikut disampaikan nama pihak bertransaksi, sifat hubungan afiliasi, dan alasan dilakukannya transaksi yang terdapat dalam transaksi Perusahaan tahun 2018.

PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## NAMA PIHAK BERTRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI SERTA ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Nama Pihak yang Berelasi	Sifat Hubungan Berelasi	Sifat Transaksi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pemegang saham mayoritas	Penempatan dana, kerjasama pembiayaan (pencairan jf), kerjasama pembiayaan (angsuran jf), pinjaman bank, bunga yang masih harus dibayar, jasa giro
PT Tunas Ridean Tbk	Pemegang saham minoritas	Transaksi operasional
PT Bumi Daya Plaza	Mayoritas dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pemegang obligasi, sewa gedung dibayar dimuka, beban sewa
PT Bank Mandiri Taspen	Mayoritas dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan dana giro deposito, jasa giro dan bunga deposito
PT AXA Mandiri Financial Service	Mayoritas dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan obligasi
PT Mandiri AXA General Insurance	Mayoritas dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Akseptasi klaim
Dana Pensiun Bank Mandiri	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pendiri	Pemegang obligasi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara	Pemegang obligasi, penempatan dana giro, jasa giro
PT Taspen (Persero)	Badan Usaha Milik Negara	Pemegang obligasi
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Badan Usaha Milik Negara	Piutang akseptasi klaim, pendapatan akseptasi klaim, pemegang obligasi
PT Perikanan Nusantara (Persero)	Badan Usaha Milik Negara	Piutang pembiayaan, pendapatan pembiayaan
Perum Jamkrindo	Badan Usaha Milik Negara	Klaim asuransi piutang, akseptasi klaim
PT Berdikari (Persero)	Badan Usaha Milik Negara	-
PT Balai Pustaka (Persero)	Badan Usaha Milik Negara	Piutang pembiayaan, pendapatan pembiayaan
PT Wahana Optima Permai	Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri	Beban sewa
Personil manajemen kunci Grup	Personil manajemen kunci Group Bank Mandiri	Piutang pembiayaan, pendapatan pembiayaan
Personil manajemen kunci Perseroan	Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Imbalan kerja, piutang pembayaran, pendapatan

## ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Seluruh transaksi yang dilakukan Perusahaan, termasuk transaksi dengan pihak berelasi, dilakukan dengan tujuan pengembangan usaha.

## PENJELASAN MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

Dalam kegiatan normal usaha, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Transaksi dengan pihak berelasi tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak tidak

berelasi. Perseroan mendapatkan suku bunga yang serupa untuk fasilitas pinjaman bank dengan pihak berelasi dan pihak ketiga. Perseroan juga menggunakan suku bunga yang serupa antara pihak berelasi dan pihak ketiga dalam rangka pemberian piutang pembiayaan konsumen.

## SALDO DAN REALISASI TRANSAKSI PIHAK BERELASI TAHUN 2018

Berikut saldo dan realisasi transaksi pihak berelasi per 31 Desember 2018.

Saldo dengan Pihak Berelasi untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Transaksi Pihak Berelasi dalam Aset	2018 (Rp-juta)	2017 (Rp-juta)	Persentase dari Jumlah Aset	
			2018 (%)	2017 (%)
Kas dan setara kas - kas pada bank	86.154	81.408	0,49%	0,55%
Deposito berjangka	50.000	50.000	0,29%	0,34%
Piutang pembiayaan konsumen	5.822	7.957	0,03%	0,05%
Piutang lain-lain	620.215	564.131	3,55%	3,83%
Sewa dibayar di muka	2.227	1.346	0,01%	0,01%
Total Aset dari Pihak-pihak Berelasi	764.418	704.842	4,37%	4,78%
Total Aset	17.481.844	14.739.458		

Transaksi Pihak Berelasi dalam Liabilitas	2018 (Rp-juta)	2017 (Rp-juta)	Persentase dari Jumlah Liabilitas	
			2018 (%)	2017 (%)
Utang lain-lain	84.738	30.344	0,55%	0,23%
Beban yang masih harus dibayar	1.828	1.227	0,01%	0,01%
Pinjaman bank	1.379.632	1.602.605	8,98%	12,36%
Surat berharga yang diterbitkan	1.014.700	1.231.700	6,61%	9,50%
Total Liabilitas dari Pihak-pihak Berelasi	2.480.898	2.865.876	16,15%	22,09%
Total Liabilitas	15.360.929	12.971.116		

Transaksi Pihak Berelasi dalam Pendapatan	2018 (Rp-juta)	2017 (Rp-juta)	Persentase dari Jumlah Pendapatan	
			2018 (%)	2017 (%)
Pembiayaan konsumen	786	1.009	0,03%	0,04%
Bunga	9.099	6.755	0,29%	0,25%
Lain-lain	120.643	115.253	3,87%	4,20%
Total Pendapatan dari Pihak-pihak Berelasi	130.528	123.017	4,18%	4,49%
Total Pendapatan	3.120.192	2.738.364		

Transaksi Pihak Berelasi dalam Beban	2018 (Rp-juta)	2017 (Rp-juta)	Persentase dari Jumlah Beban	
			2018 (%)	2017 (%)
Beban umum dan administrasi - beban sewa gedung	13.388	9.998	0,52%	0,44%
Beban gaji dan tunjangan - Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi	23.107	20.603	0,90%	0,91%
Beban keuangan	137.694	145.320	5,34%	6,40%
Total Beban dari Pihak-pihak Berelasi	174.189	175.921	6,75%	7,75%
Total Beban	2.580.349	2.269.986		

## **KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERKAIT MEKANISME REVIEW ATAS TRANSAKSI**

Kewajaran transaksi dan pemenuhan peraturan atas transaksi pihak berelasi telah melalui proses *review* dan audit oleh pihak auditor internal dan eksternal. Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah sesuai dengan PSAK No 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

## **PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT**

Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dilakukan melalui upaya pengungkapan PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dalam laporan keuangan Perusahaan tahun 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

## **Informasi Keuangan Yang Mengandung Kejadian Yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi**

Perseroan tidak menemukan adanya informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018.

PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

Perubahan Peraturan / Perundang-undangan	Penjelasan	Dampaknya Terhadap Perseroan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 / POJK.04 / 2018 Tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik	Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan dan keterbukaan informasi oleh emiten atau perusahaan publik kepada Otoritas Jasa Keuangan, perlu menyempurnakan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai penyampaian laporan dan keterbukaan informasi melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik.	Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Perseroan lebih efisien dalam hal melakukan pelaporan-pelaporan wajib yang ada di Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 / POJK.02 / 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan	Pada era digitalisasi saat ini, Pelayanan Jasa Keuangan perlu menciptakan Inovasi Keuangan Digital (IKD) guna mendukung pelayanan jasa keuangan yang lebih cepat, murah, mudah, dan luas agar dapat menjangkau setiap daerah. Pelayanan Jasa Keuangan dituntut dapat menciptakan inovasi digital keuangan yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen, serta memiliki risiko yang terkelola dengan baik untuk memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat	Dengan telah terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memberikan peluang kepada Perseroan untuk mengembangkan dan melakukan inovasi dalam produk keuangan secara digital, Perseroan masih dalam tahap mempelajari berkaitan dengan inovasi keuangan digital.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07 / 2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan	Dengan semakin berkembangnya industri di sektor jasa keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan perlu mengatur kegiatan yang mampu melindungi kepentingan konsumen. Salah satu cara yang Otoritas Jasa Keuangan yang akan di tempuh yaitu memberikan kewajiban kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk memiliki layanan pengaduan konsumen, layanan pengaduan konsumen yang dimaksud diharapkan dapat menampung keluhan konsumen termasuk adanya potensi kerugian materil atas produk yang dimiliki Perusahaan sektor jasa keuangan. Dengan pertimbangan tersebut maka OJK perlu mengatur ketentuan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.	Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Perseroan dalam hal layanan pengaduan konsumen telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 / POJK.07 / 2018. Sehingga saat ini Perseroan selalu mengembanga sistem pelayanan kepada konsumen sehingga memudahkan kepada konsumen.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 / SEOJK.07 / 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.	Sehubungan dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 151 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6246), SEOJK ini untuk mengatur pelaksanaan mengenai Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.	



Perubahan Peraturan / Perundang-undangan	Penjelasan	Dampaknya Terhadap Perseroan
<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 / POJK.03 / 2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.</p>	<p>Lembaga jasa keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengelolaan dan pemanfaatan dana masyarakat, maka dari itu kepemilikan dan pengelolaan lembaga jasa keuangan perlu dilakukan secara baik oleh pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur lebih lanjut proses penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.</p>	<p>Dengan adanya peraturan otoritas jasa keuangan ini, Pihak Utama Perseroan lebih berhati-hati dalam melakukan segala tindakan atas pengendalian Perseroan sehingga Pihak Utama Perseroan tidak terkena penilaian kembali.</p>
<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 / POJK.05 / 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan</p>	<p>Untuk meningkatkan peranan perusahaan pembiayaan dalam perekonomian nasional, meningkatkan pengaturan prudensial, dan meningkatkan perlindungan konsumen, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.</p>	<p>Dengan adanya peraturan otoritas jasa keuangan ini, Perseroan terdapat beberapa perubahan. Terutama dalam pengembangan produk, karena dengan POJK ini terdapat beberapa peluang usaha yang baru untuk pengembangan usaha Perseroan. Selain itu juga terdapat penyesuaian proses seperti perjanjian pembiayaan, penetapan kualitas kredit, dll</p>

## Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan

Selama tahun buku 2018 Perseroan tidak ada perubahan dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar keuangan yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan perseroan namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan 2018:

- Penyesuaian 2018 PSAK 46 - Pajak Penghasilan, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan. Penyesuaian ini menegaskan mengenai konsekuensi pajak penghasilan atas dividen (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan) timbul ketika entitas mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan tersebut lebih terkait secara langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan daripada dengan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan tersebut dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal entitas atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.
- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari *joint project* yang sukses antara *International Accounting Standards Board* dan *Financial Accounting Standards Board*, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

## INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

---

### BENCANA ALAM SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR BERPENGARUH DALAM KELANGSUNGAN USAHA TAHUN 2018

Indonesia menghadapi beberapa bencana alam selama 2018. Beberapa bencana alam yang cukup besar adalah gempa di Lombok dan tsunami di Palu & Donggala. Ketiga wilayah tersebut merupakan termasuk wilayah operasional bisnis Perseroan. Bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi berimbas pula ke bisnis Perseroan. Untuk beberapa waktu operasional bisnis di wilayah tersebut harus terganggu sehingga tidak dapat melayani masyarakat dan nasabah. Di sisi lain, kendaraan bermotor para nasabah Perseroan turut menjadi korban dalam bencana alam tersebut. Hilangnya kendaraan sebagai aset kredit dapat berdampak pada perusahaan kesehatan keuangan perusahaan. Manajemen secara langsung turun tangan untuk dapat melihat dan menilai seberapa besar dampak bencana.

Berdasarkan penilaian manajemen terhadap dampak gempa dan tsunami, manajemen mengambil langkah taktis yaitu mendata dan memetakan nasabah Perseroan yang menjadi korban bencana alam. Untuk nasabah yang mengalami dampak dari bencana tersebut,

manajemen memberikan beberapa kebijakan yaitu penundaan pembayaran angsuran, restrukturisasi hutang, diskon biaya administrasi dan juga penghapusan penalti. Berdasarkan perhitungan manajemen, total eksposur gempa Lombok dan tsunami Palu dan Donggala adalah Rp273 miliar dan Rp491 miliar dengan masing-masing potensi kerugian sebesar Rp14,5 miliar dan Rp94,5 miliar.

### TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam KMK No. 84/PMK.012/2006 pada Bab VII, pasal 25 ayat 3 dan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dijelaskan bahwa tingkat kesehatan pembiayaan diukur dengan *gearing ratio* setinggi-tingginya 10 kali. Tingkat perbandingan antara kewajiban yang mengandung unsur bunga dibandingkan dengan ekuitas Perseroan berturut-turut pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, dan 2016 adalah 6,62 kali, 6,72 kali, dan 6,05 kali.

“Perseroan memiliki profil tingkat kesehatan pembiayaan yang baik, sesuai dengan peraturan terkait penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.”

PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## PETA JALAN USAHA RENCANA JANGKA PANJANG

Dalam menghadapi tantangan persaingan ketat di industri pembiayaan, Perseroan telah menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkesinambungan serta dapat memberikan kontribusi terbaik terhadap pemangku kepentingan. Dalam rencana jangka panjang, Perseroan menargetkan pertumbuhan minimal di atas 12%. Untuk dapat mencapai target tersebut saat sedang terhambatnya pertumbuhan penjualan mobil baru yang berimbas ke penurunan pembiayaan mobil baru sebagai *core business* MTF, Perseroan telah menyiapkan berbagai strategi di antara lainnya adalah diversifikasi produk dengan perluasan segmen pembiayaan.

Perseroan memperkuat diversifikasi bisnis seiring dengan arah pembangunan negara dan masyarakat, yaitu produk pembiayaan produktif untuk investasi dan modal kerja. Baik untuk segmen perusahaan maupun untuk segmen perorangan. Perseroan juga terus mengupayakan perbaikan proses bisnis menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan SLA dan kualitas serta berbagai upaya-upaya efisiensi terhadap biaya untuk dapat mendorong pertumbuhan laba Perseroan. Di samping itu, Perseroan juga telah menyiapkan serangkaian strategi peningkatan pelayanan nasabah untuk dapat memberikan servis terbaik dan meningkatkan *branding* Perseroan di mata masyarakat. Berbagai inovasi lainnya telah disiapkan Perseroan guna terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan kontribusi optimal kepada pemangku kepentingan.



# FUNGSI PENUNJANG BISNIS

Tumbuh Bersama Karyawan: Pengelolaan Sumber Daya Manusia	214
Menjemput Perubahan: Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Informasi	230

## TUMBUH BERSAMA KARYAWAN: PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

---

Keberhasilan PT Mandiri Tunas Finance sebagai salah satu perusahaan *multifinance* terdepan di Indonesia tidak terlepas dari peran Sumber Daya Manusia (SDM), para Perwira Mandiri Tunas Finance yang merupakan aset paling penting yang dimiliki Perseroan. SDM merupakan mitra strategis bagi Perusahaan untuk dapat meraih kesuksesan dalam setiap lini bisnis yang dijalankan, serta target bisnis yang telah dicanangkan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Bagi Perusahaan, SDM adalah aset berharga yang eksistensinya selalu mendapat perhatian khusus baik dalam bentuk pengembangan kompetensi maupun tingkat kesejahteraan. Manajemen SDM memiliki tanggung jawab untuk membentuk karyawan yang andal dan berkompeten supaya mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dengan kemampuan inilah Perusahaan dapat melaju dengan baik dan mampu menghadapi berbagai tantangan di era yang serba kompetitif.

### KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM

Perseroan memiliki strategi pengembangan sumber daya manusia yang dituangkan dalam *Human Capital Roadmap* berupa sistem dan

kebijakan *Strategy Organization Readiness, People Readiness* dan *Conducive Working. Organization readiness* untuk memastikan kesiapan organisasi untuk mengakomodasi Bisnis Perseroan. *People readiness* untuk memastikan kesiapan SDM melalui program rekrutmen, pengembangan SDM, pengelolaan kinerja, kesiapan kepemimpinan dan regenerasi. Serta *conducive working* adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan fun yang mendukung agar tercipta kontribusi yang optimal.

Sasaran strategi *Human Capital* yang dituangkan tersebut diharapkan dapat menjadikan SDM PT Mandiri Tunas Finance dapat menghadapi tantangan pasar dan konsumen yang semakin berat, bisnis yang semakin transformatif dan



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
<b>FUNGSI PENUNJANG BISNIS</b>
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



bergerak sangat cepat, dominasi teknologi informasi yang mengubah gaya hidup serta merumuskan dan mampu membuat solusi yang memadai untuk dapat bertahan secara berkesinambungan.

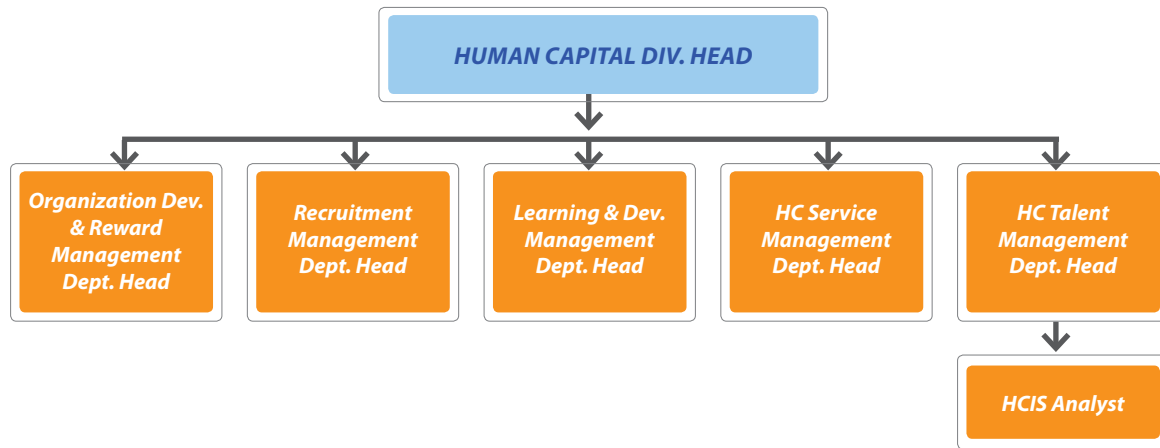
Untuk membuat seluruh SDM memahami dan menyadari akan kondisi *Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity* (VUCA) maka perlu dilakukan *change management* dengan menciptakan *increase urgency* sehingga pesan yang disampaikan bisa terasa oleh seluruh Perwira PT Mandiri Tunas Finance. Kondisi global ekonomi dunia juga harus disikapi dengan realistis, sehingga *Leadership* memegang peranan yang sangat penting.

Menjawab tantangan tersebut, maka *Human Capital* fokus pada peningkatan produktivitas *man power*, program *recruitment* dan seleksi yang mendukung proses kaderisasi di Perseroan. Memberikan atensi yang lebih kepada

karyawan yang memiliki talenta dan senantiasa memberikan kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya. Pengelolaan kinerja, penggajian dan kompensasi karyawan, membina hubungan kerja secara *industry* serta membuat sistem *Human Capital Information System* yang terintegrasi yang mampu melihat *track record* kinerja kader-kader secara lengkap dan akurat.

## PEMBENTUKAN DIVISI PENGELOLA SDM PERUSAHAAN

Dasar kebijakan SDM Perusahaan mengacu pada kebijakan entitas induk, yaitu Mandiri *Human Capital Management* yang dilakukan oleh Divisi SDM. Dasar kebijakan tersebut merupakan instrumen Perusahaan dalam menentukan strategi pengembangan SDM baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.



Divisi SDM Perseroan dipimpin oleh seorang Kepala Divisi. Berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 159A/SKUSA-MTF/VI/2018, Direksi menunjuk Vivid Zulprimiadanni untuk menjabat Kepala Divisi Human Capital.



## VIVID ZULPRIMIADANNI

Kepala Divisi Human Capital

### PERIODE JABATAN

Menjabat Sejak 1 Februari 2017

### DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia

Kelahiran Bt Tabit, 2 Desember 1972 (46 tahun)

### DOMISILI

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

### PENDIDIKAN

S2 Management Prasetya Mulya Business School (2014)

**BERGABUNG DI MTF** 1 Februari 2017

### PENGALAMAN KERJA

Human Capital Division Head PT Komatsu Astra Finance (2015-2017), Senior Manager Organization Development PT Astra Credit Companies (2013-2015), Senior Manager Talent and Performance Management PT Astra Credit Companies (2008-2013) dan Manager Recruitment and People Development PT Astra Credit Companies (2003-2008).

### SERTIFIKASI PROFESI

3rd Asia Pasific HR Forum – PT Indonesia Lebih Baik (2018), The 9th Indonesia HR Summit – Multi Taruna Sejati (2017), Astra General Management Program – National University of Singapore Business School (2016), HC Conference Bali – Astra (2015), MBTI - Myers Briggs Personality Test Certified – CPP Asia Pasific (2015), HC Conference Kuala Lumpur - Jardine (2014)

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
<b>FUNGSI PENUNJANG BISNIS</b>
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## VISI DAN MISI PENGEMBANGAN SDM

Perusahaan memiliki visi dan misi dalam upaya melakukan pengelolaan dan pengembangan SDM. Visi dan misi digunakan agar pelaksanaan pengembangan SDM lebih terarah dan terstruktur.



### **Visi Pengembangan dan Pengelolaan SDM Mandiri Tunas Finance**

*"Create productive environment for people to perform through internalization of company culture to ensure availability of "steady flow" of man power and leaders".*



### **Misi Pengembangan dan Pengelolaan SDM Mandiri Tunas Finance**

*"to provide the following quality services of employee MTF through Recruitment of qualified individuals. Retention of valuable employees, training, development and promote individual success and increase overall value to the organization through services excellence and Integrated Human Capital Information System".*

## PENGEMBANGAN SDM

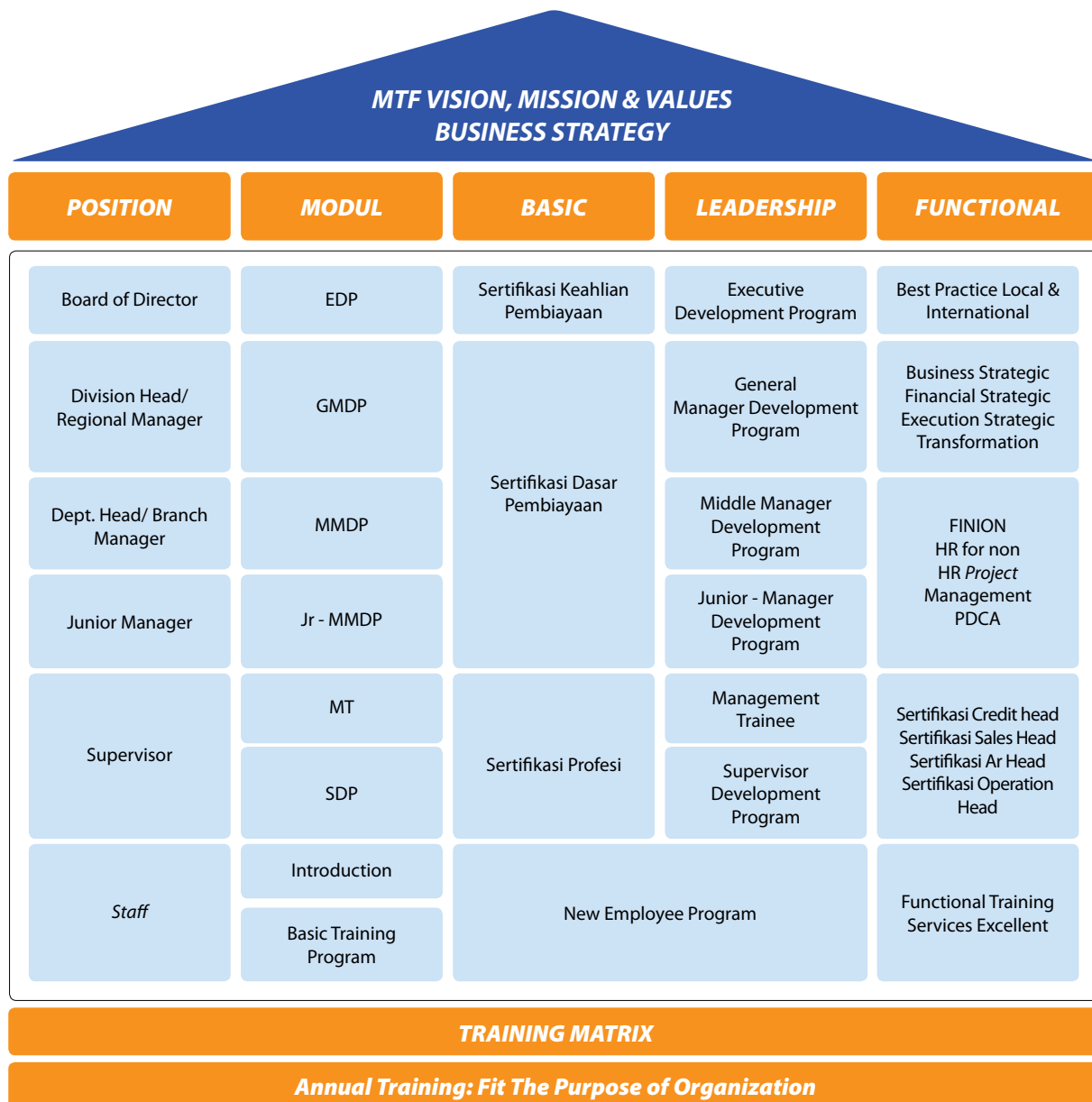
Perusahaan berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi karyawan secara konsisten dan berkesinambungan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. Hal ini dilakukan untuk menunjang kebutuhan Perusahaan akan SDM berkualitas untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang semakin dinamis serta penuh tantangan. Pendidikan dan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam meningkatkan produktivitas kerja, pengelolaan risiko, budaya perusahaan serta profesionalitas kerja.

Inovasi mendorong untuk memastikan pengembangan organisasi secara terus menerus. PT Mandiri Tunas Finance terus menerapkan pembelajaran dan melakukan inovasi di setiap tahapan usaha yang senantiasa berusaha untuk menggerakkan ide-ide inovasi dan perbaikan secara berkelanjutan, melalui pembentukan dan pengelolaan perangkat organisasi dalam bentuk komunitas di setiap cabang dan Kantor Pusat dengan membuat semacam ajang penghargaan untuk maju dan berkembang bersama yang bertajuk Innovation Award.

Tema *Innovation Award* pada Tahun 2018 adalah “How to Use Our Data”, yang bermaksud untuk meningkatkan kepedulian karyawan agar didalam membuat alternatif solusi mengacu kepada akar masalah yang dilengkapi dengan data yang akurat. Pada tahun 2018, ini *Innovation Award* dibagi menjadi dua kategori yaitu kategori berdikari dan kolaborasi. Berdikari merupakan inovasi dengan tingkatan *suggestion system* yang dilakukan secara individual, sementara kolaborasi merupakan inovasi

yang berfokus pada bisnis proses yang melibatkan dua atau lebih unit kerja yang saling berkaitan.

Pada tahun 2018, Perusahaan memfokuskan program pengembangan SDM nya untuk menciptakan *successor-successor* baru yang dapat mengisi posisi strategis dan potensial Perusahaan. Oleh karena itu Perusahaan mempersiapkan program pendidikan untuk memupuk potensi karyawan untuk menjadi pemimpin masa depan.



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
<b>FUNGSI PENUNJANG BISNIS</b>
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

### 1. Program Pendidikan *Management Trainee* (MT)

Program pengembangan SDM yang dikembangkan secara khusus bagi para *Fresh Graduates* agar dapat menghasilkan pemimpin masa depan yang mampu mendukung pencapaian visi perusahaan. Peserta MT berasal dari internal & eksternal yang merupakan lulusan mahasiswa (sarjana dan magister) dari universitas terkemuka. Hingga akhir tahun 2018 Perseroan telah melakukan proses program *Management Trainee* sebanyak 7 *Batch*. Durasi program Pendidikan ini adalah 12 bulan yang dibagi kedalam 3 fase journey, yaitu proses *inclass training*, *On the Job Training* (OJT) *Various* dan *On The Job Training Spesifik*.

### 2. Program Pendidikan *Supervisor Development Program* (SDP)

Program pengembangan karir untuk karyawan internal dengan level *staff* untuk menjadi *Supervisor/Asisten Manager*. Durasi program Pendidikan SDP adalah 6 bulan, dimana journey-nya juga terbagi menjadi 3 fase, yaitu *Inclass Training*, *OJT Various* dan juga OJT Spesifik. Di sepanjang tahun 2018 ini, Program Pendidikan SDP dilaksanakan sebanyak 6 *Batch*.

### 3. Program Pendidikan *Junior - Manager Development Program* (Jr - MDP)

Program yang dirancang untuk menyiapkan para pemimpin masa depan Perseroan melalui pengembangan karir jalur cepat setingkat *manager*. Peserta Jr - MDP berasal dari karyawan internal Perseroan yang memiliki prestasi serta potensi dan berasal dari seluruh unit kerja baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang. Hingga tahun 2018 Perseroan telah menyelenggarakan Program

Pendidikan Jr - MDP sebanyak 8 *Batch*. Di tahun 2018, Perseroan menyelenggarakan Jr - MDP *Batch* 8 dengan Journey yang terbagi menjadi 3 fase yaitu *In Class Training* pada Bulan Februari 2018, *OJT Various* pada Bulan April 2018 dan *OJT Specific* yang dimulai pada Bulan Mei 2018.

### 4. Program Pendidikan *Middle Manager Development Program* (MMDP)

Program yang dirancang untuk pengembangan level middle manager untuk mendapatkan pembekalan, yang mencakup *leadership*, *business sense*, *customer centric*, *sense of competitiveness*, *innovative & creative*, *risk management*, and *technology savvy*. Sepanjang tahun 2018, Perseroan telah menyelenggarakan MMDP sebanyak 4 *Batch*. MMDP *Batch* 1 dilaksanakan pada Bulan Januari dan Februari 2018. MMDP *Batch* 2 dilaksanakan pada Bulan Maret dan April 2018. MMDP *Batch* 3 dilaksanakan pada Bulan Juli dan Agustus 2018 serta MMDP *Batch* 4 dilaksanakan pada Bulan Oktober dan November 2018.

### 5. Program Pendidikan *General Manager Development Program* (GMDP)

*Program General Manager Development Program* (GMDP) merupakan program pengembangan untuk level *Division Head* untuk mendapatkan pembekalan komprehensif yang mencakup fungsi (strategi bisnis, strategi keuangan, strategi eksekusi dan transformasi, serta *visionary leadership*). Sepanjang tahun 2018, Perseroan telah menyelenggarakan Program Pendidikan GMDP sebanyak 2 *Batch*. Tahun 2018, Perseroan menyelenggarakan GMDP *Batch* 2 yang dilaksanakan pada Bulan Oktober dan November 2018.

## REKRUTMEN

Mekanisme rekrutmen menjadi perhatian Perusahaan, khususnya untuk dapat menjaring SDM yang memiliki potensi pengembangan yang baik di masa mendatang. Penerapan standar kompetensi dalam melakukan proses rekrutmen untuk memperoleh SDM yang potensial dan berkualitas diperlukan dalam memenuhi kebutuhan Perusahaan serta untuk menghadapi tantangan bisnis yang semakin ketat dan kompetitif.

Kebutuhan Perusahaan ini kemudian diterjemahkan ke dalam *Manpower Planning* (MPP). MPP yang ditetapkan sejalan dengan tujuan dan strategi bisnis Perusahaan, berdasarkan rencana kerja tahunan Perusahaan sesuai dengan keputusan dari Manajemen.

Beragam strategi telah dilakukan untuk menjaring kandidat terbaik dan berpotensi. Sumber pemenuhan tenaga kerja diperoleh dari:

1. Sumber Internal Perusahaan, yaitu seleksi karyawan *existing* untuk mengisi lowongan jabatan pada suatu unit kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi dan terbuka bagi karyawan dari unit kerja lain dalam Perusahaan.
2. Sumber Eksternal Perusahaan, yaitu mencari calon karyawan dari eksternal dengan beragam program dan media publikasi. Media yang dipergunakan dalam mencari sumber kandidat antara lain melalui situs web Perusahaan, web karir Perusahaan, job portal, referensi dari internal karyawan, partisipasi pada bursa tenaga kerja (*Job Fair* maupun *campus hiring*) dan *walk in interview*.

Perusahaan telah menyusun *branding* program dalam rangka mendapatkan sumber kandidat eksternal yang komprehensif agar dapat menjangkau seluruh level mahasiswa. *Branding* Program tersebut terdiri dari:

1. MTF *Friendship* atau *Friends Scholarship*, bertujuan untuk membantu mahasiswa tahun pertama, untuk diberikan beasiswa oleh Perusahaan.
2. MTF *Ambassador* yang menyasar kepada mahasiswa tahun 2 dan 3 untuk dapat aktif berpartisipasi menjadi duta pada setiap event yang diselenggarakan oleh Perusahaan.
3. MTF *Speed Up Career*, ditujukan untuk mahasiswa tahun akhir agar dapat mengembangkan kompetensi diri sejak dini dengan mengikuti program magang di Perusahaan.
4. *Business Case Competition*, merupakan perlombaan ide dan inovasi untuk Perseroan yang ditujukan untuk mahasiswa tingkat akhir.
5. *Career Coaching*, merupakan program *workshop* dan seminar yang terkait dengan pengembangan kompetensi diri yang bertujuan untuk membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan diri dan mengenal dunia kerja profesional.

Di samping itu, Perusahaan aktif dalam mencari sumber kandidat program pendidikan *Management Trainee* (MT) melalui media bursa tenaga kerja (*Job fair*) yang diselenggarakan oleh pihak ketiga atau kampus terkemuka. Dalam kesempatan tersebut



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
<b>FUNGSI PENUNJANG BISNIS</b>
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



Perusahaan juga melakukan kegiatan *branding* dan *career coaching* kepada para lulusan Universitas agar mereka dapat mengenal Perusahaan secara lebih mendalam. Perusahaan juga menggunakan media *Campus hiring* untuk memperoleh kandidat secara langsung dari lulusan kampus terkait yang menjadi target Perusahaan.

Perseroan menyadari bahwa *fresh graduate* saat ini merupakan generasi milenial. Generasi ini teridentifikasi sebagai *savvy technology*, *internet users*, sehingga Perseroan berusaha mengikuti perkembangan para milenial saat ini dengan melakukan publikasi melalui beragam media seperti *job portal*, situs web kampus, *social media*, *instagram*, *line official*, *youtube* serta *linkedin*. Dengan beragamnya media yang digunakan, di

tahun 2018 Perseroan mampu meningkatkan jumlah pelamar hingga 233% yang terdokumentasi pada job portal yaitu [karir.mtf.co.id](http://karir.mtf.co.id).

Mekanisme penyeleksian calon karyawan dilakukan melalui lembaga profesional atau Perusahaan dengan tahapan seleksi antara lain melalui test administrasi, wawancara, psikotest/*assessment*, serta tes kesehatan yang selanjutnya disetujui oleh pejabat terkait sesuai ketentuan/persyaratan yang berlaku. Proses rekrutmen mengedepankan asas-asas keterbukaan, kewajaran dan kesetaraan berdasarkan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki oleh calon karyawan.

Perseroan melakukan proses seleksi secara tepat dan cepat sesuai dengan *service level agreement (SLA)*



yang telah ditentukan. Tepat berarti menjaring SDM yang berkualitas yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Maka dari itu, Perseroan selalu berusaha untuk melakukan inovasi terkait dengan proses seleksi rekrutmen karyawan di Mandiri Tunas Finance. Pada tahun 2018, *Human Capital* bekerjasama dengan vendor pengadaan aplikasi psikotest secara online dengan menggunakan alamat situs web asesmen.mtf.co.id.

Di sepanjang tahun 2018, Perseroan telah merekrut karyawan baru sebanyak 390 orang untuk berbagai level posisi. Selain itu Perseroan juga telah merekrut sejumlah 37 orang peserta *Management Trainee* (MT) yang tergabung dalam MT *Batch 6* dan *Batch 7*. Dalam setiap perekrutan karyawan baru, Perseroan menitikberatkan pada kompetensi melalui

kualifikasi dan keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan serta rencana yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar Perseroan mampu menghasilkan SDM yang berkualitas serta dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara baik dan fleksibel terhadap perkembangan di masa depan.

Dalam setiap perekrutan karyawan baru, Perusahaan menitikberatkan pada kompetensi melalui kualifikasi dan keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan serta rencana yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar Perusahaan mampu menghasilkan SDM yang berkualitas serta dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara baik dan fleksibel terhadap perkembangan di masa depan.

Perihal	2018 (orang)	2017 (orang)	Kenaikan (Penurunan)		
			Jumlah (orang)	Persentase (%)	
Total Karyawan Awal Tahun	3.467	3.569	102	2,86%	↑
Karyawan Baru	390	386	4	1,04%	↑
Karyawan yang Berakhir Hubungan Kerjanya	9	10	1	10,00%	↑
Mengundurkan Diri	407	480	73	15,21%	↑
Memasuki Masa Pensiun	4	1	3	300,00%	↑
Total Karyawan Akhir Tahun	3,448	3.467	19	0,55%	↑

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
<b>FUNGSI PENUNJANG BISNIS</b>
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## TURNOVER KARYAWAN

Di sepanjang tahun 2018, telah terjadi *turnover* karyawan yang masih berada dalam kondisi baik, dimana *turnover* ini terjadi lebih dikarenakan proses evaluasi atas *performance* masing-masing karyawan di lingkungan Perseroan.

Bulan	Jumlah Karyawan In	Jumlah Karyawan Out	Jumlah Karyawan	Ratio TO
Desember 2016	38	49	3.577	
Januari 2017	33	41	3.569	1,37%
Februari 2017	54	43	3.580	1,15%
Maret 2017	66	42	3.604	1,19%
April 2017	25	46	3.583	1,17%
Mei 2017	27	40	3.570	1,29%
Juni 2017	57	32	3.574	1,12%
Juli 2017	12	21	3.566	0,90%
Agustus 2017	15	51	3.530	0,59%
September 2017	26	46	3.514	1,45%
Oktober 2017	18	64	3.468	1,33%
November 2017	30	27	3.471	1,84%
Desember 2017	23	27	3.467	0,78%
Januari 2018	29	29	3.467	0,78%
Februari 2018	56	19	3.504	0,83%
Maret 2018	31	29	3.506	0,54%
April 2018	26	52	3.480	0,83%
Mei 2018	24	39	3.465	1,50%
Juni 2018	25	29	3.461	1,13%
Juli 2018	42	36	3.467	0,84%
Agustus 2018	37	45	3.459	1,04%
September 2018	27	38	3.448	1,31%
Oktober 2018	27	28	3.447	1,10%
November 2018	45	33	3.457	0,81%
Desember 2018	21	30	3.448	0,96%

## MANAJEMEN DAN PENILAIAN KINERJA

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, Perusahaan senantiasa mengevaluasi dan menyelaraskan organisasi sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan usaha. Manajemen dan Penilaian Kinerja merupakan alat evaluasi pencapaian target dan tujuan yang harus dicapai oleh seluruh Karyawan maupun satuan kerja yang disusun berdasarkan visi, misi dan tujuan jangka panjang Perusahaan. Penilaian Kinerja masing-masing individu Karyawan yang dilaksanakan secara objektif, berjenjang, periodik, dan transparan.

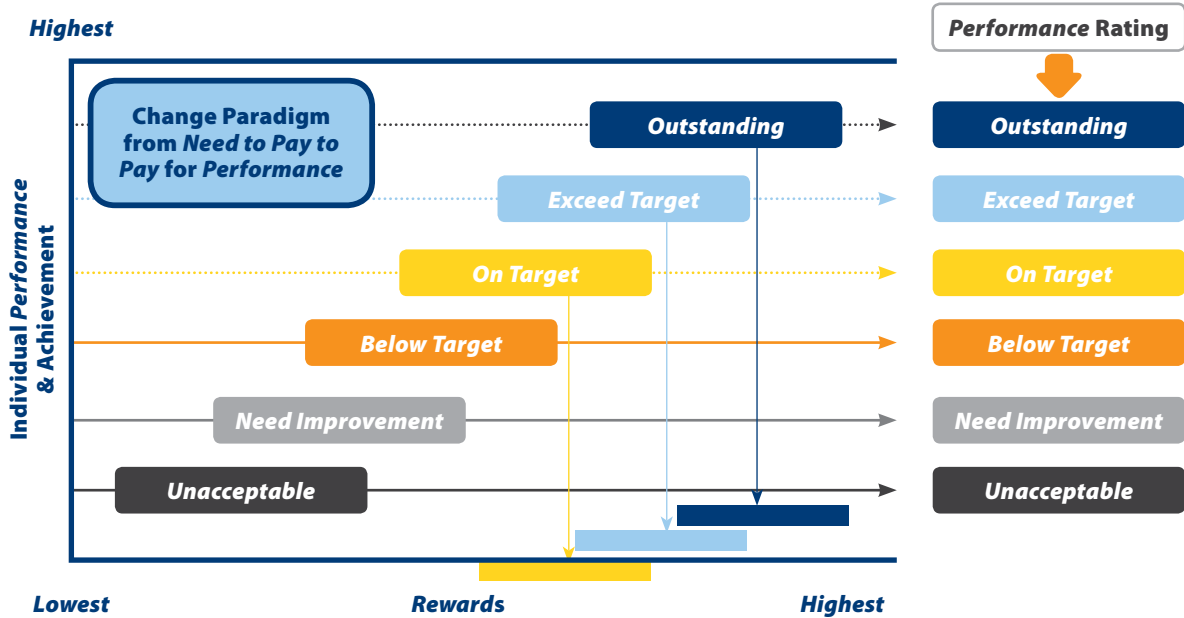
Guna menentukan kinerja seluruh karyawan, Perusahaan menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang direncanakan dan ditetapkan mulai level dari Perusahaan, tingkat divisi/tim, hingga tingkat individu. Langkah selanjutnya, Perusahaan menetapkan proses pemantauan atas capaian kinerja masing-masing individu maupun grup/kelompok melalui *coaching*, *counselling*, dan *controlling*. Setelah itu Perusahaan melakukan evaluasi atas kinerja seluruh pekerja, baik secara individual, tim maupun pada tingkat Perusahaan secara periodik. Melalui penerapan tersebut, maka pengembangan, seleksi, dan nominasi karyawan dilaksanakan dengan berbasis pada kompetensi dan penilaian kinerja yang bersangkutan.

## PEMENUHAN HAK KARYAWAN

Perseroan menerapkan kebijakan atas pemenuhan hak karyawan berupa remunerasi yang merupakan aspek penting dalam upaya Perseroan untuk memastikan dan meningkatkan kesejahteraan setiap karyawannya. Tolak ukur kesejahteraan yang paling utama adalah remunerasi yang juga menjadi fokus *Human Capital*. Setiap tahun, PT Mandiri Tunas Finance melaksanakan survei upah karyawan dan studi tolok ukur terhadap daya saing pasar untuk memastikan semua karyawan mendapatkan balas jasa yang menarik dan kompetitif berdasarkan ketentuan Upah Minimum dari Pemerintah. PT Mandiri Tunas Finance menggunakan prinsip 3P,

yaitu *Pay For Position*, *Pay For People* dan *Pay For Performance*.

1. *Pay for Position*, dimana karyawan dihargai sesuai dengan jabatannya berdasarkan struktur remunerasi.
2. *Pay for People*, dimana karyawan dihargai sesuai dengan kompetensinya berdasarkan posisinya dalam kotak *Human Asset Value* (HAV).
3. *Pay for Performance*, dimana karyawan dihargai sesuai dengan kinerjanya berdasarkan hasil Penilaian Kinerja Akhir Tahun.



**REWARD AND PUNISHMENT**

Guna memotivasi sekaligus memacu kinerja seluruh karyawan, Perusahaan memberlakukan sistem pemberian *reward and punishment* secara berkala, adil dan transparan. Pemberiaan *reward* merupakan bentuk apresiasi kepada karyawan atas prestasi dan dedikasi dalam bekerja untuk Perusahaan. *Reward* yang diberikan kepada karyawan bervariasi, mulai dari insentif hingga *reward trip* yang direncanakan setiap tahun. Perusahaan senantiasa memberikan penghargaan atau *reward* kepada karyawan berupa kebijakan peningkatan remunerasi yang disesuaikan dengan kondisi keuangan Perusahaan berdasarkan tingkat inflasi, pasar industri pembiayaan, dan hasil

penilaian terhadap indikator kerja masing-masing unit kerja.

Perseroan juga memberikan *punishment* kepada karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, *Standard Operation Procedure* (SOP), dan Kode Etik Pegawai. Perusahaan memberikan surat teguran dan pembinaan kedisiplinan terhadap karyawan yang menyalahi aturan kepegawaian dan pelanggaran SOP. Sanksi berat berupa pemutusan hubungan kerja diberikan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran berat atau pelanggaran ringan yang berulang.

## PEMBERIAN PUNISHMENT

Jenis Sanksi	Karyawan Yang Diberikan Sanksi (orang)					
	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Surat Teguran I	31	16	5	35	26	16
Surat Peringatan	105	178	125	60	57	19
Surat Peringatan II	55	46	59	21	17	40
Surat Peringatan III	20	34	35	8	12	42
Pemutusan Hubungan Kerja	9	10	5	5	1	8
Jumlah	220	284	229	129	113	125

## SUMBER INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan mengembangkan sistem dan infrastruktur guna memfasilitasi kebutuhan komunikasi dan informasi karyawan melalui *Human Resources Information System* (HRIS) untuk memberikan kemudahan akses terhadap informasi menjadi hal yang sangat penting untuk dapat diimplementasikan pada bidang sumber daya manusia. Setelah di tahun 2017 Perseroan mampu menyediakan sarana informasi bagi karyawan secara *on line* melalui *system* HCIS. Maka di tahun 2018, Perseroan telah

mengintegrasikan sistem informasi ke karyawan dengan secara menyeluruh, baik dari *personel system, online on board, individual training and development record, coaching & counseling platform, dan employee self services*. Dengan fokus kepada *service excellence* dan *fast and easy, Human Capital Information System*, Perseroan juga melakukan simplifikasi proses dan menghilangkan beberapa proses yang kurang relevan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

## ROTASI DAN MUTASI KARYAWAN

Dalam rangka memberi tugas dan tanggung jawab terhadap karyawan yang bersangkutan pada level jabatan yang lebih tinggi dilakukan proses rotasi dan mutasi. Rotasi dan mutasi untuk promosi ditetapkan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan/Surat Keputusan Direksi/Kebijakan Manajemen No. 003/SK-Dir/MTF/I/2014 tentang

Kebijakan Mutasi, Promosi & Demosi Pegawai.

Di tahun 2018, tingkat rotasi dan mutasi karyawan sebesar 4%. Besarnya persentase tersebut dikarenakan kebutuhan Perseroan dalam upaya pencapaian target serta upaya pengembangan karyawan.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
<b>FUNGSI PENUNJANG BISNIS</b>
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## MUTASI KARYAWAN TAHUN 2018

Bulan	Mutasi Pegawai	Jumlah Pegawai	Persentase Mutasi
Januari	209	3467	6%
Februari	37	3504	1%
Maret	82	3506	2%
April	364	3480	10%
Mei	76	3465	2%
Juni	44	3461	1%
Juli	390	3467	11%
Agustus	67	3459	2%
September	39	3448	1%
Oktober	349	3447	10%
November	42	3457	1%
Desember	24	3448	1%

## JAMINAN SOSIAL

Kesejahteraan karyawan merupakan salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan, yang salah satunya dapat dipenuhi lewat remunerasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan. Perusahaan menerapkan pemberian sistem remunerasi yang proporsional dan transparan sesuai dengan jenjang karir atau jabatan dengan memperhatikan undang-undang ketenagakerjaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan senantiasa berupaya terus meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui berbagai aspek antara lain:

- Pemberian dan perbaikan remunerasi dan *benefit*, kepesertaan jaminan sosial BPJS Kesehatan, kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, fasilitas kesehatan serta Asuransi;
- Program pengembangan karyawan seperti program peningkatan jenjang pendidikan, dukungan pada kebutuhan karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan dengan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran pelaksanaan kegiatan keagamaan;
- Dukungan pada kebutuhan karyawan untuk melaksanakan kegiatan olah raga dengan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran pelaksanaan kegiatan olah raga;
- Bantuan bagi karyawan yang mengalami duka cita.

Bulan	Jumlah Peserta	Premi (Rp)
Januari	71	170.784.692
Februari	322	325.598.382
Maret	107	109.668.430
April	75	93.042.679
Mei	34	32.445.617
Juni	67	46.945.333
Juli	17	8.750.750
Agustus	112	60.240.067
September	36	14.358.244
Oktober	72	19.708.466
November	51	8.809.483
Desember	93	81.887.400

Premi	Jumlah Peserta		Nominal Premi		Kenaikan/ Penurunan (%)
	2017	2018	2017	2018	
Utama	7.849	7.712	12.301.420.800	13.094.157.700	6,4%
GCU	92	127	305.894.100	356.237.800	16,5%
Total	7.941	7.839	12.607.314.900	13.418.866.200	

## PEMBENTUKAN LINGKUNGAN KERJA YANG KONDUSIF

Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk mengembangkan dirinya melalui berbagai kegiatan di luar tanggung jawab performa kinerja. Kegiatan-kegiatan seperti olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan hobi lainnya diharapkan mampu memberikan

wadah kepada setiap karyawan untuk lebih mengenal satu sama lain secara personal. Dengan pengenalan personal ini, Perseroan berupaya untuk membentuk lingkungan kerja yang kondusif, yang akan berujung pada loyalitas dan produktivitas karyawan.



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
<b>FUNGSI PENUNJANG BISNIS</b>
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## PETA JALAN PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2018

Rencana dan pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah proses yang berkelanjutan. Perusahaan telah menyusun rencana pengembangan SDM 2018-2020 seperti yang terlihat di bawah ini.

### ROAD MAP PENGEMBANGAN SDM MANDIRI TUNAS FINANCE 2018-2020

2018	→	2019	→	2020
<p><b>Organization Readiness</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Improve Effectiveness &amp; Efficiency Organization Tools</li> <li>• Leverage Productivity Measurement Tools</li> <li>• Create Employee Value Proposition</li> <li>• Internalization of the spirit of PERWIRA</li> </ul>		<p><b>Organization Readiness</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organization Effectiveness Dashboard System</li> <li>• Remodeling Business Process for Productivity Measurement Tools</li> <li>• Implement EVP for MTF Employee</li> <li>• Perwira Values into DNA for employee engagement increment</li> </ul>		<p><b>Organization Readiness</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverage agile and resilient organization to sustain business growth</li> <li>• Create Value Added HC to Business Partner</li> <li>• Engage Organization Effectiveness through productivity utilization</li> <li>• Internalization "Perwira Culture"</li> </ul>
<p><b>People Readiness</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Build MTF Branding with "Duta" MTF in education Institution</li> <li>• Recruitment System Online</li> <li>• Optimize development program for key position</li> <li>• Talent management system (talent pool, RTC)</li> <li>• Leadership readiness » Leader as coach</li> <li>• Develop Knowledge Management system based on Process / Technology, Products, People Profiles</li> </ul>		<p><b>People Readiness</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strengthen MTF Branding and Attract the Best Talent</li> <li>• Talent Employee Engagement System</li> <li>• HUMAN Capital Integration and Digital System</li> <li>• Leadership readiness » Leader as Legacy</li> <li>• Apply KM into IDP / IDP Programs (Talent Pool &amp; Leadership Program)</li> </ul>		<p><b>People Readiness</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimize contribution of value creation people</li> <li>• Leader as Accelerator</li> </ul>
<p><b>Conductive Working</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internalization IR Mgt System</li> <li>• Integrated Value Based Remuneration with HC System</li> <li>• Personalized Self Services</li> <li>• Optimization Personal Data Base System</li> </ul>		<p><b>Conductive Working</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enhance IR Mgt System</li> <li>• Integrated Personal Data Base System with HC System and Finance</li> </ul>		<p><b>Conductive Working</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Industrial relation risk mitigation</li> <li>• Leverage MTF as the Best place to keep fun environment, innovative and productive</li> <li>• capitalize Mandiri Synergy</li> </ul>

## MENJEMPUT PERUBAHAN: PENGEMBANGAN DAN OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI

---

Perkembangan industri jasa pembiayaan di Indonesia pada umumnya, dan pengembangan bisnis Perusahaan pada khususnya, mengharuskan Perusahaan untuk menata dan membenahi diri dalam menyiapkan teknologi yang dibutuhkan untuk dapat mendukung pengembangan dan perluasan bisnis, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen melalui layanan yang berbasis teknologi informasi.

Dalam era globalisasi, kehandalan teknologi informasi merupakan salah satu unsur penting yang mendukung proses bisnis dan layanan yang prima. Teknologi merupakan kunci utama yang memungkinkan Perusahaan menyediakan produk dan jasa kepada konsumen, mengukur dan menelusuri kinerja bisnis, serta mengambil keputusan-keputusan manajemen yang tepat untuk kelangsungan usahanya. Pengelolaan Teknologi Informasi di Perusahaan dilakukan oleh Divisi Teknologi Informasi (TI), sehingga kebijakan terkait TI lebih terarah dan berjalan sesuai dengan visi misi perusahaan.

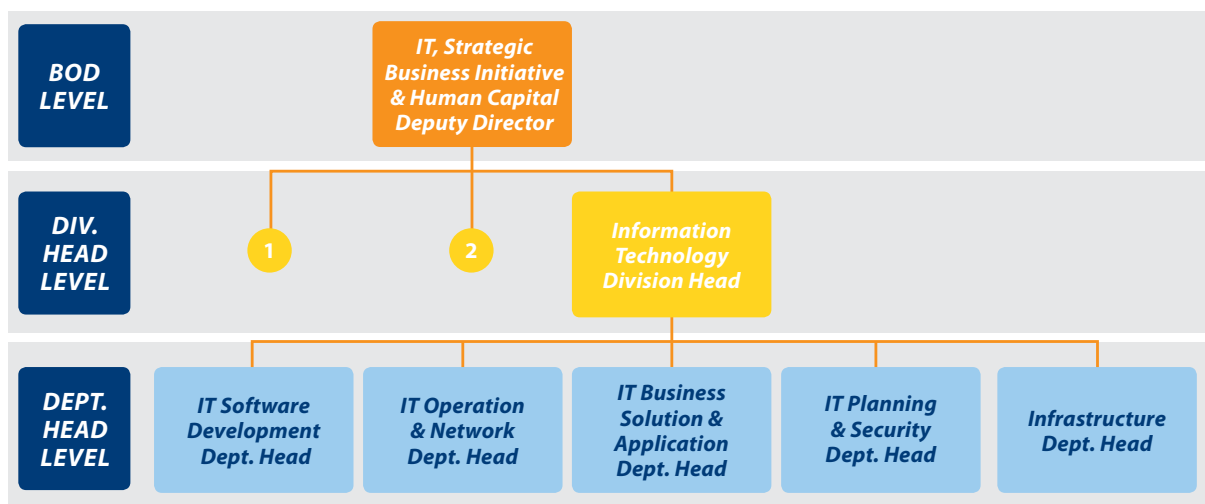
### PEMBENTUKAN DIVISI PENGELOLA IT PERUSAHAAN

Departemen Teknologi Informasi MTF berperan sebagai *business enabler* dalam memberikan layanan pada user untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, serta mendukung perkembangan bisnis Perseroan. Divisi ini juga terus mengembangkan sarana yang dapat memudahkan pelanggan untuk berhubungan dengan pihak MTF. Sebagai pendukung bisnis Perseroan dalam memberikan layanannya, departemen TI MTF dibagi menjadi beberapa departemen yaitu:

- Departemen *Software Development*
- Departemen *Operation and Network*
- Departemen *Business Solution and Application*
- Departemen *Planning and Security*
- Departemen *Infrastructure*

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
<b>FUNGSI PENUNJANG BISNIS</b>
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## STRUKTUR PENGELOLAAN IT MANDIRI TUNAS FINANCE



Divisi IT Perseroan dipimpin oleh seorang Kepala Divisi. Berdasarkan Surat Keputusan No. 1234/SK-HCP.SVC/HC/VII/2016, Direksi menunjuk Kanda Octaviano untuk menjabat Kepala Divisi IT.

### KANDA OCTAVIANO

Kepala Divisi IT

**MENJABAT SEJAK** 1 Agustus 2016

#### DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia

Kelahiran Jakarta, 13 Oktober 1981 (37 tahun)

**DOMISILI** Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

**PENDIDIKAN** Sarjana (S1) Akuntansi STIE Indonesia

#### RIWAYAT PENUNJUKAN

SK- No. :1234/SK-HCP.SVC/HC/VII/2016

#### PENGALAMAN KERJA

Plt. Kepala Divisi IT (2016-2017), IT Software Development Departement (2016), IT Software Development Dept Head (2013-2016), IT Software Development Departement (2010-2012), IT Supervisor (2007-2009), SOP & Control SPV (2005-2007)

**BERGABUNG DI MTF** 1 Agustus 2002



## VISI DAN MISI PENGEMBANGAN IT PERUSAHAAN



### Visi

*"To Drive and Embrace Digital Transformation in PT Mandiri Tunas Finance"*



### Misi

- Berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dari segi teknologi Perseroan dalam memberikan layanan untuk pelanggan.
- Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholder dan mendukung PT Mandiri Tunas Finance dalam mencapai target strategisnya.
- Mengembangkan teknologi sebagai sarana bagi Perseroan dalam menjaga budaya kerja PERWIRA.
- Menjadi pilar teknologi dalam menjaga institusi yang membanggakan dalam berkarya dan meraih prestasi.

## PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
<b>FUNGSI PENUNJANG BISNIS</b>
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



## PERKEMBANGAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018, Perseroan telah melakukan beberapa program pengelolaan Teknologi Informasi sebagai berikut:

### 1. IT Master Plan

Sebagai turunan dari *Business Plan Perseroan*, *IT Master Plan* diharapkan selaras dengan rencana kerja Perseroan dalam 3 tahun (2019 – 2021) dan menjadi landasan TI dalam membuat kebijakan agar penerapan IT dapat lebih efektif dan efisien

### 2. Penetration Testing

Divisi IT telah melakukan kajian keamanan pada sistem informasi yang sedang berjalan saat ini untuk mengidentifikasi celah keamanan dan mengoptimalkan kinerja sistem yang ada

dengan melibatkan jasa pihak eksternal yang berkompeten.

3. *Upgrade Database Server pada Core System MTF*  
Untuk meningkatkan *High Availability Database server Core System MTF* yang menyesuaikan perkembangan teknologi saat ini.
4. *Peremajaan Server Core*  
Peremajaan ini ditujukan untuk menyiapkan *system core* yang dapat menampung dan mengelola data Perseroan yang semakin berkembang.
5. *Penambahan Virtualisasi Server*  
Untuk memenuhi kebutuhan *project-project* unit bisnis yang membutuhkan server sebagai pendukung infrastrukturnya.



## BIAYA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Penentuan besarnya budget untuk Opex dan Capex IT berdasarkan kebutuhan operasional dan kebutuhan untuk pengadaan infrastruktur TI yang sesuai rekomendasi dan melalui proses *review management* Perseroan. Berikut perbandingan biaya investasi IT yang dilakukan Perseroan.

Perihal	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)		
			Jumlah (Rp)	Persentase (%)	
Opex (Internet RVPN)	1.276.710.000,00	2.127.240.000,00	850.530.000,00	39,98 %	↑
Opex (Repair and Maintenance - Computer Equipment)	3.333.154.627,08	3.913.601.631,75	580.447.004,67	14,83 %	↑
Capex	24.740.669.420,00	22.773.520.000,00	1.967.149.420,00	8,64 %	↑

## DASAR PENGELOLA TI

Di masa mendatang diharapkan tata kelola TI Perusahaan sudah dapat mencapai *maturity level* rata-rata industri Pembiayaan dalam skala pengukuran *maturity level* berdasarkan COBIT5. Sehingga untuk mencapai kondisi tersebut, secara umum IT harus melakukan langkah-langkah perbaikan yang antara lain adalah sebagai berikut:

- Penambahan dan perbaikan fungsi/tugas.
- Pengembangan kebijakan dan prosedur.
- Pengembangan ukuran-ukuran kinerja.
- Pengadaan *system* aplikasi pendukung yang relevan.
- Melakukan evaluasi Tata Kelola IT.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
<b>FUNGSI PENUNJANG BISNIS</b>
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## PETA JALAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

<b>2019</b> <b>Enhance Digital Coverage</b>	<b>2020</b> <b>Optimize Digital Potential</b>	<b>2021</b> <b>Maintain Continuous Digital Growth</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan cakupan proses bisnis digital yang belum tercakup dari sisi teknologi seperti <i>Corporate Fleet</i>, pemanfaatan <i>business intelligence</i>, dan lainnya.</li> <li>• Meningkatkan <i>customer experience</i> dengan <i>complaint management system</i> untuk pencatatan keluhan pelanggan.</li> <li>• Peningkatan keamanan dan perangkat infrastruktur TI untuk mendukung kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi perusahaan.</li> <li>• Meningkatkan kontrol dan tata kelola TI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan potensi dari bisnis usaha Syariah, serta mengembangkan infrastruktur dan kebijakan pendukungnya.</li> <li>• Implementasi <i>big data</i> untuk memberikan nilai tambah pada proses sales dan marketing dalam menganalisa tren penjualan, <i>customer behavior</i>, dll.</li> <li>• Revitalisasi dan redundansi perangkat infrastruktur guna mendukung kegiatan operasional dan keberlangsungan bisnis perusahaan.</li> <li>• Membuat <i>framework</i> kebijakan TI untuk perlindungan data.</li> <li>• Menetapkan kebijakan manajemen layanan TI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan prinsip <i>paperless</i> dengan mengurangi penggunaan kertas atau dokumentasi manual melalui digitalisasi dokumentasi proses bisnis/ <i>workflow</i>.</li> <li>• Peningkatan proses <i>collection</i> dengan kerja sama bersama pihak eksternal yang menyediakan lahan dan fasilitas parkir.</li> <li>• Aspek keamanan informasi untuk meningkatkan optimalisasi dan kecepatan pemulihan bencana dan gangguan keamanan informasi di lingkungan TI perusahaan.</li> <li>• Implementasi kontrol untuk perlindungan data berdasarkan <i>framework</i> dari tahun sebelumnya.</li> </ul>





# TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pemahaman Mendasar Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	238
Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup Mandiri Tunas Finance	240
Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	240
Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik	246
Sosialisasi dan Internalisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik	250
Penghargaan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	251
Penilaian: Evaluasi, Pemantauan, dan Peningkatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	252
Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan yang Baik	258
Hubungan antar Organ dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik	258
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	259
Dewan Komisaris	266
Komisaris Independen	275
Direksi	277
Transparansi Informasi Tentang Dewan Komisaris dan Direksi	286
<i>Assessment</i> Penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris dan Direksi	286
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	287
Rapat Dewan Komisaris dan Direksi	292
Pengungkapan Hubungan Afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali	298
Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi	299

Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi	301
Organ Pendukung Dewan Komisaris	302
Komite Audit	302
Komite Nominasi dan Remunerasi	312
Komite Pemantauan Risiko	321
Informasi Tentang Organ/Komite Lainnya di Bawah Dewan Komisaris	329
Organ Pendukung Direksi	330
Sekretaris Perusahaan	330
Audit Internal	338
Auditor Eksternal/ Akuntan Publik	346
Manajemen Risiko	350
Sistem Pengendalian Internal	361
<i>Corporate Social Responsibility</i>	364
Perkara Penting	365
Akses Informasi dan Data Perusahaan	369
Kode Etik	374
Pengendalian Gratifikasi	379
Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik	380
Kebijakan Anti Korupsi	381
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	382
<i>Whistleblowing System</i>	285
Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	388
Kepatuhan Terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan: Kesesuaian Terhadap Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014	390
Transparansi Praktik <i>Bad Governance</i>	402

## PEMAHAMAN MENDASAR TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) secara definitif merupakan serangkaian sistem yang mengatur dan mengendalikan entitas usaha yang diharapkan mampu menciptakan nilai tambah untuk seluruh pemangku kepentingan; termasuk kepada pemegang saham.

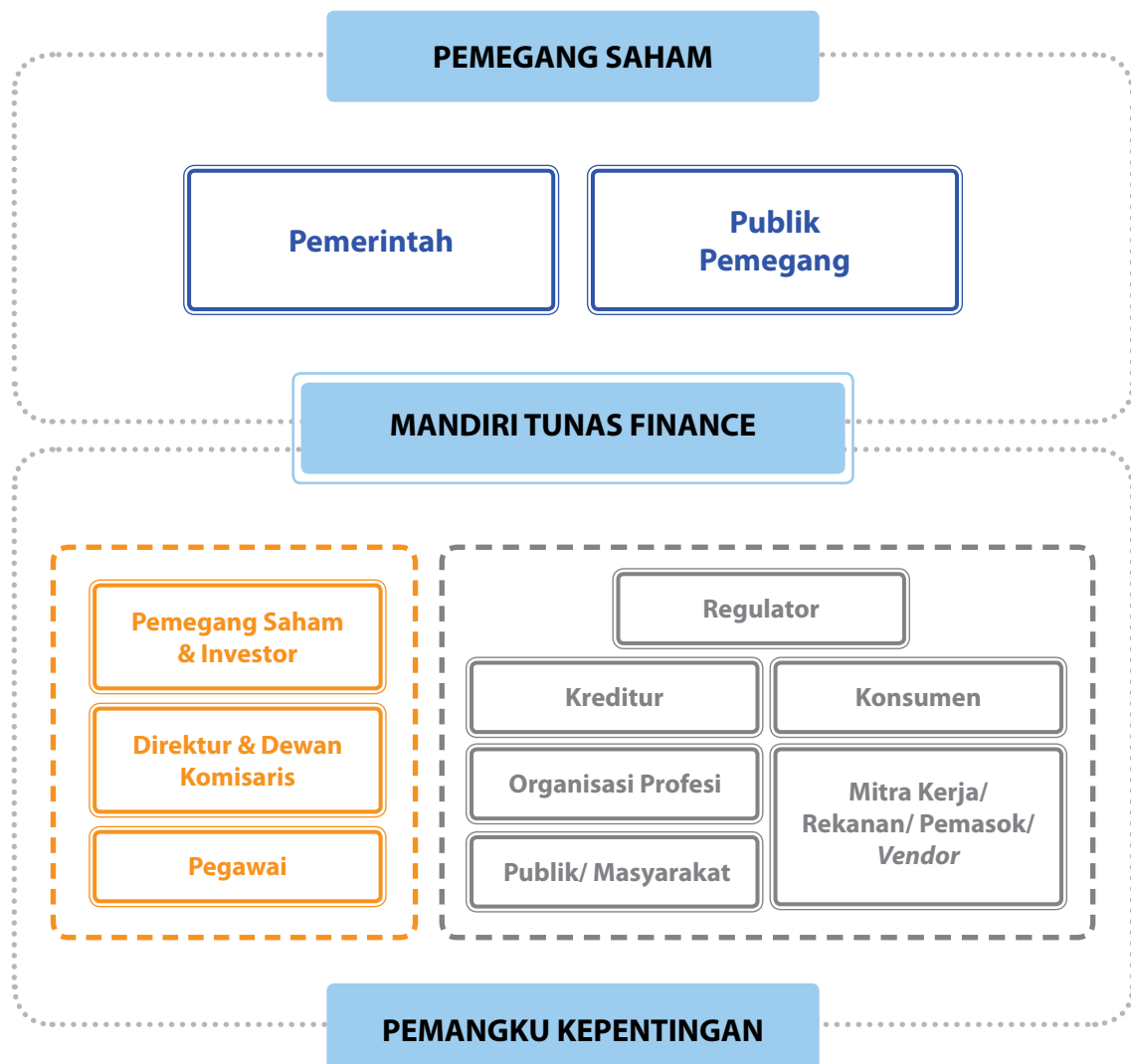
Terdapat 2 (dua) hal penekanan, yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya bahkan hingga pemegang saham minoritas, dan, kewajiban entitas usaha untuk melakukan pengungkapan

secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja entitas usaha, kepemilikan, dan pemangku kepentingan. Kehadiran GCG diharapkan mampu memberikan fondasi atas pengelolaan entitas usaha yang akuntabel.

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, prinsip GCG turut mengalami perkembangan yang mencakup sistem pengawasan dan pengendalian yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mendukung integritas dalam pelaporan

keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta hubungan pemangku kepentingan dan Perseroan yang berlandaskan etika. Di lingkup Perseroan, penilaian dilakukan atas penerapan GCG untuk memastikan terwujudnya prinsip GCG secara komprehensif.

### GCG dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan: Hubungan Mandiri Tunas Finance dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan



# PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP MANDIRI TUNAS FINANCE

## DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sebagai emiten yang melakukan perdagangan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Perseroan berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para investor, pemegang saham, masyarakat secara luas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perseroan menekankan praktik terbaik (*best practices*) penerapan GCG yang berlaku di industri beserta perkembangannya yang terkini, dan menetapkan Standar Kualitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup Perseroan, antara lain: Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) serta *Road Map* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### TUJUAN PENERAPAN GCG

Sebagai anak usaha dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Perseroan berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan merujuk terhadap penerapan GCG dengan standar BUMN. Selain itu, tujuan penerapan prinsip GCG di lingkup Perseroan mengacu kepada Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, yaitu:

- mengoptimalkan nilai Perseroan bagi pemangku kepentingan, khususnya debitur, kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- meningkatkan pengelolaan Perseroan secara profesional, efektif, dan efisien.
- meningkatkan kepatuhan Organ Perseroan

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan.

- d. mewujudkan Perseroan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif.
- e. meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional.

Dengan status Perseroan yang merupakan perusahaan tidak terbuka, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, juga diterapkan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

## PRINSIP DASAR GCG DAN PENERAPANNYA

Perseroan memandang bahwa penerapan GCG merupakan sebuah pilar kuat untuk memajukan pertumbuhan. Oleh sebab itu, Perseroan berupaya untuk senantiasa menerapkan GCG terhadap seluruh pemangku kepentingan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan kualitas dari penerapan praktik terbaik GCG dengan secara terus menerus dilakukan, melakukan pemutakhiran berbagai kebijakan, standar, pedoman, prosedur yang disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keadaan lingkungan bisnis, dan juga perkembangan usaha dan kinerja Perseroan.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKKG) maupun yang tertuang dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.



Penjelasan prinsip-prinsip dasar di atas dan penerapannya secara umum di lingkup Perseroan adalah sebagai berikut:

Prinsip Dasar	Penjelasan Sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
Keterbukaan ( <i>Transparency</i> )	Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.	<p>Perseroan menilai prinsip transparansi sebagai keterbukaan dalam mengungkap informasi material yang relevan secara akurat dan tepat waktu. Perseroan mengungkapkan informasi material tersebut tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan. Sehingga diharapkan pemegang saham dan pemangku kepentingan dapat lebih dini mengetahui perkembangan usaha Perseroan. Penerapan prinsip ini diwujudkan Perseroan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan penerbitan Laporan Tahunan yang tersedia di halaman situs web Perseroan.</li> <li>• Penyusunan dan penjelasan program kerja Perseroan.</li> <li>• Laporan keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan triwulan dan tahunan.</li> <li>• Tersedianya laporan keterbukaan informasi terkait kegiatan usaha Perseroan.</li> <li>• Segala informasi dan data terkait perusahaan yang telah di sediakan pada situs web Perseroan untuk pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.</li> </ul>
Akuntabilitas ( <i>Accountability</i> )	Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.	Penerapan prinsip akuntabilitas diimplementasikan oleh Perseroan dengan menetapkan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban masing-masing organ dalam Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan dapat terlaksana secara efektif. Dengan diterapkannya prinsip akuntabilitas ini maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi maupun di setiap bagian dalam Perseroan.
Pertanggungjawaban ( <i>Responsibility</i> )	Kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.	<p>Perseroan mendefinisikan prinsip pertanggungjawaban sebagai dipatuhinya baik prosedur operasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap aktivitas bisnis yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban juga diikuti dengan komitmen untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan standar etika yang baik. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris lebih ditingkatkan terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi sehingga dapat berjalan efektif, disertai adanya tuntutan pencapaian target terhadap Direksi. Prinsip ini diterapkan Perseroan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan terhadap ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu.</li> <li>• Pelaksanaan program dan kegiatan CSR.</li> <li>• Pelaksanaan kewajiban keterbukaan informasi sesuai peraturan.</li> </ul>



Prinsip Dasar	Penjelasan Sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
Kemandirian ( <i>Independency</i> )	Keadaan perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.	<p>Perseroan mengartikan independensi sebagai dijalkannya tugas, kewajiban serta wewenang masing-masing organ Perseroan tanpa campur tangan dari organ-organ Perseroan yang lain maupun pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Independensi diwujudkan antara lain dengan saling menghargai peran dan fungsi masing-masing Organ Perseroan serta keputusan pengurusan Perseroan melalui keputusan Direksi Perseroan. Prinsip independensi sangat diperlukan terutama dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan manajemen yang harus dilakukan secara obyektif dan menempatkan kepentingan Perseroan sebagai prioritas utama. Penerapan prinsip ini diterapkan Perseroan antara lain dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab di antara organorgan Perusahaan.</li> <li>• Pemegang saham dan Dewan Komisaris tidak melakukan intervensi terhadap pengurusan Perseroan.</li> <li>• Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan.</li> <li>• Kegiatan Perseroan yang memiliki benturan kepentingan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen atau wakilnya yang diberi wewenang dalam RUPS sebagaimana diatur, serta mematuhi peraturan tentang benturan kepentingan.</li> </ul>
Kesetaraan dan Kewajaran ( <i>Fairness</i> )	Kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.	<p>Perseroan mengartikan kewajaran atau keadilan sebagai perlakuan yang setara terhadap setiap pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penerapannya, antara lain Perseroan selalu menjaga hubungan baik dengan karyawan dan menghindari praktek diskriminasi serta menghormati hak-hak karyawan, termasuk menghindari diskriminasi karyawan terkait latar belakang suku, agama, ras, maupun gender. Prinsip ini diterapkan Perseroan antara lain dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Perseroan melaporkan informasi terkait rekanan kepada pemangku kepentingan secara adil dan transparan.</li> <li>• Perseroan menghadirkan kondisi kerja yang baik dan aman bagi seluruh karyawan sesuai dengan kemampuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta adanya penilaian kinerja secara periodik serta kesempatan promosi yang sama bagi seluruh karyawan.</li> </ul>

## DASAR HUKUM

Penerapan GCG di Perseroan mengacu kepada beberapa ketentuan, peraturan, serta perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Undang-Undang Republik Indonesia
  - Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
  - Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
  - Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  - Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003
  - Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - Undang Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
- Peraturan Menteri
  - Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara
  - Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/06/2016 Jo. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN
- Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang telah dialihfungsikan menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI)
  - Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No. Kep-179/BI/2008 Tanggal 14 Mei 2008, tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perubahan Publik
  - Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan
  - Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
  - Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
  - Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
  - Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
  - Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik
  - Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

- Penawaran Umum
- Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
  - Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
  - Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
  - Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
  - Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
  - Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan
  - Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
  - Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan No. I-A Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perseroan Tercatat
  - Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* tanggal 17 Oktober 2006 (“Pedoman Umum GCG Indonesia KNKG”).
  - Anggaran Dasar Perseroan terakhir, yang telah disahkan melalui Akta No. 53 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta.
  - ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial
  - OECD 2004 *Principles of Corporate Governance* dan Asian Corporate *Governance* Scorecard (ACGS).

## STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

### INFRASTRUKTUR DAN *SOFTSTRUCTURE* GCG MANDIRI TUNAS FINANCE



### STRUKTUR GCG

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur keorganisasian sebuah Perseroan Terbatas mencakup kepentingan pemegang saham yang dituangkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Direksi dengan tugasnya untuk mengelola; serta Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan. Sistem kepengurusan Perseroan Terbatas menganut model 2 (dua) badan atau *two tier system*, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

Perseroan memiliki ketiga organ utama tersebut,

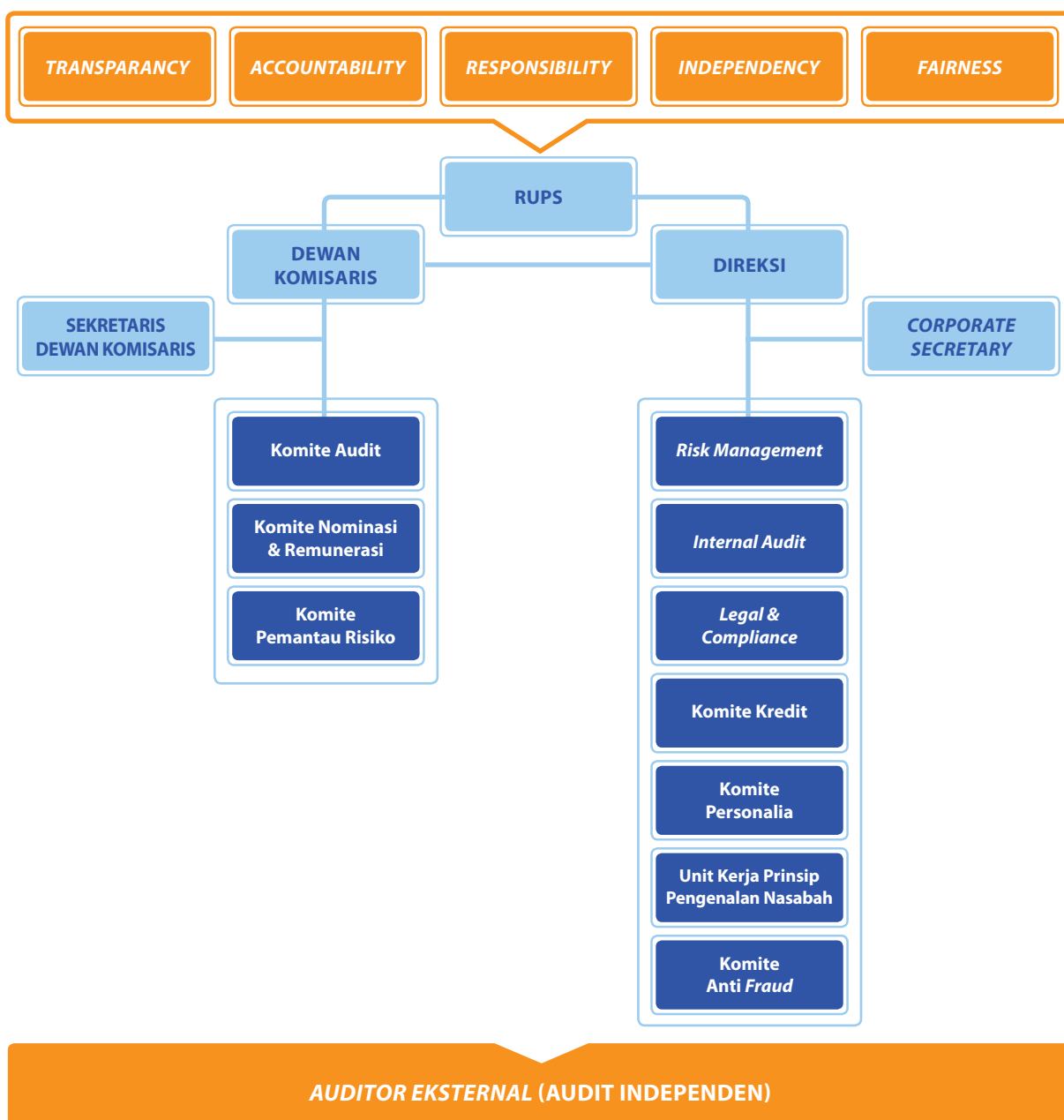
baik RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai serta budaya Perseroan.

Infrastruktur GCG Perseroan juga mengikutsertakan beberapa aspek penting yang berperan untuk mendukung penguatan kontrol dan pengelolaan terhadap Perseroan, terdiri dari organ pendukung yang meliputi Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, Manajemen Risiko, dan beberapa komite serta satuan kerja lainnya yang berada di bawah

Direksi; hingga Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Pemantau Risiko yang berada di bawah Dewan Komisaris. Selain itu, terdapat proses audit independen atas laporan keuangan dan laporan

lainnya yang dilakukan oleh akuntan eksternal dalam memperkuat kontrol khususnya terkait laporan kinerja Perseroan. Struktur tersebut telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia.

### STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN MANDIRI TUNAS FINANCE



## MEKANISME GCG

Mekanisme atau perangkat lunak GCG merupakan aturan main, standar prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme GCG terdiri dari berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur lingkup tanggung jawab organ GCG, dan hubungan kerja antar organ GCG; termasuk dengan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

Perseroan telah memiliki mekanisme GCG meliputi Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* yang telah disahkan. Perusahaan terus melakukan penyempurnaan

kebijakan GCG (*soft-structure* GCG) yang dimiliki agar sejalan dengan kebutuhan proses bisnis maupun ketentuan pelaksanaan GCG bagi Perseroan. Selain pedoman GCG, Perseroan telah menyusun *Code of Conduct*, *Board Manual*, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*), Piagam Komite Audit, Piagam Audit Internal dan berbagai kebijakan dan prosedur dalam mendukung terlaksananya tata kelola yang baik. Seluruh kebijakan dan prosedur tersebut bertujuan untuk mendorong Perusahaan mampu melakukan *check and balance* pada setiap aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang berlaku.

Kebijakan dan Prosedur	Penetapan
Anggaran Dasar	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance No.53 tanggal 29 Maret 2018 oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH, Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Ditetapkan melalui Surat Keputusan No.03, efektif berlaku sejak 1 April 2016 dan telah disetujui oleh Direksi
<i>Board Manual</i> (Buku Panduan Dewan Komisaris dan Direksi)	Ditetapkan tanggal 27 Agustus 2015 yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris
Kode Etik ( <i>Code of Conduct/CoC</i> )	Ditetapkan tanggal 11 Maret 2013
Piagam Komite Audit	Ditetapkan tanggal 25 September 2013 telah ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit dan Dewan Komisaris
Piagam Komite Nominasi & Remunerasi	Ditetapkan tanggal 4 Agustus 2015 telah ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris
Piagam Komite Pemantau Risiko	Ditetapkan tanggal 26 November 2016 telah ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko dan Dewan Komisaris
Piagam Audit Internal	Telah disahkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan revisi terakhir pada tanggal 1 Desember 2015
Piagam Sekretaris Perusahaan	Surat Keputusan No.03/PGN/06/2016 yang telah diterbitkan tanggal 23 Desember 2016 dan telah melalui perbaikan/revisi pada tanggal 14 Desember 2018, telah disetujui oleh Direksi Perseroan
Pedoman Sistem Pengendalian Internal	Surat Keputusan No. 03/PGN/01/2016 efektif berlaku tanggal 28 Desember 2016 telah disetujui oleh Direksi Perseroan
Pedoman Manajemen Risiko	Surat Keputusan No. 03/PGN/07/2016 yang telah diterbitkan tanggal 27 Desember 2016 dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Kebijakan dan Prosedur	Penetapan
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa	Surat Keputusan No.02/PGA/01/2017 efektif berlaku sejak 1 Juni 2017 dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan
Pedoman Pengendalian Gratifikasi	Surat Keputusan No. 03/PGN/10/2018 efektif berlaku sejak 17 September 2018 dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran ( <i>Whistle Blowing System</i> )	Surat Keputusan Direksi No. 063/MTF-DIR/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011



## SOSIALISASI DAN INTERNALISASI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sebagai bentuk komitmen Perseroan untuk selalu menerapkan kegiatan usaha dan pelaksanaan operasional Perseroan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka Perseroan selalu memberikan bekal kepada setiap pegawai baru dan pegawai yang ada untuk dilakukan sosialisasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Selama tahun 2018, Perseroan telah melakukan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebanyak 4 kali, yaitu:

Tanggal	Nama Pelatihan	Peserta	Jumlah Peserta
20 Februari 2018	<i>Induction Training</i>	<i>New Employee</i>	20
29 Maret 2018	<i>Manager Development Program Batch 8</i>	<i>MDP Batch 8</i>	8
20 Juni 2018	<i>Management Trainee Batch 6</i>	<i>MT Batch 6</i>	21
18 September 2018	<i>Induction Training</i>	<i>New Employee</i>	25

## PENGHARGAAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Selama tahun 2018 telah dilakukan penilaian atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh The Indonesia Institute for *Corporate Governance* (IICG) dalam ajang *Corporate Governance Perception Index* dengan tema “Transformasi Model Bisnis dalam kerangka *Good Corporate Governance*” melalui tema transformasi model bisnis, CGPI masih melanjutkan metode penilaian dan aspek penilaian yang terdiri dari dua tahapan yaitu tahapan analisis dan observasi.

Tahapan analisis dilakukan melalui metode pengisian kuesioner (*self assessment*) dan penilaian dokumen perusahaan, dilanjutkan dengan tahapan observasi melalui paparan eksekutif dan diskusi dengan Organ Perseroan. Aspek penilaian CGPI mencakup struktur governansi (*governance*

*structure*), proses governansi (*governance process*), dan hasil governansi (*governance outcome*). Penilaian CGPI menggunakan acuan penerapan GCG yang bersifat wajib (*mandatory*) dan praktik terbaik yang berlaku umum (*best practices*) serta pendekatan dengan perspektif stakeholder dimana hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) semakin penting dalam menjaga kesinambungan bisnis perusahaan dalam jangka Panjang.

Hasil penilaian CGPI dengan tema “Tranformasi Model Bisnis dalam Kerangka GCG (*Good Corporate Governance*)” di Perseroan menunjukkan skor sebesar 79,80. Hasil pemeringkatan berdasarkan skor tersebut, Perseroan berada dalam kelompok perusahaan “**Terpercaya**”.

### HASIL CGPI PERSEROAN

No	Aspek & Indikator Penilaian	Bobot (Total 100)	Nilai Akhir
1	Aspek Struktur Governansi	25,75	21,02
2	Aspek Proses Governansi	43,00	33,86
3	Aspek Hasil Governansi	31,25	24,92
Total Skor CGPI & Rating			79,80 (terpercaya)

Hasil CGPI tersebut menunjukkan prestasi terpercaya sehingga dapat menggambarkan bahwa Organ Perseroan dan segenap anggota Perseroan telah berkomitmen dan melakukan upaya yang bersungguh-sungguh dan konsisten dalam mengimplementasikan GCG dan mengelola transformasi model bisnis perusahaan berdasarkan prinsip GCG sehingga bergerak berubah menuju kondisi yang menciptakan nilai bagi *stakeholders*.

## PENILAIAN: EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN PENINGKATAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perseroan melakukan evaluasi guna melihat efektivitas dari program implementasi GCG yang dilaksanakan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi Perseroan untuk melakukan perbaikan terhadap seluruh kebijakan penerapan GCG di lingkup Perseroan.

### DASAR DAN METODE PENILAIAN

Penilaian GCG di Perseroan mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan

SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, serta POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Untuk kriteria penilaian tata kelola untuk masing-masing ketentuan yaitu:

No.	POJK 30 tahun 2014 dan SEOJK 15 tahun 2016	No	Skor
A.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.	1.	Direksi
B.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal	2.	Dewan Komisaris
C.	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal	3.	Dewan Pengawas Syariah
D.	Penerapan Manajemen risiko dan sistem pengendalian intern.	4.	Komite Tata Kelola Terintegrasi
E.	Penerapan Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain	5.	Satuan Kerja Kepatuhan
F.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan.	6.	Satuan Kerja Audit Internal
G.	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan	7.	Penerapan Manajemen Risiko
H.	Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih	8.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
I.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga Direksi	9.	Benturan Kepentingan
J.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga Dewan Komisaris	10.	Kebijakan Remunerasi
K.	Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada OJK		

Penilaian atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan oleh internal Perseroan, yang tentunya untuk melakukan penilaian tersebut, dilakukan secara independensi agar hasil dari penilaian tersebut mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## ASSESSMENT PENERAPAN GCG TAHUN BUKU 2017: HASIL, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUTNYA DI TAHUN 2018

Evaluasi penerapan GCG periode tahun buku 2017 dilakukan dengan metode penilaian mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015, dan dilakukan oleh pihak internal Perseroan secara independen. Hasil penilaian menunjukkan perolehan skor 1,26 dengan predikat "Sangat Baik".

Jenis Penilaian	<i>self assesment</i>
Assessor/Penilai	Internal Perseroan
Periode Penerapan	1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017
Tahun Ukur	Tahun Buku 2017

Rincian hasil *assessment* penerapan GCG Perseroan untuk tahun buku 2017 sebagai berikut:

### HASIL PENILAIAN GCG TAHUN 2017

No.	Parameter	Indikator	Skor	
1	<b>Direksi</b>			
		Struktur Tata Kelola	1	1
			2	1
	3		1	
	Proses Tata Kelola	1	1	
		2	2	
		3	2	
		4	1	
	Hasil Tata Kelola	1	1	
		2	2	
	Rata-Rata Nilai		1,33	
2	<b>Dewan Komisaris</b>			
		Struktur Tata Kelola	1	1
			2	2
	3		3	
	Proses Tata Kelola	1	1	
2		1		

No.	Parameter	Indikator	Skor
		3	1
		4	1
	Hasil Tata Kelola	1	1
		2	1
		3	1
	Rata-Rata Nilai		1,30
<b>3</b>	<b>Komite Tata Kelola Terintegrasi</b>		
	Struktur Tata Kelola	1	1
		2	1
	Proses Tata Kelola	1	1
		2	1
	Hasil Tata Kelola	1	1
		2	1
		3	1
	Rata-Rata Nilai		1,29
<b>4</b>	<b>Satuan Kerja Kepatuhan</b>		
	Struktur Tata Kelola	1	1
		2	1
	Proses Tata Kelola	1	1
	Hasil Tata Kelola	1	1
	Rata-Rata Nilai		1,25
<b>5</b>	<b>Satuan Kerja Audit Intern</b>		
	Struktur Tata Kelola	1	1
		2	1
	Proses Tata Kelola	1	1
	Hasil Tata Kelola	1	1
		2	1
		3	2
	Rata-Rata Nilai		1,50

No.	Parameter	Indikator	Skor
6	<b>Penerapan Manajemen Risiko</b>		
	Struktur Tata Kelola	1	2
		2	1
	Proses Tata Kelola	1	1
	Hasil Tata Kelola	1	2
		2	2
Rata-Rata Nilai		1,40	
7	<b>Pedoman Tata Kelola</b>		
	Struktur Tata Kelola	1	1
	Proses Tata Kelola	1	1
	Hasil Tata Kelola	1	1
	Rata-Rata Nilai		1,67
8	<b>Benturan Kepentingan</b>		
	Struktur Tata Kelola Terintegrasi	1	1
	Proses Tata Kelola Terintegrasi	1	1
	Hasil Tata Kelola Terintegrasi	1	1
	Rata-Rata Nilai		1,33
9	<b>Kebijakan Remunerasi</b>		
	Struktur Tata Kelola Terintegrasi	1	1
	Proses Tata Kelola Terintegrasi	1	1
	Hasil Tata Kelola Terintegrasi	1	1
	Rata-Rata Nilai		1,67
<b>TOTAL SKOR</b>			<b>1,26</b>

Hasil skor 1,26 menunjukkan "Sangat Baik". Komitmen Perseroan dalam menyempurnakan implementasi GCG di antaranya dilakukan dengan menindaklanjuti setiap temuan dalam penilaian GCG yang menjadi rekomendasi

Komitmen Perseroan dalam menyempurnakan implementasi GCG di antaranya dilakukan dengan menindaklanjuti setiap temuan dalam penilaian GCG yang menjadi rekomendasi.

## ASSESSMENT PENERAPAN GCG TAHUN BUKU 2018

Perseroan telah melakukan penilaian GCG dengan mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015, serta POJK No. 30/POJK.05/2014, juga Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2016, yang dilakukan pada tahun 2018.

Untuk penilaian berdasarkan POJK 18 tahun 2014 dan SEOJK 15 tahun 2015, memperoleh skor 1.32 dengan predikat "Sangat Baik". Sementara untuk penilaian berdasarkan POJK 30 tahun 2014 dan SEOJK 15 tahun 2016, memperoleh skor 99.32 dengan predikat yang juga "Sangat Baik".

Jenis Penilaian	<i>self assesment</i>
Assessor/Penilai	Internal Perseroan
Periode Penerapan	1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018
Tahun Ukur	Tahun Buku 2018

Rincian hasil *assessment* penerapan GCG Perseroan untuk tahun buku 2018 sebagai berikut:

### HASIL PENILAIAN GCG TAHUN 2018

POJK 30 tahun 2014 dan SEOJK 15 tahun 2016			POJK 18 tahun 2014 dan SEOJK 15 tahun 2015		
No	Isi Pembahasan	Skor	No	Isi Pembahasan	Skor
A.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.	30.00	1.	Direksi	1.22
B.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal	5.00	2.	Dewan Komisaris	1.20
C.	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal	7.50	2.	Dewan Pengawas Syariah	N/A
D.	Penerapan Manajemen risiko dan sistem pengendalian intern.	10.00	4.	Komite Tata Kelola Terintegrasi	1.14
E.	Penerapan Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain	2.32	5.	Satuan Kerja Kepatuhan	1.25
F.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan.	15.00	6.	Satuan Kerja Audit Internal	1.50
G.	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan	7.50	7.	Penerapan Manajemen Risiko	1.60



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

POJK 30 tahun 2014 dan SEOJK 15 tahun 2016			POJK 18 tahun 2014 dan SEOJK 15 tahun 2015		
No.	Isi Pembahasan	Skor	No.	Isi Pembahasan	Skor
H.	Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih	5.00	8.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	1.33
I.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga Direksi	2.50	9.	Benturan Kepentingan	1.33
J.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga Dewan Komisaris	2.50	10.	Kebijakan Remunerasi	1.33
K.	Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada OJK	12.00			
Struktur Tata Kelola					
Total Nilai		99.32	Total Akhir		1.32
Predikat		Sangat Baik	Predikat		Sangat Baik

# STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

## HUBUNGAN ANTAR ORGAN DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Secara garis besar, struktur GCG di lingkup Perseroan mengacu kepada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang terdiri dari 3 (tiga) organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sistem pengelolaan Perseroan Terbatas menganut model 2 (dua) badan atau *two tier system*, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi dengan kewewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. Sementara RUPS merupakan forum bagi pemegang saham untuk memutuskan hal-hal yang bersifat strategis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) organ komite, yaitu Sekretaris

Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko, dengan didukung oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Sedangkan Direksi memiliki organ pendukung Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal serta satuan kerja lainnya untuk penanganan pekerjaan yang bersifat lintas unit.

Mekanisme GCG Perseroan dituangkan dalam Pedoman GCG serta *Board Manual* yang ditandatangani bersama-sama oleh Dewan Komisaris dan Direksi dan mengatur pelaksanaan hubungan kerja seluruh Organ Tata Kelola di lingkungan Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

### PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang Saham Perseroan terdiri dari Pemegang Saham Utama/Pengendali dan Pemegang Saham lainnya (pendiri).

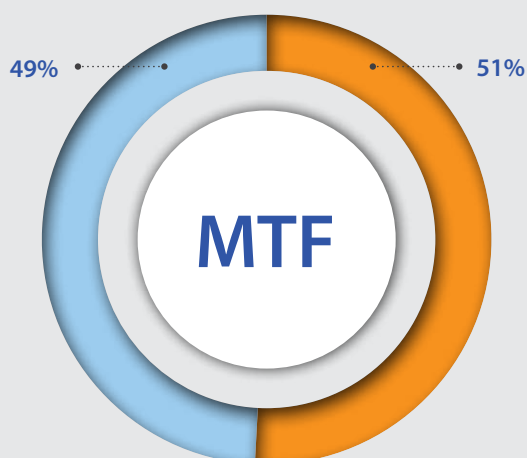
Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang memiliki saham Perseroan sebanyak 51,00%.

Perseroan senantiasa memenuhi serta memperhatikan hak-hak Pemegang Saham secara setara tanpa membedakan antara pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Kesetaraan pemenuhan hak kepada seluruh pemegang

saham dapat dilihat dari pemberitahuan informasi pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan RUPS sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan yang berlaku. Sebelum RUPS dilaksanakan, Perseroan akan melakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 21 hari terhitung sejak penetapan tanggal pelaksanaan RUPS. Selain itu, Perusahaan juga memastikan dapat memelihara dan menegakkan hak-hak pemegang saham meliputi:

1. Mengusulkan, menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar termasuk perubahan modal.
3. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran.
4. Meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
5. Setiap satu saham memberikan 1 (satu) hak suara.
6. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
7. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
8. Menjalankan hak lainnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM MANDIRI TUNAS FINANCE PER 31 DESEMBER 2018



- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Tunas Ridean Tbk

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS sebagai organ Perseroan merupakan wadah bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

RUPS dan/atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

Selain itu, Perusahaan juga memastikan dapat memelihara dan menegakkan hak-hak Pemegang Saham meliputi:

1. Mengusulkan, menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar termasuk perubahan modal.
3. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran.
4. Meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
5. Setiap satu saham memberikan 1 hak suara.
6. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
7. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
8. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT.

### JENIS-JENIS PELAKSANAAN RUPS

#### RUPS TAHUNAN

Diadakan untuk membahas laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.

#### RUPS LUAR BIASA

Dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham untuk menetapkan hal-hal yang tidak dilakukan dalam RUPS Tahunan.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Penyelenggaraan RUPS Perseroan mengacu kepada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Baik RUPS Tahunan dan RUPSLB memiliki wewenang tertinggi dalam struktur Tata Kelola Perusahaan sekaligus merupakan forum utama bagi pemegang saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap Manajemen Perseroan.

## MEKANISME PENYELENGGARAAN RUPS PERSEROAN

Dalam hal tata cara penyelenggaraan RUPS, Perseroan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2014 dan aturan lain yang terkait.

## PENYELENGGARAAN RUPS DI SEPANJANG TAHUN 2018



***“Di tahun 2018 Mandiri Tunas Finance hanya melakukan RUPS Tahunan dan tidak melakukan RUPS Luar Biasa”***

Di sepanjang tahun 2018, Perseroan melakukan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada Jumat, 9 Maret 2018 di Plaza Mandiri, Jakarta. Dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut, pada setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk tanya jawab mengenai materi yang dibahas. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka

keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Lenny Janis Ishak, SH Notaris di Jakarta dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi hadir pada rapat tersebut.

Adapun agenda RUPS Tahunan 2018 beserta pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

## AGENDA RUPS TAHUNAN 2018 DAN PELAKSANAANNYA

Agenda RUPS Tahunan 9 Maret 2018	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Keterangan
<b>AGENDA KE-1</b> Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	100%	-	-	Keputusan melalui musyawarah mufakat
<b>AGENDA KE-2</b> Usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	100%	-	-	Keputusan melalui musyawarah mufakat
<b>AGENDA KE-3</b> Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	100%	-	-	Keputusan melalui musyawarah mufakat
<b>AGENDA KE-4</b> Usulan Penetapan gaji bagi anggota Direksi, honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan penetapan tunjangan lainnya termasuk tantieme bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	100%	-	-	Keputusan melalui musyawarah mufakat
<b>AGENDA KE-5</b> Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan lebih dari 50% kekayaan Perseroan sebagai jaminan hutang atas nama Perseroan guna mendapatkan Pendanaan baru yang berasal dari sumber perbankan dan/atau penerbitan surat berharga.	100%	-	-	Keputusan melalui musyawarah mufakat
<b>AGENDA KE-6</b> Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017.	100%	-	-	Keputusan melalui musyawarah mufakat
<b>AGENDA KE-7</b> Usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	100%	-	-	Keputusan melalui musyawarah mufakat
<b>AGENDA KE-8</b> Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.	100%	-	-	Keputusan melalui musyawarah mufakat

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## HASIL KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN 2018 DAN TINDAK LANJUTNYA

Agenda RUPS Tahunan 9 Maret 2018	Sudah/ Belum Terlaksana	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2018 Hingga Akhir Tahun 2018
<p><b>Agenda ke-1</b> Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &amp; Surja (<i>a member firm of Ernst &amp; Young Global Limited</i>) dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, dan kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan, yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.</p>	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat No.10 tanggal 9 Maret 2018.
<p><b>Agenda ke-2</b> Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017 sebesar Rp350.241.513.915,64 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membagikan dividen tunai sejumlah 10% dari jumlah laba bersih atau sebesar Rp35.024.151.391,56 yang akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Tunas Ridean Tbk.</li> <li>• Sisa Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017 sejumlah 90% dari jumlah laba bersih atau sebesar Rp315.217.362.524,08 akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan (<i>retained earning</i>) yang akan digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan.</li> </ul>	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat No.10 tanggal 9 Maret 2018.
<p><b>Agenda ke-3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyetujui dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &amp; Surja (<i>a member firm of Ernst &amp; Young Global Limited</i>) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.</li> <li>• Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Auditor tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &amp; Surja (<i>a member firm of Ernst &amp; Young Global Limited</i>), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.</li> </ul>	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat No.10 tanggal 9 Maret 2018.
<p><b>Agenda ke-4</b> Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas benefit dan atau tunjangan lainnya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.</li> <li>• Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.</li> </ul>	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat No.10 tanggal 9 Maret 2018.



Agenda RUPS Tahunan 9 Maret 2018	Sudah/ Belum Terlaksana	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2018 Hingga Akhir Tahun 2018
<p><b>Agenda ke-5</b> Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, sejak pentutupan Rapat ini, untuk mengalihkan dan/atau menjadikan lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang atas nama Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari sumber perbankan dan penerbitan obligasi atau surat berharga, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, sebesar Rp8.000.000.000.000,- di tahun 2019. Dimana untuk setiap pengalihan dan/atau penjaminan kekayaan bersih Perseroan dengan kelipatan sebesar Rp1.000.000.000.000,-, Direksi diwajibkan membuat laporan tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan tersebut.</p>	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat No.10 tanggal 9 Maret 2018.
<p><b>Agenda ke-6</b> Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp850.000.000.000,-.</p>	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat No.10 tanggal 9 Maret 2018.
<p><b>Agenda ke-7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.</li> <li>• Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan hasil keputusan Rapat ini dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat No.10 tanggal 9 Maret 2018.
<p><b>Agenda ke-8</b> Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima pengunduran diri Bpk. Ignatius Susatyo Wijoyo dari jabatannya selaku Direktur Utama</li> <li>• Mengangkat kembali Bpk. Harjanto Tjitohardjojo sebagai Direktur Perseroan</li> <li>• Mengangkat Bpk. Arya Suprihadi sebagai Direktur Utama Perseroan</li> <li>• Mengangkat Bpk. Armendra sebagai Direktur Perseroan</li> </ul> <p>Selanjutnya terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahun Buku 2017, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama: Arya Suprihadi</li> <li>• Direktur: Harjanto Tjitohardjojo</li> <li>• Direktur: Armendra</li> </ul> <p>Masa jabatan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak penetapan pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.</p>	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat No.10 tanggal 9 Maret 2018.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## INFORMASI TENTANG HASIL KEPUTUSAN RUPS TAHUN 2017 DAN TINDAK LANJUTNYA OLEH MANAJEMEN

Di tahun 2017, Perseroan melakukan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada Kamis, 10 April 2017 di Plaza Mandiri, Jakarta. Seluruh proses penyelenggaraan RUPS, sejak pemberitahuan, penyelenggaraan RUPS, hingga

hasil risalah RUPS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil Keputusan RUPS di sepanjang tahun 2017 dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perseroan hingga akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

### INFORMASI TENTANG HASIL KEPUTUSAN RUPS TAHUN 2017 DAN TINDAK LANJUTNYA OLEH MANAJEMEN

Hasil Keputusan RUPS Tahunan 10 April 2017	Sudah/ Belum Terlaksana	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RUPS Tahunan 2017 Hingga Akhir Tahun 2018
<b>Agenda Pertama</b> Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.	✓	
<b>Agenda Kedua</b> Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.	✓	
<b>Agenda Ketiga</b> Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Punlik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	✓	
<b>Agenda Keempat</b> Persetujuan penetapan gaji bagi anggota Direksi, honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan penetapan tunjangan lainnya termasuk tantieme bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	✓	Telah terdokumentasikan dalam Berita Acara Rapat No.10 tanggal 9 Maret 2018.
<b>Agenda Kelima</b> Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari sumber perbankan dan/atau penerbitan surat berharga.	✓	
<b>Agenda Keenam</b> Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance tahap II Tahun 2016.	✓	
<b>Agenda Ketujuh</b> Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance tahap I Tahun 2016.	✓	
<b>Agenda Kedelapan</b> Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.		

✓ = sudah terlaksana | ✗ = belum terlaksana

Di tahun 2017 Perseroan hanya melakukan RUPS Tahunan dan tidak melakukan RUPS Luar Biasa.

## DEWAN KOMISARIS



Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara independen terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Perseroan serta memastikan bahwa Perseroan telah melaksanakan GCG.

### KRITERIA DAN PROSEDUR PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Kriteria Dewan Komisaris Perseroan adalah:

- a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  3. Tidak pernah dihukum karena melakukan

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
- Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris kepada RUPS; dan

- Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

## MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang ditentukan lamanya yaitu 3 (tiga) tahun.

## KOMPOSISI DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018

Anggota Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2018 berjumlah 3 (tiga) orang, dimana 1 (satu) orang diantaranya adalah Komisaris Utama, 1 (satu) orang anggota Komisaris, dan 1 (satu) anggota lainnya adalah Komisaris Independen. Dengan demikian komposisi keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mengatur bahwa:

- Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

- Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.

Di tahun 2018, tidak terdapat pergantian susunan keanggotaan Dewan Komisaris. Dengan demikian, susunan dan komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018 adalah sama.

## SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PER 31 DESEMBER 2018

Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Dasar Uji Kepatutan dan Kelayakan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Rico Adisurja Setiawan	Komisaris Utama	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 23 tanggal 26 April 2017 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta	Surat Keputusan OJK No. KEP-471/NB.11/2017 tanggal 21 Agustus 2017	RUPS Tahun 2017 - RUPS Tahun 2020	Ke-1
Harry Gale	Komisaris	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 23 tanggal 26 April 2017 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta	Surat Keputusan OJK No. KEP-484/NB.11/2017 tanggal 25 Agustus 2017	RUPS Tahun 2017 - RUPS Tahun 2020	Ke-1
Ravik Karsidi	Komisaris Independen	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 23 tanggal 26 April 2017 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta	Surat Keputusan OJK No. KEP-483/NB.11/2017 tanggal 25 Agustus 2017	RUPS Tahun 2017 - RUPS Tahun 2020	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan)

Profil seluruh anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab Profil Perseroan pada Laporan Tahunan ini.

## UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai peraturan yang diberlakukan OJK kepada industri keuangan, pihak yang mengurus lembaga keuangan diwajibkan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh OJK sebagai prasyarat berlakunya jabatan kepengurusan secara formal. Seluruh Dewan Komisaris Perseroan telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK.

Penunjukkan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan Atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Penjaminan.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## INDEPENDENSI

Dalam meminimalisasi terjadinya benturan kepentingan Dewan Komisaris tidak diperkenankan memiliki hubungan darah antara satu sama lain sampai derajat ketiga, baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, Perseroan memiliki kebijakan yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan tentang rangkap jabatan yang mengadopsi peraturan OJK. Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun.

Anggota Dewan Komisaris Perseroan juga telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 juncto Pasal 18 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

## BOARD MANUAL: PEDOMAN TATA KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman Kerja (*Board Charter*) Dewan Komisaris yang telah dibuat oleh Perseroan. Pedoman Kerja ini berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris agar menjalankan aktivitasnya secara terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami untuk mencapai visi dan misi Perseroan sehingga tercapai standar kerja yang tinggi sejalan dengan prinsip-prinsip GCG. Perseroan juga melakukan evaluasi secara terhadap Pedoman Kerja yang dimiliki guna menyesuaikan dengan dinamika demi kelangsungan Perseroan.

Perseroan telah memiliki *Board Manual* atau Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris yang telah disahkan pada tanggal 27 Agustus 2015, yang berisi petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-

masing untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dalam *Board Manual* Perseroan mencakup:

- Acuan Kebijakan
- Ruang Lingkup
- Dasar Hukum
- Prinsip Hubungan Kerja Dewan Komisaris Dengan Direksi
- Komposisi, Masa Jabatan dan Rangkap Jabatan
- Tugas, Tanggungjawab, dan Kewajiban Dewan Komisaris
- Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
- Budaya dan Etika Perilaku Dewan Komisaris
- Kerahasiaan Informasi dan Benturan Kepentingan
- Rapat Dewan Komisaris
- Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- Komite Penunjang Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris
- Sekretaris Dewan Komisaris

## TUGAS, TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

### Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris:

- 1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dengan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Memberi nasihat kepada Direksi atas jalannya pengurusan Perseroan.
- 3) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 4) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan, termasuk perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
- 5) Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- 6) Memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang diusulkan oleh Direksi dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tersebut sesuai ketentuan dengan Anggaran Dasar;
- 7) Memimpin acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 8) Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

### Kewajiban Dewan Komisaris:

- 1) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta bertindak profesional;
- 2) Melakukan kajian, mengesahkan, serta mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang telah disiapkan Direksi sesuai regulasi yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan;
- 3) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak/golongan tertentu;
- 4) Menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
- 5) Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan melaporkan kegiatan pengawasannya kepada RUPS.
- 6) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan yang bersangkutan dan Perseroan lain, termasuk setiap perubahannya.
- 7) Memberikan rekomendasi kepada RUPS atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Perseroan;
- 8) Melakukan tindak lanjut atas hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada RUPS dalam hal terjadi penyimpangan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar;
- 9) Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

10) Dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan, segera mengadakan RUPS untuk melaporkan kepada Pemegang Saham, dengan disertai saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang harus ditempuh;

11) Memantau efektivitas implementasi *Good Corporate Governance*.

Wewenang Dewan Komisaris:

- 1) Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan tertulis atas keputusan Direksi untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:
  - a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
  - b) Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 2) Memperoleh akses yang cukup atas informasi Perseroan dalam hal ini melihat bukubuku, surat berharga serta memeriksa kekayaan Perseroan.
- 3) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan/

kebijakan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.

- 4) Meminta Direksi dan/atau pejabat unit kerja lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
- 5) Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu dan memberhentikannya.
- 6) Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- 7) Membentuk komite lain selain komite audit, dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan.
- 8) Jika dianggap perlu dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris dapat menggunakan bantuan tenaga ahli untuk jangka waktu terbatas dengan beban Perseroan;
- 9) Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
- 10) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan/atau keputusan RUPS.

## PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang secara kolektif bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan

Dewan Komisaris. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

## PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Bagi Komisaris yang baru diangkat diberikan program orientasi dan pengenalan Perseroan. Penanggung jawab program ini berada pada Sekretaris Perusahaan. Materi program pengenalan mencakup:

- Anggaran Dasar Mandiri Tunas Finance
- Peraturan perundang-undangan terkait bisnis Mandiri Tunas Finance
- Laporan Tahunan Mandiri Tunas Finance
- Rencana Jangka Panjang
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
- Program Kerja Dewan Komisaris
- *Key Performance Indicator* Dewan Komisaris

Di tahun 2018 tidak terdapat pengangkatan Komisaris baru. Dengan demikian Perseroan tidak melaksanakan program pengenalan Perseroan terhadap Dewan Komisaris.

## PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Perseroan senantiasa memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia mulai dari level teratas hingga bawah sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Kebijakan mengenai program peningkatan kapabilitas bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris.
- b. Rencana untuk melakukan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
- c. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program peningkatan kapabilitas diwajibkan menyajikan presentasi kepada Anggota Dewan Komisaris lain dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.
- d. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018

Keputusan, rekomendasi, dan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

	Keputusan, Rekomendasi, dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris di tahun 2018
Kuartal I-2018 (Q1-2018)	<p>Pembiayaan baru pada Q1-2018 mencapai Rp6,6 triliun, mengalami kenaikan dibandingkan dengan Q1-2017 yaitu sebesar Rp4,6 triliun diiringi dengan kualitas yang membaik;</p> <p><i>Cost of Credit</i> dan <i>Operational Expenses</i> perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat mencapai profit yang optimal;</p> <p>Melakukan sinergi dengan Mandiri Group melalui KKB dan pembiayaan <i>Fleet</i> untuk meningkatkan <i>lending</i> yang berkualitas;</p> <p>Menurunkan <i>Cost of Fund</i> dalam rangka pencapaian target <i>Net Interest Margin</i> yang optimal;</p> <p>Melakukan kajian dan koordinasi dengan Bank Mandiri dalam rangka menjaga <i>Debt to Equity Ratio</i> tetap terkendali dengan angka maksimal 7 (tujuh) kali.</p> <p>Melakukan <i>shifting</i> ke <i>high margin product</i> untuk pencapaian <i>lending</i> dengan tetap menjaga kualitas</p>
Kuartal II-2018 (Q2-2018)	<p>Perseroan sudah mulai <i>on track</i> dalam mencapai Pembiayaan baru dimana pada Q2-2018 mencapai Rp13,41 triliun, mengalami kenaikan dibandingkan dengan Q2-2017 yaitu sebesar Rp9,75 triliun.</p> <p>Pertumbuhan pembiayaan baru tetap harus diiringi dengan kualitas yang baik sehingga meminimalisasi AR Loss yang akan terjadi.</p> <p>Melakukan sinergi dengan Mandiri Group melalui KKB dan pembiayaan <i>Fleet</i> untuk meningkatkan <i>lending</i> yang berkualitas.</p> <p>Menurunkan <i>Cost of Fund</i> dalam rangka pencapaian target <i>Net Interest Margin</i> yang optimal.</p> <p>Melakukan kajian dan koordinasi dengan Bank Mandiri dalam rangka menjaga <i>Debt to Equity Ratio</i> tetap terkendali dengan angka maksimal 7 (tujuh) kali.</p> <p>Melakukan <i>shifting</i> ke <i>high margin product</i> untuk pencapaian <i>lending</i> dengan tetap menjaga kualitas.</p> <p>Melakukan perbaikan administratif dalam rangka peningkatan <i>operational excellence</i>.</p>
Kuartal III-2018 (Q3-2018)	<p>Perseroan sudah mulai <i>on track</i> dalam mencapai Pembiayaan baru dimana pada Q3-2018 mencapai Rp20.06 triliun, mengalami kenaikan 28.9% dibandingkan dengan Q3-2017 yaitu sebesar 15.57 Triliun.</p>
Kuartal IV-2018 (Q4-2018)	<p>Mohon jaga kualitas pada pergeseran komposisi <i>lending</i> by DP, terutama pada kenaikan komposisi DP &lt; 20%, diharapkan pergeseran ini terjadi pada brand/ merk yang bagus.</p> <p>Mohon identifikasi terkait kondisi dan pangsa pasar yang ada di Palu.</p> <p><i>Review</i> dan pertimbangkan keikutsertaan asuransi gempa bagi <i>customer</i> yang terletak pada wilayah yang rawan gempa.</p> <p>Jaga pencapaian BSM OTO dan multiguna. Untuk multiguna, perlu dilakukan <i>re-engineering</i> proses, optimalisasi <i>database</i>, telemarketing, dan programnya.</p>

## **PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi beserta tanggung jawabnya dibantu oleh Komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris termasuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko. Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan efektif. Perseroan juga membentuk Komite Pemantau Risiko dengan tujuan memantau

secara berkala dan merekomendasikan perbaikan terhadap manajemen risiko yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Perseroan. Kemudian, membuat rencana kegiatan tahunan Komite Pemantau Risiko yang disetujui oleh Komisaris. Pembentukan Komite Pemantau Risiko juga ditujukan untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## KOMISARIS INDEPENDEN



**“Komposisi Komisaris Independen Perseroan terhadap jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebesar 33,33%, dan telah memenuhi peraturan terkait.”**

Komisaris Independen diperlukan sebagai salah satu instrumen pengawasan yang bersifat independen dan tidak memiliki afiliasi maupun kepentingan apapun terhadap Perseroan. Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan Perseroan yang mungkin menghalangi

atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili kepentingan pemegang saham minoritas.

Pengangkatan Komisaris Independen diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

### KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN KOMISARIS INDEPENDEN DALAM SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, komposisi Dewan Komisaris haruslah minimal 30% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Di akhir tahun 2018, Perseroan memiliki 1 (satu) Komisaris Independen.

#### KOMISARIS INDEPENDEN MANDIRI TUNAS FINANCE PER 31 DESEMBER 2018

Komisaris Independen	Periode Jabatan dan Pertama Kali Diangkat	Masa Jabatan
Ravik Karsidi	Periode ke-1, sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan	RUPS Tahun 2017 - RUPS Tahun 2020

## INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Keberadaan Komisaris Independen yang ada di Perseroan senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kriteria penentuan Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04.2014 yaitu:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
- Tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.
- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Komisaris, Direksi dan Pemegang saham Utama Perseroan.
- Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

Dengan demikian, Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### KOMISARIS INDEPENDEN MANDIRI TUNAS FINANCE PER 31 DESEMBER 2018

Komisaris Independen	Kriteria Independensi			
	Sebagai orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.	Memiliki saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung	Memiliki hubungan Afiliasi dengan Komisaris, Direksi dan Pemegang saham Utama Perseroan	Memiliki hubungan usaha dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung
Ravik Karsidi	X	X	X	X

## SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi sebagai Komisaris Independen yang menyatakan bahwa :

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau pemegang saham LJKNB yang sama; dan
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas

Syariah atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada LJKNB yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan LJKNB tersebut dalam kurun waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Independen pada tanggal 8 Mei 2017.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengelolaan atas Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

### KRITERIA DAN PERSYARATAN SERTA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan formal dan material yang berlaku. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan material bersifat khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan.

Kriteria Direksi Perseroan adalah:

- a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
    - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.



## MASA JABATAN DIREKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang ditentukan lamanya yaitu 3 (tiga) tahun.

## KOMPOSISI DAN SUSUNAN DIREKSI TAHUN 2018

Komposisi Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi, dimana seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komposisi Direksi Perseroan tahun 2018 beranggotakan 3 (tiga) Direksi, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 2 (dua) Direktur. Di sepanjang tahun 2018 terdapat pergantian keanggotaan Direksi, sesuai keputusan RUPS Tahunan 2018 tanggal 9 Maret 2018. Berikut disampaikan kronologis susunan Direksi di sepanjang tahun 2018 dan susunan Direksi per 31 Desember 2018.

### KRONOLOGIS SUSUNAN DIREKSI DI SEPANJANG TAHUN 2018

1 Januari - 9 Maret 2018	9 Maret - 31 Desember 2018	Keterangan
Ignatius Susatyo Wijoyo (Direktur Utama)		Ignatius Susatyo Wijoyo tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi sejak RUPS Tahunan 9 Maret 2018
Arya Suprihadi (Direktur)	Arya Suprihadi (Direktur Utama)	Melalui RUPS Tahunan 9 Maret 2018, Arya Suprihadi diangkat menjadi Direktur Utama
Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)	Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)	-
	Armendra (Direktur)	Armendra duduk dalam jajaran Direksi sejak RUPS Tahunan 9 Maret 2018

### SUSUNAN DIREKSI PER 31 DESEMBER 2018

Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Dasar Uji Kelayakan dan Kelayakan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Arya Suprihadi	Direktur Utama	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 42 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta	Surat Keputusan OJK No. KEP-489/NB.11/2018 tanggal 27 April 2018	RUPS Tahun 2018 - RUPS Tahun 2021	Ke-1
Harjanto Tjitohardjojo	Direktur	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 42 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Lenny Janis	Surat Keputusan OJK No. KEP-273/BL/2010 tanggal 5 JULI	RUPS Tahun 2018 - RUPS Tahun 2021	Ke-3
Armendra	Direktur	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 42 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta	Surat Keputusan OJK No. KEP-490/NB.11/2018 tanggal 27 April 2018	RUPS Tahun 2018 - RUPS Tahun 2021	Ke-1

Profil seluruh Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perseroan dalam Laporan Tahunan ini.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN DIREKSI

Sesuai peraturan yang diberlakukan OJK kepada industri keuangan, pihak yang mengurus lembaga keuangan diwajibkan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh OJK sebagai prasyarat berlakunya jabatan kepengurusan secara formal. Seluruh Direksi Perseroan telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK.

Penunjukkan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan Atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Penjaminan.

## INDEPENDENSI ANGGOTA DIREKSI

Agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Perseroan secara keseluruhan, maka independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting. Untuk menjaga independensi, maka ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Selain organ Perseroan, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam pengurusan Perseroan.
2. Direktur dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perseroan.

3. Anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
4. Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.

Anggota Direksi Perseroan juga telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 juncto Pasal 18 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

## BOARD MANUAL: PEDOMAN TATA KERJA DIREKSI

Seluruh tata cara, pedoman kerja Direksi telah ditetapkan dalam Board Manual. Pedoman ini mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan mencantumkan antara lain tanggung jawab, kewajiban, wewenang, hak, etika Direksi, serta pengaturan rapat dan tata cara hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Pedoman Kerja ini berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Direksi agar menjalankan aktivitasnya secara terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami untuk mencapai visi dan misi Perseroan sehingga

tercapai standar kerja yang tinggi sejalan dengan prinsip-prinsip GCG. Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*. Perseroan juga melakukan evaluasi secara terhadap Pedoman Kerja yang dimiliki guna menyesuaikan dengan dinamika demi kelangsungan Perseroan.

Perseroan telah memiliki *Board Manual* atau

Pedoman Tata Kerja Direksi yang telah disahkan pada tanggal 27 Agustus 2015, yang berisi petunjuk tata laksana kerja Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis,

mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, yang menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan.

## TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Direksi bertugas secara penuh menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud serta tujuan Perseroan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS. Berdasarkan Board Manual, tugas pokok Direksi secara umum dan berdasarkan jabatannya adalah sebagai berikut:

### 1. Tugas pokok Direksi:

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- b. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan- pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/ atau keputusan RUPS.
- c. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan.

### 2. Tugas pokok kolegal Direksi:

- a. Menetapkan visi, misi, dan strategi Perusahaan;
- b. Menetapkan kebijakan Perusahaan yang berlaku secara Korporat;
- c. Menetapkan usulan dan perubahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Menetapkan sasaran kinerja serta evaluasi kinerja Perseroan termasuk kebijakan dividen melalui mekanisme organisasi Perseroan

sesuai ketentuan yang berlaku;

- e. Mengupayakan tercapainya sasaran kinerja yang digunakan sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan sesuai dengan kesepakatan kinerja yang telah ditetapkan dalam "RUPS Persetujuan RKAP";
- f. Menetapkan persetujuan proyek investasi non rutin yang melebihi kewenangan Direktur dan memantau pelaksanaannya;
- g. Menetapkan struktur organisasi dan penetapan pejabat Perusahaan sampai jenjang tertentu yang diatur melalui ketetapan Direksi.

Dalam pelaksanaan kerja juga dibekali Direksi bertanggung jawab untuk:

1. Memenuhi ukuran Kinerja terpilih yang jelas, lengkap, dan berimbang, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan untuk menentukan pencapaian misi dan tujuan Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mewujudkan pelaksanaan RJPP dan RKAP, termasuk pencapaian target keuangan dan non keuangan.
3. Melaksanakan manajemen risiko.
4. Membangun dan memanfaatkan teknologi informasi.
5. Menindaklanjuti temuan-temuan audit satuan SPI dan Auditor Eksternal serta melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
6. Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Dewan Komisaris, antara lain mengenai

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

suksesi/mutasi/promosi manajer kunci (senior), program pengembangan SDM, pertanggung jawaban manajemen risiko, dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi.

7. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membuat risalah RUPS.
8. Memperhatikan kepentingan stakeholders sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Selain diberikan tugas dan tanggung jawab, Direksi juga diberikan hak dan berwenang untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dengan pengelolaan Perusahaan, termasuk kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Kebijakan-kebijakan terkait ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan aturan internal Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Direksi juga memiliki kuasa untuk mengatur masalah pendelegasian wewenang/pemberian kuasa Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

Kewajiban Direksi adalah:

1. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, menandatangani bersama dengan Komisaris, dan menyampaikannya kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.
2. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan menyampaikannya kepada Komisaris untuk dan RUPS untuk memperoleh pengesahan.
3. Menyusun dan mengimplementasikan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan termasuk pembukuan dan administrasi yang didasarkan atas pengendalian internal yang handal.
4. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan dalam laporan lainnya jika diminta oleh RUPS.
5. Menetapkan secara jelas tugas, tanggung jawab, dan wewenang manajemen pada setiap tingkatan/level.
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditandatangani bersama Komisaris kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
7. Mencantumkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain dalam Laporan Tahunan.

## RUANG LINGKUP PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Pembagian ruang lingkup tugas Direksi mengacu kepada Surat Keputusan Direksi No. 021/SK-DIR/MTF/X/2011 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang serta Tata Tertib Direksi, yakni sebagai berikut:

### ARYA SUPRIHADI (DIREKTUR UTAMA)

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan persaingan bisnis dengan mendorong bisnis unit membuat produk dengan lebih dinamis dan kompetitif.
3. Mengkoordinasikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan *Business Unit* dan *Supporting Unit* agar berjalan lancar, efektif dan efisien.
4. Mengarahkan dan mensupervisi divisi-divisi yang berada dibawahnya yaitu *Divisi Corporate Secretary*, *Divisi Risk & Account Receivable Management* dan *Divisi Internal Audit*.
5. Meningkatkan citra Perseroan dengan membina hubungan baik dengan semua *stakeholder*.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial Perseroan serta mendorong penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Perseroan.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari Direksi lainnya.

### HARJANTO TJITOHARDJOJO (DIREKTUR PENJUALAN & DISTRIBUSI)

1. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bisnis unit dalam mengembangkan dan memasarkan produk dan aliansi sehingga lebih *marketable* dan *profitable*.
2. Mengarahkan dan mensupervisi divisi-divisi yang berada dibawahnya yaitu *Divisi Marketing & Product Development*, *Divisi COP & Fleet Business*, dan mengkoordinasikan seluruh fungsi kerja di Regional 1, Regional 2, Regional 3 dan Regional 4.
3. Memimpin dan mengarahkan kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan kegiatan bisnis dan pemasaran untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
4. Membantu Direktur Utama dalam mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan persaingan bisnis dengan mendorong bisnis unit membuat produk dengan lebih dinamis dan kompetitif.

### ARMENDRA (DIREKTUR KEUANGAN, OPERASI & RISIKO)

1. Memimpin dan mengarahkan strategi bisnis, tujuan dan target financial jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Perseroan secara komprehensif.
2. Memimpin dan mengarahkan aktifitas pembukuan dan pelaporan agar memiliki sistem keuangan dengan pengawasan, kebijaksanaan dan prosedur yang tepat untuk dapat menghasilkan informasi keuangan yang tepat waktu, lengkap, konsisten, handal dan terukur.
3. Mengarahkan dan mensupervisi divisi-divisi yang berada dibawahnya yaitu *Divisi Finance & Accounting*, *Divisi Credit*, *Divisi Operation*, *Divisi Information Technology & General Affair*, dan *Divisi Human Resources Development*.
4. Membantu Direktur Utama dalam mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan persaingan bisnis dengan mendorong bisnis unit membuat produk dengan lebih dinamis dan kompetitif.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI

Program pengenalan kepada Direksi baru dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap kondisi-kondisi yang ada dalam Perseroan sehingga pejabat tersebut mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas kondisi Perseroan baik secara organisasi maupun operasional sebagaimana diatur dalam *Board Manual*. Program pengenalan perusahaan kepada Direksi yang baru diangkat dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan.

Materi yang diperkenalkan kepada Direksi baru sekurang-kurangnya mencakup informasi berikut:

1. Situasi industri keuangan Indonesia, khususnya non perbankan.
2. Profil Perseroan.
3. Operasi serta kinerja keuangan Perseroan.
4. Keorganisasian dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Di tahun 2018 Program Pengenalan Perseroan terhadap Direksi yang baru dilakukan pada tanggal 9 Maret 2018 bersamaan dengan RUPS yang digelar Perseroan.

## PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Perseroan juga merancang program untuk memberikan wawasan baru bagi Direksi untuk meningkatkan kapasitas Perseroan dalam lingkungan usaha yang kompetitif, serta memberikan kesempatan untuk membangun jaringan dalam rangka memberdayakan sumber daya yang ada dalam organisasi sehingga menjadikan Perseroan sebagai organisasi berkinerja tinggi.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penting agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang industri dimana Perseroan beroperasi dan selalu siap mengantisipasinya bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan. Kebijakan tentang program peningkatan kapabilitas bagi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi.
2. Rencana program harus dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran Direksi.
3. Direksi yang mengikuti program wajib mempresentasikan kepada Direksi lain dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.
4. Direksi yang bersangkutan membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan Kapabilitas dan disampaikan kepada Direksi lainnya.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

## LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2018

Selama tahun 2018 Direksi telah mengeluarkan berbagai keputusan baik di bidang operasional, keuangan, maupun beberapa penunjang usaha melalui perangkat kebijakan yang dimiliki Direksi. Adapun keputusan, rekomendasi, dan pelaksanaan tugas Direksi di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

	Keputusan, Rekomendasi, dan Pelaksanaan Tugas Direksi di tahun 2018
Kuartal I-2018 (Q1-2018)	<p><i>Shifting to High Margin Product</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan <i>Market Share New Car</i> 14% -&gt; 15%</li> <li>2. Multiguna</li> <li>3. P2P Lending / Fintech</li> <li>4. Remarketing Financing</li> <li>5. KI / KMK</li> </ol>
	<p>Peningkatan <i>Service Level</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan <i>Mobile Platform</i></li> <li>2. Pengembangan <i>Project Sprint</i> (Sentralisasi Proses Input)</li> <li>3. Partnership dengan <i>Online Marketplace</i></li> <li>4. <i>Centralized Service</i> (DKI Jakarta)</li> </ol>
	<p>Sinergi Mandiri Group</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan <i>Referral</i> Mandiri KKB</li> <li>2. Perluasan <i>Coverage</i> BSM OTO</li> <li>3. <i>Fleet</i> (Canvassing Nasabah BMRI)</li> </ol>
Kuartal II-2018 (Q2-2018)	<p>Melanjutkan Q1, ditambah dengan: Sinergi Mandiri Group</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan <i>Mobile Platform</i></li> <li>2. Pengembangan <i>Project Sprint</i> (Sentralisasi Proses Input)</li> <li>3. Partnership dengan <i>Online Marketplace</i></li> <li>4. <i>Centralized Service</i> (DKI Jakarta)</li> </ol>
Kuartal III-2018 (Q3-2018)	<p><i>Business Excellence</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. #1 in <i>New Car financing</i>.</li> <li>2. Penetrate <i>multipurpose financing</i> in good segment.</li> <li>3. Create <i>new business line</i></li> <li>4. Financing through <i>P2P platform</i>.</li> <li>5. Expand the <i>external online channels</i>.</li> <li>6. <i>Cross selling program</i> with Mandiri Group.</li> <li>7. Conduct <i>New Servicing Channel</i>.</li> </ol>
	<p><i>Operational Excellence</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimization in <i>mobile platform</i>.</li> <li>2. Enhancement <i>Data Processing</i></li> <li>3. Build the <i>digital scoring system</i>.</li> <li>4. Build the <i>collection scoring system</i>.</li> <li>5. Develop <i>online auction</i>.</li> <li>6. Explore <i>data mining</i> for sales &amp; customer retention.</li> <li>7. <i>Cost Efficiency awareness</i></li> </ol>
	<p><i>Service Excellence</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Integrated Business Channel</i>.</li> <li>2. Build the <i>customer experience</i>.</li> <li>3. <i>Re-engineering multipurpose and fleet business process</i>.</li> </ol>
Kuartal IV-2018 (Q4-2018)	Melanjutkan program Q3



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Selain Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal, dalam menjalankan tugas dan fungsi beserta tanggung jawabnya, Direksi juga dibantu oleh beberapa satuan kerja yang memberikan dukungan dalam hal pengelolaan bisnis Perseroan yang sesuai dengan prinsip GCG. Satuan kerja yang dimaksud adalah Komite Kredit, Komite Personalialia, dan Komite

Anti *Fraud*. Sepanjang tahun 2018, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan efektif dalam memberikan masukan-masukan, yang menjadi salah satu acuan bagi Direksi dalam mengambil kebijakan strategis.

## TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### ASSESSMENT PENERAPAN GCG UNTUK ASPEK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sebagai organ utama dalam Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran sentral dalam gerak pertumbuhan Perseroan. *Assessment* atas kedua organ ini menjadi sebuah keharusan, terutama karena Perseroan merupakan anak usaha dari BUMN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diarahkan untuk menerapkan prinsip GCG pada standar BUMN sekaligus penilaian terhadap penerapan tersebut.

Sekilas uraian dasar penilaian dan metode penilaian

Jenis Penilaian	: <i>self assesment</i>
Assessor/Penilai	: Internal Perseroan
Periode Penerapan	: 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017
Tahun Ukur	: Tahun Buku 2017

No.	Parameter	Indikator	Skor
2	<b>Dewan Komisaris</b>		
	Struktur Tata Kelola	1	1
		2	2
		3	3
	Proses Tata Kelola	1	1
		2	1
		3	1
		4	1
	Hasil Tata Kelola	1	1
		2	1
		3	1
	Rata-Rata Nilai		1,30

### HASIL ASSESSMENT PENERAPAN GCG ASPEK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN BUKU 2017

No.	Parameter	Indikator	Skor
1	<b>Direksi</b>		
	Struktur Tata Kelola	1	1
		2	1
		3	1
	Proses Tata Kelola	1	1
		2	2
		3	2
		4	1
	Hasil Tata Kelola	1	1
		2	2
	Rata-Rata Nilai		1,33

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### PROSEDUR PENGUSULAN HINGGA PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Perseroan.

Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan basis formula yang

ditetapkan oleh pemegang saham melalui RUPS dan telah melalui kajian oleh Dewan Komisaris dan Komite Nominasi & Remunerasi melalui pendalaman yang dilakukan oleh pemegang saham. Keputusan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS.

#### SKEMA PROSEDUR PENGUSULAN HINGGA PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI



## STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Komponen penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas, serta Tantiem/Insentif Kinerja sebagai bonus kerja. Berikut struktur remunerasi dan komponennya bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat disampaikan:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris	Struktur Remunerasi Direksi
<p><b>Honorarium Dewan Komisaris*</b> Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama</li> <li>Perhitungan gaji Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama</li> </ul>	<p><b>Gaji Direksi*</b> Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal pemegang saham.</li> <li>Gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan sebesar 90% dari Gaji Direktur Utama.</li> <li>RUPS dapat menetapkan Faktor Besaran Jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi serta kemampuan Perseroan.</li> </ul>
<p><b>Tunjangan Dewan Komisaris</b> Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Komisaris selain Honorarium, yang dapat berupa:</p>	<p><b>Tunjangan Direksi</b> Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi selain Gaji, yang dapat berupa:</p>
<p><b>Fasilitas Dewan Komisaris</b> Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas/Asuransi Kesehatan</li> <li>Fasilitas Bantuan Hukum</li> </ul>	<p><b>Fasilitas Direksi</b> Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas/Asuransi Kesehatan</li> <li>Fasilitas Bantuan Hukum</li> </ul>
<p><b>Tantiem/Insentif Kinerja Dewan Komisaris</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.</li> <li>Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris.</li> </ul>	<p><b>Tantiem Direksi</b> Tantiem diberikan sebagai tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive/LTI</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tantiem, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Direksi apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.</li> <li>Insentif Kinerja, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.</li> </ul>
Santunan Purna Jabatan	Santunan Purna Jabatan

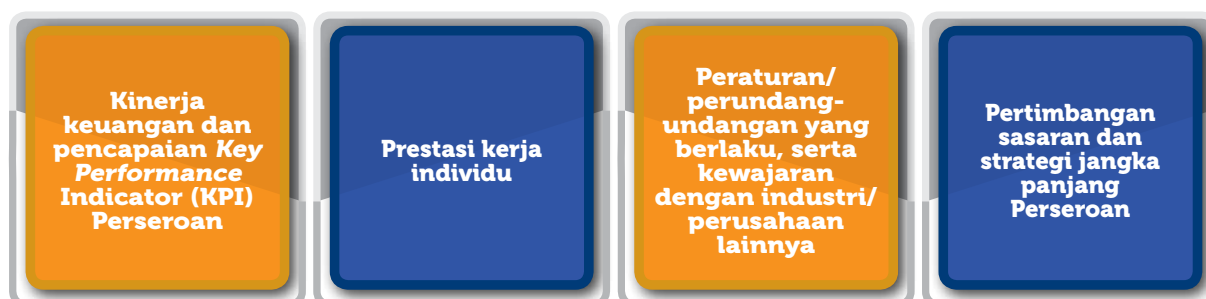
Di luar komponen di atas, Perseroan tidak memberikan remunerasi dalam bentuk lainnya, termasuk opsi saham (Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham bagi manajemen)

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## KEBIJAKAN DASAR TERKAIT INDIKATOR DAN PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2018

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perusahaan.

### ASPEK KAJIAN PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI



Hasil kajian tersebut sebagai bahan usulan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemegang Saham. Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Berdasarkan Pasal 96 ayat (2) kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris menentukan dasar penetapan remunerasi bagi Direksi berbasis metode *balance scorecard* dengan menggunakan parameter yang telah ditentukan. Penilaian kinerja Direksi selama tahun 2018 dilakukan berdasarkan metode *balance scorecard* dengan menggunakan parameter sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu meliputi pencapaian target angka-angka keuangan seperti volume pembiayaan, profitabilitas, pembiayaan *joint financing*, *cost efficiency ratio*, *cost of credit* dan piutang pembiayaan bermasalah.
2. Penyempurnaan dan pengembangan proses bisnis pembiayaan, meliputi antara lain proses kredit, proses operasional, proses pemasaran, dan proses *collection*.
3. Perluasan jaringan usaha dan peningkatan kerjasama aliansi.
4. Strategis dengan *Group* serta pengembangan kerjasama dengan *dealer* dan *showroom*.
5. Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan *corporate branding*.

## TRANSPARANSI REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2018

Informasi jumlah nominal remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

### PERHITUNGAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2018 (PERHITUNGAN SELAMA 1 TAHUN PENUH)

Komponen Remunerasi	Jabatan	
	Dewan Komisaris (3 posisi/jabatan)	Direksi (3 posisi/jabatan)
Gaji/Honorarium	Rp 1.909.800.000	Rp 5.223.548.387
Tunjangan	Rp 1.525.912.400	Rp 6.194.273.088
Asuransi Kesehatan	Rp 17.537.522	Rp 81.857.676
Jamsostek	-	Rp 937.383.266
Bonus/Tantiem	Rp 1.552.659.472	Rp 5.017.600.000
Tunjangan Hari Raya	Rp 175.120.000	Rp 471.960.000

### JUMLAH REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2018

Uraian	Jumlah
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris	Rp 5.181.029.394
Jumlah Remunerasi Direksi	Rp 17.926.622.417
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2018	Rp 23.107.651.811

## INFORMASI TENTANG RASIO GAJI

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
- 2) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan

terendah;

- 3) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
- 4) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

Informasi mengenai rasio gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan adalah sebagai berikut:

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Perbandingan	2018
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1 : 1,11
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1 : 2,11
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi	1 : 1,40
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1 : 72,01



## RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mengadakan rapat dan pertemuan baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat bersama Direksi serta komite-komite. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat internal dan rapat dengan mengundang

Direksi untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial Perseroan.

Di tahun 2018, Dewan Komisaris mengadakan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat-rapat tersebut.

### RISALAH RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS

Tanggal Rapat	Tempat	Agenda Rapat
28 Maret 2018	Jakarta	Menindaklanjuti hasil telaah produk Perseroan
25 April 2018	Jakarta	Membahas Corporate Plan
28 Mei 2018	Jakarta	Memberi arahan untuk Direksi mengenai <i>performance</i> cabang
31 Juli 2018	Jakarta	Membahas <i>performance</i> Perseroan
28 Agustus 2018	Jakarta	Memberikan arahan kepada Direksi perihal Financial <i>Performance</i>
26 September 2018	Jakarta	Menindaklanjuti arahan dari Komite Pemantau Resiko
29 Oktober 2018	Jakarta	Membahas RKAP 2019
14 Desember 2018	Jakarta	Membahas evaluasi hasil audit tahun buku 2018

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Internal Dewan Komisaris dapat dilihat di bawah ini:

#### REKAPITULASI KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS PADA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	8	8	100,00%
Harry Gale (Komisaris)	8	6	75,00%
Ravik Karsidi (Komisaris Independen)	8	8	100,00%
Rata-rata			91,67%

#### RAPAT DIREKSI

Direksi mengadakan rapat dan pertemuan baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat bersama Direksi maupun bersama Dewan Komisaris yang diagendakan secara berkala setiap tahunnya untuk menindaklanjuti berbagai pembahasan terkait rencana dan evaluasi kinerja bisnis. Rapat Direksi juga bisa dilaksanakan diluar yang diagendakan dan ditetapkan jika terdapat hal-hal yang luar biasa serta mendesak.

Mekanisme pengambilan keputusan rapat yang dilaksanakan Direksi mengacu pada Pedoman Kerja. Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan

musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak. Rapat Direksi terdiri dari rapat internal dan rapat dengan mengundang Direksi untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial Perseroan.

Di sepanjang tahun 2018, Direksi melaksanakan rapat sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

#### RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Tanggal Rapat	Tempat	Agenda Rapat
8 Januari 2018	Jakarta	1. Pembagian strategi wilayah 2. Pembagian cabang wilayah Jakarta
15 Januari 2018	Jakarta	1. <i>Update</i> rencana audit dan hasil audit 2. Pembahasan evaluasi kelas cabang
29 Januari 2018	Jakarta	1. Pembahasan hasil audit setiap cabang 2. Pembahasan <i>Asset &amp; Liability Committee</i>
5 Februari 2018	Jakarta	1. Pembahasan ketentuan <i>Project Management</i> 2. <i>Update Project Peer to Peer Lending</i>

Tanggal Rapat	Tempat	Agenda Rapat
19 Februari 2018	Jakarta	1. Pembahasan Materi <i>Board Forum</i> Q4 2017 2. Pembahasan Hasil Audit Tahun Buku 2017
26 Februari 2018	Jakarta	1. <i>Update progress project</i> DPO 2. Pembahasan program <i>DF Prepayment</i>
5 Maret 2018	Jakarta	1. Pelaksanaan <i>customer</i> dan <i>dealer</i> research 2. Persiapan RUPS Tahunan
19 Maret 2018	Jakarta	1. <i>Update progress</i> Koperasi 2. Pembahasan <i>Asset &amp; Liability Committee</i>
26 Maret 2018	Jakarta	1. <i>Update</i> Struktur Organisasi Perseroan 2. Pembahasan hasil audit bulan Februari
27 Maret 2018	Jakarta	1. <i>Financial Performance</i>
2 April 2018	Jakarta	1. Pembahasan pembiayaan <i>merchant online</i> 2. Pembahasan kalender 2019
16 April 2018	Jakarta	1. Pembahasan <i>Crash Reward Program Hospital in Car</i> 2. <i>Update</i> pembiayaan Merchant Online
23 April 2018	Jakarta	1. Pembahasan <i>Asset &amp; Liability Committee</i> 2. Pembahasan Hasil Audit bulan Maret
30 April 2018	Jakarta	1. Merevisi RKAP 2018 2. Pembahasan Materi <i>Board Forum</i> Q1
11 Mei 2018	Jakarta	1. Pembahasan penurunan <i>rate commercial car</i> 2. Pembahasan ekosistem digital
14 Mei 2018	Jakarta	1. Pembahasan <i>project service center</i> 2. Pembahasan hasil <i>review project</i>
21 Mei 2018	Jakarta	1. Pembahasan tindak lanjut hasil audit bulan April 2. Pembahasan <i>Asset &amp; Liability Committee</i>
28 Mei 2018	Jakarta	1. Pembahasan <i>project I Care &amp; Psikometrik</i> 2. <i>Update Dealer</i> Financing Prepayment
4 Juni 2018	Jakarta	1. <i>Update</i> perbaikan fidusia 2. <i>Update project regional unit control</i>
11 Juni 2018	Jakarta	1. Pembahasan hasil <i>customer &amp; dealer</i> research 2. Pembahasan <i>employee gathering &amp; leadership forum</i>
26 Juni 2018	Jakarta	1. Pembahasan <i>human capital integrated system</i> 2. Pembahasan hasil Audit bulan Mei
9 Juli 2018	Jakarta	1. <i>Update I Care</i> 2. Persiapan <i>leadership forum</i> 2018
16 Juli 2018	Jakarta	1. Pembahasan <i>progress leadership forum</i> 2018 2. <i>Mereview performance</i> EPD Semester 1-2018
23 Juli 2018	Jakarta	1. Pembahasan <i>Performance Regional</i> 2
30 Juli 2018	Jakarta	1. Pembahasan produk dan program KMK 2. Persetujuan RAB GIIAS

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggal Rapat	Tempat	Agenda Rapat
6 Agustus 2018	Jakarta	1. <i>Update project</i> koperasi 2. Pembahasan keputusan gedung centralized service
13 Agustus 2018	Jakarta	1. Pembahasan <i>project management</i> 2. Pembahasan Hasil Audit bulan Juli
20 Agustus 2018	Jakarta	1. Pembahasan Employee Gathering 2. Pembahasan Quick Win terkait denda
27 Agustus 2018	Jakarta	1. Pembahasan <i>project sales expense</i> 2. Pembahasan program tematik "Hari Pelanggan Nasional"
3 September 2018	Jakarta	1. <i>Report presentation exhibition effectivity study : GIIAS 2018</i> 2. Pembahasan hari pelanggan
10 September 2018	Jakarta	1. Pembahasan skema insentif
24 September 2018	Jakarta	1. Pembahasan <i>Asset &amp; Liability Committee</i> 2. Pembahasan hasil audit bulan Agustus
1 Oktober 2018	Jakarta	1. Pembahasan produk dan program tematik bulan Oktober 2. Pembahasan <i>Customer Perseroan</i>
8 Oktober 2018	Jakarta	1. <i>Update progress sprint</i>
22 Oktober 2018	Jakarta	1. <i>Mereview performance BSM Oto</i> 2. Pembahasan hasil audit Bank Mandiri
29 Oktober 2018	Jakarta	1. Pembahasan <i>Asset &amp; Liability Committee</i> 2. Pembahasan hasil Audit bulan September
5 November 2018	Jakarta	1. Pembahasan Struktur Organisasi Perseroan 2. Pembahasan <i>Corporate Plan</i>
12 November 2018	Jakarta	1. Membut perencanaan penerapan ISO
19 November 2018	Jakarta	1. Pembahasan <i>Asset &amp; Liability Committee</i> 2. Pembahasan proyeksi akhir tahun
26 November 2018	Jakarta	1. Pembahasan hasil audit bulan Oktober 2. Pembahasan Audit Rating
3 Desember 2018	Jakarta	1. <i>Update MTF Lounge</i> 2. Pembahasan implementasi single target 2019
17 Desember 2018	Jakarta	1. Pembahasan <i>grading dealer</i> 2. Pembahasan hasil riset <i>repeat order</i>
20 Desember 2018	Jakarta	1. <i>Mereview budget Perseroan 2019</i> 2. <i>Update hasil penilaian Standard Service periode 2018</i>

Rekapitulasi kehadiran Direksi pada Rapat Direksi dapat dilihat di bawah ini

#### REKAPITULASI KEHADIRAN DIREKSI PADA RAPAT DIREKSI

Dewan Direksi	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Arya Suprihadi (Direktur Utama)	43	40	93,02%
Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)	43	37	86,05%
Armendra (Direktur)*	36	33	91,67%
Bonifatius Perana Citra Ketaren (Deputi Direktur)	43	39	90,70%
Albertus Henditrianto (Deputi Direktur)	43	37	86,05%
William Francis Indra (Deputi Direktur)	43	40	93,02%
Rata-rata			90,04%

\*) Armendra merupakan jajaran Direksi Perseroan yang baru, dan mulai mengikuti rapat pada tanggal 19 Maret 2018.

#### RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Untuk menyatukan pandangan dan memutuskan suatupersoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan operasional Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi mengagendakan pertemuan berkala dalam forum Rapat Gabungan Dewan Komisaris-Direksi. Penyelenggara rapat berkala ini dilakukan oleh Dewan Komisaris guna membahas berbagai agenda menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Rapat ini merupakan bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam risalah rapat. Keputusan rapat dibuat berdasarkan azas musyawarah untuk

mufakat atau diambil berdasarkan suara terbanyak serta mengikat untuk dilaksanakan tindak lanjutnya. Pada proses pengambilan suara, jika ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan, tidak boleh ikut memberikan suara dan keterangan mengenai hal ini dicatat pada risalah rapat.

Di tahun 2018, rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan 8 (delapan) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## RISALAH RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SERTA KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PADA RAPAT GABUNGAN

Tanggal Rapat	Tempat	Agenda Rapat
28 Maret 2018	Jakarta	Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
25 April 2018	Jakarta	<i>Performance</i> 99 Cabang Perseroan
28 Mei 2018	Jakarta	Menindaklanjuti Temuan Hasil Audit Internal Perseroan
31 Juli 2018	Jakarta	Laporan Keuangan Tengan Tahunan Perseroan
28 Agustus 2018	Jakarta	<i>Mereview</i> Kondisi Pasar dan <i>Market Share</i>
26 September 2018	Jakarta	Dampak bencana alam gempa bumi dan tsunami di Lombok dan sekitarnya terhadap kantor cabang Perseroan
29 Oktober 2018	Jakarta	Laporan Keuangan <i>Quarter</i> 3
14 Desember 2018	Jakarta	Dampak bencana alam gempa bumi dan tsunami di Palu serta mitigasi resiko pembiayaan untuk wilayah gempa

Rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan dapat dilihat di bawah ini:

### REKAPITULASI KEHADIRAN DIREKSI PADA RAPAT DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
<b>DEWAN KOMISARIS</b>			
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	8	8	100,00%
Harry Gale (Komisaris)	8	6	75,00%
Ravik Karsidi (Komisaris Independen)	8	8	100,00%
<b>DIREKSI</b>			
Arya Suprihadi (Direktur Utama)	8	8	100,00%
Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)	8	8	100,00%
Armendra (Direktur)*	8	7	87,50%
Bonifatius Perana Citra Ketaren (Deputi Direktur)	8	6	75,00%
Albertus Henditrianto (Deputi Direktur)	8	6	75,00%
William Francis Indra (Deputi Direktur)	8	7	87,50%
Rata-rata			88,89%

\*) Armendra merupakan jajaran Direksi Perseroan yang baru, dan mulai mengikuti rapat pada tanggal 19 Maret 2018

## PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

### INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI

Pemegang Saham adalah badan hukum yang secara sah memiliki saham Perseroan. Pemegang Saham Perseroan terdiri dari Pemegang Saham Utama/Pengendali dan Pemegang Saham lainnya

(pendiri). Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang memiliki saham Perseroan sebanyak 51,00%.

### PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI

Pemegang Saham Utama/Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan antara lain tanggung jawab, kewajiban, wewenang, dan hak masing-masing.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda. Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Utama/Pengendali dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

#### REKAPITULASI KEHADIRAN DIREKSI PADA RAPAT DIREKSI

Keterangan	Hubungan Afiliasi		
	Dewan Komisaris	Direksi	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemegang Saham Utama/Pengendali)
<b>DEWAN KOMISARIS</b>			
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	X	X	X
Harry Gale (Komisaris)	X	X	✓
Ravik Karsidi (Komisaris Independen)	X	X	X
<b>DIREKSI</b>			
Arya Suprihadi (Direktur Utama)	X	X	X
Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)	X	X	X
Armendra (Direktur)*	X	X	X

✓ = terdapat adanya hubungan | X = tidak terdapat adanya hubungan



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Komisaris Harry Gale memiliki hubungan afiliasi melalui rangkap jabatan sebagai *Group Head of Consumer Loans Group* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016 - 2018), dan RCEO Jawa 1 Bank Mandiri (2018 – sekarang). Rangkap jabatan ini sebagai

bagian dari representasi manajerial kelompok usaha Bank Mandiri. Komisaris Harry Gale telah lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh OJK melalui Surat Keputusan OJK No. KEP-484/NB.11/2017 tanggal 25 Agustus 2017.

## PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mematuhi ketentuan Pasal 24 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mengatur bahwa:

- Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain, dan anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Untuk Direksi, Anggota Direksi Perseroan tidak merangkap jabatan kecuali terhadap ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu bahwa anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

- Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

Berikut disampaikan transparansi rangkap jabatan yang dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan per 31 Desember 2018.

Keterangan	Kepengurusan pada Perusahaan Lain		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris	Sebagai Anggota Direksi	Jabatan Lainnya
<b>DEWAN KOMISARIS</b>			
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	✓	✓	✗
Harry Gale (Komisaris)	✗	✗	✓
Ravik Karsidi (Komisaris Independen)	✗	✗	✗
<b>DIREKSI</b>			
Arya Suprihadi (Direktur Utama)	✗	✗	✗
Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)	✗	✗	✗
Armendra (Direktur)*	✗	✗	✗

✓ = ada | ✗ = tidak ada

#### PENJELASAN TERKAIT KEPENGURUSAN PADA PERUSAHAAN LAIN

Nama dan Jabatan	Jabatan pada Perusahaan Lain
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama PT Tunas Dwipa Matra (2013 - sekarang),</li> <li>• Komisaris Utama PT Asia Surya Perkasa (2015 – sekarang)</li> <li>• Komisaris PT Rahardja Ekalancar (2010 – sekarang)</li> <li>• Direktur Utama PT Tunas Mobilindo Parama (1997 – sekarang)</li> <li>• Direktur Utama PT Tunas Asset Sarana (2005 – sekarang)</li> <li>• Direktur Utama PT Surya Mobil Megahtama (2005 – sekarang)</li> <li>• Direktur Utama TURI (2010 – sekarang)</li> <li>• Direktur Utama PT Tunas Mobilindo Perkasa (2017 – sekarang)</li> <li>• Direktur PT Surya Sudeco (2005– sekarang)</li> </ul>
Harry Gale (Komisaris)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Senior Vice President Consumer Loans Group</i> Bank Mandiri (2016 – 2018)</li> <li>• RCEO Jawa 1 Bank Mandiri (2018 – sekarang)</li> </ul>

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan perusahaan lainnya senantiasa diungkapkan secara berkala melalui daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyampaikan keterbukaan transaksi pembelian dan penjualan surat berharga kepada OJK paling lambat 10 hari

sejak terjadinya transaksi. Berikut disampaikan transparansi kepemilikan saham Perseroan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, dan kepemilikan saham perusahaan lain di atas 5% oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan.

### KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keterangan	Kepemilikan Saham	
	Mandiri Tunas Finance	Perusahaan Lain > 5%
<b>DEWAN KOMISARIS</b>		
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	- Nihil -	-
Harry Gale (Komisaris)	- Nihil -	-
Ravik Karsidi (Komisaris Independen)	- Nihil -	-
<b>DIREKSI</b>		
Arya Suprihadi (Direktur Utama)	- Nihil -	-
Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)	- Nihil -	-
Armendra (Direktur)*	- Nihil -	-

Perseroan tidak memiliki program maupun kebijakan kepemilikan saham baik oleh manajemen maupun karyawan. Dengan demikian, tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh manajemen atau karyawan.

## ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

### KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit untuk mendukung pelaksanaan GCG di lingkup Perseroan. Dalam pelaksanaannya, Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi dalam mengelola Perseroan sesuai dengan prinsip tata kelola perseroan yang baik meliputi untuk memberikan pendapat dan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya termasuk pengawasan terhadap sistem dan proses Pelaporan Keuangan, proses audit atas laporan Keuangan Perusahaan, evaluasi atas pelaksanaan pengawasan internal (*internal control*) Perusahaan, evaluasi atas kinerja Internal Auditor Perusahaan, dan pengawasan kinerja teknis dan operasional serta pemenuhan ketentuan dan peraturan perundang undangan lainnya.

Seluruh anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada pemegang saham. Komite Audit dibentuk dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Secara umum Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha Perseroan dalam melaksanakan fungsi oversightnya terutama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal atas pengelolaan perseroan, dan ketaatan terhadap undang-undang serta peraturan yang berlaku. Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan perseroan, terutama dalam hal:

- Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perseroan.
- Mengawasi kualifikasi dan kemandirian fungsi internal dan eksternal audit untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit.
- Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk kepatuhan perseroan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

### KUALIFIKASI MENJADI ANGGOTA KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit harus memahami kegiatan usaha Perseroan dan memiliki integritas yang tinggi, memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Anggota

Komite Audit juga wajib memahami laporan keuangan, proses audit, manajemen risiko, dan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Kriteria menjadi anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
  - b. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
  - c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
  - d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
  - e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada perseroan
- f. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris kecuali Komisaris Independen.
  - g. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perseroan.
  - h. Tidak mempunyai:
    - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama perseroan, dan atau
    - hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

## MASA JABATAN

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Penggantian anggota Komite Audit dapat dilakukan secara bertahap dan/ atau tidak bersamaan. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan calon pengganti, honorarium, dan tunjangan anggota Komite Audit

jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, penggantian bertahap/ tidak bersamaan, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

## SUSUNAN DAN KOMPOSISI ANGGOTA KOMITE AUDIT TAHUN 2018

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang komisaris independen dan 2 (dua) orang anggota. Ketua Komite Audit

adalah salah seorang anggota komite audit yang merupakan Komisaris Independen Perseroan. Anggota Komite Audit adalah tenaga ahli yang

bukan merupakan pegawai Perseroan dan tidak mempunyai keterkaitan finansial dengan Perseroan.

Susunan dan komposisi Komite Audit Perseroan di tahun 2018 tidak mengalami perubahan. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor POJK 55/

POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.KEP.KOM/002/2017 tertanggal 10 April 2017, berikut disampaikan susunan keanggotaan Komite Audit per 31 Desember 2018.

#### SUSUNAN KOMITE AUDIT PER 31 DESEMBER 2018

NAMA	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Ravik Karsidi	Ketua Komite Audit/Komisaris Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/002/2017 tentang Pengangkatan Komite Audit	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen	
Irene Yudhistira Junarso	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/002/2017 tentang Pengangkatan Komite Audit	10 April 2017 – 10 April 2020	Ke-1
Allen Situngkir	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/002/2017 tentang Pengangkatan Komite Audit	10 April 2017 – 10 April 2020	Ke-1

#### PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT



##### **RAVIK KARSIDI**

Ketua Komite Audit/Komisaris Independens

Profil Ketua Komite Audit Ravik Karsidi dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

**TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

**IRENE YUDHISTIRA JUNARSO**

Anggota Komite Audit

**PERIODE JABATAN**

Periode Jabatan 10 April 2017 - 10 April 2020, Periode Ke-1

**DATA PRIBADI**

Warga negara Indonesia

Usia 52 tahun.

Kelahiran Jakarta 1966

**DOMISILI**

DKI JAKARTA

**PENDIDIKAN**

Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara

**PENGALAMAN KERJA**

Beliau memulai karirnya di Kantor Akuntan Prasetyo Utomo (saat ini Ernst & Young) sebagai *Senior Auditor* (1987 – 1990). Usai dari sana karir beliau semakin cemerlang dengan menjabat berbagai posisi penting di PT Bank Bali Group –  *Holding Company* (1990 – 2002). Beliau juga pernah menjabat sebagai *President Director* sekaligus Pemegang saham di PT Grahaniaga Anugerah (2002 - 2008 & 2013 – 2016), *Associate Director – Commercial Sales Director* di PT Jones Lang Lasalle Indonesia (Procon) (2008-2013), *GM Property Management* Mangga Dua Square di PT Mandiri Dipta Cipta (2004 – 2005), *Finance & Administration Director* di PT Asuransi Sarjaya – General Insurance (1999 – 2002), *President Director* di PT Bali Tunas Finance (1998 – 1999), *Director, Building Management* di PT Yacolt Graha (1996 – 1998). Saat ini beliau tercatat masih menjabat sebagai *Director of Investment & Business Development* di PT Nai Indonesia.

**ALLEN SITUNGKIR**

Anggota Komite Audit

**PERIODE JABATAN**

Periode Jabatan 10 April 2017 - 10 April 2020, Periode Ke-1

**DATA PRIBADI**

Warga negara Indonesia

Usia 62 tahun.

Kelahiran Samosir, 1959

**DOMISILI**

Jakarta Indonesia

**PENDIDIKAN**

Sarjana Muda (D3) dari Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta (1983)





## PENGALAMAN KERJA

Kepala Cabang Bekasi di PT Cakrawala Mitra Bersama (cash management) (2015), beberapa jabatan penting hingga terakhir sebagai Assistant Vice President di Bank Mandiri (1998 – 2015), juga beberapa jabatan Kepala Bagian di Bank Ekspor Impor Indonesia, Bandar Lampung (1994 – 1998). Memulai karirnya di Bank Ekspor Impor Indonesia, Kantor Pusat Jakarta sebagai Senior Clerk – Assistant Auditor (1984 – 1993).

## INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Seluruh anggota Komite Audit merupakan pribadi yang profesional dan tidak memiliki hubungan dengan Perseroan guna menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas, dan tanggung jawabnya. Komite Audit yang dibentuk Perseroan telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman, dan integritas. Komite Audit juga tidak terkait dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun pemegang saham. Komite Audit berasal dari luar

perusahaan yang tidak memiliki kepentingan/latar kaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan (Conflict of Interest) dengan Perseroan. Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada ketentuan/hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Perseroan. Transparansi independensi Komite Audit terlihat dalam tabel berikut:

### TRANSPARANSI INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Aspek Independensi	Ravik Karsidi	Irene Yudhistira Junarso	Allen Situngkir
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	X	X	X
Memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan ataupun di perusahaan afiliasi	X	X	X
Memiliki saham Perseroan	X	X	X
Memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan sesama anggota komite	X	X	X
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	X	X	X
Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat Pemerintah Daerah	X	X	X

✓ = ada | X = tidak ada

## KONFLIK DAN KODE ETIK

Komite Audit berkomitmen pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik yakni, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan

kewajaran untuk menghindari timbulnya konflik kepentingan. Sementara, dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit berpegang teguh pada

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Komite Audit maupun kode etik profesi Komite Audit.

Untuk menghindari timbulnya konflik, Komite Audit berpegang teguh pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan

kewajaran/fairness.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit Perseroan berpegang teguh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Komite Audit, maupun kode etik profesi Komite Audit.

## PEDOMAN KERJA: PIAGAM KOMITE AUDIT

Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha Perseroan, serta memberikan landasan dan pedoman bagi Komite Audit dalam membantu tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi oversightnya terutama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal atas pengelolaan Perseroan, dan ketaatan terhadap undang-undang serta peraturan yang berlaku, maka dengan ini ditetapkan Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit disusun berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Piagam Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris di Jakarta pada 25 September 2013, merupakan dokumen tertulis yang mengatur terutama mengenai kedudukan, keanggotaan, kewenangan, tugas, dan tanggungjawab Komite Audit. Piagam ini juga memberikan batasan dan mengatur tata hubungan kerja antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal.

## TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN KOMITE AUDIT

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris yang digunakan sebagai pedoman dan tata tertib kerja anggota Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap

laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh internal maupun external audit.

- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern perusahaan serta pelaksanaannya.
- e. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang dalam lingkup tugas dan kewajiban Komite Audit.
- g. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit berpedoman kepada Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 25 September 2013.

Sementara dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris meliputi:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh internal maupun external audit.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perseroan.
- Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern

perusahaan serta pelaksanaannya.

- Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
- Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang dalam lingkup tugas dan kewajiban Komite Audit.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas.

Selain tugas dan tanggung jawab, Komite Audit juga diberikan wewenang khusus untuk mendukung pelaksanaan kerja yang sesuai dengan Piagam Komite Audit. Wewenang tersebut meliputi:

- Anggota Komite Audit wajib mengenal serta memahami peran dan tanggung jawab sesuai dengan Piagam Komite Audit, yang merupakan Pedoman Kerja Komite Audit.
- Komite Audit menerima otoritas dan penugasan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan yang terkait dengan pasar modal.
- Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, *asset* serta sumber daya perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- Komite Audit berdasarkan surat tugas dari komisaris, memiliki hak akses atas informasi yang ada di perseroan dari direksi, internal audit dan semua satuan organisasi perseroan bila terjadi kasus/indikasi penyimpangan dimana komite audit perlu meneliti atau mengklarifikasi kasus-kasus tersebut.
- Komite Audit dengan persetujuan komisaris dapat meminta saran dan bantuan dari tenaga ahli dan profesional lain atas beban Perseroan.

## HUBUNGAN KERJA KOMITE AUDIT



Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berkomunikasi dengan auditor eksternal, auditor internal dan manajemen Perseroan. Peran Komite Audit dalam hubungannya dengan eksternal auditor adalah:

- a. Melakukan *review* atas pekerjaan eksternal auditor.
- b. Membahas hasil audit dengan eksternal auditor.
- c. Apabila diperlukan, Komite Audit dapat melakukan pembahasan atas hasil audit dengan manajemen, eksternal auditor dan internal auditor.
- d. Melakukan *review* kinerja eksternal auditor untuk memastikan kepatuhan eksternal auditor terhadap standar profesional yang berlaku, termasuk independensi eksternal auditor

Peran Komite Audit dalam hubungan dengan Internal Audit adalah:

- a. Menerima dan mereview laporan auditor internal.
- b. Memonitor tindak lanjut hasil internal audit.
- c. Meminta internal audit untuk melakukan pemeriksaan khusus/tertentu dengan izin dari Dewan Komisaris.
- d. Memberi masukan mengenai isi *Internal Audit Charter*/Piagam Internal Audit.

- e. Berkoordinasi dengan internal audit dan eksternal audit sehingga dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.
- f. Mengkaji laporan internal audit yang berkaitan dengan benturan kepentingan, dan atau perbuatan melanggar hukum.

Sementara peran Komite Audit dalam hubungannya dengan Manajemen Perseroan adalah:

- a. Mengevaluasi kecukupan pengungkapan hal-hal yang bersifat material dalam Laporan Keuangan perseroan.
- b. Menilai kecukupan pengendalian intern dan kebijakan manajemen risiko perseroan.
- c. Menilai kebijakan perseroan berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan internal maupun eksternal perseroan yang berlaku, kode etik (*code of conduct*) dan benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- d. Memastikan bahwa manajemen perseroan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi dari internal audit dan eksternal audit.
- e. Mengidentifikasi dan memantau permasalahan yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris.
- f. Mengundang manajemen perseroan untuk hadir dalam rapat komite audit apabila diperlukan.

## LAPORAN

Komite Audit berkewajiban membuat laporan secara tertulis dalam melaksanakan kerjanya baik terhadap Dewan Komisaris maupun terkait temuan terkait kendala yang dihadapi oleh Perseroan.

- Komite Audit membuat laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- Apabila Komite Audit menemukan hal-hal yang diperkirakan akan mengganggu kegiatan perseroan dan bersifat material Komite Audit akan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
- Komite Audit membuat Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Audit dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Audit. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Audit.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Anggota Komite Audit di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

## RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit melaksanakan rapat secara berkala baik dengan internal anggota maupun dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat yang dilaksanakan oleh Komite Audit yakni:

- Rapat Komite Audit Triwulanan dilaksanakan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan jadwal yang ditentukan, dan fokus pada pembahasan Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi) dan Kinerja Perseroan Triwulan.
- Rapat Bulanan Komite Audit dilakukan sekali pada setiap bulan apabila diperlukan, dengan agenda rapat yang telah disepakati sebelumnya. Rapat bulanan tidak diadakan di bulan dimana diadakan rapat triwulanan. Fokus rapat bulanan adalah pada pembahasan hasil General Audit Internal.
- Ketua Komite Audit dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Internal Auditor, Eksternal Auditor, Wakil Pemegang Saham dan pihak lain yang diperlukan untuk hadir dalam rapat.
- Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan Risalah Rapat didistribusikan kepada seluruh peserta rapat untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut.
- Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diperlukan.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Di tahun 2018, Komite Audit melakukan 8 (delapan) kali rapat, dengan risalah dan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut.

#### RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Tanggal Rapat	Tempat	Agenda Rapat
28 Maret 2018	Graha Mandiri, Jakarta	Melakukan pembinaan dan control terhadap temuan berulang
25 April 2018	Graha Mandiri, Jakarta	Memberikan arahan untuk Divisi Internal Audit dalam membentuk fungsi yang melakukan control terhadap operasional di cabang
28 Mei 2018	Graha Mandiri, Jakarta	Memonitor komitmen dari Divisi Internal Audit dalam perbaikan proses operasional di cabang
31 Juli 2018	Graha Mandiri, Jakarta	Memberikan arahan atas temuan audit eksternal
28 Agustus 2018	Graha Mandiri, Jakarta	Mereview implementasi pilot <i>project</i> penempatan internal control di masing-masing wilayah
26 September 2018	Graha Mandiri, Jakarta	Menindaklanjuti hasil temuan dari Internal Audit
29 Oktober 2018	Graha Mandiri, Jakarta	Memberikan arahan kepada Corporate Audit untuk menyusun rencana audit di tahun 2019
14 Desember 2018	Graha Mandiri, Jakarta	Mengevaluasi hasil audit tahun 2018

#### REKAPITULASI KEHADIRAN KOMITE AUDIT PADA RAPAT

Komite Audit	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Ravik Karsidi (Ketua Komite Audit/ Komisaris Independen)	8	8	100,00%
Irene Yudhistira Junarso (Anggota Komite Audit)	8	7	87,50%
Allen Situngkir (Anggota Komite Audit)	8	8	100,00%
Rata-rata			95,83%

## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan memiliki Komite Nominasi & Remunerasi yang bertugas membantu Dewan Komisaris yang bertujuan melakukan pemantauan, pengawasan dan penilaian atas efektifitas nominasi dan remunerasi. Dengan mengacu pada regulasi atau ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan sebagai salah satu pengawasan Dewan Komisaris yaitu menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, anggota komite penunjang Dewan Komisaris, serta kerangka nominasi dan remunerasi bagi pejabat Perseroan dan karyawan secara keseluruhan maka

dibentuk Komite Nominasi & Remunerasi.

Melalui Komite Nominasi & Remunerasi, proses nominasi dan remunerasi pengurus Perseroan dan organ pelaksana Perseroan lainnya dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perkembangan usaha Perseroan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pengelolaan Perseroan.

Keberadaan Komite Nominasi & Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/ POJK.04/2014.

### KUALIFIKASI MENJADI ANGGOTA KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

Anggota Komite Nominasi & Remunerasi wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan pengalaman serta persyaratan independensi, yaitu:

1. Memiliki integritas, obyektifitas dan etika yang tinggi.
2. Mempunyai pengetahuan yang memadai termasuk ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.
3. Paling sedikit salah satu dari anggota komite harus memiliki latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja dibidang nominasi, remunerasi karyawan, atau Human Resource Development.
4. Mampu bersikap independen yaitu mampu

melaksanakan tugas secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Konsultan Hukum, Kantor Konsultan Sumber Daya Manusia, Kantor Konsultan Business Development, atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non assurance*, dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat sebagai anggota komite oleh Dewan Komisaris.



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## MASA JABATAN

Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite sama dengan masa kerja penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan atau Rapat Umum Pemegang Saham. Masa jabatan anggota Komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama daripada

masa jabatan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite yang bukan anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan pertimbangan Ketua Komite yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Masa jabatan anggota komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama daripada masa jabatan Dewan Komisaris.

## SUSUNAN DAN KOMPOSISI ANGGOTA KOMITE NOMINASI & REMUNERASI TAHUN 2018

Sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.Kep.Kom/01/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mandiri Tunas

Finance tertanggal 26 November 2014 yang telah di ubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.KEP/KOM/003/2017 tanggal 10 April 2017, dengan susunan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

### SUSUNAN KOMITE NOMINASI & REMUNERASI PER 31 DESEMBER 2018

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Ravik Karsidi	Ketua Komite/ Komisaris Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/003/2017 tanggal 10 April 2017	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen	
Harry Gale	Anggota/ Komisaris	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/003/2017 tanggal 10 April 2017	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris	
Vivid Zulprimiadanni	Anggota/ <i>Human Capital Division Head</i>	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/003/2017 tanggal 10 April 2017	10 April 2017 – 10 April 2020	Ke-1

## PROFIL ANGGOTA KOMITE NOMINASI & REMUNERASI



### **RAVIK KARSIDI**

Ketua Komite Nominasi & Remunerasi/  
Komisaris Independen

Profil Ketua Komite Nominasi & Remunerasi Ravik Karsidi dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini



### **HARRY GALE**

Anggota Komite Nominasi &  
Remunerasi/Komisaris

Profil Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Harry Gale dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

## VIVID ZULPRIMIADANNI

Anggota Komite Nominasi & Remunerasi/Komisaris

Profil Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Vivid Zulprimiadanni dapat dilihat di bagian profil Kepala Divisi Human Capital pada bab Fungsi Penunjang Bisnis dalam Laporan Tahunan ini



## INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

Seluruh anggota Komite Nominasi & Remunerasi merupakan pribadi yang profesional dan tidak memiliki hubungan dengan Perseroan guna menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas, dan tanggung jawabnya. Komite Nominasi & Remunerasi yang dibentuk Perseroan telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman, dan integritas. Komite Nominasi & Remunerasi juga tidak terkait dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun pemegang saham. Komite Nominasi & Remunerasi dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada ketentuan/hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Perseroan.

Agar dapat bertindak independen, Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan diwajibkan memenuhi kriteria independensi berikut:

1. Tidak memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal Anggota Komite memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan.
3. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan termasuk di dalamnya tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan entitas anak selain imbalan jasa yang diterima

berkaitan dengan tugas-tugas sebagai Anggota Komite.

4. Bukan pegawai Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh

Dewan Komisaris.

5. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan Perseroan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris.

#### TRANSPARANSI INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

Aspek Independensi	Ravik Karsidi	Harry Gale	Vivid Zulprimiadanni
Memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung	X	X	X
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali	X	X	X
Memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan	X	X	X
Merupakan orang yang memberikan jasa audit, non audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir	X	X	X
Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan			

✓ = ada | X = tidak ada

\*) Ravik Karsidi merupakan Komisaris Independen, sedangkan Harry Gale menjabat sebagai Komisaris Perseroan, sementara Vivid merupakan Kepala Divisi Human Capital Perseroan.

#### PEDOMAN KERJA: PIAGAM KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

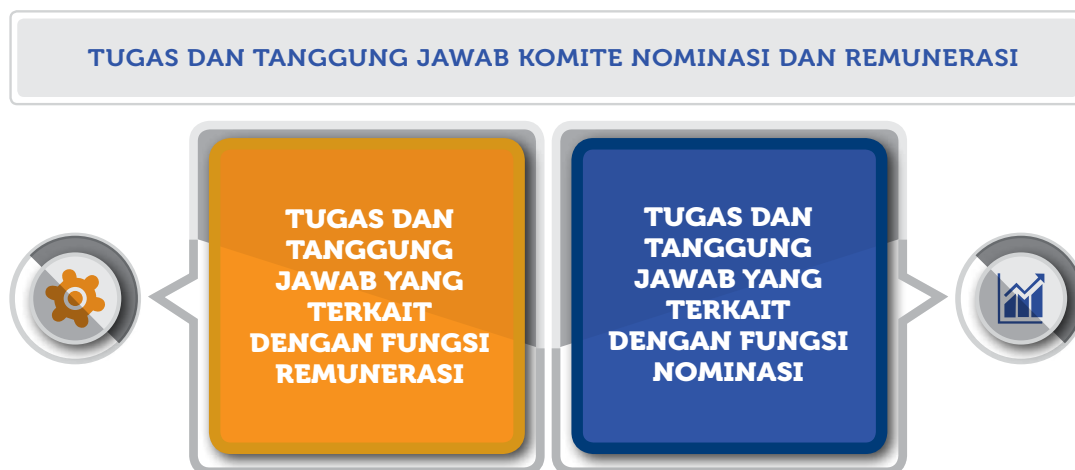
Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan telah dilengkapi piagam yang ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2014 dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan perannya. Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi, mengatur beberapa hal terkait dengan:

- a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite
- b. Kewenangan Komite

- c. Rapat Komite
- d. Organisasi Komite

Piagam *Charter* Komite Nominasi & Remunerasi di *review* secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan pedoman tersebut selalu sejalan dengan kebutuhan, dan regulasi lain terkait dengan bisnis Perseroan.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI



Tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan Fungsi Remunerasi adalah:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Perseroan yang meliputi Gaji, Honorarium, Tunjangan Hari Raya (THR), Benefit (medical, health, loan facility, dan lainnya), Bonus/Insentif (untuk karyawan), dan Tantiem (untuk Dewan Komisaris dan Direksi)
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS serta kebijaksanaan remunerasi pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi Perseroan telah sesuai dengan kinerja keuangan Perseroan dan pemenuhan cadangan sesuai peraturan/regulasi yang berlaku, evaluasi prestasi kerja individual, kewajaran peer group didalam maupun diluar Perseroan, dan strategi pengembangan Perseroan jangka panjang

Tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan Fungsi Nominasi adalah:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, dan criteria yang dibutuhkan dalam nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai nama calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
4. Menelaah, dan mengusulkan perencanaan suksesi (*succession plan*) anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
5. Melakukan penilaian berdasarkan tolok ukur (*benchmark*) yang telah disusun sebagai bahan evaluasi kinerja dan pengembangan kemampuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris

7. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite penunjang Dewan Komisaris
8. Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi

## FUNGSI DAN WEWENANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam pelaksanaan kerjanya, Komite Nominasi & Remunerasi melekat fungsi dan wewenangnya yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Fungsi Komite Nominasi & Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun, melaksanakan dan menganalisa kriteria dan prosedur nominasi bagi calon Direksi dan Dewan Komisaris dan juga prosedur pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris
2. Mengidentifikasi calon Direksi dan Dewan Komisaris baik dari dalam maupun dari luar yang memenuhi syarat untuk diajukan/diangkat menjadi Direktur atau Dewan Komisaris
3. Menyusun kriteria penilaian kinerja Direksi
4. Mengusulkan suatu sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris berupa sistem penggajian, pemberian fasilitas dan tunjangan, opsi yang diberikan serta sistem pensiun
5. Memastikan pelaksanaan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan atau regulasi OJK, Kementerian Ketenagakerjaan, dan regulasi terkait lainnya termasuk hal-hal yang menjadi keputusan RUPS Perseroan

6. Mendukung aktifitas pengembangan sumber daya manusia yang profesional

Wewenang Komite Nominasi & Remunerasi adalah:

1. Komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite
2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana diatur dalam poin 1 di atas, Komite bekerja sama dengan mitra kerja diantaranya Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Penunjang Dewan Komisaris, tim terkait di level manajemen khususnya *Human Resources Development Division*, dan unit-unit kerja Perseroan terkait lainnya (jika diperlukan)
3. Komite mempunyai wewenang berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas Komite
4. Apabila diperlukan Komite dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen di luar Komite atau membentuk *ad hoc team* yang perlu untuk membantu pelaksanaan tugasnya atas biaya Perseroan
5. Komite melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Nominasi & Remunerasi dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Nominasi & Remunerasi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Nominasi & Remunerasi.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Anggota Komite Nominasi & Remunerasi di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

## RAPAT KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

Komite Nominasi & Remunerasi menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun sesuai dengan Pedoman Kerja Komite Nominasi & Remunerasi. Dalam pengambilan keputusan dalam rapat yang diselenggarakan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan secara musyawarah dan mufakat, serta pengambilan suara terbanyak bila tidak mendapatkan mufakat. Sementara, hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditanda tangani oleh seluruh anggota yang hadir

dan didokumentasikan secara baik oleh Sekretaris Komite. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dalam pengambilan keputusan yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Di tahun 2018, Komite Nominasi & Remunerasi melakukan 3 (tiga) kali rapat, dengan risalah dan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut:

### RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

Tanggal Rapat	Tempat	Agenda Rapat
9 Maret 2018	Graha Mandiri, Jakarta	Pembahasan nominasi calon Direksi
26 Juli 2018	Graha Mandiri, Jakarta	Menetapkan pelaksanaan training Direksi
26 Desember 2018	Graha Mandiri, Jakarta	Menetapkan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris setelah purna jabatan



#### REKAPITULASI KEHADIRAN KOMITE NOMINASI & REMUNERASI PADA RAPAT

Komite Nominasi & Remunerasi	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Ravik Karsidi (Ketua Komite Nominasi & Remunerasi/Komisaris Independen)	3	3	100,00%
Harry Gale (Anggota Komite Nominasi & Remunerasi/Komisaris)	3	3	100,00%
Vivid Zulprimiadanni (Anggota Komite Nominasi & Remunerasi)	3	3	100,00%
Rata-rata			100,00%

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko guna memantau pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan yang telah disusun oleh Direksi. Pembentukan Komite Pemantau Risiko dilandasi pada beberapa peraturan yang berlaku antara lain:

1. Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
2. Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
3. Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Pembiayaan.
4. Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.05/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan.
5. Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

## KUALIFIKASI MENJADI ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko, anggota Komite harus memenuhi berbagai kriteria dan persyaratan. Selain memiliki independensi, anggota Komite Pemantau Risiko diharuskan memiliki diantaranya integritas serta pengetahuan tentang bisnis yang dijalankan oleh Perseroan. Persyaratan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

1. Anggota Komite wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko harus memiliki latar belakang manajemen risiko.
3. Memahami bisnis Perseroan khususnya manajemen risiko dan peraturan perundangundangan terkait dengan usaha pembiayaan.
4. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan terkait pemantauan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko perusahaan pembiayaan.
5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
6. Bukan merupakan anggota Direksinya integritas serta pengetahuan tentang bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

## MASA JABATAN

Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu yang mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/01/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Pemantau Risiko,

menetapkan bahwa masa tugas anggota komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu waktu.

## SUSUNAN DAN KOMPOSISI ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2018

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/004/2018 tanggal 30 Januari 2018 perihal Pengangkatan Komite Pemantau Risiko, susunan anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

### SUSUNAN KOMITE PEMANTAU RISIKO PER 31 DESEMBER 2018

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Ravik Karsidi	Ketua Komite Pemantau Risiko/Komisaris Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEPKOM/004/2017 tanggal 10 April 2017	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Independen	
Rico Setiawan	Anggota Komite Pemantau Risiko/Komisaris Utama	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/004/2018 tanggal 30 Januari 2018	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Utama	
Harry Gale	Anggota Komite Pemantau Risiko/Komisaris	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/004/2017 tanggal 10 April 2017	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris	
Irene Yudhistira Junarso	Anggota Komite Pemantau Risiko	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/004/2018 tanggal 30 Januari 2018	30 Januari 2018 – 30 Januari 2021	Ke-1
Irwan Tri Nugroho	Anggota Komite Pemantau Risiko	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/004/2018 tanggal 30 Januari 2018	30 Januari 2018 – 30 Januari 2021	Ke-1

PERFORMA 2018

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

**TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## PROFIL ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

### **RAVIK KARSIDI**

Ketua Komite Pemantau Risiko/  
Komisaris Independen

Profil Ketua Komite Audit Ravik Karsidi dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.



### **RICO SETIAWAN**

Anggota Komite Pemantau Risiko/  
Komisaris Utama

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko Rico Setiawan dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini



---

## HARRY GALE

Anggota Komite Pemantau Risiko/  
Komisaris

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko Harry Gale dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini



---

## IRENE YUDHISTIRA

Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko yang juga merupakan Anggota Komite Audit Irene Yudhistira Junarso dapat dilihat di bagian profil Komite Audit pada bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Laporan Tahunan ini



## IRWAN TRI NUGROHO

Anggota Komite Pemantau Risiko

### PERIODE JABATAN

30 Januari 2018 – 30 Januari 2021, Periode Ke-1

### DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia

Kelahiran Bantul, 6 November 1984 (34 tahun)

### DOMISILI

Bantul, Daerah Khusus Yogyakarta, Indonesia

### PENDIDIKAN

S1 bidang Manajemen dari UNS (2006), S2 bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Gadjah Mada (2009), S3 bidang *Banking and Finance* dari University of Limoges, Perancis (2014)



### PENGALAMAN KERJA

Saat ini juga merupakan staf pengajar bidang manajemen keuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret (UNS), Dosen dan peneliti tamu di berbagai perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri, Wakil presiden bidang program dan kerjasama internasional di Indonesian Finance Association (IFA), Dosen berprestasi peringkat 1 UNS tahun 2015 dan 2018.

## INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pribadi yang profesional dan tidak memiliki hubungan dengan Perseroan guna menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas, dan tanggung jawabnya. Komite Pemantau Risiko yang dibentuk Perseroan telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman, dan integritas.

Agar dapat bertindak independen, Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan diwajibkan memenuhi kriteria independensi berikut:

1. Tidak memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal Anggota

Komite memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

2. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan.
3. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan termasuk di dalamnya tidak

menerima kompensasi dari Perseroan dan entitas anak selain imbalan jasa yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas sebagai Anggota Komite.

4. Bukan pegawai Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu

6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

5. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan Perseroan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris.

### TRANSPARANSI INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Aspek Independensi	Ravik Karsidi	Harry Gale	Irene	Irawan
Memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung	X	X	X	X
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali	X	X	X	X
Memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan	X	X	X	X
Merupakan orang yang memberikan jasa audit, non audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir	X	X	X	X
Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan			X	X

✓ = ada | X = tidak ada

\*) Ravik Karsidi merupakan Komisaris Independen, Rico Setiawan merupakan Komisaris Utama, sedangkan Harry Gale menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

### PEDOMAN KERJA: PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam pelaksanaan kerjanya Komite Pemantau Risiko Perseroan mengacu pada Piagam Komite Pemantau Risiko. Piagam Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris di Jakarta pada 24 Nopember 2016, merupakan dokumen tertulis yang mengatur terutama mengenai

kedudukan, keanggotaan, kewenangan, tugas, dan tanggungjawab Komite Audit. Piagam ini juga memberikan batasan dan mengatur tata hubungan kerja antara Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit serta dengan Komite lain di bawah Dewan Komisaris.



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## WEWENANG SERTA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang untuk dapat mengakses dokumen, data dan informasi perseroan, berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal dan manajemen risiko, melibatkan pihak independen yang diperlukan dan melakukan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris sehingga mampu dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tugas komite Pemantau risiko yang antara lain meliputi:

1. Mengarahkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*
2. Melakukan *review* atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
3. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas satuan kerja Manajemen Risiko
4. Melakukan *review* atas laporan profil risiko dan/ atau tingkat risiko
5. Melakukan *review* atas laporan tingkat kesehatan keuangan Perseroan
6. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Pemantau Risiko dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Pemantau Risiko. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Pemantau Risiko.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Anggota Komite Pemantau Risiko di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

## RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat triwulanan yang dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun. Komite juga dapat melakukan rapat bulanan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, Ketua Komite mengundang seluruh anggota komite dan seluruh anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat yang dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota yang ditunjuk secara tertulis

apabila ketua berhalangan hadir. Rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah anggota termasuk seorang Komisaris dan pihak independen.

Di tahun 2018, Komite Pemantau Risiko melakukan 8 (delapan) kali rapat, dengan risalah dan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut,

## RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tanggal Rapat	Tempat	Agenda Rapat
29 Januari 2018	Graha Mandiri, Jakarta	Membentuk struktur keanggotaan Komite Pemantau Risiko
25 April 2018	Graha Mandiri, Jakarta	Memberikan arahan untuk membentuk tim khusus untuk mengevaluasi risiko yang ada di cabang
28 Mei 2018	Graha Mandiri, Jakarta	Pembahasan metodologi <i>Quality Assurance</i>
31 Juli 2018	Graha Mandiri, Jakarta	Mereview kebijakan risiko operasional di bulan Juni
28 Agustus 2018	Graha Mandiri, Jakarta	Membahas hasil risiko dari Tata Kelola Perusahaan yang sudah terpenuhi
26 September 2018	Graha Mandiri, Jakarta	Memberikan arahan atas risiko operasional terkait dampak bencana alam di Lombok
29 Oktober 2018	Graha Mandiri, Jakarta	Pembahasan <i>Risk Appetite Statement</i>
14 Desember 2018	Graha Mandiri, Jakarta	Menentukan kebijakan atas dampak bencana alam di Palu

## REKAPITULASI KEHADIRAN KOMITE PEMANTAU RISIKO PADA RAPAT

Komite Pemantau Risiko	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Ravik Karsidi (Ketua Komite Pemantau Risiko/Komisaris Independen)	8	8	100,00%
Harry Gale (Anggota Komite Pemantau Risiko/Komisaris)	8	6	75,00%
Irene Yudhistira Junarso (Anggota Komite Pemantau Risiko)	8	7	87,50%
Irwan Tri Nugroho (Anggota Komite Pemantau Risiko)	8	8	100,00%
Rata-rata			90,63%

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## INFORMASI TENTANG ORGAN/KOMITE LAINNYA DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Hingga akhir tahun 2018, Perseroan hanya memiliki organ-organ di bawah Dewan Komisaris seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu:

1. Sekretaris Dewan Komisaris
2. Komite Audit
3. Komite Nominasi dan Remunerasi
4. Komite Pemantau Risiko

Dengan demikian tidak terdapat organ atau komite lainnya di bawah Dewan Komisaris di luar yang telah diuraikan di atas.

## ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

### SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sebagai emiten yang memperdagangkan obligasi kepada publik, Perseroan wajib memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang merupakan orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG; memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi secara

berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta; menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan; serta menjadi penghubung atau *liaison officer* Perseroan untuk berhubungan dengan pihak di luar Perseroan.

Keberadaan Sekretaris Perusahaan diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

### PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat Perseroan yang diangkat secara khusus untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya langsung kepada

Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun pada emiten lain atau perusahaan publik.

Selama mengemban amanah, Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan wajib membuat laporan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

### KUALIFIKASI PEJABAT SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra Perseroan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan. Persyaratan sebagai Sekretaris Perusahaan:

1. Cakap melakukan perbuatan hukum
2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan dan tata kelola perusahaan
3. Memahami kegiatan usaha Perusahaan
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
5. Berdomisili di Indonesia

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## PEJABAT SEKRETARIS PERUSAHAAN

Penetapan Pejabat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Keputusan Direksi No. 01324/SKHCP.SVC/HC/11/2018 tanggal 26 November 2018 yang mengangkat Arif Reza Fahlepi sebagai Sekretaris Perusahaan dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Penggantian Sekretaris Perusahaan telah dipublikasikan di situs web

Perseroan [www.mtf.co.id/korporat](http://www.mtf.co.id/korporat) tanggal 27 November 2018 dan dilaporkan kepada OJK melalui surat No.283/MTF-CLC.CCS/XI/2018 pada tanggal 27 November 2018 untuk memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

### ARIF REZA FAHLEPI

Corporate Secretary & Legal Compliance  
Division Head

#### DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia  
Usia 41 tahun  
Kelahiran Jakarta 30 September 1977

#### DOMISILI

DKI Jakarta, Indonesia

#### PENDIDIKAN

Sarjana (S1) Sastra Indonesia dari Universitas Padjajaran, Bandung (2001), dan Magister (S2) jurusan *Corporate Communication* di London School of Public Relations, Jakarta (2017)

#### BERGABUNG DI MTF

26 November 2018

#### SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2018

Meraih *PR Assessor Certification* dari Badan Nasional Sertifikasi Indonesia

#### PENGALAMAN KERJA

Sebelum dipercaya untuk menjabat *Corporate Secretary & Legal Compliance Division Head* MTF, beliau berkarir di PT Federal International Finance sebagai *Head of Corporate Communication* (2016-2018), *Corporate Communication Analyst* (2007-2016), *Human Capital* (2005-2007), *Surveyor* (2004-2005). Berpengalaman sebagai Redaktur di PT Cahaya Rakyat Merdeka (2001-2004) dan pernah bekerja sebagai *Marketing Officer* di PT Purbaya Pancasakti (1997-2001). Aktif sebagai Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Humas Indonesia (PERHUMAS) bidang Kerjasama Strategis untuk periode 2017-2020.

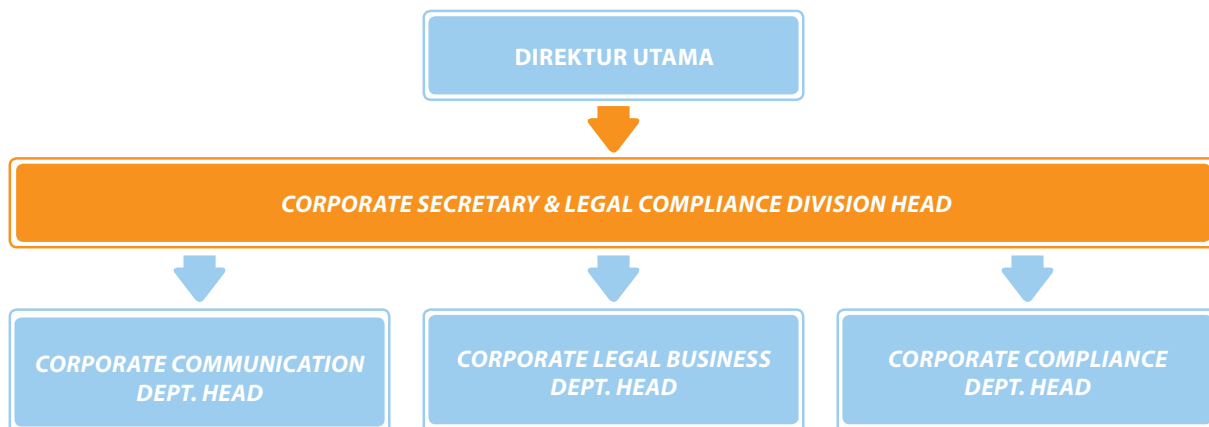


## ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Secara struktural, Sekretaris Perusahaan berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan sendiri membawahi Kepala Departemen Komunikasi, Kepala Departemen *Corporate Legal* dan Kepala Departemen *Regulatory and Compliance*. Dengan

adanya Sekretaris Perusahaan, diharapkan dapat membantu Direksi dalam menjalankan pengelolaan informasi Perusahaan dan memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

### STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN MANDIRI TUNAS FINANCE



Hingga akhir tahun 2018 jumlah Karyawan *Corporate Secretary & Legal Compliance Division* adalah sebagai berikut:

### JUMLAH KARYAWAN PADA DIVISI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Jabatan	Jumlah Karyawan
Kepala Divisi	1
Kepala Departemen	2
<i>Supervisor</i>	12
<i>Staff</i>	2
Jumlah	17

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## PEDOMAN KERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam mendukung kerja Sekretaris Perusahaan, telah diterbitkan Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan No.03/PGN/06/2016 yang telah diterbitkan tanggal 23 Desember 2016 dan telah melalui perbaikan/revisi pada tanggal 14 Desember 2018, telah disetujui oleh Direksi Perseroan.

## FUNGSI DAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berdasarkan Surat Keputusan No.2428/SK-HCP.SVC/HC/IV/2017 fungsi dan tugas Sekretaris Perusahaan PT Mandiri Tunas Finance adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan mensosialisasikannya kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan pemangku kepentingan Perusahaan.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat;
  - b. Penyampaian laporan kepada regulator secara tepat waktu; dan
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS termasuk mempersiapkan proses.

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Sekretaris Perusahaan dalam rangka meningkatkan kompetensi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Sekretaris Perusahaan.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Sekretaris Perusahaan di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

## PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN 2018

Sepanjang tahun 2018, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan beberapa tugas dan kegiatan sebagai berikut:

- **Publikasi Informasi Perusahaan**

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menjalankan prinsip keterbukaan informasi Perseroan dengan mempublikasikan berbagai

kegiatan atau informasi mengenai Perseroan sepanjang tahun buku 2018. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. X.K.1 (Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-86/PM/1996 tertanggal 24 Januari 1996) dan Peraturan Bursa Efek Jakarta No. I-E.IV (Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004).



Pengungkapan informasi material dilakukan Perseroan melalui laporan ataupun siaran pers. Dalam rangka meningkatkan penyebarluasan informasi material, seluruh informasi untuk pers dan laporan dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

- **Laporan Keuangan Bulanan Perusahaan Pembiayaan**

Berdasarkan Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, Perusahaan Pembiayaan wajib mengirimkan Laporan Bulanan kepada OJK paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Dalam hal pada tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka Laporan Keuangan Bulanan disampaikan pada hari kerja berikutnya. Selama tahun 2018, Perseroan telah melaporkan kepada OJK Laporan Keuangan Bulanan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

Periode Bulan Laporan Tahun 2018	Tanggal Pengiriman Laporan
Januari	9 Januari 2018
Februari	10 Februari 2018
Maret	9 Maret 2018
April	9 April 2018
Mei	9 Mei 2018
Juni	8 Juni 2018
Juli	9 Juli 2018
Agustus	8 Agustus 2018
September	10 September 2018
Oktober	9 Oktober 2018
November	8 November 2018
Desember	7 Desember 2018

- **Kewajiban Penyampaian Data Hutang Valuta Asing**

Berdasarkan Surat OJK No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan No. S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 perihal

Permintaan Data Hutang/Kewajiban Dalam Valuta Asing, Emiten atau Perusahaan Publik diminta untuk menyampaikan:

1. Laporan mengenai jumlah hutang/kewajiban dalam valuta asing
2. Proyeksi pembayaran hutang/kewajiban dalam valuta asing per bulan
3. Informasi jatuh tempo hutang/kewajiban dalam valuta asing

Dalam hal emiten tidak mempunyai atau memiliki hutang/kewajiban dalam valuta asing, emiten diminta untuk tetap melaporkan kepada OJK dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Laporan tersebut di atas wajib disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam surat OJK No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 tersebut.

Perseroan telah melaporkan kepada OJK Laporan hutang/kewajiban dalam valuta asing secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

Periode Bulan Laporan Tahun 2018	Tanggal Pengiriman Laporan
Januari	8 Januari 2018
Februari	5 Februari 2018
Maret	6 Maret 2018
April	2 April 2018
Mei	7 Mei 2018
Juni	7 Juni 2018
Juli	6 Juli 2018
Agustus	6 Agustus 2018
September	7 September 2018
Oktober	8 Oktober 2018
November	8 November 2018
Desember	10 Desember 2018

• **Kegiatan Membina Hubungan dengan Media Massa**

Perseroan senantiasa membina hubungan baik dengan Media Massa sebagai mitra dalam penyebaran informasi tentang kondisi perusahaan. Perseroan secara berkala

menggelar kegiatan bersama media massa guna meningkatkan komunikasi dengan melakukan berbagai kegiatan. Di sepanjang 2018, Perseroan menjalankan beberapa kegiatan dengan melibatkan media massa diantaranya:

Tanggal	Kegiatan	Lokasi	Tajuk Kegiatan
14 Februari 2018	Press conference Direksi Mengajar Solo	Surakarta	MTF Konsisten Berikan Edukasi Literasi Keuangan untuk Mahasiswa, Gelar Kegiatan “Direksi Mengajar” untuk 1.500 Mahasiswa UNS
13 Februari 2018	Publikasi Pembukaan Kantor MTF Cabang Manado	Manado	MTF Genjot Pembiayaan <i>Retail</i> , Resmikan Kantor Cabang Di Manado
27 Februari 2018	Press conference Kinerja 2017	Jakarta	Mandiri Tunas Finance Konsisten Tumbuh Berkelanjutan, Salurkan Pembiayaan Baru Rp 22,2 Triliun di Tahun 2017
3 Maret 2018	Publikasi Corsec & IT Award	Jakarta	Mandiri Tunas Finance Raih Dua Penghargaan Di Bidang <i>Corporate Secretary &amp; Corporate Communication</i> dan IT
19 April 2018	Press Conference Pembukaan IIMS	Jakarta	Mandiri Tunas Finance menjadi Official Leasing Partner Indonesia International Motor Show 2018
26 April 2018	Press Conference IIMS	Jakarta	Mandiri Tunas Finance Luncurkan Produk “Angsuran Berjenjang” di Ajang IIMS 2018
3 Mei 2018	Publikasi hasil IIMS	Jakarta	Kondisi Ekonomi Stabil, Pembiayaan Kendaraan MTF Lampau Target di Ajang IIMS 2018
17 Mei 2018	Publikasi Semarang <i>Autoshow</i>	Semarang	MTF Targetkan SPK Senilai Rp 8,2 miliar dari Semarang <i>Autoshow</i> 2018
13 Mei 2018	Publikasi kegiatan pembiayaan di Indonesia Timur	Jakarta	MTF Konsisten Salurkan Pembiayaan di Indonesia Bagian Timur
30 Mei 2018	Press conference kinerja Q1 dan buka bersama media	Jakarta	Lab Bersih Mandiri Tunas Finance Triwulan I 2018 Meningkatkan Tajam 86,7%
21 Juli 2018	Press Release tanggapan kasus Medan	Medan	Mandiri Tunas Finance Pastikan BPKB Nasabah di Medan Aman
31 Juli 2018	Publikasi partisipasi acara Codymax	Surabaya	MTF Targetkan 150 SPK dalam Event Codymax Auto Mall Surabaya
9 Agustus 2018	Publikasi Promo Merdeka MTF	Jakarta	Mandiri Tunas Finance Tawarkan Promo Merdeka Paket Bunga Pintar 3% dan Program Merdeka untuk PNS & Pegawai BUMN

Tanggal	Kegiatan	Lokasi	Tajuk Kegiatan
9 Agustus 2018	<i>Interview</i> Pak Arya oleh Men's Obsession (9 Agustus 2018)	Jakarta	73 Figur Berprestasi 2018, Majalah Men's Obsession, edisi Agustus 2018
23 Agustus 2018	<i>Interview</i> Pak Arya oleh Bisnis Indonesia (23 Agustus 2018)	Jakarta	Rubrik Lunch with CEO, Harian Bisnis Indonesia, edisi 3 September 2018
28 Agustus 2018	<i>Interview</i> Pak Har oleh CNN Indonesia	Jakarta	Berita pembiayaan otomotif, CNN Indonesia, 28 Agustus 2018
4 September 2018	<i>Press Conference</i> Harpelnas	Jakarta	Apresiasi Mandiri Tunas Finance untuk <i>Customer</i> di Hari Pelanggan Nasional
19 September 2018	<i>Press Conference</i> CSR Lombok	Mataram	Mandiri Tunas Finance Siap Dukung Pemulihan Ekonomi di Lombok, Serahkan Bantuan dari Karyawan MTF
10 Oktober 2018	Publikasi pembukaan kantor Pekanbaru	Pekanbaru	MTF Genjot Pembiayaan <i>Retail</i> Resmikan Kantor Cabang Di Pekanbaru
12 Oktober 2018	Publikasi pembukaan kantor Ungaran	Ungaran	Mandiri Tunas Finance Perluas Jaringan di Ungaran
10 Oktober 2018	Publikasi partisipasi dalam IIMS Makassar	Makassar	Mandiri Tunas Finance Targetkan 200 SPK dalam <i>Event</i> Indonesia International Motor Show 2018 di Makassar
16 Oktober 2018	Publikasi MTF Autofiesta Palembang	Palembang	Mandiri Tunas Finance Targetkan 140 SPK dalam <i>event</i> MTF Autofiesta Kota Palembang
7 Nopember 2018	Publikasi partisipasi dalam IIMS Surabaya	Surabaya	Mandiri Tunas Finance Targetkan 300 SPK dalam <i>event</i> IIMS Daerah Kota Surabaya
8 Nopember 2018	<i>Press conference</i> Dukcapil	Jakarta	Tingkatkan Standar Pelayanan Administrasi, MTF Jalin Kerja Sama dengan Dukcapil
29 Nopember 2018	<i>Press Conference</i> Investor Gathering	Jakarta	Mandiri Tunas Finance Targetkan Rp 1 Triliun Melalui Penawaran Umum Oblisasi Berkelanjutan IV MTF Tahap I Tahun 2018
5 Desember 2018	<i>Photo session</i> oleh Kontan	Jakarta	Berita foto di Harian Kontan edisi 6 Desember 2018
8 Desember 2018	<i>Media Visit</i> Radio Sonora Bandung	Bandung	<i>Media visit</i> Radio Sonora Bandung
11 Desember 2018	Publikasi <i>event Business Case Competition</i>	Jakarta	Mandiri Tunas Finance Dorong Peran Millenials dalam Dunia Bisnis, Gelar Ajang MTF <i>Business Case Competition</i> untuk Mahasiswa

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Secara umum, kegiatan yang telah dilakukan Sekretaris Perusahaan di sepanjang tahun 2018:

1. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2017
2. Menyelenggarakan *Investor Gathering* dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV MTF Tahap I Tahun 2019
3. Menyelenggarakan kegiatan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris secara rutin
4. Melakukan pelaporan yang menjadi kewajiban perusahaan terhadap Regulator
5. Menjalin *relationship* dengan pihak eksternal, khususnya *stakeholder* Perusahaan
6. Melaksanakan *event-event* Perusahaan, baik event internal maupun eksternal
7. Melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility*, Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan
8. Membina hubungan dengan media massa dan memonitor pemberitaan
9. Mengelola dan memperbarui *content* situs web Perusahaan
10. Melakukan dalam kegiatan penghargaan public dan partisipasi sponsorship
11. Menjalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)
12. Melakukan *review* dan merekomendasikan pengkinian serta penyempurnaan kebijakan, ketentuan maupun system prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan agar sesuai dengan ketentuan/regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Melakukan *review* perjanjian-perjanjian dan opini legal terkait bisnis Perusahaan
14. Menangani keluhan pelanggan dan membuat pelaporan wajib secara rutin

## AUDIT INTERNAL

Fungsi Audit Internal adalah melakukan evaluasi secara periodik ke seluruh fungsi dan unit kerja di Perseroan guna membantu Direksi dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal di Perseroan. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal, yang merupakan unit independen yang bertanggung jawab langsung

kepada Direktur Utama. Dalam pelaksanaan tugasnya, Divisi Audit Internal secara fungsional juga melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.



***“Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.”***

### PERTANGGUNGJAWABAN

Kepala Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Dalam menjalankan fungsi pengawasan secara fungsional Audit Internal berkoordinasi dengan Komite Audit. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut atas hasil audit,

maka Kepala Audit Internal dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## PROFIL KEPALA AUDIT INTERNAL

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.02648/SK-PGS/HRD/II/2015 tanggal 13 Februari 2015, Direktur Utama mengangkat Dayu Rasmini sebagai Kepala Audit Internal Perseroan.

### DAYU RASMINI

Kepala Audit Internal

**MENJABAT SEJAK** 1 Juli 2016

#### DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia

Usia 45 tahun

Kelahiran Jakarta, 10 Juli 1973

**DOMISILI** Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

#### PENDIDIKAN

Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi Akuntansi – Universitas Padjajaran (1995)

**BERGABUNG DI MTF** 2015

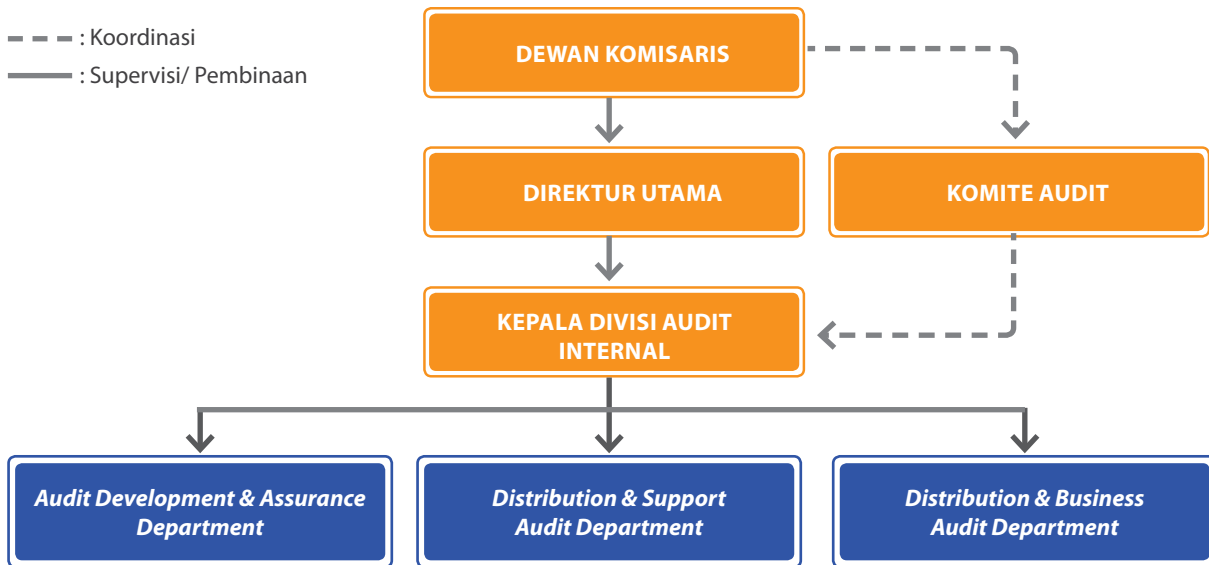
#### PENGALAMAN KERJA

*Distribution & Support Audit Department Head* PT Mandiri Tunas Finance (2015-2016), Sebelumnya beliau sempat bertugas di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1997-2015) dan berpengalaman di bidang *Retail Banking Audit, Commercial Banking Audit, Audit Development, Personel Performance & Budgeting*, serta *Corporate Banking Audit*. Beliau mengawali karirnya di bidang perbankan di PT Bank Ekspor Impor Indonesia (1996-1997) sebagai *Officer Development Program*.



## STRUKTUR ORGANISASI DAN KEDUDUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN

### STRUKTUR ORGANISASI AUDIT INTERNAL MANDIRI TUNAS FINANCE



Hingga akhir tahun 2018, SPI memiliki 18 karyawan dengan rincian penempatan dan pelaksanaan tugas sebagai berikut:

Jabatan/Fungsi	Jumlah Karyawan
Kepala Divisi	1 orang
Kepala Departemen	2 orang
Lead Auditor	6 orang
IT Audit Specialist	1 orang
Auditor	8 orang
Jumlah	18 orang

Jumlah pegawai tersebut merupakan hasil dari identifikasi dan kajian atas pengelolaan sistem pengendalian internal dan efektivitas pengawasannya yang dilakukan oleh Manajemen Perseroan.

## SERTIFIKASI PROFESI AUDIT INTERNAL

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap

peraturan serta perkembangan industri. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan Audit Internal hingga akhir tahun 2018.



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Nama	Jabatan	Sertifikasi	Tahun
Dayu Rasmini	Kepala Divisi	Sertifikasi APPI	2016
Ricky Harris	Kepala Departement	Sertifikasi APPI	2016
Nestri Hutabarat	Kepala Departement	Sertifikasi APPI	2016

Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan level sertifikasi profesi bagi karyawan Audit Internal, baik bagi karyawan yang telah memiliki sertifikasi profesi maupun yang belum memiliki.

## PIAGAM AUDIT INTERNAL: PEDOMAN DAN TATA TERTIB AUDIT INTERNAL

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan revisi terakhir pada tanggal 1 Desember 2015, sebagai acuan atau pedoman Divisi Audit Internal dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya.

Dalam Piagam Audit Internal Perseroan disebutkan bahwa:

1. Divisi Audit Internal dipimpin oleh Kepala Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
2. Kepala Divisi Audit Internal bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan melakukan koordinasi dengan Komite Audit.
3. Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Divisi Internal Audit akan dilaporkan segera kepada otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi kegiatan usaha Perseroan.
4. Seluruh Internal Auditor di Divisi Audit Internal bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Audit Internal.

## INDEPENDENSI DIVISI AUDIT INTERNAL

Anggota Divisi Audit Internal merupakan pribadi yang profesional dan tidak memiliki hubungan dengan Perseroan guna menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas, dan tanggung jawabnya.

Divisi Audit Internal yang dibentuk Perseroan telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman, dan integritas.

## KODE ETIK AUDIT INTERNAL

Kode Etik merupakan dasar profesionalisme auditor internal dalam pelaksanaan audit. Kode Etik Auditor Internal mengacu pada prinsip-prinsip yang relevan dengan profesi dan kegiatan audit sesuai dengan standar perilaku *The Institute of Internal Auditors* (IIA). Pelanggaran terhadap Kode Etik merupakan pelanggaran terhadap disiplin Perseroan yang dapat mengakibatkan Auditor Internal diberi peringatan, diberhentikan dari tugas di lingkungan Audit Internal dan atau dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Auditor Internal diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip kode etik, sebagai berikut:

### 1. Integritas

Memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung

jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal.

### 2. Obyektivitas

Menjunjung tinggi ketidak-berpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi audit.

### 3. Kerahasiaan

Menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otorisasi yang memadai, kecuali terdapat peraturan dan undang-undang yang mengharuskan.

### 4. Kompetensi

Memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas yang diberikan.

## FUNGSI AUDIT INTERNAL

Secara umum, fungsi dari Divisi Audit Internal dibagi menjadi 2 (dua), yaitu fungsi *assurance* dan *consulting*.

### 1. Fungsi Assurance

Pelaksanaan fungsi *assurance* oleh Divisi Audit Internal bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian internal, manajemen risiko dan

tata kelola telah dilakukan oleh seluruh unit kerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis di Perseroan maupun peraturan eksternal. Hasil penilaian tersebut dilaporkan oleh Divisi Audit Internal secara berkala kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Dalam melaksanakan fungsi *assurance*, Divisi Audit Internal mempergunakan metode

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

audit berbasis risiko atau *Risk Based Audit* (RBA). Dalam metode tersebut, penentuan unit kerja yang akan diaudit dan ruang lingkup audit dilakukan berdasarkan evaluasi risiko yang dilakukan secara periodik.

Selama tahun 2018, Divisi Audit Internal telah melaksanakan 56 penugasan yang terdiri dari 52 audit umum dan 4 investigasi. Setiap penugasan *assurance* dilaporkan kepada Direksi Perseroan dan pihak yang diaudit dilengkapi dengan rencana tindak lanjut perbaikan, termasuk sanksi apabila diperlukan. Kemajuan tindak lanjut perbaikan harus dilaporkan oleh pihak yang diaudit kepada Divisi Audit Internal secara periodik untuk memastikan bahwa setiap pihak yang diaudit selalu berupaya melakukan penyempurnaan atau perbaikan.

## 2. Fungsi *Consulting*

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses, Perseroan melaksanakan fungsi *consulting* oleh Divisi Internal Audit. Fungsi *consulting* berperan sebagai *strategic partner* melalui penelaahan risiko dan kontrol atas suatu proses atau aktivitas yang akan disusun atau akan dievaluasi oleh Perseroan dan memberikan saran dan masukan perbaikan proses. Dalam melaksanakan fungsi *consulting*, Divisi Audit

Internal melakukan analisa sendiri atau bekerja sama dengan unit kerja atau Divisi lain.

Di tahun 2018, fokus audit diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal terhadap risiko utama bisnis yang dihadapi oleh Perseroan sebagai salah satu upaya mitigasi yang harus dilakukan. Dalam proses prioritas risikorisiko utama yang akan dievaluasi mitigasinya, Divisi Audit Internal telah mendapat masukan dari unit kerja terkait dan arahan dari Direksi Perseroan. Masukan dan arahan tersebut mencakup risiko utama pada proses bisnis dan proses pendukungnya, khususnya yang ada di jaringan kantor cabang untuk mendukung terciptanya pemberian pembiayaan yang lebih berkualitas dan penurunan *AR Loss* sesuai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Divisi Audit Internal juga melakukan on desk monitoring atas data operasional cabang secara berkelanjutan. Indikasi kelemahan dari hasil on desk akan disampaikan kepada klien (*Branch*) setiap bulan sebagai salah satu bentuk *early warning signal* dari *strategic partner* dan dimonitor tindak lanjutnya. Hasil on desk juga dikomunikasikan kepada unit kerja terkait di Kantor Pusat untuk dibahas perbaikannya.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG AUDIT INTERNAL

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*).
2. Merencanakan dan melaksanakan Aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang/ aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang
3. Menyusun program untuk mengevaluasi kegiatan internal audit yang dilakukannya.
4. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan

ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Perusahaan dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.

Dewan Direksi lainnya serta Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

5. Memonitor, menganalisis dan melaporkan tindak lanjut hasil Aktivitas Internal Audit dan Aktivitas Investigasi.
6. Bekerja sama dengan Komite Audit.
7. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
8. Tidak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional.

Kewenangan Audit Internal:

1. Melakukan penugasan audit terhadap kegiatan semua unit kerja kantor pusat maupun cabang dalam organisasi Perseroan.
2. Berwenang melakukan akses terhadap semua

catatan dan dokumentasi perusahaan dan termasuk di dalamnya catatan karyawan dan sumber daya lainnya serta hal-hal lain yang dianggap perlu untuk menunjang kegiatan audit.

3. Melakukan penelusuran terhadap indikasi fraud pada setiap aspek dan unsur kegiatan baik berupa penipuan, pemalsuan, penggelapan, pencurian, atau hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi Perseroan. Penelusuran terhadap suatu kejadian fraud terbatas pada pengungkapan dan pelaporan kepada Dewan Direksi.
4. Melakukan komunikasi secara berkala dengan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI AUDIT INTERNAL

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Audit Internal dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawan. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Audit Internal.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Divisi Audit Internal di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini. Sementara kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala *Departement*, *Lead Auditor*, *IT Audit Specialist*, dan *Auditor*, adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Pelatihan / pengembangan Kompetensi	Tahun
1	Ricky Harris	Kepala Departement	<i>Metodologi Root Cause Analysis, Training Menulis Laporan Audit, Middle Management Development Program Batch 2, dan Pendeteksian &amp; Metodologi Mengenali Kebohongan.</i>	2018
2	Nestri Hutabarat	Kepala Departement	<i>Effective Communication Skill, Effective Coching And Conseling Skill, Financial Management For Non Finance, Leader As Role Model, Integrated Leadership, Powerfull Presentation Skill, dan Pendeteksian &amp; Metodologi Mengenali Kebohongan.</i>	2018
3	Yulyus Hariadi	Lead Auditor	<i>Metodologi Root Cause Analysis, Training Menulis Laporan Audit, Pendeteksian &amp; Metodologi Mengenali Kebohongan dan Workshop Investigasi.</i>	2018
4	Angga Yudhistira	Lead Auditor	<i>Metodologi Root Cause Analysis, Training Menulis Laporan Audit, Pendeteksian &amp; Metodologi Mengenali Kebohongan.</i>	2018

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

No	Nama	Jabatan	Pelatihan / pengembangan Kompetensi	Tahun
5	Stanley Adhitama	Lead Auditor	Metodologi Root Cause Analysis, Training Menulis Laporan Audit, Pendeteksian & Metodologi Mengenali Kebohongan.	2018
6	Muhammad Mifta Faridz	Lead Auditor	Metodologi Root Cause Analysis, Training Menulis Laporan Audit, Pendeteksian & Metodologi Mengenali Kebohongan.	2018
7	Ervin Kervinda	Lead Auditor	Metodologi Root Cause Analysis, Training Menulis Laporan Audit, Pendeteksian & Metodologi Mengenali Kebohongan.	2018
8	Muhammad Fajar	Lead Auditor	Pendeteksian & Metodologi Mengenali Kebohongan.	2018
9	Dewa Gede	IT Audit Specialist	Pendeteksian & Metodologi Mengenali Kebohongan.	2018
10	Ena Ariadne	Auditor	Metodologi Root Cause Analysis, Training Menulis Laporan Audit, Pendeteksian & Metodologi Mengenali Kebohongan.	2018
11	Novita Sari Naionggolan	Auditor	Metodologi Root Cause Analysis, Training Menulis Laporan Audit, Pendeteksian & Metodologi Mengenali Kebohongan.	2018
12	Indah Christina	Auditor	Metodologi Root Cause Analysis, Training Menulis Laporan Audit, Pendeteksian & Metodologi Mengenali Kebohongan.	2018
13	Danang Priyo Aji Wicaksono	Auditor	Pendeteksian & Metodologi Mengenali Kebohongan dan <i>Workshop</i> Investigasi.	2018
14	Alethea Riski Maharani	Auditor	Pendeteksian & Metodologi Mengenali Kebohongan	2018
15	Agung Pratama Simanjuntak	Auditor	Pendeteksian & Metodologi Mengenali Kebohongan dan <i>Workshop</i> Investigasi.	2018
16	Syahrizal	Auditor	Pendeteksian & Metodologi Mengenali Kebohongan.	2018
17	Arya Wibowo	Auditor	Metodologi Root Cause Analysis, Training Menulis Laporan Audit, Pendeteksian & Metodologi Mengenali Kebohongan.	2018

## LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS AUDIT INTERNAL TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018. Audit Internal telah melaksanakan audit sebanyak 56 penugasan yang terdiri dari 52 audit umum dan 4 investigasi. Pokok-pokok hasil audit yang perlu mendapat perhatian antara lain, proses akuisisi kredit, pengelolaan dan pengikatan jaminan (BPKB), pengelolaan kendaraan inventory, perjanjian kerja sama dengan pihak ke-3, kepatuhan terhadap ketentuan regulator, dan penanganan debitur *overdue* (AR Handling).

## AUDITOR EKSTERNAL/ AKUNTAN PUBLIK

Akuntan publik merupakan organ eksternal Perseroan yang berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perseroan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Keberadaan

akuntan publik diatur melalui Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

### KEPATUHAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Perseroan dan patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga

Keuangan (Bapepam-LK) yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. VIII.G.7, Lampiran Surat Keputusan No. KEP-347/BL/2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

### PROSEDUR AUDIT EKSTERNAL DAN STANDAR AUDIT

- Audit atas laporan keuangan Perseroan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.
- Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.
- Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan.
- Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen.
- Manajemen, dalam hal ini Direksi, memberikan tanggung jawabnya terhadap laporan keuangan yang telah di audit oleh KAP, sesuai Peraturan OJK No. 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.
- Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perseroan untuk di-review oleh badan atau otoritas terkait.

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## KRITERIA AKUNTAN PUBLIK

Perseroan menetapkan 4 (empat) syarat atau kriteria yang harus dimiliki KAP dalam prosedur penunjukannya, yaitu sebagai berikut:

- Terdaftar di OJK
- KAP yang termasuk dalam kelompok 4 (empat)

besar di Indonesia

- Memiliki afiliasi internasional
- Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan berstatus emiten atau perusahaan terbuka

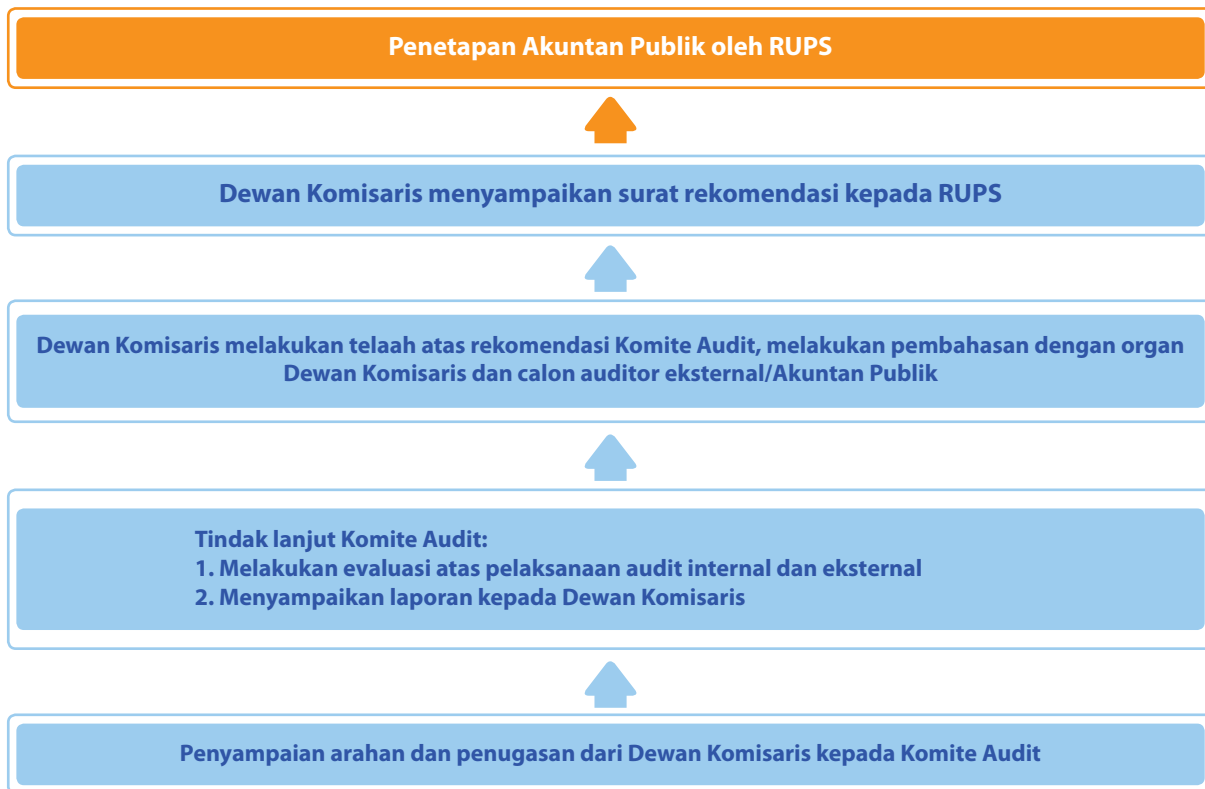
## MEKANISME PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Tahapan mekanisme penunjukan KAP:

- Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon Auditor eksternal dengan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa.
- Dewan Komisaris dapat melakukan penunjukan kembali auditor eksternal dengan berdasarkan pada hasil evaluasi atas kinerja auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan.
- Dewan Komisaris menyampaikan alasan pencalonan tersebut kepada RUPS dan besarnya honorarium/imbalance jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut.
- Usulan kepada RUPS tersebut dapat disampaikan melalui surat tersendiri yang merupakan bagian dari surat tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja tahunan Perseroan.
- Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja auditor eksternal melalui Komite Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
- Untuk proses penunjukan calon auditor eksternal dan atau penunjukan kembali auditor eksternal yang dilakukan oleh RUPS, Dewan Komisaris cukup memberikan kuasa kepada RUPS untuk menetapkan auditor tersebut.



## MEKANISME PENUNJUKAN HINGGA PENETAPAN AKUNTAN PUBLIK



## AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2018

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 9 Maret 2018 Perseroan telah menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

## AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2018

Kantor Akuntan Publik	Purwantono, Suherman & Surja ( <i>a member firm of Ernst &amp; Young Global Limited</i> )
Akuntan Publik	Danil Setiadi Handaja, CPA
Tahun Audit	Tahun Buku 2018
Periode Penugasan	2018
Jasa	Audit umum atas Laporan Keuangan
Jasa Lainnya	tidak ada
Biaya	Rp570.000.000

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## DAFTAR AKUNTAN PUBLIK

Guna kebutuhan transparansi, berikut disampaikan daftar Kantor Akuntan Publik, Akuntan dan biaya yang diberikan dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) tahun terakhir.

### DAFTAR AKUNTAN PUBLIK 2013-2018

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Akuntan	Jasa	Jasa Lainnya	Opini	Biaya Jasa
2018	Purwantono, Suherman & Surja (EY)	Danil Setiadi Handaja, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2018	Tidak ada	Wajar dalam semua hal yang material	Rp570.000.000
2017	Purwantono, Suherman & Surja (EY)	Danil Setiadi Handaja, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2017	Tidak ada	Wajar dalam semua hal yang material	Rp506.000.000
2016	Purwantono, Suherman & Surja (EY)	Yasir, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2016	Tidak ada	Wajar dalam semua hal yang material	Rp460.000.000
2015	Purwantono, Suherman & Surja (EY)	Danil Setiadi Handaja, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2015	Tidak ada	Wajar dalam semua hal yang material	Rp423.500.000
2014	Purwantono, Suherman & Surja (EY)	Danil Setiadi Handaja, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2014	Tidak ada	Wajar dalam semua hal yang material	Rp390.500.000
2013	Purwantono, Suherman, & Surja (EY)	Peter Surja, CPA	Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2013	Tidak ada	Wajar dalam semua hal yang material	Rp367.500.000

# MANAJEMEN RISIKO

## KOMITMEN PENGELOLAAN RISIKO YANG HANDAL

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Perseroan sangat menyandari tentang berbagai potensi risiko yang akan dihadapi terlebih dalam industri pembiayaan. Untuk itulah, Perseroan menerapkan manajemen risiko guna mengidentifikasi, menganalisa, dan menerapkan strategi mitigasi terhadap risiko yang datang. Manajemen risiko korporat semakin menjadi tuntutan, karena keberhasilannya merupakan faktor kunci sukses pencapaian tujuan dan kemenangan persaingan ditingkat global. Dalam aktivitas bisnis, Perseroan menghadapi beberapa risiko yang melekat (*inherent risk*) yaitu:

### 1. Risiko Strategi

Risiko strategi adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan dalam perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi,

pengambilan keputusan bisnis yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target Perseroan.

### 2. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan Perseroan.

### 3. Risiko Aset dan Liabilitas

Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas, yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban Perseroan.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

#### 4. Risiko Kepengurusan

Risiko kepengurusan adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan manajemen dalam memelihara komposisi terbaik pengurusnya, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

#### 5. Risiko Tata Kelola

Risiko tata kelola adalah risiko yang muncul karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan GCG, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian di Perseroan.

#### 6. Risiko Dukungan Dana

Risiko dukungan dana adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal yang ada pada Perseroan, termasuk kurangnya akses tambahan dana dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana yang tidak terduga.

#### 7. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang muncul akibat kegagalan *customer* dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan.

## PEMBENTUKAN DIVISI MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PEMANTAU PENGELOLAAN RISIKO PERSEROAN

Perseroan telah membentuk Divisi Manajemen Risiko agar pengelolaan manajemen risiko lebih maksimal dan terukur sehingga menghindari dampak kerugian bagi Perseroan yang diakibatkan dari risiko tersebut. Divisi Manajemen Risiko

dipimpin oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko yang ditunjuk oleh Direksi. Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, Divisi Manajemen Risiko mengacu pada pedoman Manajemen Risiko yang mengatur tugas, kewajiban serta wewenangnya.

## RM INDRA WARDHANA

Kepala Divisi Risk Management

### DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia  
Jakarta/ 9 Maret 1969 (49 tahun)

### DOMISILI

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

### PENDIDIKAN

Sarjana Teknik Industri dari Universitas Pasundan (1996)

### BERGABUNG DI MTF

1 Maret 2015



### PENGALAMAN KERJA

*Consumer Risk Departement Head* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005 - 2008), *Consumer Collection Departement Head* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2002 - 2005), *Consumer Collection Section Head* PT Bank Mandiri (2001 - 2002), *Manager* PT Bank Mandiri Cabang Ternate (1999 - 2001), *Retail Officer* PT Bank Mandiri Cabang Manado (1998 - 1999), *Retail Officer* PT Bank Mandiri Cabang Gorontalo (1996 - 1998). Beliau memulai karirnya sebagai *Officer Development Program* di PT Bank Bumi Daya.

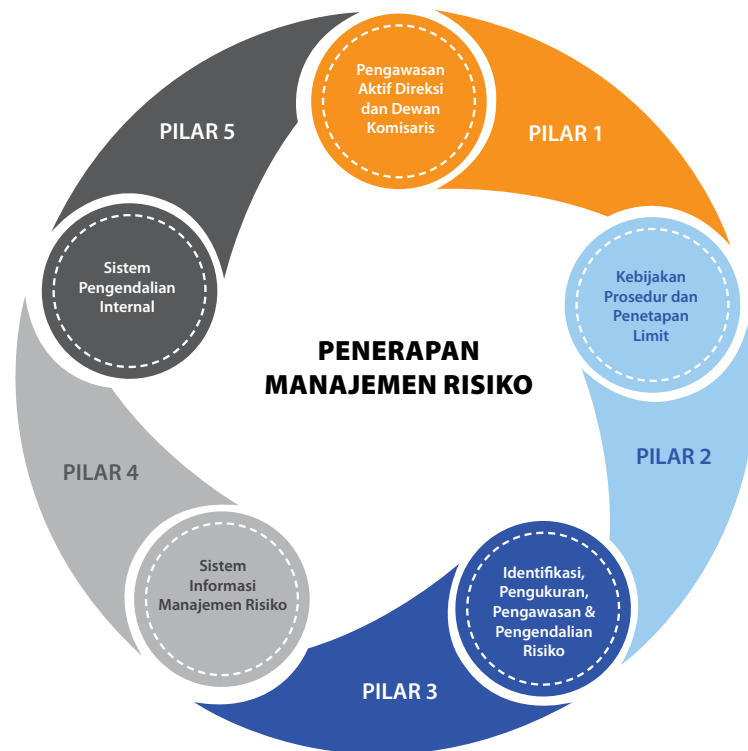
### SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2018

Mengikuti Sertifikasi Dasar Pembiayaan - Managerial yang diselenggarakan PT. Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) (2016); Sertifikasi Management Resiko Program Eksekutif oleh Badan Sertifikasi Manajemen Resiko (BSMR) (2016)

## PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO MANDIRI TUNAS FINANCE

Manajemen risiko bertujuan menjaga modal Perseroan, meningkatkan nilai Perseroan, mengoptimalkan profil *risk-return*, mendukung proses pengambilan keputusan serta melindungi reputasi Perseroan. Sesuai dengan POJK NO. 1/

POJK.05/2015 tertanggal 26 Maret 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dalam implementasi manajemen risiko Perseroan bertumpu pada 5 (lima) pilar yang diuraikan sebagai berikut:



### PILAR 1

#### PENGAWASAN AKTIF

Direksi dan Dewan Komisaris Pengawasan aktif tersebut tercermin sejak perencanaan bisnis melalui:

- Penetapan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan otoritas dalam pemberian batasan serta tinjauan atas kualitas portofolio secara berkala
- Melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif
- Memastikan struktur organisasi yang memadai
- Evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala
- Terdapatnya Komite Audit, Unit Kerja *Compliance*, Divisi Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko sebagai bagian organ Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya

**PILAR  
2**

## **KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN PENETAPAN LIMIT**

Perusahaan menyusun kebijakan-kebijakan terkait manajemen risiko yang diperiksa secara berkala dan selalu disesuaikan dengan keadaan usaha terkini. Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis perusahaan dan dalam penyusunannya harus dikoordinasikan dengan fungsi atau satuan kerja terkait. Kebijakan-kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam Standard Operational Procedure (SOP) yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perusahaan juga telah menetapkan limit risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk Appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*) dan strategi perusahaan secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal perusahaan untuk menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul. Dalam rangka pengendalian risiko, limit digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang dilakukan manajemen. Limit juga dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik jika terjadi perubahan. Perusahaan juga memiliki kebijakan-kebijakan mengenai batasan persetujuan/otorisasi untuk transaksi kredit maupun yang bukan transaksi kredit. Kebijakan pencadangan kerugian piutang Perusahaan juga sejalan dengan kebijakan pencadangan pada Perusahaan Induk yang sesuai dan patuh terhadap ketentuan regulator.

**PILAR  
3**

## **IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RISIKO**

Perusahaan memiliki perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengendalikan 7 risiko yang ada secara berkala, baik secara bulanan, triwulan, dan semester. Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Perusahaan dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko serta dampaknya.

Selanjutnya, Perusahaan telah melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran Risiko, Perusahaan menetapkan satuan kerja yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah risiko. Selain itu, efektivitas penerapan Manajemen Risiko didukung oleh pengendalian Risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan Risiko.



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## PILAR 4

### SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, MTF telah mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha. Sebagai contoh yaitu MTF *Report* yang berisi indikator *leading*, *coincidence* dan *lagging* berbasis *mobile* yang menyediakan informasi secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga Direksi, Dewan Komisaris dan kepala unit kerja terkait dapat cepat dalam mengambil keputusan.

## PILAR 5

### SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

MTF memiliki Unit Audit Internal yang secara independen melaporkan proses dan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Akuntabilitas dari Unit Audit Internal mencakup:

- Menyediakan penilaian atas kecukupan dan efektifitas dari semua proses yang ada di dalam Perusahaan.
- Melaporkan masalah-masalah penting yang terkait dengan proses pengendalian aktivitas-aktivitas di dalam Perusahaan termasuk perbaikan yang potensial terhadap proses-proses tersebut; dan
- Koordinasi dengan fungsi pengendali dan pengawasan lainnya (manajemen risiko, kepatuhan, hukum dan audit eksternal).

## PENGELOLAAN RISIKO TERINTEGRASI DENGAN ENTITAS INDUK

Selain itu, sebagai entitas anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Perseroan juga melakukan Konsolidasi Risiko dengan entitas induk dimana aktivitas ini merupakan bukti kepatuhan kepada Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 dan Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tertanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Melalui kepatuhan tersebut, penerapan manajemen risiko Perseroan merupakan pendekatan terpadu dan konsisten dalam melakukan penelaahan, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko terhadap seluruh komponen kelompok Perseroan. Perkembangan konsolidasi ini secara berkala telah dikomunikasikan Bank Mandiri kepada regulator.

Konsep konsolidasi manajemen risiko dengan entitas induk dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu:

1. *First Line*, yang berkaitan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.
2. *Second Line*, yang lebih merupakan pendekatan kebutuhan internal Perusahaan secara keseluruhan yang mencakup perangkat (*tools*), kesadaran risiko (*awareness*), tata kelola perusahaan (*governance*), dan system informasi manajemen risiko (*system*).

Berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan dalam rangka konsolidasi risiko antara lain:

- *Annual Risk Consolidation Conference (ARCC)* antara Perusahaan Induk dan seluruh Perusahaan Anak;
- *Forum Integrated Risk Committee (FIRC)* yang dilakukan bersama Bank Mandiri setiap triwulan untuk membahas perkembangan Profil Risiko Inherent dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) di MTF.
- Penerapan *Risk Appetite Statement (RAS)* bersama dengan Bank Mandiri sebagai salah satu *tools Risk Management* untuk mengukur tingkat risiko yang masih dapat diterima Perusahaan dalam mendukung strategi bisnis.
- Pelaksanaan *stress testing* terintegrasi Bank Mandiri dengan perusahaan anak setiap triwulan, menggunakan beberapa asumsi/skenario sebagai bentuk antisipasi aksi perusahaan pada kondisi lingkungan bisnis yang buruk.
- Penerapan model skoring yang dibuat dan dikalibrasi secara berkala oleh Bank Mandiri sesuai dengan kondisi bisnis MTF.
- *Monitoring* kondisi likuidas perusahaan secara mingguan untuk dilaporkan kepada Perusahaan Induk sebagai bentuk konsolidasi risiko.
- *Risk Awareness Survey (RAWS)* dilakukan setiap tahun untuk mengetahui perkembangan *risk awareness* pegawai MTF.
- *Risk Based Bank Rating* dilakukan setiap semester untuk mengetahui perkembangan kemampuan permodalan dan tingkat rentabilitas MTF.
- *Integrated Central Liabilities System (ICLS)* merupakan system yang berisi kumpulan data debitur Bank Mandiri dan seluruh Perusahaan Anak.

## JENIS-JENIS RISIKO YANG DIHADAPI DAN PENGELOLAAN SERTA MITIGASINYA DI TAHUN 2018

Sesuai dengan bisnis inti yang dijalankan, terdapat 3 (tiga) risiko terbesar yang dihadapi Perseroan di sepanjang tahun 2018, yaitu risiko kredit atau pembiayaan, risiko operasional dan risiko aset dan liabilitas pada level yang diterima sehingga menjadi perhatian tersendiri bagi Perseroan dalam melakukan mitigasi.

### 1. Risiko Pembiayaan dan Pengelolaannya

Risiko pembiayaan berasal dari aktivitas pemberian pembiayaan. Pengelolaan risiko pembiayaan bertujuan untuk mengukur, mengantisipasi, dan meminimalisir kerugian akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

- **Kebijakan Pembiayaan**

Penjabaran kebijakan pembiayaan secara operasional dituangkan dalam bentuk *Standard Operational Procedure* (SOP). Proses pengelolaan pembiayaan diawali dengan penetapan target market, melakukan *risk assessment* dan *monitoring* atas pemberian pembiayaan. Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan, dimana fungsi analisa kredit dilakukan oleh unit bisnis dan unit risiko pembiayaan yang independen, fungsi persetujuan kredit dilakukan secara "4 eyes principle" Konsep persetujuan kredit yang dilakukan oleh fungsi sales dengan fungsi kredit menggunakan sistem *credit scoring* yang dikembangkan dan dipelihara oleh Divisi Risk Management Perseroan dan entitas induk, Bank Mandiri.

- **Persetujuan Pembiayaan**

Dalam menilai aplikasi kredit, Perseroan senantiasa mengacu pada regulasi

dan prinsip kehati-hatian diantaranya berdasarkan factor penilaian kemampuan membayar, prospek usaha dan kinerja debitur. Perseroan telah menerapkan *mobile survey* dalam rangka meningkatkan kualitas pencairan kredit. Proses kredit dan pengelolaan risiko pembiayaan segmen *retail* dilakukan melalui proses end-to end yang terintegrasi dalam *system e-Star*. Proses pengambilan keputusan pada segmen *corporate* atau *fleet* dilakukan melalui rapat Komite Kredit (RKK). Sedangkan pada segmen *retail* dilakukan melalui sistem *credit scoring*. Model *credit scoring* secara berkala dilakukan validasi untuk memastikan keakuratannya. Untuk mempercepat proses pengambilan keputusan kredit, Perseroan telah memberikan kewenangan memutus kredit kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan kualifikasi tertentu.

- **Monitoring Pembiayaan**

Monitoring pembiayaan pada segmen *corporate* atau *fleet* dilakukan dengan menggunakan metode *Watch List* yang merupakan suatu metode standar, terstruktur dan komprehensif dalam memantau kinerja debitur, sehingga dapat segera dilakukan penanganan dini untuk mencegah penurunan kualitas kredit debitur. Monitoring dilakukan secara harian dengan adanya fungsi kerja khusus penanganan account bermasalah/berpotensi bermasalah di unit kerja *fleet*. Monitoring untuk kredit *retail* dilakukan pada tingkat portofolio melalui analisa portofolio dari berbagai aspek (kualitas dan kuantitas portofolio dari berbagai sudut analisa) yang dituangkan dalam *monthly portfolio review*. Perseroan

juga melakukan monitoring secara berkala terhadap pejabat pemegang kewenangan memutus kredit untuk memantau kualitas keputusan. Sebagai langkah antisipatif (*early warning signal*), dilakukan proses simulasi dan stress testing terhadap portofolio secara berkala untuk mengetahui perubahan kualitas portofolio terhadap perubahan makro ekonomi. Hasil simulasi memberikan panduan bagi Perseroan untuk memonitor secara lebih ketat sektor-sektor atau debitur-debitur yang berpotensi mengalami penurunan kualitas serta untuk menetapkan langkah-langkah antisipatif guna mencegah terjadinya dampak yang buruk.

- **Credit Collection dan Recovery**

Perusahaan secara khusus menjalankan kebijakan penanganan *collection* dan *recovery* yang dibuat secara lebih terfokus, sistematis, agresif dan terintegrasi berdasarkan jenis produk dan masing-masing bucket collection. Kebijakan tersebut didukung oleh *Automatic Collection System* yang sifatnya *end-to-end* dan dilengkapi dengan collection reports. Perseroan juga telah mengimplementasikan mobile collection yang dilengkapi dengan EDC untuk memudahkan *field collector* dalam melakukan penagihan.

## 2. Risiko Operasional dan Pengelolaannya

Risiko operasional yang dihadapi oleh Perseroan disebabkan karena tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Pengelolaan risiko operasional yang efektif dapat menekan kerugian akibat risiko

operasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan risiko operasional, Perseroan melakukan hal seperti penyesuaian metodologi *Risk Based Audit* melalui sinkronisasi *risk library*; menyediakan media komunikasi dengan Direktur Utama yang dinamakan "*letter to CEO*" sebagai *Whistle Blowing System*; dan melakukan implementasi perangkat yang dinamakan *Operational Risk Management Tools* (ORM Tools). *ORM Tools* yang dipergunakan untuk pelaksanaan ORM adalah sebagai berikut:

- a. **Quality Assurance (QA)**

QA merupakan *tools* yang digunakan untuk memastikan kualitas pembiayaan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. **Risk Control & Self Assessment (RCSA)**

RCSA dipergunakan untuk identifikasi dan menilai risiko yang melekat pada aktivitas bisnis Perseroan dan menilai kualitas control yang telah dilakukan setiap triwulan.

- c. **MTF Loss Events Database (MLED)**

Pencatatan dilakukan oleh setiap unit kerja setiap bulan secara *online/web based*.

- d. **MTF Early Detection System (MEDS)**

MEDS merupakan system pendeteksi dini terkait proses akuisisi kredit, collection, maupun *fraud event* yang melekat pada proses bisnis yang berpotensi merugikan Perseroan.

- e. **Business Continuity Management**

Selain *tools* tersebut di atas, untuk menjamin kelangsungan operasional dalam kondisi darurat, Perseroan memiliki suatu rencana komprehensif yang berisi langkah-langkah yang harus diambil sebelum, selama dan setelah terjadinya suatu keadaan darurat. Kebijakan perusahaan dalam menjamin

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

kelangsungan operasional bisnis diatur dalam *Business Continuity Management* (BCM) yang mencakup *Business Continuity Plan* (BCP), *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Emergency Response Procedure* (ERP):

- **Disaster Recovery Plan (DRP)**

DRP adalah suatu perencanaan menyeluruh mengenai tindakan yang harus diambil sebelum, selama dan setelah suatu peristiwa yang mengganggu dan menyebabkan suatu kerugian sistem informasi. Tujuan DRP yaitu menanggulangi kondisi krisis agar proses kegiatan operasional Perseroan tetap berjalan dengan baik ketika terjadi *downtime system server* dengan menggunakan sistem cadangan (*back up*) yang telah dipersiapkan.

- **Emergency Response Plan (ERP)**

ERP adalah suatu strategi perencanaan untuk mengantisipasi dan menanggulangi keadaan darurat dengan membentuk suatu tim yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan tindakan penyelamatan pada saat terjadi keadaan darurat.

- **Business Continuity Plan (BCP)**

BCP adalah suatu perencanaan yang difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan fungsi bisnis saat terjadi gangguan kritis yang disebabkan oleh bencana alam atau yang dibuat oleh manusia yang berpotensi menyebabkan kerugian sehingga dapat meminimalisasi efek gangguan dan untuk memungkinkan bisnis terus

berlangsung.

Dalam hal pengelolaan risiko operasional, unit kerja *Risk Management* berperan sebagai *second line of defense* dan Internal Audit sebagai *third line of defense*. Sedangkan unit kerja bisnis sebagai *risk owner* merupakan *first line of defense* yang bertanggung terhadap pengelolaan risiko operasional pada unit kerja masing-masing.

### 3. Risiko Aset dan Liabilitas dan Pengelolaan

Fokus utama Perseroan dalam pengelolaan risiko *asset* dan liabilitas adalah pada masalah likuiditas perusahaan. Permasalahan likuiditas dapat terjadi apabila perusahaan gagal menyediakan likuiditas dengan harga yang wajar dan nyaman secara bisnis. Perseroan setiap bulan mengelola risiko *asset* dan liabilitas melalui *Asset Liability Committee* (ALCO). Perseroan telah mengikat perjanjian dengan Bank Mandiri dalam hal Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) sehingga dihasilkan komitmen penyediaan pendanaan dari Bank Mandiri sepanjang tahun. Selain pembiayaan bersama, Perseroan juga telah mendapatkan komitmen pinjaman dari beberapa bank lokal maupun swasta internasional dengan jangka waktu yang cukup panjang dan mengcover tenor pinjaman debitur.

### 4. Risiko Lainnya

Disamping risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko *asset* dan liabilitas, Perseroan juga menaruh perhatian pada risiko-risiko lain yang harus dikelola, antara lain : risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko strategik dan risiko dukungan dana. Keseluruhan risiko

tersebut dikelola secara terintegrasi dengan Bank Mandiri melalui *Forum Integrated Risk Committee* (FIRC) setiap triwulan. Dalam hal risiko kepengurusan, Perseroan menggunakan indikator/parameter berupa penetapan prosedur dan legalitas dokumen terkait dengan penunjukan dan pemberhentian Direksi/Dewan Komisaris, kepemilikan komposisi dan proporsi Direksi/Dewan Komisaris yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dan adanya penetapan kriteria atas kompetensi dan integritas yang baik bagi Direksi/Dewan Komisaris. Dalam hal risiko tata kelola, Perseroan menggunakan indikator/parameter berupa kelengkapan pedoman tata kelola yang memadai, prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran

dan kesetaraan, serta Manajemen Risiko yang dilaksanakan dengan baik.

Dalam hal risiko strategis, Perseroan melakukan *review* kinerja dan evaluasi kebijakan penyusunan target bisnis dan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rencana strategi dan target bisnis sesuai dengan *Risk Appetite* serta mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal. Sementara, dalam hal risiko Dukungan Dana, Perseroan menggunakan indikator/parameter berupa kemampuan pendanaan dan tambahan pendanaan Perseroan yang dievaluasi secara berkala melalui pencapaian rasio Tingkat Kesehatan Keuangan (TKK).

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

# SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

## PRINSIP PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam rangka mencapai tujuan terkait pengelolaan kegiatan operasi dan bisnis yang efektif dan efisien, Perseroan membentuk Sistem Pengendalian Internal yang bertujuan untuk menciptakan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Perseroan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga tercipta budaya perusahaan yang baik. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Internal di lingkup Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Perseroan
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
4. Mengurangi dampak kerugian dari adanya penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi sumber daya



## PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DI LINGKUP PERSEROAN

Sistem Pengendalian Internal diterapkan mulai dari penetapan sasaran dan strategi di seluruh organisasi, identifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi sasaran dan strategi dimaksud, dan pengelolaan risiko agar tetap berada dalam batas toleransi (*risk appetite*), untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan Perseroan. Kerangka kerja sistem pengendalian internal yang menjadi acuan Perseroan adalah kerangka kerja terbaik (*best practices*) yang telah dipraktekkan oleh perusahaan-perusahaan di dunia, yaitu *COSO Internal Control Framework*, yang antara lain mencakup komponen-komponen:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam Perseroan, yang terdiri dari integritas, nilai etika dan kompetensi dari Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai Perseroan, filosofi dan gaya kepemimpinan manajemen termasuk cara yang ditempuh dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya, pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia serta perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Manajemen risiko, yang mencakup proses identifikasi, analisa, penilaian dan mitigasi atau respon atas risiko yang relevan dengan bidang usaha Perseroan.
3. Aktivitas kontrol, mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan agar seluruh proses di Perseroan terkendali sesuai sasaran yang telah ditetapkan, antara lain aktivitas yang terkait dengan struktur organisasi mencakup kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan pengamanan aset perusahaan.
4. Sistem informasi dan komunikasi, mencakup aktivitas yang terkait dengan penyajian laporan kegiatan Perseroan dan penyampaian kepada pihak terkait, yang antara lain mencakup informasi dan komunikasi kegiatan operasional, kegiatan finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5. Monitoring, mencakup aktivitas atau proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk kualitas fungsi Audit Internal dan kualitas unit kerja di dalam struktur organisasi Perseroan, sehingga sistem pengendalian internal dapat dilaksanakan secara optimal, dan penyimpangan yang terjadi segera dilaporkan kepada Direksi dan Komisaris melalui Komite Audit.

### KOMPONEN DALAM KERANGKA KERJA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL MANDIRI TUNAS FINANCE SESUAI COSO INTERNAL CONTROL FRAMEWORK



## PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

---

Perseroan memiliki komitmen untuk mengungkapkan laporan tersebut kepada semua pihak yang berkepentingan secara adil dan transparan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya, Perseroan senantiasa memelihara sistem pengendalian internal yang menjamin keandalan dan kecukupan setiap transaksi. Penyajian laporan keuangan (neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas) pada setiap tahun buku dilakukan untuk memenuhi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Perseroan. Untuk memenuhi semua prinsip di atas, Perseroan telah memiliki kebijakan yang menjamin bahwa transaksi dicatat dengan segera, akurat

dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai. Transaksi yang tercatat dalam sistem akuntansi sekurang-kurangnya telah mendapatkan persetujuan Manajemen yang memiliki kewenangan untuk keperluan tersebut dan dicatat dengan benar. Setiap laporan keuangan perusahaan secara wajar dan akurat menggambarkan transaksi yang sebenarnya tanpa sedikitpun adanya upaya menyembunyikan fakta kepada pembaca laporan. Semua pihak, baik Direksi, Komisaris dan Karyawan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tersebut, wajib memahami dan menjalankan kebijakan sistem pengendalian internal dan prosedur pencatatan akuntansi keuangan perseroan.

## TINJAUAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

---

Sistem pengendalian internal diberlakukan untuk menjaga *asset* terhadap penyalahgunaan dan pengalihan kepemilikan secara tidak sah, menjaga keabsahan catatan-catatan akuntansi dan keandalan informasi keuangan yang digunakan di dalam perusahaan maupun yang dipublikasikan. Manajemen Perseroan senantiasa melakukan

penilaian efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perseroan. Selain itu, evaluasi atas efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan juga dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik pada saat proses pelaporan keuangan tahunan.

# CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi sebuah wadah bagi Perseroan dalam membangun hubungan yang tumbuh bersama dengan pemangku kepentingan, baik dari internal seperti manajemen dan karyawan maupun dari eksternal seperti masyarakat sekitar lokasi usaha dan konsumen. Terkait pelaksanaan CSR, Perseroan membaginya ke dalam 4 (empat) aspek.



Selengkapnya tentang pelaksanaan CSR oleh Perseroan dapat dilihat pada bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

# PERKARA PENTING

## PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Perseroan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2018 dan perbandingannya dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut,

Pihak yang Berperkara	Pokok Perkara		Status Perkara	Risiko yang dihadapi Perseroan dan Pengaruhnya Terhadap Perseroan
	Materiil	Immateril		
Muhammad Syarifudin Hidayattullah	Rp.299,360,000		Perkara sudah diselesaikan	Tidak Ada
Yudi Syaifullah	RP.1,500,000,000		Perkara sudah diselesaikan	Tidak Ada
Juanda	Rp.420,260,000		Perkara sudah diselesaikan	Tidak Ada
Agung Kurniawan	Rp.93,357,600	Rp.500,000	Perkara sudah diselesaikan	Tidak Ada
Joko Kristanto	Rp.116,096,000		Perkara sudah diselesaikan	Tidak Ada
Heri Subroto	Rp.151,704,000		Perkara sudah diselesaikan	Tidak Ada

Pihak yang Berperkara	Pokok Perkara		Status Perkara	Risiko yang dihadapi Perseroan dan Pengaruhnya Terhadap Perseroan
	Materiil	Immateriil		
Joko Kristanto	Rp.116,096,000		Perkara sudah diselesaikan	Tidak Ada
Heri Subroto	Rp.151,704,000		Perkara sudah diselesaikan	Tidak Ada
PT Mulia Restu Mandiri Group	Rp.8,000,000,000		Perkara sudah diselesaikan	Tidak Ada
Joko Kristanto	Rp.116,096,000		Perkara sudah diselesaikan	Tidak Ada
Heri Subroto	Rp.151,704,000		Perkara sudah diselesaikan	Tidak Ada
Yullyanti A.R	Rp.377,995,000		Perkara sudah diselesaikan	Tidak Ada
Siti Maimunah	Rp.414,000,000		Dalam proses pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin	Tidak Ada
Abdul Rahman Gobel	Rp.287,073,000	Rp.50,000	Dalam proses persidangan di PN Gorontalo	Tidak Ada
PT Rajawali Duta Sarana	Rp.1,743,500,000	Rp.150,000,000	Dalam proses persidangan di PN Padang	Tidak Ada
Yulia Setiana Mulder	Rp.228,850,000	Rp.1,000,000,000	Perkara sudah diselesaikan	Tidak Ada
Karyanto Pieter	Rp.2,000,000,000		Dalam proses persidangan di PN Makassar	Tidak Ada
Brian Hartanto	Rp.2,000,000,000		Dalam proses persidangan di PN Makassar	Tidak Ada
Riska Fauziah	Rp.139,320,000	Rp.70,480,000	Dalam proses persidangan di PN Pandegelang	Tidak Ada
Ida Khusnul Farida	Rp.1,155,900,000		Dalam proses persidangan di PN Sleman	Tidak Ada
Armen Dedi	Rp.719,450,000		Dalam proses persidangan di PN Sleman	Tidak Ada
Yuhana Noviza	Rp.11,000,000,000		Dalam proses persidangan di PN Lampung	Tidak Ada

Pihak yang Berperkara	Pokok Perkara		Status Perkara	Risiko yang dihadapi Perseroan dan Pengaruhnya Terhadap Perseroan
	Materiil	Immateril		
Lili M. Suhu	Rp.690,562,000		Dalam proses persidangan di PN Manado	Tidak Ada
Vike Rumambi	Rp.225,437,000		Dalam proses persidangan di PN Manado	Tidak Ada
Yelis Piyohu	Rp.150,278,000		Dalam proses persidangan di PN Gorontalo	Tidak Ada
Nirta S. Ohihiya	Rp.99,382,000		Dalam proses persidangan di PN Gorontalo	Tidak Ada
Yudi Syaifullah	Rp.187,000,000		Perkara sudah diselesaikan	Tidak Ada
Lukman	Rp.2,300,411,100		Dalam proses persidangan di PN Jambi	Tidak Ada
PT Wahana Lestari Investama	Rp.696,538,324		Perkara sudah diselesaikan	Tidak Ada
PT Almater Bangun Persada	Rp.4,260,177,000		Dalam proses persidangan di PN Ciamis	Tidak Ada
Ling Kurnaedi	Rp.100,000,000		Dalam proses persidangan di PN Bogor	Tidak Ada
Mamat Rahmat	Rp.71,584,100		Dalam proses pengajuan keberatan di PN Bandung	Tidak Ada
iis Risna	Rp.186,760,000		Dalam proses persidangan di PN Tangerang	Tidak Ada
PT Batu Anugerah Mineral Resource	Rp.20,585,175,644		Dalam proses persidangan di PN Jakarta Pusat	Tidak Ada
PT Prima Multi Arta	Rp.391,747,600		Dalam proses persidangan di PN Jakarta Pusat	Tidak Ada
Hendrik Yudi	Rp.2,000,000,000		Dalam proses persidangan di PN Makassar	Tidak Ada

---

## SANKSI ADMINISTRASI

---

Di sepanjang tahun 2018 tidak terdapat sanksi administrasi yang dikenakan oleh otoritas terkait baik kepada Perseroan maupun kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

## PERKARA PENTING DI LUAR ASPEK HUKUM

---

Perseroan tidak menemukan adanya perkara penting di luar aspek hukum yang melibatkan Perseroan maupun kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

# AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Perseroan senantiasa memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk mengakses informasi dan data perusahaan melalui situs web [www.mtf.co.id](http://www.mtf.co.id) yang disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain sebagai

sarana penyebaran informasi kepada publik, situs web ini juga merupakan upaya Perseroan dalam menerapkan praktik GCG dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan.

## TATA KELOLA INFORMASI DAN AKSES DATA PERUSAHAAN UNTUK PIHAK EKSTERNAL

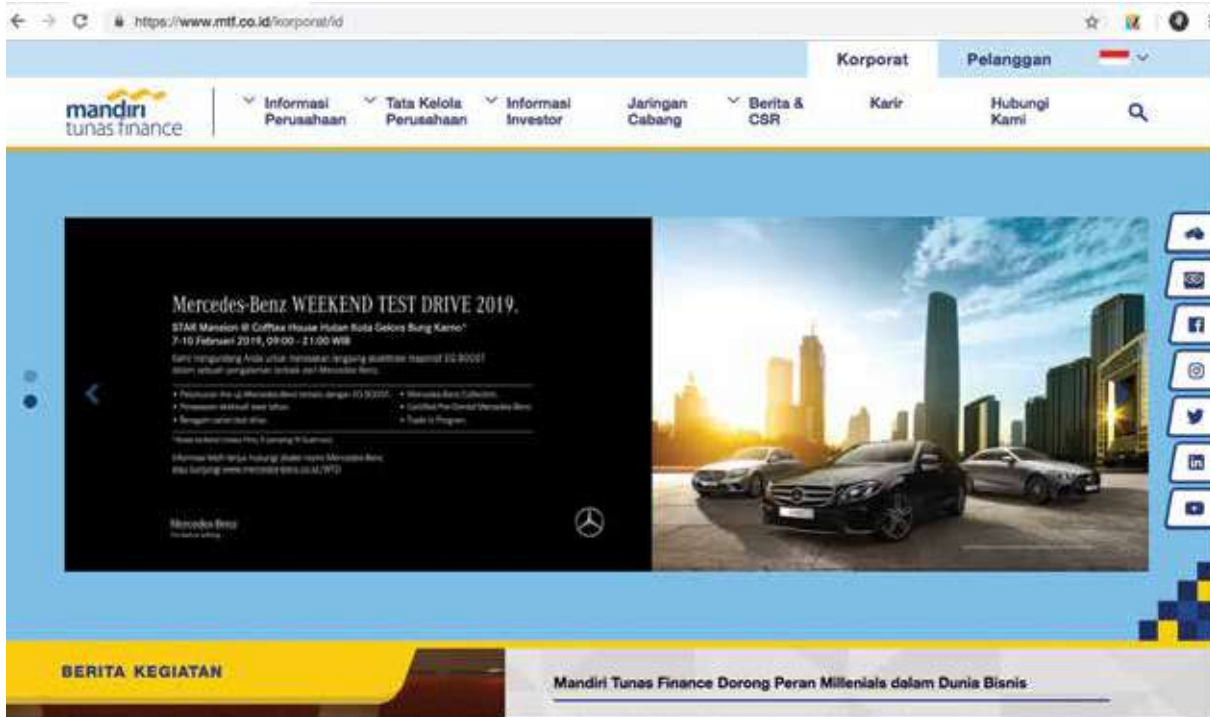
Perseroan menyediakan akses informasi dan data perusahaan untuk Pihak Eksternal dengan cara berikut:

- **Pengelolaan Situs Web**  
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten dan Perusahaan Publik, Perseroan telah memiliki situs web resmi yang mencerminkan identitas Perseroan dan dapat diakses melalui [www.mtf.co.id](http://www.mtf.co.id). Situs web Perseroan terbagi ke dalam 2 (dua) platform, yaitu situs web produk dan jasa dengan alamat [www.mtf.co.id](http://www.mtf.co.id) yang dikelola oleh marketing, dan situs web korporasi dengan alamat [www.mtf.co.id/korporat](http://www.mtf.co.id/korporat) yang dikelola oleh Sekretaris Perusahaan. Situs web Perseroan juga telah tersedia dalam 2 (dua) bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan

Bahasa Inggris. Perseroan secara berkala memperbarui situs web untuk senantiasa memberikan informasi terbaru terkait Perseroan kepada para pemangku kepentingan serta dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Situs web Perseroan juga menyediakan nomor kontak serta alamat email dan pos yang dapat dihubungi untuk komunikasi selanjutnya dengan para pemangku kepentingan.

Di bawah ini tersaji kesesuaian konten situs web korporasi Perseroan [www.mtf.co.id/korporat](http://www.mtf.co.id/korporat) dengan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.





POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	Kesesuaian dengan Situs Web Perseroan
<b>Ketentuan Umum</b>	
Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan informasi dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Informasi yang disajikan dalam bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia.	✓
Informasi yang termuat mengenai Emiten atau Perusahaan Publik terbuka untuk umum, aktual, dan terkini.	✓
Dapat diakses setiap saat oleh semua pihak.	✓
<b>Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik</b>	
Identitas Perusahaan, mencakup nama, alamat dan kontak kantor pusat dan/atau kantor perwakilan Emiten atau Perusahaan Publik, dan alamat pabrik (jika ada) yang paling kurang meliputi nomor telepon, nomor faksimili, dan alamat surat elektronik yang dapat dihubungi.	✓
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik.	✓
Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik.	✓
Struktur kepemilikan Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya setiap akhir bulan.</li> <li>• Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram.</li> <li>• Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut (jika ada).</li> </ul>	✓

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	Kesesuaian dengan Situs Web Perseroan
Struktur grup Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan yang paling kurang meliputi perusahaan dalam grup Emiten atau Perusahaan Publik yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.	✓
Profil Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan Sekretaris Perusahaan paling kurang meliputi: foto, nama, riwayat jabatan- termasuk rangkap jabatan, riwayat pendidikan, dan hubungan afiliasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham (jika ada).	✓
Nama dan alamat Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dalam tahun berjalan.	✓
Nama dan alamat Pemeringkat Efek (jika ada).	✓
Nama dan alamat Wali Amanat (jika ada).	✓
Nama dan alamat Biro Administrasi Efek (jika ada).	X
Dokumen Anggaran Dasar.	✓
<b>Informasi Bagi Pemodal atau Investor</b>	
Prospektus Penawaran Umum.	✓
Laporan tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir.	✓
Informasi keuangan, paling kurang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan keuangan tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir.</li> <li>• Laporan keuangan tengah tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir.</li> <li>• Ikhtisar data keuangan penting, dalam bentuk perbandingan untuk 5 (lima) tahun buku terakhir yang paling kurang memuat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>◊ Pendapatan, laba bruto, laba (rugi), laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali, total laba (rugi) komprehensif, laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali, dan laba (rugi) per saham.</li> <li>◊ Jumlah aset, liabilitas dan ekuitas.</li> <li>◊ Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset, rasio laba (rugi) terhadap ekuitas, rasio laba (rugi) terhadap pendapatan, rasio lancar, rasio liabilitas terhadap ekuitas, dan rasio liabilitas terhadap jumlah aset.</li> <li>◊ Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan perusahaan dan jenis industrinya.</li> </ul> </li> </ul>	✓
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumuman dan pemanggilan.</li> <li>• Bahan mata acara yang dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</li> <li>• Riwayat hidup calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris apabila terdapat mata acara pengangkatan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</li> <li>• Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham.</li> </ul>	✓
Informasi saham, paling kurang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah saham beredar.</li> <li>• Pemecahan saham (jika ada).</li> <li>• Penggabungan saham (jika ada).</li> <li>• Saham bonus (jika ada).</li> <li>• Perubahan nilai nominal saham (jika ada).</li> </ul>	X
Informasi obligasi dan/atau Sukuk, paling kurang meliputi nilai obligasi yang belum lunas/terhutang (outstanding bond) dan/atau Sukuk, hasil pemeringkatan obligasi dan/atau Sukuk, tanggal jatuh tempo, dan tingkat bunga obligasi dan/atau imbal hasil Sukuk.	✓

POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	Kesesuaian dengan Situs Web Perseroan
Informasi dividen.	✓
Informasi untuk pemodal atau investor, media, publik, dan/atau analis (jika ada).	✓
Informasi terkait aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan tindakan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.</li> <li>• Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha Utama.</li> <li>• Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.</li> <li>• Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.</li> <li>• Kuasi Reorganisasi.</li> <li>• Pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.</li> <li>• Pembagian Saham Bonus.</li> <li>• Pernyataan Penawaran Tender.</li> <li>• Pembelian kembali saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam kondisi pasar yang berpotensi krisis.</li> <li>• Program kepemilikan saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan dari Emiten atau Perusahaan Publik atau pihak terkendali.</li> </ul>	X
Informasi atau Fakta Material selain yang telah diungkapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	X
<b>Informasi Tata Kelola Perusahaan</b>	
Pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris.	✓
Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau kekosongan Sekretaris Perusahaan, termasuk Sekretaris Perusahaan sementara, serta informasi pendukungnya.	✓
Piagam Unit Audit Internal.	✓
Kode etik.	✓
Pedoman kerja komite.	✓
Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit.	X
Uraian prosedur Nominasi dan Remunerasi, apabila tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.	✓
Kebijakan manajemen risiko.	✓
Kebijakan mekanisme sistem pelaporan pelanggaran (jika ada).	✓
Kebijakan anti korupsi (jika ada).	X
Kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak kreditur (jika ada).	X
Kebijakan dalam peningkatan kemampuan vendor (jika ada).	X
<b>Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan</b>	
Bidang lingkungan hidup; termasuk kebijakan, jenis program dan biaya yang dikeluarkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik.	X
Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja; termasuk kebijakan, jenis program dan biaya yang dikeluarkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik.	✓
Pengembangan sosial dan kemasyarakatan; termasuk kebijakan, jenis program dan biaya yang dikeluarkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik.	✓
Tanggung jawab produk dan/atau layanan, dengan disertai informasi pendukungnya; termasuk kebijakan, jenis program dan biaya yang dikeluarkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik.	✓

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

- **Layanan Pelanggan**

Perseroan memberikan saluran layanan pelanggan yang dapat digunakan oleh pelanggan untuk mengajukan pertanyaan, permintaan kebutuhan data, maupun keluhan.



Email: [customer.service@mtf.co.id](mailto:customer.service@mtf.co.id)  
 Care center: 15000 59  
 Whatsapp: 08111766935

- **Jejaring Sosial Perusahaan**

Perseroan juga memperhatikan perkembangan media sosial sebagai fasilitas komunikasi interaksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Perseroan membuka kanal komunikasi daring melalui Facebook, Twitter, dan Instagram.



Instagram: @mtf\_autoloan  
 Youtube: MTF AutoLoan  
 Twitter : MTF\_AutoLoan  
 LinkedIn : Mandiri Tunas Finance

- **Mobile Application**

Perseroan memiliki beberapa *mobile application* berbasis sistem operasi Android dan IOS yang

dapat digunakan oleh pelanggan maupun publik untuk mendapatkan layanan pembiayaan kendaraan bermotor dari Perseroan.



MTF Go  
 MTF Mobile  
 MTF Lelang

- **Hubungan Media**

Perseroan memanfaatkan media massa sebagai mitra untuk menyebarkan informasi tentang Perseroan kepada khalayak. Tentang kegiatan hubungan media telah diulas pada bagian Sekretaris Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

- **Laporan Tahunan**

Perseroan juga menerbitkan buku Laporan Tahunan yang dibagikan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Penerbitan dan penyampaian Laporan Tahunan juga merupakan bentuk pemenuhan Perseroan terhadap ketentuan peraturan dan informasi Perseroan serta salah satu syarat pelaksanaan RUPS.

Kegiatan Hubungan Investor Tahun 2018	Frekuensi
Investor Gathering 29 November 2018	1x

## KODE ETIK

Agar visi, misi dan nilai inti serta budaya perusahaan dapat diterapkan secara lebih nyata, diperlukan sebuah perangkat yang bersifat artikulatorif serta memiliki mekanisme *reward & punishment*. Perseroan telah menyusun Pedoman Standar Etika Perilaku sebagai Kode Etik atau *Code of Conduct*. Kode Etik ini berfungsi sebagai pedoman standar perilaku bagi seluruh insan MTF dalam berinteraksi dengan pihak dalam dan pihak luar. Kode Etik Perseroan diperkenalkan ke seluruh tingkatan di

dalam Perseroan dan tertulis dalam kontrak kerja perekrutan karyawan yang harus dipahami dan ditandatangani oleh seluruh karyawan. Kemudian, seluruh karyawan diharapkan untuk berperilaku sesuai nilai-nilai Perseroan dan menerapkan Kode Etik dalam kegiatan sehari-hari. Perseroan secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas Kode Etik, dan mengadakan program sosialisasi untuk mengingatkan dan menekankan penerapan kode etik bagi para pegawai.

### HUBUNGAN YANG HARMONIS DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Salah satu tujuan besar dari penerapan prinsip GCG adalah pengembangan hubungan entitas usaha dengan pemangku kepentingan. Perseroan merumuskan Kode Etik yang dimilikinya untuk dapat membangun hubungan yang harmonis antara

kepentingan operasi dan bisnis yang dilakukan Perseroan dengan kepentingan dari setiap pemangku kepentingan yang berada di dalam lingkaran operasi dan bisnis Perseroan maupun yang terkena dampak kegiatan operasi dan bisnis Perseroan.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

### PEMANGKU KEPENTINGAN MANDIRI TUNAS FINANCE



### VISI, MISI, SERTA NILAI DAN BUDAYA PERUSAHAAN SEBAGAI PANGLIMA

Perseroan telah merumuskan dan menetapkan visi dan misi sebagai panglima utama dalam arahan bagi pengembangan Perseroan ke depan. Visi dan misi tersebut kemudian diturunkan ke dalam Nilai-nilai dan Budaya Perusahaan yang diharapkan

dapat dipahami sebagai kebijakan mendasar Perseroan untuk mengembangkan keorganisasian yang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.



### PENETAPAN DAN ISI KODE ETIK

Isi kode etik PT Mandiri Tunas Finance sesuai Peraturan Perusahaan 2018-2020 adalah sebagai berikut:

1. Wajib melaksanakan tugas pokok sesuai dengan uraian pekerjaan dan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
2. Mencurahkan semua kemampuan diri untuk Perseroan, tidak bekerja dan mengikatkan diri pada pihak ketiga, baik perorangan maupun badan usaha atau lembaga lainnya untuk mendapatkan imbalan, kecuali telah mendapat ijin tertulis dari Perseroan.

- 
3. Senantiasa melandasi seluruh tindakan dengan mengutamakan kepentingan Perseroan, tidak mengutamakan keuntungan pribadi/ organisasi/kelompok (*conflict of interest*).
  4. Menerima dan memahami imbalan yang diberikan Perseroan telah sesuai dengan tugas dan tanggungjawab, sehingga tidak akan meminta dan menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak-pihak terkait dengan Perseroan.
  5. Menjaga diri untuk bersikap professional, sehingga tidak akan melakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait dengan Perseroan, termasuk tapi tidak terbatas pada *client, customer*, relasi dalam hal-hal yang dapat melanggar kode etik.
  6. Menjaga diri untuk selalu dapat dipercaya dalam bekerja dan akan selalu menjaga kerahasiaan atas :
    - a. Semua informasi dan data mengenai Perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai rahasia Perseroan.
    - b. Semua informasi yang telah dipercayakan oleh *customer* kepada Perseroan.
    - c. Semua transaksi yang telah dilakukan *customer* melalui Perseroan.
    - d. Semua kode rahasia yang telah dipercayakan kepada saya dalam rangka melaksanakan tugas.
  7. Menjunjung tinggi kesusilaan dan menghindarkan diri dari skandal di antara sesama pekerja.
  8. Menjaga diri untuk bersikap profesional dalam bekerja dengan menghindarkan diri dari adanya hubungan keluarga langsung dengan salah seorang karyawan di Perseroan (bapak, ibu, istri, kakak, adik dan anak).
  9. Selalu mengutamakan tugas-tugas Perseroan, tidak memakai waktu kerja untuk usaha / bisnis pribadi
  10. Menghindarkan diri untuk mempengaruhi atau mengajak pekerja lain melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Undang Undang / Peraturan Pemerintah yang berlaku.
  11. Bersedia menyerahkan kembali segala hal yang bukan menjadi hak saya kepada Perseroan meskipun hal tersebut terjadi bukan karena kesalahan sendiri.
  12. Hadir di tempat kerja dan siap melaksanakan tugas tepat pada waktu yang telah ditetapkan.
  13. Mengenakan Kartu Tanda Pengenal / Kartu Identitas Pegawai yang diberikan Perseroan selama berada di lingkungan pekerjaan.
  14. Mengenakan busana kerja yang telah ditetapkan oleh Perseroan dengan kriteria sopan, bersih dan rapih selama menjalankan tugas / pekerjaan.
  15. Berlaku sopan dan menjaga suasana persaudaraan serta keakraban dalam lingkungan kerja. Menghindarkan diri untuk menggunakan kekerasan fisik, mengancam, memfitnah ataupun mencemarkan nama baik sesama rekan kerja, yang dapat mengganggu kelancaran pekerjaan.
  16. Memelihara lingkungan kerja yang sehat dan bersih, serta menjauhkan diri dari penyalahgunaan obat-obat psikotropika dan obat-obatan terlarang, termasuk dalam hal penggunaan, pengedaran, perdagangan dan kepemilikannya.
  17. Senantiasa memelihara dengan baik semua peralatan kantor yang digunakan. Bila ada peralatan yang rusak atau hilang, saya wajib segera melapor ke atasan langsung dengan dilengkapi Berita Acara, selanjutnya atasan melaporkan kepada Departemen *General Affairs*.
  18. Perseroan dapat meminta ganti kerugian kepada saya bila terjadi kerusakan atas barang

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

- Perseroan atau kerugian lainnya karena kesengajaan maupun kelalaian.
19. Peralatan kantor, dokumen atau barang apapun merupakan inventaris Perseroan dan tidak diperkenankan untuk dibawa pulang, kecuali telah memperoleh ijin dari atasan langsung.
  20. Menyimpan semua dokumen penting Perseroan di lemari yang terkunci / tempat yang aman.
  21. Melaporkan kepada Perseroan setiap kali terjadi perubahan data yang berkaitan dengan diri saya sendiri.
  22. Memberitahukan atasan langsung secara lisan atau tertulis bila berhalangan hadir karena sakit tidak lebih dari 1(satu) hari.
  23. Apabila berhalangan hadir karena sakit lebih dari 1 (satu) hari diwajibkan menyampaikan laporan tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter.
  24. Apabila saya mangkir bekerja paling sedikit dalam waktu 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil melalui pos tercatat oleh Perseroan sebanyak 2 (dua) kali secara tertulis pada hari yang berbeda dalam 5 (lima) hari kerja tersebut, dan saya tidak dapat memberikan keterangan tertulis dengan bukti yang sah sesuai ketentuan Perseroan, maka saya dianggap mengundurkan diri dan Perseroan dapat melakukan proses pemutusan hubungan kerja.
  25. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
  26. Mematuhi Prosedur Operasional & Prosedur Administrasi yang telah digariskan oleh Perseroan.
  27. Menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai budaya Perseroan.

## MANFAAT DAN TUJUAN PENERAPAN STANDAR ETIKA PRILAKU

Perseroan berusaha melaksanakan secara konsisten menerapkan Kode Etik secara konsisten sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi, pemegang saham, perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai, Nasabah, Mitra Usaha dan masyarakat. Adapun tujuan penerapan Standar Etika Prilaku ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi secara profesional dan beretika dengan memperhatikan kepentingan dari pemangku kepentingan, sehingga pada akhirnya akan terwujud standar kerja yang maksimal bagi seluruh individu dan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku bagi Perseroan.
2. Meminimalisir segala risiko yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan maupun tuntutan hukum atau proses litigasi akibat kelalaian yang dilakukan oleh indivi di dalam Perseroan.
3. Sebagai sarana untuk terciptanya hubungan yang harmonis, sinergis dan saling menguntungkan antar pemangku kepentingan Perseroan.
4. Dalam jangka panjang mendorong perbaikan kualitas pelayanan konsumen, pengelolaan Perseroan, pengembangan nilai Perseroan dan pada akhirnya menuju pada peningkatan reputasi Perseroan.



## PEMBERLAKUAN KODE ETIK BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Penerapan Pedoman Standar Etika Perilaku Perseroan merupakan tanggung jawab seluruh insan MTF, mencakup karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh organ pendukungnya untuk berperilaku sesuai dengan budaya perusahaan

sehingga terwujud perilaku yang profesional, bertanggungjawab, wajar, patut dan dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan rekan sekerja maupun para mitra kerja.

## SOSIALISASI DAN INTERNALISASI KODE ETIK

Sosialisasi dan internalisasi merupakan tahapan penting dari penerapan Kode Etik. Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Kode Etik kepada seluruh jajaran Perseroan, pelanggan dan mitra kerja dan melakukan penyegaran secara berkala.
2. Melakukan evaluasi atas pemahaman jajaran Perseroan, baik pada masa orientasi maupun masa bekerja.
3. Pengkajian secara berkala butir-butir Kode Etik dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut. Jika diperlukan aturan pelaksanaan lebih rinci maka akan dibuat dalam kebijakan dan peraturan Perseroan.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Perseroan berupaya menghindari praktik gratifikasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Gratifikasi sendiri berpotensi bisa mempengaruhi independensi kinerja organ perusahaan sehingga berdampak buruk terhadap pada Perseroan. Oleh karena itu, guna menjaga hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan, Perseroan mengatur hal-hal terkait dengan gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya yang telah disusun.

Di tahun 2018, Perseroan secara konsisten terus melakukan perbaikan dalam hal pengendalian, salah satunya untuk pengendalian gratifikasi, dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi beserta telah terbitnya standar operating procedure pengendalian gratifikasi

dan strategi *anti fraud* yang termaktub dalam Pedoman Gratifikasi No. 03/PGN/10/2018 dan efektif berlaku sejak 17 September 2018 dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan. Dalam standar operating procedure tersebut mengatur tentang definisi gratifikasi, sifat gratifikasi, kriteria gratifikasi, prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi, pemberian dan penerimaan gratifikasi didalam internal perusahaan, pelaporan penolakan gratifikasi, pelaporan penerimaan gratifikasi, dan penanganan laporan gratifikasi.

Di tahun 2018, Perseroan pun terus-menerus melakukan sosialisasi Kebijakan Anti Gratifikasi kepada segenap insan MTF, yang rutin dilakukan di kantor pusat Perseroan.

## INFORMASI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Perseroan memiliki kebijakan untuk melarang keterlibatan individu atas nama Perseroan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik. Perseroan memiliki kebijakan untuk melarang keterlibatan individu atas nama Perseroan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik. Secara tegas, Perseroan tidak mengizinkan insan MTF menggunakan fasilitas atau sumber daya apapun untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik maupun untuk tujuan partisipasi politik. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Standar Etika Perilaku Perseroan.

Sebaliknya, kepedulian yang tinggi terhadap masalah sosial dan kemasyarakatan merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, yang diwujudkan melalui program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penjelasan lebih rinci tentang kegiatan CSR yang telah dilakukan Perseroan di sepanjang tahun 2018, serta nilai nominalnya dapat dilihat pada Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

## KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh pegawai senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang fair, nilai sportifitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip GCG. Perseroan juga berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan. Perseroan juga senantiasa memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perseroan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha dengan semangat anti korupsi yakni menjauhkan diri dari perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang tertanam dalam benak seluruh insan MTF. Oleh karenanya, MTF senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang fair, nilai sportifitas dan profesionalisme, serta prinsip-

prinsip GCG sehingga mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat.

Komitmen tersebut merupakan cerminan dari implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti :

- Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kebijakan Gratifikasi

MTF berupaya menghindari praktik gratifikasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Gratifikasi sendiri berpotensi bisa mempengaruhi independensi kinerja organ perusahaan sehingga berdampak buruk terhadap pada Perseroan. Oleh karena itu, guna menjaga hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan, Perseroan mengatur hal-hal terkait dengan gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya yang telah disusun.

# KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

## PRINSIP DASAR DAN KETENTUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUP MANDIRI TUNAS FINANCE

Dalam melakukan pengadaan barang dan jasa Perseroan menerapkan efisien, akurat serta transparansi. Dasar hukum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini mengacu pada aturan Standar Operasional Perusahaan tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa dilakukan secara hati-hati mulai dari perencanaan, pengadaan, pemilihan/seleksi penyedia Barang dan Jasa, serta pengawasan pelaksanaan pengadaan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Efisien, berarti pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Efektif, berarti pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Terbuka dan Bersaing, berarti pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/criteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil/Tidak Diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon

penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, Perseroan telah menerapkan prosedur sebagai berikut:
  - a. Pelaksana Pengadaan Terdapat 3 kelompok pelaksana pengadaan yang dapat memproses pengadaan barang dan jasa perusahaan, yaitu:
    - Departemen *Procurement dan General Affair* - Tim pengadaan yang terdiri dari Departemen *procurement dan General Affair* ditambah dengan unit kerja lain yang terkait serta;
    - Panitia pengadaan yang terdiri dari Departemen *Procurement dan General Affair* dan/atau Divisi terkait dan Legal untuk melaksanakan proses pengadaan Barang dan Jasa yang pada dasarnya dilaksanakan secara Pelelangan Umum/ Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum/ Seleksi Terbatas.
  - b. Dokumen pengadaan: Setiap pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa wajib didokumentasikan untuk digunakan sebagai bukti otentik pengadaan Barang dan Jasa.
  - c. Daftar Penyedia barang dan jasa: Penyedia barang dan jasa harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan sehingga pengadaan barang dan jasa sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
  - d. Sistem Penyampaian penawaran : Cara penyampaian penawaran dapat memilih salah satu dari ketiga sistem yang telah ditetapkan sebelumnya didalam dokumen pengadaan yaitu:
    - Sistem satu sampul: sistem ini diberlakukan untuk pengadaan bvv spesifikasi teknis, metode kerjanya dan/ atau produknya dapat dibuat dengan jelas dan pasti.
    - Sistem dua sampul: Sistem ini diberlakukan untuk barang dan jasa tertentu yang memiliki range (koridor) spesifikasi untuk setiap aspek teknisnya sehingga diperlukan evaluasi teknis yang mendalam untuk menjamin kualitas barang dan jasa tersebut sebelum dilaksanakan proses evaluasi harga.
    - Sistem bertahap: sistem ini hanya diberlakukan untuk pengadaan barang dan jasa yang sifatnya kompleks, berteknologi tinggi, dan nilai pengadaannya relative besar serta memerlukan penyesuaian criteria teknis/ kinerja/desain untuk menyetarakan spesifikasi teknis diantara penyedia barang dan jasa sebagai mana yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
  - e. Sistem evaluasi penawaran: dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:
    - Sistem evaluasi penawaran untuk pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari sistem gugur, sistem nilai, system penilaian biaya selama umur ekonomis
    - Sistem evaluasi penawaran untuk pengadaan jasa konsultasi yang dibagi menjadi Sistem evaluasi kualitas, system evaluasi kualitas dan biaya, sistem

evaluasi biaya terendah.

f. Bentuk dan jenis ikatan kerja:

- Bentuk ikatan kerja terdiri dari: bukti pembelian barang, SPK, Kontrak kerja
- Jenis Ikatan kerja terdiri dari: Ikatan Lumpsum, Ikatan harga satuan dengan volume, ikatan gabungan lumpsum dan unit price, ikatan terima jadi, ikatan harga satuan tanpa volume pemesanan pasti, ikatan penyerahan bertahap dengan

batas volume maksimal, ikatan *cost plus fee*, ikatan presentase.

- g. Jaminan dalam pengadaan barang dan jasa: Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus disadari adanya risiko- risiko yang mungkin Timbul, diantaranya pengunduran diri dari penyedia barang dan jasa, wan prestasi, risiko penarikan uang muka, dan risiko lainnya.

## JENIS-JENIS PELELANGAN

a. Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas Pelaksanaan metode ini dilaksanakan apabila nilai tender diperkirakan lebih dari 5 miliar Rupiah dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:

- Pengumuman Prakualifikasi
- Pemasukan Dokumen prakualifikasi
- Evaluasi dokumen prakualifikasi
- Penetapan pengumuman prakualifikasi
- Undangan pengambilan dokumen pengadaan
- Penjelasan lelang - Pemasukan dan pembukaan penawaran
- Evaluasi penawaran - Pembuatan berita acara hasil pelelangan
- Penetapan pemenang lelang
- Pengumuman pemenang lelang
- Sanggahan peserta lelang

- Penandatanganan kontrak
- Pembayaran uang muka

b. Pemilihan Langsung

Tata cara pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:

- Undangan kepada penyedia barang dan jasa
- Pemberian penjelasan dokumen pengadaan
- Penyampaian penawaran - Pembukaan penawaran
- Evaluasi penawaran
- Klarifikasi teknis dan negosiasi
- Penetapan penyedia barang dan jasa terpilih
- Penunjukkan penyedia barang dan jasa
- Penandatanganan

# WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sebagai upaya untuk mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) dalam rangka mencegah terjadinya tindak kecurangan dengan melaporkan kejadian perilaku pelanggaran serta mendorong budaya kejujuran dan keterbukaan. Penerapan WBS bermanfaat untuk pengembangan sistem pelaporan pelanggaran yang dikelola dengan baik, yang dapat menjadi fondasi bagi Perseroan untuk merancang evaluasi dan tindak lanjut yang diperlukan. WBS juga menjadi bagian dari mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat sebuah pelanggaran. Bagi pelapor, WBS memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan identitas.

*Whistle Blowing System* tidak terpisah dari Mekanisme Anti Korupsi PT. Mandiri Tunas Finance dimana dalam menegakkan peraturan, etika kerja dan bisnis, nilai-nilai Perseroan, umpan balik bagi Management dan pelapor, maka masyarakat atau pelapor dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik serta nilai-nilai etika yang berlaku berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan perusahaan. Dimana identitas pelapor bersifat rahasia dan laporan dapat disampaikan oleh pelapor tanpa mencantumkan identitasnya (anonim).



## PENETAPAN PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN MANDIRI TUNAS FINANCE

Sistem pelaporan pelanggaran perusahaan diatur berdasarkan surat Direktur Utama dengan nomor 063/MTF-DIR/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011. Dalam surat tersebut, Direktur Perseroan menghimbau kepada seluruh karyawan dengan rasa memiliki

sesuai dengan Budaya PERWIRA agar untuk berperan secara aktif dengan bersama-sama untuk mencegah, mendeteksi dan mengantisipasi serta meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam Perseroan.

## RUANG LINGKUP PENGADUAN PELANGGARAN MELALUI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN MANDIRI TUNAS FINANCE

Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui mekanisme WBS Perseroan adalah:

- Adanya dugaan atau indikasi pelanggaran prosedur

- Kecurangan (*fraud*)
- Perbuatan melanggar hukum atau perbuatan tidak etis lainnya yang merugikan keuangan Perseroan atau nama baik Perseroan.

## SALURAN PENGADUAN

Pelaporan disampaikan melalui media komunikasi kepada unit kerja yang telah ditunjuk untuk kemudahan ditindaklanjuti yakni situs web [www.mtf.co.id/korporat/id/whistle-blower](http://www.mtf.co.id/korporat/id/whistle-blower). Permasalahan tersebut selanjutnya akan

ditindaklanjuti oleh komite yang merupakan bagian dari beberapa unit kerja yang ditunjuk untuk menentukan tindak lanjut pelaporan, langkah tindak lanjut hingga umpan balik kepada pelapor.

## PIHAK PENGELOLA PENGADUAN

Pelaporan yang masuk dalam *whistleblower* akan dikelola secara langsung oleh Sekretaris Perusahaan. Setiap laporan akan diproses secara

independent dan akan dilakukan penelusuran kebenaran informasi yang diberikan.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## MEKANISME PENYAMPAIAN PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN YANG MASUK MELALUI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Setiap karyawan dapat melakukan pelaporan pengaduan dengan cara email [direktur.utama@mtf.co.id](mailto:direktur.utama@mtf.co.id) atau surat menyurat dengan ditujukan ke Direktur Utama dengan alamat Graha Mandiri Lt.3A, Jl. Imam Bonjol 61, Jakarta Pusat. Mulai tahun

2018 bagi seluruh karyawan yang akan melaporkan pengaduan dapat juga menyampaikan pada halaman situs web Perusahaan di <https://www.mtf.co.id/korporat/id/whistle-blower>.

### PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Perseroan menjamin kerahasiaan dan perlindungan kepada pelapor dalam melakukan proses setiap pelaporan pengaduan dengan senantiasa mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dengan cara yang profesional. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan perlindungan kepada Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun,

sepanjang Pelapor dapat menjaga kerahasiaan kasus yang diadukan/dilaporkan.

Perlindungan ini juga berlaku bagi pihak yang ditunjuk Perseroan dalam melaksanakan investigasi, verifikasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyungkapan fakta penyimpangan.

### PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perseroan. Perseroan juga memberikan sanksi bagi pelaporan pelanggaran yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan ini, misalnya fitnah atau pelaporan palsu.

Selain itu, penghargaan diberikan kepada Pelapor apabila kasus yang dilaporkan mengandung kebenaran dan Perseroan mendapat dampak positif dari adanya laporan tersebut. Jenis dan besarnya penghargaan yang diberikan diatur dengan kebijakan Direksi yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari kebijakan WBS.

### PELAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2018 DAN TINDAK LANJUT

Di sepanjang tahun 2018 tidak terdapat laporan pengaduan pelanggaran yang masuk melalui mekanisme WBS yang dimiliki Perseroan.

## KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi berasal dari beragam latar belakang guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dalam menjawab segala tantangan usaha yang semakin dinamis. Oleh karenanya, penetapan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan pada pengetahuan, keahlian, pengalaman profesional serta pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan.

Hingga 31 Desember 2018, Perseroan belum memiliki aturan tertulis yang mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Namun demikian, berdasarkan kebijakan Pemegang Saham, penetapan komposisi Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas perusahaan termasuk memperhatikan unsur keberagaman, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

## KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI MANDIRI TUNAS FINANCE

Nama dan Jabatan	Kewarganegaraan	Usia	Gender	Latar Belakang Pendidikan	Keahlian
<b>Dewan Komisaris</b>					
Rico Adisurja Setiawan (Komisaris Utama)	Indonesia	47	Laki-laki	Master (S2) of Business Administration untuk bidang Finance, Sarjana (S1) Bachelor of Science	Administrasi untuk Bidang Finance
Harry Gale (Komisaris)	Indonesia	47	Laki-laki	Magister (S2) Manajemen dan Sarjana (S1) Ekonomi	Manajemen
Ravik Karsidi (Komisaris Independen)	Indonesia	61	Laki-laki	Doktor (S3) Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Magister Sains (S2) Sosiologi Pedesaan untuk Studi Pembangunan, Sarjana (S1) Ilmu Pendidikan	Ilmu Penyuluhan Pembangunan
<b>Direksi</b>					
Arya Suprihadi (Direktur Utama)	Indonesia	47	Laki-laki	Master Science (S2) untuk Finance, Master (S2) of Business Administration, Sarjana (S1) Teknik Sipil	Science
Harjanto Tjitohardjojo (Direktur)	Indonesia	50	Laki-laki	Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Manajemen	Ekonomi
Armendra (Direktur)	Indonesia	47	Laki-laki	Sarjana (S1) Matematika	MIPA
Albertus Henditrianto (Deputi Direktur)	Indonesia	49	Laki-laki	Sarjana (S1) Ekonomi Universitas Gadjah Mada	Ekonomi
Bonifatius Perana Citra Ketaren (Deputi Direktur)	Indonesia	41	Laki-laki	Sarjana (S1) Akuntansi Universitas Parahyangan	Akuntansi
William Francis Indra (Deputi Direktur)	Indonesia	36	Laki-laki	Magister Manajemen Universitas Mercu Buana	Manajemen Pemasaran

# KEPATUHAN TERHADAP PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN: KESESUAIAN TERHADAP PERATURAN OJK NO. 30/ POJK.05/2014

Peta Jalan atau *Roadmap* GCG yang diterbitkan OJK pada tahun 2014 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan GCG di masa-masa berikutnya. Penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan penyampaian informasi yang wajar menjadi bahasan yang dapat menjadi pegangan bagi entitas usaha, tak terkecuali bagi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) khususnya perusahaan pembiayaan.

Secara umum, Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan telah melaksanakan seluruh

peraturan yang dikeluarkan OJK, dan akan terus berupaya melakukan perbaikan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dalam hal pedoman penerapan GCG yang diatur berdasarkan Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, Perseroan berupaya untuk mengembangkan prinsip GCG sesuai dengan peraturan tersebut. Adapun uraian penerapannya dapat dilihat di bawah ini.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## KESESUAIAN PERKEMBANGAN PENERAPAN GCG DI LINGKUP MANDIRI TUNAS FINANCE DENGAN PERATURAN OJK NO. 30/POJK.05/2014 TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik		
Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi: keterbukaan ( <i>transparency</i> ), akuntabilitas ( <i>accountability</i> ), pertanggungjawaban ( <i>responsibility</i> ), kemandirian ( <i>independency</i> ), dan kesetaraan dan kewajaran ( <i>fairness</i> ).	✓	Penyusunan Laporan Tahunan yang tersedia di halaman situs web Perseroan
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bertujuan untuk:	✓	Tersedianya laporan Keterbukaan Informasi terkait kegiatan usaha Perseroan
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi Pemangku Kepentingan, khususnya Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;</li> <li>b. Meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif, dan efisien;</li> <li>c. Meningkatkan kepatuhan Organ Perusahaan dan DPS serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan;</li> <li>d. Mewujudkan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan</li> <li>e. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.</li> </ul>		
Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit menguraikan hal-hal sebagai berikut:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tata cara pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi;</li> </ul>	✓	Perseroan telah memiliki pedoman tata tertib Dewan Komisaris dan Direksi
<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;</li> </ul>	✓	Perseroan telah memiliki Piagam/Pedoman Komite pendukung Dewan Komisaris
<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;</li> </ul>	✓	Perseroan telah memiliki Komite Audit
<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;</li> </ul>	✓	Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko
<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Kebijakan remunerasi;</li> </ul>	✓	Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Kebijakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan; dan</li> </ul>	✓	Laporan Keuangan tercantum dalam situs web Perseroan
<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Tatacara penyusunan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.</li> </ul>	✓	Rencana kerja Perseroan tercantum dalam Rancangan Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
Dalam melakukan kegiatan usaha, Perusahaan wajib menyelenggarakan kegiatan usahanya secara sehat dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan industri jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK.	✓	Kegiatan usaha tercantum dalam Akta Perseroan
Perusahaan wajib memiliki standar operasi dan prosedur yang memadai untuk seluruh aktivitas bisnis Perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi.	✓	Perseroan memiliki SOP yang bisa diakses oleh seluruh karyawan
Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Perusahaan wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.	✓	Perseroan melakukan RUPS Tahunan sesuai Undang-undang yang berlaku
Dalam mengambil keputusan, RUPS harus menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, kreditur, dan kepentingan pemegang saham minoritas.	✓	Keputusan RUPS berdasarkan musyawarah dan mufakat semua pemegang saham
Pemegang Saham Setiap pihak yang menjadi pemegang saham pengendali Perusahaan wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan.	✓	Pemegang saham Perseroan telah memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan
Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.	✓	Perseroan telah tunduk dan memenuhi sebagaimana yang diatur dalam POJK
Pemegang saham Perusahaan melalui RUPS harus memastikan Perusahaan dijalankan berdasarkan praktik usaha pembiayaan yang sehat.	✓	Perseroan menjalankan RUPS sebagaimana yang diatur dalam POJK
Pemegang saham harus memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Perusahaan.	✓	Komitmen pemegang saham selalu diberikan untuk pengembangan operasional Perseroan
Pemegang saham Perusahaan dilarang mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS.	✓	Pemegang Saham Perseroan tidak mencampuri kegiatan Operasional Perseroan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas
Pemegang saham Perusahaan yang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada Perusahaan yang sama harus mendahulukan kepentingan Perusahaan.	✓	Pemegang saham Perseroan bukan merupakan anggota Direksi ataupun Dewan Komisaris
Direksi Perusahaan yang memiliki aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.	✓	Perusahaan memiliki 3 (tiga) Direksi
Seluruh anggota Direksi dari Perusahaan yang seluruh pemegang sahamnya: warga negara Indonesia; dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara Indonesia, wajib berkewarganegaraan Indonesia.	✓	Direksi telah memenuhi kriteria dan syarat yang ditentukan OJK

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
Perusahaan yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung wajib memiliki paling sedikit 50% anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.	X	Tidak ada kepemilikan asing dalam Perseroan
Anggota Direksi Perusahaan wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.	✓	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia
Bagi anggota Direksi berkewarganegaraan asing wajib memiliki surat izin menetap dan surat izin bekerja dari instansi berwenang.	X	Tidak ada anggota Direksi berkewarganegaraan asing
Seluruh anggota Direksi Perusahaan harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.	✓	Anggota Direksi telah mengikuti fit & proper test
Anggota Direksi Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan lain.	✓	Anggota Direksi Perseroan tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain
Tidak termasuk rangkap jabatan apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan yang memiliki usaha di bidang pembiayaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan, sepanjang perangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan.		
Setiap anggota Direksi Perusahaan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.	✓	Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana daitur POJK
Anggota Direksi Perusahaan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional; b. Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya; c. Mendahulukan kepentingan Perusahaan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya dari pada kepentingan pribadi; d. Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan dan Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya; dan e. Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.	✓	Anggota Direksi telah memenuhi kriteria yang ditentukan OJK
Direksi Perusahaan wajib: a. mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya; b. mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya; c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS; d. memastikan agar Perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya; e. memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris dan DPS secara tepat waktu dan lengkap; dan f. membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Organ Perusahaan dan DPS.	✓	Direksi Perseroan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang dan Anggaran Dasar



Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
<p>Perusahaan wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur,serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perusahaan kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.</p> <p>Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi pembiayaan, fungsi pemasaran dan fungsi keuangan, kecuali Direktur Utama.</p>	✓	Fungsi kepatuhan dalam Perseroan dipimpin langsung oleh Direktur Utama
<p>Perusahaan wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Satuan kerja atau pegawai bertugas membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Satuan kerja atau pegawai yang dimaksud bertanggungjawab kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	✓	Perseroan memiliki satuan kerja yang menjalani fungsi kepatuhan, yaitu <i>Legal &amp; Compliance Divisi</i>
<p>Anggota Direksi Perusahaan dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan, dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat;</li> <li>memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat;</li> <li>mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan</li> <li>memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.</li> </ol>	✓	ireksi Perseroan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan
<p>Direksi Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Direksi Perusahaan wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) tersebut. Anggota Direksi Perusahaan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi.</p>	✓	Sepanjang tahun 2018 Direksi melakukan rapat sebanyak 43 kali
<p>Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi Perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.</p>	✓	Rapat Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
<p>Direksi Perusahaan harus menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen,tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.</p>	✓	Direksi Perseroan dalam mengambil keputusan mempertimbangkan segala aspek

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
Dewan Komisaris Perusahaan wajib mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia	✓	Dewan Komisaris Perseroan berdomisili di Indonesia
Bagi anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki: surat izin menetap; dan surat izin bekerja, dari instansi berwenang.	✗	Perseroan tidak memiliki Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing
<p>Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Perusahaan lain.</p> <p>Tidak termasuk rangkap jabatan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau</li> <li>anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.</li> </ol>	✓	Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris di perusahaan lain
Setiap anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.	✓	Setiap anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>fit &amp; proper test</i> dari OJK
<p>Dewan Komisaris Perusahaan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;</li> <li>mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;</li> <li>menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;</li> <li>memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;</li> <li>memberikan persetujuan dalam hal Dewan Pengawas Syariah memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; dan</li> <li>memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</li> </ol>	✓	Dewan Komisaris menjalankan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang dan anggaran Dasar Perseroan
<p>Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat;</li> <li>memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat;</li> <li>mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan</li> <li>mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.</li> </ol>	✓	Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
<p>Anggota Dewan Komisaris Perusahaan berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu.</p>	✓	<p>Direksi selalu memberikan informasi kepada Dewan Komisaris dengan lengkap dan tepat waktu</p>
<p>Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen. Komisaris Independen Perusahaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Perusahaan, dalam Perusahaan yang sama;</li> <li>tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;</li> <li>memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat;</li> <li>memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan</li> <li>berdomisili di Indonesia.</li> </ol>	✓	<p>Perseroan memiliki seorang Komisaris Independen</p>
<p>Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Debitur, kreditur, dan Pemangku Kepentingan lainnya.</p>	✓	<p>Tugas dan fungsi Komisaris Independen tercantum dalam Tata Tertib Dewan Komisaris</p>
<p>Komisaris Independen wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 hari kalender sejak ditemukannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau</li> <li>keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.</li> </ol>	X	<p>Sepanjang tahun 2018 Komisaris Independen tidak menemukan pelanggaran dan hal-hal lain yang membahayakan Perseroan</p>
<p>Perusahaan dilarang memberhentikan Komisaris Independen karena tindakan Komisaris Independen dalam melaksanakantugasnya.</p>	✓	<p>Sepanjang tahun 2018 Perseroan tidak pernah memberhentikan Komisaris Independen</p>
<p>Perusahaan yang memiliki total <i>asset</i> lebih dari Rp200.000.000.000,00 wajib membentuk komite audit. Salah seorang anggota komite audit adalah Komisaris Independen yang sekaligus berkedudukan sebagai ketua komite.</p>	✓	<p>Perseroan telah membentuk Komite Audit</p>
<p>Komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.</p>	✓	<p>Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Komite Audit telah memiliki pedoman kerja / charter</p>
<p>Selain komite audit, Dewan Komisaris Perusahaan dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.</p>	✓	<p>Komite lainnya yaitu Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Resiko</p>

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
Perusahaan yang memiliki total aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.	✓	Komite Audit bernaung dibawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
Dewan Komisaris Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.	✓	Sepanjang tahun 2018 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sebanyak 8 kali
Perbedaan pendapat ( <i>dissenting opinions</i> ) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris.	✓	Agenda rapat Dewan Komisaris tercantum dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris
Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	✓	Jumlah rapat telah tercantum dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Dewan Komisaris Perusahaan wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.	✓	Keputusan Dewan Komisaris bersifat independen dan profesional
Dewan Pengawas Syariah	X	Perseroan tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah
Transparansi Kepemilikan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan wajib mengungkapkan mengenai: a. kepemilikan sahamnya yang mencapai 50% atau lebih pada Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat, kepada Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	✓	Kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam daftar pemegang saham
Auditor Eksternal Auditor eksternal Perusahaan wajib ditunjuk oleh RUPS dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan komite audit (jika ada). Pencalonan auditor eksternal wajib disertai: a. alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut; dan b. pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh auditor eksternal, untuk bebas dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada OJK.	✓	Penunjukkan Auditor Eksternal telah dilakukan voting/pemungutan suara melalui RUPS dengan rekomendasi Komite Audit

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
<p>Perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang auditor eksternal sehingga auditor eksternal dapat memberikan pendapatnya tentang kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan standar audit yang berlaku.</p>	✓	<p>Perseroan terbuka dalam memberikan informasi dan data penunjang auditor eksternal</p>
<p>Praktik dan Kebijakan Remunerasi</p> <p>Perusahaan wajib menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (<i>prudent behaviour</i>) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan dan perlakuan adil terhadap Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya. Kebijakan remunerasi harus memperhatikan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>prestasi kerja individual;</li> <li>kewajaran dengan Perusahaan dan/atau level jabatan yang setara (<i>peer group</i>); dan</li> <li>pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.</li> </ol>	✓	<p>Kebijakan remunerasi telah diatur oleh Komite Nominasi dan Remunerasi</p>
<p>Tata Kelola Pembiayaan</p> <p>Perusahaan wajib menyusun kebijakan dan rencana pembiayaan yang dituangkan dalam rencana bisnis tahunan Perusahaan. Kebijakan dan rencana pembiayaan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ditetapkan oleh Direksi; dan</li> <li>disosialisasikan kepada manajemen dan unit kerja terkait</li> </ol>	✓	<p>Perseroan telah membuat rencana bisnis setiap tahunnya</p>
<p>Direksi wajib mengambil keputusan pembiayaan secara profesional dan mengoptimalkan nilai tambah kekayaan Perusahaan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Debitur dan kepentingan bagi Pemangku Kepentingan lainnya.</p>	✓	<p>Dalam mengambil keputusan Direksi memperhatikan segala aspek</p>
<p>Perusahaan wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyelenggarakan fungsi pemasaran, penerapan prinsip mengenal nasabah, analisis pembiayaan, pemantauan kualitas piutang pembiayaan, penagihan, penanganan pengaduan Debitur;</li> <li>menyusun dan menerapkan standar dan prosedur operasional pembiayaan; dan</li> <li>menyusun dan menerapkan sistem dan prosedur pengendalian internal untuk memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi pembiayaan, serta tidak melanggar peraturan perundangan.</li> </ol> <p>Untuk melakukan fungsi-fungsi tersebut, Perusahaan wajib memiliki pegawai yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang pembiayaan.</p>	✓	<p>Perseroan telah memiliki Divisi yang menjalankan fungsi pemasaran</p>
<p>Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur. Perusahaan harus menuangkan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai.</p> <p>Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;</li> <li>pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan</li> <li>pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi perusahaan pembiayaan Indonesia.</li> </ol> <p>Perusahaan bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain.</p> <p>Perusahaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerjasama dengan pihak.</p>	✓	<p>Kerjasama dengan pihak ketiga selalu dituangkan dalam perjanjian tertulis dan bermaterai</p>

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal	Perusahaan wajib menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, dan memantau risiko usaha secara efektif. Manajemen risiko harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perusahaan.	Manajemen Risiko dikelola dalam satu Divisi tersendiri
	<p>Direksi Perusahaan wajib menetapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi bisnis serta anggaran dasar dan aturan internal lain Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur;</li> <li>pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengelola risiko usaha;</li> <li>aktivitas pengendalian, yaitu tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset perusahaan;</li> <li>sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas peraturan perundang-undangan di bidang usaha pembiayaan;</li> <li>tata cara monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal; dan</li> <li>mekanisme pelaporan kepada Direksi dengan tembusan kepada komite audit, dalam hal terjadi penyimpangan kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan.</li> </ol>	Pengendalian Internal dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan Audit Internal
Rencana Bisnis Tahunan	<p>Perusahaan wajib menyusun rencana bisnis tahunan. Rencana bisnis tahunan paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ringkasan eksekutif;</li> <li>kebijakan dan strategi manajemen;</li> <li>penerapan manajemen risiko dan kepatuhan;</li> <li>penerapan Tata Kelola yang Baik Perusahaan;</li> <li>kinerja keuangan Perusahaan periode sebelumnya;</li> <li>proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;</li> <li>proyeksi rasio-rasio dan tingkat kesehatan keuangan;</li> <li>rencana pengembangan dan pemasaran pembiayaan;</li> <li>rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor;</li> <li>rencana permodalan;</li> <li>rencana pendanaan;</li> <li>rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia; dan</li> <li>informasi lainnya</li> </ol>	Perseroan telah menyusun rencana bisnis tahunan
	<p>Perusahaan wajib menyampaikan rencana bisnis tahunan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 Januari tahun berikutnya.</p> <p>Perusahaan wajib menyampaikan rencana bisnis tahunan untuk pertama kali paling lambat tanggal 30 Januari tahun 2016.</p>	Rencana Bisnis Tahunan telah dilaporkan sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan
Keterbukaan Informasi	Kebijakan dan strategi komunikasi Perusahaan harus memungkinkan informasi yang dibutuhkan diberikan kepada OJK secara lengkap, tepat waktu, dan dengan cara yang efisien.	Komunikasi Perseroan dengan OJK melalui Sekretaris Perusahaan
	Perusahaan wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan Pemangku Kepentingan lain.	Pelaporan keuangan telah dilakukan melalui sistem yg diatur OJK dan BEI

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
<p>Perusahaan wajib mengungkapkan kepada OJK mengenai hal-hal penting, paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal;</li> <li>b. Transaksi material dengan pihak terkait;</li> <li>c. Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi; dan</li> <li>d. Informasi material lain mengenai Perusahaan.</li> </ul>	✓	Perusahaan melakukan keterbukaan informasi
<p>Pengungkapan hal-hal penting dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.</p>	✓	Telah termuat dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
<p><b>Etika Bisnis</b></p> <p>Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan Perusahaan dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan Perusahaan dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.</p>	✓	Tercantum dalam Peraturan Perusahaan
<p>Perusahaan wajib membuat pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi Organ Perusahaan dan seluruh karyawan Perusahaan.</p>	✓	Tercantum dalam Peraturan Perusahaan
<p><b>Pelaporan</b></p> <p>Perusahaan wajib melakukan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkala.</p> <p>Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan berdasarkan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik.</p>	✓	Perseroan telah melakukan <i>self assessment</i>
<p>Perusahaan wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada setiap akhir tahun buku.</p> <p>Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang paling kurang meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;</li> <li>b. penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan</li> <li>c. rencana tindak (<i>action plan</i>) yang meliputi tindakan korektif (<i>corrective action</i>) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.</li> </ul>	✓	Perseroan telah menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk OJK
<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik diatur dalam Surat Edaran OJK.</p>	✓	Bentuk dan susunan laporan telah sesuai dengan SEOJK
<p>Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.</p> <p>Perusahaan wajib menyampaikan laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk pertama kali pada periode tahun 2016, yang disampaikan paling lambat tanggal 30 April 2017.</p>	✓	Laporan telah dikirimkan tepat waktu

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Isi Peraturan sebagai Prinsip Kepatuhan	Status	Penerapan di Lingkup Mandiri Tunas Finance
<p>Sanksi</p> <p>Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini, dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>peringatan; dan/atau</li> <li>pelaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>).</li> </ol> <p>Sanksi administratif berupa peringatan dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku paling lama masing-masing 2 (dua) bulan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>peringatan pertama;</li> <li>peringatan kedua; dan</li> <li>peringatan ketiga.</li> </ol> <p>Perusahaan yang melanggar ketentuan namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya.</p> <p>Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan ketiga, Perusahaan tidak juga memenuhi ketentuan, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali dikenakan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.</p>	X	Perseroan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam POJK
<p>Dalam hal Perusahaan mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan secara kumulatif sebanyak 5 (lima) kali atau lebih dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan/atau pemegang saham pengendali dikenakan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.</p>	X	Sepanjang tahun 2018 tidak ada sanksi yang ditujukan untuk Perseroan

✓ = telah diterapkan | X = belum diterapkan



# TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE

## KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

Seluruh penyajian informasi dalam Laporan Tahunan ini, khususnya terkait kinerja keuangan dan hal-hal lainnya, mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*). Penyajian dan pengungkapan

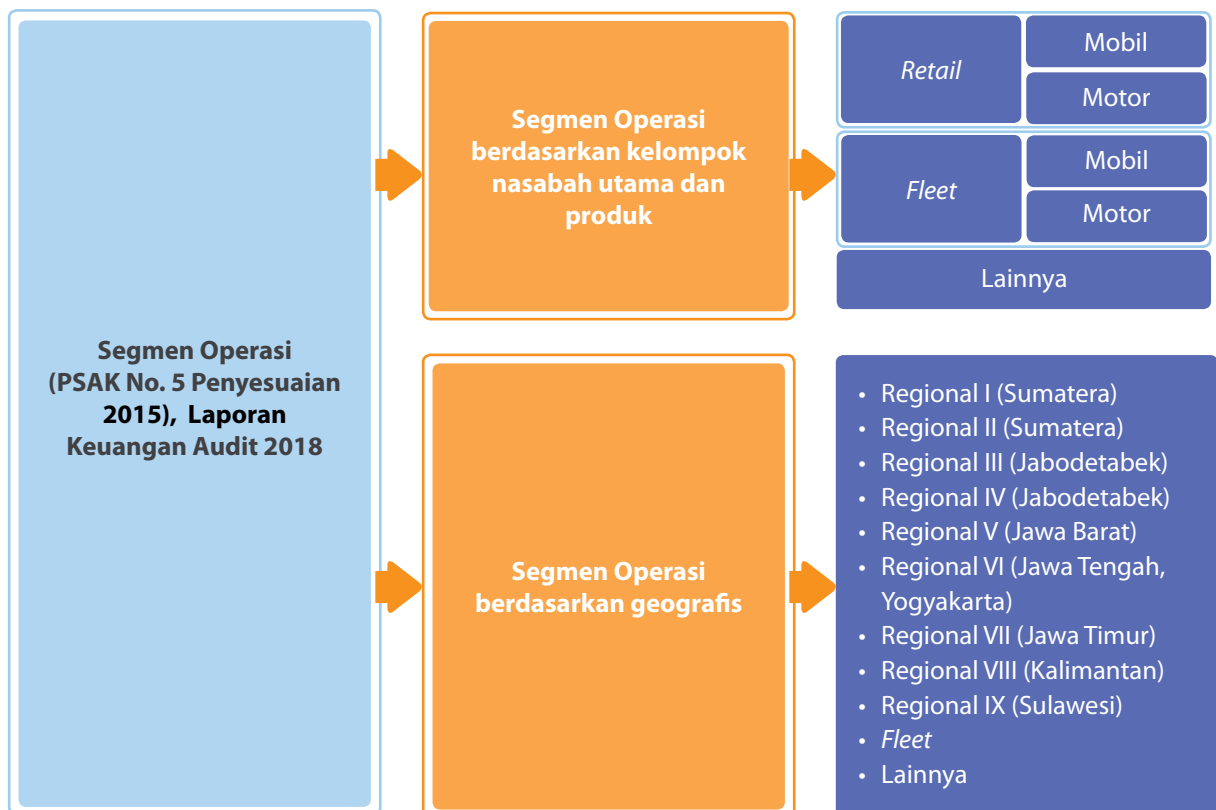
laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

## PENGUNGKAPAN SEGMENT OPERASI PADA LAPORAN KEUANGAN

Sebagaimana yang tercantum dalam PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015) tentang Segmen Operasi dan untuk kepentingan manajemen, Perseroan telah menerapkan segmen operasi dalam laporan keuangannya membagi segmen operasi

berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk, yaitu *Fleet* dan *Retail*, serta segmen lainnya sebagai perhitungan yang tidak dapat dialokasikan ke dalam kedua segmen tersebut.

## PENERAPAN SEGMENT OPERASI (PSAK NO. 5 PENYESUAIAN 2015) MANDIRI TUNAS FINANCE



### KESESUAIAN BUKU LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN DIGITAL

Laporan Tahunan digital Perseroan baik yang disampaikan kepada regulator, pemegang saham, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perseroan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perseroan.



# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pembangunan Berkelanjutan	406
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	410
Program dan Kegiatan Terkait Ketenagakerjaan	410
Program dan Kegiatan Terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja	413
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	415
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab Terhadap Produk/ Jasa Serta konsumen dan Mitra Kerja	420

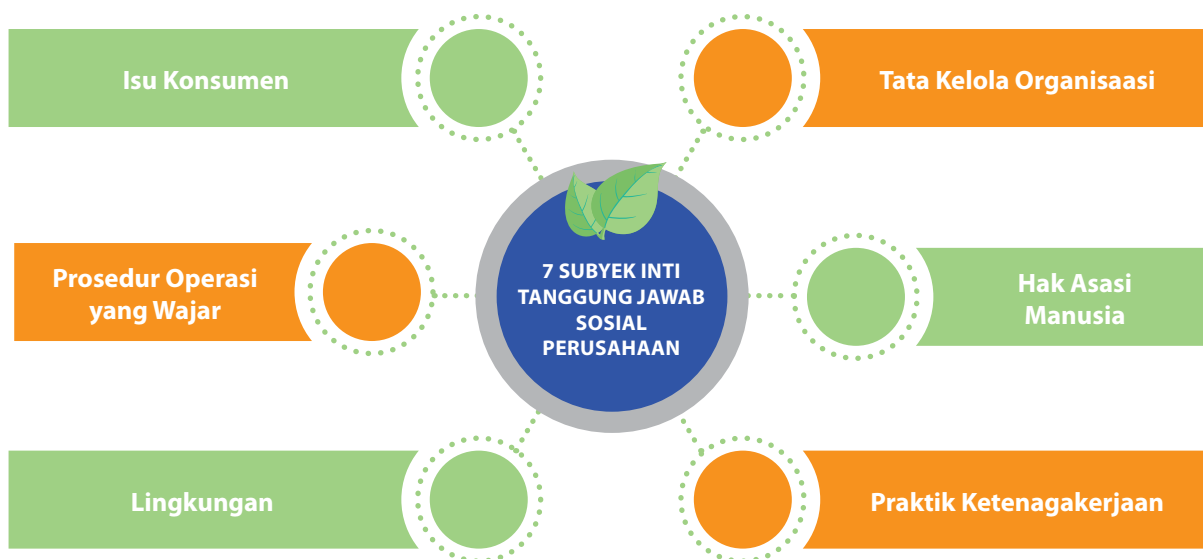
## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Konsep Pembangunan Berkelanjutan, atau *Sustainability Development* yang telah berkembang di berbagai negara muncul sebagai bagian dari keinginan banyak pihak tentang keseimbangan antara *people, profit* dan *planet*. Konsep ini hanya dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat dari seluruh pihak, khususnya entitas usaha yang tak dapat dipungkiri bersandar pada orientasi keuntungan dan cenderung mengabaikan dampak jangka panjang atas kegiatan yang dilakukan.

Di Indonesia, regulator telah mendorong upaya harmonisasi ini melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang mewajibkan entitas usaha untuk memiliki kebijakan dan program terkait

komitmennya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan. Organisasi Internasional untuk Standarisasi (*International Organization for Standardization/ISO*), sebuah badan penetap standar industrial dan komersial dunia telah merilis ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance on Social Responsibility*). Walaupun tidak bersifat wajib dan hanya sekedar himbauan, ISO ini memberikan pola dan modul yang berlaku secara internasional tentang bagaimana CSR dapat dikembangkan dalam dimensi sebuah organisasi. Di Indonesia, ISO 26000 telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada tahun 2012.

### SUBYEK INTI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BERDASARKAN ISO 26000



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
<b>TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN</b>

Pada lingkup pelaporan tahunan, CSR dibagi ke dalam 4 (empat) aspek, yaitu: aspek lingkungan hidup; praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja; pengembangan sosial dan

kemasyarakatan; serta tanggung jawab barang dan/atau jasa. Aspek inilah yang menjadi dasar dari pelaporan dalam bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

### ASPEK TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



## KEBIJAKAN PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI LINGKUP MANDIRI TUNAS FINANCE

### PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bagi Perusahaan, CSR tak dapat dilepaskan dari perkembangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG). GCG berangkat dari gagasan tentang entitas usaha yang dapat menerapkan pola hubungan yang harmonis antara entitas usaha, pemangku kepentingan, dan pemilik modal atau pemegang saham. Perusahaan meyakini CSR menjadi bagian dari komitmen yang terus-menerus diupayakan dengan mengusung prinsip TARIF,

khususnya prinsip *Responsibility*, yang dapat membuat Perusahaan menjadi semakin kokoh dan berkelanjutan. Perusahaan percaya bahwa bisnis akan berkelanjutan apabila memberikan perhatian yang seimbang kepada aspek keuntungan (*profit*), kemanusiaan (*people*) dan lingkungan (*planet*). Oleh karena itu Perusahaan menjadikan CSR sebagai bagian tidak terpisahkan dari operasional untuk mendukung keberlanjutan usaha.

## KESEIMBANGAN DALAM USAHA YANG BERKELANJUTAN



Penyusunan program CSR Perusahaan diawali dengan pemetaan potensi sasaran pelaksanaan CSR. Dalam menentukan program CSR, setiap wilayah mengedepankan kebutuhan pokok masyarakat sekitar. Pelaksanaan program dilakukan setelah Perusahaan berinteraksi dan terlibat langsung dengan masyarakat sekitar untuk menentukan jenis program yang tepat sasaran dan dibutuhkan bagi masyarakat. Hasil pemetaan akan menjadi rancangan program yang sesuai dengan tujuan serta dapat diimplementasikan sesuai sumber daya yang dimiliki Perusahaan. Dengan demikian program CSR diharapkan menghasilkan *output* yang ditetapkan dan berkelanjutan baik dari sisi *outcome* maupun dari sisi program.

### DASAR HUKUM PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Dasar pelaksanaan program CSR Perusahaan berlandaskan pada beberapa aspek hukum, diantaranya:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
<b>TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN</b>

5. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
6. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
9. Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
10. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
11. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
12. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

## ORGANISASI, PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA

Kegiatan CSR merupakan bagian integral dari aktivitas di lingkup Perusahaan, sehingga pengambilan keputusan bisnis dan aktivitas yang dilakukan tidak hanya untuk tujuan peningkatan profitabilitas semata, melainkan juga untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham, karyawan, konsumen, pemberi kerja, pemasok, masyarakat, pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan.

	Aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Penanggung Jawab di Lingkup Mandiri Tunas Finance
	➔ Lingkungan	➔ <i>Information Technology Division</i>
	➔ Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja	➔ <i>Human Capital Division</i>
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	➔ Pengembangan Sosial dan Masyarakat	➔ <i>Corporate Secretary &amp; Legal Compliance Division</i>
	➔ Tanggung Jawab Konsumen dan Produk/Jasa serta Mitra Kerja	➔ <i>Corporate Secretary &amp; Legal Compliance Division, Credit Management Division, Operation Support Management Division</i>



# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

## KEBIJAKAN

Kebijakan Perseroan terkait ketenagakerjaan tertuang di dalam Buku Peraturan Perusahaan PT Mandiri Tunas Finance yang berlaku pada periode tahun 2018-2020 dan telah terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.350/PHIJSK-PK/PP/III/2018.

## PROGRAM DAN KEGIATAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN

- **Penyerapan Tenaga Kerja Lokal**

Perusahaan memberikan prioritas pengisian karyawan baru dengan menggunakan metode rekrutmen dan seleksi yang dapat mengefisienkan waktu, mengoptimalkan pencarian karyawan yang berkompeten dan pemanfaatan tenaga kerja lokal. Kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja Perusahaan selalu diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Di samping itu, penggunaan tenaga kerja lokal akan menciptakan efisiensi biaya dan pengelolaan SDM Perusahaan yang efektif.

Tentang penyerapan tenaga kerja lokal dapat dilihat di bab Fungsi Penunjang Bisnis pada bagian Sumber Daya Manusia dalam laporan tahunan ini; atau dalam Laporan Berkelanjutan yang diterbitkan bersamaan dengan laporan tahunan ini.

- **Rekrutmen, Kesempatan Kerja dan Pengembangan Karir yang Terbuka**

Sistem rekrutmen Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada siapapun untuk dapat diterima menjadi karyawan Perusahaan, tanpa memandang suku, agama, ras, maupun gender. Demikian pula halnya dalam pengembangan karir, sistem pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlaku di internal Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Tentang sistem rekrutmen dan pengembangan karir dapat dilihat di bab Fungsi Penunjang Bisnis pada bagian Sumber Daya Manusia dalam laporan tahunan ini.

- **Kesetaraan Gender dan Perlakuan yang Proporsional**

Perusahaan memastikan semua karyawan merasakan kesetaraan kesempatan, tanpa memandang latar belakang khususnya terkait



jenis kelamin/gender. Perusahaan memberikan kesempatan yang setara kepada siapapun untuk dapat diterima sebagai karyawan Perusahaan hingga mampu membuktikan kapasitas sebagai karyawan Perusahaan berdasarkan penilaian kinerja.

Walaupun demikian, Perusahaan memiliki kebijakan proporsional terkait jenis kelamin/gender. Bagi karyawan perempuan, Perusahaan memiliki pemberian cuti bagi pegawai perempuan yang hamil.

Disebutkan dalam Peraturan Perusahaan PT Mandiri Tunas Finance 2018-2020 Pasal 12 terkait Cuti Lainnya, diantaranya adalah:

- Istri melahirkan (s.d anak ke-3)/Keguguran: 3 hari kerja
- Istirahat melahirkan dan gugur kandungan

1. Kepada karyawan wanita yang istirahat melahirkan diberikan hak istirahat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum saatnya menurut perhitungan dokter akan melahirkan dan 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah melahirkan
2. Istirahat karena gugur kandungan dapat diambil maksimal 45 (empat puluh lima) hari kalender dengan berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan yang merawatnya
3. Istirahat melahirkan dan bersalin ini dapat diperpanjang apabila dokter atau bidan yang merawatnya memandang perlu.

## DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER/JENIS KELAMIN (ORANG)

Gender/Jenis Kelamin	2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Laki-laki	2.539	73,64%	2.547	73,46%
Perempuan	909	26,36%	920	26,54%
Jumlah	3.448	100,00%	3.467	100,00%

- Pengembangan Talenta SDM, Pemenuhan Hak Kesejahteraan, Apresiasi, serta Pembentukan Lingkungan Kerja yang Kondusif**

Sebagai salah satu pihak yang berkepentingan terhadap tumbuh berkembangnya Perusahaan, karyawan memiliki posisi penting dan strategis bagi Perusahaan, khususnya dalam menopang perkembangan Perusahaan. Kebijakan untuk mengembangkan talenta diri setiap karyawan, pemenuhan hak kesejahteraan pegawai, apresiasi atau penghargaan, hingga pembentukan lingkungan kerja yang kondusif melalui kegiatan di luar operasional dan usaha, menjadi perhatian Perusahaan untuk dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan dapat tumbuh bersama dengan pegawai. Lebih jauh tentang pembahasan SDM dapat dilihat di bab Fungsi Penunjang Bisnis pada bagian Sumber Daya Manusia dalam laporan tahunan ini.

- Turnover Pegawai**

*Turnover* atau tingkat perputaran pegawai mengindikasikan kemampuan sebuah entitas usaha dalam mengelola SDM-nya. *Turnover* dapat menjadi alat bagi Perusahaan untuk menilai dan mengevaluasi kebijakan yang diambil terkait pengelolaan usaha khususnya

yang berhubungan dengan SDM. Uraian tentang *turnover* pegawai dapat dilihat di bab Fungsi Penunjang Bisnis pada bagian Sumber Daya Manusia dalam laporan tahunan ini, atau dalam Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan bersamaan dengan laporan tahunan ini.

- Peraturan Perusahaan**

Seluruh karyawan Perseroan dilindungi oleh Peraturan Perusahaan (PP), yang ditandatangani oleh pihak Manajemen dan Perwakilan Pegawai. PP mencakup hak dan kewajiban

masing-masing pihak. PP diperbarui melalui perundingan dan disepakati bersama setiap 2 (dua) tahun sekali. PP yang berlaku untuk periode 2018 - 2020 telah terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.350/PHIJSK-PK/PP/III/2018.



PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
<b>TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN</b>

- **Survei Kepuasan/Keterikatan Karyawan**

Seperti yang telah disebutkan di atas, Perusahaan memandang pegawai sebagai salah satu pemangku kepentingan yang berperan strategis bagi perkembangan Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan melaksanakan survei kepuasan/keterikatan karyawan sebagai bagian dari alat evaluasi bagi Perusahaan dalam

merumuskan kebijakan dan mengembangkan sistem pengelolaan SDM.

Tentang survei kepuasan/keterikatan karyawan dapat dilihat di bab Fungsi Penunjang Bisnis pada bagian Sumber Daya Manusia dalam laporan tahunan ini.

## PROGRAM DAN KEGIATAN TERKAIT KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

- **Pengelolaan Risiko K3**

Masalah keamanan dan keselamatan kerja merupakan hal penting yang harus diutamakan dalam lingkungan pekerjaan, karena kondisi darurat dapat terjadi setiap saat. Oleh karena itu, Perseroan mengatur pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang merupakan bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap karyawan yang diwujudkan dalam Kebijakan sebagai berikut:

- *Standar Operating Procedure* No. 02/OPS/06/2018 tentang Business Continuity Management (BCM).
- *Standar Operating Procedure* No. 02/PGA/2017 tentang *Procurement & General Affair*

Dalam BCM diatur mengenai kondisi darurat di cabang dan kantor pusat, dimana komponen utamanya terdiri atas:

- *Disaster Recovery Plan* (DRP), yakni perencanaan menyeluruh mengenai tindakan yang harus diambil sebelum,

selama dan setelah suatu peristiwa yang mengganggu dan menyebabkan suatu kerugian sistem informasi. *Team* DRP diketuai oleh *IT Division Head*, dengan anggota dari berbagai fungsi di *IT Division*. Uji coba DRC dilakukan secara rutin, dengan periode minimal 1 kali dalam 1 tahun oleh *IT Division* bersama *Risk Management Division*.

- *Emergency Response Plan* (ERP), yakni suatu strategi perencanaan untuk mengantisipasi dan menanggulangi keadaan darurat, dimana setiap unit kerja diwajibkan memiliki *Emergency Respons Team* (ERT) yang diketuai oleh masing-masing *Division Head* (di kantor pusat) dan *Branch Manager* (di Kantor Cabang).

Ketua Tim Tanggap Darurat bertugas untuk memastikan seluruh tools dalam proses kejadian bencana, evakuasi dan kelangsungan bisnis dapat berjalan, dan untuk di cabang ditambah dengan melakukan deklarasi terjadinya

bencana. Perseroan juga memastikan bahwa Alat Pemadam Kebakaran (APAR) berfungsi dengan melakukan pemeriksaan minimal 2 kali dalam setahun.

*Business Continuity Plan* (BCP), adalah suatu perencanaan yang difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan fungsi bisnis saat terjadi gangguan kritis yang disebabkan oleh bencana alam atau yang dibuat manusia yang berpotensi menyebabkan kerugian sehingga dapat meminimalisasi efek gangguan dan untuk memungkinkan bisnis terus berlangsung.

- **Pembentukan P2K3**

Sebagai entitas usaha yang berkomitmen dalam kepatuhan atas norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Pembentukan organisasi ini mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja. P2K3 merupakan badan pembantu yang merupakan wadah kerjasama antara Perusahaan dan

karyawan untuk mengembangkan kerja sama dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

- **Kecelakaan Kerja dan Angka Kinerja K3**

Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi sepanjang tahun 2018 tercatat sebanyak 5 (lima) orang. Dimana 3 (tiga) orang diantaranya mengalami kecelakaan kerja saat melakukan penagihan sedangkan 2 (dua) orang lainnya saat bertugas di dalam kantor cabang.

- **Fasilitas dan Jaminan Kesehatan bagi Karyawan**

Perusahaan memberikan fasilitas dan jaminan kesehatan kepada karyawan, baik jaminan kesehatan untuk kecelakaan kerja di saat bertugas maupun jaminan kesehatan yang diwajibkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tentang fasilitas dan jaminan kesehatan karyawan dapat dilihat di bab Fungsi Penunjang Bisnis pada bagian Sumber Daya Manusia dalam laporan tahunan ini, atau dalam Laporan Berkelanjutan yang diterbitkan bersamaan dengan laporan tahunan ini.

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

### KEBIJAKAN

Komitmen Perseroan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan terlampir pada kebijakan

Perseroan yang tertuang dalam Standard Operation Procedure No. 03/PGN/05/2016 tentang Corporate Communication.

### PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN DAN DAMPAKNYA

Program CSR yang dilaksanakan Perseroan selama tahun 2018 adalah kegiatan-kegiatan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sosial, sebagaimana yang terlampir di bawah ini:

- **Bidang Pendidikan**

Seperti tahun sebelumnya, di tahun 2018 Perseroan kembali melaksanakan program CSR dibidang pendidikan berupa literasi

keuangan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan keyakinan (*confidence*) bagi masyarakat agar mereka memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik.

Berikut kegiatan program Literasi Keuangan yang dilakukan Perseroan sepanjang tahun 2018:



Direksi Mengajar di Universitas Sebelas Maret, Surakarta



Direksi Mengajar di Universitas Indonesia, Depok.



Direksi Mengajar UGM - Yogyakarta



Direksi Mengajar di Universitas Ma Chung, Malang.



No	Tanggal	Kuartal	Kegiatan	Keterangan
1	14 Februari	1	Direksi Mengajar UNS - Solo	<b>Direksi Mengajar di Universitas Sebelas Maret, Surakarta</b> PT Mandiri Tunas Finance (MTF) melaksanakan kegiatan edukasi literasi keuangan bagi sekitar 1.000 mahasiswa di Universitas Sebelas Maret (UNS) di Surakarta, Jawa Tengah. Hadir dalam acara tersebut Rektor UNS Ravik Karsidi, Direktur Utama MTF Ignatius Susatyo Wijoyo, didampingi oleh jajaran direksi MTF lainnya. Dalam acara tersebut MTF memberikan sharing mengenai industri pembiayaan dan memperkenalkan MTF, serta bagaimana menghadapi dunia kerja bagi para mahasiswa.
2	14 Maret	1	Direksi Mengajar UI - Depok	<b>Direksi Mengajar di Universitas Indonesia, Depok</b> PT Mandiri Tunas Finance (MTF) melaksanakan kegiatan edukasi literasi keuangan dalam program "Direksi Mengajar", kali ini di Universitas Indonesia (UI), Depok Jawa Barat. Dalam acara tersebut, Direktur Utama MTF Arya Suprihadi membawakan materi di hadapan sekitar 160 orang mahasiswa yang menyimak dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan antusias. Dari pihak MTF, hadir pula Deputi Direktur MTF William Francis Indra, Corporate Secretary MTF Ahmad Reza, HC Division Head Vivid Zulprimiadhanni, dan <i>team</i> MTF lainnya. Sedangkan dari pihak Manajemen UI, hadir Direktur Pengembangan dan Hubungan Alumni Career Development Center (CDC) Drs. Erwin Nurdin, M.Sc.
3	14 Maret	1	CSR utk Yayasan Dinamika Edukasi Dasar Semarang	<b>MTF Peduli - Bantuan Untuk Yayasan Dinamika Edukasi Dasar</b> PT Mandiri Tunas Finance berpartisipasi dalam mendukung program Sistem Informasi Keuangan Terpadu yang diselenggarakan oleh Yayasan Dinamika Edukasi Dasar (DED). Yayasan DED merupakan sebuah yayasan di bidang pendidikan yang didirikan Romo YB Mangunwijaya atau Romo Mangun, bertujuan untuk membantu dan memberdayakan anak-anak dari kalangan ekonomi menengah ke bawah agar memperoleh pendidikan yang layak. Penyerahan dana bantuan secara simbolis dilaksanakan Semarang, 14 Maret 2018 oleh Deputi Direktur MTF Albertus Henditrianto kepada Romo Aria Dewa selaku Bendahara Yayasan DED.
4	21 September	3	Direksi Mengajar UGM - Yogyakarta	<b>Direksi Mengajar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta</b> PT Mandiri Tunas Finance (MTF) mengadakan kegiatan Direksi Mengajar dalam rangkaian kegiatan Literasi dan Edukasi tahun 2018 dan bertempat di Universitas Gadjah Mada (UGM). Direksi Mengajar kali ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa UGM namun dihadiri juga oleh mahasiswa UPN, UII dan lainnya. Direktur Keuangan MTF Armendra membawakan materi mengenai "Mengenal Perusahaan Pembiayaan", yang direspon dengan antusias oleh mahasiswa melalui banyaknya pertanyaan mengenai dunia pembiayaan. Selain Direktur Keuangan MTF, hadir pula Kepala Divisi Human Capital Vivid Zulprimiadhanni, Kepala Wilayah Regional 6 Puji Bisno Santoso dan perwakilan dari Cabang MTF Yogyakarta.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
<b>TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN</b>

No	Tanggal	Kuartal	Kegiatan	Keterangan
5	14 November	4	Literasi untuk Mahasiswa S2 UNS	<b>Literasi untuk Mahasiswa Program MM UNS</b> Sejumlah mahasiswa Magister Manajemen Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta berkunjung ke MTF dan menyimak penjelasan dari Direktur MTF Harjanto Tjotohardjo mengenai "Mengenal Perusahaan Pembiayaan" dan berdiskusi mengenai industri pembiayaan.
6	27 November	4	Direksi Mengajar Ma Chung - Malang	<b>Direksi Mengajar di Universitas Ma Chung, Malang</b> PT Mandiri Tunas Finance (MTF) melaksanakan kegiatan literasi keuangan berupa Program Direksi Mengajar di Universitas Ma Chung, Malang, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, hadir sekitar 100 mahasiswa yang mengikuti dengan antusias paparan mengenai "Mengenal Perusahaan Pembiayaan" yang dibawakan oleh Deputy Direktur MTF William Francis Indra.

#### • Bidang Kesehatan

Kepedulian Perseroan terhadap bidang kesehatan, diimplementasikan melalui kegiatan donor darah yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia. Dimana hasil dari kegiatan donor darah tersebut, akan disumbangkan

kepada Palang Merah Indonesia. Kegiatan ini diperuntukan bukan hanya bagi karyawan Perseroan, namun juga bagi perusahaan lain yang ada di sekitaran kantor MTF.



Donor Darah dalam rangka Hari Kartini



Donor Darah dalam rangka Hari Kemerdekaan RI

Berikut kegiatan program Donor Darah yang dilakukan Perseroan sepanjang tahun 2018:

No	Tanggal	Kuartal	Kegiatan	Keterangan
1	23 April	2	Donor darah	<b>Donor Darah dalam rangka Hari Kartini</b> PT Mandiri Tunas Finance mengadakan kegiatan donor darah dalam rangka peringatan hari Kartini, yang dilaksanakan bekerja sama dengan PMI Kota Tangerang. Dalam acara tersebut, para karyawan MTF maupun perusahaan lain yang berada di Graha Mandiri turut berpartisipasi dan menyumbangkan sebanyak 77 kantong darah.



No	Tanggal	Kuartal	Kegiatan	Keterangan
2	27 Agustus	3	Donor darah	<b>Donor Darah dalam rangka Hari Kemerdekaan RI</b> PT Mandiri Tunas Finance mengadakan kegiatan donor darah dalam rangka peringatan hari Kemerdekaan RI, yang dilaksanakan bekerja sama dengan PMI DKI Jakarta. Direktur MTF Harjanto Tjitohardjojo dan Armendra turut serta beserta para karyawan MTF maupun perusahaan lain yang berada di Graha Mandiri menyumbangkan sebanyak 83 kantong darah

• **Bidang Sosial**

Program kegiatan CSR di bidang sosial kemasyarakatan dilaksanakan Perseroan sebagai bentuk kepedulian Perseroan terhadap sesama. Adapun bentuk kegiatan CSR di bidang sosial kemasyarakatan di sepanjang tahun 2018, adalah sebagai berikut:



Partisipasi dalam Peringatan Idul Adha Mandiri Group



Bantuan MCK dan Instalasi Air Bersih untuk Korban Gempa Lombok



Donasi untuk Korban Bencana Palu



MTF Peduli Korban Tsunami Selat Sunda

No	Tanggal	Kuartal	Kegiatan	Keterangan
1	22 Agustus	3	Idul Adha Mandiri Group	<b>Partisipasi dalam Peringatan Idul Adha Mandiri Group</b> Sebagai bagian dari Mandiri Group, PT Mandiri Tunas Finance berpartisipasi dalam kegiatan peringatan Hari Raya Idul Adha 1439 H. Dalam acara tersebut Direktur MTF Armendra menyerahkan sapi kepada Mandiri Amal Insani selaku penyelenggara acara. Peringatan Idul Adha yang diikuti oleh Bank Mandiri dan perusahaan anak dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
<b>TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN</b>

No	Tanggal	Kuartal	Kegiatan	Keterangan
2	19 September	3	CSR Lombok	<p><b>Bantuan MCK dan Instalasi Air Bersih untuk Korban Gempa Lombok</b></p> <p>PT Mandiri Tunas Finance memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya pelanggan di Lombok berupa sejumlah unit MCK dan instalasi air bersih serta sejumlah paket sembako. Bantuan tersebut diserahkan kepada warga Pamenang dan Nipah oleh Direktur Utama MTF Arya Suprihadi, didampingi oleh Deputy Direktur MTF Perana Citra Ketaren. Bantuan yang merupakan wujud kepedulian dan solidaritas dari seluruh Karyawan MTF, diharapkan akan dapat meringankan kondisi warga sekitar wilayah tersebut.</p>
3	24 Oktober	4	CSR Palu	<p><b>Donasi untuk Korban Bencana Palu</b></p> <p>Untuk memberikan dukungan dan bantuan bagi karyawan dan masyarakat yang menjadi korban bencana di Palu dan sekitarnya, PT Mandiri Tunas Finance melalui Direktur Utama MTF Arya Suprihadi didampingi Deputy Direktur MTF Bonifacius Perana Citra Ketaren dan team MTF lainnya melakukan kunjungan ke Palu. Dalam kesempatan tersebut, MTF menyerahkan bantuan yang berasal dari donasi karyawan MTF dan dana CSR MTF kepada karyawan dan masyarakat sekitar berupa donasi uang tunai dan paket sembako.</p>
4	31 Desember	4	Sumbangan untuk bencana tsunami Banten	<p><b>MTF Peduli Korban Tsunami Selat Sunda</b></p> <p>Untuk meringankan beban para korban bencana tsunami di Selat Sunda, PT Mandiri Tunas Finance memberikan bantuan berupa 200 paket sembako, alat tulis, pakaian dan tenda. Bantuan tersebut diserahkan oleh Deputi Direktur MTF Perana Citra dan Deputi Direktur MTF William Francis di Desa Teluk, Labuan, Banten.</p>

## BIAYA DAN/ATAU INVESTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK PEMBERDAYAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Jumlah penyaluran program CSR pada aspek pengembangan sosial dan kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berikut tabel besaran anggaran yang digunakan untuk program CSR dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tahun	Jumlah (Rp)	Kenaikan dari tahun sebelumnya
2018	360.000.000	2,86%
2017	350.000.000	5,70%
2016	331.000.000	-17,3%
2015	400.372.050	16,2%
2014	344.744.736	

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK/JASA SERTA KONSUMEN DAN MITRA KERJA

## KEBIJAKAN

Kebijakan Perseroan terkait tanggung jawab terhadap produk/Jasa serta konsumen dan mitra kerja tertuang dalam:

1. Kebijakan Pembiayaan No.1 tanggal 29 Februari 2016
2. Kebijakan Operasional dan *Support* No.2 tanggal 31 Maret 2016, khususnya bagian Pengadaan Barang dan Jasa (*Procurement*), Penerimaan Pembayaran Kewajiban *Customer*
3. Standar *Operating Procedure* Pengendalian No. 03/PGN/02/2016 mengenai *Customer Care*
4. Standar *Operating Procedure* No. 02/GA/01/2017 mengenai *Procurement & General Affairs*

## RENCANA DAN TARGET KEGIATAN SERTA REALISASINYA DI SEPANJANG TAHUN 2018

Dalam memenangkan persaingan yang ketat di industri pembiayaan, maka di tahun 2018 Mandiri Tunas Finance membuat strategi yang berkaitan dengan pemberian kredit untuk mempercepat SLA dan mengurangi risiko kredit serta mengurangi penggunaan kertas. Adapun strategi tersebut adalah :

1. Menjalankan program SPRINT (Sentralisasi Proses Input).  
Program ini dibuat untuk mengurangi SLA proses kredit, mengurangi penggunaan kertas dan mengembangkan proses digital.
2. Melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri RI. Kerjasama ini dilakukan untuk mengurangi

potensi pemalsuan data identitas kependudukan dan mengurangi celah bagi para mafia *leasing* untuk melakukan penipuan. Selain itu juga demi mewujudkan program pemerintah dalam membangun *big data* kependudukan di Indonesia.

Strategi-strategi tersebut dibuat dengan tujuan akhir adalah *one day service* dengan tetap mendukung program *Go Green*, pertumbuhan *lending* yang sehat dengan kualitas terjaga, *Non Performing Financing* (NPF) <1% dan profit bertumbuh dengan sehat. Untuk program-program tersebut sudah dilaksanakan dan terrealisasi di tahun 2018.

## PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN DAN DAMPAKNYA

### Pengelolaan Hubungan dengan Mitra Kerja Pemasok/*Supplier/Vendor*

Hubungan dengan pemasok/*supplier/vendor* diatur dalam SOP *Procurement & General Affairs* No. 02/GA/01/2017 khususnya bahasan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa. Ketentuan umum pengadaan di Perseroan mengacu pada prinsip

dasar dan etika pengadaan barang dan jasa yang meliputi transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, independen, kewajaran serta efektif dan efisien. Pengadaan barang dan jasa di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang MTF meliputi:

- Pengadaan barang dan jasa
- Pengadaan jasa konsultansi namun tidak

PERFORMA 2018
LAPORAN MANAJEMEN
PROFIL PERUSAHAAN
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
FUNGSI PENUNJANG BISNIS
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
<b>TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN</b>

termasuk jasa perencanaan konstruksi, pengawas konstruksi.

- Pengadaan jasa *outsourcing*

Seluruh pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Departemen *Procurement*.

## PENGADUAN TERKAIT LAYANAN SERTA PRODUK PERUSAHAAN DAN PENANGANANNYA

Penanganan dan penyelesaian keluhan nasabah dilakukan melalui unit kerja *Customer Care & Services* di Kantor Pusat maupun *Customer Care & Services Officer* di setiap kantor cabang dengan koordinasi unit kerja terkait. Pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan/masalah yang sedang dihadapi, pertanyaan dan permintaan informasi antara lain cara pembayaran angsuran, asuransi, proses perpanjangan STNK, pengambilan BPKB, perhitungan pelunasan (khusus *customer lancar*) serta informasi terkait *collection* dan *marketing*.

Pelanggan dapat menyampaikan keluhan maupun pertanyaan melalui berbagai media yang telah disediakan oleh Perseroan untuk mempercepat dan

mempermudah nasabah dalam menyampaikan keluhannya, yakni melalui:

Jenis Saluran	Keterangan
Situs web	www.mtf.co.id
Email	customer.service@mtf.co.id
Care Center	1500059
Facebook	MTFAutoLoan
Google+	MTFAutoLoan
Youtube	MTF AutoLoan
Twitter	@MTF_Autoloan
Instagram	@mtf_autoloan
LinkedIn	Mandiri Tunas Finance
Whatsapp	08111766935

## JUMLAH DAN PENANGANAN KELUHAN LAYANAN SERTA PRODUK PERUSAHAAN

	2018 (Keluhan)	2017 (Keluhan)	Kenaikan (Penurunan) %
Jumlah Keluhan	572	229	149%

## REFERENSI SILANG: KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018

No	KRITERIA	KETERSEDIAAN DALAM LAPORAN TAHUNAN (ADA/TIDAK)	HALAMAN
<b>I. UMUM</b>			
1.	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris.	✓	
2.	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca.	✓	
3.	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas a. Sampul muka b. Samping c. Sampul belakang d. Setiap halaman	✓	
4.	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di:	✓	
5.	Laporan tahunan ditampilkan di situs web perusahaan, mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	✓	
<b>II. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING</b>			
1.	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk Perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun, Informasi memuat antara lain: a. Penjualan/pendapatan usaha b. Laba (rugi): • Diatribusikan kepada pemilik entitas induk • Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali c. Penghasilan komprehensif periode berjalan : • Diatribusikan kepada pemilik entitas induk • Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali d. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.	✓	22-23
2.	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun, Informasi memuat antara lain: a. Jumlah investasi pada entitas asosiasi b. Jumlah aset c. Jumlah liabilitas d. Jumlah ekuitas.	✓	24-26
3.	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	✓	28-29
4.	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik a. Jumlah saham yang beredar b. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: o Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan o Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan o Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. c. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: o Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan o Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.	✓	31
5.	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Informasi memuat: a. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding) b. Tingkat bunga/imbalan c. Tanggal jatuh tempo d. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2017 dan 2018. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.	✓	32

No	KRITERIA	KETERSEDIAAN DALAM LAPORAN TAHUNAN (ADA/TIDAK)	HALAMAN
<b>III. LAPORAN DEWAN KOMISARIS &amp; DIREKSI</b>			
1.	Laporan Dewan Komisaris, memuat hal-hal sebagai berikut: a. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya b. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya c. Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut d. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	✓	44-48
2.	Laporan Direksi memuat hal-hal sebagai berikut: a. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: • Kebijakan strategis • Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan • Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya b. Analisis tentang prospek usaha c. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan d. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	✓	50-59
3.	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, memuat hal-hal sebagai berikut: a. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri b. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan c. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya d. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	✓	61
<b>IV. PROFIL PERUSAHAAN</b>			
1.	Nama dan alamat lengkap perusahaan yang memuat informasi antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.	✓	66-67
2.	Riwayat singkat perusahaan, mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	✓	68-71
3.	Bidang usaha yang memuat uraian mengenai antara lain: a. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir b. Kegiatan usaha yang dijalankan Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	✓	72-73
4.	Struktur Organisasi dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi.	✓	77
5.	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan yang mencakup: a. Visi perusahaan b. Misi perusahaan c. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direview dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku d. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.	✓	78-79
6.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris yang memuat Informasi antara lain: a. Nama b. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) c. Umur d. Domisili e. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) f. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) g. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	✓	81-86
7.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi yang memuat informasi antara lain: a. Nama b. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) c. Umur d. Domisili e. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) f. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) g. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	✓	87-91

No	KRITERIA	KETERSEDIAAN DALAM LAPORAN TAHUNAN (ADA/TIDAK)	HALAMAN
8.	<p>Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi, yang memuat informasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi</li> <li>Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan</li> <li>Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian</li> <li>Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan</li> <li>Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.</li> </ol>	✓	96-101; 214-229
9.	<p>Komposisi Pemegang saham yang mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya;</li> <li>Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham</li> <li>• Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.</li> </ul> </li> <li>Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.</li> </ol>	✓	102-108
10.	<p>Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama entitas anak dan/atau asosiasi</li> <li>Persentase kepemilikan saham</li> <li>Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi</li> <li>Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).</li> </ol>	✓	109
11.	<p>Struktur grup perusahaan; Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).</p>	✓	109
12.	<p>Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku, Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action)</li> <li>Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action)</li> <li>Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.</li> </ol> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.</p>	✓	110
13.	<p>Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku, mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalance efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya;</li> <li>Nilai penawaran efek lainnya</li> <li>Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan</li> <li>Peringkat efek.</li> </ol> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan.</p>	✓	110-117
14.	<p>Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang, informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan</li> <li>Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik</li> <li>Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.</li> </ol>		118-119
15.	<p>Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional, informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama penghargaan dan/atau sertifikasi</li> <li>Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi</li> <li>Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi</li> <li>Masa berlaku (untuk sertifikasi).</li> </ol>	✓	120-123
16.	<p>Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada), memuat informasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama dan alamat entitas anak; dan</li> <li>Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan.</li> </ol> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.</p>	✓	124-130
17.	<p>Informasi pada Website Perusahaan, Meliputi paling kurang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;</li> <li>Isi Kode Etik;</li> <li>Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan</li> <li>Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir)</li> <li>Profil Dewan Komisaris dan Direksi</li> <li>Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.</li> </ol>	✓	131-133

No	KRITERIA	KETERSEDIAAN DALAM LAPORAN TAHUNAN (ADA/TIDAK)	HALAMAN
18.	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite- komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal, Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris</li> <li>Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi</li> <li>Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit</li> <li>Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi</li> <li>Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya</li> <li>Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan</li> <li>Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal yang diikuti pada tahun buku.</li> </ol> Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan	✓	134-137
<b>V. ANALISA &amp; PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN</b>			
1.	Tinjauan operasi per segmen usaha, memuat uraian mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penjelasan masing-masing segmen usaha.</li> <li>Kinerja per segmen usaha, antara lain:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi</li> <li>• Peningkatan/penurunan kapasitas produksi</li> <li>• Penjualan/pendapatan usaha</li> <li>• Profitabilitas.</li> </ul> </li> </ol>	✓	146-163
2.	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan, yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset</li> <li>Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas</li> <li>Ekuitas</li> <li>Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan</li> <li>Arus kas.</li> </ol>	✓	164-179
3.	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan; Penjelasan tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang</li> <li>Tingkat kolektibilitas piutang.</li> </ol>	✓	180-186
4.	Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy), Penjelasan atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas</li> <li>Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies)</li> <li>Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.</li> </ol>	✓	187-89
5.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir, Penjelasan tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama pihak yang melakukan ikatan</li> <li>Tujuan dari ikatan tersebut</li> <li>Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut;</li> <li>Mata uang yang menjadi denominasi</li> <li>Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.</li> </ol> Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	✓	190
6.	Bahasan mengenai ikatan investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir <ol style="list-style-type: none"> <li>Penjelasan tentang:</li> <li>Jenis investasi barang modal;</li> <li>Tujuan investasi barang modal; dan</li> <li>Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.</li> </ol> Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.	✓	190
7.	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan, Informasi memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi)</li> <li>Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.</li> </ol>	✓	191-193
8.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.           Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.	✓	194
9.	Uraian tentang prospek usaha perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	✓	195



No	KRITERIA	KETERSEDIAAN DALAM LAPORAN TAHUNAN (ADA/TIDAK)	HALAMAN
10.	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	✓	196-98
11.	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir, Memuat uraian mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan pembagian dividen</li> <li>Total dividen yang dibagikan</li> <li>Jumlah dividen kas per saham</li> <li>Payout ratio</li> <li>Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun.</li> </ol> Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	✓	199-200
12.	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku, Memuat uraian mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya</li> <li>Jangka waktu</li> <li>Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak</li> <li>Harga exercise.</li> </ol> Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	✓	201
13	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana), Memuat uraian mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>Total perolehan dana</li> <li>Rencana penggunaan dana</li> <li>Rincian penggunaan dana</li> <li>Saldo dana</li> <li>Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).</li> </ol> Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	✓	201
14.	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi, memuat uraian mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi</li> <li>Penjelasan mengenai kewajaran transaksi</li> <li>Alasan dilakukannya transaksi</li> <li>Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir</li> <li>Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme <i>review</i> atas transaksi</li> <li>Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.</li> <li>Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.</li> </ol>	✓	202-206
15.	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir, uraian memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan</li> <li>Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.</li> </ol> Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	✓	207
16.	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir, uraian memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan kebijakan akuntansi</li> <li>Alasan perubahan kebijakan akuntansi</li> <li>Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.</li> </ol> Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	✓	209
17.	17. Informasi kelangsungan usaha, pengungkapan informasi mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir</li> <li><i>Assessment</i> manajemen atas hal-hal pada angka 1</li> <li>Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan <i>assessment</i>.</li> </ol> Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	✓	210
<b>VI. TATA KELOLA PERUSAHAAN</b>			
1.	Uraian Dewan Komisaris, uraian memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris</li> <li>Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya</li> <li>Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).</li> </ol>	✓	266-274

No	KRITERIA	KETERSEDIAAN DALAM LAPORAN TAHUNAN (ADA/TIDAK)	HALAMAN
2.	Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris), meliputi antara lain: a. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan b. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	✓	275-276
3.	Uraian Direksi yang memuat antara lain: a. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi b. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada) c. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	✓	277-285
4.	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2018 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi, memuat uraian mengenai: a. Kriteria yang digunakan dalam penilaian b. Pihak yang melakukan penilaian c. Skor penilaian masing-masing kriteria d. Rekomendasi hasil penilaian e. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2018, agar diungkapkan.	✓	252-257; 286
5.	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup antara lain: a. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris b. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi c. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; d. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi e. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi f. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	✓	287-291
6.	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan), informasi memuat antara lain: a. Tanggal Rapat b. Peserta Rapat c. Agenda Rapat untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	✓	292-297
7.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	✓	298
8.	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali, mencakup antara lain: a. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; b. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; c. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; d. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan e. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	✓	298-299
9.	Komite Audit, mencakup penyampaian informasi antara lain: a. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; b. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; c. Independensi anggota komite audit; d. Uraian tugas dan tanggung jawab; e. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan f. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	✓	302-311
10.	Komite Nominasi dan/atau Remunerasi, penyampaian informasi antara lain: a. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; b. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; c. Uraian tugas dan tanggung jawab; d. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; e. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; f. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan g. Kebijakan mengenai suksesi direksi.	✓	312-320
11.	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan, penyampaian informasi antara lain: a. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; b. Independensi komite lain; c. Uraian tugas dan tanggung jawab; d. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan e. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	✓	321-329

No	KRITERIA	KETERSEDIAAN DALAM LAPORAN TAHUNAN (ADA/TIDAK)	HALAMAN
12.	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan, penyampaian informasi antara lain; <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan;</li> <li>Domisili;</li> <li>Uraian tugas dan tanggung jawab; dan</li> <li>Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.</li> </ol>	✓	320-327
13.	Uraian mengenai unit audit internal, penyampaian informasi antara lain <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama ketua unit audit internal;</li> <li>Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal;</li> <li>Sertifikasi sebagai profesi audit internal;</li> <li>Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan;</li> <li>Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan</li> <li>Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.</li> </ol>	✓	328-345
14.	Akuntan Publik, penyampaian informasi antara lain <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;</li> <li>Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;</li> <li>Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan</li> <li>Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.</li> </ol> Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.	✓	346-349
15.	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan, mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan;</li> <li>Penjelasan mengenai hasil <i>review</i> yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku;</li> <li>Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan</li> <li>Upaya untuk mengelola risiko tersebut.</li> </ol>	✓	350-360
16.	Uraian mengenai sistem pengendalian intern, penyampaian informasi antara lain <ol style="list-style-type: none"> <li>Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional;</li> <li>Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan</li> <li>Penjelasan mengenai hasil <i>review</i> yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.</li> </ol>	✓	361-363
17.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait tatakelola Tanggung jawab sosial <ol style="list-style-type: none"> <li>Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial</li> <li>Informasi mengenai methoda dan lingkup due diligent terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktifitas perusahaan</li> <li>Informasi tentang stakeholder penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan</li> <li>Informasi tentang isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan</li> <li>Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban</li> <li>Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya stakeholders engagement dan meningkatkan value untuk stakeholder dan shareholder</li> <li>Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan</li> <li>Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial</li> </ol>	X	-
18.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subject Hak Azasi Manusia <ol style="list-style-type: none"> <li>Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Hak Azasi Manusia</li> <li>Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject Hak Azasi Manusia</li> <li>Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang Hak Azasi Manusia</li> <li>Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia</li> <li>Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia</li> </ol>	X	-
19.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subject Operasi yang adil <ol style="list-style-type: none"> <li>Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Operasi yang adil</li> <li>Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject operasi yang adil</li> <li>Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang operasi yang adil</li> <li>Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil</li> <li>Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil</li> </ol>	X	-

No	KRITERIA	KETERSEDIAAN DALAM LAPORAN TAHUNAN (ADA/TIDAK)	HALAMAN
20.	<p>Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup, penyampaian informasi tentang ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan</li> <li>Informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan</li> <li>Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen;</li> <li>Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan</li> <li>Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup</li> <li>Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain.</li> <li>Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.</li> </ol>	x	-
21.	<p>Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subject ketenagakerjaan</li> <li>Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan</li> <li>Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; dan</li> <li>Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut</li> <li>Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.</li> </ol>	✓	410-414
22.	<p>Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen, Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2018 ditetapkan manajemen; dan</li> <li>Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut</li> <li>Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.</li> </ol>	✓	415-419
23.	<p>Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan masyarakatan, mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subject pengembangan sosial dan masyarakatan</li> <li>Informasi tentang isu sosial yang relevan dengan perusahaan</li> <li>Informasi tentang resiko sosial yang dikelola perusahaan</li> <li>Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan masyarakatan</li> <li>Target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen;</li> <li>Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan</li> <li>Biaya yang dikeluarkan</li> <li>Terkait pengembangan sosial dan masyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.</li> </ol>	✓	420-421
24.	<p>Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan, mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pokok perkara/gugatan;</li> <li>Status penyelesaian perkara/gugatan;</li> <li>Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan</li> <li>Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi).</li> </ol> <p>Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.</p>	✓	365-368
25.	<p>Akses informasi dan data perusahaan: Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.</p>	✓	369-373
26	<p>Bahasan mengenai kode etik, memuat uraian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pokok-pokok kode etik;</li> <li>Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi;</li> <li>Penyebarluasan kode etik;</li> <li>Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan</li> <li>Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir.</li> </ol> <p>Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan</p>	✓	374-381

No	KRITERIA	KETERSEDIAAN DALAM LAPORAN TAHUNAN (ADA/TIDAK)	HALAMAN
27	<p>Pengungkapan mengenai whistleblowing system. Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian laporan pelanggaran;</li> <li>b. Perlindungan bagi whistleblower;</li> <li>c. Penanganan pengaduan;</li> <li>d. Pihak yang mengelola pengaduan; dan</li> <li>e. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan</li> <li>f. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku.</li> </ul> <p>Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p>	✓	385-387
28	<p>Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin.</p> <p>Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.</p>	✓	388-389
<b>VII. INFORMASI KEUANGAN</b>			
1.	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	✓	
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan	✓	
3.	<p>Deskripsi Auditor Independen di Opini, deskripsi memuat tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan tanda tangan;</li> <li>b. Tanggal Laporan Audit; dan</li> <li>c. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.</li> </ul>	✓	
4.	<p>Laporan keuangan yang lengkap, memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan posisi keuangan;</li> <li>b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;</li> <li>c. Laporan perubahan ekuitas;</li> <li>d. Laporan arus kas;</li> <li>e. Catatan atas laporan keuangan;</li> <li>f. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan</li> <li>g. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).</li> </ul>	✓	
5.	Perbandingan tingkat profitabilitas, menampilkan perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.	✓	
6.	<p>Laporan Arus Kas, yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan;</li> <li>b. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi;</li> <li>c. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan</li> <li>d. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.</li> </ul>	✓	
7.	<p>Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang meliputi sekurang-kurangnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK;</li> <li>b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan;</li> <li>c. Pajak penghasilan;</li> <li>d. Imbalan kerja; dan</li> <li>e. Instrumen Keuangan.</li> </ul>	✓	
8.	<p>Pengungkapan transaksi pihak berelasi, dimana hal-hal yang diungkapkan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi;</li> <li>b. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan</li> <li>c. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.</li> </ul>	✓	

No	KRITERIA	KETERSEDIAAN DALAM LAPORAN TAHUNAN (ADA/TIDAK)	HALAMAN
9.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan, Hal-hal yang harus diungkapkan: a. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; b. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; c. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2018; d. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan e. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	✓	
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap, hal-hal yang harus diungkapkan: a. Metode penyusutan yang digunakan; b. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; c. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan d. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	✓	
11.	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi dimana hal-hal yang harus diungkapkan: a. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; b. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; c. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan d. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama	✓	
12.	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan, dimana hal-hal yang harus diungkapkan: a. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; b. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; c. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; d. Kebijakan manajemen risiko; dan e. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	✓	
13.	Penerbitan laporan keuangan, hal-hal yang diungkapkan antara lain: a. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan b. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan	✓	
<b>ASPEK LAIN-LAIN</b>			
1	Praktik <i>good corporate governance</i> (+5%) yang melebihi kriteria		
1	Menerapkan peraturan atau ketentuan tata kelola perusahaan di bidang pasar modal dan international best practices; dan	✓	
2	Menyampaikan Laporan Keberlanjutan/CSR yang disusun berdasarkan standar yang berlaku secara internasional (GRI Sustainability Reporting Guidelines).	✓	
II	Praktik <i>bad corporate governance</i> (-5%) yang tidak diatur dalam kriteria		
1	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan;	✓	
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan;	✓	
3	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan;	✓	
4	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK;	✓	
5	Kasus terkait dengan buruh dan karyawan;	✓	
6	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan listed; dan	✓	
7	Terdapat ketidaksesuaian antara LT <i>hardcopy</i> dengan LT <i>softcopy</i> .	✓	





A man in a dark suit and tie stands in front of a whiteboard, pointing at a diagram. The whiteboard contains a flowchart with several boxes and arrows, and some handwritten text. The man is smiling slightly. In the foreground, the hands of another person are visible, resting on a desk with a laptop.

# LAPORAN KEUANGAN AUDIT





## **PT Mandiri Tunas Finance**

Laporan keuangan  
tanggal 31 Desember 2018  
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
beserta laporan auditor independen/  
*Financial statements as of 31 December 2018 and  
for the year then ended  
with independent auditors' report*

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE  
FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF 31 DECEMBER 2018  
AND FOR THE YEAR THEN ENDED**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : Arya Suprihadi

**Alamat kantor** : Gedung Graha Mandiri Lt. 3A  
Jl. Imam Bonjol No. 61  
Menteng Jakarta Pusat 10310

**Alamat domisili  
sesuai KTP atau  
kartu identitas  
lain** : Jl. Wijaya XII No. 38  
RT 001/RW 004  
Kel. Melawai,  
Kec. Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan

**Nomor Telepon** : (021) 2305608

**Jabatan** : Direktur Utama
- Nama** : Armendra

**Alamat kantor** : Gedung Graha Mandiri Lt. 3A  
Jl. Imam Bonjol No. 61  
Menteng Jakarta Pusat 10310

**Alamat domisili  
sesuai KTP atau  
kartu identitas  
lain** : Bukit Modern G-5/2  
RT 001/RW 013  
Kel. Pondok Cabe Udik,  
Kec. Pamulang,  
Kota Tangerang Selatan.

**Nomor Telepon** : (021) 2305608

**Jabatan** : Direktur

*We, the undersigned:*

- Name** : Arya Suprihadi

**Office address** : Gedung Graha Mandiri Lt. 3A  
Jl. Imam Bonjol No. 61  
Menteng Jakarta Pusat 10310

**Domicile address  
appropriate ID  
card or other  
identification card** : Jl. Wijaya XII No. 38  
RT 001/RW 004  
Kel. Melawai,  
Kec. Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan

**Telephone** : (021) 2305608

**Function** : President Director
- Name** : Armendra

**Office address** : Gedung Graha Mandiri Lt. 3A  
Jl. Imam Bonjol No. 61  
Menteng Jakarta Pusat 10310

**Domicile address  
appropriate ID  
card or other  
identification card** : Bukit Modern G-5/2  
RT 001/RW 013  
Kel. Pondok Cabe Udik,  
Kec. Pamulang,  
Kota Tangerang Selatan.

**Telephone** : (021) 2305608

**Function** : Director

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Mandiri Tunas Finance ("Perseroan");
2. Laporan keuangan Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3.
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perseroan telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - b. Laporan keuangan Perseroan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perseroan

declare that:


1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Mandiri Tunas Finance (the "Company");
2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;
3.
  - a. All information in the Company's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
  - b. The Company's financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;
4. We are responsible for the Company's internal control system.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*We certify the accuracy of this statement.*

Jakarta, 25 Januari 2019/ 25 January 2019

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors

  
Arya Suprihadi  
Presiden Direktur / President Director

  
Armendra  
Direktur / Director



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF 31 DECEMBER 2018  
AND FOR THE YEAR THEN ENDED  
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

**Daftar Isi**

**Table of Contents**

	Halaman/ Page	
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan .....	1-2	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain .....	3	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas .....	4	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas .....	5-6	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan .....	7-117	<i>Notes to the Financial Statements</i>

\*\*\*\*\*



*The original report included herein is in the Indonesian language.*

## Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00106/2.1032/AU.1/09/1008-2/1/1/2019

### Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

#### PT Mandiri Tunas Finance

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Mandiri Tunas Finance terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

## Independent Auditors' Report

Report No. 00106/2.1032/AU.1/09/1008-2/1/1/2019

### The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

#### PT Mandiri Tunas Finance

We have audited the accompanying financial statements of PT Mandiri Tunas Finance, which comprise the statement of financial position as of 31 December 2018 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

### Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

Laporan No. 00106/2.1032/AU.1/09/1008-2/1/I/2019 (lanjutan)

**Tanggung jawab auditor (lanjutan)**

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Mandiri Tunas Finance tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Independent Auditors' Report (continued)**

Report No. 00106/2.1032/AU.1/09/1008-2/1/I/2019 (continued)

**Auditors' responsibility (continued)**

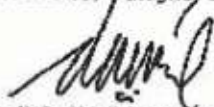
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

**Opinion**

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Mandiri Tunas Finance as of 31 December 2018, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Dani Setiadi Handaja, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1008/Public Accountant Registration No. AP.1008

25 Januari 2019/25 January 2019

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
**As of 31 December 2018**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Kas dan setara kas	2c,2f 4,27			Cash and cash equivalents
Kas		12.863	20.198	Cash on hand
Kas pada bank		105.923	8.944	Cash in banks
Pihak ketiga		136.154	131.408	Third parties
Pihak berelasi	2s,4,26a			Related parties
		254.940	160.550	
Piutang pembiayaan konsumen	2c,2d,2g,5, 27,28,29			Consumer financing receivables
Pihak ketiga		12.927.542	11.444.554	Third parties
Pihak berelasi	2s,5,26a	5.822	7.957	Related parties
		12.933.364	11.452.511	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	2j,5	(303.884)	(271.205)	Less: allowance for impairment losses
		12.629.480	11.181.306	
Piutang sewa pembiayaan	2c,2d,2h,6, 27,28,29			Finance lease receivables
Pihak ketiga		3.328.389	2.364.629	Third parties
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	2j,6	(9.286)	(7.739)	Less: allowance for impairment losses
		3.319.103	2.356.890	
Anjak piutang	2c,2d,2i,7, 27,28			Factoring receivables
Pihak ketiga		11.416	-	Third parties
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	2j,7	(113)	-	Less: allowance for impairment losses
		11.303	-	
Piutang lain-lain	2c,8,27			Other receivables
Pihak ketiga		115.193	104.140	Third parties
Pihak berelasi	2s,8,26a	620.215	564.131	Related parties
		735.408	668.271	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	2j,8	(6.007)	(2.896)	Less: allowance for impairment losses
		729.401	665.375	
Aset pajak tangguhan	2m,9d	59.921	38.004	Deferred tax assets
Tagihan kelebihan pajak	9a	43.538	65.538	Claims for tax refund
Piutang derivatif	2c,2t,16,27,28	138.333	23.202	Derivative receivables
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp137.175 dan Rp102.750 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017)	2l,10	182.005	165.907	Fixed assets (net of accumulated depreciation of Rp137,175 and Rp102,750 as of 31 December 2018 and 2017, respectively)
Aset lain-lain	2c,2k,11, 27,29			Other assets
Pihak ketiga		111.593	81.340	Third parties
Pihak berelasi	2s,11,26a	2.227	1.346	Related parties
<b>TOTAL ASET</b>		<b>17.481.844</b>	<b>14.739.458</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**(lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2018**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
**(continued)**  
**As of 31 December 2018**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Utang usaha	2c,12,27,29	649.630	606.513	Trade payables
Utang lain-lain	2c,13,27			Other payables
Pihak ketiga		199.947	194.491	Third parties
Pihak berelasi	2s,13,26b	84.738	30.344	Related parties
Utang pajak kini	2m,9b	1.852	33.916	Current tax liabilities
Beban yang masih harus dibayar	2c,14,27			Accrued expenses
Pihak ketiga		220.282	135.559	Third parties
Pihak berelasi	2s,14,26b	1.828	1.227	Related parties
Pinjaman bank	2c,2d,2e,15,27,28			Bank loans
Pihak ketiga		9.843.103	6.641.977	Third parties
Pihak berelasi	2s,15,26b	1.379.632	1.602.605	Related parties
		11.222.735	8.244.582	
Biaya provisi yang belum diamortisasi	15	(34.611)	(34.152)	Unamortized provision cost
		11.188.124	8.210.430	
Surat berharga yang diterbitkan	2c,2d,2r,17,27,28			Securities issued
Pihak ketiga		1.835.300	2.443.300	Third parties
Pihak berelasi	2s,17,26b	1.014.700	1.231.700	Related parties
		2.850.000	3.675.000	
Beban emisi yang belum diamortisasi	17	(5.284)	(9.749)	Unamortized issuance cost
		2.844.716	3.665.251	
Utang derivatif	2c,2t,16,27,28	89.788	19.540	Derivative payables
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2n,18	80.024	73.845	Employee benefits obligation
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>15.360.929</b>	<b>12.971.116</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Modal saham				Share capital
Modal dasar - 10.000.000.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham				Authorized capital - 10,000,000,000 ordinary shares with a par value of Rp100 (full amount) per share
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.500.000.000 lembar saham	2o,19	250.000	250.000	Issued and fully paid up capital - 2,500,000,000 ordinary shares
Penghasilan komprehensif lain: Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan - neto	2n,18	(19.519)	(24.567)	Other comprehensive income: Remeasurement of employee benefits obligation - net
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto	2t	(33.391)	(12.620)	Cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges - net
Saldo laba				Retained earnings
Sudah ditentukan penggunaannya	20	50.000	50.000	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		1.873.825	1.505.529	Unappropriated
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>2.120.915</b>	<b>1.768.342</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>17.481.844</b>	<b>14.739.458</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN**  
**KOMPREHENSIF LAIN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Desember 2018**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS**  
**AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**  
**For the Year Ended 31 December 2018**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
		2018	2017	
<b>PENDAPATAN</b>	2u			<b>REVENUE</b>
Pembiayaan konsumen	2s,21a,26c	1.936.719	1.830.424	Consumer financing
Sewa pembiayaan	21b	386.302	178.983	Finance lease
Anjak piutang	21c	96	-	Factoring
Bunga	2s,21d,26c	12.116	9.036	Interest
Lain-lain - neto	2s,21e,26c	784.959	719.921	Others - net
Total pendapatan		3.120.192	2.738.364	Total revenue
<b>BEBAN</b>	2u			<b>EXPENSES</b>
Beban keuangan	2s,2t,22,26d	(1.260.010)	(1.035.442)	Finance charges
Gaji dan tunjangan	2s,23,26d	(518.980)	(437.812)	Salaries and benefits
Umum dan administrasi	2s,24,26d	(398.555)	(354.063)	General and administration
Penyisihan kerugian penurunan nilai:				Provision for impairment losses:
Pembiayaan konsumen	2c,2j,5	(394.619)	(434.774)	Consumer financing
Sewa pembiayaan	2c,2j,6	(3.950)	(5.784)	Finance lease
Anjak piutang	2c,2j,7	(113)	-	Factoring
Piutang lain-lain	2c,2j,8	(4.122)	(2.111)	Other receivables
Total beban		(2.580.349)	(2.269.986)	Total expenses
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>539.843</b>	<b>468.378</b>	<b>INCOME BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX EXPENSE</b>
Beban pajak final	2m,9c	(2.423)	(1.807)	Final tax expense
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>537.420</b>	<b>466.571</b>	<b>INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	2m,9c	<b>(134.100)</b>	<b>(116.329)</b>	<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>403.320</b>	<b>350.242</b>	<b>INCOME FOR THE YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>				<b>Item that will not be reclassified to profit or loss:</b>
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	2n,18	6.730	(13.162)	Remeasurement of employee benefits obligation
Pajak penghasilan terkait	2m,9d	(1.682)	3.290	Income tax effect
		5.048	(9.872)	
<b>Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>				<b>Item that will be reclassified to profit or loss:</b>
Bagian efektif dari kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	2t	(27.695)	(16.826)	Effective portion of loss on hedging instruments in a cash flow hedge
Pajak penghasilan terkait	2m,9d	6.924	4.206	Income tax effect
		(20.771)	(12.620)	
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak		(15.723)	(22.492)	Other comprehensive income - net of tax
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>387.597</b>	<b>327.750</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)</b>	2q,25	<b>161</b>	<b>140</b>	<b>BASIC EARNINGS PER SHARE (Full amount)</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk Tahun yang Berakhir**  
**Pada Tanggal 31 Desember 2018**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY**  
**For the Year Ended**  
**31 December 2018**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan- neto/ Remeasurement of employee benefits obligation- net	Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai Cummulative loss on derivative instrument for cash flow hedges- net	Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya/ Appropriated retained earnings	Saldo laba belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated retained earnings	Ekuitas/ Equity
<b>Saldo 31 Desember 2016</b>	<b>250.000</b>	<b>(14.695)</b>	-	<b>50.000</b>	<b>1.188.824</b>	<b>1.474.129</b>
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan- setelah pajak		(9.872)	-	-	-	(9.872)
Kerugian bersih atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas		-	(12.620)	-	-	(12.620)
Laba tahun berjalan 2017		-	-	-	350.242	350.242
Dividen yang dibayarkan		-	-	-	(33.537)	(33.537)
<b>Saldo 31 Desember 2017</b>	<b>250.000</b>	<b>(24.567)</b>	<b>(12.620)</b>	<b>50.000</b>	<b>1.505.529</b>	<b>1.768.342</b>
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan- setelah pajak		5.048	-	-	-	5.048
Kerugian bersih atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas		-	(20.771)	-	-	(20.771)
Laba tahun berjalan 2018		-	-	-	403.320	403.320
Dividen yang dibayarkan		-	-	-	(35.024)	(35.024)
<b>Saldo 31 Desember 2018</b>	<b>250.000</b>	<b>(19.519)</b>	<b>(33.391)</b>	<b>50.000</b>	<b>1.873.825</b>	<b>2.120.915</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun yang Berakhir**  
**Pada Tanggal 31 Desember 2018**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**STATEMENT OF CASH FLOWS**  
**For the Year Ended**  
**31 December 2018**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
		2018	2017	
<b>ARUS KAS DARI</b>				<b>CASH FLOWS FROM</b>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>				<b>OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari konsumen:				Cash receipts from customers:
Pembiayaan konsumen		32.929.846	29.784.343	Consumer financing
Sewa pembiayaan		3.146.365	867.371	Finance lease
Bunga		12.128	9.053	Interest
Pendapatan penalti	21e	58.007	47.844	Late payment penalties
Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan	5,6	152.200	72.005	Recovery from written-off receivables
Premi asuransi		1.746.273	1.643.524	Insurance premiums
Pengeluaran kas untuk:				Cash disbursements for:
Pembayaran fasilitas pembiayaan bersama		(9.408.430)	(9.844.625)	Repayments of joint financing facilities
Pembayaran kepada penyalur kendaraan		(27.161.244)	(22.647.364)	Payments to car dealers
Pembayaran beban keuangan		(1.208.033)	(1.040.072)	Payments for finance charges
Pembayaran pajak penghasilan		(185.262)	(113.687)	Payments for income tax
Pembayaran gaji dan tunjangan		(461.115)	(355.254)	Payments for salaries and allowances
Pembayaran beban umum dan administrasi		(478.880)	(385.014)	Payments for general and administrative expenses
Pembayaran kepada perusahaan asuransi		(1.085.334)	(1.008.229)	Payments to insurance companies
<b>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi</b>		<b>(1.943.479)</b>	<b>(2.970.105)</b>	<b>Net cash used in operating activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Hasil penjualan aset tetap	10	-	38	Proceeds from sale of fixed assets
Perolehan aset tetap	10	(50.719)	(49.979)	Acquisition of fixed assets
<b>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>		<b>(50.719)</b>	<b>(49.941)</b>	<b>Net cash used in investing activities</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)  
Untuk Tahun yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Desember 2018  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)  
For the Year Ended  
31 December 2018  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
		2018	2017	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan pinjaman bank	32	16.824.698	13.034.928	Proceeds from bank loans
Penerimaan surat berharga yang diterbitkan	32	-	850.000	Proceeds from securities issued
Pembayaran pinjaman bank	32	(13.874.241)	(10.424.457)	Repayment of bank loans
Pembayaran surat berharga yang diterbitkan	17,32	(825.000)	(500.000)	Repayment of securities issued
Pembayaran beban emisi surat berharga	17	(1.845)	(4.232)	Payment of securities issuance costs
Pembayaran dividen kas	20	(35.024)	(33.537)	Payment of cash dividends
<b>Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>		<b>2.088.588</b>	<b>2.922.702</b>	<b>Net cash provided by financing activities</b>
<b>Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas</b>		<b>94.390</b>	<b>(97.344)</b>	<b>Net increase (decrease) in cash and cash equivalents</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>	4	<b>160.550</b>	<b>257.894</b>	<b>Cash and cash equivalents at beginning of year</b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	4	<b>254.940</b>	<b>160.550</b>	<b>Cash and cash equivalents at end of year</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**1. INFORMASI UMUM**

PT Mandiri Tunas Finance (“Perseroan”) didirikan dengan nama PT Tunas Financindo Corporation pada tanggal 17 Mei 1989 berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, No. 262. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-4868.HT.01.01.TH’89 tanggal 1 Juni 1989 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 57, Tambahan No. 1369 tanggal 18 Juli 1989. Pada tanggal 18 Agustus 2000, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Tunas Financindo Sarana berdasarkan Akta Notaris Adam Kasdarmadji S.H., M.H., Notaris di Jakarta No. 49. Akta perubahan ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan melalui Surat Keputusan No. C-21195HT.01.04.TH2000 tanggal 22 September 2000. Pada tanggal 30 November 2007, Perseroan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Notaris No. 94, Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008.

Pada tanggal 26 Juni 2009, Perseroan mengubah nama Perseroan menjadi PT Mandiri Tunas Finance berdasarkan perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Notaris No. 181 Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dengan Akta, No. 23 tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0032175 tanggal 17 Maret 2016.

Perubahan susunan Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang terakhir dilakukan pada tanggal 26 Maret 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta No. 42 yang dibuat oleh Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database sistem administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0128132 tanggal 28 Maret 2018.

**1. GENERAL INFORMATION**

*PT Mandiri Tunas Finance (the “Company”) was incorporated with the name of PT Tunas Financindo Corporation on 17 May 1989 based on Notarial Deed of Misahardi Wilamarta, S.H., Notary in Jakarta, No. 262. The Company’s Articles of Association were approved by the Ministry of Justice in its Decision Letter No. C2-4868.HT.01.01.TH’89 dated 1 June 1989 and were published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 57, Supplement No. 1369 dated 18 July 1989. On 18 August 2000, the Company changed its name to PT Tunas Financindo Sarana based on Notarial Deed of Adam Kasdarmadji S.H., M.H., Notary in Jakarta No. 49. This deed was approved by the Minister of Law and Regulation in its Decision Letter No. C-21195HT.01.04.TH2000 dated 22 September 2000. On 30 November 2007, the Company complied its Articles of Association to The Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company based on Notarial Deed No. 94 of Herawati, S.H., Notary in Jakarta. This Deed was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008 dated 12 February 2008.*

*On 26 June 2009, the Company changed its name to PT Mandiri Tunas Finance based on the amendment of the Articles of Association by the Notarial Deed No. 181 of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., Notary in Jakarta. The Articles of Association have been amended from time to time, the latest amendment was by Deed of No. 23 dated 24 February 2016 made before Lenny Janis Ishak, S.H., Notary in Jakarta. This deed was approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0032175 dated 17 March 2016.*

*The latest change in the composition of Directors and the composition of the Board of Commissioner was conducted on 26 March 2018 as stated in the Notary Deed No. 42 of Lenny Janis Ishak, S.H., Notary in Jakarta. The notification receipt of the change in the corporate data has been received and recorded in the database administration system of legal entity in the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0128132 dated 28 March 2018.*



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

Kegiatan komersial Perseroan dimulai pada tahun 1989. Perseroan memperoleh ijin usaha sebagai Perseroan pembiayaan dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen dari Menteri Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. 1021/KMK.013/1989 tanggal 7 September 1989, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan No. 54/KMK.013/1992 tanggal 15 Januari 1992 dan No. 19/KMK.017/2001 tanggal 19 Januari 2001. Amandemen terakhir diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009. Saat ini, Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, anjak piutang dan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan berdomisili di Jakarta Pusat dan mempunyai 102 kantor cabang dan 20 kantor selain kantor cabang yang berlokasi di beberapa tempat di Indonesia.

Pada tanggal 6 Februari 2009, PT Tunas Ridean Tbk. dan PT Tunas Mobilindo Parama mengalihkan kepemilikan sahamnya di Perseroan sejumlah masing-masing 650.000.000 lembar saham dan 625.000.000 lembar saham atau sebesar 51% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan akta notaris No. 8, Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., tanggal 6 Februari 2009.

Perseroan menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Mandiri Tunas Finance ke Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

Obligasi/Bonds	Tanggal terbit/Issue date	Nilai nominal/Nominal value
I	29 Mei/May 2003	500.000
II	22 Juni/June 2004	350.000
III	8 Juli/July 2005	350.000
IV	22 Februari/February 2007	600.000
V	20 Februari/February 2008	600.000
VI	6 Mei/May 2011	600.000
Berkelanjutan I tahap I/ Continuing Bonds I Phase I	5 Juni/June 2013	500.000
Berkelanjutan I tahap II/ Continuing Bonds I Phase II	23 Mei/May 2014	600.000
Berkelanjutan I tahap III/ Continuing Bonds I Phase III	9 Juni/June 2015	150.000
Berkelanjutan II tahap I/ Continuing Bonds II Phase I	18 Desember/December 2015	600.000
Berkelanjutan II tahap II/ Continuing Bonds II Phase II	1 Juni/June 2016	1.400.000
Berkelanjutan III tahap I/ Continuing Bonds III Phase I	7 Oktober/October 2016	500.000
Berkelanjutan III tahap II/ Continuing Bonds III Phase II	8 Mei/May 2017	850.000

**1. GENERAL INFORMATION (continued)**

The Company commenced commercial activities in 1989. The Company obtained a business license to operate in leasing, factoring and consumer financing from the Ministry of Finance in its Decision Letter No. 1021/KMK.013/1989 dated 7 September 1989, as amended by the Decision Letter No. 54/KMK.013/1992 dated 15 January 1992 and No. 19/KMK.017/2001 dated 19 January 2001. The latest amendment was by the Ministry of Finance Decision Letter No. KEP-352/KM.10/2009 dated 29 September 2009. Currently, the Company is engaged in investing, working capital, multipurpose, factoring and other financing activities based on the approval of Financial Services Authority.

The Company is domiciled in Central Jakarta and has 102 branches and 20 other branches that are located through other parts of Indonesia.

On 6 February 2009, PT Tunas Ridean Tbk. and PT Tunas Mobilindo Parama have transferred their ownership in the Company amounting to 650,000,000 shares and 625,000,000 shares, respectively, representing 51% of total issued and fully paid-up shares, to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. by the Notarial Deed No. 8 of Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., dated 6 February 2009.

The Company issued and registered the following Mandiri Tunas Finance Bonds in the Indonesia Stock Exchange:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

Pada tanggal 20 Mei 2011, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Mandiri Tunas Finance VI tahun 2011 ("Obligasi VI") ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi VI tahun 2011 serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan sesuai dengan Perjanjian No. 29 tanggal 25 Februari 2011 jo. Addendum 1 No. 7 tanggal 5 April 2011, jo. Addendum II No. 16 tanggal 11 April 2011, jo. Addendum III No. 1 tanggal 2 Mei 2011 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi VI.

Pada tanggal 7 Juni 2013, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 ("Obligasi Berkelanjutan I Tahap I") ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 29 tanggal 22 Maret 2013, jo. Addendum I No. 61 tanggal 17 April 2013, jo. Addendum II No. 47 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.

Pada tanggal 26 Mei 2014, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 ("Obligasi Berkelanjutan I Tahap II") ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 5 tanggal 2 Mei 2014 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap II.

Pada tanggal 9 Juni 2015, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 ("Obligasi Berkelanjutan I Tahap III") ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 29 tanggal 19 Mei 2015 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap III.

**1. GENERAL INFORMATION (continued)**

On 20 May 2011, the Company issued and registered Bonds Mandiri Tunas Finance VI ("Bonds VI") in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Bonds VI 2011 and Trusteeship Agreements No. 29 dated 25 February 2011 jo. Addendum 1 No. 7 dated 5 April 2011, jo. Addendum II No. 16 dated 11 April 2011, jo. Addendum III No. 1 dated 2 Mei 2011 were signed by the Company and PT Bank Mega Tbk, as the Trustee for the Bonds VI holders.

On 7 June 2013, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds I Phase I Year 2013 ("Continuing Bonds I Phase I") in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds I Phase I and Trusteeship Agreements No. 29 dated 22 March 2013, jo. Addendum I No. 61 dated 17 April 2013, jo. Addendum II No. 47 dated 20 May 2013 were signed by the Company and PT Bank Mega Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds I Phase I.

On 26 May 2014, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds I Phase II Year 2014 ("Continuing Bonds I Phase II") in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds I Phase II and appointment of Trustee based on Trusteeship Agreements No. 5 dated 2 May 2014 were signed by the Company and PT Bank Mega Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds I Phase II.

On 9 June 2015, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds I Phase III Year 2015 ("Continuing Bonds I Phase III") in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds I Phase III and appointment of Trustee based on Trusteeship Agreements No. 29 dated 19 May 2015 were signed by the Company and PT Bank Mega Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds I Phase III.



**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

Pada tanggal 18 Desember 2015, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap I") ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 7 tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

Pada tanggal 1 Juni 2016, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap II") ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 28 tanggal 12 Mei 2016, yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.

Pada tanggal 7 Oktober 2016, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap I") ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 2 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap I.

Pada tanggal 8 Mei 2017, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap II") ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 16 tanggal 8 Mei 2017 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II.

*The original financial statements included herein are in the Indonesian language.*

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**1. GENERAL INFORMATION (continued)**

*On 18 December 2015, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase I Year 2015 ("Continuing Bonds II Phase I") in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds II Phase I and Trusteeship Agreements No. 7 dated 5 October 2015 were signed by the Company and PT Bank Mega Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds II Phase I.*

*On 1 June 2016, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase II Year 2016 ("Continuing Bonds II Phase II") in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds II Phase II and Trusteeship Agreements No. 28 dated 12 May 2016, were signed by the Company and PT Bank Mega Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds II Phase II.*

*On 7 October 2016, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds III Phase I Year 2016 ("Continuing Bonds III Phase I") in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds III Phase I and appointment of Trustee based on Trusteeship Agreements No. 2 dated 1 August 2016 were signed by the Company and PT Bank Mega Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds III Phase I.*

*On 8 May 2017, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds III Phase II Year 2017 ("Continuing Bonds III Phase II") in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds III Phase II and appointment of Trustee based on Trusteeship Agreements No. 16 dated 8 May 2017 were signed by the Company and PT Bank Mega Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds III Phase II.*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

Susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember/ December 2018</b>
<b>Dewan Komisaris</b>	
Komisaris Utama	Rico Adisurja
Komisaris	Setiawan
Komisaris Independen	Harry Gale Ravik Karsidi
<b>Direksi</b>	
Direktur Utama	Arya Suprihadi **)
Direktur	Armendra **)
Direktur	Harjanto Tjitohardjo
<b>Komite Audit</b>	
Ketua	Ravik Karsidi
Anggota	Allen Situngkir Irene Yudhistira
Anggota	Junarso

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015.

Sekretaris Perusahaan Perseroan dan Kepala Divisi Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember/ December 2018</b>
Sekretaris Perusahaan	Arif Reza Fahlepi
Kepala Divisi Audit Internal	Dayu Rasmini

Pembentukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.

Pembentukan Divisi Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan memiliki 3.448 karyawan (31 Desember 2017: 3.467 karyawan) (tidak diaudit).

Entitas induk langsung dan entitas induk terakhir Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

\*) Telah mengundurkan diri berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 Maret 2018

\*\*) Telah diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 Maret 2018 dan efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK

**1. GENERAL INFORMATION (continued)**

The members of the Company's Board of Commissioners, Directors and Audit Committee are as follows:

	<b>31 Desember/ December 2017</b>	
		<b>Board of Commissioners</b>
	Rico Adisurja	President Commissioner
	Setiawan	Commissioner
	Harry Gale	Independent Commissioner
	Ravik Karsidi	
		<b>Directors</b>
	Ignatius Susatyo	President Director
	Wijoyo *)	Director
	Arya Suprihadi	Director
	Harjanto Tjitohardjo	
		<b>Audit Committee</b>
	Ravik Karsidi	Chairman
	Allen Situngkir	Member
	Irene Yudhistira	
	Junarso	Member

The appointment of the Company's Audit Committee is in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015.

The Company's Corporate Secretary and the Head of Internal Audit Division are as follows:

	<b>31 Desember/ December 2017</b>	
		Corporate Secretary
	Citra Judith Lupitadevi	Head of Internal Audit Division
	Dayu Rasmini	

The establishment of the Company's Corporate Secretary is in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 dated 8 December 2014.

The establishment of the Company's Internal Audit Division is in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 dated 23 December 2015.

As of 31 December 2018, the Company has 3,448 employees (31 December 2017: 3,467 employees, respectively) (unaudited).

The direct and ultimate holding entity of the Company is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, state-owned company, owned by the Government of the Republic of Indonesia.

\*) Has resigned based on the decision of General Meeting of Shareholders on 26 March 2018

\*\*) Has been appointed based on the decision of General Meeting of Shareholders on 26 March 2018 and effective after obtaining approval from OJK

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**

Kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

**a. Pernyataan kepatuhan**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

**b. Dasar penyusunan laporan keuangan**

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas, dan menggunakan konsep biaya historis kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, kas pada bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman atau dibatasi penggunaannya.

Pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lainnya disajikan terpisah antara akun - akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi dan akun - akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

The significant accounting policies, applied in the preparation of the Company's financial statements were as follows:

**a. Statement of compliance**

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards as issued by the Indonesian Institute of Accountants.

**b. Basis of preparation of the financial statements**

The financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the statement of cash flows, and using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant notes herein.

The statement of cash flows are prepared based on direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purposes of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with original maturity of three months or less, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.

The items under Other Comprehensive Income (OCI) are presented separately between items to be reclassified to profit or loss and those items not to be reclassified to profit or loss.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of estimates and assumptions that affects:

- the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and
- the reported amounts of revenues and expenses during the reported period.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**b. Dasar penyusunan laporan keuangan  
(lanjutan)**

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Mata uang penyajian yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain.

**c. Aset dan liabilitas keuangan**

**Aset keuangan**

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, dan (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Selama tahun berjalan dan pada tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan serta derivatif lindung nilai sehingga kebijakan akuntansi berkaitan dengan klasifikasi aset keuangan di luar pinjaman yang diberikan dan piutang serta derivatif lindung nilai tidak diungkapkan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Perseroan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**b. Basis of preparation of the financial  
statements (continued)**

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

The presentation currency used in the financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Company.

The amounts in the financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah unless otherwise stated.

**c. Financial assets and liabilities**

**Financial assets**

The Company classifies its financial assets in the following categories: (i) financial assets measured at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables, (iii) held-to-maturity financial assets, and (iv) available-for-sale financial assets. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

During the year and at the date of statement of financial position, the Company only has financial assets classified as loans and receivables and hedging derivatives. Therefore, the accounting policies related to classifications other than loans and receivables and hedging derivatives are not disclosed.

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- those that the Company intends to sell immediately or in the near future, which are classified as held-for-trading, and those that the entity upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**Aset keuangan (lanjutan)**

Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Perseroan mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial, kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan pendapatan administrasi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, anjak piutang, piutang lain-lain dan aset lain-lain (piutang karyawan, piutang bunga, setoran dalam perjalanan dan uang jaminan).

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai "Pendapatan pembiayaan konsumen", "Pendapatan sewa pembiayaan" dan "Anjak piutang".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, cadangan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

**Financial assets (continued)**

Loans and receivables (continued)

- those that the Company upon initial recognition designates as available-for-sale; or
- those for which the Company may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration and receivables.

Loans and receivables are initially recognized at fair value plus transaction costs and administration income and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Loans and receivables consist of cash and cash equivalents, consumer financing receivables, finance lease receivables, factoring receivables, other receivables and other assets (employee receivables, interest receivables, deposit in transit and security deposit).

Income from financial assets classified as loans and receivables is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income and is reported as "Consumer financing income", "Finance lease income" and "Factoring".

In the case of impairment, allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loan and receivables and recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Provision for impairment losses".

Financial assets measured at fair value through profit or loss

Financial assets measured at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
**(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

**Aset keuangan (lanjutan)**

**Financial assets (continued)**

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)

Aset derivatif diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Derivative assets are classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at fair value through profit or loss are carried in the statement of financial position at fair value with gains or losses recognized in the profit or loss.

Pengakuan

Recognition

Perseroan menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk kontrak reguler ketika mencatat transaksi aset keuangan.

The Company uses settlement date accounting for regular way contracts when recording financial assets transactions.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Impairment of financial assets

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

The Company assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

Kesulitan keuangan yang dialami debitur, kemungkinan debitur akan bangkrut, atau kegagalan atau penundaan pembayaran angsuran dapat dipertimbangkan sebagai indikasi adanya penurunan nilai atas aset atau bagian dari kelompok aset keuangan tersebut.

Significant financial difficulties of the debtors, probability that the debtors will bankrupt and default or delinquency in payments are considered as indicators that the financial assets or group of financial assets are impaired.

Perseroan menentukan penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual, penentuan penurunan nilai dilakukan secara kolektif.

The Company assesses impairment of financial assets individually for financial assets that are individually significant, and collectively for financial assets that are not significant individually.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**Aset keuangan (lanjutan)**

Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

Jika Perseroan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka Perseroan memasukkan aset keuangan tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dinilai secara individual tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di dalam Perseroan. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Ketika suatu piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan ke dalam "cadangan kerugian penurunan nilai".

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat piutang debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

**Financial assets (continued)**

Impairment of financial assets (continued)

If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for individually assessed financial assets, it includes the financial assets in a group of financial assets with similar credit risk characteristic and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment are not included in a collective assessment of impairment.

Future cash flows from a group of financial assets that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for assets with credit risk characteristics similar to those in the Company. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions that did not affect the period on which the historical loss experience is based and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist.

When a receivable is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses. Such receivables are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined. Impairment charges relating to loans and receivables are classified into "allowance for impairment losses".

If in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized (such as an improvement in the debtor's receivable rating), the previously recognized impairment loss is reversed by adjusting the allowance for impairment losses. The amount of the impairment reversal is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**Aset keuangan (lanjutan)**

Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukkan, dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan kerugian penurunan nilai.

**Liabilitas keuangan**

Perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Selama tahun berjalan dan pada tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Perseroan juga memiliki utang derivatif yang diakui sebagai lindung nilai yang efektif.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi.

Setelah pengakuan awal, Perseroan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, utang lain-lain, beban bunga yang masih harus dibayar, pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi mencakup liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awalnya, telah ditetapkan, diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

**Financial assets (continued)**

Impairment of financial assets (continued)

Subsequent recoveries of receivable written off are credited by adjusting the allowance for impairment losses account.

**Financial liabilities**

The Company classifies its financial liabilities in the category of (i) financial liabilities measured at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

During the year and at the date of statement of financial position, the Company does not have financial liabilities that are measured at fair value through profit or loss. The Company has derivatives payables that are accounted for as an effective hedge.

Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities at amortized cost are initially recognized at fair value less transaction costs.

After initial recognition, the Company measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rates method.

Financial liabilities measured at amortized cost include trade payables, other payables, accrued interest expenses, bank loans and securities issued.

Financial liabilities measured at fair value through profit or loss

Financial liabilities measured at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas keuangan (lanjutan)**

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar  
melalui laba atau rugi (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki untuk tujuan dijual dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Laba atau rugi atas liabilitas keuangan dalam kelompok diperdagangkan harus diakui dalam laba rugi.

**Penghentian pengakuan**

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perseroan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Penghentian pengakuan piutang pembiayaan konsumen yang mengalami penurunan nilai, akan dilakukan ketika piutang telah dihapusbukukan. Piutang ragu-ragu akan dihapusbukukan setelah menunggak lebih dari 180 hari atau pada saat piutang tersebut diputuskan tidak dapat tertagih. Penghapusbukuan piutang ragu-ragu ini bukan merupakan hapus tagih, sehingga upaya penagihan tetap dilakukan. Piutang pembiayaan konsumen dapat diselesaikan dengan menjual kendaraan yang dibiayai Perseroan.

Perseroan menerima kendaraan dari konsumen dan membantu untuk menjual kendaraan tersebut sehingga konsumen dapat melunasi utang pembiayaan konsumennya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

**Financial liabilities (continued)**

Financial liabilities measured at fair value  
through profit or loss (continued)

Financial liabilities are classified as held for trading if these are incurred for the purpose of selling in the near term. Derivative liabilities are also classified as held for trading unless these are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on financial liabilities held for trading are recognized in profit or loss.

**Derecognition**

Financial assets are derecognized when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risk and rewards were not transferred, the Company tests control to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognized when they have been redeemed or otherwise extinguished.

Consumer financing receivables are derecognized when the receivables have been written off. Doubtful receivables are written off when they have been overdue for more than 180 days or determined to be not collectible. The write-off of doubtful accounts do not eliminate the right to collect and hence are still to be pursued for collection continuously. Consumer financing receivables could be settled by selling the motor vehicles that are financed by the Company.

The Company receives motor vehicles from customers and assist them in selling their motor vehicles so that the customers are able to settle their consumer financing payables.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
**(lanjutan)**

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**Penghentian pengakuan (lanjutan)**

Konsumen memberi kuasa kepada Perseroan untuk menjual kendaraan ataupun melakukan tindakan lainnya dalam upaya penyelesaian piutang pembiayaan konsumen bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Konsumen berhak atas selisih lebih antara nilai penjualan dengan saldo piutang pembiayaan konsumen. Jika terjadi selisih kurang, kerugian yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Jaminan kendaraan milik konsumen untuk pelunasan piutang pembiayaan konsumen, dinyatakan sebesar nilai terendah antara nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen terkait atau realisasi neto dari jaminan kendaraan milik konsumen tersebut. Selisih antara nilai tercatat dan nilai realisasi neto piutang dicatat sebagai cadangan kerugian penurunan nilai dan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

**Saling hapus**

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum berarti:

- a. tidak terdapat kontinjensi di masa yang akan datang, dan
- b. hak yang berkekuatan hukum pada kondisi-kondisi berikut ini:
  - i. kegiatan bisnis normal;
  - ii. kondisi kegagalan usaha; dan
  - iii. kondisi gagal bayar atau bangkrut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

**Derecognition (continued)**

The customers give the right to the Company to sell the motor vehicles or take any other actions to settle the outstanding consumer financing receivables in the events of default. Customers are entitled to the positive difference between the proceeds from sale of the motor vehicles and the outstanding consumer financing receivables. If difference is negative, the resulting loss is charged to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

Motor vehicle collaterals owned by customers for settlement of their consumer financing receivables are presented at the lower of carrying value of the related consumer financing receivables or the net realizable value of motor vehicle collaterals. The difference between the carrying value and the net realizable value of receivables is recorded as allowance for impairment losses and charged to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

**Offsetting**

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously. This means that the right to set off:

- a. must not be contingent on a future event, and
- b. must be legally enforceable in all of the following circumstances:
  - i. the normal course of business
  - ii. the event of default
  - iii. the event of insolvency or bankruptcy.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**Klasifikasi instrumen keuangan**

Perseroan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

**Classification of financial instruments**

The Company classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristics of those financial instruments. The classifications are shown in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No.55 (Revisi 2014)/ Category as defined by SFAS No.55 (Revised 2014)		Golongan (ditentukan oleh Perseroan)/ Class (as determined by the Company)	Subgolongan/ Subclasses
Aset keuangan/ Financial assets	Pinjaman yang diberikan dan piutang/Loans receivables	Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents - Kas/Cash on hand - Kas pada bank/Cash in banks - Deposito berjangka/Time deposit	
		Piutang pembiayaan konsumen/Consumer financing receivables Piutang sewa pembiayaan/Finance lease receivables Anjak piutang/Factoring receivables	
		Piutang lain-lain/Other receivables	
		Aset lain-lain/Other assets - Piutang karyawan/Employee receivables - Piutang bunga/Interest receivables - Setoran dalam perjalanan/Deposit in transit - Uang jaminan/Security deposit	
	Derivatif lindung nilai/ Hedging derivatives	Lindung nilai atas nilai arus kas/Hedging instruments in cash flow hedges - Piutang derivatif/Derivative receivables	
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/Financial liabilities at amortized cost	Utang usaha/Trade payables - Utang kendaraan/Vehicle payables - Utang asuransi/Insurance payables	
		Utang lain-lain/Other payables - Kantor pendaftaran fidusia/Fiduciary register office - Premi asuransi/Insurance premium - Pembiayaan bersama/Joint financing Lain-lain/Others	
		Beban bunga yang masih harus dibayar/Accrued interest expenses	
		Pinjaman bank/Bank loans	
	Derivatif lindung nilai/Hedging derivatives	Surat berharga yang diterbitkan/Securities issued Lindung nilai atas nilai arus kas/Hedging instruments in cash flow hedges - Utang Derivatif/ Derivative payables	



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
**(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**d. Penentuan nilai wajar**

**d. Determination of fair value**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar berdasarkan asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di:

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:*

- pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- jika terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

- *in the principal market for the asset or liability, or*
- *in the absence of the principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

Perseroan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut.

*The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company.*

Nilai wajar aset dan liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

*The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.*

Perseroan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

*The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.*

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan level input yang terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

*All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:*

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Level 2 - teknik penilaian di mana tingkat level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 - teknik penilaian di mana tingkat level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung.

- *Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.*
- *Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly unobservable.*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**d. Penentuan nilai wajar (lanjutan)**

Untuk aset dan liabilitas yang diukur secara berulang dalam laporan keuangan, Perseroan menentukan apakah perpindahan antar level hirarki telah terjadi dengan melakukan evaluasi pengelompokan (berdasarkan level input yang terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara menyeluruh) pada setiap akhir periode pelaporan.

**e. Penjabaran mata uang asing**

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018
<u>Mata uang</u>	
Dolar Amerika Serikat (AS\$)	14.481,00
Yen Jepang (JPY ¥)	131,12

**f. Kas dan setara kas**

Kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, yang tidak dibatasi penggunaannya, tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dan dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang sangat signifikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**d. Determination of fair value (continued)**

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in hierarchy by reassessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

**e. Foreign currency translation**

Transactions denominated in a foreign currency are translated into Rupiah at the exchange rate prevailing at the date of the transaction. At the date of statement of financial position, monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated at the exchange rates prevailing at that date.

Exchange gains and losses arising on transactions in foreign currency and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The exchange rates used to translate the monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as of 31 December 2018 and 2017 are as follows:

	2017	<u>Currency</u>
	13.548,00	United State Dollar (US\$)
	-	Japanese Yen (JPY ¥)

**f. Cash and cash equivalents**

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with original maturity of three months or less, which are not restricted and are not pledged as collateral for any borrowing and that are readily convertible to known amounts of cash which are subject to insignificant risk of changes in value.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
**(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**g. Piutang pembiayaan konsumen**

**g. Consumer financing receivables**

Piutang pembiayaan konsumen diakui pada awalnya dengan nilai wajar ditambah biaya-biaya transaksi dan dikurangi *yield enhancing income* yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat bunga efektif. Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

*Consumer financing receivables are recognized initially at fair value, added with directly attributable transactions costs and deducted by yield enhancing income, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Consumer financing receivables are classified as loans and receivables. Refer to Note 2c for the accounting policy for loans and receivables.*

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan pada tanggal terjadinya transaksi.

*Early termination is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting gain or loss is credited or charged to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income at the transaction date.*

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dan jumlah pokok pembiayaan yang akan diakui sebagai penghasilan sesuai dengan jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode tingkat suku bunga efektif.

*Unearned consumer financing income is the difference between total installments to be received from customers and the total financing which is recognized as income over the term of the contract using the effective interest rate.*

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara pengalihan kredit, melanjutkan kredit, mengangsur kembali, merubah jatuh tempo, merubah tenor dan/atau menambah *down payment*.

*Credit restructuring can be done by over contract, asset replacement, repay back, change in due date, change in tenor and/or increase in down payment.*

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit hanya diakui bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi di laporan keuangan.

*Losses on loan restructuring in respect of modification of the terms of the loans are recognized only if the cash value of total future cash receipt specified in the new terms of the loans, including both receipt designated as interest, and those designated as loan principal, are less than the recorded amounts of loans before restructuring in financial statements.*

**Pembiayaan bersama**

**Joint financing**

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan piutang pembiayaan bersama, pendapatan pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

*Consumer financing receivables are stated at net of joint financing receivables, unearned consumer financing income and allowance for impairment losses.*



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**g. Piutang pembiayaan konsumen (lanjutan)**

**Pembiayaan bersama (lanjutan)**

Piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak-pihak lain dimana masing-masing pihak mendapatkan imbalan (*rewards*) dan menanggung risiko kredit sesuai dengan porsi yang disajikan di laporan posisi keuangan secara bersih. Pendapatan administrasi atas pengelolaan pembiayaan bersama disajikan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**h. Piutang sewa pembiayaan**

Piutang sewa pembiayaan merupakan jumlah piutang sewa pembiayaan ditambah nilai sisa yang akan diterima pada akhir masa sewa pembiayaan dikurangi dengan pendapatan sewa pembiayaan tangguhan, simpanan jaminan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara nilai piutang usaha bruto dan nilai tunai piutang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan tangguhan. Pendapatan sewa pembiayaan tangguhan dialokasikan sebagai pendapatan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian konstan atas investasi bersih dengan menggunakan suku bunga efektif.

Penyewa pembiayaan memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa-pembiayakannya pada akhir masa sewa pembiayaan dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa pembiayaan.

Penyelesaian kontrak sebelum masa sewa pembiayaan berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak sewa dan laba atau rugi yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Piutang sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**g. Consumer financing receivables  
(continued)**

**Joint financing (continued)**

Joint financing receivables where the Company and joint financing providers bear credit risk in accordance with their portion are presented on a net basis in the statement of financial position. Administration income for managing joint financing are presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**h. Finance lease receivables**

Finance lease receivables represent lease receivables plus the residual value at the end of the lease period and stated at net of unearned lease income, security deposits and allowances for impairment losses. The difference between the gross lease receivable and the present value of the lease receivable is recognized as unearned lease income. Unearned lease income is allocated to current year statement of profit or loss and other comprehensive income based on a constant rate of return on the net investment using effective interest rates.

The lessee has the option to purchase the leased asset at the end of the lease period at a price mutually agreed upon at the commencement of the agreement.

Early termination is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting gain or loss is credited or charged to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

Finance lease receivables are classified as loans and receivables. Refer to Note 2c for the accounting policy of loans and receivables.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**i. Tagihan anjak piutang**

Tagihan anjak piutang dicatat berdasarkan jumlah yang dibayar oleh Perseroan yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai piutang. Perbedaan antara jumlah yang dibayar dan jumlah neto piutang dialihkan merupakan pendapatan belum diakui dan diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu perjanjian dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif (Catatan 2c).

**j. Cadangan kerugian penurunan nilai**

Perseroan melakukan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dengan menggunakan metode "incurred losses". Lihat Catatan 2c.

**k. Beban dibayar di muka**

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**l. Aset tetap dan penyusutan**

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan ("HGB") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi.

Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGB diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomi tanah.

Hak atas tanah tidak diamortisasi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**i. Factoring receivables**

Factoring receivables are recorded at the amount paid by the Company which are calculated based on certain percentages of the receivable value. The difference in value between the amounts paid by the Company and the net factoring receivable is recognized as unearned income and realized over the period of the contract using the effective interest method (Note 2c).

**j. Allowance for impairment losses**

The Company calculates the allowance for impairment losses using the "incurred losses" methodology. Refer to Note 2c.

**k. Prepaid expenses**

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

**l. Fixed assets and depreciation**

Fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation.

Acquisition cost covers all expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

The legal cost of land rights in the form of Building Usage Right (Hak Guna Bangunan or "HGB") when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land under the "Fixed Assets" account and not amortized.

Meanwhile, the extension or the legal renewal costs of land rights in the form of HGB is recognized as intangible asset and amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

Land rights is not amortized.

Construction in progress is stated at cost and transferred to the respective fixed asset account when completed and ready to use.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**1. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)**

**1. Fixed assets and depreciation (continued)**

Penyusutan aset tetap selain tanah dan bangunan dalam pengerjaan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

Depreciation on fixed assets other than land and construction in progress are calculated using the straight-line method over their estimated useful lives as follows:

Golongan	Masa manfaat (tahun)/ Useful life (years)	Persentase/ Percentage	Classification
Bangunan	20	5,00%	Buildings
Perabotan dan peralatan kantor	5	20,00%	Furniture and office equipment
Kendaraan	5	20,00%	Vehicles
Renovasi bangunan sewa	3 - 5	20,00% - 33,33%	Leasehold improvement

Aset tetap kecuali tanah dan bangunan dalam pengerjaan disusutkan sampai dengan nilai sisanya.

Fixed assets except land and construction in progress are depreciated to their residual value.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana seharusnya, hanya apabila kemungkinan besar Perseroan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai yang terkait dengan penggantian komponen tidak diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. Amounts in respect of replaced parts are derecognized. All other repairs and maintenance are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income during the period in which they are incurred.

Nilai residu dan umur manfaat aset ditelaah dan disesuaikan, setiap tanggal laporan posisi keuangan jika diperlukan.

The assets' residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at each date of statement of financial position.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements and the resulting gain or loss on the disposal of fixed assets is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi yang dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

An assessment is made at each reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
**(lanjutan)**

**l. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)**

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur masa manfaatnya.

**m. Perpajakan**

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan", pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Perusahaan memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan pendapatan bunga sebagai pos tersendiri.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Penghasilan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Penghasilan".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**l. Fixed assets and depreciation (continued)**

A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

Reversal of an impairment loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

**m. Taxation**

Final Tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction are recognizing losses.

Referring to PSAK No. 46, "Income Tax", final tax is no longer governed by PSAK No. 46. Therefore, the Company has decided to present all of the final tax arising from interest income as separate line item.

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Income Tax Expense" in the statement of profit or loss and other comprehensive income. The Company also presented interest/penalty, if any, as part of "Income Tax Expense".

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**m. Perpajakan (lanjutan)**

**m. Taxation (continued)**

Pajak Tangguhan

Deferred Tax

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

*Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode posisi keuangan atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

*Deferred tax assets and liabilities are recognized using the financial position method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.*

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

*The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Company reassesses unrecognized deferred tax assets. The Company recognizes a previously unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.*

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

*Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current year operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

*Deferred tax assets and liabilities are offset in the statement of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.*



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
**(lanjutan)**

**n. Imbalan kerja**

**Imbalan kerja jangka pendek**

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

**Imbalan pasca-kerja**

Imbalan pasca-kerja, seperti pensiun, uang pisah, uang penghargaan, dan imbalan lainnya, ditentukan sesuai dengan Peraturan Perseroan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU 13/2003").

Karena UU 13/2003 menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU 13/2003 adalah program imbalan pasti. Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Liabilitas program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan, serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat obligasi pemerintah jangka panjang dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**n. Employee benefits**

**Short-term employee benefits**

Short-term employee benefits are recognized when it is payable to the employees based on accrual method.

**Post-employment benefits**

Post-employment employee benefits, such as pensions, severance pay, service pay, and other benefits are provided in accordance with the Company's Regulations and Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

Since Law 13/2003 sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under this Law 13/2003 represent defined benefit plans. A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service or compensation.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the date of statement of financial position, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and past service cost. The present value of defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using yields on Indonesian Government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

All past service costs are recognized at the earlier of when the amendment/curtailment occurs and when the related restructuring or termination costs are recognized. As a result, unvested past service costs can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**n. Imbalan kerja (lanjutan)**

**n. Employee benefits (continued)**

**Imbalan pasca-kerja (lanjutan)**

**Post-employment benefits (continued)**

Bunga neto atas imbalan pasti neto merupakan komponen pendapatan bunga dari aset program, biaya bunga atas liabilitas imbalan pasti dan bunga atas dampak batas atas dari aset.

*Net interest on the net defined benefit liabilities is the interest income component of plan assets, interest expense of defined benefit obligation and interest on the effect of asset ceiling.*

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto terdiri atas:

*Remeasurements of the net defined benefit obligation consists of:*

- keuntungan dan kerugian aktuarial
- imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto
- setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto.

- Actuarial gains and losses
- Return on plan assets, excluding amount included in net interest on the net defined benefit obligation
- Any change in effect of the asset ceiling, excluding amount included in net interest on the net defined benefit obligation.

**Pesangon pemutusan hubungan kerja**

**Termination benefits**

Pesangon pemutusan hubungan kerja terutang ketika karyawan dihentikan kontrak kerjanya sebelum usia pensiun normal. Perseroan mengakui pesangon pemutusan hubungan kerja ketika Perseroan menunjukkan komitmennya untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terperinci yang kecil kemungkinannya untuk dibatalkan. Pesangon yang akan dibayarkan dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan didiskontokan untuk mencerminkan nilai kini.

*Termination benefits are payable whenever an employee's employment is terminated before the normal retirement date. The Company recognizes termination benefits when it is demonstrably committed to terminate the employment of current employees according to a detailed formal plan and the possibility to withdraw the plan is low. Benefits falling due more than 12 months after statement of financial position's date are discounted to reflect its present value.*

**o. Saham**

**o. Share capital**

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas.

*Ordinary shares are classified as equity.*

**p. Dividen**

**p. Dividends**

Pembagian dividen final diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada tanggal dividen tersebut disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

*Final dividend distributions are recognized as a liability in the financial statements at the date when the dividends are approved in the Company's General Meeting of Shareholders.*

**q. Laba per saham**

**q. Earnings per share**

Labanya per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

*Earnings per share is calculated by dividing income for the year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.*



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
**(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**r. Surat berharga yang diterbitkan**

Surat berharga yang diterbitkan meliputi *Medium-Term Notes* dan utang obligasi. Surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan surat berharga dikurangkan dari jumlah surat berharga yang diterbitkan dan diamortisasi selama jangka waktu surat berharga yang diterbitkan tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

**r. Securities issued**

*Securities issued consist of Medium-Term Notes and bonds payable. Securities issued are classified as financial liabilities at amortized cost. Incremental costs directly attributable to the issuance of securities are deducted from the amount of securities issued and amortized over the period of the securities issued using the effective interest rate method. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial liabilities at amortized cost.*

**s. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi**

Perseroan mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang dipakai adalah sebagai berikut:

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perseroan jika:

- a. orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - (iii) merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - (i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
  - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

**s. Transactions with related parties**

The Company has transactions with related parties. The definition of related parties used is as follows:

The Company considers the following as its related parties:

- a. a person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
  - (i) has control or joint control of the reporting entity;
  - (ii) has significant influence over the reporting entity; or
  - (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. an entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
  - (i) the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
  - (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
  - (iii) both entities are joint ventures of the same third party.
  - (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**s. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi  
(lanjutan)**

- b. suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)
- (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
  - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
  - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

**t. Instrumen keuangan derivatif**

Instrumen derivatif diakui pertama-tama pada nilai wajar pada saat kontrak tersebut dilakukan, dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya. Derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Metode pengakuan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar tergantung pada apakah derivatif tersebut adalah instrumen lindung nilai, dan sifat dari unsur yang dilindungi nilainya.

Perseroan menggunakan instrumen keuangan derivatif, pertukaran (swap) mata uang asing dan tingkat suku bunga, sebagai bagian dari aktivitas manajemen untuk melindungi dampak risiko mata uang asing dan tingkat suku bunga atas pinjaman Perusahaan. Perusahaan menerapkan akuntansi lindung nilai arus kas pada saat transaksi tersebut memenuhi kriteria perlakuan akuntansi lindung nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**s. Transactions with related parties  
(continued)**

- b. an entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: (continued)
- (v) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
  - (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
  - (vii) a person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

All transactions with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

**t. Derivative financial instruments**

Derivative instruments are initially recognized at fair value on the date the contracts are entered into and are subsequently re-measured at their fair values. Derivatives are carried as assets when the fair value is positive and as liabilities when the fair value is negative.

The method of recognizing the fair value gain or loss depends on whether the derivative is designated as a hedging instrument and, if so, the nature of the item being hedged.

The Company uses derivative instruments, cross currency and interest rate swap as part of its management activities to manage exposures to foreign currency and interest rate on the Company's bank loan. The Company applies cash flow hedge accounting when transactions meet the specified criteria for hedge accounting treatment.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
**(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**t. Instrumen keuangan derivatif (lanjutan)**

**t. Derivative financial instruments**  
**(continued)**

Pada saat terjadinya transaksi, Perseroan membuat dokumentasi mengenai hubungan antara instrumen lindung nilai dan unsur yang dilindungi nilainya, juga tujuan manajemen risiko dan strategi yang diterapkan dalam melakukan transaksi lindung nilai. Proses dokumentasi ini menghubungkan derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai dengan aset dan liabilitas tertentu atau dengan komitmen penuh tertentu atau transaksi yang diperkirakan.

*The Company documents, at the inception of the transaction, the relationship between hedging instruments and hedged items, as well as its risk management objective and strategy for undertaking hedge transactions. This process includes linking all derivatives designated as hedges to specific assets and liabilities or to specific firm commitments or forecast transactions.*

Pada saat terjadinya transaksi lindung nilai dan pada periode berikutnya, Perseroan juga membuat dokumentasi atas penilaian apakah derivatif yang digunakan sebagai transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam menandingi (offsetting) perubahan nilai wajar atau arus kas dari unsur yang dilindungi nilainya.

*The Company also documents its assessment, both at the hedge inception and on an ongoing basis, as to whether the derivatives that are used in hedging transactions are highly effective in offsetting changes in fair values or cash flows of hedged items.*

Lindung nilai dinyatakan efektif oleh Perseroan hanya jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

*The Company assesses a hedge as highly effective only if the following criteria are met:*

- i) pada saat terjadinya dan sepanjang umur transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam menandingi (offsetting) perubahan nilai wajar atau arus kas yang melekat pada risiko - risiko yang dilindungi nilainya dan
- ii) tingkat efektivitas lindung nilai berkisar antara 80% sampai dengan 125%. Perusahaan menghentikan penerapan akuntansi lindung nilai ketika derivatif tersebut tidak atau tidak lagi efektif; ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dibayar, pada saat unsur yang dilindungi tersebut jatuh tempo, dijual atau dibayar kembali; atau ketika transaksi yang diperkirakan akan terjadi tidak lagi diperkirakan akan terjadi.

- i) *At inception of the hedge and throughout its life, the hedge is expected to be highly effective in achieving offsetting changes in fair value or cash flows attributable to the hedged risks, and*
- ii) *Actual results of the hedge are within a range of 80% to 125%. The Company discontinues hedge accounting when it determines that a derivative is not, or has ceased to be, highly effective as a hedge; when the derivative expires or is sold, terminated or exercised; when the hedged item matures, is sold or repaid; or when a forecast transaction is no longer deemed highly probable.*

Bagian yang efektif atas perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas, diakui sebagai "penghasilan komprehensif lain" pada bagian ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas bagian yang tidak efektif diakui langsung sebagai laba atau rugi. Jumlah akumulasi keuntungan atau kerugian dalam ekuitas dibebankan sebagai laba atau rugi komprehensif ketika unsur yang dilindungi nilainya mempengaruhi laba neto.

*The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated and qualified as cash flow hedges are recognized in "other comprehensive income" and reported to equity. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in profit or loss. Amounts accumulated in equity are recycled to profit or loss in the periods in which the hedged item will affect net profit.*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**t. Instrumen keuangan derivatif (lanjutan)**

Ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan, dilaksanakan, atau tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang ditangguhkan di ekuitas tetap diakui pada "penghasilan komprehensif lain" dan direklasifikasi ke laba rugi ketika item yang dilindungi nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**u. Pengakuan pendapatan dan beban**

Pendapatan dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, komisi asuransi dan biaya jasa perantara asuransi serta beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan *interest bearing* diakui sesuai dengan jangka waktu kontrak berdasarkan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup biaya transaksi dan pendapatan administrasi.

Pendapatan bunga bank dan denda keterlambatan pembayaran diakui pada saat terjadinya. Pendapatan bunga bank disajikan secara bruto pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya, menggunakan dasar akrual.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**t. Derivative financial instruments  
(continued)**

*When the hedging instrument expires or sold, terminated, exercised or no longer qualifies for hedge accounting, the cumulative amount deferred in equity remains in the "other comprehensive income" and is subsequently transferred to profit or loss when the hedged item is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

**u. Income and expense recognition**

*Income from consumer financing and finance lease, insurance commission and insurance brokerage fee and expense for all interest bearing financial instruments are recognized over the term of the respective contracts using the effective interest rate method.*

*The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.*

*When calculating the effective interest rate, the Company estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instruments but does not consider future credit losses. These calculations include transaction costs and administration income.*

*Interest income and late payment penalties are recognized upon receipt. Interest income is presented on a gross basis in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

*Income and expense are recognized as incurred on an accrual basis.*



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
**(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**v. Segmen Operasi**

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas, dimana:

- i. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- ii. hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan,
- iii. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Perseroan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang disiapkan secara internal untuk pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional Perseroan adalah Direksi.

Segmen operasi Perseroan disajikan berdasarkan segmen usaha yang terdiri dari *fleet* dan *retail* (lihat Catatan 30).

**w. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan**

Perseroan telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tanggal 1 Januari 2018 yang dianggap relevan:

- Amandemen PSAK No. 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan, berlaku efektif 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.

**v. Operating Segment**

An operating segment is a component of an entity which:

- i. involves with business activities to generate income and expenses (including income and expenses relating to the transactions with other components with the same entity);
- ii. operation result is observed regularly by chief decision maker to make decisions regarding the allocation of resources and to evaluate the works; and,
- iii. separate financial information is available.

The Company presents operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker. The Company's chief operating decision makers are the Directors.

The Company discloses the operating segment and presented based on business segment which consists of *fleet* and *retail* (refer to Note 30).

**w. Changes in accounting policies and disclosures**

The Company adopted the following accounting standards, which are considered relevant, starting on 1 January 2018:

- Amendments to SFAS 2: Statement of Cash Flows on the Disclosures Initiative, effective 1 January 2018, with earlier application is permitted.

These amendments require entities to provide disclosures that enable the financial statements users to evaluate the changes in liabilities arising from financing activities, including changes from cash flow and non-cash.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**w. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)**

Perseroan telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tanggal 1 Januari 2018 yang dianggap relevan: (lanjutan)

- Amandemen PSAK No. 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi, berlaku efektif 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.

Perseroan telah menganalisa penerapan standar akuntansi di atas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan Perseroan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**w. Changes in accounting policies and disclosures (continued)**

The Company adopted the following accounting standards, which are considered relevant, starting on 1 January 2018: (continued)

- Amendments to SFAS No. 46: Income Taxes on the Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses, effective 1 January 2018, with earlier application is permitted.

These amendments clarify that to determine whether the taxable income will be available so that the deductible temporary differences can be utilized; estimates of the most likely future taxable income can include recovery of certain assets of the entity exceeds its carrying amount.

The Company has assessed that the adoption of the above mentioned accounting standards do not have significant impact to the financial statements.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI  
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Pertimbangan**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perseroan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan seperti diungkapkan pada Catatan 2c.

Sewa

Perseroan mempunyai perjanjian-perjanjian sewa dimana perseroan bertindak sebagai *lessee* untuk sewa tempat. Perseroan mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat yang signifikan dari aset sewa yang diahlikan, yang mensyaratkan Perseroan untuk membuat pertimbangan dengan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset.

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan Perseroan atas perjanjian sewa tempat yang ada saat ini, maka transaksi sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

**Estimasi dan Asumsi**

**a. Cadangan kerugian penurunan nilai**

Perseroan melakukan reviu atas piutang yang diberikan pada setiap tanggal laporan untuk melakukan penilaian atas cadangan penurunan nilai yang telah dicatat. Justifikasi manajemen diperlukan dalam menentukan tingkat cadangan yang dibutuhkan.

Perseroan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai kolektif atas eksposur piutang, dimana evaluasi dilakukan berdasarkan data kerugian historis (lihat Catatan 2c).

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,  
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

**Judgments**

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Classification of financial assets and financial liabilities

The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2c.

Leases

The Company has several leases whereby the Company act as *lessee* in respect of rental location. The Company evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased assets are transferred which requires the Company to make judgment and estimates of the transfer of risks and rewards related to the ownership of assets.

Based on the review performed by the Company for the current rental agreement of rental location accordingly, the rent transactions were classified as operating lease.

**Estimates and Assumptions**

**a. Allowance for impairment losses**

The Company reviews its receivables at reporting date to evaluate the allowance for impairment losses. Management's judgment is applied in the estimation when determining the level of allowance required.

The Company estimates the collective impairment allowance for its receivables portfolio based on historical loss experience (refer to Note 2c).



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI  
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

**b. Imbalan pasca kerja**

Imbalan pasca kerja ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial. Perhitungan aktuarial menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja (lihat Catatan 2n).

**c. Penyusutan dan estimasi umur manfaat aset tetap**

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap seperti diungkapkan pada Catatan 2l. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

**d. Pajak penghasilan**

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

**e. Pajak tangguhan**

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan.

Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan (Catatan 2m).

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,  
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

**Estimates and Assumptions (continued)**

**b. Post-employment benefits**

Post-employment benefits are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rate, expected rate of return, on investments, future salary increases, mortality rate, resignation rate and others. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post-employment benefits obligations (refer to Note 2n).

**c. Depreciation and estimated useful lives of fixed assets**

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets as disclosed in Note 2l. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

**d. Income tax**

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transaction and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

**e. Deferred tax assets**

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference.

Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic planning (Note 2m).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**4. KAS DAN SETARA KAS**

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>	
<b>Kas</b>	12.863	20.198	<b>Cash on hand</b>
<b>Kas pada bank</b>			<b>Cash in banks</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta (dahulu Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Cabang Jakarta)	55.803	5	MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch (formerly Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch)
PT Bank UOB Indonesia	47.847	5	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	1.454	8.280	PT Bank Central Asia Tbk
PT BPR Karyajatnika Sadaya	595	391	PT BPR Karyajatnika Sadaya
PT Bank Mega Tbk	54	54	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Panin Tbk	25	47	PT Bank Panin Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	18	30	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	17	17	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	16	20	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank DKI	16	17	PT Bank DKI
PT Maybank Indonesia Tbk	16	5	PT Maybank Indonesia Tbk
PT Bank KEB Hana Indonesia	14	24	PT Bank KEB Hana Indonesia
Bank of China Limited Cabang Jakarta	14	23	Bank of China Limited Jakarta Branch
PT Bank CTBC Indonesia	14	14	PT Bank CTBC Indonesia
PT Bank HSBC Indonesia	14	11	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	4	-	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank Mizuho Indonesia	2	-	PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank Bukopin Tbk	-	1	PT Bank Bukopin Tbk
	<u>105.923</u>	<u>8.944</u>	
<b>Pihak berelasi</b>			<b>Related parties</b>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	85.763	79.640	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	384	1.734	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen	7	7	PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	27	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	<u>86.154</u>	<u>81.408</u>	
<b>Deposito berjangka</b>			<b>Time deposits</b>
<b>Pihak Berelasi</b>			<b>Related Parties</b>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Mandiri Taspen	50.000	50.000	PT Bank Mandiri Taspen
	<u>254.940</u>	<u>160.550</u>	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)**

Tingkat suku bunga deposito berjangka dan giro dalam mata uang Rupiah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, berkisar sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2018	2017
Deposito	6,75%	7,25%
Giro	0% - 2,75%	0,00% - 1,90%

Penempatan deposito pada PT Bank Mandiri Taspen (dahulu PT Bank Mandiri Taspen Pos) sebesar Rp50.000 adalah penempatan atas dana hasil usaha yang berasal dari laba neto Perseroan seperti yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang No. 40 pasal 70 tentang "Perseroan Terbatas" yaitu kewajiban perusahaan untuk melakukan pencadangan hingga mencapai paling sedikit 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Lihat Catatan 26a untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

**4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)**

The interest rates for time deposits and current accounts for the year ended 31 December 2018 and 2017, are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2018	2017
Time deposits	6,75%	7,25%
Current accounts	0% - 2,75%	0,00% - 1,90%

Placement of time deposit at PT Bank Mandiri Taspen (formerly PT Bank Mandiri Taspen Pos) amounting to Rp50,000 represents the placement of the funds derived from the Company's net income as required by Law No. 40 article 70 concerning "Limited Liability Companies" whereby the Company shall make a reserve up to a least 20% of the issued and fully paid up capital.

Refer to Note 26a for details of balances and transaction with related parties.

**5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN**

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Piutang pembiayaan konsumen - bruto	46.569.692	41.546.201
Dikurangi:		
Piutang pembiayaan yang dibiayai bersama pihak-pihak lain - bruto:		
<u>Rupiah</u>		
Pihak berelasi	(30.185.424)	(26.751.546)
Piutang pembiayaan konsumen - bruto: Pembiayaan sendiri	16.384.268	14.794.655
Dikurangi:		
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui		
<u>Rupiah</u>		
Pihak Ketiga	(7.559.236)	(7.061.514)
Dikurangi:		
Pendapatan yang belum diakui dari pembiayaan yang dibiayai bersama pihak-pihak lain - bruto:		
<u>Rupiah</u>		
Pihak berelasi	4.108.332	3.719.370
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui: Pembiayaan sendiri	(3.450.904)	(3.342.144)
Piutang pembiayaan konsumen	12.933.364	11.452.511
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(303.884)	(271.205)
<b>Neto</b>	<b>12.629.480</b>	<b>11.181.306</b>

**5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES**

Consumer financing receivables - gross	46.569.692	41.546.201
Less:		
Joint financing - gross:		
<u>Rupiah</u>		
Related parties	(30.185.424)	(26.751.546)
Consumer financing receivables - gross: Direct financing	16.384.268	14.794.655
Less:		
Unearned income on consumer financing		
<u>Rupiah</u>		
Third parties	(7.559.236)	(7.061.514)
Less:		
Unearned joint financing - gross:		
<u>Rupiah</u>		
Related parties	4.108.332	3.719.370
Unearned income on consumer financing: Direct financing	(3.450.904)	(3.342.144)
Consumer Finance Receivables	12.933.364	11.452.511
Less:		
Allowance for impairment losses	(303.884)	(271.205)
<b>Net</b>	<b>12.629.480</b>	<b>11.181.306</b>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)**

Seluruh kontrak pembiayaan yang disalurkan Perseroan adalah untuk kendaraan bermotor, multiguna, investasi, dan modal kerja.

Jangka waktu kontrak pembiayaan yang disalurkan oleh Perseroan atas kendaraan bermotor berkisar antara 12 - 84 bulan.

Angsuran dari saldo piutang pembiayaan konsumen - bruto per 31 Desember 2018 dan 2017 yang akan diterima dari konsumen berdasarkan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember/ December 2018</b>	<b>31 Desember/ December 2017</b>	
<u>Tahun</u>			
2018	-	16.755.018	2018
2019	19.007.202	12.317.949	2019
2020	13.855.149	7.660.716	2020
2021	8.552.024	3.653.352	2021
2022	4.011.982	1.099.565	2022
2023 dan sesudahnya	1.143.335	59.601	2023 and onward
	<b>46.569.692</b>	<b>41.546.201</b>	

**5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)**

All consumer financing contracts provided by Company are for motor vehicles, multipurpose, investment, and working capital.

The period of consumer financing contracts for motor vehicles ranged between 12 - 84 months.

Installments of consumer financing receivables - gross balance as of 31 December 2018 and 2017 which will be received from customers based on the maturity dates, are as follows:

Rata-rata suku bunga efektif yang dikenakan kepada konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut:

Average effective interest rates charged to customers for the years ended 31 December 2018 and 2017, are as follows:

	<b>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December</b>		
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
Mobil	12,64%	12,97%	Car
Sepeda Motor	14,03%	13,39%	Motorcycle
Investasi	13,50%	13,50%	Investment
Multiguna	17,86%	17,63%	Multipurpose
Modal Kerja	9,34%	10,36%	Working Capital

Analisa umur piutang pembiayaan konsumen - bruto adalah sebagai berikut:

The aging analysis of consumer financing receivables - gross, are as follows:

	<b>31 Desember/ December 2018</b>	<b>31 Desember/ December 2017</b>	
Belum jatuh tempo	43.978.864	39.403.525	Current
Lewat jatuh tempo:			Overdue:
1 - 90 hari	2.191.715	1.799.950	1 - 90 days
91 - 120 hari	180.103	139.881	91 - 120 days
121 - 180 hari	200.498	177.069	121 - 180 days
> 180 hari	18.512	25.776	> 180 days
	<b>46.569.692</b>	<b>41.546.201</b>	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)**

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember/ December 2018</b>	<b>31 Desember/ December 2017</b>
Saldo awal	271.205	298.650
Penyisihan untuk tahun berjalan	394.619	434.774
Penghapusan piutang ragu-ragu	(513.552)	(533.362)
Pemulihan kembali piutang yang telah dihapusbukukan	151.612	71.143
<b>Saldo akhir</b>	<b>303.884</b>	<b>271.205</b>

Seluruh piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dievaluasi secara kolektif terhadap penurunan nilai dan Perseroan telah mencadangkan sejumlah cadangan kerugian penurunan nilai.

Piutang pembiayaan konsumen yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 0,3574% dari saldo piutang pembiayaan konsumen - bruto (31 Desember 2017: 0,0425%).

Pada tanggal 31 Desember 2018, piutang pembiayaan konsumen yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank yang diterima oleh Perseroan dan utang obligasi seperti yang masing-masing dijelaskan pada Catatan 15 dan 17 adalah sejumlah Rp8.109.979 (31 Desember 2017: Rp6.674.756).

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen.

**5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES  
(continued)**

The movements in the allowance for impairment losses for years ended 31 December 2018 and 2017, are as follows:

	<b>31 Desember/ December 2018</b>	<b>31 Desember/ December 2017</b>
Saldo awal	298.650	298.650
Penyisihan untuk tahun berjalan	394.619	434.774
Penghapusan piutang ragu-ragu	(513.552)	(533.362)
Pemulihan kembali piutang yang telah dihapusbukukan	151.612	71.143
<b>Saldo akhir</b>	<b>303.884</b>	<b>271.205</b>

All consumer financing receivables as of 31 December 2018 and 2017 are collectively evaluated for impairment and the Company has provided some allowance for impairment losses.

The percentage of restructured consumer financing receivables as of 31 December 2018 is 0.3574% of the consumer financing receivables balance - gross (31 December 2017: 0.0425%).

As of 31 December 2018, total consumer financing receivables pledged as collateral for bank loans and bonds payable as disclosed respectively in Notes 15 and 17 amounted to Rp8,109,979 (31 December 2017: Rp6,674,756).

Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient to cover any possible losses from uncollectible consumer financing receivables.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN**

**6. FINANCE LEASE RECEIVABLES**

	<b>31 Desember/ December 2018</b>	<b>31 Desember/ December 2017</b>	
Piutang sewa pembiayaan			<i>Finance lease receivables</i>
Piutang sewa pembiayaan - bruto	5.160.930	2.756.597	<i>Finance lease receivables - gross</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Piutang sewa pembiayaan yang dibiayai bersama pihak-pihak lain - bruto:			<i>Joint financing - gross :</i>
<u>Rupiah</u>			<u><i>Rupiah</i></u>
Pihak berelasi	(1.243.484)	-	<i>Related parties</i>
Nilai sisa yang terjamin	1.631.185	796.442	<i>Guaranteed residual value</i>
Piutang sewa pembiayaan - bruto: Pembiayaan sendiri	5.548.631	3.553.039	<i>Finance lease receivables – gross: Direct financing</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui:			<i>Unearned income on finance lease receivables:</i>
<u>Rupiah</u>			<u><i>Rupiah</i></u>
Pihak ketiga	(692.570)	(391.968)	<i>Third parties</i>
Simpanan jaminan	(1.631.185)	(796.442)	<i>Security deposit</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Pendapatan yang belum diakui dari pembiayaan yang dibiayai bersama pihak-pihak lain - bruto:			<i>Unearned joint financing – gross:</i>
<u>Rupiah</u>			<u><i>Rupiah</i></u>
Pihak berelasi	103.513	-	<i>Related parties</i>
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui: Pembiayaan sendiri	(2.220.242)	(1.188.410)	<i>Unearned lease income financing: Direct financing</i>
Piutang sewa pembiayaan	3.328.389	2.364.629	<i>Finance lease receivables</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9.286)	(7.739)	<i>Allowance for impairments losses</i>
<b>Neto</b>	<b>3.319.103</b>	<b>2.356.890</b>	<b>Net</b>

Jangka waktu kontrak pembiayaan yang disalurkan oleh Perseroan atas kendaraan bermotor dan alat berat berkisar antara 12 - 60 bulan.

*The period of consumer financing contracts for motor vehicles and heavy equipment ranged between 12 - 60 months.*

Piutang sewa pembiayaan - bruto sesuai dengan tanggal jatuh temponya sebagai berikut:

*Finance lease receivables - gross based on maturity date, are as follows:*

	<b>31 Desember/ December 2018</b>	<b>31 Desember/ December 2017</b>	
<u>Tahun</u>			<u><i>Year</i></u>
2018	-	1.224.643	<i>2018</i>
2019	2.473.702	949.452	<i>2019</i>
2020	1.824.280	510.070	<i>2020</i>
2021	727.172	65.315	<i>2021</i>
2022 dan seterusnya	135.776	7.117	<i>2022 and onward</i>
	<b>5.160.930</b>	<b>2.756.597</b>	



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)**

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	
Saldo awal	7.739	4.538	Beginning balance
Penyisihan untuk tahun berjalan	3.950	5.784	Provision for the year
Penghapusan piutang	(2.991)	(3.445)	Receivables written-off
Pemulihan kembali piutang yang telah dihapusbukukan	588	862	Recovery of written-off receivables
<b>Saldo akhir</b>	<b>9.286</b>	<b>7.739</b>	<b>Ending balance</b>

Seluruh piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dievaluasi secara kolektif terhadap penurunan nilai dan Perseroan telah mencadangkan sejumlah cadangan kerugian penurunan nilai.

Piutang sewa pembiayaan yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 0,1579% dari saldo piutang sewa pembiayaan - bruto (31 Desember 2017: 1,5039%).

Rata-rata suku bunga efektif yang dikenakan kepada konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2018	2017	
Mobil	12,40%	11,98%	Car
Alat berat	12,53%	12,10%	Heavy equipment
Mesin	11,25%	14,65%	Machine

Analisa umur piutang sewa pembiayaan - bruto adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	
Belum jatuh tempo	4.911.063	2.695.432	Current
Lewat jatuh tempo:			Overdue:
1 - 90 hari	221.462	45.730	1 - 90 days
91 - 120 hari	7.024	9.374	91 - 120 days
121 - 180 hari	11.476	5.227	121 - 180 days
> 180 hari	9.905	834	> 180 days
	<b>5.160.930</b>	<b>2.756.597</b>	

**6. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)**

The movements in the allowance for impairment losses for years ended 31 December 2018 and 2017, are as follows:

All finance lease receivables as of 31 December 2018 and 2017 are collectively evaluated for impairment and the Company has provided some allowance for impairment losses.

The percentage of restructured finance lease receivables as of 31 December 2018 is 0.1579% of the finance lease receivables balance - gross (31 December 2017: 1.5039%).

Average effective interest rates charged to customers for years ended 31 December 2018 and 2017, are as follows:

The aging analysis of finance lease receivables - gross, are as follows:



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)**

Pada saat transaksi sewa pembiayaan ditandatangani, penyewa pembiayaan memberikan uang jaminan yang akan diperhitungkan dengan nilai jual aset sewa pembiayaan pada saat transaksi berakhir bila penyewa pembiayaan menggunakan hak opsinya untuk membeli aset sewa pembiayaan tersebut. Jika penyewa tidak menggunakan hak opsinya, jaminan tersebut akan dikembalikan kepada penyewa pembiayaan.

Pada tanggal 31 Desember 2018, piutang sewa pembiayaan yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank yang diterima oleh Perseroan dan utang obligasi seperti yang dijelaskan masing-masing pada Catatan 15 dan 17 adalah sejumlah Rp535.356 (31 Desember 2017: Rp1.328.105).

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang sewa pembiayaan.

**7. ANJAK PIUTANG**

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>
Anjak piutang - bruto:	11.693	-
Dikurangi:		
Pendapatan anjak piutang yang belum diakui:		
<u>Rupiah</u>		
Pihak ketiga	(277)	-
Anjak piutang	11.416	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	(113)	-
<b>Neto</b>	<b>11.303</b>	<b>-</b>

Anjak piutang - bruto sesuai dengan tanggal jatuh temponya sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>
<u>Tahun</u> 2019	11.693	-

**6. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)**

Upon signing of lease contracts, the lessee is required to pay a security deposit which will be applied against the selling price of the leased asset at the end of the lease term if the lessee exercises his option to purchase the leased asset. Otherwise, the security deposit will be refunded to the lessee.

As of 31 December 2018, total finance lease receivables pledged as collateral for bank loans and bonds payable as disclosed respectively in Notes 15 and 17 amounted to Rp535,356 (31 December 2017: Rp1,328,105).

Management believes that the existing allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible finance lease receivables.

**7. FACTORING RECEIVABLES**

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>
Factoring receivables - gross:	-	-
Less:		
Unearned income on factoring receivables:		
<u>Rupiah</u>		
Third parties	-	-
Factoring receivables	-	-
Allowance for impairments losses	-	-
<b>Net</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Factoring receivables - gross based on maturity date, are as follows:

	<u>31 Desember/ December 2018</u>	<u>31 Desember/ December 2017</u>
<u>Year</u> 2019	-	-

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**7. ANJAK PIUTANG (lanjutan)**

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	
Saldo awal	-	-	Beginning balance
Penyisihan untuk tahun berjalan	113	-	Provision for the year
<b>Saldo akhir</b>	<b>113</b>	<b>-</b>	<b>Ending balance</b>

Rata-rata suku bunga efektif yang dikenakan kepada konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	
Anjak piutang	14,50%	-	Factoring receivables

Analisa umur anjak piutang - bruto adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	
Belum jatuh tempo	11.693	-	Current
	<b>11.693</b>	<b>-</b>	

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya anjak piutang.

Average effective interest rates charged to customers for the years ended 31 December 2018 and 2017, are as follows:

The aging analysis of factoring receivables - gross, are as follows:

Management believes that the existing allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible factoring receivables.

**8. PIUTANG LAIN-LAIN**

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
Piutang akseptasi klaim	48.550	51.515	Claim acceptance receivables
Piutang asuransi	30.114	21.709	Insurance receivables
Piutang penjualan kendaraan jaminan	2.182	8.288	Receivables from sales of collateral vehicle
Lain-lain	34.347	22.628	Others
	115.193	104.140	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.007)	(2.896)	Less: Allowance for impairment losses
	<b>109.186</b>	<b>101.244</b>	

**8. OTHER RECEIVABLES**

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)**

	<b>31 Desember/ December 2018</b>
<b>Pihak berelasi</b>	
Piutang pembiayaan bersama	555.645
Piutang klaim penjaminan kredit	50.598
Piutang akseptasi klaim	13.796
Lain-lain	176
	<u>620.215</u>
	<b>729.401</b>

Piutang pembiayaan bersama merupakan piutang yang telah dijanjikan secara bersama untuk dibiayai, namun belum ditagihkan ke pemberi pembiayaan bersama.

Lihat Catatan 26a untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember/ December 2018</b>
Saldo awal	2.896
Penambahan untuk tahun berjalan	4.122
Penghapusan piutang	(1.011)
<b>Saldo akhir</b>	<b>6.007</b>

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang.

**9. PERPAJAKAN**

**a. Tagihan kelebihan pajak**

	<b>31 Desember/ December 2018</b>
<b>Pajak pertambahan nilai:</b>	
Tahun pajak 2011	14.582
Tahun pajak 2012	21.442
Tahun pajak 2013	29.495
	<u>65.519</u>
<b>Pajak penghasilan badan:</b>	
Tahun pajak 2013	19
	<u>65.538</u>
<b>Dikurangi:</b>	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.000)
	<u>43.538</u>

**8. OTHER RECEIVABLES (continued)**

	<b>31 Desember/ December 2017</b>	
	502.570	<b>Related parties</b>
	7.309	Joint financing receivables
	53.699	Credit guarantee claims receivables
	553	Claim acceptance receivables
	<u>564.131</u>	Others
	<b>665.375</b>	

Joint financing receivables represent receivables that have been jointly promised to be financed, but have not been billed to the joint financing provider.

Refer to Note 26a for details of balances and transactions with related parties.

The movements in the allowance for impairment losses for years ended 31 December 2018 and 2017, are as follows:

	<b>31 Desember/ December 2017</b>	
	785	<b>Beginning balance</b>
	2.111	Provision for the year
	-	Receivables written-off
	<u>2.896</u>	<b>Ending balance</b>

Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient to cover any possible losses from uncollectible receivables.

**9. TAXATION**

**a. Claims for tax refund**

	<b>31 Desember/ December 2017</b>	
	14.582	<b>Value added tax:</b>
	21.442	Fiscal year 2011
	29.495	Fiscal year 2012
	<u>65.519</u>	Fiscal year 2013
	65.519	<b>Corporate income tax:</b>
	19	Fiscal year 2013
	<u>65.538</u>	
	-	<b>Less:</b>
	<u>65.538</u>	Allowance for impairment losses

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**9. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**9. TAXATION (continued)**

**b. Utang pajak kini**

**b. Current tax liabilities**

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	
Pasal 29	1.852	3.916	Article 29
Pasal 25	-	30.000	Article 25
	<b>1.852</b>	<b>33.916</b>	

**c. Beban pajak**

**c. Tax expense**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2018	2017	
Kini - non final	150.775	123.758	Current - non final
Tangguhan (lihat Catatan 9d)	(16.675)	(7.429)	Deferred (refer to Note 9d)
	<b>134.100</b>	<b>116.329</b>	

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense and the theoretical tax amount on the Company's income before income tax expense is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2018	2017	
Laba sebelum beban pajak penghasilan	539.843	468.378	Income before income tax expense
Pajak dihitung pada tarif pajak	134.961	117.095	Tax calculated at tax rates
Penghasilan bunga dikenakan pajak final	(3.029)	(2.259)	Interest income subjected to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan	2.168	1.493	Non-deductible expenses
<b>Beban pajak</b>	<b>134.100</b>	<b>116.329</b>	<b>Tax expense</b>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**9. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Beban pajak (lanjutan)**

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

**9. TAXATION (continued)**

**c. Tax expense (continued)**

Reconciliation between income before income tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and estimated taxable income is as follows:

	<b>Tahun yang berakhir</b> <b>pada tanggal 31 Desember/</b> <b>Year ended 31 December</b>		
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
Laba sebelum beban pajak penghasilan	539.843	468.378	<i>Income before income tax expense</i>
<b>Koreksi fiskal:</b>			<b>Fiscal corrections:</b>
<b>Beda temporer</b>			<b>Temporary differences</b>
Selisih antara nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	(2.133)	(4.228)	<i>Difference in net book value between commercial and fiscal</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas tagihan kelebihan pajak	22.000	-	<i>Provision for impairment losses on claims for tax refund</i>
Penyisihan imbalan kerja karyawan	12.909	10.548	<i>Provision for employee benefits</i>
Penyisihan bonus	30.432	20.453	<i>Provision for bonus</i>
Penyisihan penghapusan <i>customer deposit</i>	381	834	<i>Provision for write-off customer deposit</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain	3.111	2.111	<i>Provision for impairment losses on other receivables</i>
	66.700	29.718	
<b>Beda tetap</b>			<b>Permanent differences</b>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	8.671	5.972	<i>Non-deductible expenses</i>
Penghasilan bunga dikenakan pajak final	(12.116)	(9.036)	<i>Interest income subjected to final tax</i>
	(3.445)	(3.064)	
Penghasilan kena pajak	603.098	495.032	<i>Taxable income</i>
Beban pajak	150.775	123.758	<i>Tax expense</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Pajak dibayar di muka			<i>Prepaid taxes</i>
Pasal 23	(10.452)	(4.237)	<i>Article 23</i>
Pasal 25	(138.471)	(115.605)	<i>Article 25</i>
Utang pajak penghasilan badan	1.852	3.916	<i>Corporate income tax payable</i>
	12.116	9.036	<i>Interest income subjected to final tax</i>
Pajak penghasilan pasal 4 (2) - final	2.423	1.807	<i>Income tax article 4 (2) - final</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Pajak dibayar di muka	(2.423)	(1.807)	<i>Prepaid tax</i>
	-	-	

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**9. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**9. TAXATION (continued)**

**d. Aset/(liabilitas) pajak tangguhan - neto**

**d. Deferred tax assets/(liabilities) - net**

31 Desember/December 2018			
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Manfaat (beban) pajak tangguhan/ <i>Deferred tax income (expenses)</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>
<b>Aset pajak tangguhan dampak dari laporan laba rugi</b>			<b>Deferred tax assets effect from profit or loss</b>
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain	724	778	1.502
Selisih antara nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	(593)	(533)	(1.126)
Penyisihan imbalan kerja karyawan	10.273	3.227	13.500
Penyisihan bonus	14.419	7.608	22.027
Penyisihan penghapusan customer deposit	787	95	882
Penyisihan atas tagihan kelebihan pajak	-	5.500	5.500
			<b>Deferred tax assets effect from other comprehensive income</b>
<b>Aset pajak tangguhan dampak dari penghasilan komprehensif lain</b>			
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	8.188	(1.682)	6.506
Kerugian bersih atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas	4.206	6.924	11.130
	<b>38.004</b>	<b>21.917</b>	<b>59.921</b>
31 Desember/December 2017			
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Manfaat (beban) pajak tangguhan/ <i>Deferred tax income (expenses)</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>
<b>Aset pajak tangguhan dampak dari laporan laba rugi</b>			<b>Deferred tax assets effect from profit or loss</b>
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain	196	528	724
Selisih antara nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	464	(1.057)	(593)
Penyisihan imbalan kerja karyawan	7.636	2.637	10.273
Penyisihan bonus	9.306	5.113	14.419
Penyisihan penghapusan customer deposit	579	208	787
			<b>Deferred tax assets effect from other comprehensive income</b>
<b>Aset pajak tangguhan dampak dari penghasilan komprehensif lain</b>			
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	4.898	3.290	8.188
Kerugian bersih atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas	-	4.206	4.206
	<b>23.079</b>	<b>14.925</b>	<b>38.004</b>



**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**9. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**e. Surat ketetapan pajak**

**Tahun pajak 2013, 2012 dan 2011**

Pada tanggal 25 Januari 2016 dan 25 Oktober 2016, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas berbagai macam pajak untuk tahun pajak 2013, 2012 dan 2011, yang menghasilkan jumlah kurang bayar sebesar Rp172.497. Atas kurang bayar tersebut, Perseroan telah melakukan pembayaran sebesar Rp67.634, dimana dari pembayaran tersebut, Perseroan telah mengajukan keberatan sebesar Rp65.538, sisanya sebesar Rp2.096 dicatat sebagai Beban denda pajak di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Untuk jumlah yang belum dibayarkan sebesar Rp104.863, Perseroan mengajukan keberatan ke Kantor Pajak.

Pada tahun 2017, Kantor Pajak menolak semua keberatan untuk tahun fiskal 2013, 2012, dan 2011. Pada tahun yang sama, Perseroan mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Pajak. Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh taksiran tagihan pajak penghasilan tersebut dapat dipulihkan.

Pada tanggal 18 Desember 2018, Pengadilan Pajak membacakan putusan terkait dengan banding yang diajukan Perseroan sebesar Rp170.401, yang terdiri dari PPh Badan sebesar Rp104.463, PPN sebesar Rp57.733, STP atas denda PPN sebesar Rp7.786, Pajak Penghasilan Pasal 4(2) sebesar Rp370, dan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp49 untuk tahun pajak 2011, 2012 dan 2013.

Atas putusan tersebut Perseroan menerima surat putusan dari Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Desember 2018. Berdasarkan hasil putusan tersebut PPh Badan telah dikabulkan sebagian sebesar Rp104.351 dan tidak dikabulkannya sebesar Rp112. Sedangkan untuk PPN yang dikabulkan sebesar Rp57.674 dan Rp59 tidak dikabulkan. Sedangkan untuk STP atas denda yang timbul dari PPN tersebut akan diajukan pembatalan STP ke Direktorat Jendral Pajak sebesar Rp7.778 dan tidak diajukan pembatalan STP sebesar Rp8. Sedangkan untuk Pajak Penghasilan Pasal 4(2) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak dikabulkan sebesar Rp370 dan Rp49. Sehingga dari hasil putusan tersebut yang masih harus dibayar total keseluruhan sebesar Rp598. Atas putusan yang sudah diterima, Manajemen sepakat untuk menerima hasil putusan yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Pajak.

**9. TAXATION (continued)**

**e. Tax assessment letter**

**Fiscal year 2013, 2012 and 2011**

On 25 January 2016 and 25 October 2016, the Company received an underpayment tax assessment letter (SKPKB) and tax billing (STP) on various taxes for fiscal years 2013, 2012 and 2011, which resulted in net tax underpayment of Rp172,497. For this underpayment, the Company has paid the amount of Rp67,634 and for the said payment, the Company has submitted an objection for the amount of Rp65,538, the remaining amount of Rp2,096 was recorded as tax penalty in the statement of profit or loss and other comprehensive income. For the remaining unpaid balance amounting to Rp104,863, the Company filed an objection to the Tax Office.

In 2017, the Tax Office has rejected all objections for fiscal years 2013, 2012, and 2011. In the same year, the Company appealed the decision to the Tax Court. Management believes that all of the estimated claim for income tax can be recovered.

On 18 December 2018, the Tax Court read out the decision related to the appeal filed in the amount of Rp170,401, consisting of Corporate Income Tax amounting to Rp104,463, VAT of Rp57,733, STP for the VAT penalty of Rp7,786, Income Tax Article 4(2) of Rp370, and Income Tax Article 23 of Rp49 for fiscal year 2011, 2012 and 2013.

Based on the decision, the Company received a decision letter from the Tax Court on 27 December 2018. Based on the results of the decision, the Corporate Income Tax was partially granted in the amount of Rp104,351 and was not granted in the amount of Rp112. Whereas the VAT granted in the amount of Rp57,674 and Rp59 were not granted. Whereas for STP for fines arising from the VAT, STP cancellation will be submitted to the Directorate General of Taxes amounting to Rp7,778 and no STP cancellation is submitted amounting to Rp8. Whereas for Income Tax Article 4(2) and Income Tax Article 23 were not granted in the amount of Rp370 and Rp49, respectively. So that from the results of the verdict, the total accrued amounted to Rp598. For the decisions that have been received, Management agrees to accept the results of the decisions that have been determined by the Tax Court.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**9. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)  
Tahun pajak 2015 dan 2014**

Pada tanggal 12 September 2018, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dari Direktorat Jendral Pajak ("DJP") atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp60.999 dan Rp31.453. Untuk jumlah kurang bayar dari SKPKB tersebut, Perseroan mengajukan keberatan ke Kantor Pajak sebesar Rp90.879. Perseroan telah menyetujui keputusan dan telah membayar sejumlah Rp724 dan Rp849 masing-masing atas SKPKB atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2015 dan 2014 berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada tanggal 1 Oktober 2018. Sampai tanggal laporan keuangan, hasil keputusan dari DJP belum diketahui.

Perseroan juga menerima SKPKB dari DJP atas Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") untuk tahun pajak 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp12.328 dan Rp4.182 dan Surat Tagihan Pajak ("STP") atas SKPKB tahun 2015 dan 2014 yang diterbitkan oleh DJP dengan jumlah masing-masing sebesar Rp1.666 dan Rp565. Perseroan menerima hasil SKPKB dan STP dari DJP dan tidak mengajukan keberatan.

Perseroan juga menerima SKPKB dari DJP atas Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 4(2) untuk tahun pajak 2015 dan 2014 dengan jumlah total masing-masing sebesar Rp125 dan Rp117. Perseroan menerima hasil SKPKB dan STP dari DJP dan tidak mengajukan keberatan.

Atas kurang bayar dari SKPKB dan STP atas berbagai macam pajak untuk tahun pajak 2015 dan 2014 tersebut, Perseroan telah melakukan pembayaran sebesar Rp20.555, dimana dari pembayaran tersebut sebesar Rp18.740 untuk jumlah kurang bayar dari SKPKB atas PPN dan STP atas SKPKB tersebut berasal dari PPN Keluaran. Sedangkan pembayaran sebesar Rp1.815 untuk Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 4(2) dicatat sebagai Beban denda pajak di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya.

**f. Administrasi**

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perseroan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

**9. TAXATION (continued)**

**e. Tax assessment letter (continued)  
Fiscal year 2015 and 2014**

On 12 September 2018, the Company received Tax Assessment Letter on Underpayment ("SKPKB") from Directorate General of Taxes ("DGT") on Corporate Income Tax for fiscal year 2015 and 2014 amounting to Rp60,999 and Rp31,453, respectively. For the amount of the underpayment of the SKPKB, the Company filed an objection to the Tax Office amounting to Rp90,879. The Company has approved the decision and has paid the amount of Rp724 and Rp849, respectively for the SKPKB on Corporate Income Tax for fiscal year 2015 and 2014 based on the Audit Result Final Discussion on 1 October 2018. Until the date of the financial statement, the decision from DGT is not yet known.

The Company also received SKPKB from DGT on Value Added Tax ("VAT") for fiscal year 2015 and 2014 amounting to Rp12,328 and Rp4,182, respectively and Tax Assessment Letter ("STP") for SKPKB for year 2015 and 2014 from DGT amounting to Rp1,666 and Rp565, respectively. Management accepted the result of SKPKB and STP from DJP and did not file an objection to The Tax Office.

The Company also received SKPKB from DGT on Income Tax Article 21, Income Tax Article 23 and Income Tax Article 4(2) for fiscal year 2015 and 2014 amounting to Rp125 and Rp117, respectively. Management accepted the result of SKPKB and STP from DJP and did not file an objection to The Tax Office.

For the underpayments of SKPKB and STP on various taxes for fiscal years 2015 and 2014, the Company has paid the amount of Rp20,555 and for the said payment, for the amount of Rp18,740 for the amount of underpayments of SKPKB on VAT and STP on the SKPKB were from VAT Out. Whereas payments of Rp1,815 for Corporate Income Tax, Article 21 Income Tax, Article 23 Income Tax, and Income Tax Article 4 (2) were recorded as tax penalty in the statement of profit and loss and other comprehensive income.

**f. Administration**

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self-assessment. The Director General of Taxes may assess or amend taxes within a certain period. For the fiscal years of 2008 and onwards, the period is within five years from the time the tax becomes due.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**10. ASET TETAP**

**10. FIXED ASSETS**

31 Desember/December 2018						
	1 Januari/ January	Penambahan/ Additions	(Pengurangan)/ (Deductions)	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December	
<b>Aset tetap</b>						<b>Fixed assets</b>
<b>Kepemilikan langsung</b>						<b>Direct ownership</b>
<b>Harga perolehan</b>						<b>Cost</b>
Tanah	42.445	-	-	-	42.445	Land
Bangunan	42.555	2.034	-	1.375	45.964	Buildings
Kendaraan	28	-	-	-	28	Vehicles
Perabotan dan peralatan kantor	150.468	40.756	(196)	-	191.028	Furniture and office equipment
Renovasi bangunan sewa	31.786	3.120	-	-	34.906	Leasehold improvement
Aset dalam penyelesaian	1.375	4.809	-	(1.375)	4.809	Construction in progress
	<u>268.657</u>	<u>50.719</u>	<u>(196)</u>	<u>-</u>	<u>319.180</u>	
<b>Akumulasi penyusutan</b>						<b>Accumulated depreciation</b>
Bangunan	(6.483)	(2.287)	-	-	(8.770)	Buildings
Kendaraan	(8)	(5)	-	-	(13)	Vehicles
Perabot dan peralatan kantor	(72.186)	(28.119)	149	-	(100.156)	Furniture and office equipment
Renovasi bangunan sewa	(24.073)	(4.163)	-	-	(28.236)	Leasehold improvement
	<u>(102.750)</u>	<u>(34.574)</u>	<u>149</u>	<u>-</u>	<u>(137.175)</u>	
<b>Nilai buku neto</b>	<b>165.907</b>				<b>182.005</b>	<b>Net book value</b>
31 Desember / December 2017						
	1 Januari/ January	Penambahan/ Additions	(Pengurangan)/ (Deductions)	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December	
<b>Aset tetap</b>						<b>Fixed assets</b>
<b>Kepemilikan langsung</b>						<b>Direct ownership</b>
<b>Harga perolehan</b>						<b>Cost</b>
Tanah	34.343	-	-	8.102	42.445	Land
Bangunan	32.986	437	-	9.132	42.555	Buildings
Kendaraan	13	15	-	-	28	Vehicles
Perabotan dan peralatan kantor	112.568	40.603	(2.703)	-	150.468	Furniture and office equipment
Renovasi bangunan sewa	25.917	5.869	-	-	31.786	Leasehold improvement
Aset dalam penyelesaian	15.554	3.055	-	(17.234)	1.375	Construction in progress
	<u>221.381</u>	<u>49.979</u>	<u>(2.703)</u>	<u>-</u>	<u>268.657</u>	
<b>Akumulasi penyusutan</b>						<b>Accumulated depreciation</b>
Bangunan	(4.890)	(1.593)	-	-	(6.483)	Buildings
Kendaraan	(2)	(6)	-	-	(8)	Vehicles
Perabot dan peralatan kantor	(54.299)	(20.542)	2.655	-	(72.186)	Furniture and office equipment
Renovasi bangunan sewa	(20.868)	(3.205)	-	-	(24.073)	Leasehold improvement
	<u>(80.059)</u>	<u>(25.346)</u>	<u>2.655</u>	<u>-</u>	<u>(102.750)</u>	
<b>Nilai buku neto</b>	<b>141.322</b>				<b>165.907</b>	<b>Net book value</b>

Rincian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Details of construction in progress as of 31 December 2018 and 2017, are as follows:

31 Desember/December 2018			
	Jumlah/ Amount	Estimasi tahun penyelesaian/ Estimated year of completion	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion
Renovasi dalam penyelesaian untuk pembukaan jaringan usaha baru	4.809	2019	80%
			Renovation in progress for new business networks

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**10. ASET TETAP (lanjutan)**

Rincian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**10. FIXED ASSETS (continued)**

Details of construction in progress as of 31 December 2018 and 2017, are as follows: (continued)

31 Desember/December 2017				
	Jumlah/ Amount	Estimasi tahun penyelesaian/ Estimated year of completion	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	
Renovasi dalam penyelesaian untuk pembukaan jaringan usaha baru	1.375	2018	75%	Renovation in progress for new business networks

Seluruh aset tetap kepemilikan langsung kecuali tanah, telah diasuransikan dengan pihak berelasi, PT Mandiri Axa General Insurance dengan jumlah pertanggungan asuransi sebesar Rp249.086 dan Rp131.610 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang menurut manajemen cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian karena kebakaran, banjir, huru-hara dan gempa bumi.

Directly owned fixed assets, except for land, are insured with a related party, PT Mandiri Axa General Insurance, for a sum insured of Rp249,086 and Rp131,610 as of 31 December 2018 and 2017, respectively, which according to the management, is sufficient to cover possible losses due to fire, flood, public disorder/riots and earthquake.

Tanah Perseroan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") yang mempunyai masa manfaat selama 20 sampai dengan 30 tahun yang akan jatuh tempo antara 2 Februari 2023 sampai dengan 31 Maret 2046. Manajemen berpendapat bahwa HGB tersebut dapat diperbaharui atau diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Land is held in the form of certificates of Hak Guna Bangunan ("HGB") which have useful lives of 20 to 30 years and will be due between 2 February 2023 to 31 March 2046. Management believes that the HGB can be renewed or extended upon expiration.

Rincian keuntungan atas pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of gain on disposal of fixed assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2018	2017	
Hasil pelepasan aset tetap	-	38	Proceed from disposal of fixed assets Book value
Nilai buku aset tetap	(47)	(48)	
<b>Rugi atas pelepasan aset tetap</b>	<b>(47)</b>	<b>(10)</b>	<b>Loss on disposal of fixed assets</b>

Kerugian atas pelepasan aset tetap diakui sebagai bagian dari "beban umum dan administrasi - lain-lain" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Loss on disposal of fixed assets is recognized as part of "general and administrative expenses - others" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Pada tanggal 20 Juli 2018, sebagian bangunan cabang Medan milik Perseroan mengalami kerusakan karena peristiwa kebakaran dengan nilai buku sebesar Rp610. Perseroan telah mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi sebesar Rp524 dan telah disetujui oleh perusahaan asuransi. Sampai tanggal laporan keuangan, Perseroan belum menerima klaim yang telah disetujui dari perusahaan asuransi.

On 20 July 2018, certain buildings of the Company's Medan branch were damaged due to fire events with a book value of Rp610. The Company has filed a claim with the insurance company amounted to Rp524 and has been approved by the insurance company. Until the date of financial statement, the Company has not received the approved claim from the insurance company.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**10. ASET TETAP (lanjutan)**

Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Pada 31 Desember 2018 dan 2017, jumlah bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp61.353 dan Rp48.557.

Tidak ada aset tetap yang dijadikan jaminan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

**10. FIXED ASSETS (continued)**

Management believes that there is no impairment on the Company's fixed assets as of 31 December 2018 and 2017, respectively.

As of 31 December 2018 and 2017, the gross amount of fixed assets which have been fully depreciated and still being used amounted to Rp61,353 and Rp48,557, respectively.

There were no fixed assets pledged as collateral as of 31 December 2018 and 2017.

**11. ASET LAIN-LAIN**

	<b>31 Desember/ December 2018</b>
<b>Pihak ketiga</b>	
Setoran dalam perjalanan	59.807
Sewa dibayar di muka	18.251
Asuransi dibayar di muka	12.177
Uang muka	8.187
Setoran jaminan	4.501
Piutang karyawan	1.397
Piutang bunga	168
Lain-lain	7.105
	<u>111.593</u>
<b>Pihak berelasi</b>	
Sewa dibayar di muka	2.227
	<u><b>113.820</b></u>

Lain-lain merupakan persediaan materai Perseroan, biaya provisi dibayar di muka, biaya emisi dan biaya dibayar di muka.

Lihat Catatan 26a untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

**11. OTHER ASSETS**

	<b>31 Desember/ December 2017</b>	
	<u>81.340</u>	
	<u>1.346</u>	
	<u><b>82.686</b></u>	
		<b>Third parties</b>
		Deposit in transit
		Prepaid rent
		Prepaid insurance
		Advance payments
		Security deposits
		Employee receivables
		Interest receivable
		Others
		<b>Related parties</b>
		Prepaid rent

Others mainly represent the Company's stamp duty, prepaid provision cost, issuance cost and prepaid expenses.

Refer to Note 26a for details of balances and transactions with related parties.

**12. UTANG USAHA**

	<b>31 Desember/ December 2018</b>
<b>Pihak ketiga</b>	
Utang kendaraan	529.757
Utang asuransi	119.873
	<u><b>649.630</b></u>

Utang usaha merupakan utang kepada pemasok atas pembiayaan kendaraan bermotor dan utang kepada perusahaan asuransi yang berkaitan dengan pembiayaan kendaraan bermotor.

**12. TRADE PAYABLES**

	<b>31 Desember/ December 2017</b>	
	<u>469.144</u>	
	<u>137.369</u>	
	<u><b>606.513</b></u>	
		<b>Third parties</b>
		Vehicle payables
		Insurance payables

Trade payables represent payables to suppliers for motor vehicle financing and payables to insurance companies in relation to motor vehicle financing.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**13. UTANG LAIN-LAIN**

	31 Desember/ December 2018
<b>Pihak ketiga</b>	
Titipan konsumen	96.705
Notaris	38.267
Liabilitas pajak	
Pasal 21	5.536
Pasal 23	1.033
PPH final	93
PPN keluaran	36.635
Pembelian aset tetap	12.730
Lain-lain	8.948
	<u>199.947</u>
<b>Pihak berelasi</b>	
Pembiayaan bersama	84.498
Lain-lain	240
	<u>84.738</u>
	<u><b>284.685</b></u>

Titipan konsumen terutama berhubungan dengan cicilan pembayaran piutang pembiayaan konsumen yang masih dalam proses identifikasi.

Pembiayaan bersama berhubungan dengan porsi cicilan pembayaran piutang pembiayaan yang telah diterima dari konsumen namun belum dibayarkan kepada pemberi pembiayaan bersama.

Lain-lain terutama terdiri dari utang kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan utang asuransi dan biaya biro jasa NPWP.

Lihat Catatan 26b untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

**13. OTHER PAYABLES**

	31 Desember/ December 2017	
		<b>Third parties</b>
	68.264	Customer deposits
	32.220	Notary
		Tax liabilities
	6.364	Article 21
	1.139	Article 23
	128	Final tax
	75.955	VAT out
	3.254	Purchase of fixed asset
	7.167	Others
	<u>194.491</u>	
		<b>Related parties</b>
	30.104	Joint financing
	240	Others
	<u>30.344</u>	
	<u><b>224.835</b></u>	

Customer deposits represent installment of consumer financing receivables which are still in identification process.

Joint financing represents the portion of installment payments for financing receivables that have been received from customers but have not been paid to joint financing providers.

Others mainly consist of payables to third parties related to insurance payable and NPWP service fee.

Refer to Note 26b for details of balances and transactions with related parties.

**14. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

	31 Desember/ December 2018
<b>Pihak ketiga</b>	
Gaji dan tunjangan	100.008
Bunga yang masih harus dibayar	98.754
Promosi	7.223
Jasa profesional	2.822
Telepon	1.521
Perbaikan dan pemeliharaan	627
Listrik dan air	488
Lain-lain	8.839
	<u>220.282</u>
<b>Pihak berelasi</b>	
Bunga yang masih harus dibayar	1.828
	<u><b>222.110</b></u>

Lain-lain terutama terdiri dari beban yang masih harus dibayar terkait: jamuan, materai, sewa PC, sewa kendaraan, perjalanan dinas dan pelatihan.

Lihat Catatan 26b untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

**14. ACCRUED EXPENSES**

	31 Desember/ December 2017	
		<b>Third parties</b>
	64.758	Salaries and allowances
	53.228	Accrued interest
	6.810	Promotion
	852	Professional fee
	1.028	Telephone
	916	Repairs and maintenance
	515	Utilities
	7.452	Others
	<u>135.559</u>	
		<b>Related parties</b>
	1.227	Accrued interest
	<u><b>136.786</b></u>	

Others mainly consist of: entertainment, stamps, PC rent, vehicles rent, travelling and training.

Refer to Note 26b for details of balances and transactions with related parties.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**15. PINJAMAN BANK**

**15. BANK LOANS**

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	
Revolving	1.262.528	268.194	Revolving
Non-revolving	9.960.207	7.976.388	Non-revolving
	11.222.735	8.244.582	
Biaya provisi yang belum diamortisasi	(34.611)	(34.152)	Unamortized provision cost
	<b>11.188.124</b>	<b>8.210.430</b>	

	Jumlah fasilitas/ Facility amount		Jumlah pinjaman/ Loan amount		Jatuh tempo fasilitas/ Maturity date of the facility	
	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
<b>Revolving</b>						
<b>Rupiah</b>						
<b>Pihak ketiga/Third parties</b>						
PT Bank Central Asia Tbk	55.000	55.000	-	-	Maret/ March 2019	Maret/ March 2018
PT Bank OCBC NISP Tbk	200.000	150.000	-	-	November/ November 2019	Februari/ February 2018
PT Bank Danamon Tbk	87.472	-	-	-	Agustus / August 2019	-
	65.000	65.000	19.861	41.528	November/ November 2019	November/ November 2019
	50.000	50.000	16.667	33.333	Desember/ December 2019	Desember/ December 2019
	52.000	52.000	26.000	43.333	Juni/ June 2020	Juni/ June 2020
	-	31.806	-	-	-	Agustus/ August 2018
	100.000	100.000	100.000	-	Agustus/ August 2019	Agustus/ August 2018
PT Bank HSBC Indonesia	150.000	150.000	150.000	-	Juli/ July 2019	Juli/ July 2018
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta (dahulu Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Cabang Jakarta)/ (formerly Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch)	724.050	-	700.000	-	Februari/ February 2019	-
	-	677.400	-	-	-	Februari/ February 2018
PT Bank UOB Indonesia	300.000	300.000	-	-	Januari/ January 2019	November/ November 2018
PT Bank ANZ Indonesia	217.215	-	-	-	Oktober/ October 2019	-
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	100.000	-	100.000	-	April/ April 2019	-
	50.000	-	50.000	-	April/ April 2019	-
	<b>2.150.737</b>	<b>1.631.206</b>	<b>1.162.528</b>	<b>118.194</b>		
<b>Revolving</b>						
<b>Rupiah</b>						
<b>Pihak berelasi/Related parties</b>						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	300.000	300.000	100.000	-	Desember/ December 2019	Desember/ December 2018
	425.000	150.000	-	150.000	Desember/ December 2019	Desember/ December 2020
	-	100.000	-	-	-	Desember/ December 2018
	<b>725.000</b>	<b>550.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>Jumlah/Total revolving</b>	<b>2.875.737</b>	<b>2.181.206</b>	<b>1.262.528</b>	<b>268.194</b>		



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**15. PINJAMAN BANK (lanjutan)**

**15. BANK LOANS (continued)**

	Jumlah fasilitas/ Facility amount		Jumlah pinjaman/ Loan amount		Jatuh tempo fasilitas/ Maturity date of the facility	
	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
<b>Non-revolving</b>						
<b>Rupiah</b>						
<b>Pihak ketiga/Third parties</b>						
PT Bank Central Asia Tbk	50.000	50.000	20.833	34.375	Agustus/ August 2020	Agustus/ August 2020
	250.000	250.000	97.222	180.556	Februari/ February 2020	Februari/ February 2020
	200.000	200.000	83.333	150.000	Maret/ March 2020	Maret/ March 2020
	200.000	200.000	105.556	172.222	Juli/ July 2020	Juli/ July 2020
	100.000	100.000	55.556	91.667	Agustus/ August 2020	Agustus/ August 2020
	300.000	-	241.667	-	Mei/ May 2021	-
	700.000	-	583.333	-	Juni/ June 2021	-
PT Bank UOB Indonesia	300.000	300.000	225.000	-	Maret/ March 2021	November/ November 2018
PT Maybank Indonesia Tbk	500.000	500.000	375.000	-	Maret/ March 2021	Desember/ December 2018
PT Bank Panin Tbk	100.000	100.000	2.128	27.660	Januari/ January 2019	Januari/ January 2019
	30.000	30.000	652	8.478	Januari/ January 2019	Januari/ January 2019
	-	100.000	-	13.889	-	Mei/ May 2018
	-	100.000	-	13.889	-	Mei/ May 2018
	-	100.000	-	13.889	-	Mei/ May 2018
	-	100.000	-	16.667	-	Juni/ June 2018
	-	100.000	-	16.667	-	Juni/ June 2018
	-	150.000	-	25.000	-	Juni/ June 2018
	-	100.000	-	16.667	-	Juni/ June 2018
	-	100.000	-	27.778	-	Oktober/ October 2018
	-	100.000	-	27.778	-	Oktober/ October 2018
	-	100.000	-	27.778	-	Oktober/ October 2018
	-	100.000	-	27.778	-	Oktober/ October 2018
	-	100.000	-	30.556	-	November/ November 2018
	100.000	100.000	22.917	47.917	November/ November 2019	November/ November 2019
	-	100.000	-	30.556	November 2018	November 2018
	-	100.000	-	30.556	November 2018	November 2018
	100.000	100.000	-	33.333	Desember 2018	Desember 2018
	100.000	100.000	-	33.333	Desember 2018	Desember 2018
	150.000	150.000	8.333	58.333	Februari/ February 2019	Februari/ February 2019
	100.000	100.000	5.556	38.889	Februari/ February 2019	Februari/ February 2019
	100.000	100.000	31.250	56.250	Maret/ March 2020	Maret/ March 2020
	200.000	200.000	16.667	83.333	Maret/ March 2019	Maret/ March 2019
	100.000	100.000	31.250	56.250	Maret/ March 2020	Maret/ March 2020
	100.000	100.000	33.333	58.333	April/ April 2020	April/ April 2020
	100.000	100.000	16.667	50.000	Juni/ June 2019	Juni/ June 2019
	100.000	100.000	19.444	52.778	Juli/ July 2019	Juli/ July 2019
	100.000	100.000	19.444	52.778	Juli/ July 2019	Juli/ July 2019



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**15. PINJAMAN BANK (lanjutan)**

**15. BANK LOANS (continued)**

	Jumlah fasilitas/ Facility amount		Jumlah pinjaman/ Loan amount		Jatuh tempo fasilitas/ Maturity date of the facility	
	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	31 Desember / December 2018	31 Desember/ December 2017
<i>Non-revolving (lanjutan/continued)</i>						
<i>Rupiah (lanjutan/continued)</i>						
<i>Pihak ketiga (lanjutan)/Third parties (continued)</i>						
PT Bank Panin Tbk (lanjutan/continued)	100.000	100.000	19.444	52.778	Juli/ July 2019	Juli/ July 2019
	100.000	100.000	19.444	52.778	Juli/ July 2019	Juli/ July 2019
	100.000	100.000	25.000	58.333	September/ September 2019	September/ September 2019
	25.000	25.000	11.979	18.229	November/ November 2020	November/ November 2020
	50.000	50.000	25.000	37.500	Desember/ December 2020	Desember/ December 2020
	200.000	200.000	133.333	50.000	Desember/ December 2020	Desember/ December 2020
	150.000	150.000	78.125	115.625	Desember/ December 2020	Desember/ December 2020
	150.000	150.000	76.596	114.894	Desember/ December 2020	Desember/ December 2020
	100.000	100.000	53.333	80.000	Desember/ December 2020	Desember/ December 2020
	100.000	100.000	54.546	81.818	Desember/ December 2020	Desember/ December 2020
	100.000	100.000	54.546	81.818	Desember/ December 2020	Desember/ December 2020
	125.000	125.000	68.182	102.273	Desember/ December 2020	Desember/ December 2020
	100.000	100.000	54.545	81.818	Desember/ December 2020	Desember/ December 2020
	-	200.000	-	200.000	-	Desember/ December 2020
	-	800.000	-	-	-	April/ April 2018
	400.000	-	288.889	-	Februari/ February 2021	-
	400.000	-	300.000	-	Maret/ March 2021	-
	200.000	-	-	-	Desember/ December 2018	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	575.000	-	-	-	Maret/ March 2019	-
PT Bank KEB Hana Indonesia	-	50.000	-	4.838	-	Maret/ March 2018
	-	50.000	-	6.420	-	April/ April 2018
	-	50.000	-	12.605	-	Agustus/ August 2018
	-	50.000	-	14.116	-	September/ September 2018
	-	100.000	-	28.232	-	September/ September 2018
	-	100.000	-	28.232	-	September/ September 2018
	400.000	-	-	-	Maret/ March 2019	-
	100.000	100.000	15.738	50.949	Mei/ May 2019	Mei/ May 2019
	100.000	100.000	18.808	53.728	Juni/ June 2019	Juni/ June 2019
PT Bank DKI	-	35.000	-	1.139	-	Januari/ January 2018
	-	30.000	-	1.944	-	Februari/ February 2018
	-	50.000	-	4.838	-	Maret/ March 2018
	-	50.000	-	4.838	-	Maret/ March 2018
	-	19.500	-	2.504	-	April/ April 2018
	-	50.000	-	18.521	-	Desember/ December 2018
	100.000	100.000	12.721	48.331	April/ April 2019	April/ April 2019

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**15. PINJAMAN BANK (lanjutan)**

**15. BANK LOANS (continued)**

	Jumlah fasilitas/ Facility amount		Jumlah pinjaman/ Loan amount		Jatuh tempo fasilitas/ Maturity date of the facility	
	31 Desember/ Desember 2018	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ Desember 2018	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
<b>Non-revolving (lanjutan/continued)</b>						
<b>Rupiah (lanjutan/continued)</b>						
<b>Pihak ketiga (lanjutan)/Third parties (continued)</b>						
PT Bank DKI (lanjutan/continued)	150.000	150.000	19.023	72.358	April/ April 2019	April/ April 2019
	25.000	25.000	8.376	16.750	November/ November 2019	November/ November 2019
	50.000	50.000	18.207	34.827	Desember/ December 2019	Desember/ December 2019
	125.000	125.000	49.126	90.363	Januari/ January 2020	Januari/ January 2020
	275.000	-	226.854	-	Mei/ May 2021	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	100.000	-	14.286	-	Mei/ May 2018
	-	100.000	-	15.625	-	Mei/ May 2018
	-	100.000	-	33.333	-	Desember/ December 2018
	-	100.000	-	33.333	-	Desember/ December 2018
	75.000	75.000	10.417	35.417	Mei/ May 2019	Mei/ May 2019
	75.000	75.000	12.500	37.500	Juni/ June 2019	Juni/ June 2019
	100.000	100.000	41.667	75.000	Maret/ March 2020	Maret/ March 2020
	100.000	100.000	45.714	80.000	April/ April 2020	April/ April 2020
	100.000	100.000	47.059	82.353	April/ April 2020	April/ April 2020
	100.000	100.000	47.059	82.353	April/ April 2020	April/ April 2020
	100.000	100.000	63.889	97.222	November/ November 2020	November/ November 2020
	100.000	100.000	66.667	100.000	Desember/ December 2020	Desember/ December 2020
PT Bank Mizuho Indonesia	724.050	-	-	-	Juni/ June 2019	-
	9.854.050	9.364.500	3.961.928	3.915.752		
<b>Mata uang asing/Foreign currency</b>						
Kredit sindikasi I/ Syndication credit I	1.194.750	1.194.750	760.470	1.117.751	September/ September 2020	September/ September 2020
	1.491.600	1.491.600	1.062.152	1.490.280	November/ November 2020	November/ November 2020
Kredit sindikasi II/ Syndication credit II	963.300	-	941.265	-	Oktober/ October 2021	-
	317.418	-	313.639	-	Oktober/ October 2021	-
	868.800	-	796.484	-	Agustus/ August 2021	-
	287.040	-	265.397	-	Agustus/ August 2021	-
Bank of China Limited, Cabang Jakarta	575.000	-	579.240	-	Desember/ December 2021	-
	5.697.908	2.686.350	4.718.647	2.608.031		
<b>Pihak berelasi/Related parties</b>						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	49.000	-	1.595	-	Januari/ January 2018
	-	49.000	-	1.595	-	Januari/ January 2018
	-	49.000	-	1.595	-	Januari/ January 2018
	-	49.000	-	3.175	-	Februari/ February 2018
	-	49.000	-	3.175	-	Februari/ February 2018
	-	49.000	-	4.741	-	Maret/ March 2018

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**15. PINJAMAN BANK (lanjutan)**

**15. BANK LOANS (continued)**

	Jumlah fasilitas/ Facility amount		Jumlah pinjaman/ Loan amount		Jatuh tempo fasilitas/ Maturity date of the facility	
	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
<i>Non-revolving (lanjutan/continued)</i>						
Rupiah (lanjutan/continued)						
Pihak berelasi (lanjutan)/Related parties (continued)						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan/continued)						
	-	49.000	-	4.741	-	Maret/ March 2018
	-	20.000	-	1.935	-	Maret/ March 2018
	-	40.000	-	7.633	-	Juni/ June 2018
	-	34.000	-	9.599	-	September/ September 2018
	100.000	100.000	21.840	56.465	Juli/ July 2019	Juli/ July 2019
	100.000	100.000	24.859	59.198	Agustus/ August 2019	Agustus/ August 2019
	100.000	100.000	24.859	59.198	Agustus/ August 2019	Agustus/ August 2019
	50.000	50.000	12.429	29.599	Agustus/ August 2019	Agustus/ August 2019
	100.000	100.000	27.794	61.839	September/ September 2019	September/ September 2019
	50.000	50.000	16.768	33.516	November/ November 2019	November/ November 2019
	50.000	50.000	16.768	33.516	November 2019	November 2019
	100.000	100.000	36.363	69.607	Desember/ December 2019	Desember/ December 2019
	100.000	100.000	36.363	69.607	Desember/ December 2019	Desember/ December 2019
	150.000	150.000	54.544	104.410	Desember 2019	Desember 2019
	100.000	100.000	39.248	72.245	Januari/ January 2020	Januari/ January 2020
	100.000	100.000	47.777	80.042	April/ April 2020	April/ April 2020
	100.000	100.000	50.578	82.602	Mei/ May 2020	Mei/ May 2020
	100.000	100.000	50.578	82.602	Mei/ May 2020	Mei/ May 2020
	100.000	100.000	50.578	82.602	Mei/ May 2020	Mei/ May 2020
	100.000	100.000	53.357	85.144	Juni/ June 2020	Juni/ June 2020
	100.000	100.000	53.357	85.144	Juni/ June 2020	Juni/ June 2020
	100.000	100.000	53.357	85.144	Juni/ June 2020	Juni/ June 2020
	100.000	100.000	56.116	87.667	Juli/ July 2020	Juli/ July 2020
	95.000	95.000	63.443	92.674	November/ November 2020	November/ November 2020
	150.000	-	104.170	-	Desember/ December 2020	-
	100.000	-	77.329	-	Maret/ March 2021	-
	250.000	-	193.157	-	Maret/ March 2021	-
	114.000	-	114.000	-	Desember/ December 2021	-
	2.509.000	2.332.000	1.279.632	1.452.605		
<b>Jumlah/Total non-revolving</b>	<b>18.060.958</b>	<b>14.382.850</b>	<b>9.960.207</b>	<b>7.976.388</b>		
<b>Jumlah/Total</b>	<b>20.936.695</b>	<b>16.564.056</b>	<b>11.222.735</b>	<b>8.244.582</b>		

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**15. PINJAMAN BANK (lanjutan)**

**Kredit sindikasi I**

Berdasarkan perjanjian sindikasi tanggal 19 Juli 2017, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari Anggota Sindikasi dengan batas kredit maksimum sejumlah AS\$200.000.000 (nilai penuh). Rincian nilai pinjamannya sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta (dahulu Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Cabang Jakarta)	273.393	391.204
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Cabang Singapura	145.810	208.642
RHB Bank Berhad	141.252	202.122
Eastspring Investments SICAV-FIS - Asia Pacific Loan Fund	109.357	156.482
The Gunma Bank, Ltd.	109.357	156.482
BDO Unibank, Inc., Cabang Hong Kong	109.356	156.482
PT Bank CTBC Indonesia	91.131	130.402
Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch Chang Hwa Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch	63.792	91.281
The Export - Import Bank of the Republic of China	63.792	91.281
Far Eastern International Bank	63.792	91.281
The Hyakugo Bank, Ltd	63.792	91.281
KGI Bank	63.792	91.281
Land Bank of Taiwan, Cabang Singapura	63.792	91.281
Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch	63.792	91.281
Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch	63.792	91.281
Taiwan Shin Kong Commercial Bank	63.792	91.281
The Korea Development Bank The Korea Development Bank, Cabang Singapura	54.679	78.241
BDO Private Bank, Inc.	31.896	45.641
Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch	31.896	45.641
Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Cabang Singapura	31.896	45.641
<b>Total</b>	<b>1.822.622</b>	<b>2.608.031</b>

**15. BANK LOANS (continued)**

**Syndication credit I**

Based on the syndication agreement dated 19 July 2017, the Company obtained a loan facility from a Syndicated Member with a maximum credit limit of US\$200,000,000 (full amount). Details are as follows:

MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch (formerly Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch)
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch
RHB Bank Berhad
Eastspring Investments SICAV-FIS - Asia Pacific Loan Fund
The Gunma Bank, Ltd.
BDO Unibank, Inc., Hong Kong Branch
PT Bank CTBC Indonesia
Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch Chang Hwa Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch
The Export - Import Bank of the Republic of China
Far Eastern International Bank
The Hyakugo Bank, Ltd
KGI Bank
Land Bank of Taiwan, Singapore Branch
Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch
Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch
Taiwan Shin Kong Commercial Bank
The Korea Development Bank The Korea Development Bank, Singapore Branch
BDO Private Bank, Inc.
Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch
Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch
<b>Total</b>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**15. PINJAMAN BANK (lanjutan)**

**Kredit sindikasi II**

Pada tanggal 26 April 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari Anggota Sindikasi, dengan batas kredit maksimum Tranche A sejumlah AS\$125.000.000 (nilai penuh) dan Tranche B JPY4.600.000.000 (nilai penuh). Penarikan pertama dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2018 dengan jumlah Tranche A AS\$60.000.000 (nilai penuh) dan Tranche B JPY2.208.000.000 (nilai penuh). Penarikan kedua tanggal 2 Oktober 2018 dengan jumlah Tranche A AS\$65.000.000 (nilai penuh) dan Tranche B JPY2.392.000.000 (nilai penuh).

Perjanjian sindikasi mensyaratkan kondisi keuangan tertentu, yaitu:

- Perseroan akan memastikan Total Utang Kotor tidak melebihi 10 kali (atau (apabila lebih kecil) dari tingkat yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia) atas Nilai Bersih barang Berwujud untuk setiap tahun buku dan semester tahun bukannya.
- Perseroan akan memastikan Total Utang Kotor tidak melebihi 90 persen dari piutang bersih untuk setiap tahun buku dan semester tahun bukannya.
- Perseroan akan memastikan bahwa pinjaman-pinjaman macetnya tidak melebihi 3 persen dari keseluruhan Piutangnya untuk setiap tahun buku dan semester tahun bukannya.

Berdasarkan perjanjian sindikasi tanggal 26 April 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Anggota Sindikasi, dengan batas kredit maksimum sejumlah AS\$168.000.000. Dengan nilai pinjaman sebesar:

**31 Desember/  
December 2018**

MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta (dahulu Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Cabang Jakarta)	417.060
The Gunma Bank, Ltd.	278.040
Mega International Commercial Bank Co.Ltd, Offshore Banking Branch	278.040
The Nishi-Nippon City Bank.Ltd	251.755
Land Bank Of Taiwan, Cabang Singapura	208.530
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tokyo	201.403
Bank of Taiwan, Cabang Tokyo	139.020
Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch	139.020
The Joyo Bank, Ltd	139.020
The Hachijuni Bank, Ltd	125.877
Fuyo General Lease(HK) Limited	69.510
The Hokkoku Bank, Ltd. Cabang Singapura	69.510

**2.316.785**

**15. BANK LOANS (continued)**

**Syndication credit II**

On 26 April 2018, the Company obtained a loan facility from a Syndicated Member with a maximum credit limit Tranche A amounting to US\$125,000,000 (full amount) and Tranche B amounting to JPY4,600,000,000 (full amount). The first drawdown was on 3 August 2018 with total Tranche A of US\$60,000,000 (full amount) and Tranche B of JPY2,208,000,000 (full amount). The second drawdown was on 2 October 2018 with total Tranche A of US\$65,000,000 (full amount) and Tranche B of JPY2,392,000,000 (full amount).

The syndication agreement has required financial covenants, namely:

- The Company shall ensure that the Total Gross debt does not exceed 10 times (or (if lower) the level prescribed by the Indonesia Financial Services Authority) of the Tangible Net Worth for each of its financial years and its financial half-years.
- The Company shall ensure that the Total Gross Debt does not exceed 90 per cent of the Net Receivables for each of its financial years and its financial half-years.
- The Company shall ensure that its Non-Performing Loans does not exceed 3 percent of its aggregate Receivables for each of its financial years and its financial half-years.

Based on the syndication agreement dated 26 April 2018, the Company obtained a loan facility from a Syndicated Member, with a maximum credit limit of US \$168,000,000. With loan amount of:

MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch (formerly Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch)
The Gunma Bank, Ltd.
Mega International Commercial Bank Co.Ltd Offshore Banking Branch
The Nishi-Nippon City Bank.Ltd
Land Bank Of Taiwan, Singapore Branch
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tokyo Branch
Bank of Taiwan, Tokyo Branch
Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch
The Joyo Bank, Ltd
The Hachijuni Bank, Ltd
Fuyo General Lease (HK) Limited
The Hokkoku Bank, Ltd. Singapore Branch

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**15. PINJAMAN BANK (lanjutan)**

Cicilan pinjaman bank dan pinjaman sindikasi sesuai dengan tanggal jatuh temponya sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	
Tahun			<i>Year</i>
2018	-	3.856.712	2018
2019	6.172.054	2.809.092	2019
2020	3.751.911	1.578.778	2020
2021 dan sesudahnya	1.298.770	-	2021 and there after
	<b>11.222.735</b>	<b>8.244.582</b>	

**15. BANK LOANS (continued)**

Bank loan and syndicated loans' installment based on maturity date follows:

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman yang belum ditarik dengan rincian sebagai berikut:

As of 31 December 2018, the Company has undrawn loan facilities with details as follows:

Nama bank/ Bank name	Jenis pinjaman/ Loan type	Nomor perjanjian/ Agreement number	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Jumlah fasilitas/ Facility amount	Jumlah fasilitas yang belum ditarik/ Undrawn facility amount	Jatuh tempo fasilitas/ Maturity date facility
<b>Revolving:</b>						
PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas Kredit Lokal/ Local Credit Facility	No. 18	17 Januari/ January 2018	55.000	55.000	12 Maret/ March 2019
PT Bank OCBC NISP Tbk	Demand Loan	No.120	29 Maret/ March 2018	200.000	200.000	10 November/ November 2019
PT Bank Danamon Tbk	KMK Revolving	107A/PPCBD/V/2018	Mei/May 2018	87.472	87.472	30 Agustus/ August 2019
MUFG Bank, Ltd Cabang Jakarta (dahulu Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Cabang Jakarta) (formerly Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Jakarta Branch)	Fasilitas Kredit/ Credit Facility	17-0604LN	11 Februari/ February 2017	724.050	24.050	11 Februari/ February 2019
PT Bank UOB Indonesia	Fasilitas Revolving Credit Facility	594/11/2017	21 November/ November 2017	300.000	300.000	21 Januari/ January 2019
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	KMK Revolving	CRO.KP/058/KMK/12 Akta no.10	20 Desember/ December 2018	300.000	200.000	23 Desember/ December 2019
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	KMK Revolving	No.10	20 Desember/ December 2018	425.000	425.000	20 Desember/ December 2019
PT Bank ANZ Indonesia	Fasilitas Modal Kerja/ Working Capital Facility	110/FA/ANZ/NEW/ X/2018	11 Oktober/ October 2018	217.215	217.215	11 Oktober/ October 2019
<b>Non-revolving:</b>						
PT Bank OCBC NISP Tbk	Fasilitas Term Loan/ Term Loan Facility	No. 120	29 Maret/ March 2018	575.000	575.000	29 Maret/ March 2019
PT Bank Mizuho Indonesia	Fasilitas Jangka Panjang/ Long Term Facility	152/MA/MZH/0618	29 Juni/ June 2018	724.050	724.050	29 Juni/ June 2019
PT Bank KEB Hana Indonesia	Angsuran Modal Kerja/ Working Capital Installment	No.5	3 September/ September 2018	400.000	400.000	3 Maret/ March 2019

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**15. PINJAMAN BANK (lanjutan)**

Pinjaman bank dalam rupiah di atas dikenakan bunga antara 7,23% - 12,00% per tahun pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Pinjaman bank dalam mata uang asing dikenakan bunga LIBOR 3M+0,9% per tahun pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan telah melakukan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman sesuai jadwal yang ditetapkan.

Pinjaman-pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen sejumlah Rp6.466.782 pada tanggal 31 Desember 2018 (31 Desember 2017: Rp4.671.455) dan piutang sewa pembiayaan sejumlah Rp468.553 pada tanggal 31 Desember 2018 (31 Desember 2017: Rp1.126.406).

Fasilitas pinjaman dari beberapa bank dan bank sindikasi tersebut mensyaratkan Perseroan untuk memberikan pemberitahuan tertulis dalam hal pembagian dividen, perubahan modal dan pemegang saham, perubahan susunan direksi dan komisaris, perubahan bisnis utama, investasi dan perolehan pinjaman baru dari bank lain.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perseroan juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti rasio jumlah utang bunga terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 dan kewajiban penyampaian laporan lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan telah memenuhi persyaratan-persyaratan di atas.

Fasilitas-fasilitas pinjaman ini dipergunakan untuk modal kerja kegiatan usaha Perseroan.

Lihat Catatan 26b untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Lihat Catatan 29 untuk perjanjian kerjasama pembiayaan bersama dan penyaluran pemberian kredit.

**15. BANK LOANS (continued)**

The bank loans denominated in Rupiah bear interest rates ranging between 7.23% - 12.00% per annum for the year ended 31 December 2018 and 2017. The bank loans denominated in foreign currency bear interest LIBOR 3M+0.9% per annum for the year ended 31 December 2018 and 2017.

During the year ended 31 December 2018 and 2017, the Company has paid the loan principal and interests installments on schedule.

These loans are secured by consumer financing receivables amounting to Rp6,466,782 as of 31 December 2018 (31 December 2017: Rp4,671,455) and finance lease receivables amounting to Rp468,553 as of 31 December 2018 (31 December 2017: Rp1,126,406).

The loan facilities from those banks and syndicated banks require the Company to provide a written notice in respect of dividend payments, changes of capital and shareholders, changes of directors and commissioners, changes of main business, investment and obtaining new loan facilities from other banks.

Under the loan agreements, the Company is also obliged to comply with financial covenants such as gearing ratio not exceeding 10:1 and other reporting obligations. As of 31 December 2018 and 2017, the Company has complied with the above requirements.

The loan facilities are used for the Company's working capital.

Refer to Note 26b for details of balances and transactions with related parties.

Refer to Note 29 for joint financing and credit channeling cooperation agreements.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF**

**16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS**

31 Desember/December 2018				
Instrumen	Jumlah nosional mata uang asing/ (jumlah penuh) <i>Notional amount foreign currency (full amount)</i>	Nilai wajar/Fair values		Instruments
		Piutang derivatif/ <i>Derivative receivables</i>	Utang derivatif/ <i>Derivative payables</i>	
<b>Terkait nilai tukar dan suku bunga</b>				
<b>Swap mata uang asing dan suku bunga</b>				
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta (dahulu Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Cabang Jakarta)	USD90.000.000	69.950	-	<i>Exchange and interest rate related Cross currency swaps and interest rate MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch (formerly Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch)</i>
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta (dahulu Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Cabang Jakarta)	USD110.000.000	68.383	-	<i>MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch (formerly Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch)</i>
PT Bank UOB Indonesia	USD 40.000.000	-	24.201	<i>PT Bank UOB Indonesia</i>
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta (dahulu Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Cabang Jakarta)	USD 20.000.000	-	4.514	<i>MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta (formerly Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch)</i>
PT Bank UOB Indonesia	USD30.000.000	-	8.312	<i>PT Bank UOB Indonesia</i>
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta (dahulu Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Cabang Jakarta)	USD35.000.000	-	28.849	<i>MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta (formerly Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch)</i>
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta (dahulu Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Cabang Jakarta)	JPY2.208.000.000	-	4.411	<i>MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta (formerly Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch)</i>
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta (dahulu Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Cabang Jakarta)	JPY2.392.000.000	-	16.904	<i>MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta (formerly Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch)</i>
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	USD40.000.000	-	2.597	<i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk</i>
		<b>138.333</b>	<b>89.788</b>	
31 Desember/ December 2017				
Instrumen	Jumlah nosional mata uang asing/ (jumlah penuh) <i>Notional amount foreign currency (full amount)</i>	Nilai wajar/Fair values		Instruments
		Piutang derivatif/ <i>Derivative receivables</i>	Utang derivatif/ <i>Derivative payables</i>	
<b>Terkait nilai tukar dan suku bunga</b>				
<b>Swap mata uang asing dan suku bunga</b>				
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta (dahulu Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Cabang Jakarta)	USD90.000.000	23.202	-	<i>Exchange and interest rate related Cross-currency swaps and interest rate MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch (formerly Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch)</i>
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta (dahulu Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Cabang Jakarta)	USD110.000.000	-	19.540	<i>MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch (formerly Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch)</i>
		<b>23.202</b>	<b>19.540</b>	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF (lanjutan)**

Perseroan menghadapi risiko pasar, terutama karena perubahan kurs mata uang asing dan tingkat bunga mengambang, dan menggunakan instrumen derivatif untuk lindung nilai atas risiko tersebut sebagai bagian dari manajemen risiko. Perusahaan tidak memiliki atau menerbitkan instrumen derivatif untuk tujuan-tujuan diperdagangkan.

**MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta (dahulu Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Cabang Jakarta)**

Perseroan melakukan kontrak swap mata uang dan suku bunga dengan MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta (dahulu Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Cabang Jakarta) dengan rincian sebagai berikut:

Dasar pinjaman/ Underlying loan	Nilai kontrak/ Contract value	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Jenis kontrak swap/ Type of swap contract
Kredit sindikasi I/ Syndication credit I	USD90.000.000	19 Juli/July 2017	25 September/ 25 September 2020	Swap mata uang dan suku bunga/ Cross currency interest rate swaps
Kredit sindikasi I/ Syndication credit I	USD110.000.000	19 Juli/July 2017	20 November/ 20 November 2020	Swap mata uang dan suku bunga/ Cross currency interest rate swaps
Kredit sindikasi II Tranche A/ Syndication credit II Tranche A	USD20.000.000	26 April/April 2018	3 Agustus/ 3 August 2021	Swap mata uang dan suku bunga/ Cross currency interest rate swaps
Kredit sindikasi II Tranche B/ Syndication credit II Tranche B	JPY2.208.000.000	26 April/April 2018	3 Agustus/ 3 August 2021	Swap mata uang dan suku bunga/ Cross currency interest rate swaps
Kredit sindikasi II Tranche A/ Syndication credit II Tranche A	USD35.000.000	26 April/April 2018	4 Oktober/ 4 October 2021	Swap mata uang dan suku bunga/ Cross currency interest rate swaps
Kredit sindikasi II Tranche B/ Syndication credit II Tranche B	JPY2.392.000.000	26 April/April 2018	4 Oktober/ 4 October 2021	Swap mata uang dan suku bunga/ Cross currency interest rate swaps

Perseroan membayar angsuran pokok dan bunga setiap 3 (tiga) bulan dengan tingkat suku bunga tetap berkisar antara 7,23%-7,74%, dan menerima dengan tingkat bunga mengambang LIBOR 3M+1,13% untuk kontrak swap mata uang dan suku bunga untuk Kredit Sindikasi I.

Perseroan membayar angsuran pokok dan bunga setiap 3 (tiga) bulan dengan tingkat suku bunga tetap berkisar antara 8,85%-9,85%, dan menerima dengan tingkat bunga mengambang 3M ICE LIBOR +0,9% untuk USD dan 3M JPY ICE LIBOR +0,5% untuk JPY, kontrak swap mata uang dan suku bunga untuk Kredit Sindikasi II.

**16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)**

The Company is exposed to market risks, primarily to changes in foreign currency exchange and floating interest rates, and uses derivative instruments to hedge these risks as part of its risk management activities. The Company does not hold or issue derivative instruments for trading purposes.

**MUFG Bank, Ltd., Jakarta branch (formerly Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch)**

The Company entered into cross currency swap contracts and interest rate swap contracts with MUFG Bank, Ltd., Jakarta branch (formerly Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch) with details as follows:

The Company pays quarterly principal installments and interest with annual fixed interest rate ranging from 7.23% - 7.74% and has received with a floating rate LIBOR 3M+1.13% for cross currency and interest rate swap for Syndication credit I.

The Company pays quarterly principal installments and interest with annual fixed interest rate ranging from 8.85% - 9.85% and has received with a floating rate 3M ICE LIBOR +0.9% for USD and 3M JPY ICE LIBOR +0.5% for JPY, cross currency and interest rate swap for Syndication credit II.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF (lanjutan)**

**16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS  
(continued)**

**PT Bank UOB Indonesia**

**PT Bank UOB Indonesia**

Perseroan melakukan kontrak swap mata uang dan suku bunga dengan PT Bank UOB Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

The Company entered into cross currency swap contracts and interest rate swap contracts with PT Bank UOB Indonesia as follows:

Dasar pinjaman/ Underlying loan	Nilai kontrak/ Contract value	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Jenis kontrak swap/ Type of swap contract
Kredit sindikasi II Tranche A/ Syndication credit II Tranche A	USD40.000.000	26 April/April 2018	3 Agustus/ 3 August 2021	Swap mata uang dan suku bunga/ Cross currency interest rate swaps
Kredit sindikasi II Tranche A/ Syndication credit II Tranche A	USD30.000.000	26 April/April 2018	4 Oktober/ 4 October 2021	Swap mata uang dan suku bunga/ Cross currency interest rate swaps

Perseroan membayar angsuran pokok dan bunga setiap 3 (tiga) bulan dengan tingkat suku bunga tetap berkisar antara 8,85%-9,85%, dan menerima dengan tingkat bunga mengambang 3M ICE LIBOR +0,9% untuk kontrak swap mata uang dan suku bunga.

The Company pays quarterly principal installments and interest with annual fixed interest rate ranging from 8.85% - 9.85% and has received with a floating rate 3M ICE LIBOR +0.9% for cross-currency and interest rate swap.

**PT Bank Danamon Indonesia Tbk**

**PT Bank Danamon Indonesia Tbk**

Perseroan melakukan kontrak swap mata uang dan suku bunga dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan rincian sebagai berikut:

The Company entered into cross currency swap contracts and interest rate swap contracts with PT Bank Danamon Indonesia Tbk as follows:

Dasar pinjaman/ Underlying loan	Nilai kontrak/ Contract value	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Jenis kontrak swap/ Type of swap contract
Bilateral loan/ Bilateral loan	USD40.000.000	29 Maret/March 2018	24 Desember/ 24 December 2021	Swap mata uang dan suku bunga/ Cross currency interest rate swaps

Perseroan membayar angsuran pokok dan bunga setiap 3 (tiga) bulan dengan tingkat suku bunga tetap berkisar sebesar 9,25%, dan menerima dengan tingkat bunga mengambang LIBOR 3M +1,15% untuk kontrak swap mata uang dan suku bunga.

The Company pays quarterly principal installments and interest with annual fixed interest rate of around 9.25% and has received with a floating rate LIBOR 3M+1.15% for cross-currency and interest rate swap.

Kontrak swap mata uang dan suku bunga Perseroan telah memenuhi kriteria dan berlaku efektif sebagai lindung nilai arus kas. Oleh karenanya, nilai wajar instrumen lindung nilai yang belum mempengaruhi laba rugi disajikan pada penghasilan komprehensif lainnya di bagian ekuitas. Aset atau liabilitas terkait yang timbul dari transaksi swap tersebut disajikan pada piutang atau utang derivatif.

The Company's cross currency and interest rate swap contracts are designated as effective cash flow hedge. Therefore, the fair value of the hedging instrument which has not yet affected the profit and loss is presented under other comprehensive income in the equity section. The related assets or liabilities arising from the swap transaction is presented under derivative receivables or payables.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN**

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	-	175.000
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III	-	150.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	100.000	600.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	1.400.000	1.400.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I	500.000	500.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II	850.000	850.000
	<u>2.850.000</u>	<u>3.675.000</u>
Dikurangi:		
Beban emisi yang belum diamortisasi:		
Saldo awal	9.749	8.766
Penambahan	1.845	4.232
Amortisasi (lihat Catatan 22)	(6.310)	(3.249)
	<u>5.284</u>	<u>9.749</u>
<b>Total</b>	<b><u>2.844.716</u></b>	<b><u>3.665.251</u></b>

**17. SECURITIES ISSUED**

*Continuing Bonds I Phase II*  
*Continuing Bonds I Phase III*  
*Continuing Bonds II Phase I*  
*Continuing Bonds II Phase II*  
*Continuing Bonds III Phase I*  
*Continuing Bonds III Phase II*

Less:  
*Unamortized issuance cost:*  
*Beginning balance*  
*Additions*  
*Amortization (refer to Note 22)*

**Total**

Surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan jatuh temponya sebagai berikut:

*Securities issued based on maturity profile, are as follows:*

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	<u>Year</u>
<u>Tahun</u>			
2018	-	825.000	2018
2019	1.120.000	1.120.000	2019
2020	710.000	710.000	2020
2021 dan sesudahnya	1.020.000	1.020.000	2021 and there after
	<u>2.850.000</u>	<u>3.675.000</u>	

**Obligasi Berkelanjutan I**

**Continuing Bonds I**

Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds I Phase II Year 2014

Pada tanggal 23 Mei 2014, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 ("Obligasi Berkelanjutan I Tahap II") dengan nilai nominal Rp600.000 yang terdiri atas dua seri sebagai berikut:

*On 23 May 2014, the Company issued Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds I Phase II Year 2014 ("Continuing Bonds I Phase II") with a nominal value of Rp600,000 which consists of two series as follows:*

<u>Obligasi/ Bonds</u>	<u>Nilai nominal/ Nominal value</u>	<u>Tingkat bunga tetap per tahun/ Fixed interest rate per annum</u>	<u>Jatuh tempo/ Due date</u>	<u>Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal installment</u>
Seri/Series A	425.000	10,70%	23 Mei/May 2017	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ <i>Bullet payment on due date</i>
Seri/Series B	175.000	10,85%	23 Mei/May 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ <i>Bullet payment on due date</i>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN  
(lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan I (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance  
Tahap II Tahun 2014 (lanjutan)

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimal 60% untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2017, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin adalah sejumlah Rp104.854 dan piutang sewa pembiayaan sejumlah Rp146 (lihat Catatan 5 dan 6). Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Mega Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap II.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. 1240/PEF-Dir/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 telah menaikkan peringkat dari idAA (Double A) menjadi idAA+ (Double A Plus) untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap II untuk periode 28 Juli 2016 sampai dengan 1 Juli 2017.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. RC-584/PEF-DIR/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap II untuk periode 11 Juli 2017 sampai dengan 1 Juli 2018.

Perseroan telah melunasi utang Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A sebesar Rp425.000 pada tanggal 22 Mei 2017.

Perseroan telah melunasi utang Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B sebesar Rp175.000 pada tanggal 21 Mei 2018.

Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance  
Tahap III Tahun 2015

Pada tanggal 9 Juni 2015, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 ("Obligasi Berkelanjutan I Tahap III") dengan rincian sebagai berikut:

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap per tahun/ Fixed interest rate per annum	Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal instalment
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III/Continuing Bonds I Phase III	150.000	9,75%	9 Juni/June 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

**17. SECURITIES ISSUED (continued)**

**Continuing Bonds I (continued)**

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds I Phase II  
Year 2014 (continued)

These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds I Phase II. As of 31 December 2017, the amount of consumer financing receivables that were pledged as security for bonds payable are Rp104,854 and finance lease receivables Rp146 (refer to Notes 5 and 6), respectively. If the amount of consumer financing receivables and finance lease receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Mega Tbk as trustee for Continuing Bonds I Phase II.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. 1240/PEF-Dir/VII/2016 dated 28 July 2016 has raised its rating from idAA (Double A) to idAA+ (Double A Plus) for the Continuing Bonds I Phase II for the period 28 July 2016 until 1 July 2017.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. RC-584/PEF-DIR/VII/2017 dated 12 July 2017 has rated the Continuing Bonds I Phase II as idAA+ (Double A plus) for the period 11 July 2017 until 1 July 2018.

The Company has settled the Continuing Bonds I Phase II Series A amounting to Rp425,000 on 22 May 2017.

The company has settled the Continuing Bonds I Phase II Series B amounting to Rp175,000 on 21 May 2018.

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds I Phase  
III Year 2015

On 9 June 2015, the Company issued Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds I Phase III Year 2015 ("Continuing Bonds I Phase III") with details as follows:



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN**  
**(lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan I (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance  
Tahap III Tahun 2015 (lanjutan)

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimal 60% untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap III dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2017, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin adalah sejumlah Rp35.938 dan piutang sewa pembiayaan sejumlah Rp54.062 (lihat Catatan 5 dan 6). Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Mega Tbk. selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap III.

PT Pefindo melalui suratnya No. 769/PEF-Dir/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 telah menetapkan kembali peringkat idAA (*Double A*) untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap III untuk periode 6 Maret 2015 sampai dengan 1 Maret 2016.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. 1244/PEF-Dir/IX/2015 tanggal 30 September 2015 telah menetapkan kembali peringkat idAA (*Double A*) untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap III untuk periode 30 September 2015 sampai dengan 1 September 2016.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. 1240/PEF-Dir/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 telah menaikkan peringkat dari idAA (*Double A*) menjadi idAA+ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap III untuk periode 28 Juli 2016 sampai dengan 1 Juli 2017.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. RC-584/PEF-DIR/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap III untuk periode 11 Juli 2017 sampai dengan 1 Juli 2018.

Perseroan telah melunasi utang Obligasi Berkelanjutan I Tahap III sebesar Rp150.000 pada tanggal 7 Juni 2018.

**17. SECURITIES ISSUED (continued)**

**Continuing Bonds I (continued)**

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds I Phase  
III Year 2015 (continued)

These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds I Phase III. As of 31 December 2017, the amount of consumer financing receivables that were pledged as security for bonds payable are Rp35,938 and finance lease receivables amounting to Rp54,062 (refer to Notes 5 and 6), respectively. If the amount of consumer financing receivables and finance lease receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Mega Tbk as trustee for Continuing Bonds I Phase III.

PT Pefindo through letter No. 769/PEF-Dir/V/2015 dated 19 May 2015 has rated the Continuing Bonds I Phase III as idAA (*Double A*) for the period 6 March 2015 until 1 March 2016.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. 1244/PEF-Dir/IX/2015 dated 30 September 2015 has rated the Continuing Bonds I Phase III as idAA (*Double A*) for the period 30 September 2015 until 1 September 2016.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. 1240/PEF-Dir/VII/2016 dated 28 July 2016 has raised its rating from idAA (*Double A*) to idAA+ (*Double A Plus*) for the Continuing Bonds I Phase III for the period 28 July 2016 until 1 July 2017.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. RC-584/PEF-DIR/VII/2017 dated 12 July 2017 has rated the Continuing Bonds I Phase III as idAA+ (*Double A plus*) for the period 11 July 2017 until 1 July 2018.

The company has settled the Continuing Bonds I Phase III amounting to Rp150,000 on 7 June 2018.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**17. SURAT BERTAHAGA YANG DITERBITKAN  
(lanjutan)**

**17. SECURITIES ISSUED (continued)**

**Obligasi Berkelanjutan II**

**Continuing Bonds II**

Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance  
Tahap I Tahun 2015

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase  
I Year 2015

Pada tanggal 11 Desember 2015, Perseroan telah memperoleh persyaratan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-596/D.04/2015 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 ("Obligasi Berkelanjutan II") dengan nilai nominal Rp600.000 yang terdiri atas dua seri sebagai berikut:

On 11 December 2015, the Company received the effective notification from the Financial Services Authority through its letter No. S-596/D.04/2015 in conjunction with continuing public offering of Mandiri Tunas Finance continuing Bonds II Phase I Year 2015 ("continuing Bonds II") with a nominal value of Rp600,000 which consists of two series as follows:

<b>Obligasi/ Bonds</b>	<b>Nilai nominal/ Nominal value</b>	<b>Tingkat bunga tetap per tahun/ Fixed interest rate per annum</b>	<b>Jatuh tempo/ Due date</b>	<b>Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal installment</b>
Seri/Series A	500.000	10,20%	18 Desember/ December 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/Series B	100.000	10,80%	18 Desember/ December 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin adalah sejumlah Rp60.000 dan Rp351.464 dan piutang sewa pembiayaan yang dijamin adalah sejumlah Rp nihil dan Rp8.536 (lihat Catatan 5 dan 6). Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Mega Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds II Phase I. As of 31 December 2018 and 2017, the amount of consumer financing receivables that was pledged as security for bonds payable are Rp60,000 and Rp351,464, respectively and finance lease receivables that was pledged are Rp nil and Rp8,536 (refer to Notes 5 and 6), respectively. If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Mega Tbk as trustee for Continuing Bonds II Phase I.

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others are collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bonds principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company's asset, except for Company's normal business transactions.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

The Company has complied with the covenants on the trustee agreements.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN**  
**(lanjutan)**

**17. SECURITIES ISSUED (continued)**

**Obligasi Berkelanjutan II (lanjutan)**

**Continuing Bonds II (continued)**

Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance  
Tahap I Tahun 2015 (lanjutan)

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase  
I Year 2015 (continued)

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. RC-584/PEF-DIR/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I untuk periode 11 Juli 2017 sampai dengan 1 Juli 2018.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. RC-584/PEF-DIR/VII/2017 dated 12 July 2017 has rated the Continuing Bonds II Phase I as idAA+ (Double A plus) for the period 11 July 2017 until 1 July 2018.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No.RC-747/PEF-DIR/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I untuk periode 10 Juli 2018 sampai dengan 1 Juli 2019.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No.RC-747/PEF-DIR/VII/2018 dated 11 July 2018 has rated the Continuing Bonds II Phase I as idAA+ (Double A plus) for the period 10 July 2018 until 1 July 2019.

Perseroan telah melunasi utang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A sebesar Rp500.000 pada tanggal 17 Desember 2018

The Company has settled the Continuing Bonds I Phase III amounting to Rp500,000 on 17 December 2018.

Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance  
Tahap II Tahun 2016

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase  
II Year 2016

Pada tanggal 1 Juni 2016, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap II") dengan rincian sebagai berikut:

On 1 June 2016, the Company issued Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase II Year 2016 ("Continuing Bonds II Phase II") with details as follows:

<b>Obligasi/ Bonds</b>	<b>Nilai nominal/ Nominal value</b>	<b>Tingkat bunga tetap per tahun/ Fixed interest rate per annum</b>	<b>Jatuh tempo/ Due date</b>	<b>Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal installment</b>
Seri/Series A	720.000	8,95%	1 Juni/June 2019	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/Series B	680.000	9,25%	1 Juni/June 2021	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin adalah sejumlah Rp786.932 dan Rp751.903 dan piutang sewa pembiayaan yang dijamin adalah sejumlah Rp53.068 dan Rp88.097 (lihat Catatan 5 dan 6). Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Mega Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.

These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds II Phase II. As of 31 Desember 2018 and 2017, the amount of consumer financing receivables that was pledged as security for bonds payable are Rp786,932 and Rp751,903, respectively and finance lease receivables that was pledged are Rp53,068 and Rp88,097 (refer to Notes 5 and 6), respectively. If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Mega Tbk as trustee for Continuing Bonds II Phase II.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**17. SURAT BERTAHAP YANG DITERBITKAN  
(lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan II (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance  
Tahap II Tahun 2016 (lanjutan)

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. 1240/PEF-Dir/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 telah menaikkan peringkat dari idAA (*Double A*) menjadi idAA+ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II untuk periode 28 Juli 2016 sampai dengan 1 Juli 2017.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. RC-584/PEF-DIR/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II untuk periode 11 Juli 2017 sampai dengan 1 Juli 2018.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No.RC-747/PEFDIR/ VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II untuk periode 10 Juli 2018 sampai dengan 1 Juli 2019.

**17. SECURITIES ISSUED (continued)**

**Continuing Bonds II (continued)**

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase  
II Year 2016 (continued)

The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others are collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bonds principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company's asset, except for Company's normal business transactions.

The Company has complied with the covenants on the trustee agreements.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. 1240/PEF-Dir/VII/2016 dated 28 July 2016 has raised its rating from idAA (*Double A*) to idAA+ (*Double A Plus*) for the Continuing Bonds II Phase II for the period 28 July 2016 until 1 July 2017.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. RC-584/PEF-DIR/VII/2017 dated 12 July 2017 has rated the Continuing Bonds II Phase II as idAA+ (*Double A plus*) for the period 11 July 2017 until 1 July 2018.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No.RC-747/PEF-DIR/VII/2018 dated 11 July 2018 has rated the Continuing Bonds II Phase II as idAA+ (*Double A plus*) for the period 10 July 2018 until 1 July 2019.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN  
(lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan III**

Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance  
Tahap I Tahun 2016

Pada tanggal 7 Oktober 2016, Perseroan telah memperoleh persyaratan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No.S-543/D.04/2016 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016 ("Obligasi Berkelanjutan III") dengan nilai nominal Rp500.000 yang terdiri atas dua seri sebagai berikut:

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap per tahun/ Fixed interest rate per annum
Seri/Series A	400.000	8,20%
Seri/Series B	100.000	8,55%

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin adalah sejumlah Rp286.708 dan Rp268.893 dan piutang sewa pembiayaan yang dijamin adalah sejumlah Rp13.292 dan Rp31.107 (lihat Catatan 5 dan 6). Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Mega Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I.

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

**17. SECURITIES ISSUED (continued)**

**Continuing Bonds III**

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds III Phase  
I Year 2016

On 7 October 2016, the Company received the effective notification from the Financial Services Authority through its letter No. S-543/D.04/2016 in conjunction with continuing public offering of Mandiri Tunas Finance continuing Bonds III Phase I Year 2016 ("Continuing Bonds III") with a nominal value of Rp500,000 which consists of two series as follows:

Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal installment
7 Oktober/ October 2019	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
7 Oktober/ October 2021	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds III Phase I. As of 31 December 2018 and 2017, the amount of consumer financing receivables that was pledged as security for bonds payable are Rp286,708 and Rp268,893, respectively and finance lease receivables that was pledged are Rp13,292 and Rp31,107 (refer to Notes 5 and 6), respectively. If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Mega Tbk as trustee for Continuing Bonds III Phase I.

The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others are collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bonds principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company's asset, except for Company's normal business transactions.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**17. SURAT BERTAHAP YANG DITERBITKAN  
(lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan III (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance  
Tahap I Tahun 2016 (lanjutan)

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

PT Pefindo telah menetapkan peringkat idAA+ (*Double A plus*) terhadap obligasi berkelanjutan sesuai suratnya No. 1238/PEF-Dir/RC/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 untuk periode 28 Juli 2016 sampai dengan 1 Juli 2017.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. RC-583/PEF-DIR/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I untuk periode 11 Juli 2017 sampai dengan 1 Juli 2018.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. RC-747/PEF-DIR/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I untuk periode 10 Juli 2018 sampai dengan 1 Juli 2019.

Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance  
Tahap II Tahun 2017

Pada tanggal 6 Juni 2017 Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017 ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap II") dengan rincian sebagai berikut:

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap per tahun/ Fixed interest rate per annum	Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal installment
Seri/Series A	610.000	8,5%	6 Juni /6 June 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/Series B	240.000	8,85%	6 Juni /6 June 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

**17. SECURITIES ISSUED (continued)**

**Continuing Bonds III (continued)**

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds III Phase  
I Year 2016 (continued)

The Company has complied with the covenants on the trustee agreements.

PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (*Double A plus*) based on its report No. 1238/PEF-Dir/RC/VII/2016 dated 28 July 2016 for period 28 July 2016 until 1 July 2017.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. RC-583/PEF-DIR/VII/2017 dated 12 July 2017 has rated the Continuing Bonds III Phase I as idAA+ (*Double A plus*) for the period 11 July 2017 until 1 July 2018.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. RC-747/PEF-DIR/VII/2018 dated 11 July 2018 has rated the Continuing Bonds III Phase I as idAA+ (*Double A plus*) for the period 10 July 2018 until 1 July 2019.

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds III Phase  
II Year 2017

On 6 June 2017, the Company issued Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds III Phase II Year 2017 ("Continuing Bonds III Phase II") with details as follows:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**17. SURAT BERTAHAP YANG DITERBITKAN  
(lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan III (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance  
Tahap II Tahun 2017 (lanjutan)

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, piutang pembiayaan konsumen yang dijamin adalah sejumlah Rp509.557 dan Rp490.249 dan piutang sewa pembiayaan yang dijamin adalah sejumlah Rp443 dan Rp19.751 (lihat Catatan 5 dan 6). Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Mega Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II.

Dalam perjanjian perwalianamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. RC-583/PEF-DIR/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 telah menetapkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II untuk periode 11 Juli 2017 sampai dengan 1 Juli 2018.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No.RC-747/PEF-DIR/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II untuk periode 10 Juli 2018 sampai dengan 1 Juli 2019.

**17. SECURITIES ISSUED (continued)**

**Continuing Bonds III (continued)**

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds III Phase  
II Year 2017 (continued)

These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds III Phase II. As of 31 December 2018 and 2017, the amount of consumer financing receivables that was pledged as security for bonds payable are Rp509,557 and Rp490,249, respectively and finance lease receivables that was pledged are Rp443 and Rp19,751 (refer to Notes 5 and 6), respectively. If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Mega Tbk as trustee for Continuing Bonds III Phase II.

The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others, collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bonds principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company's asset, except for Company's normal business transactions.

The Company has complied with the covenants on the trustee agreements.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. RC-583/PEF-DIR/VII/2017 dated 12 July 2017 has rated the Continuing Bonds III Phase II as idAA+ (*Double A plus*) for the period 11 July 2017 until 1 July 2018.

In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No.RC-747/PEF-DIR/VII/2018 dated 11 July 2018 has rated the Continuing Bonds III Phase II as idAA+ (*Double A plus*) for the period 10 July 2018 until 1 July 2019.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**18. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN**

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2018	2017	
Biaya jasa kini	10.989	8.367	Current service costs
Biaya bunga	5.312	4.160	Interest costs
Biaya jasa lalu	291	470	Past service costs
	16.592	12.997	
Biaya pesangon pemutusan hubungan kerja	1.750	1.445	Termination
<b>Total</b>	<b>18.342</b>	<b>14.442</b>	<b>Total</b>

**18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION**

The amounts recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income, are as follows:

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movements in employee benefits obligation in the statement of financial position are as follows:

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	
Saldo awal	73.845	50.135	Beginning balance
Penyisihan pada laba rugi	18.342	14.442	Provision in profit or loss
Penyisihan pada penghasilan komprehensif lain	(6.730)	13.162	Provision in other comprehensive income
Pembayaran tahun berjalan	(5.433)	(3.894)	Payment during the year
<b>Saldo akhir</b>	<b>80.024</b>	<b>73.845</b>	<b>Ending balance</b>

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movements of present value of employee benefit obligation presented in the statement of financial position, are as follows:

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	
Saldo awal	73.845	50.135	Beginning balance
Biaya jasa kini	10.989	8.367	Current service costs
Biaya bunga	5.312	4.160	Interest costs
Biaya jasa lalu	291	470	Past service cost
Pembayaran tahun berjalan	(5.433)	(3.894)	Payments during the year
Biaya pesangon pemutusan hubungan kerja	1.750	1.445	Termination
(Keuntungan)/kerugian pada kewajiban aktuarial:			Actuarial (gains)/losses on obligation:
Perbedaan historis	5.403	4.443	Experience adjustment
Asumsi keuangan	(12.133)	8.719	Financial assumption
<b>Saldo akhir</b>	<b>80.024</b>	<b>73.845</b>	<b>Ending balance</b>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**18. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN**  
**(lanjutan)**

Mutasi kerugian aktuarial yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, bruto pajak tangguhan sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2018	2017	
Saldo awal	32.755	19.593	Beginning balance
Kerugian aktuarial yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain	(6.730)	13.162	Actuarial losses charged to other comprehensive income
<b>Saldo akhir</b>	<b>26.025</b>	<b>32.755</b>	<b>Ending balance</b>

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 didasarkan atas estimasi perhitungan aktuarial yang tercantum pada laporan PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dengan menggunakan metode *projected unit credit* dalam laporan aktuariannya tanggal 2 Januari 2019 dan 2 Januari 2018. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan aktuaris independen adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	
Tingkat diskonto	8,4% per tahun/per annum	7,4% per tahun/per annum	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	7% per tahun/per annum	7% per tahun/per annum	Salary increment rate
Tingkat kematian	TMI 3	TMI 3	Rate of mortality
Tingkat cacat	10% dari/from TMI 3	10% dari/from TMI 3	Rate of disability
Tingkat pengunduran diri	7% per tahun pada usia sampai dengan 40 tahun dan berkurang hingga 0,00% pada usia 55 tahun/ 7% per annum up to 40 years old and decrease linearly up to 0.00% at 55 years old	7% per tahun pada usia sampai dengan 40 tahun dan berkurang hingga 0,00% pada usia 55 tahun/ 7% per annum up to 40 years old and decrease linearly up to 0.00% at 55 years old	Rate of resignations
Tingkat pensiun	100,00% usia pensiun normal/ 100,00% at normal retirement age	100,00% usia pensiun normal/ 100,00% at normal retirement age	Rate of retirements

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji sebesar 1%, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan: (tidak diaudit)

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in discount rates and salary increment rate of 1%, with all other variables held constant, of the present value of employee benefits obligation: (unaudited)

	31 Desember/December 2018				
	Tingkat diskonto/ Discount rate		Tingkat kenaikan gaji/ Salary increment rate		
	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Dampak pada nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan	(7.226)	8.337	8.851	(7.796)	Effect on present value of employee benefit obligation



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**18. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)**

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji sebesar 1%, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan: (tidak diaudit) (lanjutan)

**18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION  
(continued)**

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in discount rates and salary increment rate of 1%, with all other variables held constant, of the present value of employee benefits obligation: (unaudited) (continued)

	31 Desember/December 2017				
	Tingkat diskonto/ Discount rate		Tingkat kenaikan gaji/ Salary increment rate		
	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Dampak pada nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan	(7.106)	8.282	8.470	(7.404)	Effect on present value of employee benefit obligation

Analisa profil jatuh tempo pembayaran imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

The maturity profile analysis of the employee benefits payments as of 31 December 2018 and 2017, are as follows:

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	
1 tahun	5.582	4.132	1 years
2 - 5 tahun	16.516	14.039	2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	168.894	179.888	More than 5 years
<b>Saldo akhir</b>	<b>190.992</b>	<b>198.059</b>	<b>Ending balance</b>

Durasi rata-rata tertimbang dari nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan diakhir periode pelaporan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah 13,68 dan 14,87 tahun.

The weighted average duration of the present value of employee benefits obligation at the end of reporting period as of 31 December 2018 and 2017 is 13.68 and 14.87 years, respectively.

**19. MODAL SAHAM**

Komposisi pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**19. SHARE CAPITAL**

The composition of the Company's shareholders as of 31 December 2018 and 2017, are as follows:

Pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai/ Value	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Shareholders
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.275.000.000	127.500	51,00	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Tunas Ridean Tbk	1.225.000.000	122.500	49,00	PT Tunas Ridean Tbk
	<b>2.500.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100,00</b>	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**20. PENGGUNAAN LABA**

Cadangan wajib telah dibentuk sesuai dengan Undang-undang No. 40/2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perseroan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan wajib untuk ditentukan penggunaannya sebesar sekurang-kurangnya 20,00% dari jumlah modal Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk mencapai cadangan wajib minimum tersebut. Saldo cadangan wajib pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp50.000.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Maret 2018 memutuskan untuk menyetujui pembagian dividen final tahun 2017 sejumlah Rp35.024 dari laba neto tahun 2017.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 10 April 2017 memutuskan untuk menyetujui pembagian dividen final tahun 2016 sejumlah Rp33.537 dari laba neto tahun 2016.

**21. PENDAPATAN**

**a. Pembiayaan konsumen**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2018	2017
<b>Pihak ketiga</b>		
Realisasi pendapatan pembiayaan konsumen	1.072.092	874.342
Amortisasi biaya transaksi dan yield enhancing income	198.844	133.908
Pendapatan dari piutang yang mengalami penurunan nilai	7.409	7.230
Pendapatan administrasi dari pembiayaan bersama	657.588	813.935
	<u>1.935.933</u>	<u>1.829.415</u>
<b>Pihak berelasi</b>		
Realisasi pendapatan pembiayaan konsumen	786	1.009
	<u>1.936.719</u>	<u>1.830.424</u>

Lihat Catatan 26c untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

**20. PROFIT DISTRIBUTIONS**

A general reserve has been established in accordance with the Indonesian Limited Company Law No. 40/2007 which requires Indonesian companies to set up a general reserve amounting to at least 20.00% of the Company's issued and paid up share capital. There is no set period of time over which this amount should be accumulated. The balance of the general reserve as of 31 December 2018 and 2017 is Rp50,000.

The Annual General Shareholders Meeting on 9 March 2018 resolved to approve the declaration of 2017 final dividends amounting to Rp35,024 from the 2017 net income.

The Annual General Shareholders Meeting on 10 April 2017 resolved to approve the declaration of 2016 final dividends amounting to Rp33,537 from the 2016 net income.

**21. REVENUE**

**a. Consumer financing**

<b>Third parties</b>
Realized consumer financing income
Amortization of transaction cost and yield enhancing income
Income from impaired asset
Administration income from joint income
<b>Related parties</b>
Realized consumer financing income

Refer to Note 26c for details of balances and transactions with related parties.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. PENDAPATAN (lanjutan)**

**21. REVENUE (continued)**

**b. Sewa pembiayaan**

**b. Finance lease**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2018	2017	
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
Realisasi pendapatan sewa pembiayaan	356.589	176.879	Realized financial lease income
Amortisasi biaya transaksi dan yield enhancing income	10.671	2.104	Amortization of transaction cost and yield enhancing income
Pendapatan administrasi dari pembiayaan bersama	19.042	-	Administration income from joint financing
	<b>386.302</b>	<b>178.983</b>	

**c. Anjak piutang**

**c. Factoring**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2018	2017	
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
Realisasi pendapatan anjak piutang	96	-	Realized financial factoring income

**d. Bunga**

**d. Interest**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ For the ended 31 December		
	2018	2017	
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
Deposito berjangka dan rekening koran	3.017	2.281	Time deposits and current accounts
<b>Pihak berelasi</b>			<b>Related parties</b>
Deposito berjangka dan rekening koran	9.099	6.755	Time deposits and current accounts
	<b>12.116</b>	<b>9.036</b>	

Lihat Catatan 26c untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26c for details of balances and transactions with related parties.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**21. PENDAPATAN (lanjutan)**

**e. Lain-lain - neto**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2018	2017
<b>Pihak ketiga</b>		
Komisi asuransi	235.876	233.753
Pendapatan akseptasi klaim	226.772	178.038
Pendapatan penagihan	72.158	71.715
Pendapatan penalti	58.007	47.844
Lain-lain	71.503	73.318
	664.316	604.668
<b>Pihak berelasi</b>		
Pendapatan akseptasi klaim	90.675	110.893
Pendapatan jasa pengurusan pembiayaan	29.968	4.360
	120.643	115.253
	<b>784.959</b>	<b>719.921</b>

Komisi asuransi merupakan pendapatan premi asuransi yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan pembiayaan konsumen. Pendapatan akseptasi klaim merupakan pendapatan yang diterima Perseroan sehubungan dengan kepengurusan administrasi penerimaan asuransi. Utang kepada perusahaan asuransi dicatat sebagai utang usaha di laporan posisi keuangan (lihat Catatan 12).

Lihat Catatan 26c untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

**22. BEBAN KEUANGAN**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2018	2017
<b>Pihak ketiga</b>		
Bunga pinjaman bank	776.020	550.788
Bunga surat berharga yang diterbitkan		
Utang obligasi	315.882	326.103
Administrasi bank	4.673	3.789
Rugi selisih kurs	17.853	3.124
Amortisasi biaya emisi surat berharga yang diterbitkan:		
Utang obligasi (lihat Catatan 17)	6.310	3.249
Lain-lain	1.578	3.069
	1.122.316	890.122
<b>Pihak berelasi</b>		
Bunga pinjaman bank	137.694	145.320
	<b>1.260.010</b>	<b>1.035.442</b>

Lihat Catatan 26d untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

**21. REVENUE (continued)**

**e. Others - net**

<b>Third parties</b>
Insurance commissions
Acceptance claim income
Collection income
Penalty income
Others
<b>Related parties</b>
Acceptance claim income
Financing management services income

Insurance commissions represents insurance premiums income received by the Company in relation to consumer financing activities. Acceptance claim income represents income received by the Company in relation to handling the administrative insurance acceptance. The related payables to insurance companies are recorded as trade payables in the statement of financial position (refer to Note 12).

Refer to Note 26c for details of balances and transactions with related parties.

**22. FINANCE CHARGES**

<b>Third parties</b>
Interest on bank loans
Securities issued interest:
Bonds payable
Bank administration
Forex loss
Amortization of securities issuance cost:
Bonds payable (refer to Note 17)
Others
<b>Related parties</b>
Interest on bank loans

Refer to Note 26d for details of balances and transactions with related parties.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN**

**23. SALARIES AND BENEFITS EXPENSES**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2018	2017	
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
Gaji dan tunjangan	476.640	403.773	Salaries and allowances
Imbalan pasca kerja karyawan	12.909	10.548	Post employment benefits
Biaya pesangon	6.324	2.888	Termination
	495.873	417.209	
<b>Pihak berelasi</b>			<b>Related parties</b>
Gaji dan tunjangan	16.537	14.507	Salaries and allowances
Tantiem	6.570	6.096	Tantiem
	23.107	20.603	
	<b>518.980</b>	<b>437.812</b>	

Lihat Catatan 26d untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 26d for details of balances and transactions with related parties.

**24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

**24. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2018	2017	
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
Biaya penagihan	152.072	171.328	Collection fee
Penyusutan aset tetap (lihat Catatan 10)	34.574	25.346	Depreciation of fixed assets (refer to Note 10)
Sewa	24.275	26.884	Rent
Cadangan atas tagihan kelebihan pajak	22.000	-	Allowance for claims for tax refund
Jasa pihak ketiga	18.620	11.255	Third parties service
Perjalanan dinas	17.829	13.781	Travelling
Perbaikan dan pemeliharaan	14.221	12.217	Repairs and maintenance
Komunikasi	13.955	13.325	Communications
Keamanan	11.955	11.293	Security
Rekrutmen dan pelatihan	9.137	7.707	Recruitment and training
Jasa profesional	8.475	3.734	Professional fees
Iuran OJK	8.134	6.122	OJK fees
Listrik dan air	6.577	6.197	Utilities
Alat tulis dan cetakan	5.864	5.501	Stationaries and printings
Jamuan bisnis	5.512	4.577	Corporate entertainment
Lain-lain	31.967	24.798	Others
	385.167	344.065	
<b>Pihak berelasi</b>			<b>Related parties</b>
Sewa	13.388	9.998	Rent
	<b>398.555</b>	<b>354.063</b>	

Lain-lain merupakan beban legal, perijinan, piknik perayaan, iklan, marketing, asuransi, sumbangan, publikasi, koran, ekspedisi dan majalah.

Others represent legal, corporate event, advertising, marketing, insurance expenses, donation, publication, newspaper, expedition and magazine.

Lihat Catatan 26d untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 26d for details of balances and transactions with related parties.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**25. LABA PER SAHAM**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December	
	2018	2017
Laba tahun berjalan	403.320	350.242
Jumlah saham biasa yang beredar (dalam ribuan) (lihat Catatan 19)	2.500.000	2.500.000
<b>Laba per saham dasar (nilai penuh)</b>	<b>161</b>	<b>140</b>

**25. EARNINGS PER SHARE**

*Income for the year*

*Number of ordinary shares  
outstanding (in thousands)  
(refer to Note 19)*

**Basic earnings per share  
(full amount)**

**26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

Sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

**Pihak berelasi/Related parties**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
PT Tunas Ridean Tbk.  
PT Bumi Daya Plaza

PT Bank Mandiri Taspen  
(dahulu/formerly PT Bank Mandiri Taspen Pos)  
PT AXA Mandiri Financial Service

PT Mandiri AXA General Insurance

PT Mandiri Sekuritas

PT Bank Syariah Mandiri

Dana Pensiun Bank Mandiri  
DPLK Bank Mandiri  
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  
PT Adhi Karya  
PT Taspen (Persero)  
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)  
PT Asuransi Jasa Raharja Putera  
PT Perikanan Nusantara  
PT Jamkrindo  
PT Berdikari (Persero)  
PT Balai Pustaka (Persero)  
PT Wahana Optima Permai

Personil manajemen kunci Grup

**26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

The nature of relationships with related parties are as follows:

**Sifat hubungan dengan pihak berelasi/  
Nature of relationship with the related parties**

Pemegang saham mayoritas/Controlling shareholder  
Pemegang saham minoritas/Minority shareholder  
Mayoritas dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk./  
Majority owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Mayoritas dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk./  
Majority owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Mayoritas dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk./  
Majority owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Mayoritas dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk./  
Majority owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Mayoritas dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk./  
Majority owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Mayoritas dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk./  
Majority owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Bank Mandiri sebagai pendiri/Bank Mandiri as founder  
Bank Mandiri sebagai pendiri/Bank Mandiri as founder  
Badan usaha milik negara/State-owned company  
Badan usaha milik negara/State-owned company  
Badan usaha milik negara/State-owned company  
Badan usaha milik negara/State-owned company  
Badan usaha milik negara/State-owned company  
Badan usaha milik negara/State-owned company  
Badan usaha milik negara/State-owned company  
Badan usaha milik negara/State-owned company  
Badan usaha milik negara/State-owned company  
Badan usaha milik negara/State-owned company  
Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank  
Mandiri/Controlled by Bank Mandiri's Pension Fund  
Personil manajemen kunci Group Bank Mandiri/  
Key management personnel of Bank Mandiri Group

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Dalam kegiatan normal usaha, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Transaksi dengan pihak berelasi tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak tidak berelasi. Perseroan mendapatkan suku bunga yang serupa untuk fasilitas pinjaman bank dengan pihak berelasi dan pihak ketiga. Perseroan juga menggunakan suku bunga yang serupa antara pihak berelasi dan pihak ketiga dalam rangka pemberian piutang pembiayaan konsumen.

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

**a. Aset**

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017
<b>Kas dan setara kas</b>		
<b>Kas pada bank</b> (lihat Catatan 4)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	85.763	79.640
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	384	1.734
PT Bank Mandiri Taspen	7	7
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	27
	<u>86.154</u>	<u>81.408</u>
<b>Deposito berjangka</b>		
PT Bank Mandiri Taspen	50.000	50.000
<b>Piutang pembiayaan konsumen</b>		
Personel manajemen kunci Grup	5.775	7.953
PT Balai Pustaka	43	-
PT Perikanan Nusantara	4	4
	<u>5.822</u>	<u>7.957</u>
<b>Piutang lain-lain</b> (lihat Catatan 8)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	555.645	502.570
PT Jamkrindo	50.598	7.309
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	13.352	53.632
PT Tunas Ridean Tbk	620	620
	<u>620.215</u>	<u>564.131</u>

**26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)**

In normal course of business, the Company enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. Transactions with related parties were conducted under terms and conditions similar to those granted to third parties. The Company obtained similar interest rate for bank loan facilities from related parties and third parties. The Company also used similar interest rate between related parties and third parties for the consumer financing receivables.

Balances and transactions with related parties are as follows:

**a. Assets**

<b>Cash and cash equivalents</b>
<b>Cash in banks</b> (refer to Note 4)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
<b>Time deposits</b>
PT Bank Mandiri Taspen
<b>Consumer financing receivable</b>
Group's key management personnel
PT Balai Pustaka
PT Perikanan Nusantara
<b>Other receivables</b> (refer to Note 8)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Jamkrindo
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
PT Tunas Ridean Tbk



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**a. Aset (lanjutan)**

	<b>31 Desember/ December 2018</b>	<b>31 Desember/ December 2017</b>
<b>Sewa dibayar di muka</b> (lihat Catatan 11)		
PT Bumi Daya Plaza	2.227	1.337
PT Wahana Optima Permai	-	9
	<u>2.227</u>	<u>1.346</u>
<b>Total aset</b> <b>kepada pihak berelasi</b>	<b><u>764.418</u></b>	<b><u>704.842</u></b>
Persentase terhadap total aset	4,37%	4,78%

Piutang lain-lain kepada pihak berelasi kepada PT Tunas Ridean Tbk, PT Jamkrindo, dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terutama berhubungan dengan transaksi usaha.

Piutang lain-lain kepada pihak berelasi kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan pembayaran ke dealer untuk porsi pembiayaan bersama yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perseroan.

**b. Liabilitas**

	<b>31 Desember/ December 2018</b>	<b>31 Desember/ December 2017</b>
<b>Utang lain-lain</b> (lihat Catatan 13)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	84.498	30.104
PT Tunas Ridean Tbk	240	240
	<u>84.738</u>	<u>30.344</u>
<b>Beban yang masih</b> <b>harus dibayar</b> (lihat Catatan 14)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.828	1.227
<b>Pinjaman bank</b> (lihat Catatan 15)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.379.632	1.602.605

**26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)**

Balances and transactions with related parties are as follows: (continued)

**a. Assets (continued)**

	<b>31 Desember/ December 2018</b>	<b>31 Desember/ December 2017</b>
<b>Prepaid rent</b> (refer to Note 11)		
PT Bumi Daya Plaza	2.227	1.337
PT Wahana Optima Permai	-	9
	<u>2.227</u>	<u>1.346</u>
<b>Total assets associated with</b> <b>related parties</b>	<b><u>764.418</u></b>	<b><u>704.842</u></b>
Persentase terhadap total aset	4,37%	4,78%

Other receivables from related parties to PT Tunas Ridean Tbk, PT Jamkrindo, and PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) are in respect of trade activities.

Other receivables from related party to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk represent payments to dealers for joint financing portion which was paid in advance by the Company.

**b. Liabilities**

	<b>31 Desember/ December 2018</b>	<b>31 Desember/ December 2017</b>
<b>Other payables</b> (refer to Note 13)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	84.498	30.104
PT Tunas Ridean Tbk	240	240
	<u>84.738</u>	<u>30.344</u>
<b>Accrued expenses</b> (refer to Note 14)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.828	1.227
<b>Bank loans</b> (refer to Note 15)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.379.632	1.602.605

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)**

**b. Liabilitas (lanjutan)**

**b. Liabilities (continued)**

	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2017	
<b>Surat berharga yang diterbitkan</b> (lihat Catatan 17)			<b>Securities issued</b> (refer to Note 17)
PT Taspen (Persero)	694.000	794.000	PT Taspen (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	183.700	273.700	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Dana Pensiun Bank Mandiri	108.000	133.000	Dana Pensiun Bank Mandiri
PT AXA Mandiri Financial Service	24.000	24.000	PT AXA Mandiri Financial Service
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	3.000	3.000	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
PT Bumi Daya Plaza	2.000	2.000	PT Bumi Daya Plaza
PT Mandiri AXA General Insurance	-	2.000	PT Mandiri AXA General Insurance
	1.014.700	1.231.700	
<b>Total liabilitas kepada pihak berelasi</b>	<b>2.480.898</b>	<b>2.865.876</b>	<b>Total liabilities associated with related parties</b>
Persentase terhadap total liabilitas	16,15%	22,09%	Percentage to total liabilities

Utang lain-lain kepada pihak berelasi terutama berhubungan dengan utang angsuran pokok termasuk bunga kepada pemberi pembiayaan bersama.

Other payables to related parties are mainly in respect of payables related with installments including interest to joint financing principals providers.

**c. Pendapatan**

**c. Revenue**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2018	2017	
<b>Pembiayaan konsumen</b> (lihat Catatan 21a)			<b>Consumer financing</b> (refer to Note 21a)
Personil manajemen kunci Grup	758	1.005	Group's key management personnel
PT Balai Pustaka	25	-	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Perikanan Nusantara	3	4	PT Perikanan Nusantara
	786	1.009	
<b>Bunga</b> (lihat Catatan 21d)			<b>Interest</b> (refer to Note 21d)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.651	2.631	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen	3.438	4.106	PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10	18	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
	9.099	6.755	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)**

**c. Pendapatan (lanjutan)**

**c. Revenue (continued)**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2018	2017	
<b>Lain-lain (lihat Catatan 21e)</b>			<b>Others (refer to Note 21e)</b>
PT Asuransi Jasa			PT Asuransi Jasa
Indonesia (Persero)	83.619	102.053	Indonesia (Persero)
PT Bank Syariah Mandiri	29.968	4.360	PT Bank Syariah Mandiri
PT Mandiri AXA			PT Mandiri AXA
General Insurance	5.010	8.175	General Insurance
PT Jamkrindo	2.046	665	PT Jamkrindo
	120.643	115.253	
<b>Total pendapatan dari pihak berelasi</b>	<b>130.528</b>	<b>123.017</b>	<b>Total revenue associated with related parties</b>
Persentase terhadap total pendapatan	4,18%	4,49%	Percentage to total revenue

Pendapatan bunga berkaitan dengan penempatan dana kepada pihak berelasi dengan tingkat bunga 0,00% - 6,75% pada tahun 2018 (2017: 0,00% - 8,50%).

Interest income relates to funds placement to related parties with interest rates ranging from 0.00% - 6.75% in 2018 (2017: 0.00% - 8.50%).

**d. Beban**

**d. Expenses**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2018	2017	
<b>Beban keuangan</b> (lihat Catatan 22)			<b>Financial charges</b> (refer to Note 22)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	137.694	145.320	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
<b>Beban gaji dan tunjangan</b> (lihat Catatan 23)			<b>Salaries and benefits</b> (refer to Note 23)
<b>Kompensasi Dewan</b>			<b>Boards of Commissioners and Directors compensation</b>
<b>Komisaris dan Direksi</b>			<b>Board of Commissioners</b>
Dewan Komisaris			Short-term employee benefits:
Imbalan kerja jangka pendek:			Salaries and allowances
Gaji dan tunjangan	3.628	3.471	Tantiem
Tantiem	1.553	1.509	Directors
Direksi			Short-term employee benefits:
Imbalan kerja jangka pendek:			Salaries and allowances
Gaji dan tunjangan	12.909	11.036	Tantiem
Tantiem	5.017	4.587	
	23.107	20.603	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK  
BERELASI (lanjutan)**

**26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH  
RELATED PARTIES (continued)**

**d. Beban (lanjutan)**

**d. Expenses (continued)**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2018	2017	
Beban umum dan administrasi (lihat Catatan 24)			<b>General and administrative (refer to Note 24)</b>
Beban sewa gedung			<b>Building rental</b>
PT Bumi Daya Plaza	13.378	9.880	PT Bumi Daya Plaza
PT Wahana Optima Permai	10	118	PT Wahana Optima Permai
	13.388	9.998	
<b>Total beban kepada pihak berelasi</b>	<b>174.189</b>	<b>175.921</b>	<b>Total expenses associated with related parties</b>
Persentase terhadap total beban	6,75%	7,75%	Percentage to total expenses

**27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

**27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

**Pendahuluan dan gambaran umum**

**Introduction and overview**

Perseroan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko sebagai berikut:

The Company has exposure to the following risks:

- Risiko pasar
- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko operasional

- Market risk
- Credit risk
- Liquidity risk
- Operational risk

**Kerangka manajemen risiko**

**Risk management framework**

Konsep manajemen risiko Perseroan adalah mengacu dari konsep *Enterprise Risk Management* (ERM) yang digunakan oleh induk entitas Perseroan yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan operasional Perseroan. ERM adalah sebuah proses pengelolaan risiko yang melekat dalam proses bisnis Perseroan, artinya pengelolaan risiko menjadi bagian yang menyatu dalam pengambilan keputusan bisnis Perseroan sehari-hari. Dengan ERM, Perseroan akan memiliki kerangka kerja pengelolaan risiko yang sistematis dan menyeluruh (risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional) dengan menghubungkan pengelolaan modal dan proses bisnis dengan risiko yang dihadapi secara utuh. Tahun ini merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya terkait dengan "Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Entitas Anak", yang dilaksanakan Perseroan dalam kapasitasnya sebagai Entitas Anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, pemegang saham pengendali Perseroan.

The concept of risk management of the Company refers to *Enterprise Risk Management* (ERM) implemented by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (parent company) which were adopted to the needs of business and operations of the Company. ERM is an inherent business risk management process in the Company's business process, which means, risk management becomes part of daily business decision making. By using ERM, the Company will have systematic and comprehensive framework for risk management (credit risk, market risk and operational risk) by connecting capital management and business risk encountered as whole. This year is a continuation from previous years in terms of "Implementation Of Consolidated Risk Management For Bank's Controlling Subsidiary Companies", which is implemented by the Company in its capacity as the Subsidiary of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, the controlling shareholder of the Company.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Kerangka manajemen risiko (lanjutan)**

Kerangka pengelolaan risiko ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Kerangka ini tercantum dalam Kebijakan Manajemen Risiko Bank Mandiri (KMRBM) agar sejalan dengan rencana penerapan Basel II Accord secara bertahap di Indonesia. Dalam kerangka pengelolaan risiko tersebut diatur berbagai kebijakan agar manajemen risiko berfungsi sebagai *business enabler* sehingga bisnis dapat tetap tumbuh dalam koridor prinsip kehati-hatian dengan menerapkan proses manajemen risiko yang ideal (identifikasi - pengukuran - pemantauan - pengendalian risiko) pada semua level organisasi.

Lebih lanjut, kemitraan antara Perseroan dengan Entitas Induk merupakan hal yang sangat penting, mengingat keduanya menghadapi tantangan regional dan global yang sama dalam mengelola pertumbuhan bisnis yang cepat dan dalam suasana kompetisi yang ketat, namun pada saat yang bersamaan Perseroan harus tetap mampu menyelenggarakan praktik bisnis tersebut berdasarkan dan mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, manajemen Perseroan memiliki komitmen penuh untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif yang secara esensi mencakup kecukupan kebijakan, prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perseroan tetap dapat terarah dan terkendali pada batasan risiko yang dapat diterima, serta tetap menguntungkan Perseroan. Divisi Manajemen Risiko yang berperan secara aktif dalam mengkoordinasikan tindakan-tindakan pencegahan, proaktif dan responsif dengan seluruh karyawan dari berbagai tingkatan yang ada di dalam Perseroan untuk mendukung penerapan manajemen risiko ini, karena semua bagian di dalam Perseroan masing-masing akan memainkan peranan penting.

Dalam penerapan manajemen risiko, Perseroan menyadari pentingnya untuk memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan. Perseroan memiliki suatu mekanisme yang bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

**27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Risk management framework (continued)**

*This risk management framework refers to Bank Indonesia regulation (PBI) No 5/8/PBI/2003 dated 19 May 2003 concerning the Application of Risk Management for Commercial Bank as amended by PBI No.11/25/PBI/2009 dated on 1 July 2009 concerning the Amendment on Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 concerning the Application of Risk Management for Commercial Bank.*

*This framework is included in the Risk Management Policy of Bank Mandiri (KMRBM) in line with the plan to apply Basel II Accord gradually in Indonesia. Within this risk management framework, the Company set up a range of policies in order for risk management to function as a business enabler so that business can still grow within the corridor of prudential principle by applying the ideal risk management process (risk identification - measurement - monitoring - management risk) at all levels of the organization.*

*Further, the partnership between the Company and the parent company is a very important thing considering both have to face the same regional and global challenge in managing fast business growth and strict competition, but at the same time the Company must implement such of business practices based on prudential principle.*

*As a company engaging in financing activities, the Company's management is fully committed to implement risk management comprehensively, which essentially covers the adequacy of policies, procedures and risk management methodology, hence, the Company's business activities could remain be directed and controlled at an acceptable risk limit, at the same time the Company can still be profitable. Risk Management Division is playing an active role in coordinating preventive, proactive and responsive actions with all employees from various levels within the Company in order to support the implementation of risk management, because all divisions of the Company will play their respective important roles.*

*In the implementation of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that is based upon 4 (four) risk management pillars, which could be described as follows:*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Kerangka manajemen risiko (lanjutan)**

**Pilar 1: Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi**

Pengawasan aktif tersebut tercermin sejak perencanaan bisnis tahunan, yang mencakup:

- Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala;
- Melakukan evaluasi dan menyetujui aktivitas yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Direksi;
- Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan otoritas dalam pemberian batasan serta tinjauan atas kualitas portofolio secara berkala;
- Terdapatnya Komite Audit dan sebagai organ Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya; dan melalui Surat Edaran No. 030/SE/MTF/VI/2012 membentuk *Forum Enterprise Risk Management* dengan dikoordinir oleh Direktorat Risk Management PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai bentuk konsolidasi manajemen risiko.

Kerangka konsolidasi manajemen risiko dengan Entitas Induk dibentuk dengan menempatkan wakil dari Entitas Induk sebagai Kepala Divisi yang membawahi fungsi manajemen risiko Perseroan. Kerangka tersebut juga dilaksanakan melalui pemeriksaan kinerja secara berkala oleh Entitas Induk terhadap Perseroan, menyangkut kinerja keuangan, pengawasan sistem informasi akuntansi, serta tingkat kesehatan dan profil risiko dari piutang pembiayaan konsumen.

**Pilar 2: Kebijakan dan Penerapan Batasan**

Perseroan menyusun kebijakan-kebijakan manajemen risiko yang diperiksa secara berkala dan selalu disesuaikan dengan keadaan usaha terkini. Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam Prosedur Operasi Standar dan Memo Internal yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perseroan juga memiliki kebijakan-kebijakan mengenai batasan persetujuan/otorisasi untuk transaksi kredit maupun yang bukan transaksi kredit.

**27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Risk management framework (continued)**

**Pillar 1: Active Supervision by Boards of Commissioners and Directors**

Active supervision is reflected since annual business planning, which includes:

- Approving and evaluating risk management policies on a regular basis;
- Evaluating and approving activities that require approval from the Board of Commissioners or Directors;
- Establishing risk management policies and strategies, which include determining the authorization in limits and reviewing the quality of portfolio on a regular basis;
- The presence of the Audit Committee as an organ of the Board of Commissioners in carrying out their supervisory functions; and through Circular Letter No. 030/SE/MTF/VI/2012 established *Enterprised Risk Management Forum* coordinated by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Risk Management Directorate in term of implementation of consolidated risk management.

The consolidated risk management framework with Parent Company is established through assigning representatives from Parent Company as Division Head of Risk Management. The framework is also implemented through regular performance assessment by the Parent Company on the Company, concerning the financial performance, monitoring on accounting information system, as well as the level of soundness and risk profile of the Company's consumer financing receivables.

**Pillar 2: Policy and Implementation of Limits**

The Company develops policies related to risk management, which are assessed periodically and aligned constantly to fit the most recent business situation. The policy is translated into Standard Operating Procedures and Internal Memo, which are being socialized to all employees. The Company also has policies regarding limitation on approval/authorization for both credit and non-credit transactions.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Pilar 2: Kebijakan dan Penerapan Batasan (lanjutan)**

Salah satu contoh kemitraan dalam pengelolaan manajemen risiko antara Perseroan dan Entitas Induk adalah perjanjian kerjasama pemberian kredit dimana Perseroan bertindak sebagai agen untuk kegiatan seleksi konsumen, penagihan dan pengurusan dokumen administrasi berdasarkan batasan produk ataupun kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh Entitas Induk. Kebijakan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang Perseroan juga mengikuti kebijakan penyisihan pada Entitas Induk yang sejalan dan patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Pilar 3: Identifikasi, Pengukuran, Pengawasan dan Sistem Informasi Manajemen**

Perseroan memiliki perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko terutama risiko kredit dan risiko operasional melalui mekanisme pelaporan dan sistem informasi manajemen yang ada serta melalui pertemuan berkala Forum Enterprise Risk Management (FERMA) dengan Entitas induk. Selain itu, sistem teknologi informasi utama Perseroan mampu menyediakan data/informasi secara cepat dan akurat kepada pihak manajemen, Entitas Induk atau pihak ketiga yang terkait lainnya.

Kerangka konsolidasi manajemen risiko dengan Entitas Induk terlaksana melalui penyampaian paparan risiko Perseroan yang ada secara berkala kepada Komite Manajemen Risiko Entitas Induk, termasuk penyampaian laporan berkala terkait aspek kepatuhan, hukum dan lainnya kepada Entitas Induk.

**Pilar 4: Pengendalian Internal**

Perseroan memiliki Divisi Audit Internal yang secara independen melaporkan proses dan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Utama dan melakukan koordinasi dengan Komite Audit secara rutin setiap bulan. Akuntabilitas dari Divisi Audit Internal mencakup:

- Menyediakan penilaian atas kecukupan dan efektivitas dari semua proses yang ada di dalam Perseroan;
- Melaporkan masalah-masalah penting yang terkait dengan proses pengendalian aktivitas-aktivitas didalam Perseroan, termasuk perbaikan yang potensial terhadap proses-proses tersebut; dan
- Koordinasi dengan fungsi pengendali dan pengawasan lainnya (manajemen risiko, kepatuhan, hukum dan audit eksternal).

**27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Pillar 2: Policy and Implementation of Limits (continued)**

An example of partnership between the Company and Parent Company in managing risk is joint financing agreement where the Company acts as an agent to underwrite, collect and administer consumer financing based on limitation of product or pre-determined criteria established by Parent Company. The Company's policy in relation with allowance for impairment losses on receivables also comply with the Parent Company's policy, which is in line and in compliance with Indonesian Financial Accounting Standards.

**Pillar 3: Identification, Measurement, Monitoring and Management Information System**

The Company has a set of tools to identify, measure and monitor risks, especially credit risk and operational risk through the existing reporting and management information system mechanism, as well as through the regular meetings of the Company's Enterprise Risk Management Forum (FERMA) with Parent Company. In addition, the Company's major information technology system is capable of providing instant and accurate data/information to the management, Parent Company or other related third parties.

The consolidated risk management framework with Parent Company is conducted through the reporting of the Company's risk exposure periodically to Parent Company's Risk Management Committee, including the periodic reporting in relation to the compliance, legal and other aspects to the Parent Company.

**Pillar 4: Internal Control**

The Company has an Internal Audit Division which independently reports on the process and assessment result to the President Director and regularly coordinate with Audit Committee monthly. The accountability of the Internal Audit Division includes:

- Providing assessment on the adequacy and effectiveness of all existing processes within the Company;
- Reporting on important issues related to the control process of activities within the Company, including potential improvements to these processes; and
- Coordinating with other controlling and supervisory functions (risk management, compliance, legal and external audit).



*The original financial statements included herein are in the Indonesian language.*

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Pilar 4: Pengendalian Internal (lanjutan)**

Kerangka konsolidasi manajemen risiko dengan Entitas Induk juga dicerminkan dengan dilaksanakannya audit reguler/audit teknologi informasi/audit terintegrasi atas unit-unit di Perseroan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Entitas Induk.

Guna penguatan pengendalian internal dan proses konsolidasi antara Entitas Induk dengan Entitas Anak, Kepala Divisi Internal Audit perseroan diseleksi dan ditetapkan oleh Entitas Induk sebelum ditempatkan di Perseroan.

**Risiko pasar**

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang Rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman, yang dapat membawa risiko bagi Perseroan. Dalam perencanaan usaha Perseroan, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Perseroan adalah dalam hal pengelolaan tingkat bunga.

Perubahan tingkat bunga acuan akan menjadi risiko pada saat berubahannya, terutama ketika tingkat bunga dinaikkan, yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan sehingga dapat menyebabkan risiko kredit Perseroan meningkat. Untuk itu, Perseroan menerapkan pengelolaan tingkat bunga tetap secara konsisten dengan menyesuaikan tingkat bunga kredit terhadap tingkat bunga pinjaman dan beban dana.

Sumber pendanaan Perseroan yang terbesar berasal dari skema pembiayaan bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan tingkat bunga tetap dan jangka waktu yang sama dengan piutang pembiayaan konsumen.

Perseroan juga menerbitkan obligasi dan *medium-term notes* yang sebagian besar mempunyai jangka waktu yang panjang, yaitu 3 (tiga) - 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga tetap serta sejumlah kecil pinjaman dari bank swasta nasional dan asing dengan tingkat bunga tetap dan mengambang.

Dengan pola aktivitas usaha yang dijalankan Perseroan saat ini, risiko pasar Perseroan adalah minimal. Perseroan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan konsumen dalam mata uang asing.

**27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Pillar 4: Internal Control (continued)**

*The consolidated risk management framework with Parent Company is also reflected in the implementation of regular audit/information technology audit/integrated audit on the business units in the Company by Parent Company's Internal Audit Unit (SKAI).*

*For the purpose of strengthening Internal Control and consolidation process between Parent Company and Subsidiary Company, the Head of Internal Audit Division is selected and determined by Parent Company before being assigned in the Company.*

**Market risk**

*Market risk is the risk which is primarily caused by the changes in interest rates, exchange rate of Rupiah currency, commodity prices and the price of capital or loans, in which the Company may be exposed to. In the Company's business planning, market risk with direct impact to the Company is in terms of interest rates management.*

*Changes in interest rates would become a risk at the point of change, especially when the interest rate increases, which would cause losses to the Company, hence resulting in increased Company's credit risk. Therefore, the Company consistently implements fixed interest rate management by making adjustments on lending interest rate and cost of funds.*

*The largest source of funding for the Company comes from a joint financing scheme with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with fixed interest rate and same period with the consumer financing receivables.*

*The Company's source of funding is also derived from the issuance of bonds and medium-term notes mostly for long-term, i.e. for 3 (three) - 5 (five) years, with fixed interest rates and as well as a small number of loans from the national and foreign private banks with fixed and floating interest rates.*

*With the pattern of business activity currently operated by the Company, the market risk of the Company is minimal. The Company does not have consumer financing business in foreign currency.*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Risiko pasar (lanjutan)**

**Market risk (continued)**

Tabel berikut menggambarkan rincian aset dan liabilitas keuangan Perseroan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga (bruto):

The following tables summarize the Company's financial assets and liabilities categorized by the earlier of contractual repricing or maturity dates to see the impact of changes in interest rates (gross):

		31 Desember/December 2018							
		Tingkat bunga tetap/Fixed interest rate							
	Bunga mengambang <3 bulan/ Floating Rate < 3 months	Kurang dari 1 bulan/Less than 1 month	1 bulan sampai 3 bulan/ 1 month to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai 1 tahun/Over 3 months to 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun/ Over 1 year to 2 years	Lebih dari 2 tahun/ Over 2 years	Tidak dikenakan bunga/No interest rate charges	Jumlah/ Total	
<b>Aset keuangan</b>									<b>Financial assets</b>
Kas dan setara kas	242.077	-	-	-	-	-	12.863	254.940	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen	-	378.440	933.859	2.990.114	6.470.998	2.159.953	-	12.933.364	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	-	129.212	259.022	1.131.498	1.209.887	598.770	-	3.328.389	Finance lease receivables
Anjak piutang	-	-	11.416	-	-	-	-	11.416	Factoring receivables
Piutang lain lain	-	-	-	-	-	-	735.408	735.408	Other receivables
Piutang derivatif	-	-	-	-	-	138.333	-	138.333	Derivative receivables
Aset lain-lain	-	-	-	-	-	-	65.874	65.874	Other assets
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>242.077</b>	<b>507.652</b>	<b>1.204.297</b>	<b>4.121.612</b>	<b>7.680.885</b>	<b>2.897.056</b>	<b>814.145</b>	<b>17.467.724</b>	<b>Total financial assets</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>									<b>Financial liabilities</b>
Utang usaha	-	-	-	-	-	-	649.630	649.630	Trade payables
Utang lain-lain	-	-	-	-	-	-	223.804	223.804	Other payables
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	-	100.582	-	-	-	-	100.582	Accrued interest expenses
Pinjaman bank	-	1.577.799	946.613	3.631.743	3.738.560	1.293.409	-	11.188.124	Bank loans
Utang derivatif	-	-	-	-	-	-	-	89.788	Derivative payables
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	1.118.756	708.423	1.017.537	-	2.844.716	Securities issued
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>-</b>	<b>1.577.799</b>	<b>1.047.195</b>	<b>4.750.499</b>	<b>4.446.983</b>	<b>2.400.734</b>	<b>873.434</b>	<b>15.096.644</b>	<b>Total financial liabilities</b>
<b>Jumlah selisih penilaian bunga</b>	<b>242.077</b>	<b>(1.070.147)</b>	<b>157.102</b>	<b>(628.887)</b>	<b>3.233.902</b>	<b>496.322</b>	<b>(59.289)</b>	<b>2.371.080</b>	<b>Total interest repricing gap</b>
		31 Desember/December 2017							
		Tingkat bunga tetap/Fixed interest rate							
	Bunga mengambang <3 bulan/ Floating Rate < 3 months	Kurang dari 1 bulan/Less than 1 month	1 bulan sampai 3 bulan/ 1 month to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai 1 tahun/Over 3 months to 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun/ Over 1 year to 2 years	Lebih dari 2 tahun/ Over 2 years	Tidak dikenakan bunga/No interest rate charges	Jumlah/ Total	
<b>Aset keuangan</b>									<b>Financial assets</b>
Kas dan setara kas	140.352	-	-	-	-	-	20.198	160.550	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen	-	324.806	641.025	2.666.672	3.263.760	4.556.248	-	11.452.511	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	-	84.708	170.599	735.722	829.833	543.767	-	2.364.629	Finance lease receivables
Piutang lain lain	-	-	-	-	-	-	668.271	668.271	Other receivables
Piutang derivatif	-	-	-	-	-	23.202	-	23.202	Derivative receivables
Aset lain-lain	-	-	-	-	-	-	42.268	42.268	Other assets
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>140.352</b>	<b>409.514</b>	<b>811.624</b>	<b>3.402.394</b>	<b>4.093.593</b>	<b>5.123.217</b>	<b>730.737</b>	<b>14.711.431</b>	<b>Total financial assets</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>									<b>Financial liabilities</b>
Utang usaha	-	-	-	-	-	-	606.513	606.513	Trade payables
Utang lain-lain	-	-	-	-	-	-	134.799	134.799	Other payables
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	-	54.455	-	-	-	-	54.455	Accrued interest expenses
Pinjaman bank	-	279.238	667.994	2.795.126	2.850.228	1.617.844	-	8.210.430	Bank loans
Utang derivatif	-	-	-	-	-	-	-	19.540	Derivative payables
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	823.374	1.117.148	1.724.729	-	3.665.251	Securities issued
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>-</b>	<b>279.238</b>	<b>722.449</b>	<b>3.618.500</b>	<b>3.967.376</b>	<b>3.362.113</b>	<b>741.312</b>	<b>12.690.988</b>	<b>Total financial liabilities</b>
<b>Jumlah selisih penilaian bunga</b>	<b>140.352</b>	<b>130.276</b>	<b>89.175</b>	<b>(216.106)</b>	<b>126.217</b>	<b>1.761.104</b>	<b>(10.575)</b>	<b>2.020.443</b>	<b>Total interest repricing gap</b>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko kredit**

Pengelolaan risiko kredit perseroan diarahkan untuk meningkatkan keseimbangan antara ekspansi kredit yang sehat dengan pengelolaan kredit secara *prudent* agar terhindar dari penurunan kualitas atau menjadi *Non Performing Loan (NPL)*, serta mengelola penggunaan modal untuk memperoleh return yang optimal. Dimulai dari proses awal penerimaan aplikasi kredit yang selektif dan ditangani dengan prinsip kehati-hatian, yang mana aplikasi kredit akan melalui proses survey dan analisa kredit sebelum disetujui oleh Komite Kredit. Perseroan juga menerapkan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No.30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank dan Peraturan Ketua Bapepam-LK No.PER-05/BL/2011 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Perseroan Pembiayaan.

Tahun 2012, Perseroan juga telah menjalankan aturan uang muka kendaraan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan serta Surat Edaran BI No.14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor yang diberlakukan sejak 15 Juni 2012.

Untuk setiap kategori aset keuangan, Perseroan harus mengungkapkan eksposur maksimum terhadap risiko kredit dan analisa konsentrasi risiko kredit.

**i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit**

Nilai tercatat dari aset keuangan Perseroan selain piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen menggambarkan eksposur maksimum atas risiko tersebut. Dalam hal piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, Perseroan menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit. Perseroan menetapkan jenis dan nilai agunan yang diterima antara lain tanah, bangunan dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan yang dibiayai Perseroan. Apabila terjadi *default* (gagal bayar), Perseroan akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

**27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Credit risk**

The Company's credit risk management is directed to improve the balance between healthy credit expansion with a prudent credit management to avoid from the decline in the quality or being Non Performing Loan (NPL), as well as, capital management to earn optimal return. It starts from the process of receiving credit applications selectively and handling them with prudence principle, where by the credit application would go through survey and credit analysis process before being approved by the Credit Committee. The Company also implemented the Manual for Implementation of Know Your Customer Principles as regulated in the Ministry of Finance Regulation No.30/PMK.010/2010 regarding the Implementation of Know Your Customer Principles for Non-Banking Financial Institutions and the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (Bapepam-LK) Regulation No.PER-05/BL/2011 regarding the Manual for Implementation of Know Your Customer Principles for Multifinance Companies.

In 2012, the Company also has implemented down payment regulation as regulated in the Ministry of Finance Regulation No.43/PMK.010/2012 concerning Down Payment for Consumer Financing, and Bank Indonesia Circular Letter No.14/10/DPNP dated 15 March 2012 concerning The Application of Bank's Risk Management on Mortgages and Motor Vehicle Credit effective 15 June 2012.

For each financial asset category, the Company should disclose maximum exposure to credit risk and concentration of credit risk analysis.

**i. Maximum exposure to credit risk**

The carrying amount of the Company's financial assets other than finance lease receivables and consumer financing receivables represent the maximum exposure of credit. In case of consumer financing and finance lease receivables, the Company uses the collateral to minimize the credit risk. The Company determined the type and value of collaterals accepted such as land, buildings, and Certificate of Ownership of the vehicles financed by the Company. In times of default, the Company will use the collateral as the last resort in recovering the obligation of the counterparty.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Risiko kredit (lanjutan)**

**Credit risk (continued)**

**ii. Analisis konsentrasi risiko kredit**

**ii. Concentration of credit risk analysis**

Konsentrasi risiko kredit timbul ketika sejumlah pelanggan bergerak dalam aktivitas usaha yang sama atau aktivitas dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika mereka memiliki karakteristik yang sejenis yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similar characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions.

Perseroan bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen yang pelanggannya kebanyakan adalah individu dan tidak terkonsentrasi pada wilayah geografis tertentu.

The Company is currently engaged in consumer financing business in which the customers are mainly individuals and they are not concentrated in the specific geographic region.

Tabel berikut menggambarkan jumlah risiko kredit dan konsentrasi risiko aset keuangan konsumen yang dimiliki Perseroan (bruto):

The following tables set out the total credit risk and risk concentration of financial assets of the Company (gross):

**a. Sektor geografis**

**a. Geographical sector**

31 Desember/December 2018							
	Jawa Bali	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
Kas dan setara kas	240.024	1.409	206	320	118	242.077	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen:							Consumer financing receivables:
perorangan	8.038.840	2.241.862	1.113.003	1.496.656	43.003	12.933.364	individual
Piutang sewa pembiayaan:							Finance lease receivables:
korporasi	3.258.109	43.280	18.419	6.883	1.698	3.328.389	corporate
Anjak piutang	11.416	-	-	-	-	11.416	Factoring receivables
Piutang lain-lain	79.464	20.414	5.728	7.915	621.887	735.408	Other receivables
Piutang derivatif	138.333	-	-	-	-	138.333	Derivative receivables
Aset lain-lain	2.393	166	83	61	63.171	65.874	Other assets
	<b>11.768.579</b>	<b>2.307.131</b>	<b>1.137.439</b>	<b>1.511.835</b>	<b>729.877</b>	<b>17.454.861</b>	
31 Desember/December 2017							
	Jawa Bali	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
Kas dan setara kas	139.556	375	183	205	33	140.352	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen:							Consumer financing receivables:
perorangan	7.352.207	2.029.396	860.746	1.184.658	25.504	11.452.511	individual
Piutang sewa pembiayaan:							Finance lease receivables:
korporasi	2.332.438	4.116	2.146	25.929	-	2.364.629	corporate
Piutang lain-lain	19.544	5.382	2.238	2.269	638.838	668.271	Other receivables
Piutang derivatif	23.202	-	-	-	-	23.202	Derivative receivables
Aset lain-lain	484	(40)	6	7	41.811	42.268	Other assets
	<b>9.867.431</b>	<b>2.039.229</b>	<b>865.319</b>	<b>1.213.068</b>	<b>706.186</b>	<b>14.691.233</b>	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko kredit (lanjutan)**

**ii. Analisis konsentrasi risiko kredit (lanjutan)**

**b. Sektor industri**

31 Desember/December 2018				
	Lembaga Keuangan/ Financial Institution	Konsumen/ Customers	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total
Kas dan setara kas	242.077	-	-	242.077
Piutang pembiayaan konsumen:				
perorangan	-	12.933.364	-	12.933.364
Piutang sewa pembiayaan:				
korporasi	-	3.328.389	-	3.328.389
Anjak Piutang	-	11.416	-	11.416
Piutang lain-lain	-	-	735.408	735.408
Piutang derivatif	138.333	-	-	138.333
Aset lain-lain	-	-	65.874	65.874
	<b>380.410</b>	<b>16.273.169</b>	<b>801.282</b>	<b>17.454.861</b>

31 Desember/December 2017				
	Lembaga Keuangan/ Financial Institution	Konsumen/ Customers	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total
Kas dan setara kas	140.352	-	-	140.352
Piutang pembiayaan konsumen:				
perorangan	-	11.452.511	-	11.452.511
Piutang sewa pembiayaan:				
korporasi	-	2.364.629	-	2.364.629
Piutang lain-lain	-	-	668.271	668.271
Piutang derivatif	23.202	-	-	23.202
Aset lain-lain	-	-	42.268	42.268
	<b>163.554</b>	<b>13.817.140</b>	<b>710.539</b>	<b>14.691.233</b>

**c. Berdasarkan kualitas kredit dari aset keuangan**

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas:

31 Desember/December 2018						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/Past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Jumlah/ Total
	High grade	Standard grade				
Kas dan setara kas	242.077	-	-	-	-	242.077
Piutang pembiayaan konsumen:						
perorangan	5.138.800	6.766.515	871.965	156.084	(303.884)	12.629.480
Piutang sewa pembiayaan:						
korporasi	1.876.988	1.259.383	167.720	24.298	(9.286)	3.319.103
Anjak Piutang	11.416	-	-	-	(113)	11.303
Piutang lain-lain	735.408	-	-	-	(6.007)	729.401
Piutang derivatif	138.333	-	-	-	-	138.333
Aset lain-lain	65.874	-	-	-	-	65.874
	<b>8.208.896</b>	<b>8.025.898</b>	<b>1.039.685</b>	<b>180.382</b>	<b>(319.290)</b>	<b>17.135.571</b>

**27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Credit risk (continued)**

**ii. Concentration of credit risk analysis (continued)**

**b. Industry sector**

31 Desember/December 2018				
	Lembaga Keuangan/ Financial Institution	Konsumen/ Customers	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total
Cash and cash equivalents	242.077	-	-	242.077
Consumer financing receivables:				
individual	-	12.933.364	-	12.933.364
Finance lease receivables:				
corporate	-	3.328.389	-	3.328.389
Factoring receivables	-	11.416	-	11.416
Other receivables	-	-	735.408	735.408
Derivative receivables	138.333	-	-	138.333
Other assets	-	-	65.874	65.874
	<b>380.410</b>	<b>16.273.169</b>	<b>801.282</b>	<b>17.454.861</b>

31 Desember/December 2017				
	Lembaga Keuangan/ Financial Institution	Konsumen/ Customers	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total
Cash and cash equivalents	140.352	-	-	140.352
Consumer financing receivables:				
individual	-	11.452.511	-	11.452.511
Finance lease receivables:				
corporate	-	2.364.629	-	2.364.629
Other receivables	-	-	668.271	668.271
Derivative receivables	23.202	-	-	23.202
Other assets	-	-	42.268	42.268
	<b>163.554</b>	<b>13.817.140</b>	<b>710.539</b>	<b>14.691.233</b>

**c. Based on quality of financial assets**

As of 31 December 2018 and 2017, credit risk exposure of financial assets is divided into:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Risiko kredit (lanjutan)**

**Credit risk (continued)**

**ii. Analisis konsentrasi risiko kredit (lanjutan)**

**ii. Concentration of credit risk analysis (continued)**

**c. Berdasarkan kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)**

**c. Based on quality of financial assets (continued)**

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas: (lanjutan)

As of 31 December 2018 and 2017, credit risk exposure of financial assets is divided into: (continued)

31 Desember/December 2017

	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/Past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Jumlah/ Total	
	High grade	Standard grade					
Kas dan setara kas	140.352	-	-	-	-	140.352	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen:							Consumer financing receivables:
perorangan	4.195.304	6.424.858	693.163	139.186	(271.205)	11.181.306	individual
Piutang sewa pembiayaan:							Finance lease receivables:
perorangan	1.559.415	755.726	38.815	10.673	(7.739)	2.356.890	corporate
Piutang lain-lain	668.271	-	-	-	(2.896)	665.375	Other receivables
Piutang derivatif	23.202	-	-	-	-	23.202	Derivative receivables
Aset lain-lain	42.268	-	-	-	-	42.268	Other assets
	<b>6.628.812</b>	<b>7.180.584</b>	<b>731.978</b>	<b>149.859</b>	<b>(281.840)</b>	<b>14.409.393</b>	

Penjelasan pembagian kualitas kredit yang diberikan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai:

- *High grade*, yaitu tidak pernah mengalami tunggakan sebelumnya.
- *Standard grade*, yaitu pernah mengalami tunggakan sebelumnya, namun sampai saat ini belum terdapat keterlambatan dalam pembayaran cicilan pokok dan bunga.

Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan yang pembayaran angsurannya menunggak lebih dari 90 hari diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang mengalami penurunan nilai.

The explanation of loan under quality "neither past due nor impaired" were as follows:

- *High grade*, which never have past due in the past.
- *Standard grade*, which have past due in the past but until now there has not been overdue in payment of principal and interest.

Consumer financing and finance lease receivables which installments are overdue for more than 90 days are classified as impaired financial assets.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko kredit (lanjutan)**

**ii. Analisis konsentrasi risiko kredit (lanjutan)**

**c. Berdasarkan kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)**

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan konsumen yang diberikan, Perseroan menerima jaminan dari konsumen berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas kendaraan bermotor yang dibiayai Perseroan, jaminan perusahaan dan jaminan pribadi.

Tabel berikut menunjukkan *aging analysis* terhadap piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

**27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Credit risk (continued)**

**ii. Concentration of credit risk analysis (continued)**

**c. Based on quality of financial assets (continued)**

As collateral to the consumer financing receivables, the Company receives the Certificates of Ownership ("BPKB") of the motor vehicles financed by the Company, corporate guarantee, and personal guarantee.

The following table summarizes the aging analysis of consumer financing receivables and finance lease receivables which are past due but not impaired.

		31 Desember/December 2018				
		1-30 hari/days	31-60 hari/days	61-90 hari/days	Jumlah/ Total	
Piutang pembiayaan konsumen:						Consumer financing receivables:
perorangan	567.109	183.692	121.164	871.965		individual
Piutang sewa pembiayaan:						Finance lease receivables:
korporasi	54.071	11.237	102.412	167.720		corporate
	<b>621.180</b>	<b>194.929</b>	<b>223.576</b>	<b>1.039.685</b>		
		31 Desember/December 2017				
		1-30 hari/days	31-60 hari/days	61-90 hari/days	Jumlah/ Total	
Piutang pembiayaan konsumen:						Consumer financing receivables:
perorangan	443.837	154.881	94.445	693.163		individual
Piutang sewa pembiayaan:						Finance lease receivables:
korporasi	19.148	6.300	13.367	38.815		corporate
	<b>462.985</b>	<b>161.181</b>	<b>107.812</b>	<b>731.978</b>		



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas merupakan risiko, yang mana Perseroan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Mengingat Perseroan memperoleh dukungan keuangan yang kuat dari Entitas Induk melalui skema pembiayaan bersama, maka risiko ini dapat dikelola dengan baik.

Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

**27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Liquidity risk**

Liquidity risk is the risk whereby the Company does not have sufficient financial resources to discharge its matured liabilities. As the Company receives strong financial support from Parent Company through joint financing scheme, this risk could be managed properly.

The following table summarizes the maturity gap profile of the Company's financial assets and liabilities as of 31 December 2018 and 2017:

31 Desember/December 2018							
	Kurang dari satu bulan/ Less than one month	1-6 bulan/ months	Lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun/ Over than 6 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ Over than 1 year	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Nilai tercatat/ Carrying value	
<b>ASET</b>							<b>ASSETS</b>
Kas dan setara kas	242.077	-	-	-	12.863	254.940	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen	378.440	1.957.380	1.966.593	8.630.951	-	12.933.364	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	127.648	636.053	737.637	1.827.051	-	3.328.389	Finance lease receivables
Anjak piutang	-	11.416	-	-	-	11.416	Factoring receivables
Piutang lain-lain	735.408	-	-	-	-	735.408	Other receivables
Piutang derivatif	-	-	-	138.333	-	138.333	Derivative receivables
Aset lain-lain	65.874	-	-	-	-	65.874	Other assets
<b>Total aset</b>	<b>1.549.447</b>	<b>2.604.849</b>	<b>2.704.230</b>	<b>10.596.335</b>	<b>12.863</b>	<b>17.467.724</b>	<b>Total assets</b>
<b>LIABILITAS</b>							<b>LIABILITIES</b>
Utang usaha	649.630	-	-	-	-	649.630	Trade payables
Utang lain-lain	223.804	-	-	-	-	223.804	Other payables
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	100.582	-	-	-	100.582	Accrued interest expenses
Pinjaman bank	1.577.799	2.223.184	2.355.172	5.031.969	-	11.188.124	Bank loans
Utang derivatif	-	-	-	89.788	-	89.788	Derivative payables
Surat berharga yang diterbitkan	-	719.470	399.285	1.725.961	-	2.844.716	Securities issued
<b>Total liabilitas</b>	<b>2.451.233</b>	<b>3.043.236</b>	<b>2.754.457</b>	<b>6.847.718</b>	<b>-</b>	<b>15.096.644</b>	<b>Total liabilities</b>
<b>Total perbedaan jatuh tempo</b>	<b>(901.786)</b>	<b>(438.387)</b>	<b>(50.227)</b>	<b>3.748.617</b>	<b>12.863</b>	<b>2.371.080</b>	<b>Total maturity gap</b>
31 Desember/December 2017							
	Kurang dari satu bulan/ Less than one month	1-6 bulan/ months	Lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun/ Over than 6 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ Over than 1 year	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Nilai tercatat/ Carrying value	
<b>ASET</b>							<b>ASSETS</b>
Kas dan setara kas	140.352	-	-	-	20.198	160.550	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen	324.805	1.530.512	1.777.185	7.820.009	-	11.452.511	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	84.708	419.289	487.033	1.373.599	-	2.364.629	Finance lease receivables
Piutang lain-lain	668.271	-	-	-	-	668.271	Other receivables
Piutang derivatif	-	-	-	23.202	-	23.202	Derivative receivables
Aset lain-lain	42.268	-	-	-	-	42.268	Other assets
<b>Total aset</b>	<b>1.260.404</b>	<b>1.949.801</b>	<b>2.264.218</b>	<b>9.216.810</b>	<b>20.198</b>	<b>14.711.431</b>	<b>Total assets</b>
<b>LIABILITAS</b>							<b>LIABILITIES</b>
Utang usaha	606.513	-	-	-	-	606.513	Trade payables
Utang lain-lain	134.799	-	-	-	-	134.799	Other payables
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	54.455	-	-	-	54.455	Accrued interest expenses
Pinjaman bank	279.238	1.663.342	1.799.779	4.468.071	-	8.210.430	Bank loans
Utang derivatif	-	-	-	19.540	-	19.540	Derivative payables
Surat berharga yang diterbitkan	-	324.830	498.543	2.841.878	-	3.665.251	Securities issued
<b>Total liabilitas</b>	<b>1.020.550</b>	<b>2.042.627</b>	<b>2.298.322</b>	<b>7.329.489</b>	<b>-</b>	<b>12.690.988</b>	<b>Total liabilities</b>
<b>Total perbedaan jatuh tempo</b>	<b>239.854</b>	<b>(92.826)</b>	<b>(34.104)</b>	<b>1.887.321</b>	<b>20.198</b>	<b>2.020.443</b>	<b>Total maturity gap</b>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko likuiditas (lanjutan)**

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada *undiscounted cash flows* pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

31 Desember/December 2018					
	Kurang dari satu bulan/ Less than one month	1-6 bulan/ months	Lebih dari 6 sampai 1 tahun/Over than 6 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ Over than 1 year	Nilai tercatat/ Carrying value
<b>LIABILITAS</b>					
Utang usaha	649.630	-	-	-	649.630
Utang lain-lain	223.804	-	-	-	223.804
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	100.582	-	-	100.582
Pinjaman bank	2.143.440	2.297.153	2.505.930	5.078.171	12.024.694
Utang derivatif	-	-	-	89.788	89.788
Surat berharga yang diterbitkan	-	845.760	493.356	1.927.236	3.266.352
<b>Total</b>	<b>3.016.874</b>	<b>3.243.495</b>	<b>2.999.286</b>	<b>7.095.195</b>	<b>16.354.850</b>

31 Desember/December 2017					
	Kurang dari satu bulan/ Less than one month	1-6 bulan/ months	Lebih dari 6 sampai 1 tahun/Over than 6 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ Over than 1 year	Nilai tercatat/ Carrying value
<b>LIABILITAS</b>					
Utang usaha	606.513	-	-	-	606.513
Utang lain-lain	134.799	-	-	-	134.799
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	54.455	-	-	54.455
Pinjaman bank	325.035	1.952.123	2.045.158	4.806.835	9.129.151
Utang derivatif	-	-	-	19.540	19.540
Surat berharga yang diterbitkan	-	493.426	650.333	3.263.513	4.407.272
<b>Total</b>	<b>1.066.347</b>	<b>2.500.004</b>	<b>2.695.491</b>	<b>8.089.888</b>	<b>14.351.730</b>

**Risiko operasional**

Perseroan juga sangat peduli terhadap risiko operasional, karena permasalahan yang timbul sehubungan dengan risiko ini dapat berdampak dan berpengaruh luas terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan. Secara umum, risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan karena kekurangan dan kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan *system* ataupun permasalahan-permasalahan yang berdampak pada operasi Perseroan. Penanganan risiko operasional dalam Perseroan dilakukan dengan 3 (tiga) langkah, yaitu:

- Pengidentifikasian risiko
- Pengukuran risiko
- Manajemen, pengawasan dan pengendalian risiko

Ketiga langkah di atas merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan. Langkah di atas telah diterjemahkan Perseroan dalam mekanisme manajemen risiko operasional sebagai berikut:

**27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Liquidity risk (continued)**

The tables below show the remaining contractual maturities of financial liabilities based on *undiscounted cash flows* as of 31 December 2018 and 2017:

31 Desember/December 2018					
	Kurang dari satu bulan/ Less than one month	1-6 bulan/ months	Lebih dari 6 sampai 1 tahun/Over than 6 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ Over than 1 year	Nilai tercatat/ Carrying value
<b>LIABILITIES</b>					
Trade payables	649.630	-	-	-	649.630
Other payables	223.804	-	-	-	223.804
Accrued interest expenses	-	100.582	-	-	100.582
Bank loans	2.143.440	2.297.153	2.505.930	5.078.171	12.024.694
Derivative payables	-	-	-	89.788	89.788
Securities issued	-	845.760	493.356	1.927.236	3.266.352
<b>Total</b>	<b>3.016.874</b>	<b>3.243.495</b>	<b>2.999.286</b>	<b>7.095.195</b>	<b>16.354.850</b>

31 Desember/December 2017					
	Kurang dari satu bulan/ Less than one month	1-6 bulan/ months	Lebih dari 6 sampai 1 tahun/Over than 6 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ Over than 1 year	Nilai tercatat/ Carrying value
<b>LIABILITIES</b>					
Trade payables	606.513	-	-	-	606.513
Other payables	134.799	-	-	-	134.799
Accrued interest expenses	-	54.455	-	-	54.455
Bank loans	325.035	1.952.123	2.045.158	4.806.835	9.129.151
Derivative payables	-	-	-	19.540	19.540
Securities issued	-	493.426	650.333	3.263.513	4.407.272
<b>Total</b>	<b>1.066.347</b>	<b>2.500.004</b>	<b>2.695.491</b>	<b>8.089.888</b>	<b>14.351.730</b>

**Operational risk**

The Company is also very concerned about the operational risk, because the problems arising from this risk could bring significant impact and affect the Company's overall performance. In general, operational risk is the risk caused by shortcomings and failures of internal processes, human errors, system failures or problems that could bring impact to the Company's operations. The operational risks in the Company are handled through 3 (three) steps as follows:

- Risk identification
- Risk measurement
- Risk management, supervision and control

The three steps above are inseparable unified process. These have been converted to the Company's operational risk management mechanism as follows:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko operasional (lanjutan)**

*Operational Risk Management System (ORMS)*

ORMS merupakan implementasi dari kewajiban Perseroan sebagai Perseroan Anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk melakukan pengendalian risiko operasional dengan cara melakukan pencatatan kejadian berisiko pada saat terjadinya kejadian berisiko tersebut, seperti yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 perihal "Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perseroan Anak".

ORMS adalah sebuah aplikasi intranet berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu pengelola risiko operasional yang dirancang agar pencatatan kejadian berisiko dapat dilakukan pada saat terjadinya kejadian berisiko tersebut dan direkam ke dalam *database*. Laporan yang terekam melalui menu laporan tersebut kemudian akan dipindahkan ke dalam aplikasi ORMS Entitas Induk sebagai bentuk dari perwujudan konsolidasi Laporan Risiko Operasional Bank.

**Manajemen permodalan**

Tujuan Perseroan dalam mengelola permodalannya adalah menjaga kelangsungan usaha Perseroan untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya modal.

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbalan hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

Konsisten dengan pelaku industri lainnya, Perseroan memonitor permodalan berdasarkan *gearing ratio*. Rasio ini dihitung dari nilai bersih pinjaman (termasuk obligasi dan *medium-term notes*) dibagi dengan jumlah modal. Jumlah modal diambil dari ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan.

**27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Operational risk (continued)**

*Operational Risk Management System (ORMS)*

*ORMS is an implementation of the obligation of the Company as a Subsidiary of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to carry out operational risk control by recording risk event at the time this risk event occurred, as regulated in Bank Indonesia Regulation No. 8/6/PBI/2006 dated 30 January 2006 regarding "Implementation of Consolidated Risk Management for Banks Performing Control on Subsidiary Companies".*

*ORMS is a web-based intranet application that is used as an operational risk management tool and is designed for recording the operational risk event at the time of occurrence of this risk event and stored into database. The report stored through the reporting menu would then be transferred to Parent Company's ORMS application as the form of the consolidated Bank's Operational Risk Report.*

**Capital management**

*The Company's objectives when managing capital are to safeguard the Company's ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.*

*In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares to reduce debt.*

*Consistent with other players in the industry, the Company monitors capital on the basis of the gearing ratio. This ratio is calculated as net debt (including bonds payable and medium-term notes) divided by total capital. Total capital is calculated as equity shown in the statements of financial position.*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Manajemen permodalan (lanjutan)**

Dalam mengelola permodalan, Perseroan melakukan analisa secara bulanan untuk memastikan bahwa Perseroan tetap mengikuti POJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang diantaranya mengatur ketentuan sebagai berikut:

- Modal disetor Perseroan minimum sebesar Rp100.000;
- Ekuitas Perseroan minimum sebesar 50,00% dari modal disetor;
- Jumlah pinjaman yang dimiliki Perseroan dibandingkan modal sendiri dan utang subordinasi dikurangi penyertaan (gearing ratio) ditetapkan setinggi-tingginya 10 kali, baik untuk pinjaman luar negeri maupun dalam negeri.

	<b>31 Desember/ December 2018</b>	<b>31 Desember/ December 2017</b>
<b>Pinjaman</b>		
Pinjaman yang diterima - neto	11.188.124	8.210.430
Obligasi	2.844.716	3.665.251
<b>Total pinjaman</b>	<b>14.032.840</b>	<b>11.875.681</b>
Jumlah modal	2.120.915	1.768.342
<b>Gearing ratio</b>	<b>6,62</b>	<b>6,72</b>

Perseroan senantiasa menjaga jumlah maksimum *gearing ratio* lebih kecil dari ketentuan yang ditetapkan melalui analisa alternatif pembiayaan baik melalui pinjaman bank, penerbitan obligasi ataupun optimalisasi dana *joint financing*. Perseroan juga menghitung biaya dana dari alternatif pembiayaan yang dipilih untuk memastikan biaya dana tersebut dapat menghasilkan pendapatan maksimum bagi Perseroan.

**27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Capital management (continued)**

In managing capital, the Company conducts monthly analysis to ensure that the Company complies with the POJK No. 29/POJK.05/2014 dated November 19, 2014 regarding Finance Companies which have some provisions as follows:

- The Company's paid-up capital of minimum Rp100,000;
- The Company's equity amounting to minimum 50.00% of paid-up capital;
- The amount of the Company's loan to equity and subordinated loan deducted by investment (gearing ratio) is maximum 10 times, both for off-shore and on-shore domestic loans.

	<b>31 Desember/ December 2018</b>	<b>31 Desember/ December 2017</b>
<b>Debt</b>		
Borrowings - net	11.188.124	8.210.430
Bonds payable	2.844.716	3.665.251
<b>Total debt</b>	<b>14.032.840</b>	<b>11.875.681</b>
Total capital	2.120.915	1.768.342
<b>Gearing ratio</b>	<b>6,62</b>	<b>6,72</b>

The Company always maintains the maximum amount of *gearing ratio* at lower level than the applicable regulation by performing an analysis to determine financing alternative whether through the bank loans, bonds issuance or joint financing fund optimization. The Company also calculates the cost of fund of each financing alternative selected by the Company to ensure it could generate a maximum income for the Company.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Manajemen permodalan (lanjutan)**

Informasi lainnya

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2014 tentang "Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan", pada tanggal 31 Desember 2018 Perseroan telah memenuhi jumlah minimal ekuitas dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan. Perusahaan telah menghitung beberapa rasio antara lain:

	<b>31 Desember/ December 2018</b>
Rasio permodalan (tidak diaudit)	20,36%
Rasio ekuitas terhadap modal disetor	848,37%
Rasio <i>Non-Performing Finance</i> - neto	0,86%
Rasio <i>Non-Performing Finance</i> - gross	1,11%
Rasio piutang pembiayaan terhadap total aset	91,29%

**27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**Capital management (continued)**

Other information

Based on POJK No. 29/POJK.05/2014 regarding "The Business Operation of a Multifinance Company", as of 31 December 2018, the Company has complied the minimum amount of equity and Limits for Giving Financing. The Company has calculated ratio as follows:

<i>Capital ratio (unaudited)</i>
<i>Equity to fully paid capital ratio</i>
<i>Non-Performing Finance - net</i>
<i>Non-Performing Finance - gross</i>
<i>Financing to asset ratio</i>

**28. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN**

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan Perseroan memiliki nilai yang hampir sama dengan nilai wajarnya kecuali untuk instrumen berikut:

**28. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES**

As of 31 December 2018 and 2017, the carrying value of the Company's financial assets and liabilities approximates their fair value except for the following financial instruments:

31 Desember/December 2018

	Pinjaman yang diberikan dan piutang/Loans and receivables	Biaya perolehan diamortisasi lainnya/ Other amortized cost	Derivatif lindung nilai/ Hedging derivatives	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
<b>ASET KEUANGAN</b>						<b>FINANCIAL ASSETS</b>
Piutang pembiayaan konsumen	12.629.480	-	-	12.629.480	13.298.946	<i>Consumer financing receivables</i>
Piutang sewa pembiayaan	3.319.103	-	-	3.319.103	3.858.711	<i>Finance lease receivables</i>
Anjak piutang	11.303	-	-	11.303	11.152	<i>Factoring receivables</i>
Piutang derivatif	-	-	138.333	138.333	138.333	<i>Derivative receivables</i>
<b>Total aset keuangan</b>	<b>15.959.886</b>	<b>-</b>	<b>138.333</b>	<b>16.098.219</b>	<b>17.307.142</b>	<b>Total financial assets</b>
<b>LIABILITAS KEUANGAN</b>						<b>FINANCIAL LIABILITIES</b>
Pinjaman bank	-	11.188.124	-	11.188.124	11.089.493	<i>Bank loans</i>
Surat berharga yang diterbitkan	-	2.844.716	-	2.844.716	2.840.557	<i>Securities issued</i>
Utang derivatif	-	-	89.788	89.788	89.788	<i>Derivative payables</i>
<b>Total liabilitas keuangan</b>	<b>-</b>	<b>14.032.840</b>	<b>89.788</b>	<b>14.122.628</b>	<b>14.019.838</b>	<b>Total financial liabilities</b>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**28. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS  
KEUANGAN (lanjutan)**

**28. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND  
LIABILITIES (continued)**

31 Desember/December 2017

	Pinjaman yang diberikan dan piutang/Loans and receivables	Biaya perolehan diamortisasi lainnya/ Other amortized cost	Derivatif lindung nilai/ Hedging derivatives	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
<b>ASET KEUANGAN</b>						
Piutang pembiayaan konsumen	11.181.306	-	-	11.181.306	11.935.962	FINANCIAL ASSETS Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	2.356.890	-	-	2.356.890	2.571.662	Finance lease receivables
Piutang derivatif	-	-	23.202	23.202	23.202	Derivative receivables
<b>Total aset keuangan</b>	<b>13.538.196</b>	<b>-</b>	<b>23.202</b>	<b>13.561.398</b>	<b>14.530.826</b>	<b>Total financial assets</b>
<b>LIABILITAS KEUANGAN</b>						
Pinjaman bank	-	8.210.430	-	8.210.430	8.209.363	FINANCIAL LIABILITIES Bank loans
Surat berharga yang diterbitkan	-	3.665.251	-	3.665.251	3.635.760	Securities issued
Utang derivatif	-	-	19.540	19.540	19.540	Derivative payables
<b>Total liabilitas keuangan</b>	<b>-</b>	<b>11.875.681</b>	<b>19.540</b>	<b>11.895.221</b>	<b>11.864.663</b>	<b>Total financial liabilities</b>

Tabel di bawah ini menyajikan analisa atas instrumen keuangan tersebut sesuai dengan masing-masing tingkat dalam hirarki nilai wajar:

The tables below present the analysis of the above financial instruments by the level in the fair value hierarchy:

31 Desember/December 2018

	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Total	
<b>ASET KEUANGAN</b>						
Piutang pembiayaan konsumen	12.629.480	-	13.298.946	-	13.298.946	FINANCIAL ASSETS Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	3.319.103	-	3.858.711	-	3.858.711	Finance lease receivables
Anjak piutang	11.303	-	11.152	-	11.152	Factoring receivables
Piutang derivatif	138.333	-	138.333	-	138.333	Derivative receivables
<b>Total aset keuangan</b>	<b>16.098.219</b>	<b>-</b>	<b>17.307.142</b>	<b>-</b>	<b>17.307.142</b>	<b>Total</b>
<b>LIABILITAS KEUANGAN</b>						
Pinjaman bank	11.188.124	-	11.089.493	-	11.089.493	FINANCIAL LIABILITIES Bank loans
Surat berharga yang diterbitkan	2.844.716	-	2.840.557	-	2.840.557	Securities issued
Utang derivatif	89.788	-	89.788	-	89.788	Derivative payables
<b>Total liabilitas keuangan</b>	<b>14.122.628</b>	<b>-</b>	<b>14.019.838</b>	<b>-</b>	<b>14.019.838</b>	<b>Total</b>

31 Desember/December 2017

	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Total	
<b>ASET KEUANGAN</b>						
Piutang pembiayaan konsumen	11.181.306	-	11.935.962	-	11.935.962	FINANCIAL ASSETS Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	2.356.890	-	2.571.662	-	2.571.662	Finance lease receivables
Piutang derivatif	23.202	-	23.202	-	23.202	Derivative receivables
<b>Total</b>	<b>13.561.398</b>	<b>-</b>	<b>14.530.826</b>	<b>-</b>	<b>14.530.826</b>	<b>Total</b>
<b>LIABILITAS KEUANGAN</b>						
Pinjaman bank	8.210.430	-	8.209.363	-	8.209.363	FINANCIAL LIABILITIES Bank loans
Surat berharga yang diterbitkan	3.665.251	-	3.635.760	-	3.635.760	Securities issued
Utang derivatif	19.540	-	19.540	-	19.540	Derivative payables
<b>Total</b>	<b>11.895.221</b>	<b>-</b>	<b>11.864.663</b>	<b>-</b>	<b>11.864.663</b>	<b>Total</b>



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**28. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)**

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut:

Nilai wajar kas dan setara kas, piutang lain-lain, aset lain-lain, utang usaha, beban bunga yang masih harus dibayar dan utang lain-lain mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Nilai wajar piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, anjak piutang, piutang derivatif, utang derivatif, pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

**29. PERJANJIAN KERJASAMA**

**Pembiayaan bersama**

Perseroan mempunyai perjanjian kerjasama pembiayaan Bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perseroan bertindak sebagai agen untuk kegiatan seleksi konsumen, penagihan dan pengurusan dokumen administrasi.

Dalam perjanjian kerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk konsumen dari masing-masing pihak adalah minimal 5,00% dari Perseroan dan maksimal 95,00% dari pemberi pembiayaan bersama. Sejak tanggal 20 Desember 2013, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk konsumen dari masing-masing pihak adalah minimal 1,00% dari Perseroan dan maksimal 99,00% dari pemberi pembiayaan bersama.

Pada tanggal 6 Februari 2009, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan total fasilitas pembiayaan bersama sebesar Rp2.000.000, dimana Perseroan menanggung risiko (*risk*) kredit dan menerima imbalan (*rewards*) sesuai dengan porsi pembiayaannya.

Pada tanggal 29 Agustus 2013, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengambilalihan Piutang Pembiayaan dengan total fasilitas pembiayaan sebesar Rp1.100.000, dimana Perseroan menanggung risiko (*risk*) kredit dan menerima imbalan (*rewards*) sesuai dengan porsi pembiayaannya.

**28. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)**

The following methods and assumptions are used to estimate the fair values:

The fair value of cash and cash equivalents, other receivables, other assets, trade payables, accrued interest expenses and other payables approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these instruments.

The fair value of consumer financing receivables, finance lease receivables, factoring receivables, derivative receivables, derivative payables, bank loans and securities issued are determined by discounting cash flows using market interest rate as of 31 December 2018 and 2017.

**29. COOPERATION AGREEMENTS**

**Joint financing**

The Company entered into a joint financing agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The Company acts as an agent to underwrite, collect and administer consumer financing.

Based on the agreements with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, the amount of funds to be financed by each party is a minimum of 5.00% from the Company and a maximum of 95.00% from joint financing providers. Since 20 December 2013, the amount of funds to be financed by each party is a minimum of 1.00% from the Company and a maximum of 99.00% from joint financing providers.

On 6 February 2009, the Company and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk signed a Joint Financing Agreement with the total joint financing facility amounting to Rp2,000,000, whereby the Company bears the credit risk and receives rewards in accordance with its financing portion.

On 29 August 2013, the Company and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk signed a Customer Asset Purchase Agreement with the total facility amounting to Rp1,100,000, whereby the Company bears the credit risk and receives rewards in accordance with its financing portion.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**29. PERJANJIAN KERJASAMA (lanjutan)**

**Pembiayaan bersama (lanjutan)**

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir melalui amandemen Perjanjian Kerjasama Kendaraan Bermotor antara PT Mandiri Tunas Finance dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tertanggal 4 Desember 2014, yang menaikkan fasilitas pembiayaan bersama menjadi sebesar Rp20.500.000 dengan porsi fasilitas pembiayaan bersama sebesar minimal 1,00% dari Perseroan dan maksimal 99,00% dari pemberi pembiayaan bersama.

Perjanjian Kerjasama Kendaraan Bermotor antara PT Mandiri Tunas Finance dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk diamandemen pada tanggal 15 Maret 2017, yang menaikkan fasilitas pembiayaan bersama dan fasilitas pengambilalihan piutang pembiayaan menjadi sebesar Rp23.500.000 dengan porsi fasilitas pembiayaan bersama sebesar minimal 1,00% dari Perseroan dan maksimal 99,00% dari pemberi pembiayaan bersama. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Februari 2018.

Perjanjian Kerjasama Kendaraan Bermotor antara PT Mandiri Tunas Finance dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk diamandemen pada tanggal 17 April 2018, yang menaikkan fasilitas pembiayaan bersama dan fasilitas pengambilalihan piutang pembiayaan menjadi sebesar Rp24.000.000 dengan porsi fasilitas pembiayaan bersama sebesar minimal 1,00% dari Perseroan dan maksimal 99,00% dari pemberi pembiayaan bersama. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Februari 2019.

Perjanjian Kerjasama Kendaraan Bermotor antara PT Mandiri Tunas Finance dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk diamandemen pada tanggal 31 Oktober 2018, yang menaikkan fasilitas pembiayaan bersama dan fasilitas pengambilalihan piutang pembiayaan menjadi sebesar Rp28.000.000 dengan porsi fasilitas pembiayaan bersama sebesar minimal 1,00% dari Perseroan dan maksimal 99,00% dari pemberi pembiayaan bersama. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 23 Februari 2019.

Pada tanggal 31 Mei 2018 dan 26 Juni 2018, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengambilalihan Piutang Sewa Pembiayaan No. RB6.SB6/PKS.01/2018 dan No. RB6.SB6/PKS.02/2018 dengan total fasilitas pembiayaan bersama akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan keputusan pemegang kewenangan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dimana Perseroan menanggung risiko (*risk*) kredit dan menerima imbalan (*rewards*) sesuai dengan porsi pembiayaannya.

**29. COOPERATION AGREEMENTS (continued)**

**Joint financing (continued)**

The agreement was amended several times. The latest of which is the amendment of the Joint Financing agreement between PT Mandiri Tunas Finance and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dated 4 December 2014, which increased the total joint financing facility to Rp20,500,000 with the portion of joint financing facility minimum of 1.00% from the Company and a maximum of 99.00% from joint financing providers.

The Joint Financing agreement between PT Mandiri Tunas Finance and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk was amended on 15 March 2017, which increased the total joint financing and Customer Asset Purchase Agreement facility to Rp23,500,000 with the portion of joint financing facility minimum of 1.00% from the Company and a maximum of 99.00% from joint financing providers. The agreement was extended up to 28 February 2018.

The Joint Financing agreement between PT Mandiri Tunas Finance and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk was amended on 17 April 2018, which increased the total joint financing and Customer Asset Purchase Agreement facility to Rp24,000,000 with the portion of joint financing facility minimum of 1.00% from the Company and a maximum of 99.00% from joint financing providers. The agreement was extended up to 23 February 2019.

The Joint Financing agreement between PT Mandiri Tunas Finance and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk was amended on 31 October 2018, which increased the total joint financing and Customer Asset Purchase Agreement facility to Rp28,000,000 with the portion of joint financing facility minimum of 1.00% from the Company and a maximum of 99.00% from joint financing providers. The agreement is valid up to 23 February 2019.

On May 31, 2018 and June 26, 2018, the Company and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk entered into a Cooperation Agreement for Acquisition of Finance Lease Receivables No. RB6.SB6/PKS.01/2018 and No. RB6.SB6/PKS.02/2018, with the total joint financing facility to be determined from time to time based on the decision of the authority holder at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk whereby the Company bears the credit risk and receives rewards in accordance with its financing portion.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**29. PERJANJIAN KERJASAMA (lanjutan)**

**Pembiayaan bersama (lanjutan)**

Jumlah pembiayaan bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dikelola oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

	<b>31 Desember/ December 2018</b>
Piutang pembiayaan konsumen	26.077.092
Piutang sewa pembiayaan	1.139.971
Rata - rata jangka pembiayaan (tahun)	3-4

**Asuransi**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Adira, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI), PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Artarindo, PT MNC Asuransi Indonesia, PT Bess Central Insurance, PT Asuransi Kresna Mitra Tbk, PT Pan Pacific Insurance, PT Jasindo Life, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPM), PT Chubb General Insurance Indonesia, PT Asuransi Ramayana, Perum Jamkrindo, PT Sampo Insurance Indonesia, Asuransi Mega Pratama, PT Asuransi Ciputra Indonesia, dan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.

**Sewa gedung**

Pada tanggal 31 Agustus 2009, Perseroan menandatangani perjanjian sewa ruangan kantor dengan PT Bumi Daya Plaza yang tidak dapat dibatalkan untuk periode lima tahun. Perjanjian tersebut akan berakhir pada tahun 2014 dengan ketentuan pembayaran di muka sebesar Rp507 untuk setiap jangka waktu 3 bulan dan akan ditinjau kembali setiap satu tahun sekali dengan kenaikan tarif maksimal sebesar 5,00% per tahun.

Pada tanggal 21 Agustus 2014, Perseroan menandatangani pembaruan perjanjian sewa ruangan kantor dengan PT Bumi Daya Plaza yang tidak dapat dibatalkan untuk periode lima tahun. Perjanjian tersebut akan berakhir pada tahun 2019 dengan ketentuan pembayaran di muka sebesar Rp882 untuk setiap jangka waktu 3 bulan pada tahun pertama, Rp988 untuk setiap jangka waktu 3 bulan pada tahun kedua, Rp1.106 untuk setiap jangka waktu 3 bulan pada tahun ketiga, Rp1.239 untuk setiap jangka waktu 3 bulan pada tahun keempat, dan Rp1.388 untuk setiap jangka waktu 3 bulan pada tahun kelima.

**29. COOPERATION AGREEMENTS (continued)**

**Joint financing (continued)**

Total joint financing amount with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk managed by the Company as of 31 December 2018 and 2017, are as follows:

	<b>31 Desember/ December 2017</b>	
	23.032.176	Consumer financing receivables
	-	Finance lease receivables
Rata - rata jangka pembiayaan (tahun)	3	Average of financing period (years)

**Insurance**

In the course of business, the Company entered into insurance agreements with PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Adira, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI), PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Artarindo, PT MNC Asuransi Indonesia, PT Bess Central Insurance, PT Asuransi Kresna Mitra Tbk, PT Pan Pacific Insurance, PT Jasindo Life, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPM), PT Chubb General Insurance Indonesia, PT Asuransi Ramayana, Perum Jamkrindo, PT Sampo Insurance Indonesia, Asuransi Mega Pratama, PT Asuransi Ciputra Indonesia and PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.

**Building rental**

On 31 August 2009, the Company signed an office space rental agreement with PT Bumi Daya Plaza which is non-cancellable for the period of five years and will expire in 2014. The Company is required to pay in advance of Rp507 for each quarter. The tariff will be reviewed on annual basis with a maximum tariff increase of 5.00% per annum.

On 21 August 2014, the Company signed a renewal of the office space rental agreement with PT Bumi Daya Plaza which is non-cancellable for the period of five years and will expire in 2019, in which the Company is required to pay in advance an amount of Rp882 for each quarter in the first year, Rp988 for each quarter in the second year, Rp1,106 for each quarter in the third year, Rp1,239 for each quarter in the fourth year, and Rp1,388 for each quarter in the fifth year.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**29. PERJANJIAN KERJASAMA (lanjutan)**

**Sewa gedung (lanjutan)**

Selama periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan mencatat beban sewa masing-masing sebesar Rp5.155 dan Rp4.692 dari sewa ruangan kantor ini.

Pada 31 Desember 2018 dan 2017, pembayaran sewa minimum masa depan dalam perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember/ December 2018</b>	<b>31 Desember/ December 2017</b>
Sampai dengan satu tahun	2.776	5.255
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	-	2.776
<b>Total</b>	<b>2.776</b>	<b>8.031</b>

**29. COOPERATION AGREEMENTS (continued)**

**Building rental (continued)**

During years ended 31 December 2018 and 2017, the Company recorded rental expense of Rp5,155 and Rp4,692, respectively from this office space rental.

As of 31 December 2018 and 2017, the future minimum rental payments under this non-cancellable operating lease agreement, are as follows:

	<b>31 Desember/ December 2018</b>	<b>31 Desember/ December 2017</b>
Within one year	2.776	5.255
After one year but not more than five years	-	2.776
<b>Total</b>	<b>2.776</b>	<b>8.031</b>

**30. SEGMENT OPERASI**

Segmen operasi Perseroan dibagi berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk yang disebut, *Fleet* dan *Retail*. Dalam menentukan hasil segmen, beberapa aset dan liabilitas serta pendapatan dan biaya yang terkait diatribusikan ke masing-masing segmen berdasarkan kebijakan pelaporan internal manajemen.

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Perseroan:

- *Fleet*  
Termasuk dalam pelaporan segmen *fleet* adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan untuk nasabah korporasi.
- *Retail*  
Termasuk dalam pelaporan segmen *retail* adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan konsumen untuk nasabah individu di Regional I dan II (Sumatera), Regional III dan IV (Jabodetabek), Regional V (Jawa Barat), Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta), Regional VII (Jawa Timur), Regional VIII (Kalimantan) dan Regional IX (Sulawesi).
- Lain-lain  
Termasuk dalam pelaporan segmen lain-lain adalah informasi pelaporan segmen operasi terkait dengan aktivitas treasury dan kantor pusat seperti pendapatan bunga bank dan beban umum dan administrasi yang tidak dapat dialokasikan.

**30. OPERATING SEGMENT**

The Company's operating segments represent the Company's key customer and product groups namely, *Fleet* and *Retail*. In determining the segment results, certain assets and liabilities items and related revenues and expenses are attributed to each segment based on internal management reporting policies.

The following summary describes the operations in each of the Company's reportable segments:

- *Fleet*  
Included in the fleet segment reporting are operating segments assessment indicators that can be actually be attributed as part of financing to corporate customers.
- *Retail*  
Included in the retail segment reporting are operating segments assessment indicators that can be actually be attributed as part of consumer financing to individual customers at Region I and II (Sumatera), Region III and IV (Jabodetabek), Region V (Jawa Barat), Region VI (Jawa Tengah, Yogyakarta), Region VII (Jawa Timur), Region VIII (Kalimantan), and Region IX (Sulawesi).
- *Others*  
Included in the other segment reporting is reporting segment information associated with treasury and head office activities such as bank interest income and general and administrative expenses that can not be allocated.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**30. SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

Informasi mengenai hasil dari masing-masing bisnis segmen disajikan di bawah ini. Kinerja diukur berdasarkan laba segmen sebelum pajak penghasilan, sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang ditelaah oleh manajemen Perseroan. Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

**30. OPERATING SEGMENT (continued)**

Information regarding the results of each reportable segment is included below. Performance is measured based on segment profit before income tax, as included in the internal management reports that are reviewed by the Company's management. Segment profit is used to measure performance of that business segment as management believes that such information is the most relevant in evaluating the results of those segments relative to other entities that operate within these industries.

31 Desember/December 2018

Informasi segmen usaha	Retail		Fleet		Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	Information by business segments
	Mobil/ Car	Motor/ Motorcycle	Mobil/ Car	Motor/ Motorcycle			
<b>Pendapatan</b>							<b>Revenue</b>
Pembiayaan konsumen	1.725.709	49.933	159.874	1.203	-	1.936.719	Consumer financing
Sewa pembiayaan	10.501	170	375.631	-	-	386.302	Financial lease
Anjak piutang	-	-	96	-	-	96	Factoring
Bunga	9.429	261	2.422	4	-	12.116	Interest
Lain-lain - neto	731.659	23.423	29.822	55	-	784.959	Others - net
<b>Total pendapatan</b>	<b>2.477.298</b>	<b>73.787</b>	<b>567.845</b>	<b>1.262</b>	<b>-</b>	<b>3.120.192</b>	<b>Total revenue</b>
<b>Beban</b>							<b>Expenses</b>
Beban keuangan	(893.121)	(25.564)	(340.747)	(578)	-	(1.260.010)	Financial charges
Beban gaji dan tunjangan	(480.205)	(24.400)	(34.375)	-	-	(518.980)	Salaries and benefits
Beban umum dan administrasi	(363.654)	(14.206)	(20.695)	-	-	(398.555)	General and administration
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(375.199)	(7.929)	(19.664)	(12)	-	(402.804)	Provision for impairment losses
<b>Total beban</b>	<b>(2.092.179)</b>	<b>(72.099)</b>	<b>(415.481)</b>	<b>(590)</b>	<b>-</b>	<b>(2.580.349)</b>	<b>Total expenses</b>
<b>Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan</b>	<b>385.119</b>	<b>1.688</b>	<b>152.364</b>	<b>672</b>	<b>-</b>	<b>539.843</b>	<b>Income before final tax and income tax expense</b>
<b>Total aset</b>	<b>11.270.507</b>	<b>199.851</b>	<b>4.724.849</b>	<b>9.920</b>	<b>1.276.717</b>	<b>17.481.844</b>	<b>Total assets</b>
<b>Total liabilitas</b>	<b>796.432</b>	<b>17.131</b>	<b>125.682</b>	<b>310</b>	<b>14.421.374</b>	<b>15.360.929</b>	<b>Total liabilities</b>

31 Desember/December 2017

Informasi segmen usaha	Retail		Fleet		Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	Information by business segments
	Mobil/ Car	Motor/ Motorcycle	Mobil/ Car	Motor/ Motorcycle			
<b>Pendapatan</b>							<b>Revenue</b>
Pembiayaan konsumen	1.640.512	50.531	138.328	1.053	-	1.830.424	Consumer financing
Sewa pembiayaan	8.171	-	170.812	-	-	178.983	Finance lease
Bunga	7.732	194	1.107	3	-	9.036	Interest
Lain-lain - neto	670.977	24.128	24.704	112	-	719.921	Others - net
<b>Total pendapatan</b>	<b>2.327.392</b>	<b>74.853</b>	<b>334.951</b>	<b>1.168</b>	<b>-</b>	<b>2.738.364</b>	<b>Total revenue</b>
<b>Beban</b>							<b>Expenses</b>
Beban keuangan	(795.078)	(23.493)	(216.687)	(184)	-	(1.035.442)	Finance charges
Beban gaji dan tunjangan	(387.069)	(25.981)	(24.762)	-	-	(437.812)	Salaries and benefits
Beban umum dan administrasi	(326.947)	(13.589)	(13.527)	-	-	(354.063)	General and administration
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(423.328)	(6.824)	(12.470)	(47)	-	(442.669)	Provision for impairment losses
<b>Total beban</b>	<b>(1.932.422)</b>	<b>(69.887)</b>	<b>(267.446)</b>	<b>(231)</b>	<b>-</b>	<b>(2.269.986)</b>	<b>Total expenses</b>
<b>Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan</b>	<b>394.970</b>	<b>4.966</b>	<b>67.505</b>	<b>937</b>	<b>-</b>	<b>468.378</b>	<b>Income before final tax and income tax expense</b>
<b>Total aset</b>	<b>10.185.814</b>	<b>200.944</b>	<b>3.277.540</b>	<b>8.269</b>	<b>1.066.891</b>	<b>14.739.458</b>	<b>Total assets</b>
<b>Total liabilitas</b>	<b>753.452</b>	<b>13.750</b>	<b>69.030</b>	<b>210</b>	<b>12.134.674</b>	<b>12.971.116</b>	<b>Total liabilities</b>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**30. SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

**30. OPERATING SEGMENT (continued)**

Informasi wilayah geografis adalah sebagai berikut:

Geographical information is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2018	2017	
<b>Pendapatan</b>			<b>Revenue</b>
Regional I (Sumatera)	168.809	156.732	Region I (Sumatera)
Regional II (Sumatera)	343.578	317.029	Region II (Sumatera)
Regional III (Jabodetabek)	372.747	358.636	Region III (Jabodetabek)
Regional IV (Jabodetabek)	355.703	371.169	Region IV (Jabodetabek)
Regional V (Jawa Barat)	219.365	219.492	Region V (Jawa Barat)
Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)	239.611	222.022	Region VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)
Regional VII (Jawa Timur)	288.924	292.476	Region VII (Jawa Timur)
Regional VIII (Kalimantan)	265.531	211.322	Region VIII (Kalimantan)
Regional IX (Sulawesi)	296.817	253.367	Region IX (Sulawesi)
Fleet	569.107	336.119	Fleet
<b>Total pendapatan</b>	<b>3.120.192</b>	<b>2.738.364</b>	<b>Total revenue</b>
<b>Beban</b>			<b>Expenses</b>
Regional I (Sumatera)	(135.079)	(127.138)	Region I (Sumatera)
Regional II (Sumatera)	(310.581)	(271.127)	Region II (Sumatera)
Regional III (Jabodetabek)	(324.550)	(331.532)	Region III (Jabodetabek)
Regional IV (Jabodetabek)	(303.103)	(320.127)	Region IV (Jabodetabek)
Regional V (Jawa Barat)	(191.758)	(170.208)	Region V (Jawa Barat)
Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)	(233.183)	(202.011)	Region VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)
Regional VII (Jawa Timur)	(235.033)	(220.569)	Region VII (Jawa Timur)
Regional VIII (Kalimantan)	(188.262)	(169.239)	Region VIII (Kalimantan)
Regional IX (Sulawesi)	(242.729)	(190.358)	Region IX (Sulawesi)
Fleet	(416.071)	(267.677)	Fleet
<b>Total beban</b>	<b>(2.580.349)</b>	<b>(2.269.986)</b>	<b>Total expenses</b>
<b>Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan</b>	<b>539.843</b>	<b>468.378</b>	<b>Income before final tax and income tax expense</b>
<b>Aset</b>			<b>Assets</b>
Regional I (Sumatera)	731.732	715.218	Region I (Sumatera)
Regional II (Sumatera)	1.596.698	1.279.157	Region II (Sumatera)
Regional III (Jabodetabek)	1.644.161	1.548.810	Region III (Jabodetabek)
Regional IV (Jabodetabek)	1.429.179	1.626.548	Region IV (Jabodetabek)
Regional V (Jawa Barat)	892.935	1.008.700	Region V (Jawa Barat)
Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)	1.311.402	1.044.953	Region VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)
Regional VII (Jawa Timur)	1.206.088	1.093.190	Region VII (Jawa Timur)
Regional VIII (Kalimantan)	1.126.001	847.869	Region VIII (Kalimantan)
Regional IX (Sulawesi)	1.532.162	1.222.313	Region IX (Sulawesi)
Fleet	4.734.769	3.285.809	Fleet
Lain-lain	1.276.717	1.066.891	Others
<b>Total aset</b>	<b>17.481.844</b>	<b>14.739.458</b>	<b>Total assets</b>



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**30. SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

Informasi wilayah geografis adalah sebagai berikut:  
(lanjutan)

**30. OPERATING SEGMENT (continued)**

Geographical information is as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December		
	2018	2017	
<b>Liabilitas</b>			<b>Liabilities</b>
Regional I (Sumatera)	70.348	83.088	Region I (Sumatera)
Regional II (Sumatera)	87.699	67.406	Region II (Sumatera)
Regional III (Jabodetabek)	106.768	133.107	Region III (Jabodetabek)
Regional IV (Jabodetabek)	102.051	92.960	Region IV (Jabodetabek)
Regional V (Jawa Barat)	76.262	101.676	Region V (Jawa Barat)
Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)	100.279	65.569	Region VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)
Regional VII (Jawa Timur)	110.670	105.006	Region VII (Jawa Timur)
Regional VIII (Kalimantan)	76.959	32.793	Region VIII (Kalimantan)
Regional IX (Sulawesi)	82.527	85.597	Region IX (Sulawesi)
Fleet	125.992	69.240	Fleet
Lain-lain	14.421.374	12.134.674	Others
<b>Total liabilitas</b>	<b>15.360.929</b>	<b>12.971.116</b>	<b>Total liabilities</b>

**31. LIABILITAS KONTINJENSI**

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 Perseroan tidak mempunyai liabilitas kontinjensi yang signifikan.

**31. CONTINGENT LIABILITIES**

The Company does not have any significant contingent liabilities as of 31 December 2018 and 2017.

**32. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS**

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

**32. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION**

The reconciliation of liabilities that arised from financing activities are as follows:

	1 Januari/ 1 January 2018	Arus Kas/ Cash Flows	Perubahan nonkas - pergerakan valuta asing/ Non-cash activities - movement of foreign currency		31 Desember/ 31 December 2018	
Pinjaman bank	8.244.582	2.950.457	27.696		11.222.735	Bank loan
Surat berharga yang diterbitkan	3.675.000	(825.000)	-		2.850.000	Securities issued
<b>Total liabilitas dari aktivitas pendanaan</b>	<b>11.919.582</b>	<b>2.125.457</b>	<b>27.696</b>		<b>14.072.735</b>	<b>Total liabilities from financing activities</b>
	1 Januari/ 1 January 2017	Arus Kas/ Cash Flows	Perubahan nonkas - pergerakan valuta asing/ Non-cash activities - movement of foreign currency		31 Desember/ 31 December 2017	
Pinjaman bank	5.621.492	2.610.471	12.619		8.244.582	Bank loan
Surat berharga yang diterbitkan	3.325.000	350.000	-		3.675.000	Securities issued
<b>Total liabilitas dari aktivitas pendanaan</b>	<b>8.946.492</b>	<b>2.960.471</b>	<b>12.619</b>		<b>11.919.582</b>	<b>Total liabilities from financing activities</b>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**33. PERISTIWA SETELAH AKHIR PERIODE  
PELAPORAN**

**33. EVENTS AFTER THE END OF REPORTING  
PERIOD**

**A. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN**

**A. SECURITIES ISSUED**

**Obligasi Berkelanjutan IV**

**Continuing Bonds IV**

Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance  
Tahap I Tahun 2019

Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV  
Phase I Year 2019

Pada tanggal 8 Januari 2019, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019 ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I") dengan nilai nominal Rp1.000.000 yang terdiri atas dua seri sebagai berikut:

On 8 January 2019, the Company issued Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV Phase I Year 2019 ("Continuing Bonds IV Phase I") with a nominal value of Rp1,000,000 which consists of two series as follows:

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap per tahun/ Fixed interest rate per annum	Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal installment
Seri/Series A	800.000	9,40%	8 Januari/ January 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/Series B	200.000	9,75%	8 Januari/ January 2024	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dari pokok obligasi terutang. Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I.

These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds IV Phase I. If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as trustee for Continuing Bonds IV Phase I.

**B. PERJANJIAN KERJASAMA**

**B. COOPERATION AGREEMENT**

Pada tanggal 11 Januari 2019, Perseroan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT Bank Mandiri Taspen untuk program *referral* pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor atau multiguna. Perseroan bertindak sebagai penyedia dana sekaligus pemutus permohonan pembiayaan, sedangkan PT Bank Mandiri Taspen bertindak sebagai agen pemasaran. Perjanjian ini berlaku sampai tanggal 10 Januari 2020 dan dapat diperpanjang.

On 11 January 2019, the Company entered into a referral cooperation agreement with PT Bank Mandiri Taspen for motor vehicle financing or multipurpose financing. The Company acts as a provider of funds and breaker for financing application, while PT Bank Mandiri Taspen acts as a marketing agent. This agreement is valid until 10 January 2020 and may be extended.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun**  
**yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of 31 December 2018 and**  
**for the Year Then Ended**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

**34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN**  
**NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF**

Berikut ini adalah beberapa Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perseroan namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun 2018:

- ISAK No. 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka, berlaku efektif setelah 1 Januari 2019.

ISAK ini mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.

- ISAK No. 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan, berlaku efektif setelah 1 Januari 2019.

ISAK ini mengklarifikasi dan memberikan panduan dalam merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.

- Amandemen PSAK 24 (2018) – Imbalan Kerja tentang Amendemen, kurtailmen, atau Penyelesaian Program, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amendemen ini memberikan panduan yang lebih jelas bagi entitas dalam mengakui biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian penyelesaian, biaya jasa kini dan bunga neto setelah adanya amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program karena menggunakan asumsi aktuarial terbaru (sebelumnya menggunakan asumsi aktuarial pada awal periode pelaporan tahunan). Selain itu, Amendemen PSAK 24 juga mengklarifikasi bagaimana persyaratan akuntansi untuk amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program dapat mempengaruhi persyaratan batas atas aset yang terlihat dari pengurangan surplus yang menyebabkan dampak batas atas aset berubah.

**34. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT**  
**YET EFFECTIVE**

The following are several Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) that are considered relevant to the financial reporting of the Company but are not yet effective for 2018 financial statements:

- IFAS No. 33: Foreign Currency Transactions and Advance Consideration, effective after 1 January 2019.

This IFAS clarifies the use of transaction date to determine the exchange rate used in the initial recognition of assets, expenses or corresponding revenues when the entity has accepted or paid advance considerations in foreign currencies.

- IFAS No. 34, "Uncertainty of Income Tax Treatment, effective after 1 January 2019.

This IFAS clarifies and provides guidance to reflect the uncertainty of income tax treatments in the financial statements.

- Amendments to PSAK 24 (2018) – Employee Benefits on the Plan Amendment, Curtailment or Settlement, effective 1 January 2019 with early application is permitted.

This amendment provides clearer guidance for entities in recognizing past service costs, settlement gains and losses, current service costs and net interest after plan amendment, curtailment or settlement because they use the new actuarial assumptions (previously using actuary assumptions at the beginning of the period of annual report). In addition, Amendment to PSAK 24 also clarifies how the accounting requirements for plan amendment, curtailment or settlement can affect the upper limit of asset requirements which can be seen from the reduction in surplus which causes the impact of the asset's upper limit to change.



**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN  
NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)**

Berikut ini adalah beberapa Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perseroan namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun 2018: (lanjutan)

- Penyesuaian 2018 PSAK 46 - Pajak Penghasilan, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.  
  
Penyesuaian ini menegaskan mengenai konsekuensi pajak penghasilan atas dividen (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan) timbul ketika entitas mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan tersebut lebih terkait secara langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan daripada dengan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan tersebut dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal entitas atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.
- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.  
  
PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.  
  
PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara *International Accounting Standards Board* dan *Financial Accounting Standards Board*, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

*The original financial statements included herein are in the Indonesian language.*

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**34. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT  
YET EFFECTIVE (continued)**

*The following are several Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) that are considered relevant to the financial reporting of the Company but are not yet effective for 2018 financial statements: (continued)*

- *2018 Improvement to PSAK 46 - Income Taxes, effective 1 January 2019 with early application is permitted.*  
  
*This improvement affirms the consequences of income tax on dividends (as defined in PSAK 71: Financial Instruments) arises when an entity recognizes liabilities to pay dividends. The consequences of the income tax are more directly related to past transactions or events that generate profits that can be distributed rather than distribution to the owner. Therefore, the entity recognizes the consequences of the income tax in profit or loss, other comprehensive income or equity in accordance with the entity's initial recognition of the past transaction or event.*
- *PSAK 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9, effective 1 January 2020 with earlier application is permitted.*  
  
*This PSAK provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introduce a more general requirements based on management's judgment.*
- *PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15, effective 1 January 2020 with earlier application is permitted.*  
  
*This PSAK is a single standard that a joint project between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting Standards Board (FASB), provides revenue recognition from contracts with customers, and the entity is expected to have analyzing before recognizing the revenue.*

*The original financial statements included herein are in the Indonesian language.*

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2018 dan Untuk Tahun  
yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2018 and  
for the Year Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN  
NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)**

Berikut ini adalah beberapa Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perseroan namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun 2018: (lanjutan)

- PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (*underlying assets*) bernilai-rendah.

Perseroan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan Perseroan.

**35. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN**

Manajemen Perseroan bertanggung jawab penuh atas penyusunan laporan keuangan ini yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2019.

**34. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT  
YET EFFECTIVE (continued)**

*The following are several Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) that are considered relevant to the financial reporting of the Company but are not yet effective for 2018 financial statements: (continued)*

- PSAK 73: Leases, adopted from IFRS 16, effective 1 January 2020 with earlier application is permitted, but not before an entity applies PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers.

*This PSAK establishes the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease; there are 2 optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.*

*The Company is presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on its financial statements.*

**35. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

*The management of the Company is responsible for the preparation of these financial statements that were completed and authorized to be issued on 25 January 2019.*

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN







**mandiri**  
tunas finance

# ADAPT TO CHANGE

LAPORAN TAHUNAN 2018 PT MANDIRI TUNAS FINANCE

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**

Graha Mandiri Lt. 3A

Jl. Imam Bonjol No. 61

Jakarta 10310

Tel : +62 21 2305608

Fax : +62 21 2305618

[www.mtf.co.id](http://www.mtf.co.id)